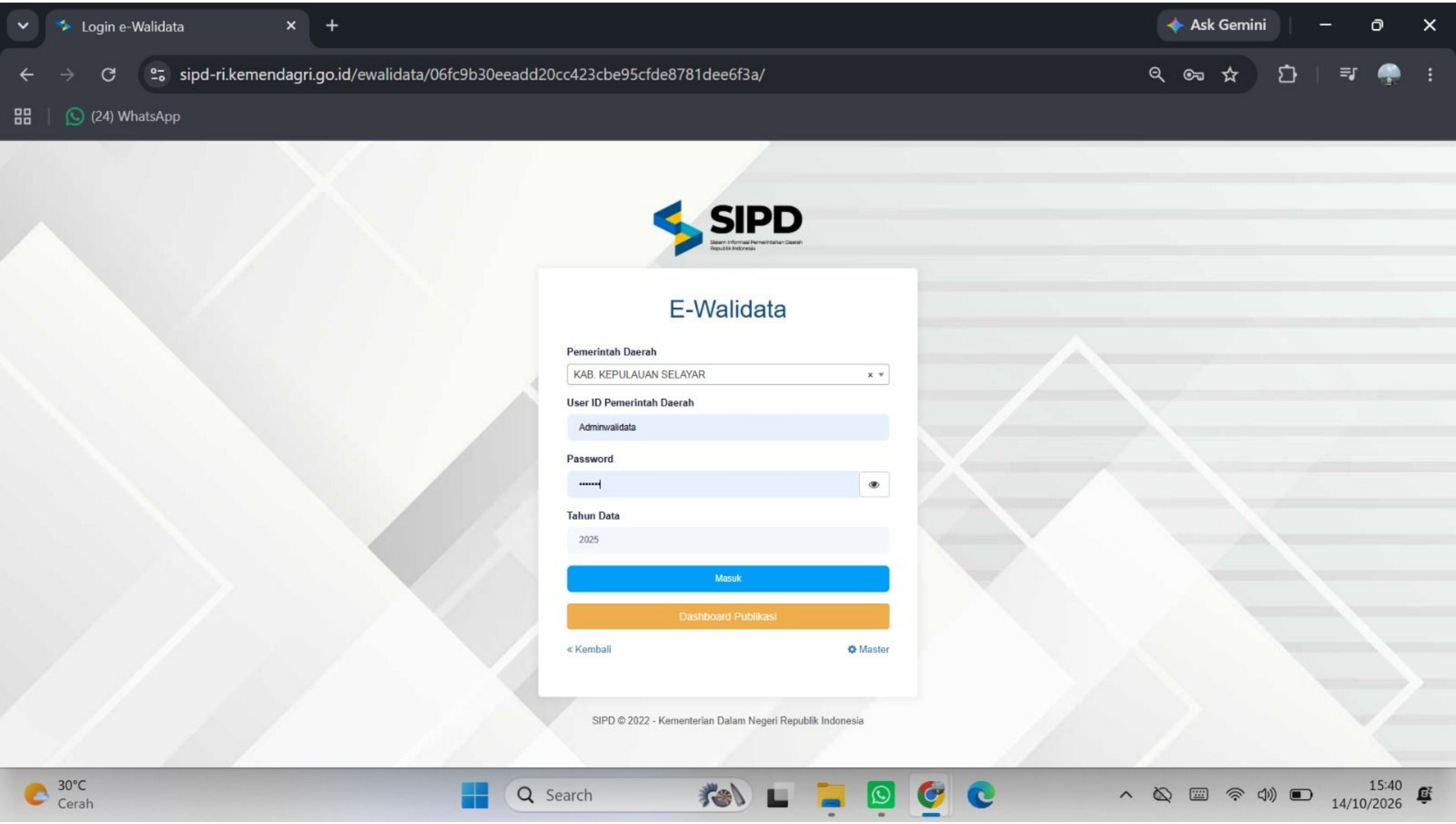
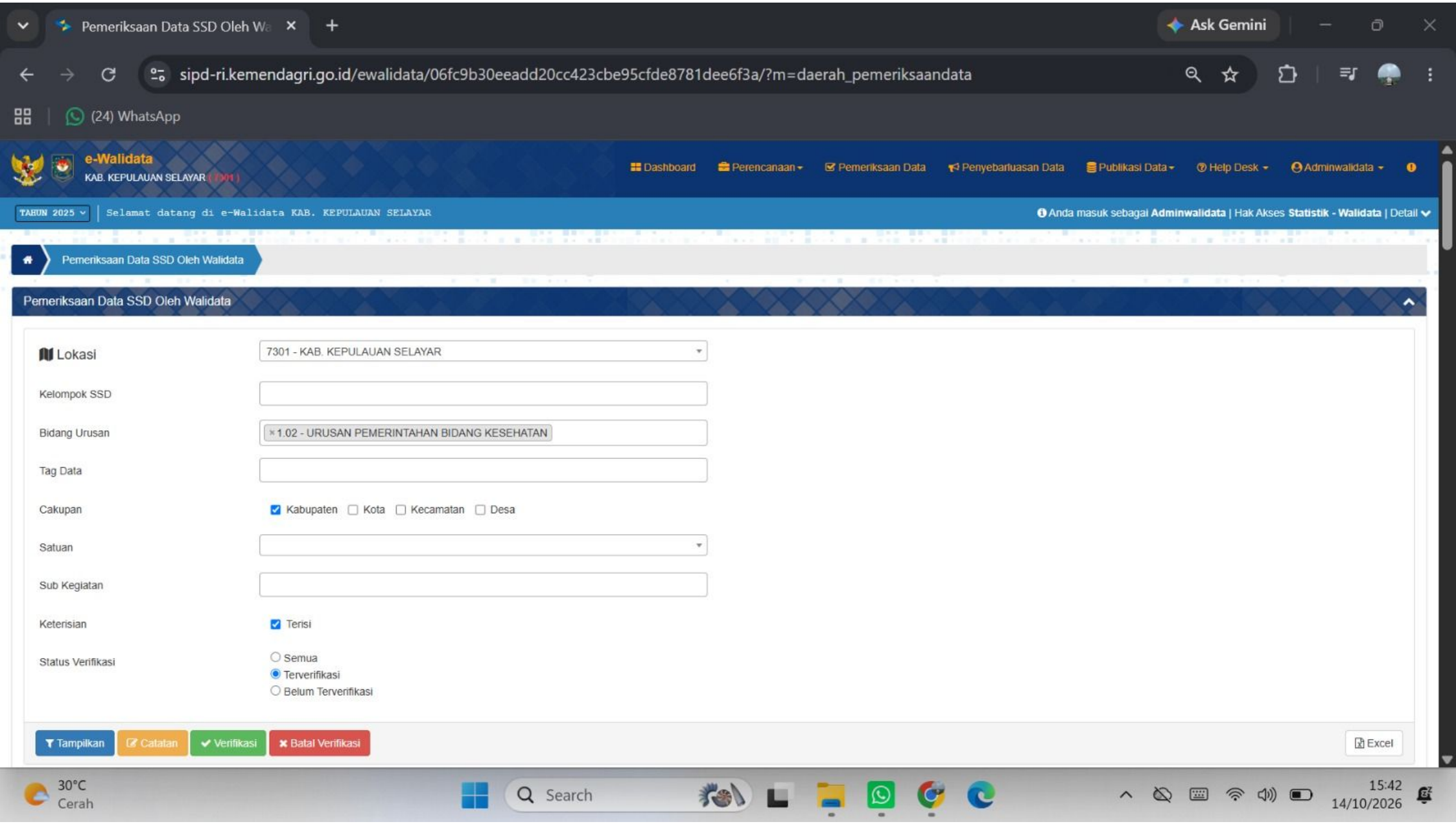

Login e-Walidata
Ask Gemini
sipd-ri.kemendagri.go.id/ewalidata/06fc9b30eeadd20cc423cbe95cfde8781dee6f3a/
(24) WhatsApp
SIPD
E-Walidata
Pemerintah Daerah
KAB. KEPULAUAN SELAYAR
User ID Pemerintah Daerah
Adminwalidata
Password
Tahun Data
2025
Masuk
Dashboard Publikasi
« Kembali
Master
SIPD © 2022 - Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
30°C
Cerah
Search
15:40
14/10/2026


Pemeriksaan Data SSD Oleh Wa
Ask Gemini
sipd-ri.kemendagri.go.id/ewalidata/06fc9b30eeadd20cc423cbe95cfde8781dee6f3a/?m=daerah_pemeriksaandata
(24) WhatsApp
e-Walidata
KAB. KEPULAUAN SELAYAR (7301)
Dashboard
Perencanaan
Pemeriksaan Data
Penyebarluasan Data
Publikasi Data
Help Desk
Adminwalidata
TAHUN 2025
Selamat datang di e-Walidata KAB. KEPULAUAN SELAYAR
Anda masuk sebagai Adminwalidata | Hak Akses Statistik - Walidata | Detail
Pemeriksaan Data SSD Oleh Walidata
Pemeriksaan Data SSD Oleh Walidata
Lokasi
7301 - KAB. KEPULAUAN SELAYAR
Kelompok SSD
Bidang Urusan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Tag Data
Cakupan
Kabupaten
Kota
Kecamatan
Desa
Satuan
Sub Kegiatan
Keterisian
Terisi
Status Verifikasi
Semua
Terverifikasi
Belum Terverifikasi
Tampilkan
Catatan
Verifikasi
Batal Verifikasi
Excel
30°C
Cerah
Search
15:42
14/10/2026

Dashboard | SIPD

Ask Gemini

sipd-ri.kemendagri.go.id/ewalidata/06fc9b30eeadd20cc423cbe95cfde8781dee6f3a/?m=daerah_dashboard

(24) WhatsApp

e-Walidata
KAB. KEPULAUAN SELAYAR (7301)

Dashboard | Perencanaan | Pemeriksaan Data | Penyebarluasan Data | Publikasi Data | Help Desk | Adminwalidata

TAHUN 2025 | Selamat datang di e-Walidata KAB. KEPULAUAN SELAYAR

Anda masuk sebagai **Adminwalidata** | Hak Akses **Statistik - Walidata** | Detail

Dashboard

Dashboard

PERENCANAAN
12 Desember 2025 s/d 8 Januari 2026

PENGUMPULAN DATA
15 Juni 2026 s/d 23 Juni 2026

PEMERIKSAAN DATA
16 Juni 2026 s/d 30 Juni 2026

PENYEBARLUASAN DATA
17 Juni 2026 s/d 30 Mei 2026

Rekap DSSD

Berdasarkan Urusan

750

500

30°C
Cerah

Search

15:41
14/10/2026

Pemeriksaan Data SSD Oleh Wa

Ask Gemini

sipd-ri.kemendagri.go.id/ewalidata/06fc9b30eeadd20cc423cbe95cfde8781dee6f3a/?m=daerah_pemeriksaandata

(24) WhatsApp

Menampilkan 50 data per halaman

Pencarian:

No	Kode SSD	Uraian	Satuan	Data Lampau	Data 2025	Status Verifikasi	Catatan Verifikasi
1	1.02.000001	Alat uji dan kalibrasi pada RMC 1.02 Prov Kab Kot 1.02.02.1.01.0013 1.02.02.2.01.0015	Unit definisi ops	2023 | 0 2024 | 0	0	Walidata Pembinadata	Untuk dilengkapi metadata, standar data, dan kode referensinya
2	1.02.000002	Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting 1.02 Prov Kab Kot 1.02.02.1.03.0003 1.02.02.1.03.0002 1.02.02.2.03.0003 1.02.02.2.03.0002	Unit definisi ops	2023 | 5 2024 | 5	5	Walidata Pembinadata	Untuk dilengkapi metadata, standar data, dan kode referensinya
3	1.02.000004	Alkes, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman yang didistribusikan ke Puskesmas serta Faskes Lainnya 1.02 Kab Kot	Paket definisi ops	2023 | 1 2024 | 1	1	Walidata Pembinadata	Untuk dilengkapi metadata, standar data, dan kode referensinya
4	1.02.000005	Alkes/alat penunjang medik Fasyankes 1.02 Prov Kab Kot 1.02.02.1.01.0010 1.02.02.2.01.0014 1.02.02.2.01.0020	Unit definisi ops	2023 | 0 2024 | 1	1	Walidata Pembinadata	Untuk dilengkapi metadata, standar data, dan kode referensinya
5	1.02.000008	Anak Usia Pendidikan Dasar 1.02 Kab Kot 1.02.02.2.02.0005	Orang definisi ops	2023 | 3753 2024 | 4235	4659	Walidata Pembinadata	Untuk dilengkapi metadata, standar data, dan kode referensinya
6	1.02.000009	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 1.02 Kab Kot 1.02.04.2.01.0001	Sarana definisi ops	2023 | 21 2024 | 23	23	Walidata Pembinadata	Untuk dilengkapi metadata, standar data, dan kode referensinya
7	1.02.000010	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memenuhi Komitmen Izin 1.02 Kab Kot	Sarana definisi ops	2023 | 3 2024 | 3	3	Walidata Pembinadata	Untuk dilengkapi metadata, standar data, dan kode referensinya
8	1.02.000011	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki izin/habis masa izinnya 1.02 Kab Kot 1.02.04.2.01.0001	Sarana definisi ops	2023 | 3 2024 | 3	3	Walidata Pembinadata	Untuk dilengkapi metadata, standar data, dan kode referensinya
9	1.02.000012	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin 1.02 Kab Kot 1.02.04.2.01.0001	Sarana definisi ops	2023 | 18 2024 | 20	20	Walidata Pembinadata	Untuk dilengkapi metadata, standar data, dan kode referensinya

30°C Cerah

Search

15:41 14/10/2026

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025	Disabled	Info Sub Kegiatan
1	4.02.000001	Dokumentasi DPRD	Dokumen		0	T	[4.02.02.2.04.0008] [4.02.02.1.04.0008]
2	4.02.000002	Orang yang mengikuti Sosalisasi Rancangan Peraturan Daerah	Orang		0	T	[4.02.02.1.05.0004] [4.02.02.2.05.0004]
3	4.02.000004	Publikasi DPRD	Dokumen		0	T	[4.02.02.2.04.0008] [4.02.02.1.04.0008]
4	4.02.000005	Rancangan Peraturan Daerah yang disosialisasikan	Dokumen		0	T	[4.02.02.1.05.0004] [4.02.02.2.05.0004]
5	4.02.000006	Situs resmi dan saluran publikasi DPRD	Dokumen		2	T	[4.02.02.2.04.0008] [4.02.02.1.04.0008]
6	4.02.000007	Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen		1	T	[4.02.02.1.01.0001] [4.02.02.2.01.0001]
7	4.02.000008	Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Dokumen		30	T	[4.02.02.1.01.0002]
8	4.02.000009	Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen		0	T	[4.02.02.1.01.0003] [4.02.02.2.01.0003]
9	4.02.000010	Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen		0	T	[4.02.02.1.01.0004] [4.02.02.2.01.0004]
10	4.02.000011	Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen		0	T	[4.02.02.1.01.0005] [4.02.02.2.01.0005]
11	4.02.000012	Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Orang		0	T	[4.02.02.1.01.0006] [4.02.02.2.01.0006]
12	4.02.000013	Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen		10	T	[4.02.02.1.02.0001] [4.02.02.2.02.0001]
13	4.02.000014	Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen		10	T	[4.02.02.1.02.0002] [4.02.02.2.02.0002]
14	4.02.000015	Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen		11	T	[4.02.02.1.02.0003] [4.02.02.2.02.0003]
15	4.02.000016	Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Dokumen		11	T	[4.02.02.1.02.0004]
16	4.02.000017	Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen		2	T	[4.02.02.1.02.0005] [4.02.02.2.02.0005]
17	4.02.000018	Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen		10	T	[4.02.02.1.02.0006] [4.02.02.2.02.0006]
18	4.02.000019	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan		15	T	[4.02.02.1.03.0001] [4.02.02.2.03.0001]
19	4.02.000020	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan		15	T	[4.02.02.1.03.0002] [4.02.02.2.03.0002]
20	4.02.000021	Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan		15	T	[4.02.02.1.03.0003] [4.02.02.2.03.0003]
21	4.02.000022	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan		15	T	[4.02.02.1.03.0004] [4.02.02.2.03.0004]
22	4.02.000023	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan		15	T	[4.02.02.1.03.0005] [4.02.02.2.03.0005]
23	4.02.000024	Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen		5	T	[4.02.02.1.03.0006] [4.02.02.2.03.0006]
24	4.02.000025	Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen		5	T	[4.02.02.1.03.0007] [4.02.02.2.03.0007]
25	4.02.000026	Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen		5	T	[4.02.02.1.03.0008] [4.02.02.2.03.0008]
26	4.02.000027	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen		0	T	[4.02.02.1.04.0001] [4.02.02.2.04.0001]
27	4.02.000028	Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen		25	T	[4.02.02.1.04.0002] [4.02.02.2.04.0002]
28	4.02.000029	Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang		4	T	[4.02.02.1.04.0004] [4.02.02.2.04.0004]
29	4.02.000030	Tenaga Ahli Fraksi	Orang		5	T	[4.02.02.1.04.0005] [4.02.02.2.04.0005]
30	4.02.000031	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen		0	T	[4.02.02.1.04.0006] [4.02.02.2.04.0006]
31	4.02.000032	Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen		1	T	[4.02.02.1.04.0007] [4.02.02.2.04.0007]
32	4.02.000033	Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen		60	T	[4.02.02.1.04.0008] [4.02.02.2.04.0008]
33	4.02.000034	Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan		75	T	[4.02.02.1.05.0001] [4.02.02.2.05.0001]
34	4.02.000035	Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen		0	T	[4.02.02.1.05.0002] [4.02.02.2.05.0002]
35	4.02.000036	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen		75	T	[4.02.02.1.05.0003] [4.02.02.2.05.0003]
36	4.02.000038	Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen		1	T	[4.02.02.1.06.0001] [4.02.02.2.06.0001]
37	4.02.000039	Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan		5	T	[4.02.02.1.06.0002] [4.02.02.2.06.0002]
38	4.02.000040	Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen		0	T	[4.02.02.1.07.0001] [4.02.02.2.07.0001]

39	4.02.000041	Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen		0	T	[4.02.02.1.07.0002] [4.02.02.2.07.0002]
40	4.02.000042	Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen		33	T	[4.02.02.1.08.0001] [4.02.02.2.08.0001]
41	4.02.000043	Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan		0	T	[4.02.02.1.08.0002] [4.02.02.2.08.0002]
42	4.02.000044	Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen		10	T	[4.02.02.1.08.0003] [4.02.02.2.08.0003]
43	4.02.000045	Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen		50	T	[4.02.02.1.08.0004] [4.02.02.2.08.0004]
44	4.02.000046	Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen		3	T	[4.02.02.1.08.0005] [4.02.02.2.08.0005]
45	4.02.000047	Dokumen Hasil Dialog dan Koordinasi DPRP dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Dokumen		0	T	[4.02.03.3.01.0001] [4.02.05.4.01.0006]
46	4.02.000048	Dokumen LKPJ dan Rencana Kerja yang Disusun	Dokumen		5	T	[4.02.03.3.01.0002]
47	4.02.000049	Dokumen Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus	Dokumen		0	T	[4.02.03.3.01.0003] [4.02.05.4.01.0007]
48	4.02.000050	Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua	Dokumen		0	T	[4.02.03.3.01.0004] [4.02.05.4.01.0008]
49	4.02.000055	Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen		30	T	[4.02.02.2.01.0002]
50	4.02.000063	Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen		11	T	[4.02.02.2.02.0004]

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025	Disabled	Info Sub Kegiatan
1	1.05.000001	Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana prioritas kabupaten/kota yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melatih aspek manajerial maupun teknis dalam hal komunikasi, koordinasi, maupun pengerahan sumber daya untuk penanganan darurat bencana berdasarkan skenario yang disusun mendekati kondisi	30	T	[1.05.03.2.02.0010] [1.05.03.2.02.0018]
2	1.05.000006	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Penanggulangan Kebakaran	Orang	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah	0	T	[1.05.04.2.01.0007]
3	1.05.000007	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Pencegahan Kebakaran	Orang	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah	0	T	[1.05.04.2.01.0007]
4	1.05.000008	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Penanggulangan Kebakaran	Orang	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah	0	T	[1.05.04.2.01.0007]
5	1.05.000009	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Pencegahan Kebakaran	Orang	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah	0	T	[1.05.04.2.01.0007]
6	1.05.000013	Data Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	Data kebencanaan adalah Data mengenai Bencana yang sesuai kriteria dan ditetapkan oleh walidata bencana yang disediakan secara bersama ataupun madiri sebagai hasil pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan yang berisi catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi yang merepresentasikan dampak/kejadian bencana yang menjadi urusan	1	T	[1.05.03.2.04.0004]
7	1.05.000014	Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan serta pengembangan sarana komunikasi dan informasi berbasis online dan paperless terkait metoda pelaporan kebakaran dan penyelamatan dalam satu portal dan bisa setiap saat d mutakhirkan dan bersifat real time yang dimiliki oleh desa/kelurahan dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang Informasi dan	0	T	[1.05.04.2.01.0008]
8	1.05.000015	Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Berkelanjutan yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan serta pengembangan sarana komunikasi dan informasi berbasis online dan paperless terkait metoda pelaporan kebakaran dan penyelamatan dalam satu portal dan bisa setiap saat d mutakhirkan dan bersifat real time yang dimiliki oleh desa/kelurahan dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang Informasi dan	0	T	[1.05.04.2.01.0008]
9	1.05.000016	Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun) yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan serta pengembangan sarana komunikasi dan informasi berbasis online dan paperless terkait metoda pelaporan kebakaran dan penyelamatan dalam satu portal dan bisa setiap saat d mutakhirkan dan bersifat real time yang dimiliki oleh desa/kelurahan dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang Informasi dan	0	T	[1.05.04.2.01.0008]
10	1.05.000017	Desa/Kelurahan yang Terbentuk Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran adalah mekanisme dan proses untuk membentuk dan membina REDKAR pada skala desa/kelurahan yang dilakukan setiap tahunnya dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat	0	T	[1.05.04.2.04.0002]

11	1.05.000018	Desa/Kelurahan yang Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran adalah mekanisme dan proses untuk membentuk dan membina REDKAR pada skala desa/kelurahan yang dilakukan setiap tahunnya dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat	0	T	[1.05.04.2.04.0002]
12	1.05.000023	Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	Dokumen analisis risiko bencana berisi tentang kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menjadi sumber bahaya/menimbulkan bencana baik yang terjadi secara tiba-tiba dan/atau berangsur di lokasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0	T	[1.05.03.1.02.0020] [1.05.03.2.02.0013]
13	1.05.000030	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran adalah penyediaan dokumen atau laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas rescue dan atau tindakan penyelamatan korban pada kondisi kebakaran dan non kebakaran (kondisi membahayakan manusia) dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non	1	T	[1.05.04.2.01.0003]
14	1.05.000031	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran adalah penyediaan dokumen atau laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas rescue dan atau tindakan penyelamatan korban pada kondisi kebakaran dan non kebakaran (kondisi membahayakan manusia) dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non	1	T	[1.05.04.2.01.0003]
15	1.05.000032	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota adalah penyediaan dokumen yang memuat hasil serangkaian kegiatan untuk mengamankan, mengendalikan dan menangani bahan berbahaya dan beracun agar tidak menimbulkan kebakaran dan yang membahayakan manusia dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran di	0	T	[1.05.04.2.01.0004]
16	1.05.000033	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota adalah penyediaan dokumen yang memuat hasil serangkaian kegiatan untuk mengamankan, mengendalikan dan menangani bahan berbahaya dan beracun agar tidak menimbulkan kebakaran dan yang membahayakan manusia dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran di	0	T	[1.05.04.2.01.0004]
17	1.05.000034	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras damkar, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras damkar pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain yang diatur dalam NSPK dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	1	T	[1.05.04.2.01.0005]
18	1.05.000035	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras damkar, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras damkar pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain yang diatur dalam NSPK dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	1	T	[1.05.04.2.01.0005]

19	1.05.000036	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras damkar, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras damkar pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain yang diatur dalam NSPK dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	1	T	[1.05.04.2.01.0005]
20	1.05.000042	Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kab/Kota	7	T	[1.05.02.2.01.0003]
21	1.05.000052	Dokumen Hasil Pengelolaan Laporan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi	Dokumen	Pengelolaan Laporan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Nonyustisi Di Provinsi		Y	[1.05.02.7.04.0010]
22	1.05.000053	Dokumen Hasil Pengelolaan Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi	Dokumen	Pengelolaan Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Nonyustisi Di Kab/Kota		Y	[1.05.02.7.04.0010]
23	1.05.000054	Dokumen Hasil Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi	Dokumen	Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi		Y	[1.05.02.7.04.0010]
24	1.05.000056	Dokumen Hasil Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	Merupakan dokumen yang berisi aktivitas Pusat Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Bencana dalam bentuk laporan periodik penerapan prosedur teknis (check list prosedur) untuk penyelenggaraan tugas Pusdalops baik pada aktivitas internal (misal: prosedur serah terima piket) maupun layanan peringatan dini (misal: prosedur sistem peringatan dini banjir) dan/atau layanan pada tindakan awal operasi penanganan darurat bencana tingkat kabupaten/kota provinsi (misal: prosedur aktivasi ruang krisis, prosedur pengendalian evakuasi,dll). aktivitas tersebut termasuk dalam pelayanan dasar	0	T	[1.05.03.2.02.0017]
25	1.05.000058	Dokumen Hasil Pengendalian Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	Merupakan dokumen yang berisi aktivitas Pusat Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Bencana dalam bentuk laporan periodik penerapan prosedur teknis (check list prosedur) untuk penyelenggaraan tugas Pusdalops baik pada aktivitas internal (misal: prosedur serah terima piket) maupun layanan peringatan dini (misal: prosedur sistem peringatan dini banjir) dan/atau layanan pada tindakan awal operasi penanganan darurat bencana tingkat kabupaten/kota provinsi (misal: prosedur aktivasi ruang krisis, prosedur pengendalian evakuasi,dll). aktivitas tersebut termasuk dalam pelayanan dasar	0	T	[1.05.03.2.02.0017]
26	1.05.000059	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi dalam mempercepat atau mempermudah tujuan berupa meningkatkan layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani	0	T	[1.05.04.2.01.0018]
27	1.05.000060	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi dalam mempercepat atau mempermudah tujuan berupa meningkatkan layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani	0	T	[1.05.04.2.01.0018]
28	1.05.000063	Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota adalah penyediaan dokumen Kajian Risiko Bencana yang sah dan legal dalam bentuk data dan peta yang memberikan analisa ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan bencana untuk mengetahui potensi masyarakat terdampak, potensi kerugian, dan potensi kerusakan lingkungan bila terjadi bencana dan digunakan untuk menyusun kebijakan strategi penanggulangan bencana di tingkat	1	T	[1.05.03.1.01.0003] [1.05.03.2.01.0003] [1.05.03.2.01.0001] [1.05.03.2.01.0008]

29	1.05.000064	Dokumen Kerja Sama Antar Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	Merupakan dokumen yang berisi perjanjian kesepakatan dan pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana di tingkat provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	0	T	[1.05.03.1.04.0019] [1.05.03.2.04.0003]
30	1.05.000065	Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	Merupakan dokumen yang berisi perjanjian kesepakatan dan pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana di tingkat kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	1	T	[1.05.03.1.04.0019] [1.05.03.2.04.0003]
31	1.05.000066	Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	Pencegahan Kebakaran adalah kegiatan dalam rangka meminimalisir dampak kejadian kebakaran melalui kajian penyusunan dokumen NSPM yang dilakukan setiap tahun dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pencegahan Kebakaran	0	T	[1.05.04.2.01.0001]
32	1.05.000070	Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)	Dokumen	Merupakan dokumen yang berisi kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan. Tersusun dalam dokumen JITUPASNA yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi kabupaten/kota	0	T	[1.05.03.2.04.0013]
33	1.05.000071	Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen	Meupakan dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara BNPB/BPBD kabupaten/kota bersama kementerian/lembaga, perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas pengkajian kebutuhan pascabencana untuk periode waktu tertentu melalui penyusunan dokumen R3P yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0	T	[1.05.03.2.04.0013]
34	1.05.000077	Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	Merupakan penyediaan dokumen regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota untuk pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota	0	T	[1.05.03.2.04.0001]
35	1.05.000080	Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota merupakan dokumen yang berisi proses perencanaan penanganan situasi darurat bencana pada jenis bahaya prioritas Kabupaten/Kokta dengan skenario dan tujuan disepakati serta tindakan teknis dan manajerial yang telah ditetapkan, baik yang baru disusun ataupun yang dimutakhirkan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	0	T	[1.05.03.2.02.0009]
36	1.05.000081	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana merupakan dokumen perencanaan penanggulangan bencana daerah kabupaten/kota yang sah dan legal dan menjadi acuan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana lingkup kewenangan kabupaten/kota yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana, Renas PB, dan kondisi kebencanaan daerah	1	T	[1.05.03.1.02.0012] [1.05.03.2.02.0014]
37	1.05.000082	Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	Dokumen Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana merupakan dokumen perencanaan kedaruratan bencana daerah kabupaten/kota yang sah dan legal berisi kebijakan operasional, sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menanggulangi keadaan darurat bencana tingkat kabupaten/kota	0	T	[1.05.03.2.02.0011]
38	1.05.000088	Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	SKPDB merupakan dokumen yang berisikan mekanisme koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh unsur dalam organisasi Komando Darurat Bencana untuk penanganan darurat bencana	4	T	[1.05.03.2.03.0002]
39	1.05.000089	Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat	Dokumen	SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah dimiliki oleh Kab/Kota	13	T	[1.05.02.1.01.0008] [1.05.02.2.01.0008]
40	1.05.000090	Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dimutakhirkan	Dokumen	SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah dimiliki dan telah di mutahirkan oleh Kab/Kota	6	T	[1.05.02.1.01.0008] [1.05.02.2.01.0008]
41	1.05.000091	Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	Merupakan dokumen yang berisikan kebijakan/regulasi/SOP Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota dalam rangka penata kelolaan kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota baik dalam hal antara lain struktur dan penugasan, penjenjangan dan kompetensi, tata kelola lembaga, maupun perencanaan dan	1	T	[1.05.03.1.04.0018] [1.05.03.2.04.0002] [1.05.03.2.04.0014]

42	1.05.000092	Dokumen yang Memuat SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Dokumen	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran adalah upaya untuk memberikan penyediaan sarana dan prasarana damkar yang berkaitan guna operasionalisasi relawan pemadam kebakaran dalam melakukan layanan pencegahan, pemadaman dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat	0	T	[1.05.04.2.04.0003]
43	1.05.000093	Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran adalah serangkaian proses pengumpulan, pencataran dan pengelolaan data yang berkaitan dengan tersedianya Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran pada bangunan/gedung/lingkungan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh	0	T	[1.05.04.2.02.0001]
44	1.05.000094	Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran adalah serangkaian proses/kegiatan pemeriksaan/pengujian/inspeksi proteksi kebakaran guna memberikan penilaian laik atau tidaknya sesuai standar teknis yang berlaku dengan satuan dokumen, berdasarkan dan dilaksanakan oleh bidang	0	T	[1.05.04.2.02.0002]
45	1.05.000098	Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	Dokumen	Investigasi Kejadian Kebakaran adalah serangkaian proses dalam menyelidiki dan mencari fakta terkait penyebab suatu kejadian kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Investasi Kejadian	0	T	[1.05.04.2.03.0001]
46	1.05.000099	Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6	T	[1.05.02.1.01.0016] [1.05.02.2.01.0004]
47	1.05.000100	Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian Terhadap Evakuasi yang Sesuai Standar	Dokumen	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian informasi terkait kejadian dan dampak kebakaran serta upaya-upaya	1	T	[1.05.04.2.05.0002]
48	1.05.000101	Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sesuai Standar	Dokumen	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi adalah kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras evakuasi/penyelamatan, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras evakuasi/penyelamatan pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani sarana dan prasarana	1	T	[1.05.04.2.05.0002]
49	1.05.000102	Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pertolongan Terhadap Evakuasi yang Sesuai Standar	Dokumen	Investigasi Kejadian Kebakaran adalah serangkaian proses dalam menyelidiki dan mencari fakta terkait penyebab suatu kejadian kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Investasi Kejadian	1	T	[1.05.04.2.05.0002]
50	1.05.000103	Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sesuai Standar	Dokumen	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi adalah kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras evakuasi/penyelamatan, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras evakuasi/penyelamatan pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani sarana dan prasarana	0	T	[1.05.04.2.05.0002]
51	1.05.000108	Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	Informasi kebencanaan adalah informasi mengenai Bencana yang tersedia secara berkala berdasrkan kriteria tertentu yang disediakan secara bersama ataupun madiri sebagai hasil pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan yang berisi catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi yang merepresentasikan dampak/kejadian bencana yang menjadi kewenangan	1	T	[1.05.03.2.04.0004]

52	1.05.000110	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	Dokumen Hasil Pelaksanaa kerjasama antar lembaga dan kemitraan merupakan dokumen dari suatu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kesepakatan dalam lingkup tugas dan fungsi Pol PP dalam Pencegahan dalam gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum	12	T	[1.05.02.1.01.0019] [1.05.02.2.01.0006] [1.05.02.2.01.0016]
53	1.05.000111	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	Kegiatan dalam Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	0	T	[1.05.02.1.01.0019] [1.05.02.2.01.0016]
54	1.05.000112	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Cegah Dini	Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini	6	T	[1.05.02.1.01.0017] [1.05.02.2.01.0015]
55	1.05.000113	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini	Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini	6	T	[1.05.02.1.01.0017] [1.05.02.2.01.0015]
56	1.05.000114	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Patroli	Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui patroli	36	T	[1.05.02.1.01.0017] [1.05.02.2.01.0015]
57	1.05.000115	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pembinaan	Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui pembinaan	0	T	[1.05.02.1.01.0017] [1.05.02.2.01.0015]
58	1.05.000116	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan	Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan	4	T	[1.05.02.1.01.0017] [1.05.02.2.01.0015]
59	1.05.000117	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengawalan	Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui pengawalan	12	T	[1.05.02.1.01.0017] [1.05.02.2.01.0015]
60	1.05.000118	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Penyuluhan	Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah MelaluiPenyuluhan/Sosialisasi	0	T	[1.05.02.1.01.0017] [1.05.02.2.01.0015]
61	1.05.000119	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Bencana merupakan kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk pencegahan memperkuat pada aspek penguatan kesiapsiagaan atas potensi bahaya dan kerentanan melalui peningkatan kapasitas kelompok masyarakat/komunitas yang ada disuatu kawasan yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah kabupaten/kota	1	T	[1.05.03.1.02.0013] [1.05.03.2.02.0006] [1.05.03.2.02.0020]
62	1.05.000120	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan Bencana	Kawasan	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan Bencana merupakan kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk pencegahan memperkuat pada aspek pengurangan potensi bahaya dan kerentanan, maupun peningkatan kapasitas kelompok masyarakat/komunitas yang ada disuatu kawasan yang berada dalam lingkup	1	T	[1.05.03.1.02.0013] [1.05.03.2.02.0006]
63	1.05.000121	Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	Keluarga yang mengikuti pelatihan tanggap bencana alam terhadap bencana prioritastingkat keluarga lingkup kabupaten/kota yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melatih pada aspek manajerial maupun teknis	0	T	[1.05.03.1.04.0006] [1.05.03.2.02.0012] [1.05.03.2.02.0019] [1.05.04.2.01.0010] [1.05.04.2.01.0019]
64	1.05.000122	Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga	Keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam penanganan mandiri atas bencana prioritas kabupaten/kota	0	T	[1.05.04.1.01.0013] [1.05.04.2.01.0019]
65	1.05.000123	Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Evakuasi Korban Bencana	Orang	Merupakan layanan dalam rangka pendistribusian logistik operasionalisasi peralatan penyelamatan dan evakuasi, serta kebutuhan dasar korban bencana, selama berlangsungnya penanganan awal bencana (masa krisis) lingkup daerah kabupaten/kota	2008	T	[1.05.03.1.03.0004] [1.05.03.2.03.0009]
66	1.05.000124	Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan Korban Bencana	Orang	Merupakan layanan dalam rangka pendistribusian logistik operasionalisasi peralatan penyelamatan dan evakuasi, serta kebutuhan dasar korban bencana, selama berlangsungnya penanganan awal bencana (masa krisis) lingkup daerah kabupaten/kota	2008	T	[1.05.03.1.03.0004] [1.05.03.2.03.0009]
67	1.05.000125	Korban yang Berhasil Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	Merupakan pelaksanaan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk memindahkan/mengevakuasi korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman	17	T	[1.05.03.2.03.0003]
68	1.05.000126	Korban yang Berhasil Ditemukan Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	Merupakan pelaksanaan pencarian Korban Bencana Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk upaya untuk menemukan korban bencana di lokasi bencana	17	T	[1.05.03.2.03.0003]
69	1.05.000127	Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	Merupakan memberikan pertolongan pada Korban Bencana Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk menolong korban bencana pada tempat kejadian bencana	2008	T	[1.05.03.2.03.0003]

70	1.05.000133	Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	Berisikan laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana kabupaten/kota meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, asistensi, supervisi dan sinkronisasi serta evaluasi antar perangkat daerah di kabupaten/kota	0	T	[1.05.03.2.04.0005]
71	1.05.000137	Laporan Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh	Laporan	Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh		Y	[1.05.02.7.04.0006]
72	1.05.000138	Laporan Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota	Laporan	Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota		Y	[1.05.02.7.04.0006]
73	1.05.000141	Laporan Hasil Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Laporan	Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		Y	[1.05.02.7.04.0007] [1.05.02.7.04.0007]
74	1.05.000144	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Informasi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota	Laporan	Pelaksanaan Informasi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota		Y	[1.05.02.7.04.0005]
75	1.05.000145	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota	Laporan	Pelaksanaan Kegiatan Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota		Y	[1.05.02.7.04.0005]
76	1.05.000146	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas dan atau tindakan memadamkan api dan mengendalikan kejadian kebakaran di lokasi terbakar dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	1	T	[1.05.04.2.01.0002]
77	1.05.000147	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas dan atau tindakan memadamkan api dan mengendalikan kejadian kebakaran di lokasi terbakar dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	1	T	[1.05.04.2.01.0002]
78	1.05.000148	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan KonsultasiTerhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota	Laporan	Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota		Y	[1.05.02.7.04.0005]
79	1.05.000149	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Pembinaan Qanun Syariat Islam		Y	[1.05.02.7.04.0002] [1.05.02.7.04.0002]
80	1.05.000150	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penegakan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Penegakan Qanun Syariat Islam		Y	[1.05.02.7.04.0002] [1.05.02.7.04.0002]
81	1.05.000152	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Legislatif dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Konsultasi Dengan Badan Legislatif dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam		Y	[1.05.02.7.04.0008] [1.05.02.7.04.0008]
82	1.05.000153	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Legislatif dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Konsultasi Dengan Badan Legislatif dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam		Y	[1.05.02.7.04.0008] [1.05.02.7.04.0008]
83	1.05.000154	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Yudikatif dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Yudikatif dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam		Y	[1.05.02.7.04.0008] [1.05.02.7.04.0008]
84	1.05.000155	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Yudikatif dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Yudikatif dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam		Y	[1.05.02.7.04.0008] [1.05.02.7.04.0008]
85	1.05.000156	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Konsultasi dengan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam		Y	[1.05.02.7.04.0008] [1.05.02.7.04.0008]
86	1.05.000157	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Instansi Terkait dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Instansi Terkait dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam		Y	[1.05.02.7.04.0008] [1.05.02.7.04.0008]
87	1.05.000158	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Ulama dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam	Laporan	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Ulama dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam		Y	[1.05.02.7.04.0008] [1.05.02.7.04.0008]
88	1.05.000159	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Ulama dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Konsultasi dengan Ulama dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam		Y	[1.05.02.7.04.0008] [1.05.02.7.04.0008]
89	1.05.000160	Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Koordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan Qanun Syariat Islam		Y	[1.05.02.7.04.0011] [1.05.02.7.04.0011]
90	1.05.000161	Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Koordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pengawasan Qanun Syariat Islam		Y	[1.05.02.7.04.0011] [1.05.02.7.04.0011]
91	1.05.000162	Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat di Bidang Pembinaan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat di Bidang Pembinaan Qanun Syariat Islam		Y	[1.05.02.7.04.0011] [1.05.02.7.04.0011]
92	1.05.000163	Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat di Bidang Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat di Bidang Pengawasan Qanun Syariat Islam		Y	[1.05.02.7.04.0011] [1.05.02.7.04.0011]
93	1.05.000164	Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Kepemudaan di Bidang Pembinaan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Kepemudaan di Bidang Pembinaan Qanun Syariat Islam		Y	[1.05.02.7.04.0011] [1.05.02.7.04.0011]
94	1.05.000165	Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Kepemudaan di Bidang Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Kepemudaan di Bidang Pengawasan Qanun Syariat Islam		Y	[1.05.02.7.04.0011] [1.05.02.7.04.0011]
95	1.05.000166	Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong	Laporan	Pelaksanaan Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong		Y	[1.05.02.7.04.0009]

96	1.05.000167	Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Mukim	Laporan	Pelaksanaan Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Mukim		Y	[1.05.02.7.04.0009]
97	1.05.000172	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	Pengawasan yang dilakukan sebagai pemantauan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Bupati/Walikota	2	T	[1.05.02.2.02.0012]
98	1.05.000173	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	Laporan	Pengawasan yang dilakukan sebagai pemantauan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah	2	T	[1.05.02.2.02.0012]
99	1.05.000174	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam		Y	[1.05.02.7.04.0003]
100	1.05.000178	Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Laporan	1. Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek dlm rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1	T	[1.05.02.2.03.0006]
101	1.05.000181	Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	1. Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek dlm rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1	T	[1.05.02.2.03.0006]
102	1.05.000182	Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan peraturan Perundang-undangan Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Penyuluhan peraturan Perundang-undangan Syariat Islam		Y	[1.05.02.7.04.0004]
103	1.05.000183	Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan Qanun	Laporan	Pelaksanaan Penyuluhan Qanun		Y	[1.05.02.7.04.0004]
104	1.05.000187	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan	sosialisasi penegsakan perda kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah	1	T	[1.05.02.2.02.0010]
105	1.05.000188	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan	sosialisasi Penegakan perkada kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah	1	T	[1.05.02.2.02.0010]
106	1.05.000189	Laporan Hasil Pelaksanaan sosialisasi peraturan Perundang-undangan Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan sosialisasi peraturan Perundang-undangan Syariat Islam		Y	[1.05.02.7.04.0004]
107	1.05.000190	Laporan Hasil Pelaksanaan sosialisasi Qanun	Laporan	Pelaksanaan sosialisasi Qanun		Y	[1.05.02.7.04.0004]
108	1.05.000193	Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sah dan Legal	Laporan	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	0	T	[1.05.04.2.05.0004]
109	1.05.000194	Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian Terhadap Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan	Penyelenggaraan koordinasi antar perangkat daerah di Provinsi dan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam konteks standarisasi kompetensi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, sistem kerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, kinerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatam, serta kesejahteraan aparatur pemadam kebakaran dan	0	T	[1.05.04.2.05.0004]
110	1.05.000196	Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pertolongan Terhadap Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan	Penyelenggaraan koordinasi antar perangkat daerah di Provinsi dan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam konteks standarisasi kompetensi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, sistem kerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, kinerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatam, serta kesejahteraan aparatur pemadam kebakaran dan	0	T	[1.05.04.2.05.0004]
111	1.05.000197	Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sah dan Legal	Laporan	Penyelenggaraan koordinasi antar perangkat daerah di Provinsi dan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam konteks standarisasi kompetensi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, sistem kerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, kinerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatam, serta kesejahteraan aparatur pemadam kebakaran dan	0	T	[1.05.04.2.05.0004]
112	1.05.000202	Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah upaya dan tindakan membantu mengatasi Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia serta merupakan tindakan penyelamatan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penyelamatan	1	T	[1.05.04.2.05.0001]
113	1.05.000203	Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	Berisikan laporan hasil Koordinasi penanganan awal pelaksanaan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas yang menjadi urusan kabupaten/kota	0	T	[1.05.03.2.03.0001]
114	1.05.000204	Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda yang Terlayani	Laporan	Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perda sesuai SOP	1	T	[1.05.02.1.01.0015] [1.05.02.2.01.0017]

115	1.05.000205	Laporan Layanan Dampak Penegakan Perkada yang Terlayani	Laporan	Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perkada sesuai SOP	1	T	[1.05.02.1.01.0015]
116	1.05.000208	Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	Merupakan laporan pelaksanaan Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana meliputi antara lain pelaksanaan pengerahan dan pengorganisasian komando penanganan darurat bencana tingkat kabupaten/kota, baik dalam hal manajerial, operasional, maupun sumberdaya	1	T	[1.05.03.1.03.0005] [1.05.03.2.03.0011] [1.05.03.2.03.0005] [1.05.03.2.03.0012]
117	1.05.000213	Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP	Laporan	Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Peraturan Bupati/Walikota sesuai SOP	1	T	[1.05.02.2.02.0011]
118	1.05.000214	Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP	Laporan	Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perda sesuai SOP	1	T	[1.05.02.2.02.0011]
119	1.05.000215	Orang yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana bagi penduduk yang berada di kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerah kabupaten/kota	50	T	[1.05.03.2.01.0004] [1.05.03.2.01.0002] [1.05.03.2.01.0007]
120	1.05.000216	Orang yang Mendapatkan Sosialisasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana bagi penduduk yang berada di kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerah kabupaten/kota	50	T	[1.05.03.2.01.0004]
121	1.05.000219	Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara	Unit	Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Penyediaan Peralatan keselmatan keselamatan diri di kawasan rawan bencana daerah kabubpaten/kota	0	T	[1.05.03.2.02.0015]
122	1.05.000220	Peralatan Penyelamatan Diri bagi Keluarga	Unit	Merupakan penyediaan alat peyelamatan diri bagi keluarga yang tinggal di daerah rawan bencana lingkup daerah kabupaten/kota	0	T	[1.05.03.2.02.0015]
123	1.05.000221	Peralatan Penyelamatan Diri bagi Petugas	Unit	Merupakan Penyediaan Peralatanpenyelamatan diri bagi petugas operasi kedaruratan bencana daerah kabubpaten/kota	40	T	[1.05.03.2.02.0015]
124	1.05.000224	Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Manajerialnya	Orang	Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas manajerialnya dalam hal koordinasi/ dukungan bagi dan/atau di wilayah kabupaten/kota untuk melakukan penanganan awal, penilaian dampak bencana secara cepat, maupun pengendalian luas area terpapar	30	T	[1.05.03.2.02.0008] [1.05.03.2.02.0021]
125	1.05.000225	Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis	Orang	Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas teknis operasionalnya dalam hal meningkatkan kecepatan respon time untuk dukungan penanganan awal daurat bencana di wilayah kabupaten/kota untuk melakukan penilaian dampak bencana secara cepat, maupun pengendalian luas	30	T	[1.05.03.2.02.0008]
126	1.05.000227	Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit,dan dilaksanakan oleh bidang yang	0	T	[1.05.04.2.01.0017]
127	1.05.000229	Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	1. Pengadaan Bantuan Operasional terhadap Satpol PP Daerah 2. Dukungan anggaran terhadap Satpol PP Daerah dalam pemenuhan sarana dan prasarana sebagai salah satu penunjang SPM Sub Urusan Trantibum	0	T	[1.05.02.1.01.0013] [1.05.02.2.01.0018]
128	1.05.000232	Sarana dan Prasarana Untuk Penanggulangan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit,dan dilaksanakan oleh bidang yang	0	T	[1.05.04.2.01.0017]

129	1.05.000233	Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit,dan dilaksanakan oleh bidang yang	0	T	[1.05.04.2.01.0017]
130	1.05.000236	Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	Pengadaan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit, dan dilaksanakan oleh bidang yang	0	T	[1.05.04.2.05.0005]
131	1.05.000237	Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	Pengadaan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit, dan dilaksanakan oleh bidang yang	0	T	[1.05.04.2.05.0005]
132	1.05.000239	Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	Pengadaan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit, dan dilaksanakan oleh bidang yang	0	T	[1.05.04.2.05.0005]
133	1.05.000240	Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	Pengadaan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit, dan dilaksanakan oleh bidang yang	0	T	[1.05.04.2.05.0005]
134	1.05.000241	SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Orang	1. Dukungan anggaran untuk Diklat Dasar Satpol PP yang diselenggarakan di BPSDM 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek Satlinmas dalam rangka Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas anggota Satlinmas	0	T	[1.05.02.1.01.0018] [1.05.02.1.01.0005] [1.05.02.2.01.0005] [1.05.02.2.01.0010] [1.05.02.2.01.0013]
135	1.05.000242	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Epidemiologi Terpadu	Dokumen	Merupakan tahapan kecepatan respon penaganan awal dalam penetapan status darurat bencana paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil penilaian secara cepat dampak awal suatu kejadian bencana daerah Kabupaten/Kota	0	T	[1.05.03.2.03.0010]
136	1.05.000243	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB Terpadu	Dokumen	Merupakan pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit adalah penanganan awal KLB yang ditingkatkan statusnya menjadi darurat bencana non alam, dengan alat ukur SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB	0	T	[1.05.03.2.03.0010]
137	1.05.000244	Warga Masyarakat yang Mendapatkan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat adalah upaya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran yang dilaksanakan setiap tahun dengan satuan orang, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani	36	T	[1.05.04.2.04.0001]
138	1.05.000245	Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat adalah upaya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran yang dilaksanakan setiap tahun dengan satuan orang, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani	30	T	[1.05.04.2.04.0001]

139	1.05.000246	Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Mitigasi Bencana	Orang	Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk pelatihan mitigasi bencana dalam tangka peningkatan kemampuan dan keterampilan warga negara di wilayah kabupaten/kota untuk mengenali potensi risiko bencana yang menjadi kewenangan kabupaten.kota	50	T	[1.05.03.2.02.0016]
140	1.05.000247	Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan Bencana	Orang	Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk pelatihan pencegahan bencana dalam tangka peningkatan kemampuan dan keterampilan warga negara di wilayah kabupaten/kota untuk meperkuat aspek pencegahan terhadap bencana yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	50	T	[1.05.03.2.02.0016]
141	1.05.000248	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	BPBD Provinsi memfasilitasi BPBD Kab/Kota berkoordinasi dengan stakeholder terkait (Camat, Lurah, Kepala Desa, Fasilitator Kebencanaan dan Stakeholder lainnya) dalam penyediaan data penduduk terpilah di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan gender ecuality, disbility dan social inclusion (GEDSI - Kesetaraan gender, disbilitas dan aspek sosial - rentan) Laporan data penduduk terpilah di daerah rawan bencana memuat : 1. Jumlah penduduk lansia 2. Jumlah penduduk balita (0-5 Tahun) 3. Jumlah anak-anak (6-12 Tahun) 4. Jumlah penduduk usia produktif (13-60) 5. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan 6. Jumlah penduduk	0	T	[1.05.03.1.04.0014]
142	1.05.000249	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang	Kemampuan spesifik dari Aparatur SDM BPBD kabupaten/kota dan lintas perangkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan untuk menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P), dengan target pelaksanaan 1 kali dalam satu tahun	0	T	[1.05.03.2.04.0008]
143	1.05.000250	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	Fasilitasi yang dilakukan BPBD Kabupaten/Kota untuk memastikan tertanganinya pasca bencana meliputi Sektor : Infrastruktur, Perumahan dan Permukiman, Ekonomi, Sosial dan Lintas Sektor	1	T	[1.05.03.2.04.0010]
144	1.05.000251	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	Peningkatan kapasitas meliputi kompetensi, karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, sikap dan kecakapan yang dimiliki aparatur sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan untuk memberikan pelayanan penanggulangan bencana	3	T	[1.05.03.2.04.0007]
145	1.05.000252	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sesuai dengan Permendagri 59/2021	0	T	[1.05.03.2.04.0009] [1.05.03.2.04.0016]
146	1.05.000253	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	Penyusunan rencana operasi kedaruratan bencana sesuai peraturan ini yang ditetapkan oleh peraturan kepala daerah	0	T	[1.05.03.2.03.0007]
147	1.05.000254	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Orang	Kemampuan spesifik dari Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi dalam melaksanakan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	0	T	[1.05.03.2.03.0008]
148	1.05.000255	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lembaga	Fasilitasi yang dilakukan BPBD Kabupaten/Kota untuk meningkatkan keterlibatan Lembaga non pemerintah : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	0	T	[1.05.03.2.04.0011]
149	1.05.000259	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	BPBD Provinsi memfasilitasi BPBD Kab/Kota berkoordinasi dengan stakeholder terkait (Camat, Lurah, Kepala Desa, Fasilitator Kebencanaan dan Stakeholder lainnya) dalam penyediaan data penduduk terpilah di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan gender ecuality, disbility dan social inclusion (GEDSI - Kesetaraan gender, disbilitas dan aspek sosial - rentan) Laporan data penduduk terpilah di daerah rawan bencana memuat : 1. Jumlah penduduk lansia 2. Jumlah penduduk balita (0-5 Tahun) 3. Jumlah anak-anak (6-12 Tahun) 4. Jumlah penduduk usia produktif (13-60) 5. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan 6. Jumlah penduduk	0	T	[1.05.03.1.04.0008]

150	1.05.000264	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	BPBD Provinsi memfasilitasi BPBD Kab/Kota berkoordinasi dengan stakeholder terkait (Camat, Lurah, Kepala Desa, Fasilitator Kebencanaan dan Stakeholder lainnya) dalam penyediaan data penduduk terpilah di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan gender ecuality, disbility dan social inclusion (GEDSI - Kesetaraan gender, disbilitas dan aspek sosial - rentan) Laporan data penduduk terpilah di daerah rawan bencana memuat : 1. Jumlah penduduk lansia 2. Jumlah penduduk balita (0-5 Tahun) 3. Jumlah anak-anak (6-12 Tahun) 4. Jumlah penduduk usia produktif (13-60) 5. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan 6. Jumlah penduduk	0	T	[1.05.03.2.04.0012]
151	1.05.000266	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Dokumen	Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten/Kota dan Kecamatan	27	T	[1.05.02.1.01.0012] [1.05.02.2.01.0019]
152	1.05.000267	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Dokumen	Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten/Kota dan Kecamatan	27	T	[1.05.02.3.05.0001]
153	1.05.000268	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Dokumen	Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten/Kota dan Kecamatan	27	T	[1.05.02.1.01.0012]
154	1.05.000270	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	Tim penilai angka kredit adalah tim yang menilai angka kredit Jabatan Fungsional Pol PP sesuai dengan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014 Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP adalah Sekretariat yang melakukan tugas pembinaan jabatan fungsional Pol PP sesuai dengan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014	0	T	[1.05.02.1.01.0011] [1.05.02.2.01.0011]
155	1.05.000273	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Orang	Kegiatan Diklat Dasar Pol PP terdiri dari 1. Diklat Jabatan JFT dan Administrator 2. Diklat Fungsional bagi Pejabat Fungsional pengangkatan Pertama dari (CPNS) 3. Diklat Kategori Keahlian 4. Diklat Kategori Keterampilan. 5. Diklat Penilaian Angka Kredit JF Pol PP Kriteria Aparatur Satuan Polisi Pamongpraja yang mengikuti pelatihan teknis sebagai berikut: bertugas di Satpol PP minimal 1 (satu) tahun, mempunyai integritas yang baik, SKP dengan kriteria minimal baik 1 (satu) tahun	0	T	[1.05.02.2.01.0010] [1.05.02.2.01.0012]
156	1.05.000274	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	Kegiatan Pembinaan/ Penyuluhan kepada warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan Perkada	22	T	[1.05.02.2.02.0004]
157	1.05.000275	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	Dokumen yang ditetapkan oleh KDH atau Kasatpol tentang SOP Penegakan Perda atau Perkada	3	T	[1.05.02.1.02.0011] [1.05.02.2.02.0005]
158	1.05.000276	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	Kegiatan Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3	T	[1.05.02.2.02.0007]
159	1.05.000277	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan	Dukungan anggaran dalam rangka penyelenggaraan persidangan atas penyelesaian perkara pidana pelnggaran Perda	6	T	[1.05.02.1.02.0007] [1.05.02.1.03.0002] [1.05.02.2.02.0008]
160	1.05.000278	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	Pemberkasan yang dilakukan PPNS pada kegiatan penyidikan terhadap Pelanggar Perda	1	T	[1.05.02.1.02.0009] [1.05.02.2.02.0009]
161	1.05.000279	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	Kegiatan sosialisasi perda atau perkada kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah	17	T	[1.05.02.2.02.0010]
162	1.05.000280	Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	Penyusunan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1	T	[1.05.02.1.03.0002] [1.05.02.1.03.0003] [1.05.02.2.03.0002]
163	1.05.000282	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Laporan	Pembinaan dan Pengawasan dalam ketersediaan Tim Penilai Angka Kredit di provinsi dan kabupaten/kota, pengembangan profesi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran, dan kendala dalam penyelenggaraan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	0	T	[1.05.04.1.01.0016] [1.05.04.1.02.0003] [1.05.04.1.01.0020] [1.05.04.1.01.0014] [1.05.04.2.01.0012] [1.05.04.2.01.0014]
164	1.05.000283	Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah	0	T	[1.05.04.1.01.0021] [1.05.04.2.01.0012]
165	1.05.000284	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	Bentuk kegiatan peningkatan kompetensi jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan	0	T	[1.05.04.1.01.0020] [1.05.04.2.01.0012] [1.05.04.2.01.0014]

166	1.05.000285	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Dokumen	Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran merupakan informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran		Y	[1.05.04.1.01.0019]
167	1.05.000286	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran merupakan informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	1	T	[1.05.04.1.01.0018] [1.05.04.1.01.0002] [1.05.04.1.01.0017] [1.05.04.2.01.0013] [1.05.04.2.01.0011] [1.05.04.2.01.0015]
168	1.05.000287	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) merupakan dokumen mengenai standar perencanaan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang sah dan legal untuk memberikan pedoman yang lengkap dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan dengan satuan dokumen dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	0	T	[1.05.04.2.01.0023] [1.05.04.1.01.0017] [1.05.04.2.01.0015]
169	1.05.000288	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	Pelaksanaan butir kegiatan jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam Permenpanrb Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	0	T	[1.05.04.1.01.0015] [1.05.04.2.01.0016]
170	1.05.000289	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	Aparatur Satpol PP Provinsi dan lintas Kab/Kota yang mengikuti Pelatihan Teknis Satpol PP antara lain : 1. Deteksi dini dan cegah dini 2. Pembinaan dan penyuluhan penegakkan perda dan perkada 3. Teknik pengawalan, pengamanan dan patroli 4. Teknik penanganan unjuk rasa 5. Teknik penyelidikan dan penyidikan yustisi dan non yustisi 6. Teknik pemberkasan perkara 7. Teknik negoisasi dan mediasi 8. Teknik penyusunan perda dan perkada 9. Teknik	0	T	[1.05.02.1.01.0018] [1.05.02.2.01.0014]
171	1.05.000290	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan	Pelaksanaan tugas Sekretariat PPNS sebagaimana bunyi pasal 8 Permendagri 3 Tahun 2019	1	T	[1.05.02.1.03.0005] [1.05.02.2.03.0005]
172	1.05.000291	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah, dengan evidence berupa SK TIM/MoU/PKS/Nota Kesepakatan	4	T	[1.05.02.1.03.0004] [1.05.02.2.03.0003]
173	1.05.000292	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung	2	T	[1.05.02.1.03.0006] [1.05.02.2.03.0004]
174	1.05.000293	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dokumen	Dokumen yang ditetapkan oleh KDH atau Kasatpol tentang SOP Penegakan Perda atau Perkada mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja	1	T	[1.05.02.1.02.0006] [1.05.02.2.02.0005]
175	1.05.000296	Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota adalah kegiatan dalam rangka penguatan kualitas layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan mealui penyusunan dokumen yang memuat prosedur dan tata kerja sebagai pedoman dan bentuk kepastian, konsistensi, transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan kebakaran dan penyelamatan lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota		Y	[1.05.04.1.02.0005]
176	1.05.000297	Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Laporan	Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota		Y	[1.05.04.1.02.0007]

177	1.05.000298	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi	Dokumen	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi adalah penata kelolaan kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di tingkat provinsi baik dalam hal status dan tipe dinas, struktur dan penugasan, penjenjangan dan kompetensi, tata kelola lembaga, maupun perencanaan dan		Y	[1.05.04.1.01.0035]
178	1.05.000299	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi	Dokumen	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi adalah penata kelolaan kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di tingkat provinsi baik dalam hal status dan tipe dinas, struktur dan penugasan, penjenjangan dan kompetensi, tata kelola lembaga, maupun perencanaan dan		Y	
179	1.05.000300	Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Orang	Pelatihan mengenai bahaya dan resiko kebakaran di tingkat keluarga dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta ketangguhan masyarakat terhadap bahaya kebakaran	0	T	[1.05.04.1.01.0030] [1.05.04.2.04.0004] [1.05.04.1.01.0039]
180	1.05.000302	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	Unit	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri merupakan mekanisme dan proses untuk melakukan memfasilitasi sarana prasarana di kabupaten/Kota, atau penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan di provinsi dalam rangka mendukung capaian SPM di kabupaten.kota yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana		Y	[1.05.04.1.01.0032]
181	1.05.000303	Asistensi dan Fasilitasi Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan	Asistensi dan Fasilitasi Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran merupakan serangkaian upaya dan tindakan berupa asistensi dan fasilitasi untuk saling bersinergi dalam mempercapat atau mempermudah tujuan berupa meningkatkan layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran dengan satuan laporan, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan	0	T	[1.05.04.1.01.0033]
182	1.05.000304	Pembinaan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran provinsi dan kabupaten/kota DSSD belum terisi!	Dokumen	Pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional berdasarkan ruang lingkup kegiatan, pengembangan profesi sebagaimana diatur dalam Permenpanrb Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran, Permenpanrb Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran, dan Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, serta kendala dalam penyelenggaraan jabatan fungsional pemadam kebakaran		Y	[1.05.04.1.01.0031]
183	1.05.000305	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	Penyelenggaraan koordinasi antar perangkat daerah di Provinsi dan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam konteks penyelenggaraan sistem kerja, kinerja, pengembangan karier, kesejahteraan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, dan bentuk kegiatan pembinaan aparatur lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-		Y	[1.05.04.1.01.0030]
184	1.05.000306	Pengembangan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Orang	Bentuk kegiatan pengembangan kompetensi jabatan fungsional pemadam kebakaran dan fungsional analis kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka mengembangkan kompetensi JF Pemadam Kebakaran dan JF Analis Kebakaran berupa bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, uji kompetensi, seminar, lokakarya (workshop), konferensi dan kegiatan lainnya sesuai peraturan		Y	[1.05.04.1.01.0036]
185	1.05.000307	Pengembangan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Orang	Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan		Y	[1.05.04.1.01.0037]

186	1.05.000308	Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi kabupaten/Kota dama rangka menyusun kajian akademis RISPKP, menyusun dokumen RISPKP, maupun pemutakhiran RISPKP		Y	[1.05.04.1.01.0034]
187	1.05.000309	Pemutakhiran Peta Rawan Kebakaran	Dokumen	Pemutakhiran Dokumen Peta Rawan Kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka memutakhirkan Dokumen Peta Rawan Kebakaran yang sebelumnya telah dimiliki atau disusun oleh pemerintah daerah namun perlu dimutakhirkan baik dari segi muatan informasi maupun substansi lainnya. Dokumen Peta Rawan Kebakaran merupakan informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, serta dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran		Y	[1.05.04.1.01.0029]
188	1.05.000310	Penyusunan Peta Rawan Kebakaran	Dokumen	Penyusunan Dokumen Peta Rawan Kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka menyusun informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, Serta dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran		Y	[1.05.04.1.01.0028]
189	1.05.000311	Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Dokumen	Tercapainya kinerja daerah dalam penegakan perda/perkada sesuai instrumen	1	T	[1.05.02.2.02.0013] [1.05.02.1.02.0013]
190	1.05.000312	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Dokumen	Tercapainya kinerja Satpol PP di daerah dalam penegakan perda/perkada dan penyelenggaraan tibumtranmas sesuai indikator yang di tetapkan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022	0	T	[1.05.02.1.01.0026] [1.05.02.2.01.0024]
191	1.05.000313	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	Mendukung digitalisasi terhadap pelaksanaan tugas, fungsi satpol pp dan satlinmas untuk mewujudkan satu data Trantibumlinmas	0	T	[1.05.02.2.01.0023] [1.05.02.1.01.0028]
192	1.05.000314	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Dokumen	Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum adalah dokumen yang memuat tentang jumlah kebutuhan yang diperlukan oleh Satpol PP dalam penegakan perda/perkada dan penyelenggaraan Tibumtranmas sekaligus menghitung kebutuhan Satpol PP dari sisi jumlah aparatur Satpol PP, sarpras dikaitkan dengan Perda yang akan ditegakkan dan Peta rawan gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah dokumen yang menggambarkan kerawanan suatu wilayah yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	0	T	[1.05.02.1.01.0025] [1.05.02.1.01.0027] [1.05.02.2.01.0022]
193	1.05.000315	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) merupakan dokumen yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan, penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di kawasan perkotaan yang sah dan legal dengan satuan dokumen dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan	1	T	[1.05.02.2.01.0020]
194	1.05.000316	Penyusunan SOP Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	Penyusunan SOP penanggulangan kebakaran dan penyelamatan adalah kegiatan dalam rangka penguatan kualitas layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan melalui penyusunan dokumen yang memuat prosedur dan tata kerja sebagai pedoman dan bentuk kepastian, konsistensi, transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan layanan penanggulangan kebakaran dan	7	T	[1.05.02.2.01.0021]

195	1.05.000317	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual adalah kegiatan dalam rangka penguatan kualitas layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan melalui kajian penyusunan dokumen yang memuat norma, standar, prosedur dan manual, serta dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pencegahan Kebakaran	0	T	[1.05.04.2.01.0025]
196	1.05.000318	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran adalah penyediaan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas dan atau tindakan memadamkan api dan mengendalikan kejadian kebakaran di lokasi terbakar dengan satuannya adalah laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	1	T	[1.05.04.2.01.0026]
197	1.05.000319	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran adalah kegiatan yang berkaitan dengan serangkaian kegiatan untuk mengamankan, mengendalikan dan menangani bahan berbahaya dan beracun agar tidak menimbulkan kebakaran dan yang membahayakan manusia dengan satuan laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penanganan Bahan	0	T	[1.05.04.2.01.0022]
198	1.05.000320	Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Orang	Pembinaan dan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka membina dan mengembangkan kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran berupa bimbingan teknis, Pendidikan dan Pelatihan, uji kompetensi, seminar, lokakarya (workshop), konferensi dan kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan	0	T	[1.05.04.2.01.0024]
199	1.05.000321	Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) merupakan kajian Akademis yang berisikan gambaran awal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan, penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di kawasan perkotaan yang sah dan legal dengan satuan dokumen dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP). Kegiatan ini terutama ditujukan untuk pemerintah daerah yang belum pernah menyusun atau memiliki dokumen RISPKP	0	T	[1.05.04.2.01.0020]
200	1.05.000322	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dokumen	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi baik melalui forum komunikasi kebakaran, organisasi profesi atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mempercepat atau mempermudah layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi	0	T	[1.05.04.2.01.0021]
201	1.05.000323	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi baik melalui forum komunikasi kebakaran, organisasi profesi atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mempercepat atau mempermudah layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi	Dokumen	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi baik melalui forum komunikasi kebakaran, organisasi profesi atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mempercepat atau mempermudah layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi	0	T	
202	1.05.000324	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota	Dokumen	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota adalah penata kelolaan kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di tingkat kabupaten/kota baik dalam hal status dan tipe dinas, struktur dan penugasan, penjenjangan dan kompetensi, tata kelola lembaga, maupun	0	T	[1.05.04.2.01.0020] [1.05.04.2.01.0027]

203	1.05.000325	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran adalah serangkaian proses pengumpulan, pencataran dan pengelolaan data yang berkaitan dengan tersedianya Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran pada bangunan/gedung/lingkungan dengan satuan laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan	0	T	[1.05.04.2.02.0003]
204	1.05.000326	Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan	Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala adalah serangkaian proses/kegiatan pemeriksaan/pengujian/inspeksi proteksi kebakaran guna memberikan penilaian laik atau tidaknya secara berkala sesuai standar teknis yang berlaku dengan satuan dokumen, berdasarkan dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan	0	T	[1.05.04.2.02.0005]
205	1.05.000327	Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan	Laporan	Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pemadam kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis aparatur, berupa bimbingan teknis, Pendidikan dan Pelatihan dan kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan	0	T	[1.05.04.2.02.0004]
206	1.05.000328	Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	Laporan	Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab kebakaran adalah serangkaian proses dalam menyelidiki dan mencari fakta terkait penyebab suatu kejadian kebakaran dengan satuan laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Investasi Kejadian kebakaran	1	T	[1.05.04.2.03.0004]
207	1.05.000329	Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran		Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis aparatur, berupa bimbingan teknis, Pendidikan dan Pelatihan dan kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan	1	T	[1.05.04.2.03.0003]
208	1.05.000330	Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Laporan	Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran adalah serangkaian proses investigasi kejadian kebakaran dalam upaya menyelidiki dan mencari fakta terkait penyebab suatu kejadian kebakaran melalui penelitian dan pengujian dengan satuan laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Investasi Kejadian kebakaran	12	T	[1.05.04.2.03.0002]
209	1.05.000331	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Dokumen	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran adalah upaya untuk memberikan penyediaan sarana dan prasarana damkar yang berkaitan guna operasionalisasi relawan pemadam kebakaran dalam melakukan layanan pencegahan, pemadaman dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani sarana dan prasarana	0	T	[1.05.04.2.04.0005]
210	1.05.000333	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Desa/Kelurahan	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran adalah mekanisme dan proses untuk membentuk dan membina REDKAR pada skala desa/kelurahan yang dilakukan setiap tahunnya dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat	0	T	[1.05.04.2.04.0007]
211	1.05.000335	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Laporan	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran adalah penyediaan dokumen atau laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas rescue dan atau tindakan penyelamatan korban pada kondisi kebakaran dan non kebakaran (kondisi membahayakan manusia) dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non	85	T	[1.05.04.2.05.0006]
212	1.05.000336	Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	Dokumen	Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar adalah kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras damkar, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras damkar pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	1	T	[1.05.04.2.05.0008]

213	1.05.000337	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	Unit	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standaradalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, Alat Pelindung Diri dan sarpras lainnya yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit,dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan	0	T	[1.05.04.2.05.0007]
214	1.05.000338	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	Unit	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Merupakan Mekanisme dan Proses untuk Melakukan pengaturan agar sarana prasarana selalu dalam kondisi baik dan dapat digunakan sebagaimana fungsinya, serta Dilaksanakan Oleh Bidang yang Menangani Sarana dan Prasarana	5	T	[1.05.04.2.05.0009]
215	1.05.000339	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Laporan	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan serta pengembangan sarana komunikasi dan informasi berbasis online dan paperless terkait metoda pelaporan kebakaran dan penyelamatan dalam satu portal dan bisa setiap saat d mutakhirkan dan bersifat real time yang terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Desa/Kelurahan dan dapat Menjangkau Masyarakat, dan dilaksanakan oleh bidang Informasi dan	0	T	[1.05.04.2.05.0010]
216	1.05.000340	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Dokumen	Dokumen SOP Ketenteraman dan keteriban Umum merupakan Dokumen pedoman atau acuan yang sistematis bagi Pol PP untuk melakukan tindakan dalam rangka menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang telah di buat dan/atau telah diputuskan	13	T	
217	1.05.000341	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Unit	Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat adalah fasilitas dan peralatan yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP	29	T	
218	1.05.000342	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	Laporan Gangguan Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan laporan hasil tidakan yang dilakukan terhadap Suatu Kondisi Yang Tidak Teratur yang Disebabkan Oleh Tidak Taatnya Kepada Hukum, Norma Serta Kesepakatan umum, yang dilakukan melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan	6	T	
219	1.05.000343	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Linmas dalam bentuk Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa merupakan laporan hasil penertiban dan unjuk rasa dan Penindakan : a. Unjuk Rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan fikiran daengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum yang berkaitan dengan peraturan daerah, pergub, kebijakan pemerintah dan kebijakan lainnya terkait dengan pemerintah b. Kerusuhan massa adalah suatu keadaan /situasi rusuh dan kekacauan yang dilakukan oleh seseorang amupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan , pengerusakan faslitaas umum, aset daerah, rumah ibadah dll	0	T	
220	1.05.000344	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	Pemberkasan yang dilakukan PPNS pada kegiatan penyidikan terhadap Pelanggar Perda mengacu pada Perka POLRI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan PPNS	6	T	

221	1.05.000345	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Dokumen	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi adalah penyediaan dokumen Kajian Risiko Bencana yang sah dan legal dalam bentuk data dan peta yang memberikan analisa ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan bencana untuk mengetahui potensi masyarakat terdampak, potensi kerugian, dan potensi kerusakan lingkungan bila terjadi bencana dan digunakan untuk menyusun kebijakan strategi penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota, dengan alat ukur jumlah dokumen yang dilegalisasi, dilaksanakan apabila diperlukan penyusunan baru (pemutakhiran).	0	T	
222	1.05.000346	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Kawasan	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan pelaksanaan kegiatan untuk pengurangan potensi bahaya dan kerentanan, maupun peningkatan kapasitas bagi yang ada di suatu kawasan yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah provinsi. seperti: Kawasan Pariwisata Tangguh Bencana, Kawasan Industri Tangguh Bencana, Fasilitasi pembinaan desa tangguh bencana dan keluarga tangguh bencana dsb, dengan alat ukur Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, dilaksanakan sesuai target yang telah ditentukan.	1	T	
223	1.05.000347	Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran adalah upaya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran yang dilaksanakan setiap tahun dengan satuan orang, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani	5	T	[1.05.04.2.04.0006]
224	1.05.000348	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Laporan hasil pelaksanaan memuat uraian keterangan pelaksanaan pengawasan, hasil pengawasan, dan evaluasi atas hasil pengawasan	27	T	[1.05.02.1.02.0002] [1.05.02.2.02.0012]

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025	Disabled	Info Sub Kegiatan
1	2.13.000001	Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	Orang		243	T	[2.13.04.2.01.0005]
2	2.13.000008	Buku Register Desa	Dokumen	(provinsi) Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka Pencatatan Data dan informasi serta percepatan Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti dengan Peraturan Bupati/Wali Kota (Kabupaten/Kota)Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah desa, untuk memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tertib administrasi Desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. 2. Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada Buku Register Desa	14	T	[2.13.04.1.01.0018] [2.13.04.2.01.0001]
3	2.13.000009	BUM Desa di Kabupaten/Kota	Dokumen	Pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan melalui strategi: a. revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa b. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa/BUM Desa c. penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa d. penguatan kerja sama atau e. penguatan pengelolaan aset dan f. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan dan g. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa.	1	T	[2.13.04.1.01.0015] [2.13.04.2.01.0008]
4	2.13.000010	Data dasar keluarga, potensi desa dan Kelurahan, tingkat perkembangan desa dan kelurahan	Dokumen	Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan merupakan upaya mendukung proses pelaksanaan Prodeskel mulai dari pengumpulan sampai dengan publikasi data Prodeskel, yang meliputi: 1. Fasilitasi Pengumpulan Data 2. Fasilitasi Penginputan dan Pemutakhiran Data 3. Fasilitasi Publikasi Data	1	T	[2.13.04.1.01.0009] [2.13.04.2.01.0011]
5	2.13.000012	Desa yang terfasilitasi penamaan dan kode desa	Desa	Fasilitasi penamaan dan kode desa merupakan fasilitasi terkait validasi usulan perubahan nama atau perbaikan redaksional nama desa serta usulan pemutakhrian kode desa akibat ketidaksesuaian kondisi faktual maupun akibat penataan desa.	0	T	[2.13.02.2.01.0004]
6	2.13.000013	Desa yang terfasilitasi penataan kewenangannya	Desa	Fasilitasi Kabupaten/Kota untuk menyusun Peraturan Bupati/Wali Kota tetang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menyusun Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagai dasar penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa, dan Peraturan/Kebijakan Lainnya.	6	T	[2.13.02.2.01.0003]
7	2.13.000014	Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan peraturan desa	Dokumen		0	T	[2.13.04.2.01.0007]
8	2.13.000016	Dokumen hasil fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Dokumen	Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota merupakan upaya atau dukungan (sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati/Wali Kota dan Peraturan Desa.	0	T	[2.13.04.1.01.0022] [2.13.04.2.01.0017]
9	2.13.000017	Dokumen hasil fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen		1	T	[2.13.05.1.01.0005] [2.13.05.2.01.0005]
10	2.13.000018	Dokumen hasil fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen		0	T	[2.13.05.1.01.0008] [2.13.05.2.01.0008]
11	2.13.000020	Dokumen hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Dokumen	Fasilitasi pembinaan Laporan Kepala Desa merupakan upaya dukungan (sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang di berikan Oleh pemerintah pusat kepada pemda Kab/kota dalam rangka proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sehingga berjalan transparan dan akuntabel	0	T	[2.13.04.1.01.0017] [2.13.04.2.01.0016]
12	2.13.000023	Dokumen hasil penyusunan perencanaan pembangunan desa	Dokumen	Perencanaan Pembangunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa diarahkan pada upaya pencapaian SDGs Desa. Perencanaan Pembangunan Desa terdiri dari: 1. Penyusunan RPJM Desa, dan 2. Penyusunan RKP Desa	1	T	[2.13.04.2.01.0003]

13	2.13.000025	Dokumen pengelolaan keuangan desa	Dokumen	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan dalam bentuk: 1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 3. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 4. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 5. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. 6. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi di bidang fasilitasi pengelolaan keuangan Desa, sumber pendapatan Desa, serta transfer dana Desa. khusus perihal dokumen pengelolaan keuangan desa , sejalan dengan point 1,2 dan 4 subdit pengelolaan keuangan desa telah memfasilitasi daerah baik dalam bentuk surat edaran, modul ataupun dokumen-dokumen perihal pengelolaan keuangan desa yang menjadi isu strategis tiap tahunnya	1	T	[2.13.04.2.01.0004]
14	2.13.000027	Informasi pelayanan masyarakat desa baik pertemuan maupun media lain	Dokumen		0	T	[2.13.02.1.01.0004] [2.13.05.1.01.0004] [2.13.02.2.01.0006] [2.13.05.2.01.0004]
15	2.13.000029	Kekayaan desa berupa harta bergerak dan tidak bergerak	Dokumen	Adalah Bentuk pembinaan berupa asistensi dan supervisi, konsultasi, koordinasi, bimbingan teknis serta penyiapan aplikasi untuk mendorong pengelolaan aset desa secara transparan dan akuntabel Adalah Bentuk pembinaan pengelolaan aset desa berupa penyediaan aplikasi (sipades) termasuk peningkatan kapasitas aparatur daerah dan desa	1	T	[2.13.04.1.01.0006] [2.13.04.2.01.0013]
16	2.13.000034	Laporan hasil fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan		0	T	[2.13.05.1.01.0007] [2.13.05.2.01.0007]
17	2.13.000035	Laporan hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	Laporan berisi hasil fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan: penelusuran, pemetaan, pengkajian, pendokumentasian, pelindungan, dan pemasaran.	0	T	[2.13.05.2.01.0006]
18	2.13.000042	Laporan penyelenggaraan musyawarah desa	Laporan		0	T	[2.13.04.2.01.0006]
19	2.13.000043	lembaga adat di Kabupaten/Kota	Lembaga Adat	Afirmasi atas SK Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui Pendataan SK MHA, Fasilitasi Asistensi, Identifikasi, Verifikasi, Validasi Pengakuan dan Perlindungan MHA	0	T	[2.13.02.2.01.0005]
20	2.13.000044	Lembaga adat di Provinsi	Lembaga Adat	Afirmasi atas SK Masyarakat Hukum Adat (MHA) melalui Pendataan SK MHA, Fasilitasi Asistensi, Identifikasi, Verifikasi, Validasi Pengakuan dan Perlindungan MHA	0	T	[2.13.02.1.01.0001] [2.13.05.2.01.0001]
21	2.13.000045	Musyawarah Desa	Dokumen		0	T	[2.13.03.1.01.0002] [2.13.03.2.01.0002]
22	2.13.000058	Partisipasi masyarakat Desa pengawasan dan evaluasi secara partisipatif oleh Badan Permusyawaratan Desa,	Peraturan Desa	1. Jenis Produk Hukum Desa terbagi menjadi 3: Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa ; 2. Fasilitasi yang dilaksanakan adalah berupa Penguatan Penyusunan Produk Hukum Desa, Bimbingan Teknis penyusunan Produk Hukum Desa dan Pendataan produk Hukum Desa	0	T	[2.13.04.1.01.0003] [2.13.04.2.01.0002]
23	2.13.000059	Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis	Dokumen		0	T	[2.13.04.1.01.0002] [2.13.04.2.01.0012]
24	2.13.000060	Pembentukan, Penghapusan, Perubahan status dan Penetapan desa dan desa adat	Desa	(Provinsi)Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pemrakarsa usulan Penataan Desa memfasilitasi kelengkapan persyaratan dan memastikan tahapan penataan Desa sesuai dengan ketentuan Per-UU yang berlaku (kab/Kota) Pembentukan Desa merupakan proses mengadakan Desa baru diluar Desa yang ada 2. Penghapusan Desa merupaka proses menghapus Kode wilayah administrasi Desa untuk kemudian Desa yang dihapuskan digabungkan dengan wilayah Desa terdekat 3. Penggabungan Desa merupakan proses menggabungan 2 (dua) atau lebih Desa menjadi 1 (satu) Desa atau wilayah dari 2(dua) atau lebih Desa yang beririsan untuk digabungkan menjadi 1 (satu) Desa baru 4. Fasilitasi Tata Wilayah Desa merupakan proses penataan wilayah Desa yang didalamnya terdiri atas Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Penataan Desa, serta Penamaan dan Kode Desa	0	T	[2.13.02.1.01.0003] [2.13.02.2.01.0001] [2.13.02.2.01.0002]
25	2.13.000064	Peraturan Bersama Kepala Desa musyawarah antar desa	Peraturan Kepala Desa	(provinsi) Kerja Sama Desa dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (kab/Kota) Kesepakatan bersama antar-Desa yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan Desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. kerja sama antar Desa dilakukan antara : a. Desa dengan Desa lain dalam 1 (satu) dan b. Desa dengan Desa lain antar Kecamatan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	0	T	[2.13.03.1.01.0001] [2.13.03.2.01.0001]
26	2.13.000065	Perencanaan, pelaksanaan, Pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa	Dokumen		1	T	[2.13.03.1.01.0003] [2.13.03.2.01.0003]

27	2.13.000066	Peta desa	Dokumen	Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDes) Tingkat Pusat terhadap pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa oleh Tim PPBDes Tingkat Kabupaten/Kota dibawah pembinaan dan pengawasan oleh Tim PPBDes Tingkat Provinsi untuk kemudian disahkan melalui Peraturan Bupati/Wali Kota dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Pemerintah Provinsi. Adapun Batas Desa adalah pembatas administrasi wilayah pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat tanda-tanda berupa alam seperti igir/punggung (watershed), gunung/pegunungan sungai median dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.	0	T	[2.13.04.1.01.0016] [2.13.04.2.01.0015]
28	2.13.000069	Rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK), karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain	Lembaga Desa dan Desa Adat	penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan NSPK, Monev dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis, asistensi dan supervisi terhadap LKD & LAD serta MHA di Desa dan Desa Adat	28	T	[2.13.02.1.01.0002] [2.13.05.1.01.0002] [2.13.05.1.01.0003] [2.13.05.2.01.0002] [2.13.05.2.01.0003]
29	2.13.000071	SDM anggota BPD	Orang	(provinsi) Meningkatkan sikap dan keterampilan anggota BPD melalui Bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan (Kab/Kota) Memberikan penghargaan atas prestasi dan kinerja anggota BPD oleh pemerintah daerah	437	T	[2.13.04.1.01.0011] [2.13.04.2.01.0014]
30	2.13.000073	Surat Keputusan Bupati/walikota terkait pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Dokumen	(provinsi) Fasilitasi Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, untuk memastikan bahwa pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. (kab/kota) 1. Penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa merujuk pada keseluruhan tahapan yang terkait dengan pemilihan kepala desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. 2. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan upaya atau dukungan (bimtek, pelatihan, sosialisasi, konsultasi, asistensi, dll) yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, untuk memastikan bahwa Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.	8	T	[2.13.04.1.01.0007] [2.13.04.2.01.0009] [2.13.04.2.01.0010]
31	2.13.000074	Tingkat perkembangan desa	Desa	Status kemajuan dan kemandirian Desa yang ditetapkan berdasar Indeks Desa Membangun yang diklasifikasikan dalam 5 status Desa yakni: a. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa b. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra- c. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa d. Desa Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pra- dan e. Desa Sangat Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pratama.	Mandiri : 28, 19, Berkembang : 31, Tertinggal 3, Sangat Tertinggal : 0	T	[2.13.04.1.01.0008] [2.13.04.2.01.0018]

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2025	Disabled	Info Sub Kegiatan
1	3.31.000001	BAP pemenuhan komitmen perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri	Laporan		0	T	[3.31.03.1.01.0004] [3.31.03.2.01.0004]
2	3.31.000002	Evaluasi pemenuhan komitmen usaha	Laporan		0	T	[3.31.03.1.01.0003] [3.31.03.2.01.0003]
3	3.31.000003	Fasilitas non fiskal bagi industri kecil dan industri menengah	Laporan			T	[3.31.02.1.01.0004] [3.31.02.2.01.0004]
4	3.31.000004	Hasil pelaksanaan RPIK	Laporan		0	T	[3.31.02.2.01.0006]
5	3.31.000006	Kegiatan pemeriksaan dokumen dan/atau observasi lapangan	Laporan		0	T	[3.31.03.1.01.0003] [3.31.03.2.01.0003]
6	3.31.000007	Kunjungan ke Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri binaannya yang belum patuh	Laporan		0	T	[3.31.04.1.01.0003] [3.31.04.2.01.0003]
7	3.31.000008	Menerima atau menolak pengefektifan perizinan usaha industri dan perizinan perluasan usaha industri	Laporan		0	T	[3.31.03.1.01.0004] [3.31.03.2.01.0004]
8	3.31.000009	Pelaksanaan kegiatan bentuk publikasi dan diseminasi lainnya	Laporan		0	T	[3.31.04.1.01.0002] [3.31.04.2.01.0002]
9	3.31.000010	Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data Lain terkait Sektor Industri lingkup Provinsi	Laporan		1	T	[3.31.04.1.01.0001] [3.31.04.2.01.0001]
10	3.31.000011	Pelaksanaan kegiatan penyusunan Dashboard Sistem Informasi Eksekutif	Laporan		0	T	[3.31.04.1.01.0002] [3.31.04.2.01.0002]
11	3.31.000012	Pelaksanaan kegiatan sistem Pendukung Keputusan	Laporan		0	T	[3.31.04.1.01.0002] [3.31.04.2.01.0002]
12	3.31.000013	Pelaksanaan Pemberian fasilitas Kepada industri kecil dan menengah	Laporan		1	T	[3.31.02.1.01.0005] [3.31.02.2.01.0005]
13	3.31.000014	Pelaksanaan pemeriksaan lapangan untuk menilai pemenuhan komitmen perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri	Laporan		0	T	[3.31.03.1.01.0004] [3.31.03.2.01.0004]
14	3.31.000015	Pelaksanaan Penguatan kapasitas kelembagaan IKM	Laporan		0	T	[3.31.02.1.01.0005] [3.31.02.2.01.0005]
15	3.31.000016	Pelaksanaan Peningkatan kompetensi internal IKM	Laporan		0	T	[3.31.02.1.01.0005] [3.31.02.2.01.0005]
16	3.31.000017	Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek SIINas kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri	Laporan		1	T	[3.31.04.1.01.0001] [3.31.04.2.01.0001]
17	3.31.000018	Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Laporan		0	T	[3.31.02.1.01.0003] [3.31.02.2.01.0003]
18	3.31.000019	Pembangunan kawasan industri	Laporan		0	T	[3.31.02.1.01.0002] [3.31.02.2.01.0002]
19	3.31.000020	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Laporan		0	T	[3.31.02.1.01.0003] [3.31.02.2.01.0003]
20	3.31.000021	Pemberian fasilitas nonfiskal untuk Perusahaan industri skala besar	Laporan		0	T	[3.31.02.1.01.0004] [3.31.02.2.01.0004]
21	3.31.000022	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri	Laporan		0	T	[3.31.02.1.01.0003] [3.31.02.2.01.0003]
22	3.31.000023	Pengembangan dan pemanfataan kreativitas dan inovasi	Laporan		0	T	[3.31.02.1.01.0003] [3.31.02.2.01.0003]
23	3.31.000024	Pengembangan kawasan peruntukan industri	Laporan		0	T	[3.31.02.1.01.0002] [3.31.02.2.01.0002]
24	3.31.000025	Pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah	Laporan		0	T	[3.31.02.1.01.0002] [3.31.02.2.01.0002]
25	3.31.000026	Pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri	Laporan		0	T	[3.31.02.1.01.0002] [3.31.02.2.01.0002]
26	3.31.000027	Peninjauan kembali RPIK setiap 5 tahun	Dokumen		0	T	[3.31.02.2.01.0006]
27	3.31.000029	Penyediaan Informasi dan Analisa Industri	Laporan		0	T	[3.31.04.1.01.0001] [3.31.04.2.01.0001]
28	3.31.000030	Penyediaan sumber pembiayaan	Laporan		0	T	[3.31.02.1.01.0003] [3.31.02.2.01.0003]
29	3.31.000031	Perda Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Dokumen		0	T	[3.31.02.1.01.0001] [3.31.02.2.01.0001]
30	3.31.000032	Permohonan verifikasi teknis dalam Perizinan usaha industri dan Perizinan Perluasan usaha industri	Laporan		0	T	[3.31.03.1.01.0004] [3.31.03.2.01.0004]
31	3.31.000033	Rapat Koordinasi antara Dinas dengan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri binaannya	Laporan		0	T	[3.31.04.1.01.0003] [3.31.04.2.01.0003]

32	3.31.000034	Rekapitulasi perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri yang diterbitkan	Laporan		0	T	[3.31.03.1.01.0003] [3.31.03.2.01.0003]
33	3.31.000036	Standardisasi industri	Dokumen		0	T	[3.31.02.1.01.0004] [3.31.02.2.01.0004]
34	3.31.000037	Tindak lanjut kegiatan evaluasi Pemenuhan komitmen usaha dari perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri	Laporan		0	T	[3.31.03.1.01.0003] [3.31.03.2.01.0003]
35	3.31.000038	Verifikasi teknis perizinan industri dan perizinan perluasan industri	Laporan		0	T	[3.31.03.1.01.0004] [3.31.03.2.01.0004]
36	3.31.000039	Data Infrastruktur Transportasi, Infrastruktur Listrik dan Energi, Infrastruktur Pengelolaan Air Baku, Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah, Sarana Pengembangan SDM Industri, Kawasan Industri, dan RTRW Kabupaten/Kota	Data		0	T	[3.31.02.2.01.0009] [3.31.02.2.01.0007]
37	3.31.000040	Data Infrastruktur Transportasi, Infrastruktur Listrik dan Energi, Infrastruktur Pengelolaan Air Baku, Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah, Sarana Pengembangan SDM Industri, Kawasan Industri, dan RTRW Provinsi	Data		0	T	[3.31.02.1.01.0007] [3.31.02.1.01.0009]
38	3.31.000041	Data Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal di Kabupaten/Kota	Data		0	T	[3.31.02.2.01.0008]
39	3.31.000042	Data Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal di Provinsi	Data		0	T	[3.31.02.1.01.0010]
40	3.31.000043	Data PDRB Industri Kabupaten/Kota, Tenaga Kerja Industri, Investasi Industri, Jumlah dan Jenis Perusahaan Industri, Kawasan Industri, Sentra IKM	Data		0	T	[3.31.02.2.01.0010]
41	3.31.000044	Data PDRB Industri Provinsi, Tenaga Kerja Industri, Investasi Industri, Jumlah dan Jenis Perusahaan Industri, Kawasan Industri, Sentra IKM	Data		0	T	[3.31.02.1.01.0008]
42	3.31.000045	Data perizinan berusaha yang dimiliki perusahaan industri di Provinsi	Data		0	T	[3.31.03.1.01.0003]
43	3.31.000046	Data persyaratan/standar kegiatan usaha berdasarkan bidang industri, skala usaha, dan tingkat risiko di Provinsi	Data		0	T	[3.31.03.1.01.0004] [3.31.03.1.01.0003]
44	3.31.000047	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan Jumlah investasi	Data		0	T	[3.31.03.2.01.0003]
45	3.31.000048	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan sektor dan subsektor, satuan perusahaan	Data		0	T	[3.31.03.2.01.0004] [3.31.03.2.01.0003]
46	3.31.000049	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha, satuan perusahaan	Data		0	T	[3.31.03.2.01.0004] [3.31.03.2.01.0003]
47	3.31.000050	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan tingkat risiko, satuan perusahaan	Data		0	T	[3.31.03.2.01.0003] [3.31.03.2.01.0004]
48	3.31.000051	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota dalam tahap pembangunan	Data		0	T	[3.31.03.2.01.0004] [3.31.03.2.01.0003]
49	3.31.000052	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota penerima fasilitas	Data		0	T	[3.31.03.2.01.0003]
50	3.31.000053	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota telah operasional	Data		0	T	[3.31.03.2.01.0004] [3.31.03.2.01.0003]
51	3.31.000054	Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan Jumlah investasi	Data		0	T	[3.31.03.1.01.0003]

52	3.31.000055	Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan sektor dan subsektor, satuan perusahaan	Data		0	T	[3.31.03.1.01.0004] [3.31.03.1.01.0003]
53	3.31.000056	Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan skala usaha, satuan perusahaan	Data		0	T	[3.31.03.1.01.0004] [3.31.03.1.01.0003]
54	3.31.000057	Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan tingkat risiko, satuan perusahaan	Data		0	T	[3.31.03.1.01.0003] [3.31.03.1.01.0004]
55	3.31.000058	Data perusahaan industri di Provinsi dalam tahap pembangunan	Data		0	T	[3.31.03.1.01.0003] [3.31.03.1.01.0004]
56	3.31.000059	Data perusahaan industri di Provinsi penerima fasilitas	Data		0	T	[3.31.03.1.01.0003]
57	3.31.000060	Data perusahaan industri di Provinsi telah operasional	Data		0	T	[3.31.03.1.01.0003] [3.31.03.1.01.0004]
58	3.31.000061	Jumlah permintaan verifikasi teknis pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian di Provinsi	Data		0	T	[3.31.03.1.01.0004]
59	3.31.000062	Jumlah permintaan verifikasi teknis pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustriandi Kabupaten/Kota	Data		0	T	[3.31.03.2.01.0004]
60	3.31.000063	Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen		0	T	[3.31.02.2.01.0001]

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2025	Disabled	Info Sub Kegiatan
58	5.05.000066	Peserta Didik	Orang	Peserta Didik adalah orang yang berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan dan lulus penilaian akhir yang diselenggarakan di ujung pelatihan sebagai bukti keikutsertaan dan kompetensi yang diperoleh dari keikutsertaan tersebut.	0 Orang	T	[5.05.03.1.01.0004] [5.05.03.2.01.0005] [5.05.03.1.02.0004] [5.05.03.2.02.0018]
62	5.05.000070	Infrastruktur Riset dan Inovasi	Unit	Infrastruktur Riset dan Inovasi adalah serangkaian sistem fisik dasar berupa perlengkapan, peralatan, hingga bangunan untuk menopang kegiatan riset dan inovasi.	1 Unit	T	[5.05.03.1.02.0007] [5.05.03.2.02.0017]
63	5.05.000071	Kebun Raya Daerah	Unit	Kebun Raya Daerah adalah kebun raya botani yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam rangka penelitian dan pengembangan ilmu botani dan ilmu yang berkaitan serta dalam rangka pertunjukan atau sarana rekreasi bagi masyarakat umum.	0 Unit	T	[5.05.03.1.02.0020] [5.05.03.2.02.0025]
64	5.05.000072	Anggaran Riset	TOE/Milyar Rupiah	Anggaran Riset adalah susunan rencana dan perkiraan mengenai biaya-biayai belanja yang ditujukan untuk melakukan penelitian.	353.965.500	T	[5.05.03.1.02.0010] [5.05.03.2.02.0008]
65	5.05.000073	Hak Kekayaan Intelektual	Unit	Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, seperti UU Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Varitas Tanaman, Sirkuit terpadu dan Merek.	0 Unit	T	[5.05.03.1.02.0025] [5.05.03.2.02.0006] [3.26.04.1.02.0026]
68	5.05.000076	Lokakarya, Pameran, dan Promosi	Berita Acara	Lokakarya, Pameran, dan Promosi adalah kegiatan perkumpulan dan perhimpunan orang banyak untuk melihat dan mengambil inspirasi dari kegiatan yang dilakukan pelaku pameran agar dapat meraih ilmu dan pengetahuan untuk dapat digunakan dalam kehidupan keseharian.	0 Berita Acara	T	[5.05.03.1.02.0016] [5.05.03.2.02.0002]
69	5.05.000077	Apresiasi Riset dan Inovasi	Berita Acara	Apresiasi Riset dan Inovasi adalah adalah setiap aktivitas penghargaan yang dilakukan sebagai hasil penggunaan, peresapan, dan penilaian seseorang terhadap sebuah riset dan inovasi.	0 Berita Acara	T	[5.05.03.1.02.0001] [5.05.03.2.02.0012]
70	5.05.000078	Perusahaan Rintisan	Unit	Perusahaan Rintisan merupakan perusahaan yang baru beroperasi dan masih berada pada fase pengembangan untuk menemukan pasar dan mengembangkan produk dengan pendekatan dan penekanan pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.	0 Unit	T	[5.05.03.1.02.0014] [5.05.03.2.02.0026]
71	5.05.000079	Kodefikasi Teknologi Masyarakat	Unit	Kodefikasi Teknologi Masyarakat adalah kegiatan mendokumentasikan dan menerapkan kode pada teknologi yang ada beredar di masyarakat umum.	0 Unit	T	[5.05.03.1.02.0024] [5.05.03.2.02.0010]
72	5.05.000080	Produk Unggulan Daerah	Unit	Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.	12 Unit	T	[5.05.03.1.02.0017] [5.05.03.2.02.0004]
73	5.05.000081	Klaster Industri Berbasis Unggulan Daerah	Unit	Klaster Industri Berbasis Unggulan Daerah adalah konsentrasi geografis dari perusahaan dan institusi yang saling berhubungan pada sektor tertentu, yang saling berhubungan karena kebersamaan dan saling melengkapi pada bidang yang menjadi keunggulan dan keunikan daerah.	0 Unit	T	[5.05.03.1.02.0018] [5.05.03.2.02.0003]
75	5.05.000083	Riset dan Seminar Internasional	Berita Acara	Riset dan Seminar Internasional adalah kegiatan penyampaian suatu karya ilmiah yang berupa ilmu pengetahuan dari seorang akademisi, yang dipresentasikan kepada peserta seminar agar dapat mengambil keputusan yang sama terhadap karya ilmiah antara sumber dengan peserta dengan lingkup mancanegara.	0 Berita Acara	T	[5.05.03.1.02.0008] [5.05.03.2.02.0024]
77	5.05.000085	Rapat Koordinasi Teknis	Berita Acara	Rapat Koordinasi Teknis adalah kegiatan permusyawarahan pengarahan atas suatu hal khusus atau bersifat teknis untuk menemukan mufakat dalam penyelesaian atas suatu permasalahan.	0 Berita Acara	T	[5.05.03.1.02.0013] [5.05.03.2.02.0021]
79	5.05.000087	Perangkat Lunak	Aplikasi	Perangkat lunak atau peranti lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat, dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer.	0 Aplikasi	T	[5.05.03.1.02.0012] [5.05.03.2.02.0013]

80	5.05.000088	Pendampingan Masyarakat	Berita Acara	Pendampingan Masyarakat adalah kegiatan kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator.	0 Berita Acara	T	[5.05.03.1.02.0019] [5.05.03.2.02.0009]

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan
1	2.07.000001	Angkatan Kerja (AK)	Orang
2	2.07.000002	Asosiasi pengusaha dan SP/SB (WLKP Online) yang diverifikasi	Asosiasi
3	2.07.000005	CPMI/PMI	Orang
4	2.07.000018	Instruktur pemerintah	Orang

5	2.07.000019	Instruktur swasta	Orang
6	2.07.000024	Kapasitas terpasang pemerintah	Orang
7	2.07.000029	kecelakaan kerja	Kasus
8	2.07.000032	Lembaga Bipartit	Lembaga
9	2.07.000035	Lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi	Unit
10	2.07.000036	Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi	Unit
11	2.07.000038	LKS Tripartit	Lembaga

12	2.07.000042	LPKS yang dibina	Lembaga
13	2.07.000046	Lulusan pelatihan pemerintah	Orang
14	2.07.000047	Lulusan pelatihan swasta	Orang
15	2.07.000048	Mediator	Orang
16	2.07.000049	Nama Program Pelatihan	Program

17	2.07.000053	Pencaker yang mengikuti Bimbingan Jabatan	Orang
18	2.07.000056	Pencari Kerja	Orang
19	2.07.000057	Pencari kerja ditempatkan	Orang
20	2.07.000058	Pencari kerja terdaftar	Orang

21	2.07.000059	Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang
22	2.07.000066	Penduduk Usia Kerja (PUK)	Orang
23	2.07.000070	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
24	2.07.000072	Penyelesaian kasus hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama	Kasus
25	2.07.000074	Peraturan Perusahaan (WLKP Online)	Dokumen

26	2.07.000077	Perjanjian Kerja Bersama (WLKP Online)	Dokumen
27	2.07.000078	Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Kasus
28	2.07.000080	Persediaan Tenaga Kerja	Orang
29	2.07.000082	Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS	Perusahaan
30	2.07.000083	Perusahaan dengan tenaga kerja minimal 50 orang	Perusahaan

31	2.07.000084	Perusahaan Kecil	Perusahaan
32	2.07.000086	Perusahaan mikro,kecil,menengah,dan besar	Perusahaan
33	2.07.000087	Perusahaan peserta jamsostek aktif	Perusahaan

34	2.07.000088	Perusahaan yang melapor ketenagakerjaan	Perusahaan
35	2.07.000095	Petugas Antar Kerja	Orang
36	2.07.000096	PMI Purna	Orang
37	2.07.000097	PMI yang di tempatkan	Orang
38	2.07.000100	Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja
39	2.07.000102	Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Unit
40	2.07.000109	Tenaga Kerja Disabilitas	Orang
41	2.07.000110	Tenaga kerja peserta jamsostek aktif	Orang

42	2.07.000114	Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja	Orang
43	2.07.000123	Validasi DKPTKA yang berasal dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
44	2.07.000125	Dokumen Kerjasama Pelatihan Vokasi	Dokumen
45	2.07.000127	Pengawasan LPTKS, LPPRT dan Job portal	Lembaga
46	2.07.000128	Tenaga Kerja yang ditempatkan AKAD dan AKL	Orang
47	2.07.000129	Perusahaan atau lembaga yang terdaftar sebagai LPTKS	Perusahaan

Definisi Operasional	2025	Disabled	Info Sub Kegiatan
jumlah dan kualitas Penduduk Usia Kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran	0	T	[2.07.02.1.01.0001] [2.07.02.1.01.0004] [2.07.02.1.01.0003] [2.07.02.2.01.0001] [2.07.02.2.01.0003]
Pengusaha: a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Pekerja/Buruh baik di Perusahaan maupun di luar Perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja/Buruh serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan keluarganya.	0	T	[2.07.05.1.02.0003] [2.07.05.2.02.0003]
Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia	1	T	[2.07.04.1.04.0001] [2.07.04.2.04.0001]
Jabatan Fungsional Instruktur adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan pelatihan.	2	T	[2.07.03.1.01.0001] [2.07.03.2.01.0004] [2.07.02.1.01.0001]

Instruktur swasta adalah instruktur yang terdaftar dan bekerja di instansi/lembaga milik pemerintah	3	T	[2.07.03.1.01.0001] [2.07.03.2.01.0004] [2.07.02.1.01.0001]
Kapasitas latih adalah jumlah orang maksimum yang dapat dilatih dalam satu tahun untuk program pelatihan tertentu oleh lembaga pelatihan kerja	80	T	[2.07.02.1.01.0001] [2.07.02.2.01.0001]
Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja	21	T	[2.07.02.1.01.0001] [2.07.06.1.01.0001] [2.07.02.2.01.0001]
LKS Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh	0	T	[2.07.05.1.01.0003] [2.07.05.2.01.0003] [2.07.02.1.01.0001]
Lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi adalah LPK Pemerintah yang telah mendapat pengakuan formal yang menyatakan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja	0	T	[2.07.03.1.02.0001] [2.07.02.1.01.0001]
Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi adalah LPK yang dikelola pihak swasta yang telah mendapat pengakuan formal yang menyatakan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja	0	T	[2.07.03.1.02.0001] [2.07.03.2.02.0001] [2.07.02.1.01.0001]
LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah.	0	T	[2.07.05.1.02.0004] [2.07.05.2.02.0004]

Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah atau badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja	3	T	[2.07.03.2.02.0001]
Peserta pelatihan yang telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus pada pelatihan yang diselenggarakan oleh LPK pemerintah	0	T	[2.07.02.1.01.0001] [2.07.03.1.01.0001] [2.07.02.1.01.0003] [2.07.02.1.01.0004] [2.07.03.2.01.0004] [2.07.02.2.01.0001] [2.07.02.2.01.0003]
Peserta pelatihan yang telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus pada pelatihan yang diselenggarakan oleh LPK swasta	0	T	[2.07.02.1.01.0001] [2.07.03.1.01.0001] [2.07.02.1.01.0003] [2.07.02.1.01.0004] [2.07.03.2.01.0004] [2.07.02.2.01.0001] [2.07.02.2.01.0003]
PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan pembinaan hubungan industrial, pengembangan hubungan industrial, dan mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial	0	T	[2.07.02.1.01.0001] [2.07.05.1.02.0001] [2.07.05.1.02.0002] [2.07.02.2.01.0001] [2.07.05.2.02.0001] [2.07.05.2.02.0002]
Jumlah Program PBK. Program PBK yang merupakan suatu rumusan tertulis yang memuat secara komprehensif rancangan pencapaian kompetensi sebagai pedoman pelaksanaan pelatihan yang penyelenggaraanya berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi	0	T	[2.07.03.1.01.0001] [2.07.03.1.02.0001] [2.07.03.3.03.0004] [2.07.03.4.03.0004] [2.07.03.2.01.0004]

Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja. Penyuluhan Jabatan adalah kegiatan pemberian informasi mengenai jabatan dan pekerjaan kepada Pencari Kerja dan masyarakat. Bimbingan Jabatan adalah pelayanan kepada Pencari Kerja untuk mengetahui dan memahami gambaran mengenai potensi diri dan dunia kerja, serta memilih bidang pekerjaan dan karir yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki	0	T	[2.07.04.1.01.0003] [2.07.04.2.01.0003]
Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja	0	T	[2.07.02.1.01.0001] [2.07.04.1.03.0002] [2.07.04.1.03.0003] [2.07.02.2.01.0001] [2.07.04.2.03.0002] [2.07.04.2.03.0003] [2.07.04.2.01.0003]
Tenaga Kerja yang Ditempatkan adalah bagian dari pencari kerja terdaftar yang di tempatkan untuk mengisi lowongan pekerjaan dalam layanan Bursa Kerja Khusus (BKK) sebagai bagian dari sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan	0	T	[2.07.02.1.01.0001] [2.07.02.1.01.0003] [2.07.02.1.01.0004] [2.07.02.2.01.0001] [2.07.02.2.01.0003]
Pencari Kerja Terdaftar adalah bagian dari pencari kerja yang terdaftar dan / atau didaftarkan dalam sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perseorangan, pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau pemberi kerja.	295	T	[2.07.02.1.01.0001] [2.07.02.2.01.0001]

Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana Penempatan Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja. Pameran Kesempatan Kerja (Job Fair) adalah aktivitas mempertemukan sejumlah Pencari Kerja dengan sejumlah Pemberi Kerja pada waktu dan tempat tertentu dengan tujuan penempatan	0	T	[2.07.04.1.03.0003] [2.07.04.2.03.0003]
jumlah penduduk yang berumur 15 (lima belas) tahun atau lebih yang disebut juga tenaga kerja	0	T	[2.07.02.1.01.0001] [2.07.04.1.01.0002] [2.07.02.1.01.0003] [2.07.02.1.01.0004] [2.07.04.2.01.0002] [2.07.02.2.01.0001] [2.07.02.2.01.0003]
Validasi DKPTKA yang berasal dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daaerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Proviinsi dan yang diterbitkan yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	T	[2.07.04.1.05.0001] [2.07.04.3.05.0002] [2.07.04.4.05.0002] [2.07.04.2.01.0002]
Jumlah kasus Perselisihan HI yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama Perjanjian Bersama adalah hasil kesepakatan bersama penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang ditandatangani oleh para pihak	0	T	[2.07.05.1.02.0002] [2.07.05.2.02.0002] [2.07.02.1.01.0001]
Jumlah Peraturan Perusahaan pada Perusahaan yang terdaftar dalam WLKP Online Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan	0	T	[2.07.05.1.01.0001] [2.07.05.2.01.0001]

Jumlah Perjanjian Kerja Bersama pada Perusahaan yang terdaftar dalam WLKP Online Jumlah Perjanjian Kerja Bersama pada Perusahaan yang terdaftar dalam WLKP Online. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.	0	T	[2.07.05.1.01.0002] [2.07.05.2.01.0002]
Perselisihan Hubungan Industrial adalah Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai perselisihan hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serat perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan	0	T	[2.07.05.1.02.0002] [2.07.05.2.02.0002]
jumlah dan kualitas angkatan kerja yang tersedia dengan berbagai karakteristiknya	0	T	[2.07.02.1.01.0001] [2.07.02.1.01.0003] [2.07.02.2.01.0001]
Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dalam negeri	0	T	[2.07.04.1.02.0001] [2.07.03.2.03.0001]
Perusahaan yang memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 50 orang atau lebih	0	T	[2.07.02.1.01.0001] [2.07.02.1.01.0003] [2.07.02.1.01.0004] [2.07.02.2.01.0003] [2.07.02.2.01.0001]

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 20/2008	0	T	[2.07.03.2.04.0001]
orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 20/2008 2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 20/2008 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 20/2008 4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih	1079	T	[2.07.02.1.01.0004] [2.07.02.2.01.0003]
Jumlah Perusahaan yang mendaftarkan Pekerjanya Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	458	T	[2.07.05.1.03.0005] [2.07.05.2.02.0005] [2.07.02.1.01.0001]

Perusahaan yang melaporkan ketenagakerjaan dalam sistem WLKP Online	0	T	[2.07.05.1.01.0001] [2.07.05.1.01.0002] [2.07.05.1.01.0003] [2.07.05.1.02.0001] [2.07.05.1.02.0002] [2.07.06.1.01.0001] [2.07.06.1.01.0003] [2.07.05.2.01.0001] [2.07.05.2.01.0002] [2.07.05.2.01.0003] [2.07.05.2.02.0001] [2.07.05.2.02.0002] [2.07.05.2.02.0005]
Petugas Antarkerja adalah petugas yang memiliki kompetensi melakukan kegiatan Antarkerja dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan Antarkerja	1	T	[2.07.04.1.01.0001] [2.07.04.2.01.0001]
Pekerja Migran Indonesia Purna adalah setiap warga negara Indonesia yang telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah Republik Indonesia	24	T	[2.07.04.1.04.0004] [2.07.04.2.04.0003]
Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan adalah setiap warga negara Indonesia yang sedang melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wiiayah Republik Indonesia	1	T	[2.07.04.1.04.0001] [2.07.04.1.04.0003] [2.07.04.2.04.0001] [2.07.04.2.04.0002]
Produktivitas tenaga kerja adalah rasio antara nilai PDRB dengan jumlah PYB yang digunakan baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi PYB dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dari proses kegiatan ekonomi pada suatu lapangan usaha secara nasional dan regional	0	T	[2.07.02.1.01.0001] [2.07.03.1.04.0001] [2.07.02.2.01.0001] [2.07.03.2.05.0001]
Sarana dan fasilitas utama terselenggaranya Pelatihan Kerja secara langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan Program Pelatihan Kerja	7	T	[2.07.03.1.01.0003] [2.07.03.1.01.0004] [2.07.03.2.01.0003] [2.07.03.2.01.0006] [2.07.03.2.01.0005]
Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain	0	T	[2.07.04.3.01.0006] [2.07.04.1.01.0006] [2.07.04.3.01.0005] [2.07.04.2.01.0004] [2.07.04.3.01.0008] [2.07.04.4.01.0008]
Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	27.301	T	[2.07.05.1.03.0005] [2.07.05.2.02.0005] [2.07.02.1.01.0001]

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.	0	T	[2.07.04.1.01.0005] [2.07.04.2.01.0005]
Validasi oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya terhadap pembayaran DKPTKA yang dilakukan oleh Pemberi Kerja	0	T	
Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk optimalisasi Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja yang diwujudkan dengan kesepakatan antar lembaga terkait	2	T	[2.07.03.1.01.0002] [2.07.03.2.01.0002]
Pengawasan terhadap Lembaga berbadan hukum PT (LPTKS dan Job Portal) dan Lembaga berbadan usaha (LPPRT) yang telah memperoleh ijin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri	0	T	[2.07.04.1.02.0002] [2.07.04.2.02.0002]
Pencari kerja yang mendapatkan layanan AKAD dan AKL untuk memperolehÂ pekerjaanÂ sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan baik untuk sementara waktu maupun tetap, sertaÂ pelayananÂ kepada pengguna tenagaÂ kerjaÂ untuk memperoleh tenagaÂ kerjaÂ yang sesuai dengan kebutuhannya	42	T	[2.07.04.1.01.0002] [2.07.04.1.01.0004] [2.07.04.1.01.0006] [2.07.04.3.01.0006] [2.07.04.3.01.0008] [2.07.04.3.01.0007] [2.07.04.2.01.0002] [2.07.04.2.01.0004] [2.07.04.3.01.0010] [2.07.04.4.01.0010] [2.07.04.3.01.0009] [2.07.04.4.01.0009]
Perusahaan yang terdaftar sebagai Lembaga berbadan hukum PT yang telah memperoleh ijin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri	0	T	[2.07.04.1.02.0001] [2.07.04.2.02.0001]

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025	Disabled	Info Sub Kegiatan
1	2.14.000001	Akseptor yang mendapat peningkatan Kesetaraan KB Pria	Orang	Daerah yang meningkatkan Kesertaan KB Pria	0	T	[2.14.03.2.03.0013] [2.14.04.2.01.0017] [2.14.04.2.01.0018] [2.14.04.2.01.0019] [2.14.04.2.01.0021] [2.14.04.2.01.0024] [2.14.04.2.01.0026] [2.14.04.2.02.0003] [2.14.03.2.02.0010]
2	2.14.000002	Akseptor yang telah mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Orang / Sertifikat	Daerah yang melaksanakan peningkatan kompetensi bagi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	0	T	[2.14.03.2.03.0015]
11	2.14.000022	Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Kegiatan	Terlaksananya Harmonisasi Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	0	T	[2.14.04.2.01.0023]
13	2.14.000025	Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kegiatan	Penyiapan Data Pendukung Perencanaan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1	T	[2.14.03.2.03.0005]
17	2.14.000030	Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Kegiatan	Daerah Melaksanakan Fasilitasi, Pembinaan, Pengembangan, dan Penguatan Pengasuhan 1000 HPK kepada Kab/Kota	0	T	[2.14.04.1.01.0017] [2.14.04.1.01.0028] [2.14.04.1.01.0040]
18	2.14.000034	Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	Daerah Menyediakan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Â 315 kader TPK	T	[2.14.04.2.01.0024]
19	2.14.000035	kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Orang	Daerah Melaksanakan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	0	T	[2.14.04.2.01.0019] [2.14.04.3.03.0003] [2.14.04.4.03.0003] [2.14.03.2.03.0022]
20	2.14.000036	kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	Daerah yang melaksanakan kegiatan penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	477	T	[2.14.03.2.02.0004]
22	2.14.000038	Kampung KB yang melaksanakan pengelolaan Program KKBPK (Bangga Kencana)	Kampung	Daerah yang melaksanakan dan mengelola Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berencana	17	T	[2.14.04.4.01.0018] [2.14.03.2.04.0005] [2.14.03.2.04.0006] [2.14.04.2.02.0005] [2.14.02.2.01.0039] [2.14.02.2.01.0041] [2.14.02.2.01.0036] [2.14.02.2.01.0035]
23	2.14.000040	Kampung KB yang telah menerima pembinaan	Kegiatan	Daerah yang melaksanakan Pembinaan Terpadu Kampung Keluarga Berkualitas	36	T	[2.14.04.4.01.0016] [2.14.04.4.01.0018] [2.14.03.2.04.0004] [2.14.02.1.01.0050] [2.14.02.1.01.0041] [2.14.02.2.01.0042] [2.14.02.2.01.0043] [2.14.02.1.01.0029] [2.14.02.1.01.0031] [2.14.02.1.01.0036] [2.14.02.2.01.0035]
25	2.14.000044	Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kelompok	Daerah Mengadakan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA, TAMASYA, GATI, GENTING)	0	T	[2.14.04.2.01.0026] [2.14.04.1.01.0036] [2.14.04.1.01.0038] [2.14.04.1.01.0039] [2.14.04.1.02.0012]
26	2.14.000045	Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kelompok	Daerah Membentuk Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) / Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	0	T	[2.14.04.3.01.0017] [2.14.04.4.01.0017] [2.14.04.2.01.0015] [2.14.04.2.01.0028] [2.14.04.2.02.0010] [2.14.04.2.01.0030] [2.14.04.2.01.0031] [2.14.04.1.02.0012]
39	2.14.000061	Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) yang telah terlaksana	Kegiatan	Daerah yang melaksanakan Mekanisme Operasional Program Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	11	T	[2.14.03.2.01.0011]
40	2.14.000063	Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang didayagunakan	Organisasi	Daerah Melaksanakan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	6	T	[2.14.04.2.02.0002] [2.14.04.2.02.0007]
43	2.14.000066	orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	Daerah yang melaksanakan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	0	T	[2.14.03.2.03.0014]
44	2.14.000067	orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang / Sertifikat	Daerah yang melaksanakan peningkatan Kesertaan Kelaurga Berencana Metode Konstrasepsi Jangka Panjang	3584	T	[2.14.03.2.03.0003] [2.14.03.1.02.0008]
45	2.14.000068	Orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Orang	Daerah yang melaksanakan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran, serta pendampingan Ibu Hamil/Pascasalin termasuk keluarga beresiko tinggi (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	0	T	[2.14.03.2.03.0016] [2.14.03.2.03.0017] [2.14.04.2.02.0006]
48	2.14.000071	orang yang telah mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Orang / Sertifikat	Daerah melaksanakan Pembinaan Peserta KB Pasca Pelayanan Kontrasepsi	0	T	[2.14.03.2.03.0007] [2.14.03.2.03.0026]
50	2.14.000073	Organisasi yang mendapatkan Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	Daerah yang meningkatkan penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	6	T	[2.14.03.2.04.0001] [2.14.03.2.03.0025]

51	2.14.000074	Organisasi yang mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	Daerah Melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	0	T	[2.14.04.2.02.0001]
52	2.14.000075	Organisasi yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	Daerah Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	0	T	[2.14.04.2.02.0003]
53	2.14.000077	Organisasi yang telah mendapatkan Pembinaan IMP dan Program KKBPK (Bangga Kencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Sertifikat / Kegiatan	Daerah yang IMPnya telah dibina dan daearah yang telah mendapatkan pembinaan Program Bangga Kencana di lini lapangan oleh PKB/PLKB	0	T	[2.14.03.2.02.0005]
54	2.14.000078	Organisasi yang telah menerima Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Organisasi	Daerah Melaksanakan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	0	T	[2.14.04.2.02.0004]
56	2.14.000086	Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Kegiatan	Pendidikan Jalur Informal yg Terimplementasi/Mengimplementasikan Pendidikan Kependudukan di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	0	T	[2.14.02.2.01.0016]
57	2.14.000087	Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Kegiatan	Pendidikan Jalur Formal dan Nonformal Terimplementasi / Mengimplementasikan Pendidikan Kependudukan.	0	T	[2.14.02.2.01.0019]
58	2.14.000089	Pemangku Kepentingan yang telah menerima Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan	Kegiatan	Memberikan/Melaksanakan Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Pengendalian Penduduk Kepada Pemangku Kepentingan	0	T	[2.14.02.2.01.0012] [2.14.02.2.01.0028] [2.14.02.2.02.0016]
59	2.14.000090	Pemangku Kepentingan yang telah menerima Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan	Kegiatan	Memberikan/Melaksanakan Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Pengendalian Penduduk Kepada Pemangku Kepentingan	7	T	[2.14.02.2.01.0013] [2.14.02.2.01.0030] [2.14.02.2.02.0016]
60	2.14.000091	Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) yang telah menerima Orientasi dan Pelatihan Teknis	Kegiatan	Daerah Melaksanakan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	0	T	[2.14.04.2.01.0021] [2.14.03.2.03.0022] [2.14.04.1.02.0012]
62	2.14.000094	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Kegiatan	Daerah Melaksanakan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	0	T	[2.14.02.2.01.0021]
63	2.14.000095	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Kegiatan	Daerah Melaksanakan Penguatan Program Kerjasama Pendidikan Jalur Formal, Nonformal, dan Informal	0	T	[2.14.02.2.01.0018]
65	2.14.000101	PIK-R yang telah mendapat/mengikuti Pengembangan & Perbanyakan Materi Substansi tentang PIK-R, Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Organisasi	Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) yang mendapatkan Pemenuhan Sarana Prasarana berupa Materi Substansi, Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya	0	T	[2.14.04.1.01.0018] [2.14.04.4.03.0001] [2.14.04.3.03.0001]
66	2.14.000104	Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah menerima pembinaan dan pengawasan pencatatan	Sertifikat	Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	0	T	[2.14.02.2.02.0018] [2.14.03.2.01.0008] [2.14.04.1.01.0037] [2.14.04.2.01.0032] [2.14.04.2.01.0035] [2.14.04.2.01.0036] [2.14.04.2.01.0037] [2.14.04.2.01.0038] [2.14.04.2.01.0043] [2.14.04.1.01.0041]
68	2.14.000107	Rapat Pengendalian Program KKBPK (Bangga Kencana) yang telah dilaksanakan	Kegiatan	Melaksanakan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	8	T	[2.14.02.2.01.0023]
72	2.14.000112	Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang telah terlaksanakan	Kegiatan	Daerah melaksanakan Sarasehan Hasil Pemutakhitan Data Keluarga	0	T	[2.14.02.2.01.0017]
73	2.14.000113	Satuan Pendidikan yang telah mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Kegiatan	Daerah Melaksanakan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	0	T	[2.14.02.2.01.0009] [2.14.02.2.01.0027]
74	2.14.000116	Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Kegiatan	Kab/Kota melaksanakan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	0	T	[2.14.02.2.01.0022] [2.14.02.2.01.0034] [2.14.02.2.01.0032] [2.14.02.1.01.0042] [2.14.02.1.01.0039] [2.14.02.1.01.0037]
75	2.14.000117	Tenaga pelayanan yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang / Sertifikat	Daerah yang meningkatkan kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	0	T	[2.14.03.2.03.0010]
76	2.14.000118	Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	Daerah Mengadakan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA, TAMASYA, GENTING, GATI, Sidaya)	10	T	[2.14.04.2.01.0018] [2.14.04.1.01.0036] [2.14.04.1.01.0038] [2.14.04.1.01.0039] [2.14.04.1.02.0012]
77	2.14.000119	Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB yang telah tersedia	Unit	Daerah melaksanakan pemenuhan sarana penunjang pelayanan KB sesuai jenis pelayanan yang diberikan	0	T	[2.14.03.2.03.0006] [2.14.04.3.03.0002] [2.14.04.4.03.0002] [2.14.03.2.03.0019] [2.14.03.2.03.0020] [2.14.04.2.01.0042]

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025	Disabled	Info Sub Kegiatan
1	2.08.000001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Kegiatan	Sarana antara lain lembaga layanan UPTD PPA, rumah aman	2	T	[2.08.03.1.03.0001] [2.08.03.2.03.0001]
2	2.08.000002	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan pengaduan	Orang	Layanan pengaduan terdiri dari layanan pengaduan korban langsung dan tidak langsung kewenangan provinsi	15	T	[2.08.07.2.02.0005] [2.08.07.2.02.0008] [2.08.07.2.02.0009] [2.08.07.2.02.0010] [2.08.07.2.02.0011] [2.08.07.2.02.0012] [2.08.07.2.02.0013] [2.08.07.2.02.0014] [2.08.07.2.02.0015]
3	2.08.000003	Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Meliputi advokasi dan pendampingan pemenuhan kriteria standarisasi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas khidup anak kewenangan kab/ kota yang mengacu pada pedoman teknis standarisasi yang ditetapkan oleh KPPPA	0	T	[2.08.06.2.02.0001] [2.08.06.2.01.0006] [2.08.06.2.01.0005] [2.08.06.2.01.0004] [2.08.06.2.01.0003]
4	2.08.000005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan	Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan audit (internal) PHA	1	T	[2.08.06.2.01.0002]
5	2.08.000006	Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	Dokumen data terpilah jenis kelamin, usia, dan disabilitas di tingkat kabupaten/kota	1	T	[2.08.05.2.01.0001] [2.08.05.2.01.0005] [2.08.05.2.01.0004]
6	2.08.000008	Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan	Dokumen	Meliputi : 1. penyadiaan, pengembangan, penyebarluasan informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, budaya, dan 2. pembentukan/ pendampingan Pusat Informasi Sahabat Perempuan (PRISMA) sesuai pedoman teknis yg ditetapkan 3. peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat kab/kota dalam penyediaan	0	T	[2.08.02.1.03.0006] [2.08.02.2.03.0003] [2.08.02.2.03.0006] [2.08.03.2.01.0007]
7	2.08.000009	Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	KIE dalam bentuk fisik dan elektronik pemenuhan hak anak	1	T	[2.08.06.2.02.0003]
8	2.08.000011	Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak	Dokumen	KIE dalam bentuk fisik dan elektronik kesetaraan gender di bidang polkum, sosbud, ekonomi	0	T	[2.08.04.1.01.0002] [2.08.04.2.01.0002]
9	2.08.000012	Dokumen penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen kerjasama antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitass hidup anak untuk melaksanakan layanan	1	T	[2.08.06.1.02.0005] [2.08.06.2.02.0004]
10	2.08.000013	Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen data atau profil gender dan anak dalam sistem satu data kabupaten/kota	1	T	[2.08.05.2.01.0002] [2.08.05.2.01.0003]
11	2.08.000015	DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	KIE dalam bentuk fisik dan elektronik perlindungan AMPK di tingkat kab/kota	0	T	
12	2.08.000017	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Kegiatan	Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan kekerasan terhadap perempuan di tingkat kabupaten/kota	1	T	[2.08.03.1.01.0001] [2.08.03.2.01.0001] [2.08.03.2.01.0006]
13	2.08.000018	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Kegiatan	Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas hidup anak di tingkat kabupaten/kota	0	T	[2.08.06.1.02.0002] [2.08.06.2.02.0002] [2.08.06.1.02.0007]
14	2.08.000019	Koordinasi dan Sinkronisasi PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG)	Kegiatan	Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan audit (internal) PUG	0	T	[2.08.02.1.01.0006] [2.08.02.2.01.0002] [2.08.02.2.01.0007]
15	2.08.000021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan	Meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat kabupaten/kota	1	T	[2.08.07.2.01.0004] [2.08.07.2.01.0006] [2.08.07.2.01.0003]
16	2.08.000023	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kegiatan	Kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK adalah kerjasama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, dan terpadu	1	T	[2.08.07.2.03.0009] [2.08.07.1.03.0003] [2.08.07.2.03.0007]
17	2.08.000024	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kegiatan	Pelatihan yang wajib diberikan antara lain KHA, manajeman kasus, standar pelayanan PPA, kebijakan perlindungan anak dan mediasi	1	T	[2.08.07.2.03.0004] [2.08.07.2.03.0008] [2.08.06.2.02.0009] [2.08.06.2.02.0008] [2.08.06.2.02.0005] [2.08.06.2.02.0006] [2.08.06.2.02.0007] [2.08.07.2.03.0012] [2.08.07.2.03.0014] [2.08.07.2.03.0013] [2.08.07.2.03.0011] [2.08.07.2.03.0010]
18	2.08.000025	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kegiatan	Sarana antara lain ruang ramah anak, ruang laktasi lembaga layanan AMPK UPTD PPA	1	T	[2.08.07.1.03.0008] [2.08.07.2.03.0006]
19	2.08.000026	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG)	Kegiatan	Meliputi harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, produk hukum daerah, dan kebijakan operasional tentang penyelenggaraan PUG kewenangan kab/kota	0	T	[2.08.02.1.01.0005] [2.08.02.2.01.0001] [2.08.02.2.01.0010]
20	2.08.000028	Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup Kabupaten/Kota	Layanan	Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang RG dan Hak Anak, antara lain ekonomi keluarga, pencegahan kekerasan, dan pengasuhan oleh lembaga penyedia layanan tingkat kabupaten/kota	1	T	[2.08.04.2.03.0001] [2.08.04.2.03.0002] [2.08.04.2.03.0003] [2.08.04.2.03.0006] [2.08.04.2.03.0004] [2.08.04.2.03.0005]

21	2.08.000029	layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	Layanan AMPK meliputi penerimaan laporan, pengelolaan kasus, penampungan sementara/Rumah Aman, pendampingan, mediasi, dan reintegrasi sosial kewenangan kabupaten/kota	1	T	[2.08.07.2.02.0006] [2.08.07.2.02.0007]
22	2.08.000031	Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan	Layanan	Layanan perempuan korban kekerasan meliputi penerimaan laporan, pengelolaan kasus, penampungan sementara/Rumah Aman, pendampingan, mediasi, dan reintegrasi sosial kewenangan kabupaten/kota	1	T	[2.08.03.1.02.0002] [2.08.03.2.02.0002] [2.08.03.2.02.0007] [2.08.03.2.02.0009] [2.08.03.2.02.0008] [2.08.03.2.02.0005] [2.08.03.2.02.0003] [2.08.03.2.02.0004] [2.08.03.2.02.0006]
23	2.08.000032	lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan	Lembaga	Meliputi advokasi dan pendampingan pemenuhan kriteria standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/ kota yang mengacu pada pedoman teknis standarisasi LPLPP yang ditetapkan oleh KPPPA	0	T	[2.08.02.2.03.0001] [2.08.02.2.03.0004] [2.08.02.2.03.0002] [2.08.02.2.03.0010] [2.08.02.2.03.0011] [2.08.03.2.03.0006] [2.08.03.2.03.0007] [2.08.03.2.03.0008] [2.08.02.2.03.0009] [2.08.02.2.03.0008] [2.08.02.2.03.0007] [2.08.03.2.03.0009]
24	2.08.000034	Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan	Lembaga	Pelaksanaan Bimtek Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang RG dan Hak Anak kepada Perangkat Daerah. lembaga yang memiliki Layanan Kualitas Keluarga merujuk pada Pedoman Standardisasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat mencakup penguatan kelembagaan, SDM, Sarana & Prasarana, KIE & Modul, Penyelenggaraan Layanan dan Sinergitas & Koordinasi tingkat daerah kab/kota.	1	T	[2.08.04.2.02.0001] [2.08.03.2.01.0003] [2.08.04.2.01.0004] [2.08.04.2.01.0005] [2.08.04.2.01.0006] [2.08.03.2.01.0004] [2.08.03.2.01.0005] [2.08.04.2.01.0007]
25	2.08.000036	organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabuputaen/Kota	Organisasi	Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupaten/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang polkum, sosbud, dan ekonomi	0	T	[2.08.02.2.02.0001] [2.08.02.2.02.0002] [2.08.02.2.02.0003] [2.08.02.2.02.0004] [2.08.02.2.02.0009] [2.08.02.2.02.0006] [2.08.02.2.02.0007] [2.08.02.2.02.0005] [2.08.02.2.02.0008] [2.08.02.2.02.0010]
26	2.08.000038	Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha	Organisasi	Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupaten/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak	0	T	[2.08.06.1.01.0003] [2.08.06.2.01.0001] [2.08.04.2.02.0004] [2.08.04.2.02.0007] [2.08.04.2.02.0008] [2.08.04.2.02.0006] [2.08.04.2.02.0005]
27	2.08.000039	organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	Advokasi dan pendampingan kepada organisasi masyarakat kewenangan kabupaten/kota perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	0	T	[2.08.07.2.01.0005] [2.08.07.2.01.0011] [2.08.07.2.01.0010] [2.08.07.2.01.0009] [2.08.07.2.01.0008] [2.08.07.2.01.0007]
28	2.08.000041	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas Keluarga	Kegiatan	Penguatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Kebijakan teknis peningkatan kualitas keluarga dapat diilakukan melalui pertemuan koordinasi, bimtek dan kegiatan lainnya dengan melibatkan Forum PUSPA, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Akademisi, LPDU, Media dan Komponen Masyarakat lainnya tingkat daerah kab/kota	1	T	[2.08.04.1.01.0003] [2.08.04.2.01.0003]
29	2.08.000042	Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kegiatan	Kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK adalah kerjasama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, dan terpadu	0	T	[2.08.07.2.03.0005]
30	2.08.000043	Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Kegiatan	Rekomendasi Kebijakan terkait Penguatan Jejaring Antar Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/kota dapat diperoleh dari pertemuan koordinasi, kegiatan teknis lainnya berupa saran/masukan terkait kebutuhan kolaborasi dan sinergitas layanan kualitas keluarga Kewenangan Kab/Kota.	0	T	[2.08.04.1.02.0003] [2.08.04.2.02.0003]
31	2.08.000044	Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Kegiatan	Kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan adalah kerjasama untuk perlindungan khusus anak secara cepat, komprehensif, dan terpadu	0	T	[2.08.03.1.03.0004] [2.08.03.2.03.0004]
32	2.08.000045	Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	Pendampingan pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan Kualitas Keluarga dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan PPPA kepada perangkat daerah terkait di Kab/Kota sesuai kebutuhan, seperti penyusunan dokumen PPRG dengan baseline IKK/ data pembangunan keluarga lain atau pelaksanaan teknis lainnya.	0	T	[2.08.04.2.01.0001]
33	2.08.000047	Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Perangkat Daerah	Advokasi dan pendampingan pelaksanaan layanan perlindungan perempuan yang dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan PPPA kepada perangkat daerah terkait di Kab/Kota sesuai kebutuhan, seperti koordinasi, penguatan jejaring, dan pengembangan kapasitas SDM dan kelembagaan	0	T	[2.08.03.1.01.0002] [2.08.03.2.01.0002]
34	2.08.000048	Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Perangkat Daerah	Meliputi : (1) Diseminasi kebijakan penyelenggaraan PUG meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan, kepada pemangku dan (2) penguatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan PUG	0	T	[2.08.02.2.01.0004] [2.08.02.2.01.0008] [2.08.02.2.01.0005]

35	2.08.000049	Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	Meliputi : (1) advokasi penguatan bimbingan teknis dalam rangka optimalisasi fungsi dan peran kelembagaan PUG (Pokja, Focal Point, Gender Champion, Tim ARG, Tim Driver); (2) pendampingan PUG dalam perencanaan dan penganggaran daerah yg responsif gender, serta PUG dalam pengawasan di daerah	0	T	[2.08.02.2.01.0013] [2.08.02.2.01.0014] [2.08.02.2.01.0011] [2.08.02.2.01.0003] [2.08.02.2.01.0006]
36	2.08.000051	Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	Pemberian layanan sesuai kebutuhan spesifik perempuan dalam kondisi khusus antara lain bencana, konflik, dan pengungsi kewenangan kabupaten/kota	0	T	[2.08.03.2.03.0003]
37	2.08.000054	perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat	Orang	Layanan pengaduan terdiri dari layanan pengaduan korban langsung dan tidak langsung kewenangan kabupaten/kota	4	T	[2.08.03.2.02.0001] [2.08.03.2.02.0015]
38	2.08.000055	SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	Meliputi: Sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, workshop, pendampingan kepada LPLPP tingkat kab/kota dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan jumlah perempuan pelopor &SIAP& yang memiliki kemampuan sebagai fasilitator/champion dan pelopor aksi nyata di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	0	T	[2.08.02.2.03.0002]
39	2.08.000057	SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	Meliputi: Sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, workshop, pendampingan layanan penanganan perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	0	T	[2.08.03.2.03.0002]
40	2.08.000059	SDM penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	Pelatihan yg diberikan kepada SDM lembaga penyedia layanan kualitas keluarga, fasilitator dan konselor keluarga dapat merujuk pada Pedoman bagi SDM Lembaga Layanan Kualitas Keluarga yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang mencakup substansi pada indikator kualitas keluarga atau permasalahan keluarga lainnya dalam rangka mewujudkan KG dan hak anak tingkat daerah kab/kota.	0	T	[2.08.04.2.02.0002]
41	2.08.000061	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kegiatan	Meliputi : (1) Diseminasi kebijakan penyelenggaraan PUG meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan, kepada pemangku dan (2) penguatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan PUG	1	T	[2.08.02.1.02.0003] [2.08.02.2.02.0001] [2.08.02.2.01.0012]
42	2.08.000067	Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Lembaga		1	T	[2.08.03.2.03.0005]

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025	Disabled	Info Sub Kegiatan
1	2.16.000067	Nama Domain Pemerintah Daerah	Domain	-Merupakan perhitungan Jumlah Nama Domain Pemerintah Daerah - Nama Domain Pemerintah Daerah adalah alamat resmi pemerintah daerah, layanan publik/layanan administrasi pemerintahan, atau layanan kegiatan berskala nasional/internasional yang telah didaftarkan dan menggunakan Nama Domain .go.id	1	T	[2.16.03.1.01.0004] [2.16.03.2.01.0004]
2	2.16.000068	Nama Sub Domain Pemerintah Daerah		-Merupakan perhitungan Jumlah Sub Domain Pemerintah Daerah - Nama Sub Domain Pemerintah Daerah adalah penggunaan nama sub domain dari domain .go.id pemerintah daerah yang digunakan oleh seluruh perangkat daerah, termasuk layanan SPBE dan kegiatan di daerah	11	T	[2.16.03.1.01.0004] [2.16.03.2.01.0004]
3	2.16.000069	Nama Domain Pemerintah Desa	Domain	- Merupakan perhitungan Jumlah Nama Domain Pemerintah Desa - Nama Domain Pemerintah Desa adalah alamat resmi pemerintah desa yang telah didaftarkan dan menggunakan Nama Domain .desa.id (contoh: mekarsari.desa.id)	19	T	[2.16.03.2.01.0004]
4	2.16.000070	Rancangan Kebijakan domain arsitektur infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah		- Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait domain infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah - Domain arsitektur infrastruktur adalah bagian dari arstitektur SPBE Pemda yang secara detail membahas terkait infrastruktur SPBE yang digunakan dan/atau dibangun Pemda - Arsitektur SPBE pemerintah daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. - Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka	2	T	[2.16.03.1.02.0015] [2.16.03.1.02.0034] [2.16.03.2.02.0018] [2.16.03.2.02.0037]
5	2.16.000071	Rancangan Kebijakan domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah		- Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah - Domain arsitektur aplikasi adalah bagian dari arstitektur SPBE Pemda yang secara detail membahas terkait aplikasi SPBE yang digunakan, dibangun dan/atau dikembangkan Pemda - Arsitektur SPBE pemerintah daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. - Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	1	T	[2.16.03.1.02.0015] [2.16.03.1.02.0034] [2.16.03.2.02.0018] [2.16.03.2.02.0037]
6	2.16.000072	Rancangan Kebijakan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah		-Jumlah perhitungan rancangan kebijakan terkait peta rencana SPBE Pemerintah Daerah - Peta Rencana SPBE pemerintah daerah adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di pemerintah daerah. - Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,	1	T	[2.16.03.1.02.0015] [2.16.03.1.02.0034] [2.16.03.2.02.0018] [2.16.03.2.02.0037]
7	2.16.000073	Rancangan Kebijakan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah		- Perhitungan Jumlah Rancangan Kebijakan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah -Rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah tersebut telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah. - Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah masing-masing. - Dinas mengkoordinasikan dan memberikan rekomendasi rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang anggaran dan keuangan daerah	1	T	[2.16.03.1.02.0022] [2.16.03.1.02.0034] [2.16.03.2.02.0022] [2.16.03.2.02.0037]

8	2.16.000074	Penyusunan proses bisnis di Lingkungan Dinas Kominfo		-Perhitungan Jumlah proses bisnis di Lingkungan Dinas Kominfo yang telah disusun - Proses Bisnis yang dimaksud terbatas hanya di lingkungan Dinas Kominfo -Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing - Penyusunan Proses Bisnis berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah	1	T	[2.16.03.1.02.0034] [2.16.03.2.02.0037]
9	2.16.000075	Data dan informasi dibagipakaikan	Data	- Jumlah perhitungan Data informasi yang dibagipakaikan - Data dan Informasi yang dibagipakaikan adalah Data dan informasi Pemerintah Daerah mencakup semua jenis Data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha,	0	T	[2.16.03.1.02.0013] [2.16.03.1.02.0021] [2.16.03.2.02.0017] [2.16.03.2.02.0039] [2.16.03.2.02.0025]
10	2.16.000076	Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Aplikasi	-Perhitungan Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional - Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE. - Pusat Data nasional merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung - Pusat Data nasional terdiri atas Pusat Data yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi	0	T	[2.16.03.1.02.0020] [2.16.03.2.02.0013]
11	2.16.000077	Pusat Data Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari Pusat Data Nasional	Unit	-Perhitungan Pusat Data Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari Pusat Data Nasional - Pusat Data yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah	0	T	[2.16.03.1.02.0020] [2.16.03.2.02.0013]
12	2.16.000078	Pusat komputasi yang terhubung dengan Pusat Data Nasional	Unit	-Perhitungan Jumlah Pusat komputasi yang terhubung dengan Pusat Data Nasional - Pusat Komputasi adalah Pusat Komputasi adalah fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu. - Pusat Komputasi terdiri dari laboratorium komputer, ruang server farm, dan workstation farm.	0	T	[2.16.03.1.02.0029] [2.16.03.1.02.0037] [2.16.03.2.02.0016] [2.16.03.2.02.0033]
13	2.16.000079	Pusat pusat kendali yang terhubung dengan Pusat Data Nasional	Unit	-Perhitungan Jumlah Pusat kendali yang terhubung dengan Pusat Data Nasional - Pusat kendali adalah Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkunean sistem - Pusat kendali adalah Pusat Kendali terdiri dari Network Operation Center, Data Operation Center, Command/Operation Center, Security Operation Center, dan Emergency Operation Center.	0	T	[2.16.03.1.02.0029] [2.16.03.1.02.0037] [2.16.03.2.02.0016] [2.16.03.2.02.0033]
14	2.16.000080	Pusat komputasi yang diselenggarakan pemerintah daerah	Unit	-Perhitungan Jumlah Pusat komputasiyang diselenggarakan pemerintah daerah	0	T	[2.16.03.1.02.0037] [2.16.03.1.02.0020] [2.16.03.2.02.0033] [2.16.03.2.02.0013]
15	2.16.000081	Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah	Unit	-Perhitungan Jumlah Pusat kendali yang diselenggarakan pemerintah daerah	0	T	[2.16.03.1.02.0020] [2.16.03.1.02.0037] [2.16.03.2.02.0033] [2.16.03.2.02.0013]
16	2.16.000083	Perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	-Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota - Dinas di tingkat Pemerintah Daerah kabupaten/kota menghubungkan jaringan di dalam Pemerintah Daerah kabupaten/kota. - Perangkat daerah yang dimaksud adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan	27	T	[2.16.03.2.02.0024]
17	2.16.000085	Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah	-Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan pemerintah daerah - Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah - Perangkat daerah yang dimaksud adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	0	T	[2.16.03.1.02.0014] [2.16.03.1.02.0036] [2.16.03.1.02.0021] [2.16.03.2.02.0021] [2.16.03.2.02.0034] [2.16.03.2.02.0025]

18	2.16.000086	Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	-Perhitungan Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah - Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah. - Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan olehPemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah	0	T	[2.16.03.1.02.0014] [2.16.03.1.02.0036] [2.16.03.1.02.0021] [2.16.03.2.02.0021] [2.16.03.2.02.0034] [2.16.03.2.02.0025]
19	2.16.000087	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Aplikasi	- Keterhubungan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan SPLP - Sistem Penghubung Layanan Pemerintah merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah diselenggarakan oleh Kementerian	0	T	[2.16.03.1.02.0014] [2.16.03.1.02.0036] [2.16.03.1.02.0021] [2.16.03.2.02.0021] [2.16.03.2.02.0034] [2.16.03.2.02.0025]
20	2.16.000088	Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda		- Perhitungan Jumlah Kapasitas Kecepatan bandwidth yang tersedia di Pemda - Kapasitas kecepatan bandwith adalah kapasitas kecepatan jaringan yang disediakan oleh penyedia layanan internet untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik	10	T	[2.16.03.1.02.0026] [2.16.03.1.02.0032] [2.16.03.2.02.0030] [2.16.03.2.02.0036]
21	2.16.000089	Perangkat Daerah yang memiliki akses internet	Perangkat Daerah	- Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki akses internet - Penyediaan akses internet menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	27	T	[2.16.03.1.02.0026] [2.16.03.1.02.0032] [2.16.03.2.02.0030] [2.16.03.2.02.0036]
22	2.16.000090	Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	-Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas - Penyediaan akses internet menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - Penyediaan layanan akses internet terhadap fasilitas layanan dasar yang mejadi kewenangan Provinsi (SMA/SMK/SLB, RSUD) / Kabupaten/Kota (SD/SMP,Puskesmas) dengan kualitas layanan dan keamanan jaringan internet yang sama merata baik di kota besar	27	T	[2.16.03.1.02.0026] [2.16.03.1.02.0032] [2.16.03.2.02.0030] [2.16.03.2.02.0036]
23	2.16.000091	Area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Titik	- Perhitungan area publik yang memiliki akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (Titik Lokasi) - Dinas Kominfo melakukan penyediaan internet di area publik dengan penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - Area publik tersebut antara lain jalan, pedestrian, taman lingkungan, plaza, lapangan olahraga, taman kota, taman rekreasi, dan lain-lain. - Daerah menyelenggarakan Infrastruktur Pasif sesuai PP 46 Tahun 2021	2	T	[2.16.03.1.02.0026] [2.16.03.1.02.0032] [2.16.03.2.02.0030] [2.16.03.2.02.0036]
24	2.16.000092	Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh pemerintah daerah	Aplikasi	-Perhitungan Jumlah Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan pemerintah daerah. - Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat atau Pemerintah Daerah lain	13	T	[2.16.03.1.02.0017] [2.16.03.1.02.0033] [2.16.03.1.02.0021] [2.16.03.2.02.0020] [2.16.03.2.02.0032] [2.16.03.2.02.0025]
25	2.16.000093	Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Kominfo	Aplikasi	Perhitungan Jumlah Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Komdigi melalui mekanisme Pendaftaran PSE Lingkup Publik	0	T	[2.16.03.1.02.0017] [2.16.03.1.02.0033] [2.16.03.1.02.0021] [2.16.03.2.02.0020] [2.16.03.2.02.0032] [2.16.03.2.02.0025]
26	2.16.000094	Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	Aplikasi	-Perhitungan aplikasi umum yang telah dimanfaatkan - Aplikasi Umum adalah aplikasi pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh KemenPAN-RB	12	T	[2.16.03.1.02.0027] [2.16.03.1.02.0033] [2.16.03.1.02.0021] [2.16.03.2.02.0029] [2.16.03.2.02.0032] [2.16.03.2.02.0025]

27	2.16.000095	Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	-Perhitungan Jumlah layanan Pemda yang memanfaatkan Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Pemda -Portal Pelayanan Publik portal pelayanan publik Pemerintah Daerah yang terdiri atas semua pelayanan publik di setiap pemerintah daerah provinsi dan semua pemerintah daerah kabupaten/kota di dalam provinsi tersebut. -Portal Administrasi Pemerintahan merupakan portal yang mengintergasikan layanan administrasi pemerintahan yang mencakup bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. - Portal data nasional merupakan pintu gerbang transparansi pemerintah melalui keterbukaan dan pertukaran data antar instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat	27	T	[2.16.03.1.02.0021] [2.16.03.2.02.0025]
28	2.16.000096	Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda	Layanan	-Jumlah Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda - Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.	0	T	[2.16.03.1.02.0021] [2.16.03.2.02.0025]
29	2.16.000097	Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda	Layanan	-Jumlah Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda - Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.	4	T	[2.16.03.1.02.0021] [2.16.03.2.02.0025]
30	2.16.000098	SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda	Surat Keputusan	-Perhitungan Jumlah SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda - Dokumen tersebut antara lain SK	1	T	[2.16.03.1.02.0016] [2.16.03.2.02.0015]
31	2.16.000099	Server yang dikelola pemerintah daerah	Unit	Jumlah server yang dikelola pemerintah daerah	0	T	[2.16.03.1.02.0016] [2.16.03.2.02.0015]
32	2.16.000100	Utilisasi server yang dikelola pemerintah daerah	Persentase	persentase penggunaan server pemerintah daerah dibandingkan dengan kapasitas total server pemerintah daerah	0	T	[2.16.03.1.02.0016] [2.16.03.2.02.0015]
33	2.16.000101	Perangkat keras media penyimpanan TIK yang dikelola pemerintah daerah	Unit	- jumlah data storage yang digunakan pemerintah daerah - Perangkat keras media penyimpanan TIK adatah data sotrage yang dapat diakses dengan metode akses data sharing Direct Attached Storage/DAS atau Network Attached Storage/NAS	0	T	[2.16.03.1.02.0016] [2.16.03.2.02.0015]
34	2.16.000102	Perangkat keras jaringan TIK yang dikelola pemerintah daerah	Unit	- Jumlah perangkat keras jaringan TIK yang digunakan pemerintah daerah - Perangkat keras jaringan TIK adalah jenis jaringan TIK yang terdiri dari Network/Communication Device yang digunakan (Switch L2, Switch L3, Switch L4, Switch L7, Multilayer Switch, Router, Wireless equipment, atau Transmission equipment)	1	T	[2.16.03.1.02.0016] [2.16.03.2.02.0015]
35	2.16.000103	Perangkat keras keamanan TIK yang dikelola pemerintah daerah	Unit	- Jumlah perangkat keras keamanan TIK yang digunakan pemerintah daerah - Perangkat keras keamanan TIK adalah perangkat keamanan TIK yang memiliki jenis dari security device (Firewall, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System, Proxy, Load Balancer, Wireless Intrusion Prevention and Detection System, Unified Threat Management, atau Network Access Control)	0	T	[2.16.03.1.02.0016] [2.16.03.2.02.0015]
36	2.16.000104	Perangkat keras pheripheral TIK yang dikelola pemerintah daerah	Unit	- Jumlah perangkat keras peripheral TIK yang digunakan pemerintah daerah. - Perangkat keras peripheral TIK adalah perangkat pendukung TIK yang memiliki jenis dari Periferal Input, Output, Input/Output	0	T	[2.16.03.1.02.0016] [2.16.03.2.02.0015]
37	2.16.000105	Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBE	Dokumen	-jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBE -Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE	0	T	[2.16.03.1.02.0023] [2.16.03.1.02.0034] [2.16.03.2.02.0019] [2.16.03.2.02.0037]

38	2.16.000106	Dokumen Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE	Dokumen	- jumlah dokumen Manajemen Layanan SPBE - Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE	0	T	[2.16.03.1.02.0023] [2.16.03.1.02.0034] [2.16.03.2.02.0019] [2.16.03.2.02.0037]
39	2.16.000107	SDM Pemda yang memiliki latar belakang dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang TIK	Orang	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang Sistem Elektronik atau Teknologi Informasi	1	T	[2.16.03.1.02.0023] [2.16.03.1.02.0034] [2.16.03.2.02.0019] [2.16.03.2.02.0037]
40	2.16.000108	Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas		- Perhitungan jumlah Pedoman Penyelenggaraan Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas -Pedoman Program Kota Cerdas merupakan pedoman program konsep pengelolaan kota/kabupaten berkelanjutan dan berdaya saing yang dibangun untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih aman, lebih mudah, lebih sehat, dan lebih makmur dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan komunikasi serta inovasi yang diarahkan untuk perbaikan kinerja, meningkatkan efisiensi, dan melibatkan partisipasi masyarakat.	0	T	[2.16.03.2.02.0027]
41	2.16.000109	Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	Inovasi	- Perhitungan jumlah Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas -Inovasi Program Kota Cerdas merupakan perubahan cara,metode, teknologi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program atau layanan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan dampak positif kepada masyarakat	0	T	[2.16.03.3.02.0014] [2.16.03.4.02.0013] [2.16.03.4.02.0014] [2.16.03.3.02.0013] [2.16.03.2.02.0027]
42	2.16.000110	Pengguna SPBE yang mendapatkan literasi SPBE	Orang	-Perhitungan Jumlah pengguna SPBE yang mengikuti Promosi Literasi SPBE - Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE	0	T	[2.16.03.1.02.0028] [2.16.03.3.01.0015] [2.16.03.4.01.0015] [2.16.03.1.02.0035] [2.16.03.2.02.0028] [2.16.03.3.02.0015] [2.16.03.4.02.0015] [2.16.03.2.02.0035]
43	2.16.000111	Audit TIK internal	Dokumen	-Jumlah dokumen Audit TIK internal - audit TIK internal dilaksanakan secara periodik oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi pengawasan internal dan dapat melibatkan pegawai Aparatur Sipil Negara dari unit kerja lain yang memiliki kompetensi Audit TIK	0	T	[2.16.03.1.02.0024] [2.16.03.1.02.0034] [2.16.03.2.02.0026] [2.16.03.2.02.0037]
44	2.16.000112	Audit TIK eksternal	Dokumen	-Jumlah dokumen Audit TIK eksternal - Pelaksanaan Audit TIK mengacu kepada PM Kominfo Nomor 16 tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit TIK	0	T	[2.16.03.1.02.0024] [2.16.03.1.02.0034] [2.16.03.2.02.0026] [2.16.03.2.02.0037]
45	2.16.000113	Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Orang	-Merupakan perhitungan jumlah orang yang terpapar informasi - Khalayak yang terpapar informasi adalah orang yang mendapatkan informasi terkait Peraturan bidang IKP	93.826	T	[2.16.02.1.01.0017] [2.16.02.2.01.0018]
46	2.16.000114	Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor	Aduan	- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor - Pengaduan Masyarakat adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan	102	T	[2.16.02.1.01.0023] [2.16.02.2.01.0019]
47	2.16.000115	Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR	Aduan	- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat - Pengaduan masyarakat tersebut dapat dihitung dari aduan yang masuk melalui kanal antara lain misalnyamedia resmi pemerintah daerah (Misalnya Twiter, IG, FB, Website, dll)	0	T	[2.16.02.1.01.0023] [2.16.02.2.01.0019]
48	2.16.000116	Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah	Kanal	- Perhitungan Jumlah pengaduan Masyarakat - Pengaduan masyarakat tersebut dapat dihitung dari aduan yang masuk melalui kanal antara lain misalnyamedia resmi pemerintah daerah (Misalnya Twiter, IG, FB, Website, dll)	3	T	[2.16.02.1.01.0023] [2.16.02.2.01.0019] [2.16.02.2.01.0028] [2.16.02.1.01.0032]
49	2.16.000117	Frekuensi laporan Isu publik yang dipantau	Laporan	1. Laporan Isu publik memuat isu sektoral yang sedang berkembang di masyarakat dengan kategorisasi isu: Polhukam, PMK, Perekonomian, Maritim dan Investasi 2. Mengolah isu publik dengan penerapan analisis: sentimen, situasional analysis, dll 3. Menyusun Rekomendasi komunikasi bagi pimpinan 4. Menyusun agenda setting komunikasi publik Pemda dan mengusulkan agenda komunikasi yang menjadi prioritas 5. Satuan dimaksud	1	T	[2.16.02.1.01.0023] [2.16.02.2.01.0019]

50	2.16.000120	Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Dokumen	-Perhitungan Jumlah strategi komunikasi publik yang disusun - strategi komunikasi memuat: a. tujuan komunikasi b. analisis situasi lingkungan internal dan c. pemetaan isu dan pemangku d. Perancangan program komunikasi e. Pelaksanaan program komunikasi publik berdasarkan waktu yang telah f. evaluasi program komunikasi publik. Dalam hal terjadi komunikasi krisis maka penanganannya sesuai SOP komunikasi krisis	0	T	[2.16.02.1.01.0019] [2.16.02.2.01.0022]
51	2.16.000121	Komunikasi krisis yang telah dikelola	Laporan	-Jumlah komunikasi krisis yang telah dikelola -Komunikasi krisis merupakan komunikasi yang betujuan untuk menangani isu yang berdampak negatif terhadap reputasi atau citra lembaga Pemerintah Daerah - Satuan laporan yang diamksud adalah laporan kasus	0	T	[2.16.02.1.01.0019] [2.16.02.2.01.0022]
52	2.16.000122	Prosedur penanganan komunikasi krisis	SOP	Prosedur penanganan komunikasi krisis yang diperbaharui minimal 1 tahun sekali dengan mengacu pada panduan nasional	0	T	[2.16.02.1.01.0019] [2.16.02.2.01.0022]
53	2.16.000124	Konten Foto	Konten Digital	- Perhitungan Jumlah konten foto - Konten Foto adalah konten hasil tangakapan kamera	523	T	[2.16.02.1.01.0015] [2.16.02.2.01.0023]
54	2.16.000125	Konten Teks	Konten	- Perhitungan Jumlah konten teks - Konten Teks adalah konten berisikan karya tulis yang menghadirkan informasi di dalamnya	0	T	[2.16.02.1.01.0015] [2.16.02.2.01.0023]
55	2.16.000126	Konten Grafis	Konten	- Perhitungan Jumlah konten grafis - Konten Grafis adalah konten berupa karya visual	51	T	[2.16.02.1.01.0015] [2.16.02.2.01.0023]
56	2.16.000127	Konten Audio Video	Konten	- Perhitungan Jumlah konten audio visual - Konten Audio Visual adalah konten dari kombinasi suara dan juga visual yang digunakan untuk menayangkan sebuah informasi atau konteks yang diinginka	91	T	[2.16.02.1.01.0015] [2.16.02.2.01.0023]
57	2.16.000128	Konten Audio	Konten	- Perhitungan Jumlah konten foto - Konten Audio adalah konten berbentuk suara yang bisa di dengarkan	0	T	[2.16.02.1.01.0015] [2.16.02.2.01.0023]
58	2.16.000129	Konten digital yang menggunakan bahasa setempat	Konten	-Jumlah Konten digital yang di produksi dengan menggunakan bahasa setempat untuk berinteraksi - Konten digital yang di produksi dengan menggunakan bahasa setempat/dialek setempat untuk berinteraksi	0	T	[2.16.02.1.01.0015] [2.16.02.1.01.0020] [2.16.02.2.01.0023] [2.16.02.2.01.0016]
59	2.16.000130	Pertemuan tatap muka	Kegiatan	- Perhitungan Jumlah pertemuan tatap muka - Pertemuan tersebut dilakukan secara langsung antara pemberi dan penerima informasi (misal: melalui forum)	1	T	[2.16.02.2.01.0020] [2.16.02.1.01.0018]
60	2.16.000131	Diseminasi melalui Media Berbayar	Kegiatan	- Perhitungan Jumlah diseminasi melalui Media Berbayar - Media Berbayar adalah Media Komunikasi Publik yang penggunaannya menggunakan skema berbayar	0	T	[2.16.02.2.01.0020] [2.16.02.1.01.0018]
61	2.16.000132	Diseminasi melalui Earned Media	Kegiatan	&-Perhitungan jumlah diseminasi melalui earned media - Earned media adalah media yang memiliki konten yang secara sukarela dipublikasikan di platform oleh orang lain - Contoh: postingan ulang diseminasi di akun media sosial masyarakat, review/komentar masyarakat, liputan media (media coverage), dan rekomendasi dari mulut ke mulut (word of mouth)	232	T	[2.16.02.2.01.0020] [2.16.02.1.01.0018]
62	2.16.000133	Diseminasi melalui shared media	Kegiatan	- Perhitungan Jumlah diseminasi melalui shared media - Shared media adalah media tidak berbayar , termasuk media sosial populer seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dll	247	T	[2.16.02.2.01.0020] [2.16.02.1.01.0018]
63	2.16.000134	Diseminasi melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Kegiatan	- Perhitungan Jumlah diseminasi melalui Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah - Media Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yaitu saluran informasi yang digunakan dalam proses komunikasi publik baik secara langsung maupun tidak langsung dan dikelola oleh Pemerintah Daerah	16	T	[2.16.02.2.01.0020] [2.16.02.1.01.0018]
64	2.16.000135	Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal	Orang	& - Jumlah Khalayak yang terpapar informasi publik melalui semua kanal - Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan perangkat daerah lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. - Khalayak yang terpapar melalui tatap muka dihitung berdasarkan dari jumlah orang yang	93.826	T	[2.16.02.2.01.0020] [2.16.02.1.01.0018]

65	2.16.000136	Media cetak yang dikelola Pemda	Media	-Perhitungan Jumlah Media cetak yang dimiliki dan dikelola Pemda - Media cetak adalah suatu wadah tertulis yang dibuat dengan cara dicetak. Contoh iklan jenis ini antara lain seperti surat kabar, majalah, koran, tabloid, dan lain sebagainya.	0	T	[2.16.02.1.01.0024] [2.16.02.1.01.0018] [2.16.02.2.01.0021] [2.16.02.2.01.0020]
66	2.16.000138	Saluran TV yang dikelola pemda	Saluran	-Perhitungan Jumlah Saluran TV yang dikelola pemda	0	T	[2.16.02.1.01.0024] [2.16.02.1.01.0018] [2.16.02.2.01.0021] [2.16.02.2.01.0020]
67	2.16.000140	Radio milik Pemerintah Daerah	Radio	Perhitungan jumlah Radio milik Pemerintah Daerah	0	T	[2.16.02.1.01.0024] [2.16.02.1.01.0018] [2.16.02.2.01.0021] [2.16.02.2.01.0020]
68	2.16.000142	Media Online yang dikelola oleh Pemda	Media	Perhitungan jumlah Media Online yang dikelola oleh Pemda	6	T	[2.16.02.1.01.0024] [2.16.02.1.01.0018] [2.16.02.2.01.0021] [2.16.02.2.01.0020]
69	2.16.000143	Akun media sosial yang dikelola oleh Pemda		Perhitungan jumlah akun media sosial di seluruh Perangkat Daerah Pemda	6	T	[2.16.02.1.01.0024] [2.16.02.1.01.0014] [2.16.02.2.01.0021] [2.16.02.2.01.0014]
70	2.16.000144	Siaran pers yang dibuat	Siaran Pers	-Jumlah Siaran Pers yang dibuat -Siaran pers merupakan ulisan ataupun rekaman yang ditujukan langsung pada media dengan tujuan untuk mengumumkan sesuatu yang memiliki nilai berita agar terpublikasi di media massa	0	T	[2.16.02.1.01.0014] [2.16.02.2.01.0014]
71	2.16.000145	Siaran pers yang dimuat di media	Siaran Pers	Jumlah Siaran pers yang dimuat di media	0	T	[2.16.02.1.01.0014] [2.16.02.2.01.0014]
72	2.16.000146	Komunitas Informasi Masyarakat	Komunitas	-Jumlah Komunitas Infornasi Masyarakat (KIM) yang terdaftar di platform digital kim.id - KIM meliputi: a. komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pengelolaan dan diseminasi dan/atau b. komunitas yang memiliki aktivitas di bidang pemberdayaaan masyarakat serta melakukan pengelolaan dan diseminasi informasi	0	T	[2.16.02.1.01.0021] [2.16.02.2.01.0015]
73	2.16.000148	Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	-Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan -Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan perangkat daerah lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.	0	T	[2.16.02.1.01.0022] [2.16.02.2.01.0017]
74	2.16.000149	Informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	Informasi	- Perhitungan Jumlah Informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah - Informasi berkala adalah nformasi yang diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali	376	T	[2.16.02.1.01.0022] [2.16.02.2.01.0017]
75	2.16.000150	Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	Informasi	- Perhitungan Jumlah Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah - Informasiserta merta adalah informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan wajib diumumkan secara serta merta tanpa penundaan	2	T	[2.16.02.1.01.0022] [2.16.02.2.01.0017]
76	2.16.000151	Informasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	Informasi	Informasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	416	T	[2.16.02.1.01.0022] [2.16.02.2.01.0017]
77	2.16.000152	SDM Pemda yang memiliki latar belakang di bidang Komunikasi Publik	Orang	Jumlah SDM Pemda yang memiliki latar belakang Bidang komunikasi publik	7	T	[2.16.02.1.01.0016] [2.16.02.2.01.0024]
78	2.16.000153	SDM Pemda yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang Komunikasi Publik	Orang	Jumlah SDM Pemda yang memiliki sertifikasi kompetensi di Bidang komunikasi publik	4	T	[2.16.02.1.01.0016] [2.16.02.2.01.0024]
79	2.16.000154	Laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Laporan	-Jumlah Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika -Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi meliputi fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan b. penyediaan dukungan administratif pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa Informasi c. pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan dan d. penyiapan bahan dokumentasi	0	T	[2.16.02.1.01.0020] [2.16.02.1.01.0022] [2.16.02.2.01.0016] [2.16.02.2.01.0017]
80	2.16.000155	Pengaturan relasi media	Perda/Perkada	- Perhitungan Pengaturan relasi media - Pengaturan relasi media mengacu pada UU Pers, aturan Dewan Pers -Ruang lingkup Perkada minimal mencakup pendaftaran media dan/atau jurnalis oleh Dinas Kominfo berdasarkan kriteria: terverifikasi, terdaftar di Dewan Pers	16	T	[2.16.02.1.01.0014] [2.16.02.2.01.0014]
81	2.16.000158	Perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Perangkat Daerah	-Jumlah Perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas -Sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas merupakan kegiatan literasi tentang pembangunan kota/kabupaten cerdas bagi seluruh aparatur negara (ASN),masyarakat, pelaku usaha yang berada pada suatu	0	T	[2.16.03.2.02.0023] [2.16.03.3.02.0013] [2.16.03.3.02.0014] [2.16.03.4.02.0013] [2.16.03.4.02.0014] [2.16.03.2.02.0038]

82	2.16.000160	Jumlah Media Massa yang Bekerja Sama dengan Pemerintah Daerah	Media	Media massa adalah suatu alat untuk melakukan atau menyebarkan informasi kepada komunikan yang luas, berjumlah banyak, dan bersifat heterogen	26	T	[2.16.02.1.01.0014] [2.16.02.2.01.0014]
83	2.16.000161	Jumlah Menara Telekomunikasi	Unit	Bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan, yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain, dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi	73	T	[2.16.03.1.02.0026] [2.16.03.2.02.0030]
84	2.16.000162	Jumlah Sebaran Titik Koordinat Blankspot	Titik	- Lokasi Desa yang ditandai dengan sepasang angka atau koordinat. - pengumpulan berbagi pakai data titik layanan publik/OPD/UPT/area publik (pusat kesehatan masyarakat, kantor pemerintahan, sekolah, rumah sakit, daerah wisata, sentra UMKM, pasar, pusat kuliner, taman kota) yang tidak memiliki akses dan - data titik wilayah blankspot 4G untuk desa-desa non 3T dan 3T	18	T	[2.16.03.1.02.0032] [2.16.03.1.02.0026] [2.16.03.2.02.0036] [2.16.03.2.02.0030]

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025	Disabled	Info Sub Kegiatan
1	2.20.000019	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	Metadata Statistik Sektoral adalah Jumlah metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator yang disampaikan kepada Pembina Data Statistik. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi	61	T	[2.20.02.2.01.0010] [2.20.02.1.01.0011]
2	2.20.000020	Jumlah kegiatan statisik sektoral yang telah dilengkapi standar data		Jumlah Statistik Sektoral yang dilengkapi standar data yang sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Standar Data	9	T	[2.20.02.1.01.0011] [2.20.02.2.01.0010]
3	2.20.000021	Jumlah Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi		Jumlah Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi adalah jumlah indikator statistik statistik sektoral yang mengggukanan kode referensi yang sudah disepakati. Kode referensi adalah kode yang dibahas dan disepakati dalam forum satu data indonesia tingkat pusat.	38	T	[2.20.02.2.01.0010] [2.20.02.1.01.0011]
4	2.20.000022	Jumlah Statistik sektoral yang telah dilengkapi analisis kebutuhan data dan konfirmasi hasil	Dokumen	Analisis kebutuhan data adalah proses identifikasi output statistik yang dibutuhkan oleh pengguna data dan kemungkinan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang dibutuhkan. Konfirmasi hasil adalah proses konfirmasi output statistik yang telah dihasilkan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna data.	4	T	[2.20.02.2.01.0009] [2.20.02.1.01.0008] [2.20.02.2.01.0022] [2.20.02.1.01.0021]
5	2.20.000023	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Persentase	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu adalah Jumlah kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu dibagi dengan kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh produsen data. Jumlah kegiatan statistik sektoral yang rilis sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dimasukkan kedalam penghitungan adalah kegiatan statistik sektoral yang dihasilkan oleh produsen data pada tahun tersebut. Survei Kebutuhan Data Statistik Sektoral adalah Survei yang digunakan untuk identifikasi kebutuhan data statistik sektoral kepada	43	T	[2.20.02.2.01.0009] [2.20.02.1.01.0008]
6	2.20.000024	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Dokumen	Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral yang sudah dimintakan rekomendasi kegiatannya kepada Pembina Data Statistik	5	T	[2.20.02.2.01.0011] [2.20.02.1.01.0010]
7	2.20.000025	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik adalah jumlah pegawai di OPD yang sudah mendapatkan pelatihan di bidang statistik baik oleh pembina data statistik maupun dari pihak lain	45	T	[2.20.02.1.01.0007] [2.20.02.1.01.0020] [2.20.02.2.01.0007] [2.20.02.2.01.0020]
8	2.20.000026	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data	Orang	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data adalah jumlah pegawai di OPD yang sudah mendapatkan pelatihan di bidang manajemen data baik oleh pembina data statistik maupun dari pihak lain	45	T	[2.20.02.1.01.0007] [2.20.02.1.01.0020] [2.20.02.2.01.0007] [2.20.02.2.01.0020]
9	2.20.000028	Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persentase	Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan adalah Jumlah OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan dibanding dengan total seluruh OPD	85	T	[2.20.02.2.01.0008] [2.20.02.1.01.0009]
10	2.20.000030	Jumlah pembinaan dibidang statistik yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data	Laporan	Jumlah Laporan pembinaan statistik sektoral yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data adalah jumlah pembinaan statistik sektoral yang dilakukan oleh walidata kepada produsen data	5	T	[2.20.02.1.01.0007] [2.20.02.1.01.0020] [2.20.02.2.01.0007] [2.20.02.2.01.0020]
11	2.20.000031	Jumlah sosialisasi hasil statistik sektoral dalam rangka peningkatan literasi pengguna data	Laporan	Jumlah Laporan sosialisasi yang dilakukan oleh produsen data atau walidata untuk meningkatkan literasi/pemahaman data statistik pengguna data	3	T	[2.20.02.2.01.0008] [2.20.02.1.01.0009]
12	2.20.000050	Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah	Kegiatan	Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah seluruh kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah/OPD	88	T	[2.20.02.1.01.0016] [2.20.02.1.01.0018] [2.20.02.1.01.0017] [2.20.02.2.01.0018] [2.20.02.2.01.0021] [2.20.02.2.01.0017]
13	2.20.000051	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasil statistik sektoralnya telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi dan/atau data induk	Kegiatan	Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah adalah seluruh kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah/OPD yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi	8	T	[2.20.02.1.01.0016] [2.20.02.2.01.0018]

14	2.20.000052	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Persentase	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasil statistik sektoralnya telah memenuhi 4 prinsip SDI dibagi dengan jumlah kegiatan statistik sektoral di pemerintah daerah dikalikan 100 persen	14,66	T	[2.20.02.1.01.0016] [2.20.02.2.01.0018]
15	2.20.000053	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda	Kegiatan	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya (data/indikator dari kegiatan statistik tersebut) dapat diakses/tersedia di portal data pemda	0	T	[2.20.02.1.01.0019] [2.20.02.2.01.0019]
16	2.20.000054	Tingkat kepuasan pengguna data dalam mengakses portal data pemda	Persentase	Tingkat kepuasan pengguna data dalam mengakses portal data pemda adalah persentase pengguna data pengakses portal data pemda yang merasa puas dibandingkan dengan jumlah total pengguna data yang mengakses portal data pemda	0	T	[2.20.02.1.01.0019] [2.20.02.2.01.0019]
17	2.20.000055	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Persentase	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data adalah Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda dibagi dengan total jumlah kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh Pemda/OPD dikalikan 100 persen	80	T	[2.20.02.1.01.0019] [2.20.02.2.01.0019]
18	2.20.000056	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan	Kegiatan	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah dilengkapi dengan dokumen perencanaan kegiatan statistik yang berisikan rancangan setiap tahapan penyelenggaraan statistik, diantaranya mencakup spesifikasi kebutuhan data, rancangan metodologi, instrumen, pengumpulan data, pengolahan, analisis,	14	T	[2.20.02.1.01.0018] [2.20.02.2.01.0021]
19	2.20.000057	Persentase kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi perencanaan kegiatan statistik sektoral	Persentase	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi perencanaan kegiatan statistik sektoral adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan dibagi dengan jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan pemerintah daerah dikali 100 persen	14,66	T	[2.20.02.1.01.0018] [2.20.02.2.01.0021]
20	2.20.000058	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Persentase	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik adalah Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari BPS dibagi dengan jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dikalikan 100 persen	5,31	T	[2.20.02.1.01.0017] [2.20.02.2.01.0017]
21	2.20.000059	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Kegiatan	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari BPS adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi resmi dari BPS	6	T	[2.20.02.1.01.0017] [2.20.02.2.01.0017]
22	2.20.000060	Jumlah penyelenggaraan forum satu data daerah	Kegiatan	Jumlah penyelenggaraan forum satu data daerah adalah jumlah penyelenggaraan wadah komunikasi dan koordinasi internal Pemerintah Daerah dan/atau Internal Pemerintah Daerah dengan Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan dalam 1 tahun	1	T	[2.20.02.1.01.0021] [2.20.02.2.01.0022]

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025	Disabled	Info Sub Kegiatan
1	2.21.000001	Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Dokumen	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	1	T	[2.21.02.1.01.0001] [2.21.02.1.01.0008] [2.21.02.2.01.0001] [2.21.02.2.01.0008]
2	2.21.000002	Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Dokumen	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	3	T	[2.21.02.1.01.0001] [2.21.02.1.01.0008] [2.21.02.2.01.0001] [2.21.02.2.01.0008]
3	2.21.000007	Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	38	T	[2.21.02.1.01.0004] [2.21.02.1.01.0006] [2.21.02.2.01.0004] [2.21.02.2.01.0007]
4	2.21.000008	Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	38	T	[2.21.02.1.02.0001] [2.21.02.1.02.0002] [2.21.02.2.02.0001] [2.21.02.2.02.0002]
5	2.21.000009	Laporan Analisis Kebutuhan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota	Laporan	Jumlah Laporan penjabaran informasi kebutuhan sumber daya keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2	T	[2.21.02.2.01.0002] [2.21.02.2.01.0006]
6	2.21.000010	Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dalam pelaksanaan kegiatan identifikasi, deteksi, proteksi dan penanggulangan dan pemulihan	17	T	[2.21.02.2.01.0003] [2.21.02.2.01.0005]
7	2.21.000011	Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Non Elektronik	Laporan	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis non elektronik dengan tahapan pemrosesan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi non elektronik	0	T	[2.21.02.2.01.0003] [2.21.02.2.01.0005]
8	2.21.000012	Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota	Laporan	Jumlah laporan pengelolaan sumber daya keamanan informasi yang mencakup pada pengelolaan aset TIK, sumber daya manusia dan manajemen pengetahuan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	T	[2.21.02.2.01.0002] [2.21.02.2.01.0006]

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025	Disabled	Info Sub Kegiatan
1	2.12.000001	Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	Penyediaan data kependudukan Kabupaten/Kota adalah proses penyajian data kependudukan berskala Kabupaten/Kota yang berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri	3	T	[2.12.05.2.01.0001]
2	2.12.000002	Data Kependudukan terkait Pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkan	Dokumen	Pemanfaatan data kependudukan adalah kegiatan pemberian hak akses data kependudukan kepada lembaga pengguna. Data kependudukan adalah hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pemanfaatan data kependudukan dilakukan untuk berbagai tujuan, seperti: Meningkatkan kualitas pelayanan publik, Perencanaan pembangunan, Alokasi anggaran, Pembangunan demokrasi, Penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Pemanfaatan data kependudukan dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya: Web Service, Web Portal, Card Reader. Untuk mengakses data kependudukan melalui Web Service, lembaga pengguna perlu memiliki aplikasi sendiri yang dapat diintegrasikan dengan database kependudukan. Sedangkan untuk Web Portal, lembaga pengguna tidak perlu memiliki aplikasi karena aplikasi web portal sudah disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Data kependudukan sangat penting bagi pembangunan karena menjadi dasar bagi pemerintah dan lembaga lainnya yang memiliki kepentingan terhadap	0	T	[2.12.02.2.03.0004]
3	2.12.000003	Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Dokumen		3	T	[2.12.04.2.03.0008]
4	2.12.000004	Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang tersedia	Dokumen	Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pendaftaran penduduk adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Data kependudukan memiliki manfaat penting bagi pembangunan, baik bagi pemerintah maupun lembaga lain yang memiliki kepentingan terhadap pembangunan. Data kependudukan yang sahih dan akurat mutlak diperlukan agar pembangunan dapat berjalan dengan baik.	3	T	[2.12.02.3.03.0003] [2.12.02.2.03.0008]
5	2.12.000005	Data yang telah diolah dan disajikan	Dokumen	Pengolahan data kependudukan adalah proses menabulasi, menjumlahkan, atau memilah-milah data kependudukan menjadi data yang siap disajikan dan dianalisis. Sedangkan penyajian data kependudukan adalah proses menyajikan data yang sudah diolah agar mudah dibaca.	3	T	[2.12.04.2.01.0001]
6	2.12.000006	Dokumen Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai PeLaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Dokumen	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama dan Pengadilan Agama terkait pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk adalah koordinasi untuk pembangunan basis data kependudukan. Koordinasi ini dilakukan dalam rangka pencatatan sipil bagi penduduk yang beragama Islam. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memiliki peran sentral dalam administrasi kependudukan suatu negara. Tugas utama Disdukcapil adalah: Mengelola data kependudukan, Menyelenggarakan pencatatan sipil, Memberikan pelayanan administrasi	0	T	[2.12.04.2.04.0002]
7	2.12.000008	Dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	Dokumen	Pengolahan data kependudukan adalah proses menabulasi, menjumlahkan, atau memilah-milah data kependudukan menjadi data yang siap disajikan dan dianalisis. Sedangkan penyajian data kependudukan adalah proses menyajikan data yang sudah diolah agar mudah dibaca.	3	T	[2.12.04.2.01.0001]

8	2.12.000009	Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	Pengolahan data kependudukan adalah proses menabulasi, menjumlahkan, atau memilah-milah data kependudukan menjadi data yang siap disajikan dan dianalisis. Sedangkan penyajian data kependudukan adalah proses menyajikan data yang sudah diolah agar mudah dibaca.	0	T	[2.12.03.2.02.0009]
9	2.12.000010	Dokumen hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pendaftaran penduduk adalah kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi dalam bidang administrasi kependudukan.	0	T	[2.12.02.2.03.0006]
10	2.12.000012	Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Laporan	Memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan. hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang belum memiliki dokumen Adminduk sehingga perlu adanya pembinaan atau sosialisasi kepada masyarakat.	0	T	[2.12.04.2.03.0007]
11	2.12.000017	Dokumen Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	Pelayanan secara aktif dalam pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil. Pencatatan Sipil menganut stelsel aktif bagi penduduk. Peristiwa penting yang dimaksud adalah: Kelahiran, Kematian, Lahir mati, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan anak, Pengesahan anak, Pengangkatan anak, Perubahan nama, Perubahan status kewarganegaraan. Pencatatan peristiwa penting dilakukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.	1	T	[2.12.02.2.03.0002]
12	2.12.000020	Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	Pemanfaatan data kependudukan terkait pencatatan sipil adalah pemberian hak akses data kependudukan dari Menteri Dalam Negeri kepada lembaga pengguna. Pemanfaatan data kependudukan ini dilakukan untuk: Meningkatkan kualitas pelayanan publik, Perencanaan pembangunan, Alokasi anggaran, Pembangunan demokrasi, Penegakan hukum dan pencegahan kriminal	0	T	[2.12.03.2.02.0007]
13	2.12.000023	Dokumen Hasil Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas peLaporan Peristiwa Penting	Dokumen	Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting adalah proses pencatatan dan penerbitan dokumen yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait peristiwa penting yang dialami oleh warga masyarakat	12	T	[2.12.03.2.01.0001]
14	2.12.000024	Dokumen hasil pencatatan, penata usahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Dokumen	Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk adalah rangkaian kegiatan dalam administrasi kependudukan	12	T	[2.12.02.2.01.0002]
15	2.12.000025	Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	Mengacu kepada Permendagri 96 Tahun 2019 Pasal 7 bahwa penduduk rentan administrasi kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan. Dalam pasal 2 disebutkan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan Administrasi Kependudukan meliputi : 1. Korban Bencana Alam 2. Korban kerusuhan Sosial 3. Orang terlantar 4. komunitas terpencil. Yang disebut dengan orang terlantar dalam permendagri 96 tahun 2019 adalah warga negara Indonesia yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial. Hal ini sudah sejalan dengan definisi dari kategori warga Negara penyandang disabilitas sesuai dengan UU No.8 Tahun 2016 pasal 1 bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif	0	T	[2.12.02.2.01.0001]

16	2.12.000026	Dokumen Hasil Pengelolaan dan PeLaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dokumen	Penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk adalah kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan kemudahan, Dukcapil melakukan penyesuaian jenis dan spesifikasi formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi	12	T	[2.12.02.2.04.0001]
17	2.12.000027	Dokumen Hasil Pengelolaan dan PeLaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Dokumen	Penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk adalah kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan kemudahan, Dukcapil melakukan penyesuaian jenis dan spesifikasi formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi	12	T	[2.12.03.2.03.0001]
18	2.12.000028	Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Dokumen	Pengumpulan, analisis, dan diseminasi data pencatatan sipil adalah kegiatan yang dilakukan oleh Sub Koordinator Pelayanan Pencatatan Sipil. Catatan sipil adalah lembaga yang bertugas untuk mencatat peristiwa yang dialami oleh warga masyarakat, seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian. Tujuannya untuk mendapatkan data selengkap mungkin agar status warga masyarakat dapat diketahui.	0	T	[2.12.03.2.01.0003]
19	2.12.000032	Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia	Paket	Penggunaan blangko dokumen kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran penduduk adalah kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan kemudahan, Dukcapil melakukan penyesuaian jenis dan spesifikasi formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi	0	T	[2.12.03.2.01.0005]
20	2.12.000033	Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia	Dokumen		1	T	[2.12.02.2.02.0002]
21	2.12.000034	Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dokumen		0	T	[2.12.04.2.03.0006]
22	2.12.000035	Dokumen kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen		1	T	[2.12.04.2.01.0002]
23	2.12.000037	Dokumen Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas peLaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen		12	T	[2.12.02.2.01.0005]
24	2.12.000039	Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri	Dokumen		12	T	[2.12.04.2.03.0002]
25	2.12.000040	Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Dokumen		0	T	[2.12.03.2.02.0005]
26	2.12.000042	Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Dokumen		0	T	[2.12.02.2.01.0008]
27	2.12.000044	Dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	Dokumen		1	T	[2.12.04.2.03.0004]
28	2.12.000046	Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Dokumen		1	T	[2.12.05.2.01.0002]
29	2.12.000047	Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan PeLaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang disusun	Dokumen		1	T	[2.12.03.2.01.0004]
30	2.12.000050	Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan PeLaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang disusun	Dokumen		1	T	[2.12.02.2.02.0001]
31	2.12.000051	Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan PeLaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang disusun	Dokumen		1	T	[2.12.04.2.02.0001]

32	2.12.000052	Laporan bimbingan teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan		0	T	[2.12.02.2.04.0003]
33	2.12.000053	Laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan		1	T	[2.12.02.2.03.0003]
34	2.12.000056	Laporan hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	Laporan		0	T	[2.12.03.1.03.0002] [2.12.03.2.03.0004]
35	2.12.000057	Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan		0	T	[2.12.04.2.04.0003]
36	2.12.000060	Laporan hasil fasilitasi pencatatan sipil	Laporan		1	T	[2.12.03.1.02.0001] [2.12.03.2.02.0006]
37	2.12.000062	Laporan hasil fasilitasiPengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan		1	T	[2.12.04.2.03.0003]
38	2.12.000063	Laporan hasil inventarisasi data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Laporan		5	T	[2.12.04.2.01.0003]
39	2.12.000067	Laporan hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan		3	T	[2.12.03.2.02.0003]
40	2.12.000068	Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan		5	T	[2.12.02.2.03.0001]
41	2.12.000069	Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan		2	T	[2.12.04.2.03.0001]
42	2.12.000071	Laporan hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Laporan		0	T	[2.12.03.2.02.0002]
43	2.12.000072	Laporan hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Laporan		0	T	[2.12.03.2.02.0001]
44	2.12.000073	Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Laporan		1	T	[2.12.03.2.02.0004]
45	2.12.000074	Laporan hasil pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan		0	T	[2.12.04.2.04.0001]
46	2.12.000076	Laporan hasil pembinaan dan pengawasan pencatatan sipil yang telah dilakukan	Laporan		0	T	[2.12.03.2.03.0002]
47	2.12.000077	Laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Laporan		0	T	[2.12.02.3.03.0003] [2.12.02.2.01.0004]
48	2.12.000078	Laporan hasil sosialiasi pendaftaran penduduk	Laporan		0	T	[2.12.02.2.03.0005]
49	2.12.000079	Laporan hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Laporan		0	T	[2.12.03.2.02.0008]
50	2.12.000081	Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan		0	T	[2.12.04.2.03.0005]
51	2.12.000085	Laporan pembinaan dan pengawasan terkait Pendataran Penduduk	Laporan		0	T	[2.12.02.2.04.0002]
52	2.12.000086	Laporan pencatatan atas peristiwa kependudukan	Laporan		12	T	[2.12.02.2.01.0006]
53	2.12.000087	Laporan Penerbitan Dokumen atas Hasil PeLaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan		12	T	[2.12.02.2.01.0007]
54	2.12.000088	Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil	Laporan		1	T	[2.12.03.2.02.0011]
55	2.12.000089	Layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	Layanan		1	T	[2.12.03.2.01.0002]
56	2.12.000090	Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk	Orang		333	T	[2.12.02.2.03.0007]
57	2.12.000091	Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada terkait Pencatatan Sipil	Orang		495	T	[2.12.03.2.02.0010]
58	2.12.000092	penduduk yang mendapatkan pelayanan penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	Orang		8053	T	[2.12.02.2.01.0003]

59	2.12.000094	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai PeLaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil yang dilaksanakan	Laporan		0	T	[2.12.03.2.03.0003]
60	2.12.000095	Penyediaan Data Agregat Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Data	Jumlah total penduduk provinsi dan kabupaten/kota, dan dipilah per jenis kelamin (laki-laki dan perempuan)	2	T	[2.12.05.1.01.0001] [2.12.05.2.01.0001]
61	2.12.000096	Rekap Lembaga yang memanfaatkan data kependudukan provinsi dan kabupaten/kota	Lembaga	Lembaga/OPD/Badan Hukum Indonesia memanfaatkan data kependudukan di tingkat provindi da kabupaten/kota	1	T	[2.12.04.1.02.0006] [2.12.03.2.02.0009]
62	2.12.000097	Kabupaten/kota melakukan kerjasama dengan RS/Faskes untuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA)	Faskes	Kabupaten/kota sebagai instansi pelaksana pelayanan administrasi kependudukan didorong untuk kerjasama dengan RS/Faskes untuk penerbitan dokumen kependudukan (NIK, akta kelahiran, KK, dan KIA) bagi setiap bayi yang lahir di RS/Faskes tersebut	5	T	[2.12.02.2.03.0006]
63	2.12.000098	Sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan	Kali	Sosialisasi administrasi kependudukan terutama pentingnya dokumen kependudukan untuk berbagai urusan layanan publik kepada masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan provinsi dan Sipil kabupaten/kota	0	T	[2.12.02.2.03.0005]
64	2.12.000099	Melakukan pendataan penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan	Kali	Dinas Dukcapil kabupaten/kota melakukan pendataan rutin terhadap penduduk non permanen dan penduduk rentan administrasi kependudukan	0	T	[2.12.02.2.01.0001]
65	2.12.000100	Pengadaan blangko Kartu Identitas Anak (KIA) untuk pemenuhan identitas resmi anak		Dinas Dukcapil kabupaten/kota melakukan pengadaan blangko KIA untuk memenuhi hak anak memiliki identitas resmi. Kenapa hanya KIA? Karena KTP-el pengadaan dilakukan oleh Ditjen Dukcapil, sementara blangko lain seperti blangko KK dan blangko pencatatan sipil tidak lagi menggunakan blangko khusus security printing, melainkan hanya menggunakan kertas HVS A4 80 gram	0	T	[2.12.03.2.01.0005]

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025	Disabled	Info Sub Kegiatan
1	1.01.000001	Asrama sekolah	Unit	jumlah asrama sekolah yang tersedia	7	T	[1.01.02.1.01.0013] [1.01.02.1.01.0030] [1.01.02.1.01.0069] [1.01.02.1.02.0009] [1.01.02.1.02.0022] [1.01.02.1.02.0071] [1.01.02.1.03.0007] [1.01.02.1.03.0023] [1.01.02.1.03.0076] [1.01.02.2.02.0008] [1.01.02.2.02.0020] [1.01.02.2.02.0063] [1.01.02.3.05.0013] [1.01.02.3.05.0030] [1.01.02.3.06.0009] [1.01.02.3.06.0022] [1.01.02.4.05.0013] [1.01.02.4.05.0030]
2	1.01.000002	Asrama sekolah yang perlu direhabilitasi	Unit	jumlah asrama sekolah yang perlu direhabilitasi	0	T	[1.01.02.1.01.0069] [1.01.02.1.02.0071] [1.01.02.1.03.0076] [1.01.02.2.02.0063]
3	1.01.000003	Asrama sekolah yang layak	Unit	jumlah asrama sekolah yang dinilai layak	0	T	[1.01.02.1.01.0013] [1.01.02.1.02.0009] [1.01.02.1.03.0007] [1.01.02.2.02.0008]
4	1.01.000004	Asrama sekolah yang rusak sedang/berat	Unit	jumlah keseluruhan asrama sekolah yang rusak sedang/berat	0	T	[1.01.02.1.01.0013] [1.01.02.1.02.0009] [1.01.02.1.03.0007] [1.01.02.2.02.0008]
5	1.01.000005	Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun	Dokumen	Jumlah Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun	0	T	[1.01.06.1.01.0011] [1.01.06.2.01.0007]
6	1.01.000007	Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkonservasi	Bahasa	jumlah Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkonservasi	0	T	[1.01.06.2.01.0002]
7	1.01.000008	Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terevitalisasi	Bahasa	jumlah Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terevitalisasi	1	T	[1.01.06.2.01.0002]
8	1.01.000009	Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkaji Vitalitasnya	Bahasa	jumlah Bahasa dan Sastra daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terkaji Vitalitasnya	0	T	[1.01.06.2.01.0002]
9	1.01.000013	Bangunan Gedung PAUD yang memerlukan pemeliharaan	Unit	jumlah keseluruhan bangunan gedung paud yang memerlukan pemeliharaan	0	T	
10	1.01.000014	Bangunan Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	Unit	jumlah bangunan gedung pendidikan nonformal / kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	0	T	[1.01.02.2.02.0029]
11	1.01.000015	Bangunan Gedung Sekolah yang memerlukan pemeliharaan	Unit	jumlah keseluruhan bangunan gedung sekolah yang memerlukan pemeliharaan	0	T	[1.01.02.2.01.0018] [1.01.02.3.05.0043] [1.01.02.3.05.0044] [1.01.02.2.03.0005]
12	1.01.000020	Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia dan terdistribusi	Buku	Jumlah Keseluruhan Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia dan terdistribusi	0	T	[1.01.06.2.01.0005] [1.01.06.2.01.0012] [1.01.06.2.01.0008]
13	1.01.000022	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Buah	Jumlah Keseluruhan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	0	T	[1.01.03.2.01.0005] [1.01.03.2.02.0003] [1.01.03.2.02.0004] [1.01.02.3.05.0067]
14	1.01.000023	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang dibutuhkan	Buah	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang dibutuhkan	0	T	[1.01.03.2.01.0003]
15	1.01.000024	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersedia	Buah	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersedia	0	T	[1.01.03.2.01.0003]
16	1.01.000028	Dayah yang memiliki tempat ibadah	Dayah	Jumlah Dayah yang memiliki tempat ibadah		Y	[1.01.07.7.01.0002] [1.01.07.7.01.0002] [1.01.07.7.01.0009]
17	1.01.000029	Dayah yang meningkat kualitas dan pengembangan kelembagaannya	Satuan Pendidikan	jumlah Dayah yang meningkat kualitas dan pengembangan kelembagaannya		Y	[1.01.07.7.01.0001] [1.01.07.7.01.0003] [1.01.07.7.01.0005] [1.01.07.7.01.0007] [1.01.07.7.01.0010] [1.01.07.7.01.0017] [1.01.07.7.01.0018] [1.01.08.7.05.0002] [1.01.07.7.01.0001] [1.01.07.7.01.0003] [1.01.07.7.01.0005] [1.01.07.7.01.0007] [1.01.07.7.01.0010] [1.01.07.7.01.0015] [1.01.07.7.01.0016] [1.01.08.7.05.0001]
18	1.01.000030	Dayah yang telah dibina sesuai dengan ketentuan	Satuan Pendidikan	Jumlah Dayah yang telah dibina sesuai dengan ketentuan		Y	[1.01.07.7.01.0013]
19	1.01.000033	Dayah yang terakrditasi A	Satuan Pendidikan	Jumlah Dayah yang terakreditasi A		Y	
20	1.01.000034	Dayah yang terakrditasi B	Satuan Pendidikan	Jumlah Dayah yang terakrditasi B		Y	
21	1.01.000035	Dayah yang yang belum terakreditasi	Satuan Pendidikan	Jumlah Dayah yang yang belum terakreditasi		Y	
22	1.01.000036	Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0	T	[1.01.05.2.02.0002] [1.01.05.3.04.0002] [1.01.05.4.04.0002]
23	1.01.000037	Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0	T	[1.01.05.2.01.0002]
24	1.01.000040	Dokumen hasil pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformals yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformals yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0	T	[1.01.05.2.02.0003]
25	1.01.000042	Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0	T	[1.01.05.2.02.0001] [1.01.05.3.04.0001] [1.01.05.4.04.0001]
26	1.01.000043	Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0	T	[1.01.05.2.01.0001]
27	1.01.000046	Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	0	T	[1.01.08.7.03.0002]
28	1.01.000049	fasilitas bermain	Unit	Jumlah fasilitas bermain yang tersedia	0	T	[1.01.02.2.03.0040]
29	1.01.000050	Fasilitas Parkir	Unit	jumlah fasilitas parkir yang tersedia	0	T	[1.01.02.1.02.0011] [1.01.02.3.06.0011] [1.01.02.4.06.0011]
30	1.01.000051	Fasilitas Parkir yang perlu direhabilitasi	Unit	jumlah fasilitas parkir yang perlu di rehabilitasi	0	T	[1.01.02.1.01.0077] [1.01.02.1.02.0070] [1.01.02.1.03.0075] [1.01.02.2.02.0022] [1.01.02.3.06.0024] [1.01.02.4.05.0032] [1.01.02.4.06.0024] [1.01.02.3.06.0060] [1.01.02.4.06.0060]
31	1.01.000052	Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi	Ruang	jumlah gedung pendidikan nonformal / kesetaraan yang perlu direhabilitasi	0	T	[1.01.02.2.04.0050]
32	1.01.000053	Gedung Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi	Ruang	jumlah gedung pendidikan nonformal / kesetaraan yang telah direhabilitasi	0	T	[1.01.02.2.04.0050]
33	1.01.000054	gedung PAUD	Unit	jumlah gedung paud yang tersedia	209	T	[1.01.02.2.03.0040] [1.01.02.2.03.0001]

34	1.01.000055	gedung PAUD yang layak	Unit	jumlah gedung paud yang layak	168	T	[1.01.02.2.03.0040]
35	1.01.000056	Gedung PAUD yang perlu direhabilitasi	Ruang	jumlah gedung paud yang perlu direhabilitasi	142	T	[1.01.02.2.03.0003]
36	1.01.000057	gedung PAUD yang rusak sedang/berat	Unit	jumlah geudng paud yang rusak sedang/berat	118	T	[1.01.02.2.03.0040]
37	1.01.000058	Gedung PAUD yang telah direhabilitasi	Ruang	jumlah gedung paud yang telah direhabilitasi	30	T	[1.01.02.2.03.0003]
38	1.01.000059	gedung PKBM	Unit	jumlah gedung pkbm	2	T	[1.01.02.2.04.0001]
39	1.01.000060	gedung PKBM yang layak	Unit	jumlah gedung pkbm yang layak	2	T	[1.01.02.2.04.0001]
40	1.01.000061	gedung PKBM yang rusak sedang/berat	Unit	jumlah gedung pkbm yang rusak sedang/berat	2	T	[1.01.02.2.04.0001]
41	1.01.000062	Gedung Sekolah yang perlu direhabilitasi	Ruang	jumlah gedung sekolah yang perlu direhabilitasi	0	T	[1.01.02.1.01.0001] [1.01.02.3.05.0020] [1.01.02.3.05.0022] [1.01.02.3.05.0023] [1.01.02.3.05.0024] [1.01.02.3.05.0027] [1.01.02.3.05.0029] [1.01.02.3.05.0031] [1.01.02.3.05.0032] [1.01.02.3.05.0033] [1.01.02.3.06.0001] [1.01.02.3.05.0034] [1.01.02.2.02.0013]
42	1.01.000063	Gedung Sekolah yang telah direhabilitasi	Ruang	jumlah gedung sekolah yang telah direhabilitasi	0	T	[1.01.02.3.05.0021] [1.01.02.3.05.0025] [1.01.02.3.05.0026]
43	1.01.000064	Gudang	Unit	jumlah gudang bada satuan pendidikan yang tersedia	0	T	[1.01.02.1.01.0001] [1.01.02.1.02.0001] [1.01.02.1.03.0001] [1.01.02.2.01.0001] [1.01.02.2.02.0001]
44	1.01.000065	Guru yang memiliki rumah dinas	Orang	jumlah guru yang memiliki rumah dinas	0	T	[1.01.02.1.01.0067] [1.01.02.1.02.0065] [1.01.02.1.03.0068] [1.01.02.2.01.0007] [1.01.02.2.02.0009]
45	1.01.000067	Kamus Bahasa daerah yang tersusun	Kamus	jumlah kamus bahasa daerah yang tersusun	0	T	[1.01.06.2.01.0011] [1.01.06.1.01.0001] [1.01.06.2.01.0001]
46	1.01.000068	Kantin Sekolah yang perlu direhabilitasi	Unit	jumlah kantin sekolah yang perlu direhabilitasi	0	T	[1.01.02.1.01.0074] [1.01.02.1.02.0067] [1.01.02.1.03.0072] [1.01.02.2.02.0023] [1.01.02.3.06.0025]
47	1.01.000069	Kantin Sekolah yang telah dibangun	Unit	jumlah kantin sekolah yang telah dibangun	0	T	[1.01.02.1.01.0016] [1.01.02.1.02.0012] [1.01.02.1.03.0010] [1.01.02.2.02.0011] [1.01.02.3.06.0012] [1.01.02.4.06.0012]
48	1.01.000070	Kantin Sekolah yang telah direhabilitasi	Unit	jumlah kantin sekolah yang telah direhabilitasi	0	T	[1.01.02.1.01.0074] [1.01.02.1.02.0067] [1.01.02.1.03.0072] [1.01.02.2.02.0023] [1.01.02.4.05.0033] [1.01.02.4.06.0025]
49	1.01.000071	Kekurangan pendidik	Orang	jumlah kekurangan pendidik	0	T	[1.01.04.1.01.0001] [1.01.04.2.01.0001]
50	1.01.000072	Kepala sekolah yang memiliki rumah dinas	Orang	jumlah kepala sekolah yang memiliki rumah dinas	0	T	[1.01.02.1.01.0067] [1.01.02.1.02.0065] [1.01.02.1.03.0068] [1.01.02.2.01.0007] [1.01.02.2.02.0009]
51	1.01.000073	Kitab/Buku Pendidikan Dayah tersedia	Buku	jumlah Kitab/Buku Pendidikan Dayah yang tersedia		Y	[1.01.07.7.01.0008] [1.01.07.7.01.0008]
52	1.01.000074	kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dokumen	Jumlah kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	0	T	[1.01.03.2.02.0001] [1.01.03.2.02.0006] [1.01.03.2.02.0005]
53	1.01.000075	kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Dasar	Dokumen	jumlah kompetensi dasar muatan lokal pendidikan dasar	0	T	[1.01.03.2.01.0001] [1.01.03.2.01.0007] [1.01.03.2.01.0006]
54	1.01.000079	Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang tersusun	Dokumen	Jumlah Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang tersusun		Y	[1.01.08.7.03.0001] [1.01.08.7.03.0001]
55	1.01.000082	Laboratorium yang perlu direhabilitasi	Ruang	jumlah laboratorium yang perlu direhabilitasi	0	T	[1.01.02.4.05.0070] [1.01.02.3.05.0068]
56	1.01.000083	Media pendidikan	Paket	jumlah media pendidikan yang tersedia	0	T	[1.01.02.1.01.0070] [1.01.02.1.01.0072] [1.01.02.1.02.0005] [1.01.02.1.02.0064] [1.01.02.1.03.0012] [1.01.02.1.03.0070] [1.01.02.1.01.0058] [1.01.02.1.02.0051] [1.01.02.1.03.0057] [1.01.02.3.04.0038] [1.01.02.4.04.0038] [1.01.02.2.01.0047] [1.01.02.2.02.0006] [1.01.02.2.02.0059] [1.01.02.2.01.0036] [1.01.02.2.02.0049] [1.01.02.2.03.0023] [1.01.02.2.04.0025] [1.01.02.3.05.0058] [1.01.02.3.06.0051]
57	1.01.000084	Modul Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun	Dokumen	Jumlah Modul Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersusun	0	T	[1.01.06.2.01.0007]
58	1.01.000086	pelatihan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dokumen	Jumlah pelatihan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	0	T	[1.01.03.2.01.0004] [1.01.03.4.01.0005] [1.01.03.3.01.0005]
59	1.01.000089	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan sekolah dasar	0	T	[1.01.02.2.01.0026] [1.01.02.4.07.0006]
60	1.01.000090	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi	Orang	Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi	0	T	[1.01.02.2.01.0026]
61	1.01.000093	Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama	Orang	Jumlah pendidik pada sekolah menengah pertama	0	T	[1.01.02.2.02.0039] [1.01.02.4.07.0008]
62	1.01.000094	Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang telah lulus sertifikasi	Orang	jumlah pendidik pada sekolah menengah pertama yang telah lulus sertifikasi	0	T	[1.01.02.2.02.0039]
63	1.01.000095	Pendidik Dayah yang telah lulus sertifikasi	Orang	Pendidik Dayah yang telah lulus sertifikasi		Y	
64	1.01.000096	Pendidik yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan	Orang	jumlah pendidik yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan	0	T	[1.01.02.1.01.0051] [1.01.02.1.02.0043] [1.01.02.1.03.0050] [1.01.02.2.01.0027] [1.01.02.2.02.0040] [1.01.02.2.03.0016] [1.01.02.2.04.0015]
65	1.01.000097	Pendidik yang mendapatkan fasilitasi pemberian promosi	Orang	jumlah pendidik yang mendapatkan fasilitasi pemberian promosi	0	T	[1.01.02.1.01.0051] [1.01.02.1.02.0043] [1.01.02.1.03.0050] [1.01.02.2.01.0027] [1.01.02.2.02.0040] [1.01.02.2.03.0016] [1.01.02.2.04.0015]
66	1.01.000098	Pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi	Orang	jumlah pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi	0	T	[1.01.02.4.06.0066] [1.01.02.3.06.0062] [1.01.02.4.06.0057] [1.01.02.1.01.0051] [1.01.02.1.02.0043] [1.01.02.1.03.0050] [1.01.02.2.01.0027] [1.01.02.2.02.0040] [1.01.02.2.03.0016] [1.01.02.2.04.0015]

67	1.01.000099	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Salafiah dan Diniyah yang meningkat kompetensinya	Orang	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan adalah Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan dengan alat ukur Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang		Y	
68	1.01.000100	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang memperoleh Peningkatan Kesejahteraan	Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang memperoleh Peningkatan Kesejahteraan	0	T	[1.01.08.7.04.0002]
69	1.01.000101	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang mendapatkan Penghargaan	Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang mendapatkan Penghargaan	0	T	[1.01.02.4.05.0051] [1.01.02.4.06.0043]
70	1.01.000102	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang mendapatkan Perlindungan	Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada setiap Satuan Pendidikan yang mendapatkan Perlindungan	0	T	[1.01.04.3.03.0001] [1.01.04.4.03.0001] [1.01.04.3.03.0001] [1.01.04.4.03.0001]
71	1.01.000103	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraanyang didistribusikan	Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraanyang didistribusikan	0	T	[1.01.04.3.01.0003] [1.01.04.3.01.0004] [1.01.02.2.01.0023] [1.01.02.2.01.0024] [1.01.02.2.04.0013] [1.01.02.2.04.0022] [1.01.04.2.01.0002] [1.01.02.4.07.0007]
72	1.01.000107	Pendidik dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Menengah di Papua yang telah lulus sertifikasi	Orang	jumlah Pendidik dari Orang Asli Papua yang telah lulus sertifikasi pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah di Papua		Y	[1.01.02.2.04.0032]
73	1.01.000108	Pendidik Dayah	Orang	Jumlah pendidik dayah yang tersedia		Y	[1.01.07.7.01.0004] [1.01.07.7.01.0014]
74	1.01.000109	Pendidik Dayah yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	Jumlah Pendidik Dayah yang berkualifikasi akademik S1/DIV		Y	
75	1.01.000110	Pendidik Non ASN	Orang	jumlah pendidik non asn yang tersedia	0	T	[1.01.04.1.01.0001] [1.01.04.2.01.0001]
76	1.01.000111	Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Orang	jumlah pendidik pada satuan pendidikan nonformal / kesetaraan	0	T	[1.01.02.2.04.0014]
77	1.01.000112	Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	Jumlah Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV	0	T	[1.01.02.2.04.0014]
78	1.01.000113	Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi	Orang	Jumlah Pendidik pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi	0	T	[1.01.02.2.04.0014]
79	1.01.000114	Pendidik pada satuan PAUD	Orang	jumlah pendidik pada satuan paud yang tersedia	410	T	[1.01.02.2.03.0015] [1.01.02.2.03.0047]
80	1.01.000115	Pendidik pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	Jumlah Pendidik pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV	305	T	[1.01.02.2.03.0015]
81	1.01.000116	Pendidik pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi	Orang	Jumlah Pendidik pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi	257	T	[1.01.02.2.03.0015]
82	1.01.000117	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	Jumlah Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV	0	T	[1.01.02.2.01.0026]
83	1.01.000119	Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	Pendidik pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1/DIV	0	T	[1.01.02.2.02.0039]
84	1.01.000120	Pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualifikasi	Orang	Jumlah Pendidik yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualifikasi	0	T	[1.01.02.1.01.0051] [1.01.02.1.02.0043] [1.01.02.1.03.0050] [1.01.02.2.01.0027] [1.01.02.2.01.0041] [1.01.02.2.02.0040] [1.01.02.2.02.0054] [1.01.02.2.03.0016] [1.01.02.2.03.0029] [1.01.02.2.04.0015] [1.01.02.2.04.0030] [1.01.02.2.04.0032]
85	1.01.000123	Pendidikan Menengah yang telah dilakukan Penilaian terkait Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal	Satuan Pendidikan	Jumlah Pendidikan Khusus yang telah dilakukan Penilaian terkait Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal		Y	[1.01.08.7.05.0003]
86	1.01.000125	Penjaga sekolah yang memiliki rumah dinas	Orang	Jumlah Penjaga sekolah yang memiliki rumah dinas	0	T	[1.01.02.1.01.0067] [1.01.02.1.02.0065] [1.01.02.1.03.0068] [1.01.02.2.01.0007] [1.01.02.2.02.0009]
87	1.01.000126	Perabot	Paket	jumlah sekolah yang memliki perabot lengkap	0	T	[1.01.02.1.01.0010] [1.01.02.1.01.0011] [1.01.02.1.01.0013] [1.01.02.1.01.0070] [1.01.02.1.01.0072] [1.01.02.1.02.0005] [1.01.02.1.02.0006] [1.01.02.1.02.0007] [1.01.02.1.02.0009] [1.01.02.1.02.0064] [1.01.02.1.03.0004] [1.01.02.1.03.0005] [1.01.02.1.03.0007] [1.01.02.1.03.0012] [1.01.02.1.03.0070] [1.01.02.2.01.0004] [1.01.02.2.01.0005] [1.01.02.2.01.0047] [1.01.02.2.02.0004] [1.01.02.2.02.0005] [1.01.02.2.02.0006] [1.01.02.2.02.0008]
88	1.01.000127	Peralatan Pendidikan	Paket	jumlah satuan pendidikan yang memiliki peralatan pendidikan yang lengkap	0	T	[1.01.02.1.01.0070] [1.01.02.1.02.0005] [1.01.02.1.03.0012] [1.01.02.2.02.0006]
89	1.01.000128	Perlengkapan lain	Paket	jumlah perlengkapan lain yang ada pada satuan pendidikan	0	T	[1.01.02.1.01.0010] [1.01.02.1.01.0011] [1.01.02.1.02.0006] [1.01.02.1.02.0007] [1.01.02.1.03.0004] [1.01.02.1.03.0005] [1.01.02.2.01.0004] [1.01.02.2.01.0005] [1.01.02.2.02.0005]
90	1.01.000129	Perpustakaan Sekolah yang perlu direhabilitasi	Ruang	jumlah perpustakaan sekolah yang perlu direhabilitasi	0	T	[1.01.02.1.01.0028] [1.01.02.1.02.0075] [1.01.02.1.03.0077] [1.01.02.2.01.0011] [1.01.02.2.02.0017] [1.01.02.3.03.0036] [1.01.02.3.05.0028] [1.01.02.3.06.0020] [1.01.02.4.06.0019] [1.01.02.4.06.0020]
91	1.01.000130	Peserta Didik pada Dayah yang menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar	Peserta Didik	Peserta Didik pada Dayah yang menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar		Y	
92	1.01.000131	Peserta Didik pada pada Sekolah/ Madrasah yang Berskala Provinsi menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar	Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik pada pada Sekolah/ Madrasah yang Berskala Provinsi menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar	0	T	[1.01.08.7.05.0001] [1.01.02.4.05.0048] [1.01.02.4.06.0040] [1.01.02.4.06.0039]

93	1.01.000132	Peserta Didik Sekolah Dasar yang berpotensi putus sekolah	Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang berpotensi putus sekolah	0	T	[1.01.02.2.01.0021]
94	1.01.000133	Peserta Didik Sekolah Dasar yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik	Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik	0Â	T	[1.01.02.2.01.0021]
95	1.01.000136	Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang berpotensi putus sekolah	Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang berpotensi putus sekolah	0	T	[1.01.02.2.02.0032]
96	1.01.000137	Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik	Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik	0	T	[1.01.02.2.02.0032]
97	1.01.000138	Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang menerima biaya personil peserta didik	Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang menerima biaya personil peserta didik	0	T	[1.01.02.2.02.0032]
98	1.01.000139	Peserta Didik yang belum menerima Perlengkapan Belajar	Siswa	Jumlah Peserta Didik yang belum menerima Perlengkapan Belajar	0	T	[1.01.02.2.02.0034] [1.01.02.2.01.0046] [1.01.02.2.02.0035] [1.01.02.2.02.0062] [1.01.02.2.04.0036] [1.01.02.2.03.0041] [1.01.02.3.05.0039] [1.01.02.3.06.0031] [1.01.02.4.05.0039] [1.01.02.4.06.0031]
99	1.01.000140	Peserta Didik yang belum menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Siswa	Jumlah Peserta Didik yang belum menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	0	T	[1.01.02.2.02.0061]
100	1.01.000141	Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Belajar	Siswa	Jumlah Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Belajar	0	T	[1.01.02.2.02.0034] [1.01.02.3.06.0039]
101	1.01.000142	Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Siswa	Jumlah Peserta Didik yang menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	0	T	[1.01.02.1.01.0066] [1.01.02.1.02.0061] [1.01.02.2.02.0061] [1.01.02.2.03.0035] [1.01.02.2.04.0037]
102	1.01.000143	Peserta Didik Sekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik	Peserta Didik	Jumlah Peserta DidikSekolah Dasar yang menerima biaya personil peserta didik	0	T	[1.01.02.2.01.0021] [1.01.02.2.01.0054]
103	1.01.000144	Prasarana PAUD yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah Prasarana PAUD yang memerlukan pemeliharaan	0	T	[1.01.02.2.03.0042]
104	1.01.000145	Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	0	T	[1.01.02.2.04.0049]
105	1.01.000146	Prasarana Sekolah yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah Prasarana Sekolah yang memerlukan pemeliharaan	0	T	[1.01.02.1.01.0043] [1.01.02.1.02.0035] [1.01.02.1.03.0042] [1.01.02.2.01.0019] [1.01.02.2.02.0030]
106	1.01.000147	Prasarana PAUD yang perlu direhabilitasi	Unit	Jumlah Prasarana PAUD yang perlu direhabilitasi	323	T	[1.01.02.2.03.0004]
107	1.01.000148	Prasarana PAUD yang telah direhabilitasi	Unit	Jumlah Prasarana PAUD yang telah direhabilitasi	28	T	[1.01.02.2.03.0004]
108	1.01.000149	Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi	Unit	Jumlah Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi	0	T	[1.01.02.2.04.0041]
109	1.01.000150	Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi	Unit	Jumlah Prasarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi	0	T	[1.01.02.2.04.0041]
110	1.01.000151	Prasarana sekolah	Unit	Jumlah Prasarana sekolah yang tersedia	0	T	[1.01.02.1.01.0014] [1.01.02.1.02.0010] [1.01.02.1.03.0008] [1.01.02.2.04.0052] [1.01.02.2.01.0006] [1.01.02.2.02.0012] [1.01.02.2.03.0002]
111	1.01.000152	Prasarana sekolah yang perlu direhabilitasi	Unit	jumlah prasarana sekolah yang perlu direhabilitasi	0	T	[1.01.02.1.01.0068] [1.01.02.1.02.0062] [1.01.02.1.03.0069] [1.01.02.2.01.0048] [1.01.02.2.02.0024] [1.01.02.3.06.0023] [1.01.02.2.01.0012]
112	1.01.000153	prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Unit	jumlah prasarana sekolah nonformal/kesetaraan	0	T	[1.01.02.2.04.0044] [1.01.02.2.04.0052]
113	1.01.000154	prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layak	Unit	jumlah prasarana sekolah nonformal/kesetaraan yang layak	0	T	[1.01.02.2.04.0044] [1.01.02.2.04.0005]
114	1.01.000155	prasarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang rusak sedang/berat	Unit	jumlah prasarana sekolah nonformal/kesetaraan yang rusak sedang/hebat	0	T	[1.01.02.2.04.0044]
115	1.01.000156	Prasarana sekolah yang layak	Unit	jumlah prasarana sekolah yang layak	0	T	[1.01.02.1.01.0014] [1.01.02.1.02.0010] [1.01.02.1.03.0008] [1.01.02.2.01.0006] [1.01.02.2.02.0012] [1.01.02.2.03.0002]
116	1.01.000157	Prasarana sekolah yang rusak sedang/berat	Unit	jumlah prasarana sekolah yang rusak sedang/berat	0	T	[1.01.02.1.01.0014] [1.01.02.1.02.0010] [1.01.02.1.03.0008] [1.01.02.2.01.0006] [1.01.02.2.02.0012] [1.01.02.2.03.0002]
117	1.01.000158	Publikasi kebahasaan dan kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Publikasi	Jumlah Publikasi kebahasaan dan kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	0	T	[1.01.06.1.01.0008] [1.01.06.1.01.0013] [1.01.06.2.01.0003]
118	1.01.000162	rasio Pendidik pada pSatuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%	jumlah rasio Pendidik pada satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0	T	[1.01.04.2.01.0001]
119	1.01.000163	rasio Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%	Jumlah rasio Pendidik pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0	T	[1.01.04.2.01.0001] [1.01.02.2.04.0012]
120	1.01.000190	Ruang Guru	Ruang	Jumlah Ruang Guru yang tersedia	254	T	[1.01.02.1.01.0001] [1.01.02.1.01.0003] [1.01.02.1.02.0001] [1.01.02.1.02.0003] [1.01.02.1.03.0001] [1.01.02.1.03.0003] [1.01.02.2.01.0001] [1.01.02.2.01.0003] [1.01.02.2.02.0001] [1.01.02.2.02.0003] [1.01.02.2.03.0040] [1.01.02.2.03.0028] [1.01.02.2.04.0038] [1.01.02.3.05.0003] [1.01.02.3.06.0003]
121	1.01.000191	Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi	Ruang	Jumlah Guru Pendidikan nonformal / kesetaraan yang telah direhabilitasi	0	T	[1.01.02.2.04.0050] [1.01.02.2.04.0060] [1.01.02.2.02.0015]
122	1.01.000192	Ruang Guru PAUD yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah Ruang Guru PAUD yang memerlukan pemeliharaan	121	T	[1.01.02.2.03.0049]
123	1.01.000193	Ruang Guru PAUD yang telah direhabilitasi	Ruang	jumlah ruang guru paud yang telah direhabilitasi	11	T	[1.01.02.2.03.0003] [1.01.02.2.03.0049]
124	1.01.000194	Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	0	T	[1.01.02.2.04.0060]
125	1.01.000196	Ruang Guru yang layak	Ruang	Jumlah Ruang guru yang layak	0	T	[1.01.02.1.01.0003] [1.01.02.1.01.0020] [1.01.02.1.02.0003] [1.01.02.1.02.0016] [1.01.02.1.03.0003] [1.01.02.1.03.0080] [1.01.02.2.01.0003] [1.01.02.2.01.0009] [1.01.02.2.02.0003] [1.01.02.2.02.0064]
126	1.01.000197	Ruang Guru yang rusak sedang/berat	Ruang	Jumlah ruang guru yang rusak sedang/berat	51	T	[1.01.02.1.01.0003] [1.01.02.1.02.0003] [1.01.02.1.03.0003] [1.01.02.2.01.0003] [1.01.02.2.02.0003]

127	1.01.000198	Ruang guru yang telah direhabilitasi	Ruang	Jumlah guru yang telah direhabilitasi	0	T	[1.01.02.1.01.0020] [1.01.02.1.02.0016] [1.01.02.1.03.0080] [1.01.02.2.01.0009] [1.01.02.2.02.0064] [1.01.02.3.05.0019] [1.01.02.3.06.0016] [1.01.02.4.06.0016]
128	1.01.000199	ruang kantor	Ruang	jumlah ruang kantor yang tersedia	0	T	[1.01.02.2.04.0001]
129	1.01.000200	ruang kegiatan anak	Ruang	jumlah ruang kegiatan anak yang tersedia	0	T	[1.01.02.2.03.0040]
130	1.01.000201	Ruang kelas	Ruang	jumlah ruang kelas yang tersedia	1620	T	[1.01.02.3.05.0069] [1.01.02.3.06.0065] [1.01.02.1.01.0072] [1.01.02.1.02.0064] [1.01.02.1.03.0070] [1.01.02.2.01.0047] [1.01.02.2.02.0059] [1.01.02.2.03.0030] [1.01.02.2.04.0039]
131	1.01.000202	Ruang kelas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi	Ruang	jumlah kelas pendidikan nonformal / kesetaraan yang telah direhabilitasi	0	T	[1.01.02.1.03.0079] [1.01.02.2.04.0050]
132	1.01.000203	Ruang kelas baru yang baru ditambahkan	Ruang	jumlah ruang kelas baru yang baru ditambhakan	0	T	[1.01.02.4.06.0063] [1.01.02.1.01.0001] [1.01.02.1.01.0072] [1.01.02.1.02.0001] [1.01.02.1.02.0064] [1.01.02.1.03.0001] [1.01.02.1.03.0070] [1.01.02.2.01.0001] [1.01.02.2.01.0047] [1.01.02.2.02.0001] [1.01.02.2.02.0059] [1.01.02.3.05.0002] [1.01.02.2.01.0002] [1.01.02.2.02.0002] [1.01.02.4.05.0067]
133	1.01.000204	Ruang Kelas PAUD yang memerlukan pemeliharaan	Unit	jumlah ruang kelas paud yang memerlukan pemeliharaan	198	T	
134	1.01.000205	Ruang kelas PAUD yang telah direhabilitasi	Ruang	jumlah ruang kelas paud yang telah direhabilitasi	31	T	[1.01.02.2.03.0003] [1.01.02.2.03.0051]
135	1.01.000206	Ruang Kelas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah Ruang Kelas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	0	T	
136	1.01.000207	Ruang kelas sekolah yang perlu direhabilitasi	Ruang	jumlah ruang kelas sekolah yang perlu direhabilitasi	0	T	[1.01.02.1.01.0019] [1.01.02.1.02.0069] [1.01.02.2.01.0008] [1.01.02.2.01.0051] [1.01.02.2.02.0014] [1.01.02.2.04.0061] [1.01.02.3.05.0019] [1.01.02.3.06.0015] [1.01.02.4.06.0015]
137	1.01.000208	Ruang kelas yang layak	Ruang	jumlah ruang kelas yang layak	1283	T	[1.01.02.1.01.0072] [1.01.02.1.02.0064] [1.01.02.1.03.0070] [1.01.02.2.01.0047] [1.01.02.2.02.0059]
138	1.01.000209	Ruang kelas yang rusak sedang/berat	Ruang	jumlah ruang kelas yang rusak sedang/berat	194	T	[1.01.02.1.01.0072] [1.01.02.1.02.0064] [1.01.02.1.03.0070] [1.01.02.2.01.0047] [1.01.02.2.02.0059]
139	1.01.000210	Ruang Kepala Sekolah	Ruang	jumlah ruang kepala sekolah yang tersedia	204	T	[1.01.02.1.01.0003] [1.01.02.1.02.0003] [1.01.02.1.03.0003] [1.01.02.2.01.0003] [1.01.02.2.02.0003] [1.01.02.2.03.0040]
140	1.01.000211	Ruang Kepala Sekolah yang layak	Ruang	jumlah ruang kepala sekolah yang layak	114	T	[1.01.02.1.01.0003] [1.01.02.1.02.0003] [1.01.02.1.03.0003] [1.01.02.2.01.0003] [1.01.02.2.02.0003]
141	1.01.000212	Ruang kepala sekolah yang perlu direhabilitasi	Ruang	Jumlah ruang kepala sekolah yang perlu direhabilitasi	15	T	[1.01.02.1.01.0003] [1.01.02.1.01.0020] [1.01.02.1.02.0003] [1.01.02.1.02.0016] [1.01.02.1.03.0003] [1.01.02.1.03.0080] [1.01.02.2.01.0003] [1.01.02.2.01.0009] [1.01.02.2.02.0003] [1.01.02.2.02.0045]
142	1.01.000213	Ruang kepala sekolah yang telah direhabilitasi	Ruang	jumlah ruang kepala sekolah yang telah direhabilitasi	0	T	[1.01.02.1.01.0020] [1.01.02.1.02.0016] [1.01.02.1.03.0080] [1.01.02.2.01.0009]
143	1.01.000215	ruang khusus pembelajaran	Ruang	jumlah ruang khusus pemnbelajaran yang tersedia	0	T	[1.01.02.2.04.0001]
144	1.01.000216	Ruang khusus praktik/bengkel kerja	Ruang	jumlah ruang khusus praktik/bengkel kerja	0	T	[1.01.02.2.04.0001]
145	1.01.000218	Ruang laboratorium	Ruang	jumlah ruang laboratorium yang tersedia	110	T	[1.01.02.4.05.0064] [1.01.02.1.02.0005] [1.01.02.1.03.0012] [1.01.02.2.01.0031] [1.01.02.2.02.0006] [1.01.02.2.04.0019] [1.01.02.2.04.0047] [1.01.02.3.05.0004] [1.01.02.3.06.0005] [1.01.02.4.06.0005] [1.01.02.4.06.0018]
146	1.01.000225	Ruang laboratorium yang layak	Ruang	jumlah ruang laboratorium yang layak	106	T	[1.01.02.1.02.0005] [1.01.02.1.03.0012] [1.01.02.1.01.0071] [1.01.02.1.03.0028] [1.01.02.1.02.0018] [1.01.02.2.02.0006] [1.01.02.2.01.0032] [1.01.02.2.04.0043] [1.01.02.3.06.0018]
147	1.01.000226	Ruang laboratorium yang rusak sedang/berat	Ruang	jumlah ruang laboratorium yang rusak sedang/berat	20	T	[1.01.02.1.02.0005] [1.01.02.1.03.0012] [1.01.02.2.02.0006]
148	1.01.000241	Ruang laboratorium IPA	Ruang	Jumlah ruang laboratorium IPA	58	T	[1.01.02.1.02.0001] [1.01.02.2.01.0001] [1.01.02.2.02.0001] [1.01.02.3.05.0009]
149	1.01.000259	ruang PAUD yang memliki mebel yang harus diganti	Ruang	Jumlah ruang PAUD yang memiliki mebel yang harus diganti	258	T	[1.01.02.2.03.0007]
150	1.01.000260	ruang PAUD yang memliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi	Ruang	Jumlah ruang PAUD yang memiliki mebel yang harus dilakukan rehabliitasi	169	T	[1.01.02.2.03.0007]
151	1.01.000261	ruang PAUD yang memliki mebel yang masih baik	Ruang	Jumlah ruang PAUD yang memiliki mebel yang masih baik	126	T	[1.01.02.2.03.0007]
152	1.01.000262	ruang PAUD yang tidak memliki mebel	Ruang	Jumlah ruang PAUD yang tidak memiliki mebel	112	T	[1.01.02.2.03.0007]
153	1.01.000263	ruang pembelejaran	Ruang	Jumlah ruang pembelajaran yang tersedia	0	T	[1.01.02.2.04.0001]
154	1.01.000264	ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki mebel yang harus diganti	Ruang	Jumlah ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memiliki mebel yang harus diganti	0	T	[1.01.02.2.04.0048]
155	1.01.000265	ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi	Ruang	Jmlah ruang pendidikan nonformal / kesetaraan yang memiliki mebel yang harus dilakukan rehabilitas	0	T	[1.01.02.2.04.0048]
156	1.01.000266	ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki mebel yang masih baik	Ruang	Jumlah ruang pendidikan nonformal / kesetaraan yang memiliki mebel yang masih baik	0	T	[1.01.02.2.04.0048]
157	1.01.000267	ruang Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang tidak memliki mebel	Ruang	Jumlah ruang pendidikan nonfformal / kesetaraan yang tidak memiliki mebel	0	T	[1.01.02.2.04.0048]
158	1.01.000268	Ruang perpustakaan	Ruang	Jumlah perpustakaan yang tersedia		Y	[1.01.02.1.01.0001] [1.01.02.1.02.0001] [1.01.02.1.03.0001] [1.01.02.2.01.0001] [1.01.02.2.02.0001]
159	1.01.000269	Ruang Perpustakaan Sekolah	Ruang	Jumlah ruang perpustakaan sekolah yang tersedia	159	T	[1.01.02.1.01.0011] [1.01.02.1.02.0007] [1.01.02.1.03.0005] [1.01.02.2.01.0005] [1.01.02.2.02.0005] [1.01.02.2.03.0033] [1.01.02.3.05.0011] [1.01.02.3.06.0007] [1.01.02.4.06.0007]

160	1.01.000270	Ruang Perpustakaan Sekolah yang layak	Ruang	Jumlah ruang perpustakaan sekolah yang layak	174	T	[1.01.02.1.01.0011] [1.01.02.1.02.0007] [1.01.02.1.03.0005] [1.01.02.2.01.0005] [1.01.02.2.02.0005]
161	1.01.000271	Ruang Perpustakaan Sekolah yang rusak sedang/berat	Ruang	Jumlah ruang perpustakaan sekolah yang rusak sedang/berat	24	T	[1.01.02.1.01.0011] [1.01.02.1.02.0007] [1.01.02.1.03.0005] [1.01.02.2.01.0005] [1.01.02.2.02.0005] [1.01.02.4.05.0028]
162	1.01.000272	Ruang pimpinan	Ruang	Jumlah ruang pimpinan yang tersedia	0	T	[1.01.02.1.01.0001] [1.01.02.1.02.0001] [1.01.02.1.03.0001] [1.01.02.2.01.0001] [1.01.02.2.02.0001]
163	1.01.000281	ruang sekolah yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah ruang sekolah yang memerlukan pemeliharaan	0	T	[1.01.02.3.05.0042] [1.01.02.3.06.0034] [1.01.02.4.05.0042] [1.01.02.4.06.0034]
164	1.01.000282	Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	Jumlah ruang serba guna/aula	0	T	[1.01.02.1.01.0012] [1.01.02.1.02.0008] [1.01.02.1.03.0006] [1.01.02.2.02.0007] [1.01.02.2.02.0019] [1.01.02.2.03.0038] [1.01.02.3.05.0012] [1.01.02.4.06.0008]
165	1.01.000283	Ruang serba guna/aula yang perlu direhabilitasi	Unit	Jumlah ruang serba guna /aula yang perlu direhabilitasi	0	T	[1.01.02.1.01.0029] [1.01.02.1.02.0066] [1.01.02.1.03.0078] [1.01.02.2.02.0019] [1.01.02.3.06.0021] [1.01.02.4.06.0021]
166	1.01.000284	Ruang Serba Guna/Aula yang layak	Ruang	Jumlah ruang reba guna/aula yang layak	0	T	[1.01.02.1.01.0012] [1.01.02.1.02.0008] [1.01.02.1.03.0006] [1.01.02.2.02.0007] [1.01.02.3.06.0008]
167	1.01.000285	Ruang Serba Guna/Aula yang rusak sedang/berat	Ruang	jumlah ruang serba guna/aula yang rusak sedang/berat	0	T	[1.01.02.1.01.0012] [1.01.02.1.02.0008] [1.01.02.1.03.0006] [1.01.02.2.02.0007] [1.01.02.4.05.0029]
168	1.01.000286	Ruang sirkulasi	Ruang	Jumlah ruang sirkulasi yang tersedia	0	T	[1.01.02.1.01.0001] [1.01.02.1.02.0001] [1.01.02.1.03.0001] [1.01.02.2.01.0001] [1.01.02.2.02.0001]
169	1.01.000288	ruang tenaga pendidik	Ruang	Jumlah ruang tenaga pendidik yang tersedia	0	T	[1.01.02.2.04.0001]
170	1.01.000289	Ruang TU	Ruang	Jumlah ruang TU yang tersedia	44	T	[1.01.02.4.06.0003] [1.01.02.1.01.0003] [1.01.02.1.02.0003] [1.01.02.1.03.0003] [1.01.02.2.01.0003] [1.01.02.2.02.0003]
171	1.01.000295	Ruang TU yang rusak sedang/berat	Ruang	Jumlah ruang TU yang rusak sedang/berat	7	T	[1.01.02.1.01.0003] [1.01.02.1.01.0020] [1.01.02.1.02.0003] [1.01.02.1.02.0016] [1.01.02.1.03.0003] [1.01.02.1.03.0080] [1.01.02.2.01.0003] [1.01.02.2.01.0009] [1.01.02.2.02.0003] [1.01.02.2.02.0044]
172	1.01.000296	Ruang UKS	Ruang	Jumlah ruang UKS yang tersedia	0	T	[1.01.02.1.01.0001] [1.01.02.1.02.0001] [1.01.02.1.03.0001] [1.01.02.2.01.0001] [1.01.02.2.02.0001] [1.01.02.2.03.0040]
173	1.01.000297	Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang tersedia	0	T	[1.01.02.1.01.0010] [1.01.02.1.02.0006] [1.01.02.1.03.0004] [1.01.02.2.01.0004] [1.01.02.2.02.0004] [1.01.02.2.03.0048] [1.01.02.2.03.0050] [1.01.02.3.05.0010] [1.01.02.2.04.0057] [1.01.02.4.06.0006]
174	1.01.000298	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang perlu direhabilitasi	Ruang	Jumlah ruangunit kesehatan sekolah yang perlu direhabilitasi	0	T	[1.01.02.2.01.0010] [1.01.02.2.02.0016] [1.01.02.2.03.0048] [1.01.02.2.04.0056] [1.01.02.3.06.0019] [1.01.02.4.06.0019] [1.01.02.1.01.0027] [1.01.02.1.02.0019] [1.01.02.1.03.0067]
175	1.01.000299	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang layak	Ruang	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang layak	0	T	[1.01.02.1.01.0010] [1.01.02.1.02.0006] [1.01.02.1.03.0004] [1.01.02.2.01.0004] [1.01.02.2.02.0004] [1.01.02.2.03.0048] [1.01.02.2.04.0056] [1.01.02.3.06.0006]
176	1.01.000300	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang rusak sdang/berat	Ruang	Jumlah ruang unit kesehatan sekolah yang rusak sedang/berat	0	T	[1.01.02.1.01.0010] [1.01.02.1.02.0006] [1.01.02.1.03.0004] [1.01.02.2.01.0004] [1.01.02.2.02.0004] [1.01.02.2.03.0048] [1.01.02.2.04.0056] [1.01.02.4.05.0027]
177	1.01.000301	Ruang yang memliki mebel yang harus diganti	Ruang	Jumlah ruang yang memiliki mebel yang harus diganti	0	T	[1.01.02.1.01.0036] [1.01.02.1.02.0028] [1.01.02.1.03.0035] [1.01.02.2.01.0014] [1.01.02.2.02.0025]
178	1.01.000302	Ruang yang memliki mebel yang harus dilakukan rehabilitasi	Ruang	Jumlah ruang yang memiliki mebel yang harus dilakukan rehabilitais	0	T	[1.01.02.1.01.0036] [1.01.02.1.02.0028] [1.01.02.1.03.0035] [1.01.02.2.01.0014] [1.01.02.2.02.0025]
179	1.01.000303	Ruang yang memliki mebel yang masih baik	Ruang	Jumlah ruang yang memiliki mebel yang masih baik	0	T	[1.01.02.1.01.0036] [1.01.02.1.02.0028] [1.01.02.1.03.0035] [1.01.02.1.01.0055] [1.01.02.1.02.0048] [1.01.02.1.03.0054] [1.01.02.2.01.0014] [1.01.02.2.02.0025] [1.01.02.2.01.0033] [1.01.02.2.02.0046] [1.01.02.2.03.0020] [1.01.02.3.05.0055] [1.01.02.2.04.0021] [1.01.02.3.06.0048] [1.01.02.4.05.0055] [1.01.02.4.06.0048] [1.01.02.2.03.0007] [1.01.02.3.05.0036] [1.01.02.2.01.0015] [1.01.02.3.05.0037] [1.01.02.3.05.0038] [1.01.02.3.05.0040]
180	1.01.000304	Ruang yang tidak memliki mebel	Ruang	Jumlah ruang yang tidak memiliki mebel	0	T	[1.01.02.1.01.0036] [1.01.02.1.02.0028] [1.01.02.1.03.0035] [1.01.02.2.01.0014] [1.01.02.2.02.0025] [1.01.02.3.06.0028] [1.01.02.4.05.0036]
181	1.01.000305	Ruang/Sudut Baca	Ruang	Ruang/Sudut Baca merupakan ruang atau area yang dilengkapi koleksi buku dan/atau karya peserta didik yang ditata secara menarik untuk menumbuhkan minat baca peserta didik	0	T	[1.01.02.1.01.0076] [1.01.02.1.02.0014] [1.01.02.1.02.0027] [1.01.02.1.02.0068] [1.01.02.1.03.0064] [1.01.02.2.01.0044] [1.01.02.2.02.0056] [1.01.02.2.03.0032] [1.01.02.2.04.0034] [1.01.02.3.05.0018] [1.01.02.3.05.0035] [1.01.02.3.06.0014] [1.01.02.3.06.0027] [1.01.02.4.05.0018] [1.01.02.4.05.0035] [1.01.02.4.06.0014] [1.01.02.4.06.0027] [1.01.02.3.06.0064] [1.01.02.4.06.0062] [1.01.02.4.05.0071]
182	1.01.000307	ruangan Sekolah yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah ruangan sekolah yang memerlukan pemeliharaan	0	T	
183	1.01.000308	Rumah Dinas Guru	Unit	Jumlah ruang dinas guru yang tersedia	0	T	[1.01.02.1.01.0067] [1.01.02.1.02.0065] [1.01.02.1.03.0068] [1.01.02.2.01.0007] [1.01.02.2.02.0009]
184	1.01.000309	Rumah Dinas Guru yang perlu direhabilitasi	Unit	Jumlah ruang dinas guru yang perlu direhabilitasi	0	T	[1.01.02.1.01.0073] [1.01.02.1.02.0074] [1.01.02.1.03.0074] [1.01.02.2.01.0013] [1.01.02.2.02.0021]

185	1.01.000310	Rumah dinas guru sekolah yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah dinas giuru sekolah yang memerlukan pemeliharan	0	T	
186	1.01.000311	Rumah Dinas guru yang layak	Unit	Jumlah rumah dinas yang layak	0	T	[1.01.02.1.01.0067] [1.01.02.1.02.0065] [1.01.02.1.03.0068] [1.01.02.2.01.0007] [1.01.02.2.02.0009]
187	1.01.000312	Rumah Dinas guru yang rusak sedang/berat	Unit	Jumlah rumah dinas guru yang rusak sedang/berat	0	T	[1.01.02.1.01.0067] [1.01.02.1.02.0065] [1.01.02.1.03.0068] [1.01.02.2.01.0007] [1.01.02.2.02.0009]
188	1.01.000313	Rumah Dinas Kepala Sekolah	Unit	Jumlah ruang dinas kepala sekolah yang tersedia	0	T	[1.01.02.1.01.0067] [1.01.02.1.02.0065] [1.01.02.1.03.0068] [1.01.02.2.01.0007] [1.01.02.2.02.0009] [1.01.02.3.06.0013] [1.01.02.4.06.0013]
189	1.01.000314	Rumah Dinas Kepala Sekolah yang perlu direhabilitasi	Unit	Jumlah rumah dinas kepala sekolah yang perlu direhabilitasi	0	T	[1.01.02.1.01.0073] [1.01.02.1.02.0074] [1.01.02.1.03.0074] [1.01.02.2.01.0013] [1.01.02.2.02.0021] [1.01.02.3.06.0026] [1.01.02.4.05.0034]
190	1.01.000315	Rumah Dinas Kepala Sekolah yang layak	Unit	Jumlah rumah dinas kepala sekolah yang layak	0	T	[1.01.02.1.01.0067] [1.01.02.1.02.0065] [1.01.02.1.03.0068] [1.01.02.2.01.0007] [1.01.02.2.02.0009]
191	1.01.000316	Rumah Dinas Kepala Sekolah yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah rumah dinas kepala sekolah yang memerlukan pemeliharaan	0	T	[1.01.02.2.01.0020] [1.01.02.3.06.0036] [1.01.02.4.05.0044]
192	1.01.000317	Rumah Dinas Kepala Sekolah yang rusak sedang/berat	Unit	Jumlah rumah dinas kepala sekolah yang rusak sedang/berat	0	T	[1.01.02.1.01.0067] [1.01.02.1.02.0065] [1.01.02.1.03.0068] [1.01.02.2.01.0007] [1.01.02.2.02.0009]
193	1.01.000318	Rumah Dinas Penjaga Sekolah	Unit	Jumlah rumah dinas penjaga sekolah yang tersedia	0	T	[1.01.02.1.01.0067] [1.01.02.1.02.0065] [1.01.02.1.03.0068] [1.01.02.2.01.0007] [1.01.02.2.02.0009]
194	1.01.000319	Rumah Dinas Penjaga Sekolah yang perlu direhabilitasi	Unit	Jumlah rumah dinas penjaga sekolah yang perlu direhabilitasi	0	T	[1.01.02.1.01.0073] [1.01.02.1.02.0074] [1.01.02.1.03.0074] [1.01.02.2.01.0013] [1.01.02.2.02.0021] [1.01.02.4.06.0026]
195	1.01.000320	Rumah Dinas penjaga sekolah yang layak	Unit	Jumlah rumah dinas penjaga sekolah yang layakj	0	T	[1.01.02.1.01.0067] [1.01.02.1.02.0065] [1.01.02.1.03.0068] [1.01.02.2.01.0007] [1.01.02.2.02.0009]
196	1.01.000321	Rumah dinas penjaga sekolah yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah rumah dinas penjaga sekolah yang memerlukan pemeilharaan	0	T	[1.01.02.2.02.0031] [1.01.02.4.06.0036]
197	1.01.000322	Rumah Dinas penjaga sekolah yang rusak sedang/berat	Unit	jumlah rumah dinas penjaga sekolah yang rusak sedang/berat	0	T	[1.01.02.1.01.0067] [1.01.02.1.02.0065] [1.01.02.1.03.0068] [1.01.02.2.01.0007] [1.01.02.2.02.0009]
198	1.01.000323	Rumah Dinas penjaga sekolah yang telah direhabilitasi	Unit	Jumlah rumah dinas penjaga sekolah yang telah direhabilitasi	0	T	[1.01.02.1.01.0073] [1.01.02.1.02.0074] [1.01.02.1.03.0074] [1.01.02.2.01.0013] [1.01.02.2.02.0021]
199	1.01.000324	Santri yang telah dididik dan diberdayakan	Peserta Didik	Jumlah santri yang telah dididik dan diberdayakan	0	T	
200	1.01.000325	Sarana PAUD yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah sarana PAUD yang menentukan memerlukan pemeliharaan	473	T	[1.01.02.2.03.0042]
201	1.01.000326	Sarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah sarana pendidikan nonformal / kesetaraan yang memerlukan pemilharaan	0	T	[1.01.02.2.04.0049]
202	1.01.000327	Sarana PAUD yang perlu direhabilitasi	Unit	Jumlah sarana PAUD yang perlu direhabilitasi	328	T	[1.01.02.2.03.0004]
203	1.01.000328	Sarana PAUD yang telah direhabilitasi	Unit	Jumlah PAUD yang telah direhabilitasi	24	T	[1.01.02.2.03.0004]
204	1.01.000329	Sarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi	Unit	Jumlah sarana pendidikan nonformal / kesetaraan yang perlu direhabilitasi	0	T	[1.01.02.2.04.0041]
205	1.01.000330	Sarana Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah direhabilitasi	Unit	Jumlah sarana pendidikan nonformal / kesetaraan yang telah direhabilitasi	0	T	[1.01.02.2.04.0041]
206	1.01.000331	Sarana sekolah	Unit	Jumlah sarana sekolah yang tersedia	0	T	[1.01.02.1.01.0014] [1.01.02.1.02.0010] [1.01.02.1.03.0008] [1.01.02.2.01.0006] [1.01.02.2.02.0012] [1.01.02.2.03.0002]
207	1.01.000332	Sarana sekolah yang perlu direhabilitasi	Unit	Jumlah sarana sekolah yang perlu direhabilitasi	0	T	[1.01.02.1.01.0068] [1.01.02.1.02.0062] [1.01.02.1.03.0069] [1.01.02.2.01.0048] [1.01.02.2.02.0024]
208	1.01.000333	sarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Unit	Jumlah sarana sekolah nonformal / kesetaraan yang tersedia	0	T	[1.01.02.2.04.0044]
209	1.01.000334	sarana Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layak	Unit	Jumlah sarana sekolah nonformal/kesetaraan yang layak	0	T	[1.01.02.2.04.0044]
210	1.01.000335	Sarana sekolah yang layak	Unit	Jumlah sarana sekolah yang layak	0	T	[1.01.02.1.01.0014] [1.01.02.1.01.0043] [1.01.02.1.02.0010] [1.01.02.1.03.0008] [1.01.02.2.01.0006] [1.01.02.2.02.0012] [1.01.02.2.03.0002]
211	1.01.000336	Sarana Sekolah yang memerlukan pemeliharaan	Unit	Jumlah sarana sekolah yang memerlukan pemeliharaan	0	T	[1.01.02.1.02.0035] [1.01.02.1.03.0042] [1.01.02.2.01.0019] [1.01.02.2.02.0030]
212	1.01.000337	Sarana Sekolah yang rusak sedang/berat	Unit	Jumlah saranasekolah yang rusak sedang/berat	0	T	[1.01.02.1.01.0014] [1.01.02.1.02.0010] [1.01.02.1.03.0008] [1.01.02.2.01.0006] [1.01.02.2.02.0012] [1.01.02.2.03.0002]
213	1.01.000338	Satuan Pendidikan Menengah yang telah disupervisi dan difasilitasi Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Satuan Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan menengah yang telah disupervisi dan difasilitasi Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh		Y	
214	1.01.000339	satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang belum menerima pembinaan kelembagaan	Orang	jumlah satuan pendidikan nonformal / kesetaraan yang belum menerima pembinaan kelembagaan	0	T	[1.01.02.2.04.0016]
215	1.01.000340	satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima pembinaan kelembagaan	Orang	Jumlah satuan pendidikan nonformal / kesetaraan yang menerima pembinaan kelembagaan	0	T	[1.01.02.2.04.0016] [1.01.02.4.06.0045]
216	1.01.000341	satuan PAUD yang belum menerima pembinaan kelembagaan	Orang	Jumlah satuan PAUD yang belum menerima pembinaan kelembagaan	80	T	[1.01.02.2.03.0017]
217	1.01.000342	satuan PAUD yang melaksanakan rekomendasi	satuan PAUD	Jumlah satuan PAUD yang melaksanakan rekomendasi	105	T	
218	1.01.000343	satuan PAUD yang membutuhkan perlengkapan sekolah	satuan PAUD	Jumlah satuan PAUD yang memburuhkan perlengkapan sekolah	289	T	[1.01.02.2.03.0009]
219	1.01.000344	satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tangga yang harus diganti	satuan PAUD	jumlah satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tangga yang harus diganti	111	T	[1.01.02.2.03.0008]
220	1.01.000345	satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik	satuan PAUD	jumlah satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik	77	T	[1.01.02.2.03.0008]
221	1.01.000346	satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi	satuan PAUD	jumlah satuan PAUD yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi	119	T	[1.01.02.2.03.0008]
222	1.01.000347	satuan PAUD yang menerima alat praktik dan peraga siswa	satuan PAUD	jumlah satuan PAUD yang menerima alat praktik dan peraga siswa	119	T	[1.01.02.2.03.0012]

223	1.01.000348	satuan PAUD yang menerima pembinaan kelembagaan	Orang	jumlah satuan paud yang menerima pembinaan kelembagaan	108	T	[1.01.02.2.03.0017]
224	1.01.000349	satuan PAUD yang menerima perlengkapan sekolah	satuan PAUD	jumlah satuan paud yang menerima perlengkapan sekolah	136	T	[1.01.02.2.03.0009]
225	1.01.000350	satuan PAUD yang mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	jumlah satuan paud yang mengelola dana BOP	170	T	[1.01.02.2.03.0018]
226	1.01.000351	satuan PAUD yang menyelenggarakan proses belajar	satuan PAUD	jumlah satuan paud yang menyelenggarakan proses belajar	261	T	[1.01.02.2.03.0013]
227	1.01.000352	satuan PAUD yang siap dievaluasi	satuan PAUD	jumlah satuan paud yang siap dievaluasi	141	T	
228	1.01.000353	satuan PAUD yang telah membutuhkan alat praktik dan peraga siswa	satuan PAUD	jumlah satuan paud yang telah membutuhkan alat praktik dan peraga siswa	90	T	[1.01.02.2.03.0012] [1.01.02.3.05.0041]
229	1.01.000354	satuan PAUD yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa	satuan PAUD	satuan paud yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa	141	T	[1.01.02.2.03.0012]
230	1.01.000355	satuan PAUD yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar	satuan PAUD	jumlah satuan PAUD yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar	20	T	[1.01.02.2.03.0013] [1.01.02.2.03.0014]
231	1.01.000356	satuan PAUD yang tidak memliki peralatan rumah tangga	satuan PAUD	jumlah satuan paud yang tidak memiliki peralatan rumah tangga	50	T	[1.01.02.2.03.0008]
232	1.01.000357	Satuan Pendidikan Dasar yang telah disupervisi dan difasilitasi Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Satuan Pendidikan	jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang telah disupervisi dan difasilitasi Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh		Y	[1.01.08.7.02.0001]
233	1.01.000358	Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren yang mendapatkan Fasilitasi untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Dayah	jumlah Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren yang mendapatkan Fasilitasi untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh		Y	[1.01.07.7.01.0004]
234	1.01.000359	Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren yang mendapatkan Supervisi untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Dayah	jumlah Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren yang mendapatkan Supervisi untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh		Y	[1.01.07.7.01.0012] [1.01.08.7.04.0001]
235	1.01.000360	Satuan Pendidikan di Aceh yang terevaluasi Pencapaian Standar Pendidikannya	Satuan Pendidikan	jumlah Satuan Pendidikan di Aceh yang terevaluasi Pencapaian Standar Pendidikannya		Y	[1.01.08.7.01.0001] [1.01.08.7.01.0002] [1.01.08.7.01.0003] [1.01.08.7.01.0004] [1.01.08.7.05.0003] [1.01.08.7.04.0002]
236	1.01.000361	Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal yang menerima pembiayaan dari Pemerintah Aceh	Satuan Pendidikan	jumlah Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal yang menerima pembiayaan dari Pemerintah Aceh		Y	[1.01.08.7.02.0001] [1.01.08.7.02.0002] [1.01.08.7.02.0003] [1.01.08.7.02.0004] [1.01.08.7.02.0002] [1.01.08.7.02.0003]
237	1.01.000363	Satuan Pendidikan Menengah Atas yang siap dievaluasi	Satuan Pendidikan	jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang siap dievaluasi	0	T	[1.01.02.3.06.0040] [1.01.02.4.07.0010]
238	1.01.000364	satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang membutuhkan alat praktik dan peraga siswa	satuan PAUD	jumlah satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang membutuhkan alat praktik dan peraga siswa	0	T	[1.01.02.2.04.0011] [1.01.02.2.04.0055]
239	1.01.000365	satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang membutuhkan perlengkapan sekolah	satuan PAUD	jumlah satuan pendidikan nonformal / kesetaraan yang membutuhkan perlengkapan sekolah	0	T	[1.01.02.2.04.0008] [1.01.02.2.04.0040] [1.01.02.2.04.0007]
240	1.01.000366	satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus diganti	satuan PAUD	jumlah satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus diganti	0	T	[1.01.02.2.04.0045]
241	1.01.000367	satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik	satuan PAUD	jumlah satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik	0	T	[1.01.02.2.04.0045]
242	1.01.000368	satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi	satuan PAUD	jumlah satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi	0	T	[1.01.02.2.04.0045]
243	1.01.000369	satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima alat praktik dan peraga siswa	satuan PAUD	jumlah satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima alat praktik dan peraga siswa	0	T	[1.01.02.2.04.0011]
244	1.01.000370	satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima perlengkapan sekolah	satuan PAUD	jumlah satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima perlengkapan sekolah	0	T	[1.01.02.2.04.0040]
245	1.01.000371	satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	jumlah satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang mengelola Dana BOP	0	T	[1.01.02.2.04.0017]
246	1.01.000372	satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menyelenggarakan proses belajar	satuan PAUD	jumlah satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menyelenggarakan proses belajar	0	T	[1.01.02.2.04.0046]
247	1.01.000373	satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa	satuan PAUD	jumlah satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa	0	T	[1.01.02.2.04.0011]
248	1.01.000374	satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar	satuan PAUD	jumlah satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar	0	T	[1.01.02.2.04.0009]
249	1.01.000375	satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang tidak memliki peralatan rumah tangga	satuan PAUD	jumlah satuan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang tidak memliki peralatan rumah tangga	0	T	[1.01.02.2.04.0045]
250	1.01.000376	Satuan pendidikan yang belum memiliki ruang UKS	Ruang	jumlah Satuan pendidikan yang belum memiliki ruang UKS	0	T	[1.01.02.1.01.0010] [1.01.02.1.02.0006] [1.01.02.1.03.0004] [1.01.02.2.01.0004] [1.01.02.2.02.0004]
251	1.01.000378	Satuan pendidikan yang belum menerima pembinaan kelembagaan	Orang	jumlah Satuan pendidikan yang belum menerima pembinaan kelembagaan	0	T	[1.01.02.1.01.0052] [1.01.02.1.02.0045] [1.01.02.1.03.0051] [1.01.02.2.01.0028] [1.01.02.2.02.0041]
252	1.01.000379	Satuan pendidikan yang melaksanakan Kurikulum Aceh yang Islami	Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan pendidikan yang melaksanakan Kurikulum Aceh yang Islami		Y	[1.01.08.7.03.0003] [1.01.08.7.03.0002] [1.01.08.7.03.0003]

253	1.01.000380	satuan pendidikan yang membutuhkan alat praktik dan peraga siswa	Satuan Pendidikan	jumlah satuan pendidikan yang membutuhkan alat praktik dan peraga siswa	0	T	[1.01.02.3.05.0015] [1.01.02.3.05.0016] [1.01.02.3.05.0017] [1.01.02.3.05.0045] [1.01.02.3.05.0046] [1.01.02.3.05.0047] [1.01.02.3.05.0048] [1.01.02.3.05.0050] [1.01.02.3.05.0051] [1.01.02.3.05.0052] [1.01.02.3.05.0053] [1.01.02.3.05.0054] [1.01.02.3.07.0001] [1.01.02.3.07.0002] [1.01.02.3.07.0003] [1.01.02.3.07.0004] [1.01.02.3.07.0005] [1.01.02.3.07.0006] [1.01.02.3.07.0007] [1.01.02.3.07.0008] [1.01.02.3.07.0009] [1.01.02.3.07.0010] [1.01.02.3.08.0001] [1.01.02.3.08.0002] [1.01.02.3.09.0001] [1.01.02.4.01.0041] [1.01.02.4.05.0001] [1.01.02.4.05.0002] [1.01.02.4.05.0003] [1.01.02.4.05.0004] [1.01.02.4.05.0005] [1.01.02.4.05.0006] [1.01.02.4.05.0007] [1.01.02.4.05.0008] [1.01.02.4.05.0009] [1.01.02.4.05.0010] [1.01.02.4.05.0011] [1.01.02.4.05.0012] [1.01.02.4.05.0013] [1.01.02.4.05.0014] [1.01.02.4.05.0015] [1.01.02.4.05.0016] [1.01.02.4.05.0017] [1.01.02.3.05.0019]
254	1.01.000383	Satuan pendidikan yang membutuhkan perlengkapan Sekolah	Satuan Pendidikan	jumlah Satuan pendidikan yang membutuhkan perlengkapan Sekolah	0	T	[1.01.02.1.01.0038] [1.01.02.1.02.0030] [1.01.02.1.03.0037] [1.01.02.2.01.0016] [1.01.02.2.01.0017] [1.01.02.2.02.0027] [1.01.02.2.02.0028] [1.01.02.3.06.0030] [1.01.02.4.05.0038] [1.01.02.4.06.0030]
255	1.01.000384	Satuan pendidikan yang memiliki fasilitas parkir yang memadai	Satuan Pendidikan	jumlah Satuan pendidikan yang memiliki fasilitas parkir yang memadai	0	T	[1.01.02.1.01.0015] [1.01.02.1.02.0011] [1.01.02.1.03.0009] [1.01.02.2.02.0010]
256	1.01.000386	Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus diganti	Satuan Pendidikan	jumlah satuan pendidikan yang memiliki peralatan rumah tangga yang harus diganti	0	T	[1.01.02.1.01.0037] [1.01.02.1.02.0029] [1.01.02.1.03.0036] [1.01.02.2.01.0015] [1.01.02.2.02.0026]
257	1.01.000387	satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus dilakukan rehabilitasi	Satuan Pendidikan	jumlah satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang harus dilakukan rehabilitasi	0	T	[1.01.02.2.01.0015]
258	1.01.000388	Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik	Satuan Pendidikan	jumlah Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tangga yang masih baik	0	T	[1.01.02.1.01.0037] [1.01.02.1.02.0029] [1.01.02.1.03.0036] [1.01.02.2.01.0015] [1.01.02.2.02.0026] [1.01.02.3.06.0029] [1.01.02.4.06.0029]
259	1.01.000389	Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi	Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan pendidikan yang memliki peralatan rumah tanggal yang harus dilakukan rehabilitasi	0	T	[1.01.02.1.01.0037] [1.01.02.1.02.0029] [1.01.02.1.03.0036] [1.01.02.2.02.0026]
260	1.01.000390	Satuan pendidikan yang menerima alat praktik dan peraga Siswa	Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan pendidikan yang menerima alat praktik dan peraga Siswa	0	T	[1.01.02.1.01.0046] [1.01.02.1.02.0038] [1.01.02.1.03.0045] [1.01.02.2.01.0022] [1.01.02.2.01.0055] [1.01.02.2.02.0035] [1.01.02.4.05.0046]
261	1.01.000391	Satuan pendidikan yang menerima bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Satuan Pendidikan Tinggi	Satuan Pendidikan	Jumlah Madrasah, Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Satuan Pendidikan Tinggi yang menerima bantuan Pembiayaan	0	T	[1.01.02.3.07.0001] [1.01.02.3.07.0002] [1.01.02.4.07.0003] [1.01.02.4.07.0004] [1.01.02.4.08.0001] [1.01.02.4.08.0002] [1.01.02.4.07.0005]
262	1.01.000392	Satuan pendidikan yang menerima pembinaan kelembagaan	Orang	Jumlah Satuan pendidikan yang menerima pembinaan kelembagaan	0	T	[1.01.02.1.01.0052] [1.01.02.1.02.0045] [1.01.02.1.03.0051] [1.01.02.1.01.0061] [1.01.02.1.02.0054] [1.01.02.1.03.0060] [1.01.02.3.04.0041] [1.01.02.4.04.0041] [1.01.02.2.01.0028] [1.01.02.2.02.0041] [1.01.02.2.01.0039] [1.01.02.2.02.0052] [1.01.02.2.03.0026] [1.01.02.2.04.0028] [1.01.02.3.05.0061] [1.01.02.3.06.0054] [1.01.02.4.05.0061] [1.01.02.4.06.0054]
263	1.01.000393	Satuan pendidikan yang menerima perlengkapan Sekolah	Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan pendidikan yang menerima perlengkapan Sekolah	0	T	[1.01.02.1.01.0038] [1.01.02.1.02.0030] [1.01.02.1.03.0037] [1.01.02.2.01.0016] [1.01.02.2.02.0027]
264	1.01.000394	Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan AN	Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan AN	0	T	[1.01.02.1.01.0078] [1.01.02.1.02.0072] [1.01.02.1.03.0071] [1.01.02.2.01.0050] [1.01.02.2.02.0058]
265	1.01.000395	Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar	Satuan Pendidikan	Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses belajar	0	T	[1.01.02.1.01.0078] [1.01.02.1.02.0072] [1.01.02.1.03.0071] [1.01.02.2.01.0050] [1.01.02.2.02.0058]
266	1.01.000396	Satuan Pendidikan yang siap menyelenggarakan AN	Satuan Pendidikan	jumlah satuan pendidikan yang siap menyelenggarakan AN	0	T	[1.01.02.1.01.0078] [1.01.02.1.02.0072] [1.01.02.1.03.0071] [1.01.02.2.01.0050] [1.01.02.2.02.0058]
267	1.01.000398	Satuan pendidikan yang telah membutuhkan alat praktik dan peraga Siswa	Satuan Pendidikan	jumlah satuan pendidikan yang membutuhkan alat praktik dan peraga siswa	0	T	[1.01.02.1.01.0046] [1.01.02.1.02.0038] [1.01.02.1.03.0045] [1.01.02.2.02.0035] [1.01.02.3.06.0038] [1.01.02.4.06.0038]
268	1.01.000399	Satuan pendidikan yang telah memiliki alat praktik dan peraga Siswa	Satuan Pendidikan	jumlah satuan pendidikan yang telah memiliki alat praktik dan peraga siswa	0	T	[1.01.02.1.01.0046] [1.01.02.1.02.0038] [1.01.02.1.03.0045] [1.01.02.2.01.0022] [1.01.02.2.02.0035]
269	1.01.000400	Satuan Pendidikan yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar	Satuan Pendidikan	jumlah Satuan Pendidikan yang telah memiliki perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan proses belajar	0	T	[1.01.02.1.01.0078] [1.01.02.1.02.0072] [1.01.02.1.03.0071] [1.01.02.3.08.0001] [1.01.02.2.01.0050] [1.01.02.2.02.0036] [1.01.02.2.02.0058] [1.01.02.4.05.0047] [1.01.02.4.09.0001]
270	1.01.000401	Satuan Pendidikan yang telah menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh	Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang telah menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh		Y	[1.01.08.7.01.0002] [1.01.02.3.06.0045]
271	1.01.000402	Satuan pendidikan yang tidak memliki peralatan rumah tangga	Satuan Pendidikan	jumlah satuan pendidikan yang tidak memiliki peralatan rumah tangga	0	T	[1.01.02.1.01.0037] [1.01.02.1.02.0029] [1.01.02.1.03.0036] [1.01.02.2.01.0015] [1.01.02.2.02.0026] [1.01.02.4.05.0037]
272	1.01.000403	Sekolah Dasar yang melaksanakan rekomendasi	Satuan Pendidikan	jumlah sekolah dasar yang melaksanakan rekomendasi	0	T	
273	1.01.000404	Sekolah Dasar yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	jumlah sekolah dasar yang mengelola dana bos	0	T	[1.01.02.2.01.0029]
274	1.01.000405	Sekolah Dasar yang siap dievaluasi	Satuan Pendidikan	jumlah sekolah dasar yang siap dievaluasi	0	T	
275	1.01.000408	Sekolah Menengah Pertama yang melaksanakan rekomendasi	Satuan Pendidikan	jumlah sekolah menengah pertama yang melaksanakan rekomendasi dari hasil pelaksanaan akreditasi	0	T	[1.01.02.4.07.0008]

276	1.01.000409	Sekolah Menengah Pertama yang mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	jumlah sekolah menengah pertama yang mengelola dana bos	0	T	[1.01.02.2.02.0042]
277	1.01.000410	Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang rusak sedang/berat	Unit	jumlah sekolah Nonformal/Kesetaraan dengan kondisi rusak sedang/berat	0	T	[1.01.02.2.04.0044]
278	1.01.000411	Sekolah Tinggi/Ma'had â€˜Aly	Satuan Pendidikan Tinggi	Sekolah Tinggi/Ma&had â€˜Aly	0	T	
279	1.01.000412	Sekolah Tinggi/Ma'had â€˜Aly yang terakrditasi A	Satuan Pendidikan Tinggi	Jumlah Sekolah Tinggi/Ma&had â€˜Aly yang terakrditasi A	0	T	
280	1.01.000413	Sekolah Tinggi/Ma'had â€˜Aly yang terakrditasi B	Satuan Pendidikan Tinggi	Jumlah Sekolah Tinggi/Ma&had â€˜Aly yang terakrditasi B	0	T	
281	1.01.000414	Sekolah Tinggi/Ma'had â€˜Aly yang yang belum terakreditasi	Satuan Pendidikan Tinggi	Jumlah Sekolah Tinggi/Ma&had â€˜Aly yang belum terakreditasi	0	T	
282	1.01.000415	Sekolah yang memiliki kantin yang memadai	Satuan Pendidikan	jumlah sekolah yang memiliki kantin dengan kondisi memadai	0	T	[1.01.02.1.01.0016] [1.01.02.1.02.0012] [1.01.02.1.03.0010] [1.01.02.2.02.0011]
283	1.01.000416	Sekolah yang memiliki ruang/sudut baca	Satuan Pendidikan	jumlah sekolah yang memiliki ruang/sudut baca	0	T	[1.01.02.1.01.0076] [1.01.02.1.02.0068] [1.01.02.1.02.0014] [1.01.02.1.02.0027] [1.01.02.1.03.0064] [1.01.02.1.01.0035] [1.01.02.1.01.0018]
284	1.01.000417	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dokumen	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	0	T	[1.01.03.2.02.0002]
285	1.01.000418	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dokumen	Jumlah silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	0	T	[1.01.03.2.01.0002]
286	1.01.000421	Siswa PAUD yang berpotensi putus sekolah	Siswa	Jumlah siswa yang berpotensi putus sekolah pada PAUD	0	T	[1.01.02.2.03.0011]
287	1.01.000422	Siswa PAUD yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik	Siswa	Jumlah siswa PAUD yang layak menerima namun belum menerima biaya personil peserta didik	0	T	[1.01.02.2.03.0011]
288	1.01.000423	Siswa PAUD yang menerima biaya personil peserta didik	Siswa	Jumlah siswa PAUD yang menerima biaya personil peserta didik	0	T	[1.01.02.3.06.0001] [1.01.02.3.06.0002] [1.01.02.3.06.0003] [1.01.02.3.06.0004] [1.01.02.3.06.0005] [1.01.02.3.06.0006] [1.01.02.3.06.0007] [1.01.02.3.06.0008] [1.01.02.4.06.0001] [1.01.02.4.06.0002] [1.01.02.4.06.0003] [1.01.02.4.06.0004] [1.01.02.4.06.0005] [1.01.02.4.06.0006] [1.01.02.4.06.0007] [1.01.02.4.06.0008] [1.01.02.2.02.0011]
289	1.01.000424	Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berpotensi putus sekolah	Siswa	Jumlah siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berpotensi putus sekolah	0	T	[1.01.02.2.04.0010]
290	1.01.000425	Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang layak namun belum menerima biaya personil peserta didik	Siswa	Jumlah siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang layak menerima namun belum menerima biaya personil peserta didik	0	T	[1.01.02.2.04.0010]
291	1.01.000426	Siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima biaya personil peserta didik	Siswa	jumlah siswa Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang menerima biaya personil peserta didik	0	T	[1.01.02.4.07.0001] [1.01.02.4.07.0002] [1.01.02.2.04.0010]
292	1.01.000429	siswa yang membutukan perlengkapan Siswa PAUD	Siswa	Jumlah siswa PAUD yang membutukan perlengkapan PAUD	0	T	[1.01.02.2.03.0041] [1.01.02.2.03.0010]
293	1.01.000430	Siswa yang membutukan perlengkapan Peserta Didik	Siswa	jumlah siswa yang membutukan perlengkapan Peserta Didik	0	T	[1.01.02.1.01.0039] [1.01.02.1.02.0031] [1.01.02.1.03.0038] [1.01.02.2.01.0046] [1.01.02.2.02.0062]
294	1.01.000431	Siswa yang menerima perlengkapan Siswa PAUD	Siswa	jumlah siswa PAUD yang menerima perlengkapan Siswa	0	T	[1.01.02.2.03.0041]
295	1.01.000432	Siswa yang menerima perlengkapan Peserta Didik	Siswa	jumlah siswa yang menerima perlengkapan Peserta Didik	0	T	[1.01.02.1.01.0039] [1.01.02.1.02.0031] [1.01.02.1.03.0038] [1.01.02.2.01.0046] [1.01.02.2.02.0062]
296	1.01.000433	Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik	Peserta Didik	jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba akademik	0	T	[1.01.02.1.01.0049] [1.01.02.1.02.0041] [1.01.02.1.03.0048] [1.01.02.2.01.0025] [1.01.02.2.02.0038] [1.01.02.3.05.0049] [1.01.02.3.06.0041] [1.01.02.4.05.0049] [1.01.02.4.06.0041] [1.01.02.2.03.0034] [1.01.02.2.04.0035]
297	1.01.000434	Siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba nonakademik	Peserta Didik	jumlah siswa yang mengikuti ajang kompetisi/lomba nonakademik	0	T	[1.01.02.1.01.0049] [1.01.02.1.02.0041] [1.01.02.1.02.0060] [1.01.02.1.03.0048] [1.01.02.1.03.0065] [1.01.02.2.01.0025] [1.01.02.2.02.0038]
298	1.01.000435	Tempat beribadah	Ruang	jumlah sekolah yang memiliki tempat beribadah	0	T	[1.01.02.1.01.0001] [1.01.02.1.02.0001] [1.01.02.1.03.0001] [1.01.02.2.01.0001] [1.01.02.2.02.0001]
299	1.01.000436	Tempat bermain/berolahraga	Unit	jumlah sekolah yang memiliki tempat bermain/berolahraga	0	T	[1.01.02.1.01.0001] [1.01.02.1.02.0001] [1.01.02.1.03.0001] [1.01.02.2.01.0001] [1.01.02.2.02.0001]
300	1.01.000437	Tempat ibadah dayah yang telah direhabilitasi	Unit	jumlah tempat ibadah dayah yang telah direhabilitasi		Y	[1.01.07.7.01.0009]
301	1.01.000438	Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Menengah di Papua yang telah lulus sertifikasi	Orang	Jumlah tenaga kependidikan di Papua dari Orang Asli Papua pada Sekolah Menengah yang telah lulus sertifikasi		Y	
302	1.01.000439	Tenaga Kependidikan Dayah yang telah lulus sertifikasi	Orang	Jumlah Tenaga Kependidikan Dayah yang telah lulus sertifikasi		Y	
303	1.01.000440	Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi	Orang	Jumlah tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang telah lulus sertifikasi	0	T	[1.01.02.2.04.0014]
304	1.01.000441	Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi	Orang	Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang telah lulus sertifikasi	120	T	[1.01.02.2.03.0015]
305	1.01.000443	Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama yang telah lulus sertifikasi	Orang	jumlah tenaga kependidikan pada sekolah menengah pertama yang telah lulus sertifikasi	535	T	[1.01.02.2.02.0039]
306	1.01.000444	Tenaga Kependidikan pada Sekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi	Orang	jumlah tenaga kependidikan pada sekolah dasar yang telah lulus sertifikasi	979	T	[1.01.02.2.01.0026]
307	1.01.000447	Tenaga Kependidikan Dayah	Orang	jumlah tenaga kependidikan dayah yang tersedia		Y	
308	1.01.000448	Tenaga Kependidikan Dayah yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	Jumlah Tenaga Kependidikan pada Dayah yang berkualifikasi akademik S1/DIV		Y	
309	1.01.000449	Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	jumlah tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal / kesetaraan yang berkualifikasi akademik S1/DIV	0	T	[1.01.02.2.04.0014]
310	1.01.000450	Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD	Orang	jumlah tenaga kependidikan pada satuan paud	0	T	[1.01.02.2.03.0015] [1.01.02.2.04.0014]

311	1.01.000451	Tenaga Kependidikan pada satuan PAUD yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	jumlah tenaga kependidikan pada satuan paud yang berkualifikasi akademik S1/DIV	0	T	[1.01.02.2.03.0015]
312	1.01.000452	Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	jumlah tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar	10	T	[1.01.02.2.01.0026]
313	1.01.000453	Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	Jumlah Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang berkualifikasi akademik S1/DIV	0	T	[1.01.02.2.01.0026]
314	1.01.000456	Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama	Orang	Jumlah tenaga kependidikan pada sekolah menengah pertama	39	T	[1.01.02.2.02.0039]
315	1.01.000457	Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Pertama yang berkualifikasi akademik S1/DIV	Orang	Jumlah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi akademik S1/DIV pada Sekolah Menengah Pertama	13	T	[1.01.02.2.02.0039]
316	1.01.000458	Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan	Orang	jumlah tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi kenaikan pangkat/golongan	0	T	[1.01.02.1.01.0051] [1.01.02.1.02.0043] [1.01.02.1.03.0050] [1.01.02.2.01.0027] [1.01.02.2.02.0040] [1.01.02.2.03.0016] [1.01.02.2.04.0015]
317	1.01.000459	Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi pemberian promosi	Orang	jumlah tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi pemberian promosi	0	T	[1.01.02.1.01.0051] [1.01.02.1.02.0043] [1.01.02.1.03.0050] [1.01.02.2.01.0027] [1.01.02.2.02.0040] [1.01.02.2.03.0016] [1.01.02.2.04.0015]
318	1.01.000460	Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi	Orang	jumlah tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kompetensi	0	T	[1.01.02.1.01.0051] [1.01.02.1.02.0043] [1.01.02.1.03.0050] [1.01.02.2.01.0027] [1.01.02.2.02.0040] [1.01.02.2.03.0016] [1.01.02.2.04.0015]
319	1.01.000461	Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualifikasi	Orang	Jumlah Tenaga Kependidikan yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualifikasi	0	T	[1.01.02.1.01.0051] [1.01.02.1.02.0043] [1.01.02.1.03.0050] [1.01.02.2.01.0027] [1.01.02.2.02.0040] [1.01.02.2.03.0016] [1.01.02.2.04.0015]
320	1.01.000462	Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	0	T	[1.01.02.2.03.0019]
321	1.01.000463	Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Orang	Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP pendidikan Nonformal / Kesetaraan	0	T	[1.01.02.2.04.0018]
322	1.01.000465	Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	0	T	[1.01.02.2.01.0030]
323	1.01.000468	Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	Jumlah Tenaga Pengelola yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	0	T	[1.01.02.2.02.0043]
324	1.01.000474	Unit sekolah	Unit	jumlah unit sekolah yang tersedia	0	T	[1.01.02.1.01.0001] [1.01.02.2.01.0001] [1.01.02.2.02.0001] [1.01.03.2.01.0005] [1.01.02.3.05.0001]
325	1.01.000475	Unit sekolah yang layak	Unit	jumlah unit sekolah yang layak	0	T	[1.01.02.1.01.0001] [1.01.02.2.01.0001] [1.01.02.2.02.0001]
326	1.01.000476	Unit sekolah yang rusak sedang/berat	Unit	jumlah unit sekolah yang rusak sedang/berat	0	T	[1.01.02.1.01.0001] [1.01.02.2.01.0001] [1.01.02.2.02.0001]
327	1.01.000480	Universitas, Institut, Politeknik, Akademi, Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang didirikan	Satuan Pendidikan Tinggi	Jumlah Universitas, Institut, Politeknik, Akademi, Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang didirikan	0	T	
328	1.01.000481	Usulan pendirian sekolah baru	Dokumen	jumlah usulan pendirian sekolah baru	0	T	[1.01.05.1.01.0001] [1.01.05.2.01.0001] [1.01.05.2.02.0001]
329	1.01.000483	Utilitas PAUD yang memerlukan pemeliharaan	Unit	jumlah Utilitas PAUD yang memerlukan pemeliharaan	196	T	[1.01.02.2.03.0042] [1.01.02.2.03.0006]
330	1.01.000484	Utilitas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	Unit	jumlah Utilitas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang memerlukan pemeliharaan	0	T	[1.01.02.2.04.0049]
331	1.01.000485	utilitas PAUD yang perlu direhabilitasi	Unit	jumlah utilitas PAUD yang perlu direhabilitasi	149	T	[1.01.02.2.03.0004] [1.01.02.2.03.0045]
332	1.01.000486	utilitas Pendidikan Nonformal / Kesetaraan yang perlu direhabilitasi	Unit	jumlah utilitas pendidikan nonformal / kesetaraan yang perlu direhabilitasi	0	T	[1.01.02.2.04.0041]
333	1.01.000487	Utilitas sekolah	Unit	jumlah utilitas sekolah yang tersedia	0	T	[1.01.02.1.01.0014] [1.01.02.1.02.0010] [1.01.02.1.03.0008] [1.01.02.2.01.0006] [1.01.02.2.02.0012] [1.01.02.2.03.0002] [1.01.02.3.05.0014] [1.01.02.3.06.0010] [1.01.02.3.06.0035] [1.01.02.4.06.0010]
334	1.01.000488	Utilitas sekolah yang perlu direhabilitasi	Unit	jumlah utilitas sekolah yang perlu direhabilitasi	340	T	[1.01.02.1.01.0068] [1.01.02.1.02.0062] [1.01.02.1.03.0069] [1.01.02.2.01.0048] [1.01.02.2.02.0024] [1.01.02.4.05.0031] [1.01.02.4.06.0023]
335	1.01.000489	utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Unit	jumlah utilitas sekolah nonformal/kesetaraan	0	T	[1.01.02.2.04.0044] [1.01.02.2.04.0002]
336	1.01.000490	utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang layak	Unit	jumlah utilitas sekolah nonformal/kesetaraan yang layak	0	T	[1.01.02.2.04.0044] [1.01.02.2.04.0006]
337	1.01.000491	utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang rusak sedang/berat	Unit	jumlah utilitas sekolah nonformal/kesetaraan yang rusak sedang/berat	0	T	[1.01.02.2.04.0003] [1.01.02.2.04.0044] [1.01.02.2.04.0004]
338	1.01.000492	Utilitas sekolah yang layak	Unit	jumlah utilitas sekolah yang layak	0	T	[1.01.02.1.01.0014] [1.01.02.1.02.0010] [1.01.02.1.03.0008] [1.01.02.2.01.0006] [1.01.02.2.02.0012] [1.01.02.2.03.0002]
339	1.01.000493	Utilitas Sekolah yang memerlukan pemeliharaan	Unit	jumlah utilitas sekolah yang memerlukan pemeliharaan	0	T	[1.01.02.1.01.0043] [1.01.02.1.02.0035] [1.01.02.1.03.0042] [1.01.02.2.01.0019] [1.01.02.2.02.0030] [1.01.02.4.05.0043] [1.01.02.4.06.0035]
340	1.01.000494	Utilitas sekolah yang rusak sedang/berat	Unit	jumlah utilitas sekolah yang rusak sedang/berat	0	T	[1.01.02.1.01.0014] [1.01.02.1.02.0010] [1.01.02.1.03.0008] [1.01.02.2.01.0006] [1.01.02.2.02.0012] [1.01.02.2.03.0002]
341	1.01.000495	jumlah dayah yang terakreditasi C	Satuan Pendidikan	satuan pendidikan dayah yang terakreditasi C		Y	
342	1.01.000496	jumlah dayah yang terakreditasi D	Satuan Pendidikan	satuan pendidikan yang terakreditasi D		Y	[1.01.07.7.01.0011]
343	1.01.000497	Jumlah Sekolah Dasar negeri	Unit	Jumlah SD yang yang dikelola oleh pihak pemerintah	139	T	
344	1.01.000498	Jumlah Sekolah Dasar swasta	Unit	Jumlah Sekolah Dasar yang dikelola oleh pihak Swasta	3	T	
345	1.01.000499	jumlah Sekolah Dasar	Unit	Jumlah Sekolah Dasar Negeri dan Swasta	142	T	[1.01.02.1.01.0001] [1.01.02.2.01.0001]
346	1.01.000500	Jumlah Siswa Sekolah Dasar negeri	Orang	Jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pemerintah	11082	T	
347	1.01.000501	Jumlah Siswa Sekolah Dasar swasta	Orang	Jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pihak swasta	443	T	

348	1.01.000502	jumlah Siswa Sekolah Dasar	Orang	Jumlah siswa pada jenjang sekolah dasar yang dikelola oleh pemerintah dan pihak swasta	11525	T	[1.01.02.2.01.0001] [1.01.02.2.01.0026]
349	1.01.000503	Jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki negeri	Orang	Jumlah siswa sekolah dasar negeri berjenis kelamin laki-laki	5766	T	
350	1.01.000504	Jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki swasta	Orang	Jumlah siswa sekolah dasar swasta berjenis kelamin laki-laki	227	T	
351	1.01.000505	jumlah Siswa Sekolah Dasar laki-laki	Orang	Jumlah siswa sekolah dasar negeri dan swasta berjenis kelamin laki-laki	5993	T	
352	1.01.000506	Jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan negeri	Orang	Jumlah siswa sekolah dasar negeri berjenis kelamin perempuan	5316	T	
353	1.01.000507	Jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan swasta	Orang	Jumlah siswa sekolah dasar swasta berjenis kelamin Perempuan	216	T	
354	1.01.000508	jumlah Siswa Sekolah Dasar perempuan	Orang	Jumlah siswa sekolah dasar negeri dan swasta berjenis kelamin Perempuan	5532	T	
355	1.01.000509	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 1 negeri	Orang	Jumlah Siswa kelas 1 pada Sekolah Dasar negeri	2019	T	
356	1.01.000510	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 1 swasta	Orang	Jumlah Siswa kelas 1 pada Sekolah Dasar negeri	69	T	
357	1.01.000511	jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 1	Orang	Jumlah Siswa kelas 1 pada Sekolah Dasar negeri	2088	T	
358	1.01.000512	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 2 negeri	Orang	Jumlah Siswa kelas 2 pada Sekolah Dasar negeri	1938	T	
359	1.01.000513	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 2 swasta	Orang	Jumlah Siswa kelas 2 pada Sekolah Dasar negeri	78	T	
360	1.01.000514	jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 2	Orang	Jumlah Siswa kelas 2 pada Sekolah Dasar negeri	2016	T	
361	1.01.000515	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 3 negeri	Orang	Jumlah Siswa kelas 3 pada Sekolah Dasar negeri	2023	T	
362	1.01.000516	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 3 swasta	Orang	Jumlah Siswa kelas 3 pada Sekolah Dasar negeri	69	T	
363	1.01.000517	jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 3	Orang	Jumlah Siswa kelas 3 pada Sekolah Dasar	2092	T	
364	1.01.000518	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 4 negeri	Orang	Jumlah Siswa kelas 4 pada Sekolah Dasar negeri	2015	T	
365	1.01.000519	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 4 swasta	Orang	Jumlah Siswa kelas 4 pada Sekolah Dasar swasta	88	T	
366	1.01.000520	jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 4	Orang	Jumlah Siswa kelas 4 pada Sekolah Dasar	2103	T	
367	1.01.000521	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 5 negeri	Orang	Jumlah Siswa kelas 5 pada Sekolah Dasar negeri	1799	T	
368	1.01.000522	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 5 swasta	Orang	Jumlah Siswa kelas 5 pada Sekolah Dasar swasta	66	T	
369	1.01.000523	jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 5	Orang	Jumlah Siswa kelas 5 pada Sekolah Dasar	1865	T	
370	1.01.000524	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 6 negeri	Orang	Jumlah Siswa kelas 6 pada Sekolah Dasar negeri	1860	T	
371	1.01.000525	Jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 6 swasta	Orang	Jumlah Siswa kelas 6 pada Sekolah Dasar swasta	72	T	
372	1.01.000526	jumlah Siswa Sekolah Dasar tingkat 6	Orang	Jumlah Siswa kelas 6 pada Sekolah Dasar	1932	T	
373	1.01.000527	Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia dibawah 7 tahun negeri	Orang	Jumlah siswa usia dibawah 7 tahun pada Sekolah Dasar Negeri	1481	T	
374	1.01.000528	Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia dibawah 7 tahun swasta	Orang	Jumlah siswa usia dibawah 7 tahun pada Sekolah Dasar Swasta	47	T	
375	1.01.000529	jumlah Siswa Sekolah Dasar usia dibawah 7 tahun	Orang	Jumlah siswa usia dibawah 7 tahun pada Sekolah Dasar	1528	T	
376	1.01.000533	Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia diatas 12 tahun negeri	Orang	Jumlah siswa usia diatas 12 tahun pada Sekolah Dasar Negeri	272	T	
377	1.01.000534	Jumlah Siswa Sekolah Dasar usia diatas 12 tahun swasta	Orang	Jumlah siswa usia diatas 12 tahun pada Sekolah Dasar Swasta	0	T	
378	1.01.000535	jumlah Siswa Sekolah Dasar usia diatas 12 tahun	Orang	Jumlah siswa usia diatas 12 tahun pada Sekolah Dasar	272	T	
379	1.01.000536	Jumlah Siswa Sekolah Dasar mengulang negeri	Orang	Jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Dasar Negeri	616	T	
380	1.01.000537	Jumlah Siswa Sekolah Dasar mengulang swasta	Orang	Jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Dasar Swasta	0	T	
381	1.01.000538	jumlah Siswa Sekolah Dasar mengulang	Orang	Jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Dasar	616	T	
382	1.01.000539	Jumlah Siswa Sekolah Dasar putus negeri	Orang	Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Dasar Swasta	495	T	
383	1.01.000540	Jumlah Siswa Sekolah Dasar putus swasta	Orang	Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Dasar Swasta	0	T	
384	1.01.000541	jumlah Siswa Sekolah Dasar putus	Orang	Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Dasar	495	T	
385	1.01.000542	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru negeri	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru pada Sekolah Dasar Negeri	1819	T	
386	1.01.000543	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru swasta	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru pada Sekolah Dasar Swasta	23	T	
387	1.01.000544	jumlah kepala Sekolah Dasar & guru	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru pada Sekolah Dasar	1842	T	
388	1.01.000545	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki negeri	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar Negeri	503	T	
389	1.01.000546	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki swasta	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar Swasta	4	T	
390	1.01.000547	jumlah kepala Sekolah Dasar & guru laki-laki	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar	507	T	
391	1.01.000548	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru perempuan negeri	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar Negeri	1316	T	
392	1.01.000549	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru perempuan swasta	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar Swasta	19	T	
393	1.01.000550	jumlah kepala Sekolah Dasar & guru perempuan	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar	1335	T	
394	1.01.000551	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah dibawah s1 negeri	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah S1 pada Sekolah Dasar Negeri	105	T	

395	1.01.000552	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah dibawah s1 swasta	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah S1 pada Sekolah Dasar Swasta	1	T	
396	1.01.000553	jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah dibawah s1	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah dibawah S1 pada Sekolah Dasar	106	T	
397	1.01.000554	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah s1 keatas negeri	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah S1 keatas pada Sekolah Dasar Negeri	1714	T	
398	1.01.000555	Jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah s1 keatas swasta	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah S1 keatas pada Sekolah Dasar Swasta	22	T	
399	1.01.000556	jumlah kepala Sekolah Dasar & guru ijazah s1 keatas	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru yang memiliki ijazah S1 keatas pada Sekolah Dasar	1736	T	
400	1.01.000557	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar laki-laki negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar Negeri	89	T	
401	1.01.000558	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar laki-laki swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar Swasta	2	T	
402	1.01.000559	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar laki-laki	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Dasar	91	T	
403	1.01.000560	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar perempuan negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar Negeri	80	T	
404	1.01.000561	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar perempuan swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar Swasta	1	T	
405	1.01.000562	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar perempuan	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Dasar	81	T	
406	1.01.000563	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah SMA negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMA pada Sekolah Dasar	122	T	
407	1.01.000564	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah SMA swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMA pada Sekolah Dasar Swasta	1	T	
408	1.01.000565	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah SMA	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMA pada Sekolah Dasar	123	T	
409	1.01.000566	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah diatas SMA negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMA ke atas pada Sekolah Dasar Negeri	28	T	
410	1.01.000567	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah diatas SMA swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMA keatas pada Sekolah Dasar Swasta	1	T	
411	1.01.000568	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah diatas SMA	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMA ke atas pada Sekolah Dasar	29	T	
412	1.01.000569	Jumlah rombongan belajar Sekolah Dasar negeri	Orang	Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Dasar Negeri	0	T	
413	1.01.000570	Jumlah rombongan belajar Sekolah Dasar swasta	Orang	Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Dasar Swasta	0	T	
414	1.01.000571	jumlah rombongan belajar Sekolah Dasar	Orang	Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Dasar	0	T	
415	1.01.000572	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar negeri	Unit	Jumlah ruang kelas pada Sekolah Dasar Negeri	780	T	
416	1.01.000573	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar swasta	Unit	Jumlah ruang kelas pada Sekolah Dasar Swasta	12	T	
417	1.01.000574	jumlah ruang kelas Sekolah Dasar	Unit	Jumlah ruang kelas pada Sekolah Dasar	792	T	
418	1.01.000575	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar baik negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Dasar Negeri	232	T	
419	1.01.000576	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar baik swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Dasar Swasta	12	T	
420	1.01.000577	jumlah ruang kelas Sekolah Dasar baik	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Dasar	242	T	
421	1.01.000578	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak ringan negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan pada Sekolah Dasar Negeri	225	T	
422	1.01.000579	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak ringan swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan pada Sekolah Dasar Swasta	0	T	
423	1.01.000580	jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak ringan	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan pada Sekolah Dasar	225	T	
424	1.01.000581	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak sedang negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Dasar Negeri	178	T	
425	1.01.000582	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak sedang swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Dasar Swasta	0	T	
426	1.01.000583	jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak sedang	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Dasar	178	T	
427	1.01.000584	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak berat negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Dasar Negeri	145	T	
428	1.01.000585	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak berat swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Dasar Swasta	0	T	
429	1.01.000586	jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak berat	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Dasar	145	T	
430	1.01.000587	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak total negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Dasar Negeri	0	T	
431	1.01.000588	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak total swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Dasar Swasta	0	T	
432	1.01.000589	jumlah ruang kelas Sekolah Dasar rusak total	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Dasar	0	T	
433	1.01.000590	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah s1 negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah S1 pada Sekolah Dasar Negeri	0	T	
434	1.01.000591	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah s1 swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah S1 pada Sekolah Dasar Swasta	0	T	
435	1.01.000592	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Dasar ijazah s1	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki ijazah S1 pada Sekolah Dasar	0	T	
436	1.01.000593	Jumlah Sekolah Menengah Pertama negeri	Unit	Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri	49	T	

437	1.01.000594	Jumlah Sekolah Menengah Pertama swasta	Unit	Jumlah Sekolah Menengah Pertama Swasta	8	T	
438	1.01.000595	jumlah Sekolah Menengah Pertama	Unit	Jumlah Sekolah Menengah Pertama	57	T	[1.01.02.2.02.0039]
439	1.01.000596	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama negeri	Orang	Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	5122	T	
440	1.01.000597	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama swasta	Orang	Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	447	T	
441	1.01.000598	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama	Orang	Jumlah Siswa pada Sekolah Menengah Pertama	4854	T	[1.01.02.2.01.0001] [1.01.02.2.02.0039]
442	1.01.000599	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki negeri	Orang	Jumlah siswa dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	2528	T	
443	1.01.000600	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki swasta	Orang	Jumlah siswa dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	247	T	
444	1.01.000601	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama laki-laki	Orang	Jumlah siswa dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama	27275	T	
445	1.01.000602	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan negeri	Orang	Jumlah siswa dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	2594	T	
446	1.01.000603	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan swasta	Orang	Jumlah siswa dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	200	T	
447	1.01.000604	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama perempuan	Orang	Jumlah siswa dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama	795	T	
448	1.01.000605	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 7 negeri	Orang	Jumlah siswa tingkat 7 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	1704	T	
449	1.01.000606	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 7 swasta	Orang	Jumlah siswa tingkat 7 pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	210	T	
450	1.01.000607	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 1	Orang	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 1 atau kelas 7	1914	T	
451	1.01.000608	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 8 negeri	Orang	Jumlah siswa tingkat 8 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	1750	T	
452	1.01.000609	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 8 swasta	Orang	Jumlah siswa tingkat 8 pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	137	T	
453	1.01.000610	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 2	Orang	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 2 atau kelas 8	1887	T	
454	1.01.000611	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 9 negeri	Orang	Jumlah siswa tingkat 9 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	1668	T	
455	1.01.000612	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 9 swasta	Orang	Jumlah siswa tingkat 9 pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	133	T	
456	1.01.000613	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 3	Orang	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat 3 atau kelas 9	1801	T	
457	1.01.000614	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat negeri	Orang	Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri		Y	
458	1.01.000615	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat swasta	Orang	Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama Swasta		Y	
459	1.01.000616	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat	Orang	Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama		Y	
460	1.01.000617	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat negeri	Orang	Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	5122	Y	
461	1.01.000618	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat swasta	Orang	Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama Swasta		Y	
462	1.01.000619	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat	Orang	Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama		Y	
463	1.01.000620	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat negeri	Orang	Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	5122	T	
464	1.01.000621	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat swasta	Orang	Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	480	T	
465	1.01.000622	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama tingkat	Orang	Jumlah keseluruhan siswa pada Sekolah Menengah Pertama	5602	T	
466	1.01.000629	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia diatas 12 tahun negeri	Orang	Jumlah Siswa yang berusia diatas 12 tahun yang ada pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	3988	T	
467	1.01.000630	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia diatas 12 tahun swasta	Orang	Jumlah Siswa yang berusia diatas 12 tahun yang ada pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	317	T	
468	1.01.000631	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama usia diatas 12 tahun	Orang	Jumlah Siswa yang berusia diatas 12 tahun yang ada pada Sekolah Menengah Pertama	4305	T	
469	1.01.000632	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang negeri	Orang	Jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	22	T	
470	1.01.000633	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang swasta	Orang	Jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	15	T	
471	1.01.000634	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama mengulang	Orang	Jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Pertama	37	T	
472	1.01.000635	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus negeri	Orang	Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	68	T	
473	1.01.000636	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus swasta	Orang	Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	0	T	
474	1.01.000637	jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama putus	Orang	Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Menengah Pertama	68	T	
475	1.01.000638	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru negeri	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	875	T	
476	1.01.000639	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru swasta	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	89	T	
477	1.01.000640	jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Pertama	964	T	
478	1.01.000641	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki negeri	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	262	T	
479	1.01.000642	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki swasta	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	30	T	
480	1.01.000643	jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru laki-laki	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama	292	T	

481	1.01.000644	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan negeri	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	613	T	
482	1.01.000645	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan swasta	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	59	T	
483	1.01.000646	jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru perempuan	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama	672	T	
484	1.01.000647	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah dibawah s1 negeri	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berijazah dibawah S1 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	10	T	
485	1.01.000648	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah dibawah s1 swasta	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berijazah dibawah S1 pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	8	T	
486	1.01.000649	jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah dibawah s1	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berijazah dibawah S1 pada Sekolah Menengah Pertama	18	T	
487	1.01.000650	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah s1 keatas negeri	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berijazah S1 ke atas pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	865	T	
488	1.01.000651	Jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah s1 keatas swasta	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berijazah S1 ke atas pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	81	T	
489	1.01.000652	jumlah kepala Sekolah Menengah Pertama & guru ijazah s1 keatas	Orang	Jumlah Kepala Sekolah dan Guru yang berijazah S1 ke atas pada Sekolah Menengah Pertama	964	T	
490	1.01.000653	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	66	T	
491	1.01.000654	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	6	T	
492	1.01.000655	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama laki-laki	Orang	Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Pertama	72	T	
493	1.01.000656	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama perempuan negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	95	T	
494	1.01.000657	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama perempuan swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	5	T	
495	1.01.000658	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama perempuan	Orang	Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Pertama	100	T	
496	1.01.000659	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah SMA negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah SMA pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	78	T	
497	1.01.000660	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah SMA swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah SMA pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	8	T	
498	1.01.000661	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah SMA	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah SMA pada Sekolah Menengah Pertama	86	T	
499	1.01.000662	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah diatas SMA negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah diatas SMA pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	41	T	
500	1.01.000663	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah diatas SMA swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah diatas SMA pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	3	T	
501	1.01.000664	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah diatas SMA	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah diatas SMA pada Sekolah Menengah Pertama	44	T	
502	1.01.000665	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama negeri	Orang	Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	0	T	
503	1.01.000666	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama swasta	Orang	Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	0	T	
504	1.01.000667	jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Pertama	Orang	Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Menengah Pertama	0	T	
505	1.01.000668	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama negeri	Unit	Jumlah ruang kelas pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	279	T	
506	1.01.000669	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama swasta	Unit	Jumlah ruang kelas pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	28	T	
507	1.01.000670	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama	Unit	Jumlah ruang kelas pada Sekolah Menengah Pertama	307	T	
508	1.01.000671	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik negeri	Unit	Jumlah ruang kelas denga kondisi baik pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	132	T	
509	1.01.000672	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik swasta	Unit	Jumlah ruang kelas denga kondisi baik pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	11	T	
510	1.01.000673	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama baik	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Menengah Pertama	143	T	
511	1.01.000674	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak ringan negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak rigan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	60	T	
512	1.01.000675	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak ringan swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak rigan pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	13	T	
513	1.01.000676	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak ringan	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak rigan pada Sekolah Menengah Pertama	73	T	
514	1.01.000677	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak sedang negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	39	T	
515	1.01.000678	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak sedang swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	3	T	
516	1.01.000679	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak sedang	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Menengah Pertama	42	T	

517	1.01.000680	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	48	T	
518	1.01.000681	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	1	T	
519	1.01.000682	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak berat	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Menengah Pertama	49	T	
520	1.01.000683	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	0	T	
521	1.01.000684	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	0	T	
522	1.01.000685	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Pertama rusak total	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Menengah Pertama	0	T	
523	1.01.000686	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah s1 negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah S1 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri	0	T	
524	1.01.000687	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah s1 swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah S1 pada Sekolah Menengah Pertama Swasta	0	T	
525	1.01.000688	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama ijazah s1	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah S1 pada Sekolah Menengah Pertama	0	T	
526	1.01.000689	Jumlah Sekolah Menengah Atas negeri	Unit	Jumlah Sekolah Menengah Atas Negeri	0	T	[1.01.02.1.01.0001]
527	1.01.000690	Jumlah Sekolah Menengah Atas swasta	Unit	Jumlah Sekolah Menengah Atas Swasta	0	T	[1.01.02.1.01.0001]
528	1.01.000691	jumlah Sekolah Menengah Atas	Unit	Jumlah Sekolah Menengah Atas	0	T	[1.01.02.1.01.0001] [1.01.02.1.01.0054]
529	1.01.000692	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas negeri	Orang	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri	0	T	[1.01.02.1.01.0066]
530	1.01.000693	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas swasta	Orang	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas Swasta	0	T	
531	1.01.000694	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas	Orang	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas	0	T	[1.01.02.1.01.0001] [1.01.02.1.01.0050]
532	1.01.000695	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas laki-laki negeri	Orang	Jumlah Siswa dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Atas Negeri	0	T	
533	1.01.000696	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas laki-laki swasta	Orang	Jumlah Siswa dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Atas Swasta	0	T	
534	1.01.000697	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas laki-laki	Orang	Jumlah Siswa dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Atas	0	T	
535	1.01.000698	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas perempuan negeri	Orang	Jumlah Siswa dengan jenis kelamin permpuan pada Sekolah Menengah Atas Negeri	0	T	
536	1.01.000699	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas perempuan swasta	Orang	Jumlah Siswa dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Atas Swasta	0	T	
537	1.01.000700	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas perempuan	Orang	Jumlah Siswa dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Atas	0	T	
538	1.01.000701	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 10 negeri	Orang	Jumlah siswa tingkat 10 pada Sekolah Menengah Atas Negeri	0	T	
539	1.01.000702	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 10 swasta	Orang	Jumlah siswa tingkat 10 pada Sekolah Menengah Atas Swasta	0	T	
540	1.01.000703	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 1	Orang	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 1 atau kelas 10	0	T	
541	1.01.000704	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 11 negeri	Orang	Jumlah Siswa tingkat 11 pada Sekolah Menengah Atas Negeri	0	T	
542	1.01.000705	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 11 swasta	Orang	Jumlah Siswa tingkat 11 pada Sekolah Menengah Atas Swasta	0	T	
543	1.01.000706	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 2	Orang	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 2 atau kelas 11	0	T	
544	1.01.000707	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 12 negeri	Orang	Jumlah Siswa tingkat 12 pada Sekolah Menengah Atas Negeri	0	T	
545	1.01.000708	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 12 swasta	Orang	Jumlah Siswa tingkat 12 pada Sekolah Menengah Atas Swasta	0	T	
546	1.01.000709	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 3	Orang	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat 3 atau kelas 12	0	T	
547	1.01.000710	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat negeri	Orang	keseluruhan jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat negeri	0	T	
548	1.01.000711	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat swasta	Orang	keseluruhan jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat swasta	0	T	
549	1.01.000712	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat	Orang	JUMLAH KESELURUHAN SISWA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS	0	T	
550	1.01.000713	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat negeri	Orang	keseluruhan jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat negeri	0	T	
551	1.01.000714	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat swasta	Orang	keseluruhan jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas yang ada pada satuan pendidikan swasta	0	T	
552	1.01.000715	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat	Orang	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas Tingkat	0	T	
553	1.01.000716	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat negeri	Orang	keseluruhan jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas yang ada pada satuan pendidikan negeri	0	T	
554	1.01.000717	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas tingkat swasta	Orang	keseluruhan jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas yang ada pada satuan pendidikan swasta	0	T	
555	1.01.000725	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia diatas 12 tahun negeri	Orang	Jumlah Siswa yang berusia diatas 12 tahun pada Sekolah Menengah Atas Negeri	0	T	
556	1.01.000726	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia diatas 12 tahun swasta	Orang	Jumlah Siswa yang berusia diatas 12 tahun pada Sekolah Menengah Atas Swasta	0	T	
557	1.01.000727	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas usia diatas 12 tahun	Orang	Jumlah Siswa yang berusia diatas 12 tahun pada Sekolah Menengah Atas	0	T	
558	1.01.000728	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas mengulang negeri	Orang	Jumlah Siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Atas Negeri	0	T	
559	1.01.000729	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas mengulang swasta	Orang	Jumlah Siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Atas Swasta	0	T	
560	1.01.000730	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas mengulang	Orang	Jumlah Siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Atas	0	T	

561	1.01.000731	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas putus negeri	Orang	Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Menengah Atas Negeri	0	T	
562	1.01.000732	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas putus swasta	Orang	Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Menengah Atas Swasta	0	T	
563	1.01.000733	jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas putus	Orang	Jumlah siswa yang putus sekolah pada Sekolah Menengah Atas	0	T	
564	1.01.000734	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru negeri	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Atas Negeri	0	T	
565	1.01.000735	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru swasta	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Atas Swasta	0	T	
566	1.01.000736	jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan guru pada Sekolah Menengah Atas	0	T	
567	1.01.000737	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru laki-laki negeri	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Atas Negeri	0	T	
568	1.01.000738	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru laki-laki swasta	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Atas Swasta	0	T	
569	1.01.000739	jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru laki-laki	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Atas	0	T	
570	1.01.000740	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru perempuan negeri	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Atas Negeri	0	T	
571	1.01.000741	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru perempuan swasta	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Atas Swasta	0	T	
572	1.01.000742	jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru perempuan	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Atas	0	T	
573	1.01.000743	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah dibawah s1 negeri	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru yang berijazah di bawah S1 pada Sekolah Menengah Atas Negeri	0	T	
574	1.01.000744	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah dibawah s1 swasta	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru yang berijazah di bawah S1 pada Sekolah Menengah Atas Swasta	0	T	
575	1.01.000745	jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah dibawah s1	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru yang berijazah di bawah S1 pada Sekolah Menengah Atas	0	T	
576	1.01.000746	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah s1 keatas negeri	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru yang berijazah S1 ke atas pada Sekolah Menengah Atas Negeri	0	T	
577	1.01.000747	Jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah s1 keatas swasta	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru yang berijazah S1 ke atas pada Sekolah Menengah Atas Swasta	0	T	
578	1.01.000748	jumlah kepala Sekolah Menengah Atas & guru ijazah s1 keatas	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru yang berijazah S1 ke atas pada Sekolah Menengah Atas	0	T	
579	1.01.000749	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas laki-laki negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan berjenis kelamin laki-laki yang ada pada Sekolah Menengah Atas Negeri	0	T	
580	1.01.000750	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas laki-laki swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan berjenis kelamin laki-laki yang ada pada Sekolah Menengah Atas Swasta	0	T	
581	1.01.000751	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas laki-laki	Orang	keseluruhan jumlah tenaga kependidikan berjenis kelamin laki-laki yang ada pada Sekolah Menengah Atas baik Negeri maupun Swasta	0	T	[1.01.02.1.01.0051] [1.01.02.1.01.0050]
582	1.01.000752	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas perempuan negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan berjenis kelamin perempuan yang ada pada Sekolah Menengah Atas Negeri	0	T	
583	1.01.000753	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas perempuan swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan berjenis kelamin perempuan yang ada pada Sekolah Menengah Atas Swasta	0	T	
584	1.01.000754	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas perempuan	Orang	keseluruhan jumlah tenaga kependidikan berjenis kelamin perempuan yang ada pada Sekolah Menengah Atas baik Negeri maupun Swasta	0	T	[1.01.02.1.01.0051] [1.01.02.1.01.0050]
585	1.01.000755	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah SMA negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Atas yang berijazah SMA	0	T	
586	1.01.000756	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah SMA swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Atas Swasta yang berijazah SMA	0	T	
587	1.01.000757	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah SMA	Orang	jumlah tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Atas yang berijazah SMA	0	T	
588	1.01.000758	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah diatas SMA negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri yang berijazah diatas SMA	0	T	
589	1.01.000759	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah diatas SMA swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Atas Swasta yang berijazah diatas SMA	0	T	
590	1.01.000760	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah diatas SMA	Orang	keseluruhan jumlah tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Atas baik Negeri maupun Swasta yang berijazah diatas SMA	0	T	
591	1.01.000761	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas negeri	Orang	Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Menengah Atas Negeri	0	T	
592	1.01.000762	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas swasta	Orang	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas negeri	0	T	
593	1.01.000763	jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Atas	Orang	keseluruhan jumlah rombongan belajar pada Sekolah Menengah Atas baik Negeri maupun Swasta	0	T	
594	1.01.000764	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas negeri	Unit	Jumlah ruang kelas pada Sekolah Menengah Atas Negeri	0	T	
595	1.01.000765	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas swasta	Unit	Jumlah ruang kelas pada Sekolah Menengah Atas Swasta	0	T	

596	1.01.000766	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas	Unit	Keseluruhan jumlah ruang kelas pada Sekolah Menengah Atas baik Negeri maupun Swasta	0	T	
597	1.01.000767	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas baik negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Menengah Atas Negeri	0	T	
598	1.01.000768	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas baik swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Menengah Atas Swasta	0	T	
599	1.01.000769	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas baik	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Menengah Atas baik Negeri maupun Swasta	0	T	
600	1.01.000770	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak ringan negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan pada Sekolah Menengah Atas Negeri	0	T	
601	1.01.000771	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak ringan swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan pada Sekolah Menengah Atas Swasta	0	T	
602	1.01.000772	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak ringan	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak ringan pada Sekolah Menengah Atas baik Negeri maupun Swasta	0	T	
603	1.01.000773	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak sedang negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Menengah Atas Negeri	0	T	
604	1.01.000774	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak sedang swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Menengah Atas Swasta	0	T	
605	1.01.000775	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak sedang	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak sedang pada Sekolah Menengah Atas baik Negeri maupun Swasta	0	T	
606	1.01.000776	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak berat negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Menengah Atas Negeri	0	T	
607	1.01.000777	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak berat swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Menengah Atas Swasta	0	T	
608	1.01.000778	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak berat	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak berat pada Sekolah Menengah Atas baik Negeri maupun Swasta	0	T	
609	1.01.000779	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak total negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Menengah Atas Negeri	0	T	
610	1.01.000780	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak total swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi rusak total pada Sekolah Menengah Atas Swasta	0	T	
611	1.01.000781	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Atas rusak total	Unit	JUMLAH KESELURUHAN RUANG KELAS YANG MENGALAMI RUSAK TOTAL	0	T	
612	1.01.000782	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah s1 negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri yang berijazah S1	0	T	
613	1.01.000783	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah s1 swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Atas Swasta yang berijazah S1	0	T	
614	1.01.000784	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas ijazah s1	Orang	JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS YANG MEMILIKI IJAZAH STRATA SATU	0	T	
615	1.01.000785	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan negeri	Unit	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	0	T	
616	1.01.000786	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan swasta	Unit	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan swasta	0	T	
617	1.01.000787	jumlah Sekolah Menengah Kejuruan	Unit	JUMLAH TERSEDIA NYA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI INDONESIA	0	T	[1.01.02.1.01.0001] [1.01.02.1.02.0042]
618	1.01.000788	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan negeri	Orang	Jumlah siswa yang ada pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	0	T	
619	1.01.000789	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan swasta	Orang	Jumlah siswa yang ada pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	0	T	[1.01.02.1.02.0042]
620	1.01.000790	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	Keseluruhan jumlah siswa yang ada pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	0	T	[1.01.02.1.02.0045]
621	1.01.000791	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki negeri	Orang	Jumlah Siswa yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	0	T	
622	1.01.000792	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki swasta	Orang	Jumlah Siswa yang berjenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	0	T	
623	1.01.000793	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki	Orang	JUMLAH SISWA BERJENIS KELAMIN LAKI-LAKI PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	0	T	
624	1.01.000794	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan perempuan negeri	Orang	Jumlah Siswa yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	0	T	
625	1.01.000795	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan perempuan swasta	Orang	JUMLAH SISWA BERJENIS KELAMIN PEREMPUAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA	0	T	
626	1.01.000796	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan perempuan	Orang	keseluruhan jumlah Siswa yang berjenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	0	T	
627	1.01.000797	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 10 negeri	Orang	Jumlah Siswa tingkat 10 pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	0	T	
628	1.01.000798	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 10 swasta	Orang	JUMLAH SISWA YANG BERADA PADA TINGKAT 10 DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA	0	T	
629	1.01.000800	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 11 negeri	Orang	Jumlah Siswa tingkat 11 pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	0	T	
630	1.01.000801	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 11 swasta	Orang	Jumlah Siswa tingkat 11 pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	0	T	
631	1.01.000803	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 12 negeri	Orang	Jumlah Siswa tingkat 12 pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	0	T	
632	1.01.000804	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 12 swasta	Orang	Jumlah Siswa tingkat 12 pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	0	T	

633	1.01.000806	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 13 negeri	Orang	Jumlah Siswa tingkat 13 pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	0	T	
634	1.01.000807	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat 13 swasta	Orang	JUMLAH SISWA YANG BERADA PADA TINGKAT 13 DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA	0	T	
635	1.01.000809	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat negeri	Orang	JUMLAH PESERTA DIDIK ATAU SISWA PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI	0	T	
636	1.01.000810	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat swasta	Orang	Jumlah siswa seluruh tingkatan pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	0	T	
637	1.01.000812	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat negeri	Orang	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	0	T	
638	1.01.000813	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat swasta	Orang	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	0	T	
639	1.01.000814	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan tingkat	Orang	Keseluruhan jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan	0	T	
640	1.01.000821	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia diatas 12 tahun negeri	Orang	JUMLAH SISWA YANG BERUSIA 12 TAHUN KEATAS PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI	0	T	
641	1.01.000822	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia diatas 12 tahun swasta	Orang	JUMLAH KESELURUHAN SISWA YANG BERUSIA 12 TAHUN KEATAS PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA	0	T	
642	1.01.000823	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan usia diatas 12 tahun	Orang	JUMLAH KESELURUHAN SISWA ATAU PESERTA DIDIK YANG BERUSIA 12 TAHUN KEATAS PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	0	T	
643	1.01.000824	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan mengulang negeri	Orang	Jumlah Siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	0	T	
644	1.01.000825	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan mengulang swasta	Orang	Jumlah Siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	0	T	
645	1.01.000826	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan mengulang	Orang	Keseluruhan jumlah siswa yang mengulang pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	0	T	
646	1.01.000827	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan putus negeri	Orang	Jumlah Siswa yang putus sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	0	T	
647	1.01.000828	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan putus swasta	Orang	JUMLAH PESERTA DIDIK YANG PUTUS SEKOLAH PADA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA	0	T	
648	1.01.000829	jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan putus	Orang	jumlah siswa putus sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	0	T	
649	1.01.000830	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru negeri	Orang	JUMLAH TENAGA PENDIDIK DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI	0	T	
650	1.01.000831	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru swasta	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	0	T	
651	1.01.000832	jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	0	T	[1.01.02.1.02.0056]
652	1.01.000833	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru laki-laki negeri	Orang	JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU ATAU TENAGA PENDIDIK YANG BERJENIS KELAMIN LAKI-LAKI DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	0	T	
653	1.01.000834	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru laki-laki swasta	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	0	T	
654	1.01.000835	jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru laki-laki	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	0	T	
655	1.01.000836	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru perempuan negeri	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	0	T	
656	1.01.000837	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru perempuan swasta	Orang	JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU YANG BERJENIS KELAMIN PEREMPUAN DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA	0	T	
657	1.01.000838	jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru perempuan	Orang	Jumlah kepala sekolah dan guru dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	0	T	
658	1.01.000839	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah dibawah s1 negeri	Orang	JUMLAH KEPALA SEKOLAH DAN GURU DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI YANG MEMILIKI IJAZAH TINGKAT STRATA SATU ATAU S1	0	T	
659	1.01.000840	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah dibawah s1 swasta	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Kejuruan Sawsta yang berijazah dibawah S1	0	T	
660	1.01.000841	jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah dibawah s1	Orang	JUMLAH KESELURUHAN KEPALA SEKOLAH DAN GURU YANG MEMILIKI IJAZAH DIBAWAH STRATA SATU ATAU S1 PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	0	T	
661	1.01.000842	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah s1 keatas negeri	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Kejuruan Sawsta yang berijazah S1 keatas	0	T	
662	1.01.000843	Jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah s1 keatas swasta	Orang	Jumlah kepala Sekolah dan Guru pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang berijazah S1 keatas	0	T	
663	1.01.000844	jumlah kepala Sekolah Menengah Kejuruan & guru ijazah s1 keatas	Orang	JUMLAH KESELURUHAN KEPALA SEKOLAH DAN GURU YANG BERIJAZAH STRATA SATU ATAU S1 KEATAS PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	0	T	
664	1.01.000845	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki negeri	Orang	Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	0	T	[1.01.02.1.02.0042]
665	1.01.000846	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Kejuruan Swastai	0	T	[1.01.02.1.02.0042] [1.01.02.3.06.0042]

666	1.01.000847	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan laki-laki	Orang	Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin laki-laki pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	0	T	[1.01.02.1.02.0042] [1.01.02.1.02.0043] [1.01.02.3.06.0042] [1.01.02.3.06.0043]
667	1.01.000848	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan perempuan negeri	Orang	JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BERJENIS KELAMIN PEREMPUAN DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI	0	T	[1.01.02.1.02.0042] [1.01.02.1.02.0043] [1.01.02.3.06.0042] [1.01.02.3.06.0043]
668	1.01.000849	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan perempuan swasta	Orang	JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BERJENIS KELAMIN PEREMPUAN DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA	0	T	[1.01.02.1.02.0042] [1.01.02.3.06.0042]
669	1.01.000850	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan perempuan	Orang	Jumlah tenaga kependidikan dengan jenis kelamin perempuan pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	0	T	
670	1.01.000851	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah SMA negeri	Orang	JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BERIJAZAH SMA PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI	0	T	
671	1.01.000852	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah SMA swasta	Orang	JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BERIJAZAH ATAU SMA PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA	0	T	
672	1.01.000853	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah SMA	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah SMA pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	0	T	
673	1.01.000854	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah diatas SMA negeri	Orang	JUMLAH KESELURUHAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG MEMILIKI IJAZAH DIATAS SMA	0	T	
674	1.01.000855	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah diatas SMA swasta	Orang	Jumlah tenaga kependidikan yang berijazah diatas SMA pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	0	T	
675	1.01.000856	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah diatas SMA	Orang	JUMLAH KESELURUHAN TENAGA KEPENDIIDIKAN YANG BERIJAZAH DIATAS SMA PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	0	T	
676	1.01.000857	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan negeri	Orang	Jumlah rombongan belajar pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	0	T	
677	1.01.000858	Jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan swasta	Orang	JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA	0	T	
678	1.01.000859	jumlah rombongan belajar Sekolah Menengah Kejuruan	Orang	Keseluruhan jumlah rombongan belajar pada Sekolah Menengah Kejuruan baik Negeri maupun Swasta	0	T	
679	1.01.000860	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan negeri	Unit	Jumlah ruang kelas pada Sekolah Menengah Kejuruan negeri	0	T	
680	1.01.000861	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan swasta	Unit	JUMLAH RUANG KELAS PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA	0	T	
681	1.01.000862	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan	Unit	JUMLAH KESELURUHAN RUANG KELAS PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	0	T	[1.01.02.3.06.0002] [1.01.02.4.06.0002]
682	1.01.000863	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan baik negeri	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri	0	T	
683	1.01.000864	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan baik swasta	Unit	Jumlah ruang kelas dengan kondisi baik pada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta	0	T	
684	1.01.000865	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan baik	Unit	JUMLAH KESELURUHAN RUANG KELAS DALAM KONDISI BAIK PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	0	T	
685	1.01.000866	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak ringan negeri	Unit	JUMLAH RUANG KELAS YANG MENGALAMI RUSAK RINGAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI	0	T	
686	1.01.000867	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak ringan swasta	Unit	JUMLAH RUANG KELAS YANG MENGALAMI RUSAK RINGAN PADA SKEOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA	0	T	
687	1.01.000868	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak ringan	Unit	JUMLAH KESELURUHAN RUANG KELAS YANG MENGALAMI RUSAK RINGAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	0	T	
688	1.01.000869	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak sedang negeri	Unit	JUMLAH RUANG KELAS YANG MENGALAMI RUSAK SEDANG PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI	0	T	
689	1.01.000870	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak sedang swasta	Unit	JUMLAH RUANG KELAS YANG MENGALAMI RUSAK SEDANG PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA	0	T	
690	1.01.000871	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak sedang	Unit	JUMLAH KESELURUHAN RUANG KELAS YANG MENGALAMI RUSAK SEDANG PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	0	T	
691	1.01.000872	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak berat negeri	Unit	JUMLAH RUANG KELAS YANG MENGALAMI RUSAK BERAT PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI	0	T	
692	1.01.000873	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak berat swasta	Unit	JUMLAH RUANG KELAS YANG MENGALAMI RUSAK BERAT PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA	0	T	
693	1.01.000874	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak berat	Unit	JUMLAH RUANG KELAS YANG MENGALAMI RUSAK BERAT PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	0	T	
694	1.01.000875	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak total negeri	Unit	JUMLAH RUANG KELAS YANG MENGALAMI RUSAK TOTAL PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI	0	T	
695	1.01.000876	Jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak total swasta	Unit	JUMLAH RUANG KELAS YANG MENGALAMI RUSAK TOTAL PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA	0	T	
696	1.01.000877	jumlah ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan rusak total	Unit	JUMLAH KESELURUHAN RUANG KELAS YANG MENGALAMI RUSAK TOTAL	0	T	
697	1.01.000878	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah s1 negeri	Orang	JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BERIJAZAH STRATA 1 ATAU S1 PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI	0	T	[1.01.02.1.02.0042] [1.01.02.3.06.0042]

698	1.01.000879	Jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah s1 swasta	Orang	JUMLAH TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BERIJAZAH STRATA 1 ATAU S1 PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA	0	T	[1.01.02.1.02.0042] [1.01.02.3.06.0042]
699	1.01.000880	jumlah tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan ijazah s1	Orang	JUMLAH KESELURUHAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BERIJAZAH S1 PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	0	T	[1.01.02.1.02.0042] [1.01.02.4.06.0042]
700	1.01.000881	Taman Bacaan Masyarakat yang butuh direhabilitasi	Ruang	Taman Bacaan Masyarakat yang butuh direhabilitasi	0	T	[1.01.02.2.04.0058]
701	1.01.000882	Taman Bacaan Masyarakat	Ruang	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat	0	T	[1.01.02.2.04.0058] [1.01.02.2.04.0059]
702	1.01.000883	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0	T	[1.01.02.3.06.0066] [1.01.02.3.05.0066] [1.01.02.4.05.0066] [1.01.02.4.06.0064] [1.01.02.1.03.0081]
703	1.01.000884	Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Formal	Kurikulum	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Formal	7	T	[1.01.03.3.02.0005] [1.01.03.4.02.0004] [1.01.03.4.04.0004] [1.01.03.3.02.0004]
704	1.01.000885	profesi pelaku perbukuan daerah	Orang	jumlah profesi pelaku perbukuan daerah		Y	
705	1.01.000886	profesi pelaku perbukuan daerah	Orang	jumlah profesi pelaku perbukuan daerah	0	T	
706	1.01.000887	Profesi pelaku perbukuan	Orang	Jumlah pofesi pelaku perbukuan	0	T	[1.01.02.1.01.0056] [1.01.02.1.02.0049] [1.01.02.1.03.0055] [1.01.02.1.02.0078] [1.01.02.1.03.0082] [1.01.02.2.01.0034] [1.01.02.2.02.0047] [1.01.02.2.03.0021] [1.01.02.2.04.0023] [1.01.02.3.05.0056] [1.01.02.3.06.0049] [1.01.02.4.05.0056] [1.01.02.4.06.0049]
707	1.01.000888	Infrastruktur TIK	Paket	Jumlah Infrastruktur TIK yang tersedia	0	T	[1.01.02.1.01.0057] [1.01.02.1.01.0059] [1.01.02.1.01.0064] [1.01.02.1.02.0050] [1.01.02.1.02.0052] [1.01.02.1.02.0058] [1.01.02.1.03.0056] [1.01.02.1.03.0058] [1.01.02.1.03.0063] [1.01.02.3.04.0037] [1.01.02.3.04.0039] [1.01.02.4.04.0037] [1.01.02.4.04.0039] [1.01.02.4.07.0002] [1.01.02.4.05.0059] [1.01.02.4.06.0052] [1.01.02.2.02.0068] [1.01.02.2.01.0035] [1.01.02.2.01.0037] [1.01.02.2.01.0042] [1.01.02.2.02.0048] [1.01.02.2.02.0050] [1.01.02.2.02.0057] [1.01.02.2.03.0022] [1.01.02.2.03.0024] [1.01.02.2.03.0031] [1.01.02.2.04.0024] [1.01.02.2.04.0026] [1.01.02.2.04.0033] [1.01.02.3.05.0057] [1.01.02.3.05.0059] [1.01.02.3.06.0050] [1.01.02.3.06.0052] [1.01.02.4.05.0057] [1.01.02.4.05.0018] [1.01.02.4.05.0019] [1.01.02.4.06.0002] [1.01.02.4.06.0050] [1.01.02.4.06.0011] [1.01.02.4.06.0054] [1.01.02.3.06.0058] [1.01.02.3.05.0064]
708	1.01.000889	layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	0	T	[1.01.02.4.05.0065] [1.01.02.3.05.0065] [1.01.02.4.06.0065] [1.01.02.3.06.0059] [1.01.02.1.01.0065] [1.01.02.1.02.0059] [1.01.02.1.03.0066] [1.01.02.1.01.0060] [1.01.02.1.02.0053] [1.01.02.1.03.0059] [1.01.02.3.04.0040] [1.01.02.4.04.0040] [1.01.02.2.01.0043] [1.01.02.2.02.0055] [1.01.02.2.03.0037] [1.01.02.2.04.0031] [1.01.02.2.01.0038] [1.01.02.2.02.0051] [1.01.02.2.03.0025] [1.01.02.2.04.0027] [1.01.02.3.05.0060] [1.01.02.3.06.0053]

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025	Disabled	Info Sub Kegiatan
1	2.19.000064	Pemuda Kader	Orang	Pemuda yang berumur 16-30 tahun di tingkat daerah yang memerlukan pengembangan skill sesuai dengan kriteria tertentu yang dilakukan antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan, dan/atau forum pengembangan	0	T	[2.19.02.1.01.0003] [2.19.02.1.01.0008] [2.19.02.1.01.0011] [2.19.02.1.01.0012] [2.19.02.2.01.0003] [2.19.02.2.01.0013] [2.19.02.2.01.0014] [2.19.02.2.01.0010]
2	2.19.000065	Pemuda Pelopor	Orang	Pemuda yang memerlukan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan kepeloporan	0	T	[2.19.02.1.01.0008] [2.19.02.1.01.0011] [2.19.02.1.01.0012] [2.19.02.1.01.0013] [2.19.02.2.01.0001] [2.19.02.2.01.0010] [2.19.02.2.01.0013] [2.19.02.2.01.0014] [2.19.02.2.01.0015]
3	2.19.000067	Pemuda wirausaha muda pemula	Orang	wirausahawan berusia muda (16 sampai 30 tahun) yang sedang merintis usahanya	32	T	[2.19.02.2.01.0002] [2.19.02.2.01.0010] [2.19.02.2.01.0014] [2.19.02.2.01.0011]
4	2.19.000068	Pemuda Berprestasi	Orang	Pemuda di daerah yang berprestasi dengan kriteria tertentu (merujuk pada asdep pemberi penghargaan) untuk diberikan penghargaan	0	T	[2.19.02.1.01.0010] [2.19.02.2.01.0007] [2.19.02.2.01.0012]
5	2.19.000069	Organisasi Kepemudaan	Organisasi	Organisasi kepemudaan yang terdaftar dan aktif untuk terfasilitasi dalam Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan	40	T	[2.19.02.1.02.0001] [2.19.02.1.02.0003] [2.19.02.1.02.0004] [2.19.02.2.01.0007] [2.19.02.2.02.0001] [2.19.02.2.02.0002] [2.19.02.2.02.0003] [2.19.02.2.02.0004]
6	2.19.000070	sarana dan prasarana kepemudaan	Unit	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang tersedia di daerah	2	T	[2.19.02.1.01.0005] [2.19.02.2.01.0006] [2.19.02.2.01.0016]
7	2.19.000071	organisasi kepemudaan berprestasi	Organisasi	Stake holder kepemudaan di daerah yang berprestasi dengan kriteria tertentu (merujuk pada asdep pemberi penghargaan) untuk diberikan penghargaan	0	T	[2.19.02.1.02.0004] [2.19.02.2.02.0002]
8	2.19.000072	sentra kewirausahaan pemuda	Sentra	Tersedianya data pusat kegiatan kewirausahaan yang dilakukan oleh dan untuk pemuda dalam rangka pengembangan kewirausahaan pemuda melalui proses pembelajaran dan pemandirian	0	T	[2.19.02.1.01.0014] [2.19.02.1.01.0015] [2.19.02.2.01.0002] [2.19.02.2.01.0010] [2.19.02.2.01.0011]
9	2.19.000073	atlet/olahragawan talenta muda	Orang	Tersedianya atlet/olahragawan usia 12-18 tahun yang dibina melalui PPLP/PPLPD/SKO/induk cabor pengprov/pengkot/kab dan klub olahraga dan usia &18 tahun pada PPLM/PPLD, induk cabor, dan klub olahraga	23	T	[2.19.03.1.03.0001] [2.19.03.1.03.0008] [2.19.03.1.03.0009] [2.19.03.2.03.0001] [2.19.03.2.03.0006] [2.19.03.2.03.0008] [2.19.03.2.03.0009] [2.19.03.2.03.0010] [2.19.03.2.05.0010] [2.19.03.4.01.0003] [2.19.03.2.04.0005] [2.19.03.2.05.0006] [2.19.03.2.05.0007]
10	2.19.000075	atlet/olahragawan disabilitas	Orang	Tersediannya atlet/olahrawagan disabilitas daerah yang mendapatkan pembinaan melalui NPCI Kabupaten/Kota/Provinsi	12	T	[2.19.03.1.03.0001] [2.19.03.1.03.0008] [2.19.03.2.03.0001] [2.19.03.2.03.0006] [2.19.03.2.03.0008] [2.19.03.2.03.0009] [2.19.03.2.03.0010] [2.19.03.2.04.0005] [2.19.03.2.05.0006] [2.19.03.2.03.0007]
11	2.19.000076	kompetisi/kejuaraan olahraga pelajar satuan pendidikan tingkat menengah	Kegiatan	Terlaksananya kompetisi/kejuaraan olahraga pelajar di daerah pada satuan pendidikan tingkat dasar (Pekan Olahraga Kab/Kota) dan tingkat menengah (Pekan Olahraga Pelajar Daerah)	3	T	[2.19.03.1.01.0002] [2.19.03.1.03.0008] [2.19.03.3.05.0001] [2.19.03.4.05.0001] [2.19.03.2.01.0006] [2.19.03.2.02.0006] [2.19.03.3.01.0003] [2.19.03.4.01.0003]
12	2.19.000078	kompetisi/kejuaraan single event		Terlaksananya kompetisi/kejuaraan olahraga (Kejurkot/kejuaraan antar klub/kejurda) pada cabang olahraga tertentu di daerah	3	T	[2.19.03.1.02.0004] [2.19.03.1.03.0008] [2.19.03.3.05.0001] [2.19.03.4.05.0001] [2.19.03.2.02.0002] [2.19.03.2.02.0004] [2.19.03.2.02.0006] [2.19.03.2.03.0007]
13	2.19.000081	pelatih olahraga yang bersertifikat	Orang	Tersedianya pelatih olahraga yang terdaftar di induk cabor dan memiliki sertifikat pelatih di tingkat Provinsi/Kab/Kota	0	T	[2.19.03.1.03.0006] [2.19.03.1.03.0008] [2.19.03.2.03.0004] [2.19.03.2.03.0010]
14	2.19.000082	Organisasi Olahraga	Lembaga	Tersedianya pelatih olahraga yang terdaftar di induk cabor dan memiliki sertifikat pelatih di tingkat Provinsi/Kab/Kota	13	T	[2.19.03.1.03.0006] [2.19.03.1.03.0008] [2.19.03.1.04.0001] [2.19.03.1.04.0002] [2.19.03.1.04.0003] [2.19.03.1.04.0005] [2.19.03.2.03.0009] [2.19.03.2.03.0010] [2.19.03.2.04.0004] [2.19.03.2.04.0005] [2.19.03.2.04.0006] [2.19.03.2.05.0006] [2.19.03.2.05.0007]
15	2.19.000083	wasit	Orang	Tersedianya wasit/juri yang terdaftar di induk cabor dan memiliki sertifikasi di tingkat Provinsi/Kab/Kota	10	T	[2.19.03.1.03.0006] [2.19.03.2.04.0004] [2.19.03.2.03.0010]
16	2.19.000084	Sentra pembinaan Olahraga	Lembaga	Tersedianya SKO, PPLP, PPLPD, PPLD di Provinsi/Kab/Kota	0	T	[2.19.03.1.01.0001] [2.19.03.1.01.0004] [2.19.03.1.03.0007] [2.19.03.1.03.0008] [2.19.03.2.01.0003] [2.19.03.2.01.0004] [2.19.03.2.03.0008] [2.19.03.2.03.0009] [2.19.03.2.03.0010] [2.19.03.2.04.0006] [2.19.03.2.05.0006] [2.19.03.2.05.0007]
17	2.19.000085	Sarana Olahraga	Unit	Tersedianya Sarana pada cabang olahraga unggulan di Provinsi/Kabupaten/Kota	4	T	[2.19.03.1.01.0004] [2.19.03.1.03.0008] [2.19.03.2.01.0003] [2.19.03.2.01.0005]
18	2.19.000086	Prasarana Olahraga	Unit	Tersedianya Prasarana pada cabang olahraga unggulan di Provinsi/Kabupaten/Kota	0	T	[2.19.03.1.01.0004] [2.19.03.1.03.0008] [2.19.03.2.01.0003] [2.19.03.2.01.0005]
19	2.19.000087	Sarana Olahraga Disabilitas	Unit	Tersedianya Sarana pada cabang olahraga unggulan disabilitas di Provinsi/Kabupaten/Kota	0	T	[2.19.03.1.01.0004] [2.19.03.1.02.0005] [2.19.03.1.03.0008] [2.19.03.2.05.0003] [2.19.03.2.01.0005]
20	2.19.000088	prasarana olahraga disabilitas	Unit	Tersedianya Prasarana pada cabang olahraga unggulan disabilitas di Provinsi/Kabupaten/Kota	0	T	[2.19.03.1.01.0004] [2.19.03.1.03.0008] [2.19.03.2.01.0003] [2.19.03.2.01.0005]
21	2.19.000089	organisasi kepramukaan	Organisasi	Tersedianya data satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis, antara lain profesi, aspirasi, dan agama yang terbentuk di daerah	0	T	[2.19.04.1.01.0001] [2.19.04.1.01.0002] [2.19.04.2.01.0002] [2.19.04.2.01.0001]

22	2.19.000090	tenaga pendidik pramuka	Orang	Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa, terdiri atas: a. b. c. dan d. instruktur. Yang telah diberikan sertifikasi kompetensi oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan	0	T	[2.19.04.1.01.0001] [2.19.04.1.01.0003] [2.19.04.2.01.0003] [2.19.04.2.01.0001]
23	2.19.000091	kegiatan pramuka	Orang	Kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif yang melibatkan peserta didik kepramukaan	0	T	[2.19.04.1.01.0001] [2.19.04.1.01.0005] [2.19.04.1.01.0008] [2.19.04.2.01.0005] [2.19.04.2.01.0008] [2.19.04.2.01.0001]

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025	Disabled	Info Sub Kegiatan
1	1.06.000007	Anak Telantar yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	Anak terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	0	T	[1.06.04.2.01.0010]
2	1.06.000008	Anak Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Anak telantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi	5	T	[1.06.04.2.01.0004]
3	1.06.000009	Anak Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	Anak telantar di luar panti yang mendapatkan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi	23	T	[1.06.04.2.01.0001]
4	1.06.000018	Anak Telantar yang menerima kebutuhan sandang	Orang	Anak telantar di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	23	T	[1.06.04.2.01.0002]
5	1.06.000020	Anak Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	Anak telantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah) dan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	0	T	[1.06.04.2.01.0008]
6	1.06.000021	Anak Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	Anak telantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	0	T	[1.06.04.2.01.0007]
7	1.06.000022	Anak Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	Anak telantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta untuk mendapatkan layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	0	T	[1.06.04.2.01.0009]
8	1.06.000023	Anak Terlantar yang mendapat layanan rujukan	Orang	Anak telantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan	0	T	[1.06.04.2.01.0012]
9	1.06.000024	Anak Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	Anak telantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan layanan penulusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi	0	T	[1.06.04.2.01.0011]
10	1.06.000025	Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara	Orang	Pemantauan anak terlantar untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	T	[1.06.05.2.01.0003]
11	1.06.000028	Anak-Anak Terlantar yang dijangkau	Orang	Anak telantar yang mendapatkan layanan kedaruratan berupa penjangkauan	0	T	[1.06.05.2.01.0001]
12	1.06.000029	Anak-anak terlantar yang mendapat rujukan	Orang	Anak telantar yang mendapatkan layanan kedaruratan berupa rujukan ke layanan sesuai kebutuhan Anak Terlantar	0	T	[1.06.05.2.01.0002]
13	1.06.000031	Fakir Miskin	Orang	&Fakir miskin yaitu orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya	9503	T	[1.06.05.2.02.0001] [1.06.05.2.02.0002] [1.06.02.3.03.0007] [1.06.02.4.03.0007]
14	1.06.000034	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	Gelandangan dan pengemis di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah) dan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	0	T	[1.06.04.2.01.0008]
15	1.06.000038	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	Gelandangan dan pengemis di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	0	T	[1.06.04.2.01.0007]
16	1.06.000039	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta untuk mendapatkan layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	0	T	[1.06.04.2.02.0009] [1.06.04.2.01.0009]
17	1.06.000040	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan rujukan	Orang	Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan	0	T	[1.06.04.2.01.0012] [1.06.04.2.02.0001]
18	1.06.000041	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	Gelandangan dan pengemis yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	0	T	[1.06.04.2.01.0010]
19	1.06.000042	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	Gelandangan dan pengemis di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan layanan penulusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi	0	T	[1.06.04.2.01.0011]

20	1.06.000043	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi	0	T	[1.06.04.2.01.0004] [1.06.04.1.04.0015]
21	1.06.000044	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	Gelandangan dan Pengemis di luar panti yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	0	T	[1.06.04.2.01.0001]
22	1.06.000047	Gelandangan dan Pengemis yang menerima kebutuhan sandang	Orang	Gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	0	T	[1.06.04.2.01.0002]
23	1.06.000052	Kampung yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kampung	Kegiatan koordinasi dan sosialisasi (FGD/Workshop/Rakor/Rapat Internal) dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana (KSB) yaitu wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan/tempat untuk program penanggulangan bencana	0	T	[1.06.06.2.02.0001]
24	1.06.000054	keluarga pada KAT	Keluarga	Jumlah keluarga pada Komunitas Adat Terpencil (KAT) yaitu sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi	0	T	[1.06.02.2.01.0001] [1.06.02.2.01.0002]
25	1.06.000055	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Keluarga	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan	7026	T	[1.06.05.2.02.0003]
26	1.06.000059	kKoordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	Dokumen	Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	2	T	[1.06.04.2.02.0014]
27	1.06.000065	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah	Dokumen	Kegiatan (FGD/Workshop/Rakor/Rapat Internal) untuk koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	0	T	[1.06.02.2.02.0001]
28	1.06.000067	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Laporan	Kegiatan koordinasi dan sosialisasi (FGD/Workshop/Rakor/Rapat Internal) dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yaitu relawan berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial	4	T	[1.06.06.2.02.0002]
29	1.06.000068	Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi	Orang	Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi meliputi pembuatan barak, fasilitas sosial, dan fasilitas umum lainnya	0	T	[1.06.06.1.01.0003] [1.06.06.2.01.0003]
30	1.06.000069	Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana	Orang	&Korban bencana yang mendapat kebutuhan sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana	18	T	[1.06.06.1.01.0002] [1.06.06.2.01.0002]
31	1.06.000070	Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial	Orang	Korban bencana yang mendapat layanan dukungan psikososial melalui bimbingan dan konsultasi, konseling, pendampingan, dan/atau rujukan	0	T	[1.06.06.1.01.0005] [1.06.06.2.01.0005]
32	1.06.000071	Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentan	Orang	Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan meliputi ibu hamil, penyandang disabilitas, anak dan lanjut usia	5	T	[1.06.06.1.01.0004] [1.06.06.2.01.0004]
33	1.06.000072	Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat	Orang	Korban bencana yang mendapatkan permakanan berupa bahan permakanan/makanan siap saji dalam masa tanggap darurat	133	T	[1.06.06.1.01.0001] [1.06.06.2.01.0001]
34	1.06.000074	Lanjut Usia Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Lanjut Usia terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa upaya pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi	0	T	[1.06.04.2.01.0004]
35	1.06.000075	Lanjut Usia Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	Lanjut usia telantar di luar panti yang mendapatkan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga sebesar 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	161	T	[1.06.04.2.01.0001]
36	1.06.000081	Lanjut Usia Telantar yang menerima kebutuhan sandang	Orang	Lanjut Usia terlantar di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	0	T	[1.06.04.2.01.0002]
37	1.06.000083	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat akses ke Kesehatan Dasar	Orang	Lanjut usia terlantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	0	T	[1.06.04.2.01.0008]

38	1.06.000084	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	Lanjut usia terlantar di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	0	T	[1.06.04.2.01.0007]
39	1.06.000085	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	Lanjut usia telantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	0	T	[1.06.04.2.02.0009] [1.06.04.2.01.0009]
40	1.06.000086	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan rujukan	Orang	Lanjut usia terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan	0	T	[1.06.04.2.01.0012]
41	1.06.000087	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	Lanjut usia terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	0	T	[1.06.04.2.01.0010]
42	1.06.000088	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	Lanjut Usia terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga yang bersangkutan untuk tujuan reunifikasi	0	T	[1.06.04.2.01.0011]
43	1.06.000089	Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga	Orang	Lanjut usia terlantar di luar panti yang mendapatkan alat bantu yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan disabilitasnya	0	T	[1.06.04.2.01.0003]
44	1.06.000090	Lembaga Kesejahteraan Sosial	Lembaga	Lembaga Kesejahteraan Sosial yaitu organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum	0	T	[1.06.02.1.02.0004] [1.06.02.3.02.0007] [1.06.02.4.02.0007] [1.06.02.2.03.0004] [1.06.02.3.05.0001] [1.06.02.4.05.0001] [1.06.02.2.03.0005]
45	1.06.000091	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Lembaga	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) adalah unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganan masalah psikososial keluarga	0	T	[1.06.02.2.03.0005]
46	1.06.000093	Makam Pahlawan Nasional	Makam	Makam di luar Taman Makam Pahlawan dimana jenazah Pahlawan Nasional dimakamkan yang dikelola oleh Kabupaten/Kota	26	T	[1.06.07.2.01.0002] [1.06.07.2.01.0001] [1.06.07.2.01.0003]
47	1.06.000094	orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi	Orang	Pemberian bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial	221	T	[1.06.02.3.02.0005] [1.06.02.4.02.0005] [1.06.05.1.02.0003] [1.06.05.2.02.0004] [1.06.02.3.03.0006] [1.06.02.4.03.0006]
48	1.06.000097	Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	Pekerja profesional/tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan fisik, mental,	2	T	[1.06.04.1.01.0006] [1.06.04.1.02.0006] [1.06.04.1.03.0006] [1.06.04.1.04.0005] [1.06.04.1.05.0005] [1.06.04.2.01.0005] [1.06.04.2.02.0007] [1.06.02.3.04.0001] [1.06.02.4.04.0001]
49	1.06.000098	pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan sosial	Orang	Pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan	4	T	[1.06.04.2.01.0006] [1.06.04.2.02.0008]
50	1.06.000099	Pekerja Sosial Masyarakat	Orang	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang tersedia yaitu warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdi di bidang kesejahteraan sosial	20	T	[1.06.02.1.02.0001] [1.06.02.2.03.0001]
51	1.06.000101	Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan aktivitas hidup	4	T	[1.06.04.1.02.0006] [1.06.04.1.03.0006] [1.06.04.1.04.0005] [1.06.04.1.05.0005] [1.06.04.1.01.0006] [1.06.04.2.02.0007] [1.06.04.2.01.0005]

52	1.06.000102	pekerja sosial profesional yang memberikan bimbingan sosial	Orang	Pekerja Sosial Profesional yaitu seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial yang melaksanakan pemberian bimbingan	4	T	[1.06.04.2.02.0008]
53	1.06.000103	Pelaksanaan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional	Laporan	Pelaksanaan pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) yaitu taman makam pahlawan nasional yang berada di kabupaten/kota	0	T	[1.06.07.1.01.0003] [1.06.07.2.01.0003]
54	1.06.000110	Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa upaya pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang	0	T	[1.06.04.2.01.0004]
55	1.06.000111	Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan pemenuhan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan megacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	77	T	[1.06.04.2.01.0001]
56	1.06.000112	Penyandang Disabilitas Telantar yang menerima kebutuhan sandang	Orang	Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	0	T	[1.06.04.2.01.0002]
57	1.06.000113	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	Fasilitasi penyandang disabilitas terlantar di luar panti untuk mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	0	T	[1.06.04.2.01.0008]
58	1.06.000115	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	Fasilitasi penyandang disabilitas terlantar di luar panti untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	0	T	[1.06.04.2.01.0007]
59	1.06.000116	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	Fasilitasi penyandang Disabilitas telantar di luar panti yang mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	3	T	[1.06.04.2.02.0009] [1.06.04.2.01.0009]
60	1.06.000117	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan rujukan	Orang	Fasiitasi penyandang disabilitas terlantar di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan kepada provinsi atau sesuai kebutuhan	4	T	[1.06.04.2.01.0012]
61	1.06.000118	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	Penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	4	T	[1.06.04.2.01.0010]
62	1.06.000119	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	Penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan penulusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi	5	T	[1.06.04.2.01.0011]
63	1.06.000122	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga	Orang	Penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan alat bantu yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan disabilitasnya	0	T	[1.06.04.2.01.0003]
64	1.06.000128	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	T	[1.06.04.2.02.0009]
65	1.06.000129	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang difasilitasi untuk mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan (sekolah) dan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rumah sakit)	0	T	[1.06.04.2.02.0010]
66	1.06.000130	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan alat bantu	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang mendapatkan alat bantu yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan disabilitasnya	0	T	[1.06.04.2.02.0005]

67	1.06.000132	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan data agar diusulkan masuk dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu serta layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	0	T	[1.06.04.2.02.0001]
68	1.06.000133	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera karena terancam kehidupannya dan/atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	0	T	[1.06.04.2.02.0002]
69	1.06.000134	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang mendapatkan layanan penulusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga anak terlantar tersebut agar dapat direunifikasi	0	T	[1.06.04.2.02.0011] [1.06.04.1.05.0014]
70	1.06.000135	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga berupa pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang	0	T	[1.06.04.2.02.0012]
71	1.06.000136	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatanberupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis	0	T	[1.06.04.2.02.0006]
72	1.06.000137	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang mendapatkan pemenuhan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan megacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi	0	T	[1.06.04.2.02.0003]
73	1.06.000138	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pLayanan Rujukan	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang difasilitasi di luar panti untuk mendapatkan layanan rujukan	0	T	[1.06.04.2.02.0013]
74	1.06.000139	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima kebutuhan sandang	Orang	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti yang menerima kebutuhan sandang berupa pakaian, perlengkapan mandi, kebutuhan khusus bagi perempuan/balita/bedridden, alas kaki, dan/atau perlengkapan ibadah	0	T	[1.06.04.2.02.0004]
75	1.06.000150	Sarana dan prasarana di Taman Makam Pahlawan yang di rehabilitasi	Unit	Komponen utama (monumen/tugu, plaza upacara, jalan utama, dst) maupun komponen penunjang (pertamanan, halaman parkir, rumah petugas, dst) di Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi	0	T	[1.06.07.1.01.0001] [1.06.07.2.01.0001]
76	1.06.000161	Tempat penampungan pengungsi yang tersedia	Unit	Barak, fasilitas sosial, dan fasilitas umum lainnya yang tersedia	0	T	[1.06.06.1.01.0003] [1.06.06.2.01.0003]
77	1.06.000162	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Orang	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersedia yaitu seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan	11	T	[1.06.02.1.02.0002] [1.06.02.3.02.0008] [1.06.02.2.03.0002] [1.06.02.3.03.0008] [1.06.02.4.03.0008]
78	1.06.000169	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Orang	warga negara migran yang mengalami masalah sosial dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu	0	T	[1.06.03.1.01.0001] [1.06.03.4.06.0001] [1.06.03.3.06.0001] [1.06.03.2.01.0001] [1.06.03.3.02.0001] [1.06.03.4.02.0001]
79	1.06.000170	Taruna Siaga Bencana	Orang	Jumlah relawan sosial yang sudah terlatih atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana	22	T	[1.06.06.3.03.0001] [1.06.06.4.03.0001] [1.06.06.3.02.0002] [1.06.06.4.02.0002] [1.06.06.3.02.0001] [1.06.06.4.02.0001] [1.06.06.3.02.0003] [1.06.06.4.02.0003] [1.06.06.2.02.0001] [1.06.06.2.02.0002]

80	1.06.000175	Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial	Dokumen	Penyusunan kebijakan program dan skema perlindungan sosial yang meliputi semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat, dimana pada konteks ini khususnya OAP, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial ditujukan kepada seseorangm keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat, pada konteks ini khususnya OAP, yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam. Perlindungan sosial dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum.	0	T	[1.06.05.3.03.0001] [1.06.05.4.03.0001] [1.06.05.3.03.0001] [1.06.05.4.03.0001]
81	1.06.000178	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga	Keluarga	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga yaitu keluarga yang yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial	0	T	[1.06.02.1.02.0003] [1.06.02.2.03.0003]
82	1.06.000179	Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Orang	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersedia yaitu seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan	11	T	[1.06.02.1.02.0002] [1.06.02.2.03.0002]
83	1.06.000180	Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Orang	Tunjangan Berkelanjutan adalah jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan Nasional dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan hidup, tunjangan perumahan dan/atau tunjangan pendidikan. Pemberian Tunjangan Berkelanjutan sebagai bentuk penghargaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan kepada Pejuang, Perintis Kemerdekaan, dan Keluarga Pahlawan Nasional. Penerima Tunjangan berkelanjutan terdiri atas: 1) Pejuang, yaitu berupa tunjangan veteran dan dana 2) Perintis Kemerdekaan, yaitu diberikan kepada Perintis Kemerdekaan atau Janda/Duda Perintis dan 3) Keluarga Pahlawan Nasioinal, yaitu diberikan kepada Janda/Duda dari Pahlawan Nasional.	9	T	[1.06.02.1.02.0010] [1.06.02.2.03.0010]
84	1.06.000181	Lokasi yang dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT	Lokasi	Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemberdayaan KAT di wilayahnya. Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan KAT sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan	0	T	[1.06.02.2.01.0005]
85	1.06.000182	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Orang	PSKS Daerah meliputi Karang Taruna, Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang dapat memperoleh program pemberdayaan ekonomi	0	T	[1.06.02.1.02.0014] [1.06.02.2.03.0015]
86	1.06.000183	Aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	Laporan	Layanan yang digunakan ditingkat Kabupaten/Kota adalah untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin & rentan miskin, lalu menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupten/Kota dan Desa/Kelurahan) dan non-pemerintah Pembinaan koordinasi termasuk Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Lintas Kabupaten/Kota yang yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program graduasi.	169	T	[1.06.02.2.03.0016]
87	1.06.000184	Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Orang	Melakukan fasilitasi pembinaan teknis berisi pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep dasar Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang menjadi Urusan Pemerintah Bidang Sosial di pusat dan di daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial daerah provinsi dengan bekerjasama Balai Daerah untuk menjamin mutu	0	T	[1.06.04.1.02.0018] [1.06.02.2.03.0017]

88	1.06.000185	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Orang	Penyediaan perbekalan kesehatan kepada penyandang disabilitas terlantar di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis	0	T	
89	1.06.000186	Anak Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Orang	Penyediaan perbekalan kesehatan kepada anak terlantar di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis	0	T	
90	1.06.000187	Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Orang	Penyediaan perbekalan kesehatan kepada lanjut usia terlantar di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis	0	T	
91	1.06.000188	Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Orang	Penyediaan perbekalan kesehatan kepada gelandangan dan pengemis di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis	0	T	
92	1.06.000189	Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Orang	Fasilitasi pemberdayaan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas miskin dan rentan di bidang sosial, ekonomi, penyediaan akses dan kesempatan kerja, pendidikan dan literasi, serta pelayanan yang diperlukan bagi penyandang disabilitas miskin dan rentan, gelandangan dan pengemis dalam menjaga kemandirian diri.	0	T	[1.06.04.1.01.0020] [1.06.04.2.01.0015]
93	1.06.000190	Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Orang	Fasilitasi pemberdayaan dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis di bidang sosial, ekonomi, penyediaan akses dan kesempatan kerja, pendidikan dan literasi, serta pelayanan yang diperlukan bagi penyandang disabilitas miskin dan rentan, gelandangan dan pengemis dalam menjaga kemandirian diri	0	T	[1.06.04.2.01.0015]
94	1.06.000191	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial	Orang	Reintegrasi adalah penyiapan penerima layanan untuk dapat kembali kepada keluarga, termasuk penyiapan ekosistem di masyarakat (keluarga dan lingkungan).	0	T	[1.06.04.2.01.0016] [1.06.04.1.02.0021]
95	1.06.000192	Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta	0	T	[1.06.04.2.01.0018]
96	1.06.000193	Anak Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta	0	T	[1.06.04.2.01.0018]
97	1.06.000194	Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta	0	T	[1.06.04.2.01.0018]
98	1.06.000195	Gelandang dan Pengemis di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta	0	T	[1.06.04.2.01.0018]

99	1.06.000196	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar Panti yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Orang	Fasilitasi pemberdayaan dan pelatihan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di bidang sosial, ekonomi, penyediaan akses dan kesempatan kerja, pendidikan dan literasi, serta pelayanan yang diperlukan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya dalam menjaga kemandirian diri. Salah satu bentuk pemberdayaan dan pelatihan yang dimaksud termasuk mendorong pelatihan literasi keuangan rumah tangga dan pengelolaan keuangan usaha/mata pencaharian, sehingga PPKS Lainnya peserta program Graduasi memiliki pengetahuan dan keterampilan pengelolaan keuangan rumah tangga	0	T	[1.06.04.2.02.0017]
100	1.06.000197	Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan asistensi sosial, serta	0	T	[1.06.04.2.02.0015]
101	1.06.000198	Peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya	Orang	Kampanye sosial untuk isu Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya. Meliputi advokasi, pencegahan, dan penanganan termasuk memfasilitasi pelaksanaan peringatan hari nasional (Hari Anak, Hari Lanjut Usia Nasional, Disabilitas Internasional, dan lainnya). Perayaan tanggal 29 Mei sebagai Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) dan tanggal 3 Desember sebagai hari Disabilitas Internasional, melalui kegiatan: 1. Pelayanan kesehatan dasar 2. Pemberian sembako, alat bantu dan sandang 3. Gerakan kampanye peduli lanjut usia dan disabilitas 4. Senam sehat 5. Pameran kerajinan 6. Kunjungan ke rumah lansia dan disabilitas 7. Lomba kreativitas 8. Apel hari Lansia dan	0	T	[1.06.04.1.05.0016] [1.06.04.2.02.0016]
102	1.06.000199	Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Orang	Fasilitasi proses pengangkatan anak meliputi Pelaporan yaitu proses penyampaian laporan dalam pelaksanaan pengangkatan anak dari pekerja sosial profesional dan orang tua angkat kepada kepala dinas sosial setempat, Kementerian Sosial, dan/atau Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan Indonesia di negara setempat. Pelaporan pelaksanaan Pengangkatan Anak dibuat dalam bentuk laporan kelayakan COTA (Calon Orang Tua Angkat), laporan perkembangan anak, dan laporan kepindahan.	31	T	[1.06.05.2.01.0004]
103	1.06.000200	Keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah	Orang	Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin dimaksudkan pemberian bantuan modal usaha bagi keluarga miskin dan rentan agar meningkat pendapatannya serta pemberian pendampingan usaha sehingga usaha yang dikelola mengalami kemajuan, dikelola dengan baik sehingga pendapatannya meningkat	0	T	[1.06.05.1.02.0011] [1.06.05.2.02.0010]
104	1.06.000201	Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang	Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah	7638	T	[1.06.05.1.02.0012] [1.06.05.2.02.0009]
105	1.06.000202	Laporan monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Dokumen	Pemantauan monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal (KL)	0	T	[1.06.06.1.01.0021] [1.06.06.2.02.0009]
106	1.06.000203	Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial	Daerah	Pemetaan rawan konflik sosial meliputi pengumpulan data lokasi, potensi/ancaman konflik sosial, analisis kajian, hingga penyusunan peta dan dokumen kajian rawan konflik sosial	0	T	[1.06.06.1.01.0020] [1.06.06.2.02.0010]
107	1.06.000204	Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	Orang	Penyelenggaran penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana (fase pra, saat, dan pasca bencana), baik bencana alam, non-alam, dan sosial, pada masyarakat di lokasi rawan ORP Urusan	0	T	[1.06.06.2.02.0011] [1.06.06.1.01.0019]

108	1.06.000205	Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	Orang	Mitigasi Kebencanaan pada Satuan Pendidikan melalui Program TAGANA Masuk Sekolah (TMS). Kegiatan Tagana Masuk Sekolah diberikan 7 pilihan sub kegiatan yang dapat dilaksanakan di lingkungan pendidikan secara berkesinambungan, yaitu : 1. Pengenalan Jenis Bencana dan Model Menghadapi Bencana 2. Strategi kesiapsiagaan dan mitigasi menghadapi bencana 3. Pengorganisasian Penanggulangan Bencana di Satuan Pendidikan 4. Menentukan tanda bahaya yang disepakati dan dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan di satuan Pendidikan 5. Menentukan dan memasang tanda petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul 6. Penyampaian informasi/laporan dan permohonan pertolongan 7. Penyelenggaraan kegiatan simulasi	0	T	[1.06.06.1.01.0018] [1.06.06.2.02.0008]
109	1.06.000206	Tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Orang	Pelatihan tenaga sukarelawan tenaga Pordam dilaksanakan untuk membantu masyarakat bila terjadi bencana sosial dan non alam	1	T	[1.06.06.1.01.0022] [1.06.06.2.02.0004]
110	1.06.000207	Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	Peningkatan kompetensi melalui Management of Training, Training Officer Course, Training of Trainers, Training of Facilitator dan upaya lain yang relevan kepada TAGANA. TAGANA adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial, yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan penanggulangan bencana secara berkala oleh Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah	1	T	[1.06.06.1.01.0015] [1.06.06.2.02.0003]
111	1.06.000208	Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Orang	TAGANA adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial, yang mendapatkan pelatihan dan bimbingan penanggulangan bencana secara berkala oleh Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah	22	T	[1.06.06.1.01.0016] [1.06.06.2.02.0006]
112	1.06.000209	Kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	Desa/Kelurahan	Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial merupakan salah satu upaya dalam mempersiapkan masyarakat di wilayah rawan bencana dalam mengantisipasi terhadap kejadian bencana. Kegiatan ini meliputi kegiatan: 1) sosialisasi, 2) pembinaan/pelatihan, 3) simulasi, dan 4) pengadaan logistik	2	T	[1.06.06.2.02.0005] [1.06.06.1.01.0023]
113	1.06.000210	Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	Orang	Bantuan langsung berupa uang tunai yang meliputi: santunan ahli waris, santunan bagi korban luka, bahan bangunan rumah, isi hunian tetap, dan/atau penguatan ekonomi bagi korban bencana. Penguatan ekonomi yang dimaksud agar korban bencana mampu bertahan hidup hingga	0	T	[1.06.06.2.02.0007] [1.06.06.1.01.0017]
114	1.06.000211	Orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional	Orang	Fasilitasi perseorangan atau kelompok untuk berziarah atau studi ke TMPN Kabupaten/Kota. Studi berupa penyediaan data dan informasi dari yang dimakamkan (perpustakaan, karya ilmiah, buku), ruang diorama, balai pelestarian, ruang temu ilmiah, dst	0	T	[1.06.07.2.01.0005] [1.06.07.1.01.0004]
115	1.06.000212	orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional	Orang	OPD Sosial menerima surat pemberitahuan dari Komando Distrik Militer untuk pemakaman. Kemudian OPD Sosial menyiapkan sarana dan prasarana pemakaman, tenaga pemakaman, dan melaksanakan penguburan	0	T	[1.06.07.1.01.0005] [1.06.07.2.01.0004]

116	1.06.000219	Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Orang	1) Nilai kepahlawanan, keperintisan dan kepeloporan adalah suatu proses kegiatan untuk menghayati, mengamalkan, mengembangkan dan melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kepeloporan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di kalangan generasi muda demi kesinambungan perjuangan bangsa. 2) Kesetiakawanan Sosial adalah nilai dasar yang terwujud dalam bentuk pikiran, sikap, dan tindakan saling peduli dan berbagai yang dilandasi oleh kerelaan, kesetiaan, kebersamaan, toleransi, dan kesetaraan guna meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri setiap warga negara Indonesia. Penguatan Kesetiakawanan Sosial adalah upaya memperkuat penanaman dan pelestarian kesetiakawanan sosial secara terarah, terpadu, terencana, dan berkelanjutan. Tujuan dari penguatan Kesetiakawanan Sosial adalah untuk menumbuhkan, meningkatkan, dan melestarikan rasa saling peduli dan berbagi yang dilandasi oleh kerelaan, kesetiaan, kebersamaan, toleransi, dan kesetaraan guna meningkatkan harkat, martabat, dan	0	T	[1.06.02.1.02.0011] [1.06.02.2.03.0011]
117	1.06.000233	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Orang	Pemantauan monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial dan Kearifan Lokal (KL)	0	T	[1.06.06.1.01.0021] [1.06.06.2.02.0009]

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025	Disabled	Info Sub Kegiatan
1	2.18.000001	Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis pelaksanaan penanaman modal.	Orang	Pengertian Bimtek (Bimbingan Teknis) adalah Pelatihan yang biasanya dilaksanakan oleh Lembaga Resmi dengan Tujuan untuk Meningkatkan Kompetensi Peserta yang Dimana Materi yang diberikan Meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur,	6	T	[2.18.05.1.01.0006] [2.18.05.2.01.0005]
2	2.18.000002	Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis.	Orang	Pengertian Bimtek (Bimbingan Teknis) adalah Pelatihan yang biasanya dilaksanakan oleh Lembaga Resmi dengan Tujuan untuk Meningkatkan Kompetensi Peserta yang Dimana Materi yang diberikan Meliputi Membangun Tim Kerja Efektif, Teknik Komunikasi dalam Konteks Pelayanan Prima, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Penanganan Keluhan Pelanggan, Tata Pemerintahan yang Baik dan Profesionalisme Aparatur,	6	T	[2.18.05.1.01.0006] [2.18.05.2.01.0005] [1.01.02.3.06.0057] [1.01.02.4.05.0069] [1.01.02.3.05.0072] [1.01.02.4.06.0059]
3	2.18.000004	Data Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;	Dokumen	& Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko &	1045	T	[2.18.06.1.01.0002] [2.18.04.1.01.0001] [2.18.04.1.01.0006] [2.18.04.1.02.0001] [2.18.04.1.02.0007] [2.18.06.1.01.0001] [2.18.06.2.01.0002] [2.18.06.2.01.0001] [2.18.04.2.01.0001] [2.18.04.2.01.0006] [2.17.02.1.02.0005]
4	2.18.000005	Informasi Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik.	Dokumen	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi pengunaan kalimat Non Perizinan	1258	T	[2.18.04.1.01.0001] [2.18.04.1.01.0006]
5	2.18.000006	Informasi Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;	Dokumen	& Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko &	1045	T	[2.18.06.1.01.0002] [2.18.06.3.02.0001] [2.18.06.4.02.0001] [2.18.07.3.01.0001] [2.18.07.3.02.0001] [2.18.07.4.01.0001] [2.18.07.4.02.0001] [2.18.04.2.01.0006] [2.18.06.2.01.0001]
6	2.18.000007	Pelaku usaha yang dilayani Pengaduannya terkait Non Perizinan.	Orang	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi pengunaan kalimat Non Perizinan	1	T	[2.18.04.1.01.0008] [2.18.04.2.01.0003]
7	2.18.000010	Pelaku usaha yang dilayani pengaduannya terkait Pelayanan Terpadu Perizinan;	Orang	Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Pelayanan Terpadu Perizinan adalah sistem pelayanan perizinan (izin dan non izin) yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen perizinan dengan transparan dan terpadu pada satu tempat	0	T	[2.18.04.2.01.0007]
8	2.18.000013	Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Perizinan berbasis Sistem secara Elektronik;	Orang	Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Perizinan berbasis sistem secara elektronik adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia	1045	T	[2.18.04.2.01.0006] [2.18.04.2.01.0007]
9	2.18.000014	Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan berbasis Elektronik.	Orang	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi pengunaan kalimat Non Perizinan	1045	T	[2.18.04.2.01.0006]
10	2.18.000016	Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Perizinan berbasis Elektronik;	Orang	Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Pelayanan terpadu perizinan berbasis elektronik adalah Perizinan berbasis sistem secara elektronik adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia	1045	T	[2.18.04.2.01.0006]

11	2.18.000017	Pelaku usaha yang menggunakan Perizinan berbasis Sistem Elektronik;	Orang	Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Perizinan berbasis sistem elektronik adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia.	1045	T	[2.18.04.1.01.0006] [2.18.04.1.01.0008] [2.18.04.1.02.0006] [2.18.04.2.01.0006] [2.18.04.2.01.0007]
12	2.18.000018	Peraturan Daerah (Perda) Menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.	Dokumen	Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota &	1	T	[2.18.02.1.02.0001] [2.18.04.1.01.0005] [2.18.02.2.02.0001] [2.18.04.2.01.0005]
13	2.18.000021	Peraturan daerah yang mengatur tentang promosi penanaman modal.	Dokumen	Perumusan strategi Promosi untuk mendorong peningkatan Minat Investasi sebagai acuan pelaksanaan kegiatan promosi berdasarkan pada Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal yang diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal	1	T	[2.18.03.1.01.0001] [2.18.03.1.01.0002] [2.18.03.1.01.0003] [2.18.02.1.02.0005] [2.18.02.1.02.0002] [2.18.02.1.02.0003] [2.18.03.2.01.0003] [2.18.03.2.01.0002] [2.18.03.2.01.0001] [2.18.02.2.02.0002] [2.18.02.2.02.0004] [2.18.02.2.02.0003]
14	2.18.000026	peraturan Kepala Daerah tentang pemberian fasilitasi/insentif Penanaman modal di daerah;	Dokumen	Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan daerah.	2	T	[2.18.02.1.01.0001] [2.18.02.1.01.0002] [2.18.02.1.01.0003] [2.18.02.1.02.0004] [2.18.02.3.03.0001] [2.18.02.3.04.0001] [2.18.02.3.05.0001] [2.18.02.4.03.0001] [2.18.02.4.04.0001] [2.18.02.4.05.0001] [2.18.04.1.02.0005] [2.18.04.1.02.0004] [2.18.04.1.01.0004] [2.18.04.1.01.0005] [2.18.02.2.01.0001] [2.18.02.2.01.0002] [2.18.04.2.01.0004] [2.18.04.2.01.0005] [2.18.02.2.01.0003] [2.18.02.3.03.0001] [2.18.02.3.04.0001] [2.18.02.3.05.0001] [2.18.02.4.03.0001] [2.18.02.4.04.0001]
15	2.18.000027	Peraturan Kepala Daerah tentang pemberian kemudahan berusaha Penanaman modal di daerah.	Dokumen	Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan daerah.	2	T	[2.18.02.1.01.0001] [2.18.02.3.06.0001] [2.18.02.4.06.0001] [2.18.02.2.01.0001] [2.18.02.3.06.0001] [2.18.02.4.06.0001]
16	2.18.000028	Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.	Dokumen	Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai nilai ekonomi	1	T	[2.18.02.2.02.0004] [2.18.02.2.02.0002] [2.18.02.2.02.0003] [2.18.02.4.06.0001] [2.18.02.3.06.0001]
17	2.18.000030	Rencana Minat Investasi di dalam negeri;	Dokumen	Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, langsung maupun tidak langsung dengan harapan di kemudian hari pemilik modal akan memperoleh manfaat tertentu dari hasil penanaman modalnya. Investasi di dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.	0	T	[2.18.02.1.01.0003] [2.18.02.1.02.0001] [2.18.02.1.02.0004] [2.18.03.2.01.0002] [2.18.02.2.01.0003] [2.18.02.2.02.0001] [2.18.02.2.02.0005]
18	2.18.000031	Rencana Minat Investasi di luar negeri.	Dokumen	Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, langsung maupun tidak langsung dengan harapan di kemudian hari pemilik modal akan memperoleh manfaat tertentu dari hasil penanaman modalnya. Investasi di luar negeri adalah investasi asing langsung atau penanaman modal asing, di mana seorang investor pada lingkup perekonomian suatu negara menaruh minat pada bisnis di lingkup perekonomian negara lain.	0	T	[2.18.03.2.01.0002]
19	2.18.000032	Unit Usaha yang dilakukan pengawasan.	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya.	13	T	[2.18.05.1.01.0004] [2.18.05.2.01.0006]
20	2.18.000034	Unit Usaha yang memenuhi komitmen perizinan berUsaha.	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.	1045	T	[2.18.05.1.01.0005] [2.18.05.2.01.0004]
21	2.18.000036	Unit Usaha yang memperoleh insentif di daerah;	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah	0	T	[2.18.02.1.01.0004] [2.18.02.2.01.0004]

22	2.18.000037	Unit Usaha yang memperoleh kemudahan berUsaha di daerah.	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Kemudahan Berusaha adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah	0	T	[2.18.02.1.01.0004] [2.18.02.2.01.0004]
23	2.18.000038	Unit usaha yang terpenuhi Komitmen Non Perizinan Penanaman Modal.	Unit Usaha	Dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah tidak disebutkan lagi pengunaan kalimat Non Perizinan	1258	T	[2.18.04.1.02.0008] [2.18.04.2.01.0008]
24	2.18.000040	Unit Usaha yang terpenuhi Komitmen Perizinan Penanaman Modal;	Unit Usaha	Unit usaha adalah suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan keuntungan, misalnya menjahit, penjualan, koperasi, dan sebagainya. Perizinan adalah merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha	1045	T	[2.18.04.1.02.0008] [2.18.04.2.01.0008]
25	2.18.000043	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	Kemitraan adalah kerjasama yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung antara pelaku UMKM dengan usaha besar	400	T	[2.18.02.1.01.0003] [2.18.02.1.02.0004] [2.18.07.3.03.0001] [2.18.07.4.03.0001] [2.18.02.2.01.0003] [2.18.02.2.02.0005]
26	2.18.000045	Dokumen promosi penanaman modal	Dokumen	Promosi Penanaman Modal selanjutnya disebut Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan di dalam negeri	0	T	[2.18.03.2.01.0003]

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2025	Disabled	Info Sub Kegiatan
1	6.01.000001	Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan		90	T	[6.01.02.1.01.0001] [6.01.02.2.01.0001]
2	6.01.000002	Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan		228	T	[6.01.02.1.01.0002] [6.01.02.2.01.0002]
3	6.01.000003	Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan		29	T	[6.01.02.1.01.0003] [6.01.02.2.01.0003]
4	6.01.000004	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan		1	T	[6.01.02.1.01.0004] [6.01.02.2.01.0004]
5	6.01.000005	Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan		0	T	[6.01.02.1.01.0005]
6	6.01.000006	Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan		0	T	[6.01.02.1.01.0006] [6.01.02.2.01.0006]
7	6.01.000007	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen		2	T	[6.01.02.1.01.0007] [6.01.02.2.01.0007]
8	6.01.000008	Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan		1	T	[6.01.02.1.02.0001] [6.01.02.2.02.0001]
9	6.01.000009	Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan		25	T	[6.01.02.1.02.0002] [6.01.02.2.02.0002]
10	6.01.000010	Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi		6	T	[6.01.03.1.01.0001] [6.01.03.2.01.0001]
11	6.01.000011	Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi		0	T	[6.01.03.1.01.0002] [6.01.03.2.01.0002]
12	6.01.000012	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah		45	T	[6.01.03.1.02.0001] [6.01.03.2.02.0001]
13	6.01.000013	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah		45	T	[6.01.03.1.02.0002] [6.01.03.2.02.0002]
14	6.01.000014	Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan		4	T	[6.01.03.1.02.0003] [6.01.03.2.02.0003]
15	6.01.000015	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah		45	T	[6.01.03.1.02.0004] [6.01.03.2.02.0004]
16	6.01.000020	Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan		177	T	[6.01.02.2.01.0005]

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025	Disabled	Info Sub Kegiatan
1	2.24.000001	Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	&Akusisi Arsip Statis meliputi verifikasi, melakukan penilaian arsip sesuai dengan JRA. Pengolahan Arsip Statis meliputi pembuatan sarana bantu penemuan kembali arsip statis yang terdiri dari daftar arsip, inventaris arsip dan guide arsip. Preservasi yang dimaksud meliputi : - Restorasi, -Penyimpanan - Reproduksi/Digitalisasi -Pengujian Arsip Akses Arsip Statis meliputi keterbukaan arsip statis, Aksessibilitas arsip dan	0	T	[2.24.02.1.01.0010] [2.24.02.1.01.0012] [2.24.02.1.02.0005] [2.24.02.1.02.0006] [2.24.02.3.06.0001] [2.24.02.2.01.0004] [2.24.02.2.02.0002] [2.24.02.2.02.0003] [2.24.02.2.02.0005] [2.24.02.2.02.0004]
2	2.24.000002	Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip	Arsip yang dimaksud meliputi arsip yang telah dilakukan perbaikan arsip dampak bencana	0	T	[2.24.02.1.01.0008] [2.24.03.1.02.0001] [2.24.03.1.02.0002] [2.24.02.1.01.0012] [2.24.03.2.02.0001] [2.24.03.2.02.0002]
3	2.24.000005	Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip	Penilaian Arsip adalah proses menentukan nilai arsip dilihat dari aspek fungsi dan substansi informasinya serta karakteristik fisik/nilai instrinsiknya yang dilakukan melalui langkah-langkah teknis pengaturan secara sistematis dalam unit-unit informasi. Pengukuran Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun dilakukan dengan menghitung Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun.	0	T	[2.24.02.1.01.0001] [2.24.02.1.01.0002] [2.24.02.1.01.0003] [2.24.02.1.01.0004] [2.24.02.1.01.0012] [2.24.02.3.06.0002] [2.24.02.4.06.0002] [2.24.03.1.01.0001] [2.24.03.1.01.0004] [2.24.02.2.01.0005] [2.24.02.2.01.0009] [2.24.02.2.01.0010] [2.24.03.2.01.0001] [2.24.03.2.01.0004]
4	2.24.000006	Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Berkas	Pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun ditetapkan oleh pimpinan SKPD atau penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi setelah mendapat: 1) Pertimbangan tertulis dari panitia penilai 2) Persetujuan tertulis dari gubenur. Pelaksanaan pemusnahan arsip tersebut menjadi tanggungjawab Unit Kearsipan di satuan kerja perangkat daerah atau penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi. Pengukuran Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun dilakukan dengan menghitung Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang	0	T	[2.24.02.1.01.0012] [2.24.03.1.01.0002] [2.24.03.1.01.0003] [2.24.02.2.01.0003] [2.24.03.2.01.0002] [2.24.03.2.01.0003]
5	2.24.000007	Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Arsip	Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup meliputi arsip yang mengekspos data diri seseorang, arsip yang sedang digunakan dalam proses hukum, peta perbatasan dll. Kriteria dari arsip tertutup dapat dilihat berdasarkan klasul pada saat penyerahan arsip dan	0	T	[2.24.02.3.04.0002] [2.24.04.1.01.0002] [2.24.04.2.01.0002] [2.24.04.2.01.0004]
6	2.24.000013	Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Daftar	Penyelamatan Arsip Pembubaran Perangkat Daerah dilaksanakan dengan pembentukan Tim Penyelamatan Arsip pada perangkat daerah Provinsi. Kegiatan meliputi : - penaataan dan pendaftaran arsip - verifikasi/penilaian arsip -penyerahan dan	0	T	[2.24.03.2.03.0001]
7	2.24.000015	Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	Kegiatan meliputi : - menyusun Berita Acara Hasil alih media dan daftar arsip alihmedia	0	T	[2.24.03.1.04.0002] [2.24.02.1.01.0011] [2.24.03.2.04.0002]
8	2.24.000016	Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Arsip	Kegiatan meliputi : -Menyusun Berita Acara pengujian autentifikasi arsip, surat pernyataan autentifikasi arsip statis, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alih media.	0	T	[2.24.03.1.05.0002] [2.24.02.1.01.0011] [2.24.02.2.02.0003] [2.24.03.2.05.0002]
9	2.24.000017	Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip	Kegiatan meliputi : -Menyusun Berita Acara pengujian autentifikasi arsip, surat pernyataan autentifikasi arsip statis, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alih media.	0	T	[2.24.03.1.04.0001] [2.24.02.1.01.0011] [2.24.02.2.02.0005] [2.24.03.2.04.0001]
10	2.24.000018	Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip	Kegiatan meliputi : -Menyusun Berita Acara pengujian autentifikasi arsip, surat pernyataan autentifikasi arsip statis, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alih media.	0	T	[2.24.03.1.05.0001] [2.24.02.1.01.0011] [2.24.03.2.05.0001]
11	2.24.000019	Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	Kegiatan meliputi : -Menyusun Berita Acara pengujian autentifikasi arsip, surat pernyataan autentifikasi arsip statis, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alih media.	0	T	[2.24.03.1.04.0001] [2.24.02.1.01.0011] [2.24.03.2.04.0001]

12	2.24.000020	Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	Arsip	Kegiatan meliputi : -Menyusun Berita Acara pengujian autentifikasi arsip, surat pernyataan autentifikasi arsip statis, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alih media.	0	T	[2.24.03.1.05.0001] [2.24.02.1.01.0011] [2.24.03.2.05.0001]
13	2.24.000021	Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Arsip	Kegiatan meliputi : -Menyusun Berita Acara pengujian autentifikasi arsip, surat pernyataan autentifikasi arsip statis, berita acara alihmedia dan daftar arsip hasil alih media.	0	T	[2.24.03.1.05.0003] [2.24.02.1.01.0011] [2.24.03.2.05.0003]
14	2.24.000027	Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	Informasi arsip yang dipublikasikan di JIKN: 1) Informasi yang bersifat terbuka, sehingga pengguna dapat melihat metadata termasuk isi (kopi digital) 2) Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengguna hanya dapat melihat metadata, atau jika terdapat kopi digital yang telah disunting atas persetujuan pejabat yang berwenang maka pengguna dapat melihat metadata termasuk isi (kopi digital) 3) Informasi yang status keterbukaan/ketertutupannya belum ditetapkan karena belum dinilai oleh pejabat yang berwenang, sehingga	0	T	[2.24.02.2.01.0006] [2.24.02.1.01.0009] [2.24.02.2.03.0001]
15	2.24.000029	Naskah Dinas yang Diciptaan dan Digunakan	Berkas	Kegiatan meliputi : Pembuatan naskah dinas, pengendalian naskah dinas dan penyajian arsip dinamis	0	T	[2.24.02.1.01.0006] [2.24.02.3.04.0002] [2.24.02.2.01.0001]
16	2.24.000031	Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	Kegiatan meliputi : Pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, pengelolaan arsipvital, terjaga,alih media, penyusutan arsip (pemindahan, pemusnahan dan penyerahan arsip statis)	0	T	[2.24.02.1.01.0005] [2.24.02.3.04.0002] [2.24.02.2.01.0002]
17	2.24.000032	Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Arsip	kegiatan meliputi : identifikasi, pendataan, pelaporan arsip terjaga dan penyerahan salinan otentik arsip terjaga ke ANRI	0	T	[2.24.02.1.02.0001] [2.24.02.1.02.0004] [2.24.02.2.02.0001]
18	2.24.000034	SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan	SOP	Acuan yang digunakan dalam penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disusun dan ditetapkan	0	T	[2.24.04.1.01.0001] [2.24.04.1.01.0003] [2.24.04.1.01.0004] [2.24.04.1.01.0005] [2.24.04.2.01.0001] [2.24.04.2.01.0003]
19	2.24.000035	Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi,Kabupaten/Kota	Arsip	Penyelamatan Arsip Pembubaran Perangkat Daerah dilaksanakan dengan pembentukan Tim Penyelamatan Arsip pada perangkat daerah. Kegiatan meliputi : - penaataan dan pendaftaran arsip - verifikasi/penilaian arsip -penyerahan dan pemusnahan arsip	0	T	[2.24.02.3.06.0003] [2.24.03.1.03.0001] [2.24.02.4.06.0003] [2.24.02.3.04.0002] [2.24.02.3.06.0001] [2.24.02.3.06.0002] [2.24.02.4.06.0001] [2.24.02.4.06.0002] [2.24.03.2.03.0001]
20	2.24.000036	Data Base Arsiparis	Orang	Data berupa jumlah arsiparis dan SDM yang ada dimasing-masing OPD, Jumlah diklat dan Bimtek yang diikuti.	0	T	[2.24.02.1.01.0007] [2.24.02.1.02.0003] [2.24.02.1.03.0002] [2.24.02.3.04.0001] [2.24.02.3.06.0003] [2.24.05.3.01.0001] [2.24.05.3.03.0001] [2.24.05.3.05.0001] [2.24.05.4.04.0001] [2.24.05.4.06.0001] [2.24.02.2.01.0008] [2.24.02.2.03.0002] [2.24.02.3.04.0001] [2.24.02.4.04.0001] [2.24.02.4.04.0002]

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025	Disabled	Info Sub Kegiatan
1	2.23.000095	Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi	1	T	[2.23.02.2.01.0001] [2.23.02.2.01.0004] [2.23.02.2.01.0007] [2.23.02.2.01.0010] [2.23.02.2.01.0011] [2.23.02.2.01.0012] [2.23.02.2.01.0013] [2.23.02.2.02.0002] [2.23.02.2.02.0007] [2.23.02.3.03.0001] [2.23.02.4.03.0001]
2	2.23.000096	Jumlah Perpustakaan yang terotomasi	Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang menggunakan sistem informasi perpustakaan terintegrasi (Inlislite, SLims, atau sejenisnya)	1	T	[2.23.02.2.01.0010]
3	2.23.000097	Perpustakaan yang memiliki repositori digital kewenangan kabupaten/kota	Perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang memiliki sarana penyimpanan dan pelayanan bahan pustaka digital. (Cth. EPrints, DSpace, OJS, aplikasi mobile perpustakaan dan sejenisnya)	1	T	[2.23.02.2.01.0010]
4	2.23.000098	Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/kota	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain	1	T	[2.23.02.2.01.0001] [2.23.02.2.01.0002] [2.23.02.2.01.0004] [2.23.02.2.01.0005] [2.23.02.2.01.0006] [2.23.02.2.01.0010] [2.23.02.2.01.0012] [2.23.02.2.01.0013] [2.23.02.2.02.0004] [2.23.02.3.03.0001] [2.23.02.4.03.0001]
5	2.23.000099	Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kota	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan sekolah Dasar sederajat, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang bersangkutan	153	T	[2.23.02.2.01.0001] [2.23.02.2.01.0002] [2.23.02.2.01.0006] [2.23.02.2.01.0007] [2.23.02.2.01.0013] [2.23.02.2.02.0004]
6	2.23.000100	Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan sekolah Menengah Pertama sederajat, yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang	61	T	[2.23.02.2.01.0001] [2.23.02.2.01.0004] [2.23.02.2.01.0006] [2.23.02.2.01.0010] [2.23.02.2.01.0012] [2.23.02.2.01.0013] [2.23.02.2.02.0004] [2.23.02.3.03.0001] [2.23.02.4.03.0001]
7	2.23.000101	Perpustakaan Kecamatan	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender	0	T	[2.23.02.2.01.0001] [2.23.02.2.01.0002] [2.23.02.2.01.0006] [2.23.02.2.01.0007] [2.23.02.2.01.0013] [2.23.02.2.02.0002] [2.23.02.2.02.0004] [2.23.02.3.03.0001] [2.23.02.4.03.0001]
8	2.23.000102	Perpustakaan Kelurahan/Desa	Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/ kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender	88	T	[2.23.02.2.01.0001] [2.23.02.2.01.0002] [2.23.02.2.01.0006] [2.23.02.2.01.0007] [2.23.02.2.01.0013] [2.23.02.2.02.0002] [2.23.02.2.02.0007] [2.23.02.3.03.0001] [2.23.02.4.03.0001]
9	2.23.000103	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah pemustaka /masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan umum yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota	12955	T	[2.23.02.2.01.0010] [2.23.02.2.01.0014] [2.23.02.2.01.0016] [2.23.02.2.02.0003]
10	2.23.000104	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah pemustaka (karyawan/pegawai) yang berkunjung ke perpustakaan khusus yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota	387	T	[2.23.02.2.01.0010] [2.23.02.2.02.0003]
11	2.23.000105	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan satuan pendidikan Dasar kewenangan Kabupaten/kota	Orang	Jumlah pemustaka (civitas sekolah) yang berkunjung ke perpustakaan satuan pendidikan dasar yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota	15008	T	[2.23.02.2.01.0010] [2.23.02.2.02.0003]
12	2.23.000106	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Satuan Pendidikan Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota	Orang	Jumlah pemustaka (civitas sekolah) yang berkunjung ke perpustakaan satuan pendidikan menengah pertama yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota	3650	T	[2.23.02.2.01.0010] [2.23.02.2.02.0003]
13	2.23.000107	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Kecamatan	Orang	Jumlah pemustaka/masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan Kecamatan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota	0	T	[2.23.02.2.01.0010] [2.23.02.2.01.0015]
14	2.23.000108	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Desa/Kelurahan	Orang	Jumlah pemustaka/masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan Desa/Kelurahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota	15008	T	[2.23.02.2.01.0010] [2.23.02.2.01.0015]

15	2.23.000109	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Umum kewenangan Kabupaten/Kota	Judul	Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di perpustakaan umum yang berada di wilayah kabupaten/kota	49227	T	[2.23.02.2.01.0009] [2.23.02.2.01.0014]
16	2.23.000110	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Khusus kewenangan Kabupaten/kota	Judul	Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di perpustakaan khusus yang berada di wilayah kabupaten/kota	650	T	[2.23.02.2.01.0009]
17	2.23.000111	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Dasar kewenangan Kabupaten/kota	Judul	Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan sekolah dasar/sederajat yang berada di wilayah kabupaten/kota	151000	T	[2.23.02.2.01.0009]
18	2.23.000112	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama kewenangan Kabupaten/kota	Judul	Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan oleh semua perpustakaan sekolah menengah pertama/sederajat yang berada di wilayah kabupaten/kota	57950	T	[2.23.02.2.01.0009]
19	2.23.000113	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Kecamatan	Judul	Jumlah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di perpustakaan kecamatan yang berada di wilayah kabupaten/kota	0	T	[2.23.02.2.01.0009]
20	2.23.000114	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Desa/Kelurahan	Judul	Jumlah Semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan di Perpustakaan Desa/Kelurahan yang berada di wilayah kabupaten/kota	60800	T	[2.23.02.2.01.0009]
21	2.23.000115	Pelestarian naskah kuno milik Kabupaten/kota	naskah	Masyarakat yang memiliki dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan	0	T	[2.23.03.2.01.0001]
22	2.23.000116	Koleksi khas daerah yang dimiliki perpustakaan kabupaten/kota	Eksemplar	Yang termasuk koleksi khas sebagai berikut : 1. Koleksi buku langka, manuskrip, peta, foto, bentuk mikro, rekaman suara 2. Koleksi khusus sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yaitu bahan perpustakaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan 3. Koleksi kearifan budaya etnis nusantara 4. Koleksi tentang negara anggota ASEAN 5. Koleksi tentang negara-negara non ASEAN terutama China, Jepang, Timur Tengah, India, Belanda, dan Australia 6. Koleksi untuk pemustaka berkebutuhan khusus pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah koleksi khas daerah yang dimiliki oleh kab/kota	20	T	[2.23.02.2.01.0003]
23	2.23.000117	koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Kabupaten/kota		koleksi budaya etnis nusantara yang mencakup Semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis yang ada di Indonesia baik yang mutahir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan: bahasa, peralatan hidup, mata pencaharian hidup/ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, kesenian, dan budaya Melayu. Kegiatan meliputi hunting data ketersediaan koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ada diwilayah Kab/Kota Pengukurannya dengan menghitung jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersedia di wilayah	1	T	[2.23.03.2.01.0002]

24	2.23.000118	koleksi budaya etnis nusantara yang dimiliki	Eksemplar	koleksi budaya etnis nusantara yang mencakup Semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis yang ada di Indonesia baik yang mutahir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan: bahasa, peralatan hidup, mata pencaharian hidup/ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, religi, kesenian, dan budaya Melayu. Kegiatan meliputi seleksi, pengadaan, pengolahan dan penyiangan koleksi budaya Etnis Nusantara yang ada di wilayahnya Pengukurannya dengan menghitung jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang	1	T	[2.23.03.2.02.0001] [2.23.03.2.02.0002]
25	2.23.000119	Jumlah promosi gemar membaca tingkat Kabupaten/kota	Kegiatan	Kegemaran membaca adalah kebiasaan atau perilaku yang disukai seseorang untuk mengetahui atau menambah informasi melalui membaca Pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah kegiatan promosi kegemaran membaca di wilayah Kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Kab/Kota	1	T	[2.23.02.2.02.0001]
26	2.23.000120	Tenaga Teknis Perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota	Orang	Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Umum di wilayah Kab/kota (tidak termasuk pustakawan)	17	T	[2.23.02.2.01.0010]
27	2.23.000121	Tenaga Teknis Perpustakaan khusus binaan Kabupaten/kota	Orang	Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Khusus di wilayah Kab/kota (tidak termasuk pustakawan)	8	T	[2.23.02.2.01.0010]
28	2.23.000122	Tenaga Teknis Perpustakaan Sekolah Dasar binaan Kabupaten/Kota	Orang	Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Sekolah Dasar di wilayah Kab/kota (tidak termasuk pustakawan)	75	T	[2.23.02.2.01.0010]
29	2.23.000123	Tenaga Teknis Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama binaan Kabupaten/kota	Orang	Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kab/kota (tidak termasuk pustakawan)	35	T	[2.23.02.2.01.0010]
30	2.23.000124	Tenaga Teknis Perpustakaan kecamatan binaan Kabupaten/kota	Orang	Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Kecamatan di wilayah Kab/kota (tidak termasuk pustakawan)	0	T	[2.23.02.2.01.0010]
31	2.23.000125	Tenaga Teknis Perpustakaan desa/Kelurahan binaan Kabupaten/kota	Orang	Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Jumlah orang yang bekerja di Perpustakaan Desa/Kelurahan di wilayah Kab/kota (tidak termasuk pustakawan)	59	T	[2.23.02.2.01.0010]
32	2.23.000126	Pustakawan pada Perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota	Orang	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Umum di wilayah Kabupaten/Kota	5	T	[2.23.02.2.01.0010] [2.23.02.2.01.0016]
33	2.23.000127	Pustakawan pada Perpustakaan khusus binaan Kabupaten/kota	Orang	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang bekerja pada perpustakaan khusus di wilayah provinsi Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Khusus di wilayah Kabupaten/Kota	1	T	[2.23.02.2.01.0010] [2.23.02.2.01.0006]

34	2.23.000128	Pustakawan pada Perpustakaan Sekolah Dasar binaan Kabupaten/Kota	Orang	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang bekerja pada perpustakaan satuan pendidikan menengah di wilayah provinsi Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Sekolah Dasar/sederajat di	306	T	[2.23.02.2.01.0010] [2.23.02.2.01.0016]
35	2.23.000129	Pustakawan pada Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama binaan Kabupaten/kota	Orang	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang bekerja pada perpustakaan satuan pendidikan khusus di wilayah provinsi Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/sederajat di wilayah Kabupaten/Kota	122	T	[2.23.02.2.01.0010] [2.23.02.2.01.0016]
36	2.23.000130	Pustakawan pada Perpustakaan kecamatan binaan Kabupaten/kota	Orang	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang bekerja pada perpustakaan satuan pendidikan khusus di wilayah provinsi Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Kecamatan di wilayah Kabupaten/Kota	0	T	[2.23.02.2.01.0010] [2.23.02.2.01.0016]
37	2.23.000131	Pustakawan pada Perpustakaan desa/Kelurahan binaan Kabupaten/kota	Orang	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Jumlah Pustakawan yang bekerja pada perpustakaan satuan pendidikan khusus di wilayah provinsi Jumlah Pustakawan yang dimiliki oleh Perpustakaan Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten/Kota	0	T	[2.23.02.2.01.0010] [2.23.02.2.01.0006]
38	2.23.000132	Anggota perpustakaan umum binaan Kabupaten/kota	Orang	jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan umum yang berada di wilayah Kabupaten/Kota	1378	T	[2.23.02.2.01.0010]
39	2.23.000133	Anggota perpustakaan khusus binaan Kabupaten/kota	Orang	jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan khusus yang berada di wilayah Kabupaten/Kota	150	T	[2.23.02.2.01.0010]
40	2.23.000134	Anggota perpustakaan sekolah dasar binaan Kabupaten/kota	Orang	jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan satuan Sekolah dasar (SD) /Sederajat yang berada di wilayah Kabupaten/Kota	15205	T	[2.23.02.2.01.0010]
41	2.23.000135	Anggota perpustakaan sekolah menengah pertama binaan Kabupaten/kota	Orang	jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan Sekolah Menegah Pertama (SMP) / Sederajat yang berada di wilayah Kabupaten/Kota	2900	T	[2.23.02.2.01.0010]
42	2.23.000136	Anggota perpustakaan kecamatan binaan Kabupaten/kota	Orang	jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten/Kota	0	T	[2.23.02.2.01.0010]
43	2.23.000137	Anggota perpustakaan desa/Kelurahan binaan Kabupaten/kota	Orang	jumlah anggota perpustakaan pada perpustakaan desa/kelurahan yang berada di wilayah Kabupaten/Kota	1760	T	[2.23.02.2.01.0010]
44	2.23.000138	Masyarakat yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat kabupaten/kota	Orang	Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam promosi gemar membaca tingkat Kabupaten/Kota	0	T	[2.23.02.2.01.0015] [2.23.02.2.02.0001]

45	2.23.000139	Penggiat literasi binaan kabupaten/kota	Orang	Pegiat Literasi adalah seseorang yang memiliki kemampuan Literasi yang dipilih sebagai panutan, motivator, inspirator, katalisator, dan influencer dalam upaya mempromosikan gemar membaca. Duta Baca merupakan sosok inspiratif untuk menjadi motivator dalam membangkitkan kegemaran membaca dan mengampanyekan pembudayaan kegemaran membaca melalui berbagai media. Bunda Baca adalah gelar yang diberikan Perpustakaan Nasional untuk sosok di tiap daerah yang menjadi panutan dalam memajukan serta menumbuhkan minat baca Pengukurannya adalah dengan menghitung jumlah orang yang menjadi pegiat literasi diwilayah Kab/Kota	0	T	[2.23.02.2.02.0003] [2.23.02.2.02.0005]
46	2.23.000140	Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Orang	Masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan dan terlibat dalam kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial	695	T	[2.23.02.2.01.0015] [2.23.02.2.02.0004]
47	2.23.000141	Jumlah Perpustakaan yang melaksanakan layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial	Orang	Perpustakaan hadir sebagai penyedia layanan yang membuka akses masyarakat pada pengetahuan dan menjadi sarana reproduksi pengetahuan ke dalam aksi nyata yang menyejahterakan perpustakaan yang melakukan replikasi terhadap program layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dilaksanakan oleh Perpustaka	22	T	[2.23.02.2.02.0004]

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025	Disabled	Info Sub Kegiatan
1	1.02.000001	Alat uji dan kalibrasi pada RMC	Unit	Alat kalibrasi adalah sebuah perangkat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur, membandingkan, dan menyesuaikan ukuran atau parameter suatu alat atau perangkat lainnya agar sesuai dengan standar atau nilai yang telah ditentukan Jumlah alat kalibrasi dengan kondisi baik	0	T	[1.02.02.1.01.0013] [1.02.02.2.01.0015]
2	1.02.000002	Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting	Unit	Alat atau perangkat Sistem Informasi Kesehatan (Health Information System) adalah solusi teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis informasi terkait dengan layanan kesehatan. Jaringan Internet adalah jaringan global yang terdiri dari ribuan jaringan komputer yang terhubung menggunakan protokol Internet. Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting	5	T	[1.02.02.1.03.0003] [1.02.02.1.03.0002] [1.02.02.2.03.0003] [1.02.02.2.03.0002]
3	1.02.000004	Alkes, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman yang didistribusikan ke Puskesmas serta Faskes Lainnya	Paket	Alat kesehatan adalah instrumen atau perangkat yang digunakan dalam praktik medis, perawatan kesehatan, atau diagnosis untuk membantu mendeteksi, mencegah, mengobati, atau mengurangi gangguan kesehatan pada manusia. Obat adalah zat atau substansi kimia yang digunakan untuk mencegah, mengobati, atau meredakan penyakit, kondisi medis, atau gejala yang tidak diinginkan pada manusia atau hewan. Bahan habis pakai adalah bahan atau produk yang digunakan sekali atau dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat digunakan lagi setelah digunakan. Bahan medis habis pakai adalah bahan atau produk yang digunakan dalam prosedur medis, diagnosis, atau perawatan kesehatan dan tidak dapat digunakan kembali setelah digunakan satu kali. Jumlah Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman yang didistribusikan ke Fasilitas Kesehatan	1	T	
4	1.02.000005	Alkes/alat penunjang medik Fasyankes	Unit	Alat Peunjang medis, sering disebut juga sebagai Alat Kesehatan (Alkes), adalah perangkat atau instrumen yang digunakan untuk membantu dalam diagnosis, perawatan, dan pemantauan kesehatan pasien. Jumlah Alat kesehatan seperti: instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh yang eksisting. Jumlah Alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan seperti: alat, aparatus, mesin yang membantu fungsi pelayanan medis, antara lain seperti peralatan di instalasi rumah duka, instalasi laundry, dan instalasi gizi yang eksisting.	1	T	[1.02.02.1.01.0010] [1.02.02.2.01.0014] [1.02.02.2.01.0020]
5	1.02.000008	Anak Usia Pendidikan Dasar	Orang	Anak usia pendidikan dasar adalah kelompok usia anak yang berada pada tingkat pendidikan dasar, yang biasanya berkisar antara usia 6 hingga 12 tahun. Jumlah anak usia pendidikan dasar	4659	T	[1.02.02.2.02.0005]
6	1.02.000009	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sarana	Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat. Toko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. Toko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan. Toko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu. Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	23	T	[1.02.04.2.01.0001]

7	1.02.000010	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memenuhi Komitmen Izin	Sarana	Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat. Toko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. Toko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan. Toko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu. jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memenuhi Komitmen Izin	3	T	
8	1.02.000011	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki izin/habis masa izinnya	Sarana	Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat. Toko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. Toko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan. Toko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu. Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki izin/habis masa izinnya	3	T	[1.02.04.2.01.0001]
9	1.02.000012	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin	Sarana	Apotek adalah sebuah fasilitas atau toko yang berfokus pada penyediaan dan penjualan obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat. Toko obat adalah jenis toko atau apotek yang khusus menjual obat-obatan, perangkat medis, dan produk kesehatan lainnya kepada masyarakat tanpa memerlukan resep dokter. Toko alat kesehatan adalah jenis toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan dan menjual berbagai alat kesehatan, perangkat medis, dan perlengkapan kesehatan. Toko Optikal adalah toko atau tempat usaha yang khusus menyediakan berbagai jenis kacamata, lensa kontak, dan produk optikal lainnya. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah bentuk usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan, produksi, dan penjualan obat-obatan tradisional atau jamu. Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin	20	T	[1.02.04.2.01.0001]
10	1.02.000014	Balita	Orang	Definisi operasional balita mengacu pada kategori usia anak yang berada pada rentang 1 hingga 5 tahun yang masuk dalam perhitungan. Balita perlu mendapatkan pelayanan mencakup pemantauan pertumbuhan, vaksinasi, pemenuhan gizi yang adekuat, serta stimulasi perkembangan yang sesuai dengan tahapan usia untuk memastikan	12493	T	[1.02.02.2.02.0004]
11	1.02.000015	Barang penunjang operasional RS	Unit	Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit adalah barang untuk memenuhi keperluan perkantoran, langanan daya listrik, telpon, internet dan air Jumlah barang penunjang operasional RS	0	T	[1.02.02.1.01.0016]
12	1.02.000016	Bayi baru lahir	Orang	Bayi baru lahir, atau yang dikenal dengan istilah neonatus, adalah bayi yang baru saja dilahirkan dan berusia antara 0 hingga 28 hari. Jumlah bayi baru lahir	1999	T	[1.02.02.2.02.0003]

13	1.02.000018	BMHP yang disediakan	Paket	Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang disediakan oleh kabupaten/kota mencakup berbagai jenis alat dan perlengkapan medis yang diperlukan untuk mendukung pelayanan kesehatan, terutama di Puskesmas. Berikut adalah beberapa kategori dan contoh BMHP yang umumnya disediakan: Kategori BMHP Alat Kesehatan Termometer Stetoskop Alat pengukur tekanan darah Sediaan Farmasi Obat-obatan dasar seperti analgesik, antibiotik, dan vaksin Bahan Medis Habis Pakai Jarum suntik Plester Sarung tangan medis Pembalut luka Perlengkapan Kesehatan Lainnya Alat bantu pernapasan (misalnya masker oksigen) Alat untuk pemeriksaan laboratorium (misalnya alat tes gula darah)	1	T	[1.02.02.2.01.0017] [1.02.02.2.01.0023]
14	1.02.000021	Data Perizinan Industri Rumah Tangga	Dokumen	Industri rumah tangga adalah sektor ekonomi yang mencakup produksi berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga atau individu untuk kebutuhan sehari-hari dan kehidupan pribadi. Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga	41	T	
15	1.02.000022	Dokter Gigi	Orang	Dokter gigi adalah seorang profesional medis yang memiliki spesialisasi dalam bidang kedokteran gigi. Jumlah dokter gigi	2	T	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
16	1.02.000023	Dokter Spesialis Anak	Orang	Dokter Spesialis Anak, juga dikenal sebagai dokter spesialis pediatri, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melanjutkan spesialisasi dalam bidang pediatri. Jumlah Dokter Spesialis Anak	1	T	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
17	1.02.000024	Dokter Spesialis Anestesi	Orang	Dokter Spesialis Anestesi, juga dikenal sebagai dokter anestesiologis, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melakukan spesialisasi dalam bidang anestesiologi. Jumlah Dokter Spesialis Anestesi	1	T	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
18	1.02.000025	Dokter Spesialis Bedah	Orang	Dokter Spesialis Bedah, juga dikenal sebagai dokter bedah atau dokter bedah spesialis, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melanjutkan spesialisasi dalam bidang bedah. Jumlah Dokter Spesialis Bedah	1	T	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
19	1.02.000026	Dokter Spesialis Jantung	Orang	Dokter Spesialis Jantung, juga dikenal sebagai dokter kardiolog, adalah seorang dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran umum dan kemudian melakukan spesialisasi dalam bidang kardiologi. Jumlah Dokter Spesialis Jantung	0	T	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
20	1.02.000027	Dokter Spesialis kebidanan	Orang	Jumlah Dokter Spesialis kebidanan	1	T	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
21	1.02.000028	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	1	T	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
22	1.02.000029	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	0	T	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
23	1.02.000030	Dokter Spesialis Mata	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Mata	1	T	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
24	1.02.000031	Dokter Spesialis Paru	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Paru	0	T	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
25	1.02.000032	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Penyakit Dalam	1	T	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
26	1.02.000033	Dokter Spesialis Radiologi	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Radiologi	1	T	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
27	1.02.000034	Dokter Spesialis THT	Orang	Jumlah Dokter Spesialis THT	1	T	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
28	1.02.000035	Dokter Spesialis Urologi	Orang	Jumlah Dokter Spesialis Urologi	0	T	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
29	1.02.000036	Dokter Umum	Orang	Jumlah Dokter Umum	17	T	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.3.07.0002] [1.02.03.4.07.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]

30	1.02.000038	Dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	T	[1.02.03.2.02.0001]
31	1.02.000039	Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	0	T	[1.02.04.2.02.0001]
32	1.02.000041	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Dokumen	&Pelayanan Kesehatan Khusus, juga dikenal sebagai pelayanan kesehatan spesialis, merujuk pada layanan medis dan perawatan kesehatan yang disediakan oleh dokter atau tenaga medis yang memiliki spesialisasi tertentu dalam bidang kesehatan tertentu. Pelayanan ini diberikan untuk mengatasi masalah kesehatan yang kompleks atau kondisi medis yang memerlukan penanganan lebih lanjut dan lebih mendalam daripada yang biasanya dapat diberikan oleh dokter umum atau pelayanan kesehatan primer. Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus&		Y	
33	1.02.000044	Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	0	T	[1.02.02.2.02.0037]
34	1.02.000045	Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	T	[1.02.02.3.02.0033] [1.02.02.4.02.0033] [1.02.02.2.02.0025]
35	1.02.000047	Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	T	[1.02.03.2.02.0003]
36	1.02.000049	Dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1	T	[1.02.02.1.03.0001] [1.02.02.2.03.0001]
37	1.02.000053	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	T	[1.02.02.1.02.0006] [1.02.02.2.02.0015]
38	1.02.000054	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1	T	[1.02.02.1.02.0012] [1.02.02.2.02.0050]
39	1.02.000055	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	&Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, juga dikenal sebagai Pelayanan Kesehatan Maternal dan Perinatal, adalah rangkaian layanan kesehatan yang ditujukan untuk mendukung kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, dan anak-anak kecil. Pelayanan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan ibu dan bayi selama masa kehamilan, persalinan, dan masa awal kehidupan anak. Jumalah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak&	1	T	[1.02.02.1.02.0003]
40	1.02.000056	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0	T	[1.02.02.1.02.0007] [1.02.02.2.02.0016] [1.02.02.2.02.0054] [1.02.02.1.02.0036]
41	1.02.000057	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	T	[1.02.02.1.02.0008] [1.02.02.2.02.0017]
42	1.02.000058	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0	T	[1.02.02.1.02.0013]
43	1.02.000059	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	T	[1.02.02.1.02.0011] [1.02.02.2.02.0019]
44	1.02.000060	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1	T	[1.02.02.1.02.0005]
45	1.02.000061	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1	T	[1.02.02.1.02.0004]
46	1.02.000062	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	T	[1.02.02.1.02.0009] [1.02.02.2.02.0018]
47	1.02.000063	Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Dokumen	& Penelitian Kesehatan adalah proses sistematik untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang berbagai aspek kesehatan manusia, penyakit, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta intervensi dan strategi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan&		Y	
48	1.02.000064	Dokumen hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	T	[1.02.02.1.02.0024] [1.02.02.3.02.0031] [1.02.02.4.02.0031] [1.02.02.2.02.0049] [1.02.02.3.02.0046] [1.02.02.4.02.0046]
49	1.02.000065	Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	T	[1.02.02.1.02.0017] [1.02.02.1.03.0002] [1.02.02.2.02.0020] [1.02.02.2.03.0002]
50	1.02.000066	Dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	0	T	[1.02.02.2.02.0024]

51	1.02.000067	Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen	&Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, juga dikenal sebagai Kit Kesehatan Rumah Tangga atau Rumah Tangga Kit Kesehatan, adalah suatu set alat dan obat-obatan medis dasar yang disediakan dan dijaga di rumah tangga untuk digunakan dalam situasi darurat atau untuk memberikan perawatan kesehatan dasar bagi anggota keluarga. Perusahaan Rumah Tangga, juga dikenal sebagai Usaha Mikro Rumah Tangga (UMRT), adalah jenis usaha mikro yang beroperasi di dalam rumah atau lingkungan sekitar rumah. Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga&		Y	
52	1.02.000068	Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	T	[1.02.04.2.01.0001]
53	1.02.000069	Dokumen hasil Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana		Y	
54	1.02.000070	Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1	T	[1.02.02.2.02.0029]
55	1.02.000071	Dokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	T	[1.02.02.2.04.0004]
56	1.02.000072	Dokumen hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	0	T	[1.02.02.1.02.0026]
57	1.02.000073	Dokumen hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	0	T	[1.02.02.1.02.0020]
58	1.02.000074	Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	T	[1.02.02.1.02.0031] [1.02.02.2.02.0034]
59	1.02.000075	Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1	T	[1.02.02.2.02.0033]
60	1.02.000076	Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	&Operasional Pelayanan Rumah Sakit adalah rangkaian kegiatan dan proses yang dilakukan di dalam rumah sakit untuk menyediakan layanan kesehatan kepada pasien. Hal ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan manajemen dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rumah sakit. Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit&	1	T	[1.02.02.1.02.0022] [1.02.02.2.02.0032]
61	1.02.000077	Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Y	
62	1.02.000079	Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota	17	T	[1.02.02.2.02.0035]
63	1.02.000080	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	17	T	[1.02.02.1.04.0001] [1.02.02.1.04.0003] [1.02.07.3.01.0001] [1.02.07.4.01.0001] [1.02.02.2.04.0001] [1.02.02.2.04.0002] [1.02.02.2.04.0003] [1.02.07.3.01.0002] [1.02.07.4.01.0002]
64	1.02.000081	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bergerak/Gugus Pulau	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bergerak/Gugus Pulau	0	T	[1.02.02.1.01.0006]
65	1.02.000082	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	0	T	[1.02.02.2.04.0002]
66	1.02.000083	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum memiliki/habis masa izin operasional	0	T	[1.02.02.1.04.0001] [1.02.02.2.04.0001]
67	1.02.000084	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belumyang belum dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	0	T	[1.02.02.1.04.0003] [1.02.07.3.01.0002] [1.02.07.4.01.0002] [1.02.02.2.04.0003]
68	1.02.000085	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional	17	T	[1.02.02.1.04.0001] [1.02.02.2.04.0001]
69	1.02.000086	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	0	T	[1.02.02.1.04.0003] [1.02.07.3.01.0002] [1.02.07.4.01.0002] [1.02.02.2.04.0003]
70	1.02.000087	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	0	T	[1.02.02.2.04.0002]
71	1.02.000088	Faskes lainnya	Unit	Jumlah Faskes lainnya	77	T	[1.02.02.1.01.0002] [1.02.02.1.01.0004] [1.02.02.1.01.0008] [1.02.02.2.01.0003] [1.02.02.2.01.0007] [1.02.02.2.01.0010]
72	1.02.000089	Fasyankes yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes eksisting	Unit	Jumlah Fasyankes yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes eksisting	0	T	[1.02.02.1.01.0020] [1.02.02.2.02.0030]
73	1.02.000090	Fasyankes yang melayani melalui telemedicine	Unit	Jumlah Fasyankes yang melayani melalui telemedicine	0	T	[1.02.02.1.01.0020]
74	1.02.000091	Gudang umum	Unit	Jumlah Gudang umum	0	T	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]
75	1.02.000092	Handuk	Paket	Jumlah Handuk	0	T	[1.02.02.1.01.0014] [1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.2.01.0001]
76	1.02.000093	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	1	T	[1.02.04.2.04.0001]
77	1.02.000094	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan	Dokumen	Jumlah dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan	0	T	[1.02.04.2.05.0001]

78	1.02.000095	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Sentra Makanan Jajanan	0	T	[1.02.04.2.05.0001]
79	1.02.000096	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi	Dokumen	Jumalah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi	31	T	[1.02.04.2.03.0001]
80	1.02.000097	Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Dokumen	Jumlah dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	31	T	[1.02.04.2.03.0001]
81	1.02.000098	HCU	Unit	Jumlah HCU	0	T	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
82	1.02.000099	Ibu bersalin	Orang	Jumlah Ibu Bersalin	1911	T	[1.02.02.2.02.0002]
83	1.02.000100	Ibu Hamil	Orang	Jumlah ibu hamil	2242	T	[1.02.02.2.02.0001]
84	1.02.000101	ICCU/ICVCU	Unit	Jumlah ICCU/ICVCU	0	T	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
85	1.02.000102	ICU	Unit	Jumlah ICU	4	T	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
86	1.02.000103	Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Unit	Jumlah Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	232	T	[1.02.04.2.04.0001]
87	1.02.000104	Kamar mandi/WC (perempuan dan laki-laki terpisah)	Unit	Jumlah Kamar mandi/WC (perempuan dan laki-laki terpisah)	2	T	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]
88	1.02.000105	Kegiatan Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Kuantitas	Jumlah Kegiatan Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	0	T	[1.02.05.1.01.0001] [1.02.03.3.08.0001] [1.02.03.4.08.0001]
89	1.02.000106	kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	Jumlah kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat	1	T	[1.02.05.2.01.0001]
90	1.02.000107	kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi paya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	Jumlah kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi paya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	T	[1.02.05.2.03.0001]
91	1.02.000108	kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	Jumlah kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0	T	[1.02.05.2.02.0001]
92	1.02.000109	Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	Keluarga	Jumlah Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	0	T	[1.02.02.1.02.0030]
93	1.02.000110	keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga	Keluarga	Jumlah keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga	0	T	[1.02.02.1.02.0030] [1.02.02.2.01.0024]
94	1.02.000111	Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	Jumlah Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	0	T	[1.02.02.2.02.0036]
95	1.02.000112	layanan kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK):	Layanan	Jumlah layanan kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)	0	T	[1.02.02.1.01.0006] [1.02.02.3.01.0042] [1.02.02.3.02.0048] [1.02.02.4.02.0048]
96	1.02.000113	NICU	Unit	Jumlah NICU	1	T	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
97	1.02.000114	obat dan vaksin yang disediakan	Paket	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	1	T	[1.02.02.1.01.0022] [1.02.02.2.01.0023]
98	1.02.000115	obat. Vaksin, makanan dan minuman serta faskes lainnya yang disediakan	Paket	Jumlah obat. Vaksin, makanan dan minuman serta faskes lainnya yang disediakan	1	T	[1.02.02.1.01.0027]
99	1.02.000116	Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Orang	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	0	T	[1.02.02.2.02.0021]
100	1.02.000117	Orang kecanduan NAPZA	Orang	Jumlah Orang kecanduan NAPZA	0	T	[1.02.02.1.02.0014]
101	1.02.000118	orang terduga menderita HIV	Orang	Jumlah orang terduga menderita HIV	2645	T	[1.02.02.2.02.0012]
102	1.02.000119	orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	Orang	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	3346	T	[1.02.02.1.02.0033] [1.02.02.2.02.0011] [1.02.02.2.02.0040]
103	1.02.000120	orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	Jumlah orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	212	T	[1.02.02.2.02.0010]
104	1.02.000121	Orang yang menerima layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA	Orang	Jumlah Orang yang menerima layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA	0	T	[1.02.02.2.02.0027]
105	1.02.000122	Organisasi masyarakat bidang kesehatan	Organisasi Masyarakat	Jumlah Organisasi masyarakat bidang kesehatan	0	T	[1.02.05.1.01.0001]
106	1.02.000123	Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB	Paket	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB	0	T	[1.02.02.1.02.0025]
107	1.02.000140	Pengolahan Limbah	Unit	Jumlah Pengolahan Limbah	1	T	[1.02.02.1.01.0002] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.1.01.0004] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0003] [1.02.02.2.01.0022] [1.02.02.2.01.0007] [1.03.02.1.01.0077] [1.03.02.1.01.0096] [1.03.02.1.01.0082] [1.02.02.2.02.0006] [1.02.03.2.01.0001] [1.02.02.1.01.0001]
108	1.02.000141	penyalahguna NAPZA	Orang	Jumlah penyalahguna NAPZA	0	T	[1.02.02.2.02.0022]
109	1.02.000142	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	kualtitas	Jumlah Penyelenggara Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0	T	[1.02.05.1.02.0001]
110	1.02.000143	Peralatan di laundry	Unit	Jumlah alat di laundry		Y	[1.02.02.1.01.0010]
111	1.02.000144	Peralatan di ruang CSSD	Unit	Jumlah Peralatan di ruang CSSD		Y	[1.02.02.1.01.0010]
112	1.02.000145	Peralatan di ruang dapur/gizi	Unit	Jumlah Peralatan di ruang dapur/gizi		Y	[1.02.02.1.01.0010]
113	1.02.000146	Peralatan di ruang farmasi	Unit	Jumlah Peralatan di ruang farmasi	0	T	[1.02.02.1.01.0010]

114	1.02.000147	Peralatan di ruang gawat darurat	Unit	Jumlah Peralatan di ruang gawat darurat	0	T	[1.02.02.1.01.0010]
115	1.02.000148	Peralatan di ruang intensif	Unit	Jumlah Peralatan di ruang intensif		Y	[1.02.02.1.01.0010]
116	1.02.000149	Peralatan di ruang kantor dan adminstrasi	Unit	Jumlah Peralatan di ruang kantor dan adminstrasi	0	T	[1.02.02.1.01.0010]
117	1.02.000150	Peralatan di ruang Laboratorium	Unit	Jumlah Peralatan di ruang Laboratorium	0	T	[1.02.02.1.01.0010]
118	1.02.000151	Peralatan di ruang operasi	Unit	Jumlah Peralatan di ruang operasi		Y	[1.02.02.1.01.0010]
119	1.02.000152	Peralatan di ruang radiologi	Unit	&Ruang Radiologi adalah area khusus di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya yang didedikasikan untuk pemeriksaan dan pengambilan gambar medis menggunakan teknologi radiologi. Jumlah Peralatan di ruang radiologi&		Y	[1.02.02.1.01.0010]
120	1.02.000153	Peralatan di ruang rawat inap (tempat tidur, dll)	Unit	Jumlah Peralatan di ruang rawat inap (tempat tidur, dll)		Y	[1.02.02.1.01.0010]
121	1.02.000154	Peralatan di ruang rekam medik	Unit	Jumlah Peralatan di ruang rekam medik		Y	[1.02.02.1.01.0010]
122	1.02.000155	Peralatan penanggulangan kebakaran	Unit	Jumlah Peralatan penanggulangan kebakaran		Y	[1.02.02.1.01.0010]
123	1.02.000156	Peralatan pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi	Unit	Jumlah Peralatan pengelolaan air bersih, limbah dan sanitasi		Y	[1.02.02.1.01.0010]
124	1.02.000157	Perizinan Industri Rumah Tangga	Unit	Jumlah perizinan Industri Rumah Tangga		Y	
125	1.02.000158	PICU	Unit	Jumlah PICU	1	T	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
126	1.02.000159	Prasarana di Fasyankes	Unit	jumlah Prasarana di Fasyankes		Y	
127	1.02.000160	Prasarana Fasyankes	Unit	Jumlah Prasarana Fasyankes		Y	
128	1.02.000161	Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar	Unit	Jumlah Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar	0	T	[1.02.04.2.06.0001]
129	1.02.000162	Public Safety Center (PSC 119)	Unit	Jumlah Public Safety Center (PSC 119)	1	T	[1.02.02.1.02.0023] [1.02.02.2.02.0038]
130	1.02.000164	Puskesmas	Unit	Jumlah Puskesmas	15	T	[1.02.02.3.01.0041] [1.02.02.3.02.0032] [1.02.02.4.01.0041] [1.02.02.4.02.0032] [1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006] [1.02.02.2.01.0009] [1.02.02.3.02.0044] [1.02.02.4.02.0044] [1.02.02.2.02.0058]
131	1.02.000165	RICU	Unit	Jumlah RICU	0	T	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
132	1.02.000166	Ruang administrasi	Unit	Jumlah Ruang administrasi	17	T	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]
133	1.02.000167	Ruang Administrasi dan Manajemen	Unit	Jumlah Ruang Administrasi dan Manajemen	17	T	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0002] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.1.01.0004] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0003] [1.02.02.2.01.0022] [1.02.02.2.01.0007]
134	1.02.000168	Ruang ASI	Unit	Jumlah Ruang ASI	0	T	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]
135	1.02.000169	Ruang Bank Darah Rumah Sakit	Unit	Jumlah Ruang Bank Darah Rumah Sakit	1	T	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
136	1.02.000170	Ruang cuci linen	Unit	Jumlah Ruang cuci linen	0	T	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]
137	1.02.000171	Ruang dinas Nakes	Unit	Jumlah Ruang dinas Nakes	0	T	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]
138	1.02.000172	Ruang Farmasi	Unit	Jumlah Ruang Farmasi	17	T	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0022] [1.02.02.2.01.0006]
139	1.02.000173	Ruang Gawat Darurat	Unit	Jumlah Ruang Gawat Darurat	17	T	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.1.01.0006] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
140	1.02.000174	Ruang Gizi	Unit	Jumlah Ruang Gizi	1	T	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
141	1.02.000175	Ruang jaga petugas	Unit	Jumlah Ruang jaga petugas	0	T	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]
142	1.02.000176	Ruang Jenazah	Unit	Jumlah Ruang Jenazah	1	T	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
143	1.02.000177	Ruang kantor untuk karyawan	Unit	Jumlah Ruang kantor untuk karyawan	15	T	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]
144	1.02.000178	Ruang Kepala Puskersmas	Unit	Jumlah Ruang Kepala Puskersmas	15	T	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]
145	1.02.000179	Ruang kesehatan anak dan iminisasi	Unit	Jumlah Ruang kesehatan anak dan iminisasi	15	T	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]
146	1.02.000180	Ruang kesehatan gigi dan mulut	Unit	Jumlah Ruang kesehatan gigi dan mulut	15	T	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]
147	1.02.000181	Ruang kesesuhatan ibu dan KB	Unit	Jumlah Ruang kesehatan ibu dan KB	15	T	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]
148	1.02.000182	Ruang KIE	Unit	Jumlah Ruang KIE	0	T	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]
149	1.02.000183	Ruang Laboraturium	Unit	Jumlah Ruang Laboraturium	1	T	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0022] [1.02.02.2.01.0006]
150	1.02.000184	Ruang Loundry	Unit	Jumlah Ruang Loundry	1	T	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0002] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.1.01.0004] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0003] [1.02.02.2.01.0022] [1.02.02.2.01.0007]
151	1.02.000185	Ruang Operasi	Unit	Jumlah Ruang Operasi	4	T	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
152	1.02.000186	Ruang Parkir	Unit	Jumlah Ruang Parkir	1	T	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0002] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.1.01.0004] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0003] [1.02.02.2.01.0022] [1.02.02.2.01.0007]
153	1.02.000187	Ruang Pemeliharaan Sarpras	Unit	Jumlah Ruang Pemeliharaan Sarpras	1	T	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0002] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.1.01.0004] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0003] [1.02.02.2.01.0022] [1.02.02.2.01.0007]

154	1.02.000188	Ruang pemeriksanaan khusus	Unit	Jumlah Ruang pemeriksanaan khusus	0	T	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]
155	1.02.000189	Ruang pemeriksanaan umum	Unit	Jumlah Ruang pemeriksanaan umum	0	T	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]
156	1.02.000190	Ruang Penaggulangan Kebakaran	Unit	Jumlah Ruang Penaggulangan Kebakaran	0	T	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
157	1.02.000191	Ruang pendaftaran dan rekam medik	Unit	Jumlah Ruang pendaftaran dan rekam medik	17	T	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]
158	1.02.000192	Ruang Pengelolaan Gas Medik	Unit	Jumlah Ruang Pengelolaan Gas Medik	0	T	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
159	1.02.000193	Ruang Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sanitas	Unit	Jumlah Ruang Pengolahan Air Bersih, Limbah dan Sanitas	1	T	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
160	1.02.000194	Ruang penyelenggaraan makanan (dapur/pantry)	Unit	Jumlah Ruang penyelenggaraan makanan (dapur/pantry)	0	T	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]
161	1.02.000195	Ruang persalinan	Unit	Jumlah Ruang persalinan	17	T	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]
162	1.02.000196	Ruang Radiologi	Unit	Jumlah Ruang Radiologi	1	T	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
163	1.02.000197	Ruang rapat/diskusi	Unit	Jumlah Ruang rapat/diskusi	0	T	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]
164	1.02.000198	Ruang Rawat Inap	Unit	Jumlah Ruang Rawat Inap	65	T	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0022] [1.02.02.2.01.0006]
165	1.02.000199	Ruang Rawat Intentif:	Unit	Jumlah Ruang Rawat Intentif	0	T	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
166	1.02.000200	Ruang Rawat Jalan	Unit	Jumlah Ruang Rawat Jalan	12	T	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.1.01.0006] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
167	1.02.000201	Ruang rawat pascaa persalinan	Unit	Jumlah Ruang rawat pascaa persalinan	17	T	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]
168	1.02.000202	Ruang Rehabilitasi Medik	Unit	Jumlah Ruang Rehabilitasi Medik	1	T	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
169	1.02.000203	Ruang Rekam Medis	Unit	Jumlah Ruang Rekam Medis	1	T	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.1.01.0006] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
170	1.02.000204	Ruang Sterilisasi	Unit	Jumlah Ruang Sterilisasi	1	T	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0002] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.1.01.0004] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0003] [1.02.02.2.01.0022] [1.02.02.2.01.0006] [1.02.02.2.01.0007]
171	1.02.000205	Ruang tindakan dan gawat daerurat	Unit	Jumlah Ruang tindakan dan gawat darurat	17	T	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]
172	1.02.000206	Ruang tunggu	Unit	Jumlah Ruang tunggu	17	T	[1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006]
173	1.02.000207	Rumah dinas Nakes	Unit	Jumlah Rumah dinas Nakes	6	T	[1.02.02.2.01.0004] [1.02.02.2.01.0011]
174	1.02.000208	Rumah Sakit	Unit	Jumlah Rumah sakit kelas A	0	T	[1.02.02.1.01.0009] [1.02.02.2.01.0008]
175	1.02.000209	Rumah Sakit kelas B	Unit	Jumlah Rumah Sakit kelas B		Y	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.1.04.0001] [1.02.02.1.04.0002]
176	1.02.000210	Rumah Sakit Kelas B yang memiliki izin operasional	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas B yang memiliki izin operasional		Y	[1.02.02.1.04.0001]
177	1.02.000211	Rumah Sakit Kelas B yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas B yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya		Y	[1.02.02.1.04.0002]
178	1.02.000212	Rumah Sakit Kelas B yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas B yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya		Y	[1.02.02.1.04.0002]
179	1.02.000213	Rumah Sakit Kelas B yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas B yang belum memiliki/habis masa izin operasional		Y	[1.02.02.1.04.0001]
180	1.02.000214	Rumah Sakit kelas C	Unit	Jumlah Rumah Sakit kelas C	1	T	[1.02.02.2.01.0022]
181	1.02.000215	Rumah Sakit Kelas C dan D	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D	2	T	[1.02.02.2.04.0001] [1.02.02.2.04.0002]
182	1.02.000216	Rumah Sakit Kelas C dan D yang memiliki izin operasional	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D yang memiliki izin operasional	2	T	[1.02.02.2.04.0001]
183	1.02.000217	Rumah Sakit Kelas C dan D yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	2	T	[1.02.02.2.04.0002]
184	1.02.000218	Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	0	T	[1.02.02.2.04.0002]
185	1.02.000219	Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum memiliki/habis masa izin operasioanal	Unit	Jumlah Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum memiliki/habis masa izin operasional	0	T	[1.02.02.2.04.0001]
186	1.02.000220	Rumah Sakit kelas D	Unit	Jumlah Rumah Sakit kelas D	1	T	[1.02.02.2.01.0022]
187	1.02.000221	Sarana di Fasyankes	Unit	Jumlah Sarana di Fasyankes	0	T	[1.02.02.1.01.0012] [1.02.02.1.01.0018] [1.02.02.2.01.0012] [1.02.02.2.01.0018]
188	1.02.000222	sarana Fasyankes	Unit	Jumlah sarana Fasyankes		Y	
189	1.02.000223	Sarana Fasyankes eksisting	Unit	Jumlah Sarana Fasyankes eksisting		Y	
190	1.02.000224	sarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar	Unit	Jumlah sarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar	0	T	[1.02.04.2.06.0001]
191	1.02.000225	Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan	Paket	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan	0	T	[1.02.02.2.02.0028]
192	1.02.000226	Sprei	Paket	Jumlah Sprei		Y	
193	1.02.000227	Telemedicine	Unit	Jumlah Telemedicine	0	T	[1.02.02.1.01.0020] [1.02.02.2.01.0025]
194	1.02.000228	Tempat tidur rumah sakit	Unit	Jumlah Tempat tidur rumah sakit	134	T	[1.02.02.1.01.0001] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0022]
195	1.02.000229	Tenaga Apotek	Orang	Jumlah Tenaga Apotek	40	T	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]

196	1.02.000230	Tenaga gizi	Orang	Jumlah Tenaga gizi	39	T	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.3.02.0005] [1.02.03.4.02.0005] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001] [1.02.03.3.03.0002] [1.02.03.4.03.0002]
197	1.02.000231	Tenaga Kebidanan	Orang	Jumlah Tenaga Kebidanan	719	T	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
198	1.02.000232	Tenaga Kebidanan yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	Jumlah Tenaga Kebidanan yang ditingkatkan kompetensinya	0	T	[1.02.03.1.02.0001]
199	1.02.000233	Tenaga Keperawatan	Orang	&Tenaga Keperawatan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan para profesional perawat yang berperan dalam memberikan perawatan kesehatan langsung kepada pasien di berbagai setting, seperti rumah sakit, klinik, fasilitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan kesehatan di masyarakat. Jumlah Tenaga Keperawatan&	619	T	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
200	1.02.000234	Tenaga Keperawatan yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	&Tenaga Keperawatan yang ditingkatkan kompetensinya disebut &&Perawat Spesialis&&. Perawat Spesialis adalah perawat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam bidang tertentu dalam praktik keperawatan. Mereka telah menyelesaikan pendidikan tambahan dan pelatihan khusus dalam bidang tertentu untuk memperoleh pengetahuan mendalam dan kemampuan khusus dalam merawat pasien dengan kondisi kesehatan tertentu. Jumlah Tenaga Keperawatan yang ditingkatkan kompetensinya&		Y	[1.02.03.1.02.0001]
201	1.02.000235	Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	&Tenaga Kesehatan Lainnya adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada berbagai jenis profesional kesehatan selain perawat dan dokter yang berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Seperti: Ahli Gizi, Farmasis, Fisioterapis, Ahli terapi Okupasi, Tenaga Medis Laboratorium, Asisten Medis, Radiografer, Teknisi Gigi, Ahli Optometri, Tenaga Kesehatan masyarakat dan lainnya. Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya&	0	T	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
202	1.02.000236	Tenaga Kesehatan lainnya yang ditingkatkan kompetensinya	Orang	&Tenaga Kesehatan lainnya yang ditingkatkan kompetensinya dapat mencakup berbagai profesional kesehatan yang telah mengambil pendidikan dan pelatihan tambahan dalam bidang spesifik untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Seperti: Perawat Spesialis, Farmasis Klinis, Ahli Gizi Klinis, Ahli Terapi Okupasi Spesialis, Perawat Anestesi, Perawat Pendidik Lanjutan, dan Spesialis Kesehatan Masyarakat Jumlah Tenaga Kesehatan lainnya yang ditingkatkan kompetensinya&	0	T	[1.02.03.1.02.0001]
203	1.02.000237	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Orang	&Tenaga Kesehatan Lingkungan adalah profesional kesehatan yang berfokus pada pemahaman dan penanganan isu-isu kesehatan yang terkait dengan lingkungan fisik di mana manusia tinggal dan bekerja. Tugas utama Tenaga Kesehatan Lingkungan adalah memastikan kualitas lingkungan yang sehat dan aman bagi masyarakat serta mencegah penyakit dan masalah kesehatan yang terkait dengan faktor lingkungan. Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan&	48	T	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
204	1.02.000238	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	&Tenaga Kesehatan Masyarakat (TKM) adalah profesional kesehatan yang berfokus pada upaya pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Tugas utama Tenaga Kesehatan Masyarakat adalah menerapkan strategi dan program kesehatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah kesehatan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat&	124	T	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
205	1.02.000239	Tenaga Kesehatan tradisional	Orang	&Tenaga Kesehatan Tradisional (TKT) adalah praktisi kesehatan yang mengandalkan metode dan pengetahuan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi, biasanya berakar dalam budaya dan tradisi suatu masyarakat tertentu. Jumlah Tenaga Kesehatan tradisional&	0	T	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]

206	1.02.000240	Tenaga Keteknisan Medis	Orang	&Tenaga Keteknisan Medis adalah profesional kesehatan yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas teknis dan prosedural dalam pelayanan kesehatan. Nakes ini membantu dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya dalam melakukan diagnosis, perawatan, dan penanganan pasien. Jumlah Tenaga Keteknisan Medis&	35	T	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
207	1.02.000241	Tenaga keterapian fisik	Orang	&Tenaga Keterapian Fisik adalah profesional kesehatan yang mengkhususkan diri dalam memberikan terapi fisik untuk memulihkan atau meningkatkan fungsi fisik, mobilitas, dan kebugaran pasien yang mengalami cedera, kelainan fisik, atau kondisi medis tertentu. Jumlah Tenaga keterapian fisik&	8	T	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
208	1.02.000242	Tenaga Teknik Biomedika	Orang	&Tenaga Teknik Biomedika adalah profesional kesehatan yang bertanggung jawab untuk memelihara, mengkalibrasi, menguji, dan memperbaiki peralatan medis dan alat kesehatan yang digunakan dalam berbagai fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, laboratorium medis, dan pusat perawatan kesehatan lainnya. Tugas utama mereka adalah memastikan bahwa peralatan medis berfungsi dengan baik, akurat, dan aman untuk digunakan dalam diagnosis, perawatan, dan pemantauan pasien. Jumlah Tenaga Teknik Biomedika&	12	T	[1.02.03.1.01.0001] [1.02.03.1.01.0002] [1.02.03.1.02.0002] [1.02.03.2.02.0001] [1.02.03.2.02.0002] [1.02.03.2.02.0003] [1.02.03.2.03.0001]
209	1.02.000243	Unit pemeliharaan Fasilitas kesehatan regional (RMC)	Unit	Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional (RMC) adalah bagian dari suatu organisasi atau sistem pelayanan kesehatan regional yang bertanggung jawab untuk memelihara dan merawat infrastruktur serta fasilitas kesehatan di wilayah tertentu. RMC biasanya terdapat dalam rumah sakit atau kompleks kesehatan regional yang mencakup berbagai fasilitas, seperti gedung, peralatan medis, sistem utilitas (seperti listrik, air, dan pendingin), dan sistem	0	T	[1.02.02.1.01.0007]
210	1.02.000244	Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana	Usaha Kecil Obat Tradisional adalah bentuk usaha mikro dalam bidang pengobatan tradisional yang menghasilkan, mengolah, dan memasarkan obat-obatan atau produk kesehatan berbasis tradisional	0	T	[1.02.04.1.02.0001]
211	1.02.000245	Usaha Kecil Obat Tradisional Yang belum Memiliki Izin/habis Masa Izinnya	Sarana	&Usaha Kecil Obat Tradisional adalah bentuk usaha mikro dalam bidang pengobatan tradisional yang menghasilkan, mengolah, dan memasarkan obat-obatan atau produk kesehatan berbasis tradisional. Usaha Kecil Obat Tradisional yang belum memiliki izin atau habis masa izinnya berarti bahwa usaha tersebut belum mendapatkan izin resmi dari otoritas kesehatan atau izin yang dimiliki telah kadaluarsa dan perlu diperbaharui. &	0	T	[1.02.04.1.02.0001]
212	1.02.000246	Usaha Kecil Obat Tradisional Yang Memiliki Izin	Sarana	&Usaha Kecil Obat Tradisional adalah bentuk usaha mikro dalam bidang pengobatan tradisional yang menghasilkan, mengolah, dan memasarkan obat-obatan atau produk kesehatan berbasis tradisional. Usaha Kecil Obat Tradisional yang memiliki izin berarti bahwa usaha tersebut telah mendapatkan izin resmi dari otoritas kesehatan setempat untuk memproduksi, mengolah, dan memasarkan produk obat tradisional. &	0	T	[1.02.04.1.02.0001]
213	1.02.000257	Parkir kendaraan roda 2 dan 4 serta garasi untuk ambulan dan Puskesmas Keliling	Unit	Jumlah Parkir kendaraan roda 2 dan 4 serta garasi untuk ambulan dan Puskesmas Keliling	17	T	
214	1.02.000258	Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang	Sarana	Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah perusahaan atau entitas yang berperan sebagai distributor utama dalam rantai distribusi obat dan produk farmasi. Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang	0	T	[1.02.04.1.01.0001] [1.03.02.1.02.0004] [1.03.02.1.02.0010] [1.03.02.1.02.0016] [1.03.02.1.02.0023] [1.02.02.2.01.0002] [1.02.02.2.01.0006] [1.03.02.2.02.0004] [1.03.02.2.02.0010] [1.03.02.2.02.0016] [1.03.02.2.02.0023]
215	1.02.000259	Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang belum Memiliki Izin/habis Masa Izinnya	Sarana	Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang belum Memiliki Izin/habis Masa Izinnya		Y	
216	1.02.000260	Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memiliki Izin	Sarana	Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memiliki Izin		Y	

217	1.02.000261	Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine	Layanan	Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine adalah bentuk layanan kesehatan yang menggunakan teknologi telekomunikasi dan informasi, seperti telepon, video conference, atau aplikasi komunikasi online, untuk memberikan konsultasi, diagnosis, dan perawatan jarak jauh kepada pasien. Dalam model telemedicine, pasien dan tenaga kesehatan tidak harus bertemu fisik secara langsung, namun mereka dapat berkomunikasi dan berinteraksi melalui teknologi komunikasi yang telah ada. Jumlah Pelayanan Kesehatan Berbasis	0	T	[1.02.02.1.01.0006] [1.02.02.1.02.0010] [1.02.04.1.01.0001] [1.03.02.1.02.0005] [1.03.02.1.02.0011] [1.03.02.1.02.0017] [1.03.02.1.02.0024] [1.02.02.2.02.0008] [1.02.02.2.02.0009] [1.02.02.2.02.0026] [1.02.03.2.01.0002] [1.03.02.2.02.0005] [1.03.02.2.02.0011] [1.03.02.2.02.0017] [1.03.02.2.02.0024]
218	1.02.000262	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Orang	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Y	
219	1.02.000263	Penderita Diabetes Melitus	Orang	Jumlah Penderita Diabetes Melitus	1449	T	
220	1.02.000264	Penderita Hipertensi	Orang	Jumlah Penderita Hipertensi	20158	T	
221	1.02.000265	penduduk mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	Dokumen laporan penduduk mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	T	[1.02.02.1.02.0016] [1.02.02.2.02.0026]
222	1.02.000266	Penduduk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Orang	Jumlah Penduduk mendapatkan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0	T	[1.02.02.1.02.0010] [1.02.02.2.02.0019]
223	1.02.000267	Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB	Orang	Penduduk terdampak dan berisiko pada kondisi KLB (Kejadian Luar Biasa) adalah mereka yang terkena dampak langsung atau memiliki risiko tinggi terkena penyakit atau kondisi kesehatan yang menjadi KLB. KLB adalah situasi di mana suatu penyakit menyebar dengan cepat dan meluas di wilayah tertentu atau populasi tertentu melebihi angka yang diharapkan. Jumlah Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB	0	T	[1.02.02.1.02.0002] [1.02.02.2.02.0013]
224	1.02.000268	Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berPotensi bencana	Orang	Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah mereka yang mengalami dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka sebagai akibat dari bencana alam atau situasi darurat lainnya. Krisis kesehatan akibat bencana dapat melibatkan berbagai jenis bencana, seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, kekeringan, badai), bencana teknologi (kecelakaan industri, kebocoran nuklir), pandemi penyakit, atau krisis kesehatan lainnya. Jumlah Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berPotensi bencana	0	T	[1.02.02.1.02.0001] [1.03.02.1.01.0081] [1.03.02.1.01.0097] [1.03.02.1.01.0098] [1.03.02.1.01.0099] [1.02.02.2.02.0007] [1.02.02.2.02.0014] [1.03.02.2.01.0081] [1.03.02.2.01.0099] [1.03.02.2.01.0113] [1.03.02.2.01.0122]
225	1.02.000269	Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Orang	Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah mereka yang mengalami dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka sebagai akibat dari bencana alam atau situasi darurat lainnya. Krisis kesehatan akibat bencana dapat melibatkan berbagai jenis bencana, seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, kekeringan, badai), bencana teknologi (kecelakaan industri, kebocoran nuklir), pandemi penyakit, atau krisis kesehatan lainnya. Jumlah Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	0	T	[1.02.02.1.02.0001] [1.03.02.1.01.0081] [1.03.02.1.01.0097] [1.03.02.1.01.0098] [1.03.02.1.01.0099] [1.02.02.2.02.0007] [1.02.02.2.02.0014] [1.03.02.2.01.0081] [1.03.02.2.01.0099] [1.03.02.2.01.0113] [1.03.02.2.01.0122]
226	1.02.000270	Penduduk Usia Lanjut	Orang	Jumlah Penduduk Usia Lanjut	18463	T	
227	1.02.000271	Penduduk Usia Produktif	Orang	Jumlah Penduduk Usia Produktif	70346	T	
228	1.02.000272	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Orang	Jumlah Tenaga Kesehatan yang memiliki izin Praktik	0	T	[1.02.03.2.01.0001]
229	1.02.000273	Pengolahan Limbah	Unit	Jumlah Pengolahan Limbah	1	T	[1.02.02.2.01.0022] [1.02.02.1.01.0026] [1.02.02.2.01.0001] [1.02.02.2.01.0003] [1.02.02.2.01.0007] [1.02.02.1.01.0002] [1.02.02.1.01.0004] [1.03.02.1.01.0077] [1.03.02.1.01.0096] [1.03.02.1.01.0082] [1.02.02.2.02.0006] [1.02.03.2.01.0001] [1.02.02.1.01.0001]
230	1.02.000274	Jumlah Unit Pemeliharaan Regional / RMC	Unit	Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional (RMC) adalah bagian dari suatu organisasi atau sistem pelayanan kesehatan regional yang bertanggung jawab untuk memelihara dan merawat infrastruktur serta fasilitas kesehatan di wilayah tertentu. RMC biasanya terdapat dalam rumah sakit atau kompleks kesehatan regional yang mencakup berbagai fasilitas, seperti gedung, peralatan medis, sistem utilitas (seperti listrik, air, dan pendingin), dan sistem	0	T	[1.02.02.1.01.0024]

231	1.02.000275	Alat Kesehatan	Unit	Alat kesehatan	1	T	[1.02.02.1.01.0025] [1.02.02.2.01.0020] [1.02.02.2.01.0021] [1.02.02.2.01.0026]
232	1.02.000276	Labkesda	Unit	Labkesda adalah unit laboratorium di tingkat daerah atau regional yang bertanggung jawab untuk melakukan berbagai jenis uji laboratorium terkait dengan kesehatan masyarakat. Tugas utama Labkesda melibatkan pengujian sampel kesehatan, diagnosis penyakit, dan pemantauan kesehatan lingkungan di wilayah tertentu. Fungsi Labkesda melibatkan pemeriksaan berbagai parameter, seperti tes darah, urin,	1	T	[1.02.02.3.02.0034] [1.02.02.4.02.0034] [1.02.02.3.02.0047] [1.02.02.4.02.0047]
233	1.02.000277	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	Lapiran Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0	T	[1.02.02.3.02.0036] [1.02.02.4.02.0036] [1.02.02.3.02.0048] [1.02.02.4.02.0048]
234	1.02.000278	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	Laporan Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Y	[1.02.02.3.02.0039] [1.02.02.4.02.0039]
235	1.02.000279	Kasus penyakit menular dan tidak menular	Kasus	Jumlah Kasus penyakit menular dan tidak menular	744	T	[1.02.02.3.02.0045] [1.02.02.4.02.0045] [1.02.02.2.02.0056] [1.02.02.2.02.0051] [1.02.02.2.02.0057] [1.02.02.1.02.0040] [1.02.02.1.02.0032] [1.02.02.1.02.0038]
236	1.02.000280	Kasus Penyakit IMS	Kasus	Jumlah Kasus Penyakit IMS	70	T	[1.02.02.3.02.0050] [1.02.02.4.02.0050] [1.02.02.3.02.0062] [1.02.02.4.02.0062]
237	1.02.000281	Kasus Penyakit Campak	Kasus	Jumlah Kasus Penyakit Campak	0	T	[1.02.02.3.02.0052] [1.02.02.4.02.0052]
238	1.02.000283	Kasus Penyakit Kusta	Kasus	Kasus Penyakit Kusta	8	T	[1.02.02.3.02.0053] [1.02.02.3.02.0064] [1.02.02.4.02.0053] [1.02.02.4.02.0064]
239	1.02.000286	Kasus Penyakit Filariasis	Kasus	Jumlah Kasus Penyakit Filariasis	0	T	[1.02.02.3.02.0054] [1.02.02.3.02.0065] [1.02.02.4.02.0054] [1.02.02.4.02.0065] [1.02.02.4.02.0071]
240	1.02.000287	Kasus Penyakit Kecacingan	Kasus	Jumlah Kasus Penyakit Kecacingan	0	T	[1.02.02.3.02.0055] [1.02.02.4.02.0055] [1.02.02.3.02.0066] [1.02.02.4.02.0066]
241	1.02.000288	Kasus Penyakit Frambusia	Kasus	Jumlah Kasus Penyakit Frambusia	0	T	[1.02.02.3.02.0056] [1.02.02.3.02.0067] [1.02.02.4.02.0056] [1.02.02.4.02.0067]
242	1.02.000291	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	Laporan Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1	T	[1.02.02.3.02.0044] [1.02.02.3.02.0055] [1.02.02.4.02.0044] [1.02.02.4.02.0055] [1.02.02.3.02.0057] [1.02.02.3.02.0068] [1.02.02.4.02.0057] [1.02.02.4.02.0068] [1.02.02.1.02.0042]
243	1.02.000292	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	Laporan Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	0	T	[1.02.02.3.02.0045] [1.02.02.3.02.0056] [1.02.02.4.02.0045] [1.02.02.4.02.0056] [1.02.02.3.02.0058] [1.02.02.4.02.0058]
244	1.02.000293	Dokumen kebijakan/regulasi yang disusun	Dokumen	Jumlah Dokumen kebijakan/regulasi yang disusun	0	T	[1.02.02.3.02.0046] [1.02.02.4.02.0046] [1.02.02.4.02.0058] [1.02.02.3.02.0059] [1.02.02.4.02.0059]
245	1.02.000294	Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar	Dokumen	Laporan Hasil Penanggulangan Penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar	0	T	[1.02.02.3.02.0057] [1.02.02.4.02.0057] [1.02.02.3.02.0069] [1.02.02.4.02.0069]
246	1.02.000295	Laporan hasil advokasi pencapaian SPM Kesehatan	Laporan	Jumlah Laporan hasil advokasi pencapaian SPM Kesehatan	1	T	[1.02.02.3.02.0060] [1.02.02.4.02.0060]
247	1.02.000296	Perizinan yang diterbitkan	Dokumen	Jumlah Perizinan yang diterbitkan	0	T	[1.02.02.3.02.0061] [1.02.02.4.02.0061]
248	1.02.000297	Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonathal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan yang dibina dan dikembangkan	Unit	Jumlah Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonathal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan yang dibina dan dikembangkan	1	T	[1.02.02.4.02.0070] [1.02.02.3.02.0070]
249	1.02.000302	Tenaga pengajar ilmu kesehatan	Orang	Jumlah tenaga pengajar ilmu kesehatan	0	T	[1.02.03.3.02.0008] [1.02.03.4.02.0008] [1.02.03.3.03.0003] [1.02.03.4.03.0003]
250	1.02.000305	Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	T	[1.02.02.1.03.0002] [1.02.03.3.02.0011] [1.02.03.4.02.0011] [1.02.02.2.03.0002]
251	1.02.000307	Tenaga kesehatan yang mendapat jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Orang	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	0	T	[1.02.03.3.04.0001] [1.02.03.4.04.0001] [1.02.03.3.04.0001] [1.02.03.4.04.0001]
252	1.02.000308	Tenaga kesehatan yang terjamin keselamatannya	Orang	Jumlah tenaga kesehatan yang terjamin keselamatannya	0	T	[1.02.03.3.05.0001] [1.02.03.4.05.0001] [1.02.03.3.05.0001] [1.02.03.4.05.0001]
253	1.02.000311	Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	Unit	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	0	T	[1.02.07.3.01.0003] [1.02.07.4.01.0003] [1.02.07.3.01.0003] [1.02.07.4.01.0003]
254	1.02.000312	Dokumen Hasil pembinaan dan dukungan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi puskesmas dan rumah sakit	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil pembinaan dan dukungan sumber daya yangdibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasipuskesmas dan rumah sakit	0	T	[1.02.07.3.01.0001] [1.02.07.4.01.0001]
255	1.02.000313	Fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota yang terakreditasi	Unit	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota yang terakreditasi	0	T	[1.02.07.3.02.0001] [1.02.07.4.02.0001]
256	1.02.000317	Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	Keluarga	Jumlah keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	0	T	[1.02.02.2.01.0024]
257	1.02.000319	penderita Tuberkulosis	Orang	Jumlah orang dengan Tuberkulosis	3346	T	[1.02.02.2.02.0040] [1.02.02.1.02.0033]
258	1.02.000320	penderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	Jumlah penderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	3094	T	[1.02.02.2.02.0040] [1.02.02.1.02.0033]
259	1.02.000321	Penderita HIV (ODHIV)	Orang	Jumlah Penderita HIV (ODHIV)	2645	T	[1.02.02.2.02.0041] [1.02.02.1.02.0037]
260	1.02.000322	Penderita HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Orang	Jumlah Penderita HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	2284	T	[1.02.02.2.02.0041] [1.02.02.1.02.0037]
261	1.02.000323	Orang berisiko terjangkit Malaria	Orang	Jumlah Orang berisiko terjangkit Malaria	0	T	[1.02.02.2.02.0042]
262	1.02.000324	Orang terjangkit (penderita) Malaria	Orang	Jumlah Orang terjangkit (penderita) Malaria	12	T	[1.02.02.2.02.0042] [1.02.02.1.02.0041] [1.02.02.1.02.0034]
263	1.02.000325	Dokumen Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan dan pemeliharaan kesehatan reproduksi	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan dan pemeliharaan kesehatan reproduksi	0	T	[1.02.02.2.02.0044]

264	1.02.000326	Dokumen Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan upaya kesehatan anak	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan upaya kesehatan anak	0	T	[1.02.02.2.02.0046]
265	1.02.000327	Dokumen fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pelayanan kelaniutusiaan	Dokumen	Jumlah Dokumen fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pelayanan kelaniutusiaan	0	T	[1.02.02.2.02.0047]
266	1.02.000328	Sarana Air Minum Komunal	Sarana	Jumlah Sarana Air Minum Komunal	0	T	[1.02.05.2.01.0002]
267	1.02.000329	Sarana Sanitasi	Sarana	Jumlah Sarana Sanitasi	0	T	[1.02.05.2.01.0002]
268	1.02.000330	Tatanan kawasan tanpa rokok	Kawasan	Jumlah Tatanan kawasan tanpa rokok	0	T	[1.02.02.2.02.0043]
269	1.02.000331	Tatatan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktivitas merokok	Kawasan	Jumlah tatatan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktivitas merokok		Y	[1.02.02.2.02.0045]

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2025	Disabled	Info Sub Kegiatan
1	2.11.000001	Audit lingkungan hidup yang diterbitkan oleh kab/kota pada n-1	Laporan	Tersedianya audit lingkungan hidup yang diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku	0	T	[2.11.03.2.01.0001]
2	2.11.000004	Data Capaian IKLH Per tahun	Poin	Tersedianya data hasil pengukuran capaian IKLH meliputi: IKA, IKU, IKAL, IKL pada tingkat Kab/kota	79.21	T	[2.11.02.2.01.0002]
3	2.11.000005	Data contoh uji	Data	Data jumlah contoh uji yang diinventaris oleh laboratorium lingkungan hidup, baik yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan/atau individu	18	T	[2.11.03.1.01.0015] [2.11.03.2.01.0015]
4	2.11.000006	Data hasil matriks integrasi/penelaahan KLHS ke dalam RPJMD	Laporan	Terbitnya surat keterangan verifikasi pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi.	1	T	[2.11.02.1.02.0002] [2.11.02.2.02.0002]
5	2.11.000007	Data hasil Penjaminan kualitas dan dokumentasi KLHS	Laporan	Terbitnya surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah	1	T	[2.11.02.1.02.0008] [2.11.02.2.02.0006]
6	2.11.000009	Data Hasil Penjaminan Kualitas KLHS RPJMD	Laporan	Terbitnya surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah Kabupaten/Kota	1	T	[2.11.02.1.02.0002] [2.11.02.2.02.0002]
7	2.11.000010	Data hasil Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP	Laporan	Tersedianya data hasil penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP yang mendukung dokumen KLHS KRP lainnya	0	T	[2.11.02.1.02.0007] [2.11.02.1.02.0008] [2.11.02.2.02.0005] [2.11.02.2.02.0006]
8	2.11.000011	Data hasil Perumusan alternatif penyempurnaan KRP	Laporan	Tersedianya data hasil perumusan alternatif penyempurnaan KRP yang mendukung dokumen KLHS KRP lainnya	0	T	[2.11.02.1.02.0007] [2.11.02.1.02.0008] [2.11.02.2.02.0005] [2.11.02.2.02.0006]
9	2.11.000012	Data hasil Validasi KLHS	Laporan	a. Tersedianya data hasil validasi KLHS yang mendukung dokumen KLHS Rencana Tata Ruang b. Tersedianya data hasil validasi KLHS yang mendukung dokumen KRP lainnya	0	T	[2.11.02.1.02.0007] [2.11.02.1.02.0008] [2.11.02.2.02.0005] [2.11.02.2.02.0006]
10	2.11.000013	Data hasil Validasi KLHS RPJMD	Laporan	Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK	1	T	[2.11.02.1.02.0002] [2.11.02.2.02.0002]
11	2.11.000014	Data keanekaragaman hayati di wilayah kabupaten/kota	Dokumen	Tersedianya data keanekaragaman hayati di wilayah kabupaten/kota	0	T	[2.11.04.2.01.0001] [2.11.04.3.01.0008] [2.11.04.3.01.0009] [2.11.04.4.01.0008] [2.11.04.4.01.0009]
12	2.11.000016	Data pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang ada	Data	Data sumber pencemar yang telah dilakukan penghentian pencemaran	5	T	[2.11.03.1.02.0003] [2.11.03.3.04.0001] [2.11.03.4.04.0001] [2.11.03.2.02.0003]
13	2.11.000018	data Pengelolaan Limbah B3 dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan Provinsi di wilayah kabupaten/kota	Dokumen	Tersedianya data dan informasi terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan Provinsi di wilayah kabupaten/kota	0	T	[2.11.05.2.02.0002]
14	2.11.000019	Data Pengkajian Pembangunan Berkelanjutan	Laporan	Tersedianya identifikasi TPB	1	T	[2.11.02.1.02.0002] [2.11.02.2.02.0002]
15	2.11.000020	Data Pengkajian Pengaruh KRP terhadap kondisi LH	Laporan	a. Tersedianya data pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi LH yang mendukung dokumen KLHS Rencana Tata Ruang b. Tersedianya data pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi LH yang mendukung dokumen KLHS KRP lainnya	0	T	[2.11.02.1.02.0007] [2.11.02.1.02.0008] [2.11.02.2.02.0005] [2.11.02.2.02.0006]
16	2.11.000021	Data pengujian parameter kualitas lingkungan	Data	Data hasil penetapan dan penentuan parameter kualitas lingkungan baik yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan/atau individu	0	T	[2.11.03.1.01.0015] [2.11.03.2.01.0015]
17	2.11.000022	Data Perumusan Skenario Pembangunan Berkelanjutan	Laporan	Tersedianya rumusan skenario TPB	1	T	[2.11.02.1.02.0002] [2.11.02.2.02.0002]
18	2.11.000023	Data Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampahan yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi	Dokumen	1. tersedianya data sarana dan prasarana penanganan sampah kabupaten/kota 2. tersedianya data sarana dan prasarana pengurangan sampah (gudang) dll 3. tersedianya data sarana prasarana pengelolaan sampah yang dibantu pengadaannya (Pusat, Provinsi, Program, LN, LSM, NGO dll)	1	T	[2.11.11.2.01.0005]
19	2.11.000024	Dokumen & Data hasil inventarisasi Lingkungan Hidup	Dokumen	Tersedianya Dokumen dan Data inventarisasi Lingkungan Hidup	0	T	[2.11.02.2.01.0006]
20	2.11.000026	Dokumen amdal yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1	Dokumen	Tersedianya dokumen amdal sesuai dengan NSPK yang berlaku	0	T	[2.11.03.2.01.0001]
21	2.11.000028	Dokumen DIKPLHD	Dokumen	Tersedianya dokumen telaahan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah	0	T	[2.11.02.1.01.0002] [2.11.02.2.01.0002]

22	2.11.000029	Dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup	Dokumen	Laporan hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup yang telah dilaksanakan oleh Laboratorium lingkungan hidup daerah	0	T	[2.11.03.1.01.0015] [2.11.06.3.02.0002] [2.11.03.2.01.0015]
23	2.11.000030	Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)	Dokumen	Tersedianya data dan informasi sumber daya alam hayati, non hayati, terbarukan dan tidak terbarukan berupa potensi dan ketersediaan, bentuk kerusakan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, konflik dan penyebab konflik pengelolaan.	0	T	
24	2.11.000033	Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota eksisting	Dokumen	1. jumlah kajian pendukung penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang telah tersedia 2. jumlah kebijakan yang telah disusun	1	T	[2.11.11.2.01.0008]
25	2.11.000034	Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota yang direview	Dokumen	1. jumlah kajian pendukung penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah 2. jumlah kebijakan yang disusun 3. jumlah kegiatan pemantauan pelaksanaan kebijakan	1	T	[2.11.11.2.01.0008]
26	2.11.000036	Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Dokumen	Jumlah dokumen hasil pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan yang dilakukan pada kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA	0	T	[2.11.07.1.02.0001] [2.11.07.2.02.0001]
27	2.11.000037	Dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST yang disusun	Dokumen	1. jumlah kajian kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST 2. data potensi jumlah timbulan sampah yang dapat ditangani oleh TPA/TPST (setelah jumlah potensi timbulan sampah kabupaten/kota dikurangi potensi penanganan sampah di instalasi TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan ditambah jumlah residu yang dihasilkan) 3. tersedianya data biaya penanganan sampah di TPA/TPST		Y	[2.11.11.2.01.0021]
28	2.11.000039	Dokumen PeLaporan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	Tersedianya dokumen pelaporan pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	1	T	[2.11.02.2.01.0002] [2.11.02.2.01.0007]
29	2.11.000041	Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH RPPLH untuk 30 Tahun	Dokumen	Tersedianya dokumen rancangan RPPLH yang memuat: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan c. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya dan d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim	0	T	
30	2.11.000042	Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun	Dokumen	Tersedianya dokumen rancangan RPPLH yang memuat: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan c. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya dan d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.	1	T	[2.11.02.1.01.0005] [2.11.02.2.01.0003]
31	2.11.000043	Dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusun	Dokumen	Tersedianya dokumen rencana Induk pengelolaan kehati yang disusun	0	T	[2.11.04.1.01.0001] [2.11.04.2.01.0001]
32	2.11.000044	Dokumen UKL-UPL yang telah di terbitkan oleh kab/kota s.d. n-1	Dokumen	Tersedianya dokumen UKL-UPL sesuai dengan NSPK yang berlaku	0	T	[2.11.03.2.01.0001]
33	2.11.000046	Eksisting kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah	Kelompok	tersedianya data dan jumlah kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan	2	T	[2.11.11.2.01.0004]
34	2.11.000048	Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	Tersedianya data Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani		Y	[2.11.10.2.01.0004]
35	2.11.000049	ijin PPLH lainnya yang telah diterbitkan kab/kota s.d. n-1	Izin	Tersedianya izin PPLH lainnya yang telah diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku	0	T	[2.11.03.2.01.0001]
36	2.11.000050	Informasi Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dipublikasikan kepada Masyarakat	Publikasi	Informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait bahaya yang ditimbulkan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	0	T	[2.11.03.1.02.0001] [2.11.03.2.02.0001]
37	2.11.000051	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kab/kota yang dilakukan pengawasan	Izin	Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan.	7	T	[2.11.06.2.01.0003] [2.11.06.2.01.0005] [2.11.06.3.01.0005] [2.11.06.4.01.0005]

38	2.11.000052	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota	Izin	Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	0	T	[2.11.06.2.01.0009] [2.11.06.3.01.0005] [2.11.06.4.01.0005]
39	2.11.000056	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota	Izin	Tersedianya data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	0	T	[2.11.06.2.01.0009] [2.11.06.3.01.0005] [2.11.06.4.01.0005]
40	2.11.000058	Izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kab/kota yang dilakukan pengawasan	Izin	Data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan	7	T	[2.11.06.2.01.0005] [2.11.06.3.01.0005] [2.11.06.4.01.0005]
41	2.11.000060	Izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang masuk dan diproses	Izin/persetujuan	Data dan jumlah usaha/kegiatan yang berkaitan dengan penanganan sampah	0	T	[2.11.11.2.02.0001]
42	2.11.000062	Kebijakan/data informasi terkait RPPLH	Dokumen	Dokumen telaahan kebijakan/data informasi terkait RPPLH	0	T	[2.11.02.1.01.0002] [2.11.02.2.01.0002]
43	2.11.000063	Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Unit	Data jumlah Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	0	T	[2.11.04.2.01.0003]
44	2.11.000066	Kegiatan fasilitasi pemenuhan ketentuan izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah	Kegiatan	1. Jumlah data usaha/kegiatan yang berkaitan dengan penanganan sampah 2. Data jumlah izin/persetujuan lingkungan yang diterbitkan terkait dengan kegiatan pengelolaan sampah	0	T	[2.11.11.2.03.0001]
45	2.11.000067	Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Laporan	Tersedianya laporan dari Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	1	T	[2.11.11.2.03.0003]
46	2.11.000068	Kegiatan pengurangan sampah	Kegiatan	1. jumlah timbulan sampah yang mampu dikurangi dari hasil pembatasan di setiap kelurahan/desa 2. jumlah kegiatan sosialisasi pembatasan sampah 3. jumlah kegiatan pemantauan pembatasan sampah 4. tersedianya data jumlah sampah yang di di daur ulang 5. tersedianya data jumlah sampah hasil daur ulang yang di jual kepada offtaker untuk setiap jenis hasil olahan 6. Data jumlah/volume sampah yang di manfaatkan kembali	1	T	[2.11.11.2.01.0013] [2.11.11.2.01.0018] [2.11.11.2.01.0019] [2.11.11.2.01.0024] [2.11.11.2.01.0030]
47	2.11.000069	Kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah yang tercatat aktif dalam 1 tahun terakhir	Kelompok	Data kelompok masyarakat yang di tingkatkan kapasitas terkait dengan pengelolaan sampah (tanggal dan tema peningkatan kapasitas	6	T	[2.11.11.2.01.0004]
48	2.11.000070	Kelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan persampahan	Kelompok	1. tersedianya data dan jumlah kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan 2. tersedianya data kelompok masyarakat yang di tingkatkan kapasitas terkait dengan pengelolaan sampah (tanggal dan tema peningkatan kapasitas 3. tersedianya data personil kelompok masyarakat yang telah di tingkatkan kapasitasnya 4. tersedianya data renaksi kelompok yang di tingkatkan kapasitasnya	2	T	[2.11.11.2.01.0004]
49	2.11.000071	Kelompok masyarakat yang mengikuti Kegiatan pembinaan	Kelompok	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti kegiatan pembinaan	0	T	[2.11.04.1.01.0006] [2.11.04.2.01.0006]
50	2.11.000072	Kelompok MHA yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan dalam rangka PPLH	Kelompok	Jumlah kelompok MHA yang telah dilakukan upaya-upaya pemberdayaan, kemitraan, penampingan dan penguatan yang bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan dan kesadaran yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0	T	[2.11.07.1.02.0001] [2.11.07.2.02.0001]
51	2.11.000074	Kelompok MHA yang terkait dengan PPLH	Kelompok	Data jumlah kelompok MHA terkait dengan PPLH yang telah diakui dan ditetapkan keberadaannya sesuai dengan mekanisme/tata cara yang diatur pada peraturan perundangan	0	T	[2.11.07.1.01.0001] [2.11.07.2.01.0001]
52	2.11.000075	Keluarga yang diidentfikasi memerlukan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Keluarga	Jumlah Keluarga yang diidentfikasi memerlukan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	225	T	[2.11.08.1.01.0004] [2.11.08.2.01.0004]
53	2.11.000076	Keputusan penerapan sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Dokumen	Data jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannya		Y	[2.11.10.1.01.0003] [2.11.10.2.01.0006]

54	2.11.000078	Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah daerah kab/kota	Dokumen	Data laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang menggambarkan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.		Y	[2.11.06.2.01.0005]
55	2.11.000080	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Dokumen	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di provinsi mapun aktivitas remidiasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota yang telah dilakukan	1	T	[2.11.03.1.03.0010] [2.11.03.2.03.0012]
56	2.11.000081	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kewenangan pemerintah dan/atau kab/kota	Dokumen	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan K/L terkait, pemerintah daerah kabupaten/kota serta lembaga lainnya dalam hal penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	0	T	[2.11.03.2.03.0001]
57	2.11.000083	Laporan hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Dokumen	dokumen laporan dan bukti-bukti pendukung lainnya terkait hasil koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	0	T	[2.11.05.2.02.0002]
58	2.11.000084	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	Rincian kegiatan yang dilaksanakan terkait inventarisasi GRK, penurunan emisi dan aktivitas yang berkaitan dengan perubahan iklim bersama dengan K/L terkait dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau lembaga lain	1	T	[2.11.03.2.01.0002]
59	2.11.000086	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Dokumen	Data dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan yang telah dilakukan	0	T	[2.11.10.1.01.0003] [2.11.10.1.01.0005] [2.11.10.2.01.0006] [2.11.10.2.01.0005]
60	2.11.000090	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi	Dokumen	1. Data sarana dan prasarana penanganan sampah kabupaten/kota 2. Data sarana dan prasarana pengurangan sampah (gudang) dll 3. Data sarana prasarana pengelolaan sampah yang dibantu pengadaannya (Pusat, Provinsi, Program, LN, LSM, NGO dll)	1	T	[2.11.11.2.01.0005]
61	2.11.000092	Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait dalam rangka menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Laporan	Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait dalam rangka menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	0	T	[2.11.08.2.01.0004]
62	2.11.000093	Laporan Hasil Koordinasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Dokumen	Laporan hasil koordinasi terkait pengakuan keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	0	T	[2.11.07.1.01.0001] [2.11.07.2.01.0001]
63	2.11.000095	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi yang dilaksanakan	Dokumen	1. Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan lembaga terkait rencana maupun aktivitas rehabilitasi yang telah dilakukan. 2. Laporan kegiatan aktivitas rehabilitasi yang telah dilakukan melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem. 3. Data lokasi yang telah dilakukan Aktivitas rehabilitasi melalui pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula. 4. Data luas area yang telah dilakukan Aktivitas rehabilitasi melalui pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.	0	T	[2.11.03.1.03.0007] [2.11.03.1.03.0009] [2.11.03.2.03.0009] [2.11.03.2.03.0013]

64	2.11.000096	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan remediasi yang dilaksanakan	Dokumen	a. Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan lembaga terkait rencana remediasi maupun aktivitas restorasi lingkungan di wilayah sesuai kewenangannya yang telah dilakukan. b. Aktivitas remediasi yang telah dilaksanakan melalui upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.	0	T	[2.11.03.1.03.0012] [2.11.03.1.03.0013] [2.11.03.2.03.0006] [2.11.03.2.03.0008]
65	2.11.000097	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi yang dilaksanakan	Dokumen	1. Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan maupun aktivitas restorasi lingkungan di wilayah sesuai kewenangannya yang telah dilakukan. 2. Laporan aktivitas restorasi yan telah dilakukan dalam rangka pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.	0	T	[2.11.03.1.03.0006] [2.11.03.1.03.0008] [2.11.03.2.03.0007] [2.11.03.2.03.0010]
66	2.11.000098	Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	Laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1	T	[2.11.03.1.01.0001] [2.11.03.2.01.0001]
67	2.11.000099	Laporan Hasil Pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Dokumen	Dokumen laporan hasil pendampingan pembinaan dalam bentuk konsultasi, koordinasi, supervisi, fasilitasi, promosi pengembangan dan bentuk kegiatan lainnya terkait gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup	1	T	[2.11.08.1.01.0002] [2.11.08.2.01.0002]
68	2.11.000100	Laporan hasil Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah kab/kota	Dokumen	Tersedianya laporan hasil penyelenggaraan penyuluhan dalam bentuk dalam bentuk sosialisasi, kampanye, workshop, publikasi, ajang kreatifitas dan inovasi, temu teknis, temu karya dan kampanye lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	1	T	[2.11.08.2.01.0003]
69	2.11.000102	Laporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kab/kota di 5 sektor	Dokumen	Kegiatan yang dilaksanakan terkait inventarisasi GRK, penurunan emisi dan aktivitas yang berkaitan dengan perubahan iklim bersama dengan K/L terkait dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau lembaga lain	0	T	[2.11.03.2.01.0002]
70	2.11.000104	Laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah B3	Laporan	Tersedianya data terkait hasil laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara & pengumpulan Limbah B3 sebelum menerbitkan/menolak izin dimaksud		Y	[2.11.05.2.01.0002]
71	2.11.000105	Laporan pelaksanaan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada masyarakat	Dokumen	Laporan hasil sosialisasi dan penyampaian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat	0	T	[2.11.03.1.02.0001] [2.11.03.2.02.0001]
72	2.11.000106	Laporan penyebab pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dokumen	Data sebaran lokasi yang diisolasi oleh pemerintah provinsi akibat adanya pencemaran	0	T	[2.11.03.1.02.0002] [2.11.02.3.03.0001] [2.11.02.4.03.0001] [2.11.03.2.02.0002] [2.11.02.3.02.0001] [2.11.02.4.02.0001]
73	2.11.000107	Lembaga /kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar dan dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup	Lembaga	Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan dan telah dilakukan peningkatan kapasitas baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2	T	[2.11.08.1.01.0005] [2.11.08.1.01.0007] [2.11.08.2.01.0005]
74	2.11.000108	Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kab/kota eksisting	Lembaga	Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan	2	T	[2.11.08.2.01.0005]
75	2.11.000110	Lokasi pelaksanaan Rehabilitasi	Lokasi	Area yang telah dilakukan rehabilatasimelalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.	0	T	[2.11.03.1.03.0007] [2.11.03.2.03.0009]

76	2.11.000111	Lokasi pelaksanaan remediasi	Lokasi	Aktivitas remediasi untuk menghilangkan polusi atau kontaminan dari media seperti tanah, air tanah, sedimen, atau air permukaan	0	T	[2.11.03.1.03.0013] [2.11.03.2.03.0006]
77	2.11.000112	Lokasi pelaksanaan Restorasi	Lokasi	Area yang telah dilakukan restorasi melalui pemulihan ekosistem yang telah rusak atau rusak, serta melestarikan ekosistem yang masih utuh	0	T	[2.11.03.1.03.0008] [2.11.03.2.03.0010]
78	2.11.000113	Lokasi pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Lokasi	Data sebaran lokasi yang diisolasi oleh pemerintah provinsi akibat adanya pencemaran	0	T	[2.11.03.1.02.0002] [2.11.03.1.02.0003] [2.11.03.2.02.0002] [2.11.03.2.02.0003]
79	2.11.000114	Lokasi Proklim yang berada di wilayah kabupaten/kota	Lokasi	Data lokasi proklim di kabupaten/kota	2	T	[2.11.03.2.01.0002]
80	2.11.000116	Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Ha	Data Luasan Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	3.03	T	[2.11.04.2.01.0003]
81	2.11.000118	Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Ha	Data Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	2.221.059	T	[2.11.04.2.01.0004]
82	2.11.000120	Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Ha	1. Tersedianya data jumlah Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota 2. Tersedianya data Luasan taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota	0.87	T	[2.11.04.2.01.0009]
83	2.11.000122	Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Ha	Data Luasan taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	5	T	[2.11.04.2.01.0008]
84	2.11.000124	Masyarakat/kelompok Masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang dilakukan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Orang	Jumlah keseluruhan individu yang telah dilakukan penyuluhan dalam bentuk sosialisasi, kampanye, workshop, publikasi, ajang kreatifitas dan inovasi, temu teknis, temu karya dan metode penyuluhan & kampanye lainnya terkait lingkungan hidup	Â± 1500	T	[2.11.08.1.01.0003] [2.11.08.2.01.0003]
85	2.11.000125	Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang diNilai kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	Data terkait Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	20	T	[2.11.09.1.01.0001] [2.11.09.2.01.0001]
86	2.11.000126	Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Entitas	Data terkait Masyarakat/lembaga Masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantrophi yang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	20	T	[2.11.09.1.01.0001] [2.11.09.2.01.0001]
87	2.11.000127	Materi yang diidentifikasi diperlukan untuk menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Materi	Jumlah Materi yang diidentifikasi diperlukan untuk menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	6	T	[2.11.08.1.01.0004] [2.11.08.2.01.0004]
88	2.11.000128	Nilai IKA n-1	Poin	Nilai yang menunjukan kualitas air pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air sesuai dengan NSPK yang berlaku	80.76	T	[2.11.03.1.01.0001] [2.11.03.2.01.0001]
89	2.11.000129	Nilai IKAL n-1	Poin	Nilai yang menunjukan kualitas air laut pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air laut sesuai dengan NSPK yang berlaku	0	T	[2.11.03.1.01.0001] [2.11.03.2.01.0001]
90	2.11.000130	Nilai IKLH n-1	Poin	Nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu yang merupakan nilai komposit dari IKA, IKU, IKTL, dan IKAL.	79.17	T	[2.11.03.1.01.0001] [2.11.03.2.01.0001]
91	2.11.000131	Nilai IKTL n-1	Poin	Nilai yang menunjukan kualitas tutupan lahan pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas tutupan lahan sesuai dengan NSPK yang berlaku	66.48	T	[2.11.03.1.01.0001] [2.11.03.2.01.0001]
92	2.11.000132	Nilai IKU n-1	Poin	Nilai yang menunjukan kualitas udara pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas udara sesuai dengan NSPK yang berlaku	84.64	T	[2.11.03.1.01.0001] [2.11.03.2.01.0001]
93	2.11.000133	Orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup	Orang	Jumlah SDM yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis dll dalam bidang lingkungan hidup	0	T	[2.11.08.1.01.0002] [2.11.08.2.01.0002]
94	2.11.000135	Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	Data jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	4	T	[2.11.10.2.01.0004] [2.11.10.2.01.0009]
95	2.11.000136	Permohonan kelayakan lingkungan hidup	Dokumen	Data permohonan kelayakan lingkungan hidup yang diajukan kepada pemerintah	0	T	[2.11.06.1.01.0001] [2.11.06.2.01.0001]
96	2.11.000139	Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak	Dokumen	Data dokumen terkait izin pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak		Y	[2.11.05.2.02.0001]

97	2.11.000140	Permohonan rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses	Dokumen	Data dokumen terkait permohonan izin pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses		Y	[2.11.05.2.02.0001]
98	2.11.000141	Permohonan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses	Dokumen	Data dokumen terkait permohonan izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diproses	0	T	[2.11.05.2.01.0001] [2.11.05.2.01.0005]
99	2.11.000142	Permohonan teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak	Dokumen	Data dokumen terkait izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang ditolak		Y	[2.11.05.2.01.0001]
100	2.11.000143	Persetujuan lingkungan hidup	Dokumen	data dokumen persetujuan lingkungan hidup yang telah disetujui oleh pemerintah	0	T	[2.11.06.1.01.0001] [2.11.06.2.01.0001]
101	2.11.000144	Persetujuan lingkungan yang telah di terbitkan s.d. n-1	persetujuan	persetujuan lingkungan yang telah diterbitkan sesuai dengan NSPK yang berlaku	0	T	[2.11.03.1.01.0001] [2.11.03.2.01.0001]
102	2.11.000146	PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD	Orang	Data jumlah PNS dengan jabatan fungsional PPLHD	4	T	[2.11.06.1.01.0005] [2.11.06.2.01.0007]
103	2.11.000147	PPLHD Eksisting	Orang	Data PPLHD yang aktif	4	T	[2.11.06.1.01.0007] [2.11.06.2.01.0006]
104	2.11.000148	PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas	Orang	Data PPLHD yang telah mengikuti diklat, pelatihan, seminar dll untuk meningkatkan kapasitas PPLHD dimaksud	1	T	[2.11.06.1.01.0005] [2.11.06.2.01.0007]
105	2.11.000149	PPLHD yang dibutuhkan	Orang	Data kebutuhan PPLHD	8	T	[2.11.06.1.01.0007] [2.11.06.2.01.0006]
106	2.11.000150	Rekomendasi izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	Rekomendasi	Data rekomendasi izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	0	T	[2.11.11.2.02.0001]
107	2.11.000151	Rincian teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	Dokumen	Data dokumen terkait izin pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan		Y	[2.11.05.2.02.0001]
108	2.11.000152	Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	Dokumen	Data dokumen terkait izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	0	T	[2.11.05.2.01.0001] [2.11.05.2.01.0005]
109	2.11.000153	RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Unit	Data jumlah RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	0	T	[2.11.04.2.01.0004]
110	2.11.000155	Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	Unit	Data jumlah unit Sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	1	T	[2.11.04.1.01.0007] [2.11.04.2.01.0007]
111	2.11.000156	Sarana dan prasarana pemilahan sampah	Unit	1. tersedianya data dan jumlah sarana pemilahan sampah 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana pemilahan sampah (Rp/bulan atau Rp/ton) 3. tersedianya data jumlah SDM yang mengopersaionalkan sarana pemilahan sampah		Y	[2.11.11.2.01.0014]
112	2.11.000158	Sarana dan prasarana pengangkutan sampah	Unit	1. tersedianya data dan jumlah sarana pengangkutan sampah 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana pengangkutan sampah (Rp/bulan atau Rp/ton) 3. tersedianya data jumlah SDM yang mengopersaionalkan sarana pengangkutan sampah	36	T	[2.11.11.2.01.0012]
113	2.11.000159	Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota eksisting	Unit	1. Data TPA/TPST/SPA dan kapasitasnya 2. Data sarana dan prasarana di setiap TPA/TPST/SPA 3. Data biaya operasional setia TPA/TPST/SPA 4. Data SDM yang dibutuhkan di setiap TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	3	T	[2.11.11.2.01.0007]
114	2.11.000160	Sarana dan prasarana pengumpulan sampah	Unit	1. tersedianya data dan jumlah sarana pengumpulan sampah 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana pengumpulan sampah (Rp/bulan atau Rp/ton) 3. tersedianya data jumlah SDM yang mengopersaionalkan sarana pengumpulan sampah	11	T	[2.11.11.2.01.0016]
115	2.11.000161	Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Unit	data jumlah Taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	0	T	[2.11.04.2.01.0009]
116	2.11.000163	Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	Unit	Data jumlah Taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	0	T	[2.11.04.2.01.0008]
117	2.11.000165	Titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)	Titik	Jumlah lokasi titik pantau yang digunakan oleh pemerintah provinsi untuk melakukan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas air laut	13	T	[2.11.03.1.01.0009] [2.11.03.2.01.0007]

118	2.11.000167	Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah	Unit	Data jumlah usaha dan atau kegiatan, Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah	2	T	[2.11.11.2.03.0002]
119	2.11.000168	Usaha/kegiatan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana PPLH	Usaha/Kegiatan	Tersedianya data laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang melakukan pelanggaran terhadap upaya dan rencana PPLH		Y	[2.11.06.1.01.0006] [2.11.06.2.01.0005]
120	2.11.000172	Volume timbulan sampah yang diangkut	Ton	1. tersedianya data jumlah sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari TPS/TPST/Bank Sampah/PDU/TPS3R dll ke TPA 2. tersedianya data jumlah timbulan sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari sumber sampah ke TPA	4626.64	T	[2.11.11.2.01.0012]
121	2.11.000174	Volume timbulan sampah yang dilakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Ton	1. Data jumlah timbulan sampah yang mampu dikurangi dari hasil pembatasan di setiap kelurahan/desa 2. Data jumlah sampah yang di di daur ulang 3. Data jumlah sampah hasil daur ulang yang di jual kepada offtaker untuk setiap jenis hasil olahan 4. Data jumlah sampah yang di manfaatkan kembali	76.24	T	[2.11.11.2.01.0013] [2.11.11.2.01.0018] [2.11.11.2.01.0019] [2.11.11.2.01.0024] [2.11.11.2.01.0030]
122	2.11.000175	Volume timbulan sampah yang dilakukan pemilahan	Ton	1. Data jumlah timbulan sampah yang masuk dan dikelola oleh setiap instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 2. Data jumlah residu sampah yang dihasilkan setiap instalasi pengolahan sampah (TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) untuk dilakukan penanganan sampah melalui pengangkutan 3. Data jumlah/volume timbulan sampah yang dijual (biji plastik, maggot, kompos dll) - ton	14.59	T	[2.11.11.2.01.0017]
123	2.11.000176	Volume timbulan sampah yang diolah	Ton	1. Data jumlah timbulan sampah yang masuk dan dikelola oleh setiap instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 2. Data jumlah residu sampah yang dihasilkan setiap instalasi pengolahan sampah (TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) untuk dilakukan penanganan sampah melalui pengangkutan 3. Data jumlah/volume timbulan sampah yang dijual (biji plastik, maggot, kompos dll) - ton	14.59	T	[2.11.11.2.01.0017]
124	2.11.000177	Volume timbulan sampah yang diproses akhir di TPA/TPST/SPA	Ton	1. Data jumlah timbulan sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (sampah yang di angkut dari sumber sampah) 2. Data jumlah residu sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (hasil dari pengolahan di TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan)	4550.4	T	[2.11.11.2.01.0020]
125	2.11.000179	Dokumen rencana/kajian RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst	Dokumen	Data terkait mutu air, mutu udara, mutu air laut, pengelolaan ekosistem gambut, dan pengelolaan karst pada tingkat Kabupaten/Kota	0	T	[2.11.02.1.01.0003] [2.11.02.2.01.0005]
126	2.11.000181	Jumlah alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang beroperasi dan terpelihara	Unit	Data jumlah alat pemantauan lingkungan hidup yang dioperasikan dalam kondisi baik oleh pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya untuk pemantauan kualitas air maupun pemantauan udara	231	T	[2.11.03.2.01.0009]
127	2.11.000183	Jumlah data contoh uji	Data	Data jumlah contoh uji yang diinventaris oleh laboratorium lingkungan hidup, baik yang terkait dengan aktivitas pemerintah daerah maupun pengujian yang dilakukan berdasarkan pengajuan lembaga dan/atau individu	55	T	[2.11.03.1.01.0004] [2.11.03.2.01.0012]

128	2.11.000186	Jumlah dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup	Dokumen	Data Laporan hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup yang telah dilaksanakan oleh Laboratorium lingkungan hidup daerah		Y	[2.11.03.1.01.0004]
129	2.11.000187	Jumlah Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis)	Dokumen	Data dan informasi sumber daya alam hayati, non hayati, terbarukan dan tidak terbarukan berupa potensi dan ketersediaan, bentuk kerusakan, jenis yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan, pengetahuan pengelolaan, konflik dan penyebab konflik pengelolaan pada tingkat Kabupaten/Kota.	0	T	[2.11.02.1.01.0004] [2.11.02.1.01.0006] [2.11.02.2.01.0004] [2.11.02.2.01.0006]
130	2.11.000189	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi penanganan sampah regional yang disusun	Dokumen	1. Data jumlah kajian pendukung kebijakan daerah yang di susun 2. Data jumlah kebijakan daerah yang di terbitkan 3. Data kebijakan daerah yang telah di terbitkan	0	T	[2.11.11.2.01.0008]
131	2.11.000191	Jumlah Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun	Dokumen	Dokumen rancangan RPPLH yang memuat: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan c. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya dan d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.	1	T	[2.11.02.1.01.0005] [2.11.02.2.01.0003]
132	2.11.000192	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi	Unit	1. Data dan jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah 2. Data biaya operasional setiap sarana penanganan sampah 3. Data biaya pemeliharaan setiap sarana penanganan sampah (servis berkala)	35	T	[2.11.11.2.01.0009]
133	2.11.000193	Jumlah fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	Usaha	Data dan informasi terkait pembinaan fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	12	T	[2.11.05.2.02.0004]
134	2.11.000195	Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	data Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	4	T	[2.11.10.2.01.0004] [2.11.10.2.01.0009]
135	2.11.000197	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota	Izin	data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota		Y	[2.11.06.2.01.0005]
136	2.11.000200	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota	Izin	data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota		Y	[2.11.06.2.01.0005]
137	2.11.000201	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan	Izin	data dan informasi terkait izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan		Y	[2.11.06.2.01.0005]
138	2.11.000205	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Perkara	Tersedianya data jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota	0	T	[2.11.10.2.01.0003]
139	2.11.000207	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	Unit	Data sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting	0	T	[2.11.05.2.02.0005]
140	2.11.000208	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	Unit	Data dan informasi terkait kebutuhan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	0	T	[2.11.05.2.01.0004]
141	2.11.000209	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	Kegiatan	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di provinsi mapun aktivitas remidiasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota yang telah dilakukan	0	T	[2.11.03.2.03.0012]
142	2.11.000211	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	Aktivitas rehabilitasi pada wilayah kabupaten/kota untuk menghilangkan polusi atau kontaminan dari media seperti tanah, air tanah, sedimen, atau air permukaan	2	T	[2.11.03.2.03.0013]
143	2.11.000213	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	Area yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan remediasi melalui pemulihan ekosistem yang telah rusak atau rusak, serta melestarikan ekosistem yang masih utuh	0	T	[2.11.03.2.03.0008]

144	2.11.000215	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	Area yang telah dilakukan restorasi melalui pengembalian nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.	0	T	[2.11.03.2.03.0007]
145	2.11.000217	Jumlah KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi	Dokumen	Laporan monitoring dan evaluasi implementasi pembuatan dan pelaksanaan KLHS	1	T	[2.11.02.1.02.0006] [2.11.02.2.02.0004]
146	2.11.000218	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Dokumen	Data laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi yang menggambarkan informasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.		Y	[2.11.06.2.01.0005]
147	2.11.000220	Jumlah Laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Laporan	1. jumlah timbulan sampah yang mampu dikurangi dari hasil pembatasan di setiap kelurahan/desa 2. jumlah kegiatan sosialisasi pembatasan sampah 3. jumlah kegiatan pemantauan pembatasan sampah	0	T	[2.11.11.2.01.0018]
148	2.11.000221	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	Laporan inventarisasi data GRK yang memuat informasi berupa tingkat, status, dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi (source) dan penyerapnya (sink) termasuk simpanan karbon (carbon stock).	1	T	[2.11.03.2.01.0005] [2.11.03.2.01.0002]
149	2.11.000224	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah berwenang bersama dengan K/L terkait, pemerintah daerah kabupaten/kota serta lembaga lainnya dalam hal pencegahan pencemaran lingkungan hidup	1	T	[2.11.03.1.01.0010] [2.11.03.2.01.0004]
150	2.11.000225	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Dokumen	Aktivitas rehabilitasi lintas kabupaten/kota melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.	1	T	[2.11.03.1.03.0009] [2.11.03.2.03.0013]
151	2.11.000226	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	Dokumen	Area yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan rehabilatisi melalui pemulihan ekosistem yang telah rusak atau rusak, serta melestarikan ekosistem yang masih utuh	0	T	[2.11.03.2.03.0008]
152	2.11.000227	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	Dokumen	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan lintas kabupaten/kota mapun aktivitas restorasi lingkungan lintas kabupaten/kota yang telah dilakukan	0	T	[2.11.03.1.03.0006] [2.11.03.2.03.0007]
153	2.11.000230	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	Nilai yang menunjukan kualitas tutupan lahan pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas tutupan lahan sesuai dengan NSPK yang berlaku	0	T	[2.11.03.2.01.0001]
154	2.11.000231	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	Laporan hasil kegiatan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup untuk peningkatakan kualitas air, udara dan laut pada lingkup provinsi, Kabupaten, dan/atau Kota	0	T	[2.11.03.1.01.0008] [2.11.03.2.01.0006]
155	2.11.000232	Jumlah Laporan kegiatan pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim di kabupaten/kota	Dokumen	Laporan inventarisasi kegiatan terkait mitigasi perubahan iklim dengan muatan identifikasi target cakupan wilayah dan/atau sektor spesifik dan dampak perubahan iklim, penyusunan kajian kerentanan, pilihan aksi, prioritas aksi adaptasi perubahan iklim dan pengintegrasian aksi adaptasi	0	T	[2.11.03.2.01.0014]
156	2.11.000234	Jumlah Laporan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi.	Dokumen	Laporan kegiatan sosialisasi yang terkait dengan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan rincian seperti bentuk aktivitas, pihak yang terlibat dan informasi lainnya yang terkait kegiatan sosialisasi	1	T	[2.11.03.1.01.0006] [2.11.03.2.01.0008]
157	2.11.000236	Jumlah Laporan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Dokumen	Laporan inventarisasi kegiatan terkait mitigasi perubahan iklim di daerah dengan rincian bentuk aksi mitigasi pada sektor yang terkait	0	T	[2.11.03.2.01.0010]

158	2.11.000238	Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kabupaten/kota eksisting	Lembaga	Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi yang ada di bidang terkait lingkungan hidup yang telah terdaftar sesuai dengan peraturan perundangan	20	T	[2.11.08.2.01.0005]
159	2.11.000241	Jumlah lokasi Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Lokasi	Area di wilayah kabupaten/kota yang dilkukan pembersihan unsur pencemar oleh pemerintah Kabupaten/Kota	2	T	[2.11.03.2.03.0011]
160	2.11.000243	Jumlah lokasi Pelaksanaan rehabilitasi	Lokasi	Area yang menjadi kewenangan provinsi yang telah dilakukan rehabilatisi melalui pengembalian nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.	0	T	[2.11.03.1.03.0007] [2.11.03.2.03.0009]
161	2.11.000244	Jumlah lokasi pelaksanaan remediasi	Lokasi	Aktivitas remediasi pada wilayah lintas provinsi, kabupaten, atau kota untuk menghilangkan polusi atau kontaminan dari media seperti tanah, air tanah, sedimen, atau air permukaan	0	T	[2.11.03.1.03.0013] [2.11.03.2.03.0006]
162	2.11.000245	Jumlah lokasi Pelaksanaan Restorasi	Lokasi	Area yang menjadi kewenangan provinsi yang telah dilakukan rehabilatisi melalui pemulihan ekosistem yang telah rusak atau rusak, serta melestarikan ekosistem yang masih utuh	0	T	[2.11.03.1.03.0008] [2.11.03.2.03.0010]
163	2.11.000246	Jumlah orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup	Orang	Jumlah keseluruhan individu dalam suatu lembaga formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat yang telah dilakukan peningkatan kapasitas baik dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100	T	[2.11.08.1.01.0005] [2.11.08.2.01.0005]
164	2.11.000247	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Perkara	Tersedianya data jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota		Y	[2.11.10.2.01.0006]
165	2.11.000250	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani	Aduan	Tersedianya data jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani		Y	[2.11.10.2.01.0004]
166	2.11.000251	Jumlah PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD	Orang	Tersedianya data jumlah PNS dengan jabatan fungsional PPLHD	4	T	[2.11.06.1.01.0005] [2.11.06.2.01.0007]
167	2.11.000252	Jumlah PPLHD Eksisting	Orang	Tersedianya data PPLHD yang aktif	4	T	[2.11.06.1.01.0007] [2.11.06.2.01.0006]
168	2.11.000253	Jumlah PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas	Orang	Tersedianya data PPLHD yang telah mengikuti diklat, pelatihan, seminar dll untuk meningkatkan kapasitas PPLHD dimaksud	1	T	[2.11.06.1.01.0005] [2.11.06.2.01.0007]
169	2.11.000254	Jumlah PPLHD yang dibutuhkan	Orang	Tersedianya data kebutuhan PPLHD	8	T	[2.11.06.1.01.0007] [2.11.06.2.01.0006]
170	2.11.000255	Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	Jumlah pembentukan dan peningkatan kapasitas penyidik PNS LHK Daerah	1	T	[2.11.10.1.01.0004] [2.11.10.2.01.0007]
171	2.11.000256	Jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditangani	Ton		0	T	
172	2.11.000257	Jumlah sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Unit	Jumlah alat pemantauan lingkungan hidup yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya untuk pemantauan kualitas air maupun pemantauan udara	1	T	[2.11.03.2.01.0013]
173	2.11.000259	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi	Unit	1. tersedianya data dan jumlah sarana serta prasarana penanganan sampah kabupaten/kota 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana dan prasearana penanganan sampah kabupaten/kota (Rp/bulan atau Rp/ton atau Rp/tahun) 3. tersedianya data biaya pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah kabupaten/kota (Rp/tahun)	132	T	[2.11.11.2.01.0015]
174	2.11.000260	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional yang tersedia	Unit	tersedianya data jumlah sarana prasarana pengelolaan sampah regional		Y	[2.11.11.1.01.0012]
175	2.11.000261	Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	Unit	Tersedianya data terkait sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	0	T	[2.11.05.2.02.0003]
176	2.11.000262	Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting	Unit	Tersedianya data terkait sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	0	T	[2.11.05.2.02.0005]

177	2.11.000263	Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	Unit	Tersedianya data terkait sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	0	T	[2.11.05.2.01.0003]
178	2.11.000264	Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting	Unit	Tersedianya data sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting	0	T	[2.11.05.2.01.0004]
179	2.11.000265	Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya	Unit	1. tersedianya data dan jumlah sarana pemilahan sampah 2. tersedianya data biaya operasional setiap sarana pemilahan sampah (Rp/bulan atau Rp/ton) 3. tersedianya data jumlah SDM yang mengopersaionalkan sarana pemilahan sampah	0	T	[2.11.11.2.01.0014]
180	2.11.000266	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Perkara	Tersedianya data jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0	T	[2.11.10.2.01.0005]
181	2.11.000268	Jumlah titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)	Titik	Jumlah lokasi titik pantau yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan kualitas air, kualitas udara dan kualitas air laut	13	T	[2.11.03.1.01.0009] [2.11.03.2.01.0007]
182	2.11.000269	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	Dokumen	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di provinsi mapun aktivitas remidiasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota yang telah dilakukan	0	T	[2.11.03.2.03.0012]
183	2.11.000271	Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	MÂ²	Area di wilayah kabupaten/kota yang dilkukan pembersihan unsur pencemar oleh pemerintah Kabupaten/Kota	0	T	[2.11.03.2.03.0011]
184	2.11.000273	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha	Aktivitas rehabilitasi pada wilayah kabupaten/kota melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.	0	T	[2.11.03.2.03.0009]
185	2.11.000275	Luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan lembaga terkait rencana restorasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota mapun aktivitas restorasi lingkungan di wilayah kabupaten/kota yang telah dilakukan	0	T	[2.11.03.2.03.0006]
186	2.11.000277	Luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha	Aktivitas rehabilitasi di wilayah kabupaten/kota melalui pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.	0	T	[2.11.03.2.03.0010]
187	2.11.000279	Nilai IKA, IKU, IKTL, IKAL, IKLH (n-1)	Poin	Besaran nilai indeks kualitas air, kualitas udara, kualitas tutupan lahan dan kualitas air laut yang menjadi dasar perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun sebelumnya	0	T	[2.11.03.1.01.0009] [2.11.03.2.01.0007]
188	2.11.000280	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	%	1. tersedianya data jumlah sumber sampah berdasarkan klasifikasi (penduduk, KK. Industri (I, II, III dst.) Hotel, pasar, kantor Swasta dll) 2. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui Gerobak 3. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui roda 3 4. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui pickup 5. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui truck engkel 6. tersedianya data jumlah potensi sumber sampah yang di kumpulkan melalui truck double 7. tersedianya data jumlah potensi timbulan sampah yang di kumpulkan oleh penanganan sampah berbasis masyarakat (TPS3R/PDU)	0	T	[2.11.11.2.01.0016]
189	2.11.000281	Tersusunnya dokumen IKLH	Dokumen	Dokumen hasil perhitungan IKLH yang terdiri atas perhitungan IKA, IKU, IKL, IKAL	0	T	[2.11.03.1.01.0012] [2.11.03.2.01.0011]

190	2.11.000282	Tersusunnya dokumen IKPLHD	Dokumen	Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah yang memuat kegiatan dalam peningkatan kinerja lingkungan hidup daerah dan/atau Laporan Status Lingkungan Hidup daerah	0	T	[2.11.03.1.01.0012] [2.11.03.2.01.0011]
191	2.11.000283	Tersusunnya dokumen SLHD	Dokumen	Laporan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah yang memuat kegiatan dalam peningkatan kinerja lingkungan hidup daerah dan/atau Laporan Status Lingkungan Hidup daerah	0	T	[2.11.03.1.01.0012] [2.11.03.2.01.0011]
192	2.11.000286	Volume sampah yang didaur ulang	Ton	1. tersedianya data jumlah sampah yang di di daur ulang 2. tersedianya data jumlah sampah hasil daur ulang yang di jual kepada offtaker untuk setiap jenis hasil olahan		Y	[2.11.11.2.01.0019]
193	2.11.000287	Volume sampah yang dimanfaatkan kembali	Ton	tersedianya data jumlah sampah yang di manfaatkan kembali		Y	[2.11.11.2.01.0013]
194	2.11.000288	Volume sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	1. jumlah timbulan sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (sampah yang di angkut dari sumber sampah) 2. jumlah residu sampah yang di tangani di fasilitas pemrosesan akhir (hasil dari pengolahan di TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan)	4550.4	T	[2.11.11.2.01.0020]
195	2.11.000289	Volume sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya	Ton	1. tersedianya jumlah timbulan sampah yang masuk dan dikelola oleh setiap instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 2. tersedianya data jumlah residu sampah yang dihasilkan setiap instalasi pengolahan sampah (TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan) untuk dilakukan penanganan sampah melalui pengangkutan 3. tersedianya data jumlah/volume timbulan sampah yang dijual (biji plastik, maggot, kompos dll) - ton	76.24	T	[2.11.11.2.01.0017]
196	2.11.000290	Volume sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	1. tersedianya data jumlah sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari TPS/TPST/Bank Sampah/PDU/TPS3R dll ke TPA 2. tersedianya data jumlah timbulan sampah yang di tangani melalui pengangkutan dari sumber sampah ke TPA	4550.4	T	[2.11.11.2.01.0012]
197	2.11.000296	Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani	Ton	Tersedianya data jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani	0	T	[2.11.11.1.01.0013] [2.11.11.1.01.0015] [2.11.11.2.01.0029]
198	2.11.000297	Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Laporan	Laporan memuat seluruh informasi terkait hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya	0	T	[2.11.03.1.01.0016] [2.11.03.2.03.0014]
199	2.11.000298	Laporan kajian Neraca SDA-LH yang dapat disusun berdasarkan data: 1. Neraca Sumber Daya Kayu 2. Jasa Lingkungan Hidup Tinggi 3. Penutupan Lahan 4. Data lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan	Laporan	Data dan informasi terkait jumlah dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup	0	T	[2.11.03.1.01.0017] [2.11.03.2.01.0016]
200	2.11.000300	&Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan NSPK Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan	Laporan	Laporan Pengembangan dan Penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH lingkup Provinsi yang meliputi: 1. Data dan informasi hasil Identifikasi Jasa LH dan para pihak yang berpotensi melaksanakan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 2. Berbagai kegiatan pengembangan NSPK pendukung penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 3. Berbagai kegiatan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH	0	T	

201	2.11.000301	Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	0	T	
202	2.11.000302	Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	Usaha	Tersedianya data usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan	12	T	[2.11.05.2.01.0006]
203	2.11.000303	laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Laporan	laporan memuat seluruh informasi terkait hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka penanggulangan pencemaran lingkungan hidup sesuai kewenangannya	0	T	[2.11.03.1.02.0004] [2.11.03.2.02.0004]
204	2.11.000305	Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	0	T	
205	2.11.000306	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota	Usaha/Kegiatan	Data dan informasi terkait izin usaha dan/atau kegiatan yang izinnya telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan berada dalam lingkup kewenangan pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	T	[2.11.06.2.01.0010]
206	2.11.000307	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota	Usaha/Kegiatan	Data dan informasi mengenai izin usaha dan/atau kegiatan yang telah menerima persetujuan lingkungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan pengawasannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	T	[2.11.06.2.01.0010]
207	2.11.000308	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan	Usaha/Kegiatan	Data dan informasi mengenai izin usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sedang berada dalam proses pengawasan.	7	T	[2.11.06.2.01.0010]
208	2.11.000310	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan	Usaha/Kegiatan	Data dan informasi terkait usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan menjadi objek pengawasan aktif.	7	T	[2.11.06.2.01.0010]
209	2.11.000311	Jumlah laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Dokumen	Dokumen laporan yang berisi data dan informasi dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terkait izin lingkungan, persetujuan lingkungan, serta surat kelayakan operasi yang dikeluarkan dan diawasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7	T	[2.11.06.2.01.0010]
210	2.11.000313	Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	0	T	
211	2.11.000314	Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup	Dokumen	Laporan memuat seluruh informasi terkait hasil dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemulihan pencemaran lingkungan hidup	0	T	[2.11.03.2.03.0015] [2.11.03.1.03.0014]
212	2.11.000317	Persetujuan Teknis pengumpulan limbah B3 sesuai kewenangannya yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	Dokumen	Tersedianya data pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan, permohonan pengumpulan limbah B3 yang sedang diproses dan Permohonan pengumpulan limbah B3 yang ditolak melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		Y	[2.11.05.1.01.0003]
213	2.11.000318	Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan pengumpulan limbah B3 sesuai dengan kewenangannya skala Provinsi yang diterbitkan	Usaha	Tersedianya data usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan pengumpulan limbah B3 sesuai kewenangannya yang diterbitkan	0	T	
214	2.11.000319	Data unit sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir eksisting	Unit	Tersedianya data jumlah sarana prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir eksisting	52	T	[2.11.11.2.01.0028]
215	2.11.000320	Data unit sarana dan prasarana pepenanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang bertambah	Unit	Tersedianya data jumlah sarana prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang bertambah pada tahun anggaran berjalan	0	T	[2.11.11.2.01.0028]

216	2.11.000321	Data kekurangan/kebutuhan unit Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir dengan mengacu pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan/atau Jakstrada	Unit	Tersedianya data kekurangan/kebutuhan unit Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir dengan mengacu pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan/atau Jakstrada sebagai dasar untuk pengalokasian anggaran di tahun berikutnya	3	T	[2.11.11.2.01.0028]
217	2.11.000322	Jumlah sarana dan prasarana Existing penegakan hukum bidang lingkungan hidup	Unit	a. data dan informasi sarana dan prasarana yang saat ini tersedia dan digunakan dalam mendukung proses penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, termasuk fasilitas, peralatan, dan infrastruktur yang relevan. b. Data dan Informasi JF PLH di daerah yang sudah mendapatan sertifikasi pelatihan (kompetensi) sesuai dengan analisis kebutuhan Sarana Prasarana (Usulan alat Pengujian Kualitas lingkungan) untuk melaksanakan tugas pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup.	2	T	[2.11.06.2.01.0011] [2.11.06.1.01.0010]
218	2.11.000323	Data sarana dan prasarana pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tersedia	Unit	Data Fasilitas pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah	0	T	[2.11.11.2.01.0025]
219	2.11.000324	Jumlah fasilitas pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang beroperasi	Unit	data sarana dan prasarana pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang beroperasi yang disediakan oleh pemerintah daerah	0	T	[2.11.11.2.01.0026]
220	2.11.000325	Data Jumlah Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup	Orang	Data dan informasi mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang lingkungan hidup yang bertugas di Pemerintah Daerah. Termasuk dalam data ini adalah informasi tentang tugas, wilayah kerja, dan kewenangan mereka. Selain itu, melakukan analisis kebutuhan untuk mengusulkan pembentukan tambahan PPNS di daerah serta identifikasi kebutuhan terkait peningkatan kapasitas penyidik di bidang lingkungan hidup, baik melalui pelatihan, kompetensi usulan sarana prasarana penunjang penyidikan, maupun pengembangan kompetensi lainnya.	1	T	[2.11.10.1.01.0011] [2.11.10.2.01.0012]
221	2.11.000326	jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang dikelola	Ton	data sumber, jenis dan jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang dikelola oleh pemerintah daerah	0	T	[2.11.11.2.01.0026]
222	2.11.000327	Data pihak swasta yang melakukan pengelolaan sampah	Badan Usaha	tersedianya data jumlah pihak lain (badan usaha) yang dibina dan diawasi kinerjanya dalam pengelolaan sampah.	0	T	[2.11.11.2.03.0004]
223	2.11.000328	Dokuman laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus	Dokumen	Tersedianya dokumen laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan sampah spesifik atau pada kondisi khusus	0	T	[2.11.11.1.01.0008] [2.11.11.1.01.0018] [2.11.11.2.01.0027]
224	2.11.000329	jumlah tonase sampah yang terkelola oleh pihak swasta yang telah memperoleh perizinan pengelolaan sampah	Ton	tersedianya data sampah yang terkelola oleh pihak lain (badan usaha) yag telah memperoleh perizinan pengelolaan sampah	0	T	[2.11.11.2.03.0004]
225	2.11.000330	Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani dan persentase penanganannya dibandingkan dengan total sampah yang ditimbulkan tersebut	Ton	Tersedianya data jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani dan menghitung persentase penanganannya dibandingkan dengan total sampah yang ditimbulkan	0	T	[2.11.11.1.01.0008] [2.11.11.2.01.0027]
226	2.11.000331	sesuai dengan kewenangannya	Ton	Tersedianya data jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani sesuai dengan kewenangannya	0	T	
227	2.11.000332	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLH	Laporan / Dokumen	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLH yang memuat data dan informasi yang menjadi indikator keberhasilan penerapan RPPLH seperti: 1. Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup 2. Indeks Perilaku Ramah Lingkungan Hidup 3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 4. Tingkat daur ulang timbulan sampah 5. Indeks Pengelolaan Kehati 6. dan indikator lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah	0	T	[2.11.02.4.01.0005] [2.11.02.2.01.0007]

228	2.11.000335	1. hasil identifikasi TPB 2. Rumusan skenario TPB 3. Surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah 4. Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK 5. Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi)	Laporan	Semua dokumen hasil proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD/RPJPD mulai dari dokumen hasil identifikasi TPB, Rumusan skenario TPB, surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah, BA validasi, dan surat keterangan atau BA verifikasi pengintegrasian muatan KLHS ke dalam dokumen perencanaan daerah	0	T	
229	2.11.000336	Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi)	Laporan	Surat keterangan verifikasi pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi.	1	T	[2.11.02.1.02.0002] [2.11.02.2.02.0002]
230	2.11.000337	Data dokumen kebijakan terkait dengan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	0	T	[2.11.03.1.02.0005] [2.11.03.2.02.0005]
231	2.11.000338	Data dokumen kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	0	T	[2.11.03.2.01.0017] [2.11.03.1.01.0018]
232	2.11.000339	Data dokumen kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen	Seluruh kebijakan yang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan upaya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	0	T	[2.11.03.1.03.0015] [2.11.03.2.03.0016]
233	2.11.000340	&Laporan hasil pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kesatuan pemangku hutan (KPH) 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data jumlah dan sebaran BUMN dan BUMD lingkup provinsi yang memanfaatkan air dan menyebabkan emisi karbon. 4. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan	Laporan	Laporan pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa LH lingkup Provinsi yang meliputi: 1. Data dan informasi hasil Identifikasi Jasa LH dan para pihak yang berpotensi melaksanakan penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH antar Daerah 2. Berbagai kegiatan fasilitasi penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH	0	T	[2.11.03.2.01.0018] [2.11.03.1.01.0019]
234	2.11.000341	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan	Laporan	Laporan pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa LH lingkup Provinsi yang meliputi: 1. Data dan informasi hasil Identifikasi Jasa LH dan para pihak yang berpotensi melaksanakan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 2. Berbagai kegiatan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH	0	T	[2.11.03.1.01.0020] [2.11.03.2.01.0019]
235	2.11.000342	Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya	Usaha	Tersedianya data usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya	12	T	[2.11.05.1.01.0004] [2.11.05.2.02.0007]
236	2.11.000343	Data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Laporan / Dokumen	Tersedianya data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang sedang Permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang ditolak dan data persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan kewenangannya	0	T	[2.11.05.2.02.0006]

237	2.11.000344	Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas LingkunganÂ yangÂ diusulkan	Orang	Data dan Informasi JF PLH di daerah yang sudah mendapatan sertifikasi pelatihan (kompetensi) sesuai dengan analisis kebutuhan Sarana Prasarana (Usulan alat Pengujian Kualitas lingkungan) untuk melaksanakan tugas pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup	0	T	
238	2.11.000345	Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan	Orang	Data dan Informasi JF PLH di daerah yang sudah mendapatan sertifikasi pelatihan (kompetensi) sesuai dengan analisis kebutuhan Sarana Prasarana (Usulan alat Pengujian Kualitas lingkungan) untuk melaksanakan tugas pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup.	1	T	[2.11.06.2.01.0011] [2.11.06.1.01.0010]
239	2.11.000346	Jumlah lembaga pendidikan formal yang telah mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHS	Sekolah	Data jumlah lembaga pendidikan formal atau sekolah yang mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHS	6	T	[2.11.08.1.01.0005] [2.11.08.2.01.0005]
240	2.11.000347	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannya	Sanksi	Data dan Informasi penerapan sanksi administrasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup. Data ini mencakup jumlah sanksi administrasi yang dikenakan, jenis sanksi, pelanggaran yang dikenai sanksi, serta status pelaksanaan dan kepatuhan terhadap sanksi tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota dan identifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut.	0	T	[2.11.10.1.01.0003] [2.11.10.1.01.0010] [2.11.10.2.01.0006] [2.11.10.2.01.0010]
241	2.11.000348	Jumlah SDM Eksisting yang mempunyai Standar Kompetensi penyelesaian sengketa lingkungan hidup		Data dan informasi kegiatan serta inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Data ini mencakup pelatihan, workshop, sertifikasi, dan program pengembangan lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam menangani dan menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Informasi ini juga mencakup evaluasi efektivitas pelatihan dan dampaknya ke depan terhadap kualitas penanganan sengketa.	1	T	[2.11.10.1.01.0012] [2.11.10.2.01.0011]
242	2.11.000349	Laporan dari seluruh kegiatan yang terkait dengan pemantauan, pembinaan, verifikasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota termasuk pengelolaan sampah spesifik, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) maupun secara tertulis	Laporan / Dokumen	Tersedianya laporan dari seluruh kegiatan yang terkait dengan pemantauan, pembinaan, verifikasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota termasuk pengelolaan sampah spesifik, baik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) maupun secara tertulis	1	T	[2.11.11.2.01.0011]
243	2.11.000350	Jumlah tonase sampah yang dimanfaatkan kembali	Ton	Tersedianya data jumlah tonase sampah yang dimanfaatkan kembali		Y	[2.11.11.2.01.0013]
244	2.11.000351	Jumlah tonase sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya	Ton	Tersedianya data jumlah tonase sampah yang tertangani di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya, baik melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah	4.565	T	[2.11.11.2.01.0017]
245	2.11.000352	jumlah tonase sampah yang didaur ulang	Ton	Tersedianya data jumlah tonase sampah yang berbahsil didaur ulang		Y	[2.11.11.2.01.0019]
246	2.11.000353	Dokumen kerja sama/kemitraan dalam melaksanakan pengelolaan sampah	Dokumen	Tersedianya dokumen kerja sama/kemitraan dalam melaksanakan pengelolaan sampah	1	T	[2.11.11.2.01.0021] [2.11.11.2.01.0023]
247	2.11.000354	Jumlah tonase sampah yang terkelola melalui kerja sama/kemitraan dalam pengelolaan sampah	Ton	Tersedianya data jumlah tonase sampah yang terkelola melalui kegiatan kerja sama/kemitraan dalam pengelolaan sampah	0	T	[2.11.11.2.01.0021] [2.11.11.2.01.0023]

248	2.11.000355	Jumlah Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah dan persentasenya terhadap jumlah total Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga eksisting yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah		Mendata jumlah Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah dan menghitung persentasenya terhadap jumlah total Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga eksisting yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah	0	T	[2.11.11.2.03.0002]
249	2.11.000357	Timbulan Sampah Harian	Ton	Timbulan sampah adalah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari sumber sampah pada wilayah tertentu per hari.	57.31	T	[2.11.11.1.01.0005] [2.11.11.1.01.0007] [2.11.11.1.01.0011] [2.11.11.1.01.0012] [2.11.11.2.01.0003] [2.11.11.2.01.0004] [2.11.11.2.01.0005] [2.11.11.2.01.0007]
250	2.11.000358	Timbulan Sampah Tahunan	Ton	Timbulan sampah adalah volume atau berat sampah yang dihasilkan dari sumber sampah pada wilayah tertentu per tahunan	20.918,15	T	[2.11.11.1.01.0005] [2.11.11.1.01.0007] [2.11.11.1.01.0011] [2.11.11.2.01.0004] [2.11.11.2.01.0007] [2.11.11.2.01.0009] [2.11.11.2.01.0012]

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2025	Disabled	Info Sub Kegiatan
1	3.28.000014	desa yang diberdayakan melalui peningkatan usaha ekonomi produktif, Data Luas Desa yang diberdayakan melalui peningkatan usaha ekonomi produktif	Desa	Peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat desa di sekitar TAHURA melalui penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat desa, verifikasi usaha ekonomi produktif, pendampingan kelompok masyarakat dan bantuan ekonomi produktif	0	T	[3.28.04.2.01.0008]
2	3.28.000020	Dokumen Inventarisasi dan Diversifikasi dengan nilai Kehati tinggi, Data Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi	Dokumen	Melakukan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi meliputi objek : tutupan lahan/open area, ekosistem, keunikan fenomena alam religi sejarah budaya adat dan jenis dan lokasi/sebaran TSL (data shp file)	0	T	[3.28.04.2.01.0003]
3	3.28.000029	Dokumen Perencanaan pemulihan ekosistem dalam Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota, Data Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem	Dokumen	Menyusun dan menetapkan pemulihan ekosistem selama 5 tahun melalui kajian ekosistem yang dipulihkan, penetapan luas areal yang dipulihkan, mekanisme pemulihan yang digunakan serta rencana pembiayaan	0	T	[3.28.04.2.01.0005]
4	3.28.000031	Dokumen perjanjian kerjasama penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Dokumen	Melaksanakan penyelenggaranan kerja sama TAHURA Kabupaten/Kota dalam rangka penguatan fungsi TAHURA dan pembangunan strategis yang tidak terelakkan	0	T	[3.28.04.2.01.0007]
5	3.28.000033	Dokumen permohonan pelayanan pemanfaatan di Tahura yang ditindak lanjuti, Data Luas Kawasan Tahura yang dimanfaatkan	Dokumen	Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Tahura adalah pemanfaatan kondisi lingkungan berupa pemanfaatan potensi ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis, dan peninggalan budaya yang berada dalam tahura yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan Wisata Alam, pemanfaatan air dan energi air, pemanfaatan Panas Bumi	0	T	[3.28.04.2.01.0006]
6	3.28.000034	Dokumen peta blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja dari Tahura berdasarkan hasil penataan kawasan Tahura Kabupaten/Kota, Luas kawasan Tahura Kabupaten/Kota	Dokumen	Pelaksanaan penyusunan blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja Tahura	0	T	[3.28.04.2.01.0010]
7	3.28.000041	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (jangka Panjang dan Jangka Pendek), Data Luas Kawasan Tahura Kabupaten/Kota	Dokumen	Terlaksananya kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan jangka panjang Tahura	0	T	[3.28.04.2.01.0011]
8	3.28.000049	kegiatan Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA, Data luas TAHURA	Kegiatan	melakukan penjagaan, patroli kawasan, pengendalian kebakaran TAHURA bersama masyarakat	0	T	[3.28.04.2.01.0002] [3.28.04.2.01.0014] [3.28.04.2.01.0015] [3.28.04.2.01.0016] [3.28.04.2.01.0017]
9	3.28.000064	Operasi kegiatan pengamanan kawasan TAHURA Kabupaten/Kota, Data Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Operasi	Melakukan Operasi kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Kawasan (Represif) di kawasan Tahura Kab/Kota serta Pengendalian Kebakaran TAHURA bersama Masyarakat	0	T	[3.28.04.2.01.0002] [3.28.04.2.01.0014] [3.28.04.2.01.0015] [3.28.04.2.01.0017]

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2025	Disabled	Info Sub Kegiatan
1	2.10.000001	Berita Acara Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan mediasi penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah garapan dan ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir	0	Y	[2.10.04.1.01.0002] [2.10.04.2.01.0002]
2	2.10.000002	Berita Acara Kesepakatan Bentuk Ganti Kerugian	Berita Acara	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan bentuk ganti kerugian yang ditandatangani oleh para pihak yang hadir Naskah dinas kesepakatan, memuat: a. Pihak yang berhak yang hadir atau kuasanya, yang setuju beserta bentuk Ganti Kerugian yang b. Pihak yang Berhak yang hadir atau kuasanya, yang tidak dan c. Pihak yang Berhak yang tidak hadir dan tidak memberikan kuasa	4 Berita Acara	T	[2.10.05.1.01.0001] [2.10.05.2.01.0001] [2.10.05.2.01.0002]
3	2.10.000003	Berita Acara kesepakatan desain konsolidasi tanah	Berita Acara	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan desain konsolidasi tanah yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir	0	T	[2.10.10.1.01.0002] [2.10.10.2.01.0003]
4	2.10.000004	Berita Acara kesepakatan rencana aksi	Berita Acara	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan rencana aksi yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir	0	T	[2.10.10.1.01.0002] [2.10.10.2.01.0003]
5	2.10.000006	Berita Acara pelepasan hak atas tanah/ garapan dalam rangka konsolidasi tanah	Berita Acara	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan pelepasan hak atas tanah/garapan dalam rangka konsolidasi tanah yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir	0	T	[2.10.10.1.01.0002] [2.10.10.2.01.0003]
6	2.10.000007	Berita Acara penerapan desain konsolidasi tanah	Berita Acara	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan terhadap penerapan desain konsolidasi tanah yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir	0	T	[2.10.10.1.01.0002] [2.10.10.2.01.0003]
7	2.10.000008	Berita Acara pengumpulan data fisik dan yuridis	Berita Acara	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan terhadap pengumpulan data fisik dan yuridis yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir	0	T	[2.10.10.1.01.0002] [2.10.10.2.01.0003]
8	2.10.000009	Berita Acara penyelesaian penanganan keberatan dan sengketa pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Dokumen	Naskah dinas yang berisi pernyataan dan bersifat pengesahan atas kesepakatan terhadap penyelesaian penanganan keberatan dan sengketa pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa yang ditandatangani oleh perwakilan dari para pihak yang hadir	0	Y	
9	2.10.000012	Daftar Nominatif	Dokumen	Rancangan Keputusan Kepala Daerah yang menetapkan daftar nominatif	0	T	[2.10.05.1.01.0001] [2.10.05.2.01.0002]
10	2.10.000013	Daftar peniaian Objek Konsolidasi Tanah	Dokumen	Laporan penilaian objek konsolidasi tanah dalam bentuk tabel	0	T	[2.10.10.1.01.0002] [2.10.05.2.01.0001] [2.10.10.2.01.0003]
11	2.10.000014	Data sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan (pertanahan)	Dokumen	Laporan inventarisasi data sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan urusan keistimewaan (pertanahan)	0	Y	
12	2.10.000015	Data aset tanah pemerintah	Dokumen	Laporan inventarisasi data aset tanah pemerintah	0	T	[2.10.06.1.01.0005] [2.10.06.2.01.0006] [2.10.12.7.01.0001]
13	2.10.000016	Data fisik Objek Pengadaan Tanah	Dokumen	a. Pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi b. Pengukuran dan pemetaan bidang per bidang c. Hasil pelaksanaan berupa Peta Bidang Tanah	4 Dokumen	T	[2.10.05.1.01.0001] [2.10.05.2.01.0001] [2.10.05.2.01.0002]
14	2.10.000017	Data hasil penanganan permasalahan hukum pertanahan	Dokumen	Laporan hasil penanganan permasalahan hukum pertanahan dalam bentuk tabular	0	Y	
15	2.10.000018	Data imeum mukim/keuchik yang mengikuti kegiata pembinaan pertanahan	Dokumen	Laporan hasil Koordinasi Peningkatan Kapasitas Pertanahan bagi Imeum Mukim/Keuchik	0	T	[2.10.14.7.02.0001] [2.10.14.7.02.0001]
16	2.10.000019	Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	Laporan Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1 Dokumen	T	[2.10.06.2.01.0002]
17	2.10.000022	Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	Data nama pemilik tanah Data alamat	0	T	[2.10.06.2.01.0001]
18	2.10.000023	Data inventarisasi tanah absente	Dokumen	Data lokasi tanah	0	T	[2.10.06.1.02.0001] [2.10.06.2.02.0001]
19	2.10.000024	Data inventarisasi tanah kelebihan maksimum	Dokumen	Data lokasi	0	T	[2.10.06.2.02.0001]
20	2.10.000026	Data inventarisasi tanah kosong	Dokumen	Data yang di inventarisasi adalah alamat lokasi bidang tanah, perkiraan luas bidang tanah, dan data pemilik bidang tanah.	0	T	[2.10.08.1.02.0002] [2.10.08.1.02.0001] [2.10.08.2.02.0001] [2.10.08.2.02.0002]

21	2.10.000027	Data masyarakat hukum adat	Dokumen	Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiiki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun. Data Masyarakat Hukum Adat diperoleh dari prose identifikasi, verifikasi dan validasi MHA	0	T	[2.10.07.2.01.0002]
22	2.10.000028	Data Pemetaan	Dokumen	Laporan Pemetaan tanah ulayat dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota yang disusun melalui Keputusan Kepala Daerah	0	T	[2.10.07.1.01.0002] [2.10.07.2.01.0003]
23	2.10.000029	Data penggunaan dan pemanfaatan tanah yang teridentifikasi dan terinventarisasi di wilayah pesisir	Dokumen	Laporan mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah yang teridentifikasi dan terinventarisasi di wilayah pesisir	0	T	[2.10.15.7.01.0001] [2.10.15.7.01.0001]
24	2.10.000030	Data pengukuran	Dokumen	Laporan mengenai Pengukuran tanah ulayat dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	0	T	[2.10.07.1.01.0002] [2.10.07.2.01.0003]
25	2.10.000031	Data sempadan pantai yang teridentifikasi dan terinventarisasi	Dokumen	Laporan hasil identifikasi dan inventarisasi mengenai Sempadan Pantai	0	T	[2.10.15.7.01.0002] [2.10.15.7.01.0002]
26	2.10.000032	Data sengketa, konflik dan perkara	Dokumen	Sengketa : perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Konflik : perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas Mediasi penyelesaian sengketa dan konflik disesuaikan dengan jenis kasus pertanahan Inventarisasi dan mediasi merupakan rangkaian upaya penyelesaian sengketa oleh pemerintah daerah	0	Y	
27	2.10.000033	Data spasial (peta) batas tanah ulayat	Dokumen	Setelah dilakukan pengukutan terhadap batas-batas bidang Tanah Ulayan Kesatuan MHA yang telah ditetapkan, maka dilakukan pemetaan atas bidang tanah dalam peta pendaftaran tanah. Pengukuran dan pemetaan dilaksanakan sesuai dengan kaidan pengukuran dan pemetaan bidang tanah	0	T	[2.10.07.1.01.0001] [2.10.07.2.01.0001]
28	2.10.000034	Data tanah milik masyarakat miskin	Dokumen	Laporan hasil inevntarisasi tanah milik masyarakat miskin	0	T	[2.10.12.7.02.0001] [2.10.12.7.02.0001]
29	2.10.000035	Data tanah wilayah perbatasan yang teridentifikasi dan terinventarisasi	Dokumen	Laporan hasil identifikasi dan inventarisai mengenai tanah wilayah perbatasan	0	T	[2.10.15.7.01.0003] [2.10.15.7.01.0003]
30	2.10.000036	Data wilayah pulau terpencil yang teridentifikasi dan terinventarisasi	Dokumen	Laporan hasil identifikasi dan inventarisasi mengenai pulau terpencil	0	T	[2.10.15.7.01.0004] [2.10.15.7.01.0004]
31	2.10.000037	Data yuridis Objek Pengadaan Tanah	Dokumen	Data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah, paling kurang: a. nama, pekerjaan, dan alamat Pihak yang Berhak b. nomor induk kependudukan atau identitas diri lainnya Pihak yang Berhak c. bukti penguasaan dan/atau pemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah d. letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang e. status tanah dan dokumennya f. jenis penggunaan dan pemanfaatan g. pemilikan dan/atau penguasaan tanah, bangunan, dan/atau benda lain yang berkaitan dengan tanah h. pembebanan Hak Atas Tanah i. Ruang Atas dan Ruang Bawah Tanah	3 Dokumen	T	[2.10.05.1.01.0001] [2.10.05.2.01.0001] [2.10.05.2.01.0002]
32	2.10.000038	Dokumen bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten	Dokumen	Laporan penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten (terlampir)	0	Y	
33	2.10.000040	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	0	T	[2.10.06.1.01.0003] [2.10.06.2.01.0004]
34	2.10.000041	Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian izin membuka tanah	Dokumen	Laporan hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian izin membuka tanah	0	T	[2.10.09.2.01.0001]
35	2.10.000042	Dokumen kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengadaan tanah dan fasilitasi percepatan pengadaan tanah untuk PPSN	Dokumen	Laporan hasil kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengadaan tanah dan fasilitasi percepatan pengadaan tanah untuk PPSN	0	T	[2.10.03.7.02.0001]

36	2.10.000043	Dokumen kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi pertanahan	Dokumen	Laporan hasil kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi pertanahan	0	Y	
37	2.10.000044	Dokumen kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara	Dokumen	Laporan hasil kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara	0	T	[2.10.09.2.01.0002]
38	2.10.000045	Dokumen koordinasi dan sinkronisasi untuk menetapkan zona nilai tanah	Dokumen	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi untuk menetapkan zona nilai tanah	0	T	[2.10.10.1.01.0003] [2.10.10.2.01.0002]
39	2.10.000046	Dokumen koordinasi penetapan ganti kerugian tanah absente	Dokumen	Sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian dan Harga Tanah Kelebihan Maksimum dan Guntai (Absentee) Obyek Retribusi Landreform	0	T	[2.10.06.1.02.0002] [2.10.06.2.02.0002]
40	2.10.000047	Dokumen koordinasi penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum	Dokumen	Sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Ganti Kerugian dan Harga Tanah Kelebihan Maksimum dan Guntai (Absentee) Obyek Retribusi Landreform	0	T	[2.10.06.1.02.0002] [2.10.06.2.02.0002]
41	2.10.000049	Dokumen pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan pertanahan	Dokumen	penguatan kapasitas kelembagaan pertanahan	0	T	[2.10.14.7.01.0002]
42	2.10.000050	Dokumen pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas lembaga pertanahan kasultanan dan kadipaten	Dokumen	peningkatan kapasitas lembaga pertanahan kasultanan dan kadipaten	0	Y	
43	2.10.000051	Dokumen pelaksanaan survei dan pengukuran tanah instansi pemerintah dan pembuatan peta lokasi tanah pemerintah	Dokumen	Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	0	Y	
44	2.10.000052	Dokumen pemanfaatan sistem informasi manajemen pertanahan (SIMTANAH)	Dokumen	SIMTANAH menjadi bagian dari Decision Support Sistem dan Perencanaan Pembangunan	0	Y	
45	2.10.000053	Dokumen pembinaan kerjasama pendidikan pertanahan	Dokumen	Pelaksanaan Pembinaan Kerjasama Pendidikan Pertanahan	0	T	[2.10.14.7.01.0001]
46	2.10.000054	Dokumen pemeliharaan Dokumen pertanahan	Dokumen	Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dokumen pertanahan sesuai ketentuan perundang-undangan	0	T	
47	2.10.000055	Dokumen penatausahaan tanah kasultanan dan tanah kadipaten	Dokumen	Penatausahaan tanah kasultanan dan kadipaten dilaksanakan dengan tujuan dalam rangka pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang - Undang tentang keistimewaan DIY	0	Y	
48	2.10.000056	Dokumen pencatatan dalam daftar tanah	Dokumen	Laporan hasil pencatatan dalam daftar tanah	0	T	[2.10.07.1.01.0002] [2.10.07.2.01.0003]
49	2.10.000057	Dokumen pengawasan tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah desa	Dokumen	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	0	Y	
50	2.10.000059	Dokumen peningkatan kapasitas pengelolaan sistem informasi manajemen pertanahan (SIMTANAH)	Dokumen	Pelayanan dilaksanakan menggunakan Sistem Informasi	0	T	[2.10.16.7.01.0001]
51	2.10.000060	Dokumen perencanaan konsolidasi tanah	Dokumen	Perencanaan Konsolidasi Tanah adalah proses pemilihan lokasi untuk diusulkan dan ditetapkan sebagai lokasi yang memenuhi kriteria Konsolidasi Tanah.	0	T	[2.10.10.1.01.0002] [2.10.10.2.01.0003]
52	2.10.000062	Dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT)	Dokumen	Data hasil Inventarisasi Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah. Data yang dihimpun merupakan data pada Tahap Pra Perencanaan, Tahapan Perencanaan dan Tahapan Persiapan. Pada Tahap Pra Perencanaan didasarkan pada dokumen perencanaan dari Instansi yang Memerlukan Tanah (RPJMD, Renstrada, DIPA, RKPD). Pada Tahap Perencanaan didasarkan pada Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah. Pada Tahap Persiapan didasarkan pada Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dan Surat Keputusan Penetapan Lokasi		Y	[2.10.03.1.01.0001]
53	2.10.000063	Dokumen Rencana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	Dokumen	Pelaksanaan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah	0	T	[2.10.05.1.01.0001] [2.10.05.1.01.0002] [2.10.05.2.01.0002]
54	2.10.000064	Dokumen rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah	Dokumen	perencanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah	0	Y	
55	2.10.000065	Dokumen rencana program/kegiatan urusan pertanahan	Dokumen	Penyusunan rencana program/kegiatan urusan pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	0	Y	

56	2.10.000066	Dokumen sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka kegiatan redistribusi tanah	Dokumen	Salah satu tahapan pelaksanaan redistribusi tanah adalah Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL). Pada tahap Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL), peran bupati/walikota adalah sebagai ketua PPL.	0	T	[2.10.06.2.01.0003]
57	2.10.000067	Dokumen survei dan pengukuran tana hak milik masyarakat	Dokumen	Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat	0	Y	
58	2.10.000068	Dokumen survei dan pengukuran tanah HGU/HGB	Dokumen	Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB	0	Y	
59	2.10.000070	Keputusan pemberian hak atas tanah objek konsolidasi tanah	Dokumen	Keputusan pemberian hak atas tanah objek konsolidasi tanah	0	T	[2.10.10.1.01.0002] [2.10.10.2.01.0003]
60	2.10.000071	Keputusan penegasan tanah objek konsolidasi tanah	Dokumen	Penegasan tanah sebagai objek Konsolidasi Tanah dilakukan untuk memberikan kewenangan kepada Tim Perencana/Pelaksana dalam menata kembali bidang tanah sesuai desain Konsolidasi Tanah	0	T	[2.10.10.1.01.0002] [2.10.10.2.01.0003]
61	2.10.000072	Laporan koordinasi dalam rangka penyelesaian tanah kosong	Laporan	Koordinasi dalam penyelesaian permasalahan tanah kosong yang berada dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota atau lintas Daerah Kabupaten/Kota	0	T	[2.10.08.1.01.0001] [2.10.08.2.01.0001]
62	2.10.000073	Laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	Laporan	Dalam PP 16 Tahun 2004 tentang penatagunaan tanah, Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Dalam UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, salah satu kewenangan dibidang pertanahan yang diserahkan ke daerah adalah perencanaan penggunaan tanah.	0	T	[2.10.10.1.01.0001] [2.10.10.2.01.0001]
63	2.10.000074	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan urusan pertanahan	Dokumen	Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	0	Y	
64	2.10.000075	Laporan survei batas tanah ulayat	Laporan	Tanah Ulayat adalah tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah. Tanah ulayat dapat ditetapkan apabila MHA telah diakui keberadaannya melalui keputusan kepala daerah. Sebelum penetapan tanah ulayat perlu dilaksanakan survei dan pemetaan batas	0	T	[2.10.07.1.01.0001] [2.10.07.2.01.0001]
65	2.10.000076	layanan bantuan hukum perkara pertanahan	Dokumen	1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. 2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. 3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. 4. Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	0	Y	
66	2.10.000077	Lembar persetujuan penyusunan desain konsolidasi tanah	Dokumen	Desain Konsolidasi Tanah yang disusun oleh pemangku kepentingan harus mendapat verifikasi dan persetujuan yang dituangkan dalam Lembar Persetujuan dari Ketua Tim Perencana/Pelaksana	0	T	[2.10.10.1.01.0002] [2.10.10.2.01.0003]
67	2.10.000078	Nomor identifikasi bidang tanah	Dokumen	Surat permohonan penomoran identifikasi bidang tanah	0	T	[2.10.07.1.01.0002] [2.10.07.2.01.0003]
68	2.10.000080	Penetapan nilai oleh tim Penilai	Dokumen	Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan nilai oleh tim Penilai	0	T	[2.10.05.1.01.0001] [2.10.05.2.01.0001] [2.10.05.2.01.0002]
69	2.10.000081	Perda tentang RTRW Provinsi	Dokumen	Bukan Urusan Pertanahan	0	T	[2.10.10.2.01.0001]
70	2.10.000082	Peta Bidang Tanah	Dokumen	Lembaran peta bidang tanah	0	T	[2.10.05.1.01.0001] [2.10.10.1.01.0002] [2.10.05.2.01.0001] [2.10.05.2.01.0002] [2.10.10.2.01.0003]

71	2.10.000083	Peta desain konsolidasi tanah	Dokumen	Desain Konsolidasi Tanah yang disusun oleh pemangku kepentingan harus mendapat verifikasi dan persetujuan yang dituangkan dalam Lembar Persetujuan dari Ketua Tim Perencana/Pelaksana	0	T	[2.10.10.1.01.0002] [2.10.10.2.01.0003]
72	2.10.000084	Peta lokasi HGU/HGB	Dokumen	Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB	0	Y	
73	2.10.000085	Peta lokasi tanah hak milik masyarakat	Dokumen	Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat	0	Y	
74	2.10.000086	Rencana aksi	Dokumen	Catatan resmi pelaksanaan rencana aksi dalam pelaksanaan konsolidasi tanah	0	T	[2.10.10.1.01.0002] [2.10.10.2.01.0003]
75	2.10.000088	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Subyek Penerima Tanah	Dokumen	Pelaksanaan penetapan daftar subyek untuk diberikan santunan tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	T	[2.10.05.2.01.0001]
76	2.10.000089	Surat pengaduan (berasal dari perorangan/warga, kelompok masyarakat, badan hukum, instansi pemerintah atau unit teknis Kementerian, Kanwil, Kantah)	Dokumen	Sengketa : perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Konflik : perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas Mediasi penyelesaian sengketa dan konflik disesuaikan dengan jenis kasus pertanahan Inventarisasi dan mediasi merupakan rangkaian upaya penyelesaian sengketa oleh pemerintah daerah	0	T	[2.10.04.1.01.0001] [2.10.04.2.01.0001]
77	2.10.000091	Surat tanda bukti hak atas tanah	Surat	Semua bidang tanah yang telah ditetapkan keputusan pemberian haknya diterbitkan Surat Tanda Bukti Hak atas Tanah termasuk TP dan/atau TUB.	0	T	[2.10.10.1.01.0002] [2.10.10.2.01.0003]
78	2.10.000098	Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	Dokumen resmi yang berisi catatan atau laporan singkat tentang suatu kejadian, pertemuan, atau proses yang telah terjadi dalam Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	T	[2.10.04.2.01.0003]
79	2.10.000103	Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Berita Acara	hasil Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong berupa berita acara	0	T	[2.10.08.2.02.0003]
80	2.10.000105	Berita Acara Hasil Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	Dokumen resmi yang berisi catatan atau laporan singkat tentang suatu kejadian, pertemuan, atau proses yang telah terjadi dalam Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota berupa Berita Acara.	0	T	[2.10.17.7.01.0004]
81	2.10.000116	Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	Dokumen resmi yang berisi catatan atau laporan singkat tentang suatu kejadian, pertemuan, atau proses yang telah terjadi dalam Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota berupa Berita Acara.	0	T	[2.10.17.7.01.0003]
82	2.10.000118	Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Hasil Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berupa Dokumen Data.	0	T	[2.10.17.7.01.0001]
83	2.10.000120	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan	Layanan	Layanan Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan	0	T	[2.10.17.7.01.0002]
84	2.10.000142	Jumlah Kebijakan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir Yang Disusun	Dokumen	hasil Penyusunan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir berupa dokumen	0	T	[2.10.07.3.01.0004] [2.10.07.4.01.0004]
85	2.10.000144	Laporan inventarisasi data sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	Laporan	hasil Inventarisasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota. berupa laporan	0	T	[2.10.07.3.02.0001] [2.10.07.4.02.0001]
86	2.10.000145	Jumlah Berita Acara Mediasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	Berita Acara	hasil Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota berupa berita acara	0	T	[2.10.07.3.02.0002] [2.10.07.4.02.0002]
87	2.10.000148	Jumlah Penetapan Hak atas tanah ulayat	Dokumen	hasil Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas bidang tanah adat/Ulayat verupa dokumen	0	T	[2.10.07.3.03.0001] [2.10.07.4.03.0001]
88	2.10.000149	Jumlah NSPK terkait pelepasan Hak	Dokumen	hasil Penyusunan peraturan atau petunjuk teknis terkait pelepasan hak berupa dokumen	0	T	[2.10.07.3.04.0001] [2.10.07.4.04.0001]
89	2.10.000150	Laporan identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA	Laporan	hasil Identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari Masyarakat Hukum Adat untuk diterbitkan Hak Milik berupa laporan	0	T	[2.10.07.3.04.0002] [2.10.07.4.04.0002]

90	2.10.000152	Jumlah MOU/Perjanjian Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	hasil Penyusunan Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat berupa dokumen	0	T	[2.10.07.3.05.0001] [2.10.07.4.05.0001]
91	2.10.000153	Jumlah tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat	Sertifikat	Pemberian tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat berupa sertifikat	0	T	[2.10.07.3.06.0001] [2.10.07.4.06.0001]
92	2.10.000154	Jumlah Laporan hasil koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan Yang Dilaksanakan	Dokumen	hasil Koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan berupa dokumen	0	T	[2.10.07.3.07.0001] [2.10.07.4.07.0001]
93	2.10.000155	Jumlah laporan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota	Dokumen	hasil Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota berupa dokumen	0	T	[2.10.07.3.07.0002] [2.10.07.4.07.0002]
94	2.10.000156	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka menyediakan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum Yang Dilaksanankan	Dokumen	hasil Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi Terkait Penyediaan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum berupa dokumen	0	T	[2.10.07.3.08.0001] [2.10.07.4.08.0001]
95	2.10.000157	Laporan inventarisasi data masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota.	Laporan	hasil Inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota berupa laporan	0	T	[2.10.07.3.09.0001] [2.10.07.4.09.0001]
96	2.10.000158	Jumlah Berita Acara Fasilitasi dan Mediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Berita Acara	hasil Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota berupa berita acara	0	T	[2.10.07.3.09.0002] [2.10.07.4.09.0002]
97	2.10.000159	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dokumen	Hasil Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota berupa dokumen	0	T	[2.10.06.2.02.0003]
98	2.10.000160	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dokumen	Hasil Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota berupa dokumen	0	T	[2.10.06.2.02.0004]
99	2.10.000161	Laporan inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi	Laporan	hasil Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi berupa laporan	0	T	[2.10.07.3.10.0001] [2.10.07.4.10.0001]
100	2.10.000162	Laporan pemanfaatan tanah adat lintas kabupaten/kota	Laporan	hasil Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/kota berupa laporan	0	T	[2.10.07.3.10.0002] [2.10.07.4.10.0002]
101	2.10.000163	Data ttanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota Yang di Inventarisasi dan Identifikasi	Laporan	hasil Inventarisasi dan identifikasi tanah adat/ulayat di di Kabupaten/Kota berupa laporan	0	T	[2.10.07.3.12.0001] [2.10.07.4.12.0001]
102	2.10.000164	Data tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota yang dilakukan Pemetaan dan Registrasi/Pendaftaran	Laporan	hasil Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota berupa laporan	0	T	[2.10.07.3.12.0002] [2.10.07.4.12.0002]
103	2.10.000165	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen	Hasil Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten berupa Dokumen		Y	[2.10.11.5.01.0001]
104	2.10.000166	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	Dokumen	Hasil Pemeliharaan Dokumen Pertanahan berupa dokumen	0	T	[2.10.11.5.01.0002]
105	2.10.000167	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen	Hasil Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten berupa dokumen		Y	[2.10.11.5.01.0003]
106	2.10.000168	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Dokumen	Hasil Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa berupa dokumen		Y	[2.10.11.5.01.0004]
107	2.10.000169	Jumlah Dokumen Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Dokumen	Hasil Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan berupa dokumen	0	T	[2.10.11.5.01.0005]
108	2.10.000170	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Laporan	Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan berupa Laporan	0	T	[2.10.11.5.01.0006]
109	2.10.000171	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengembangan dan Pemanfataan Sistem Informasi Pertanahan	Dokumen	Hasil Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan berupa Dokumen	0	T	[2.10.11.5.01.0007]
110	2.10.000172	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen	Hasil Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten berupa Dokumen	0	T	[2.10.11.5.02.0001]
111	2.10.000173	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Berita Acara	Hasil Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa berupa Berita Acara	0	T	[2.10.11.5.02.0002]

112	2.10.000174	Data Hasil Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan	Dokumen	Hasil Penyusunan Dokumentasi Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan berupa Dokumen	0	T	[2.10.11.5.02.0003]
113	2.10.000175	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	Unit	Hasil Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan berupa Unit	0	T	[2.10.11.5.03.0001]
114	2.10.000179	Dokumen Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Dokumen	Hasil kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) berupa Dokumen	0	T	[2.10.16.7.01.0001]
115	2.10.000180	Dokumen Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Dokumen	Hasil Pelaksanaan Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) berupa Dokumen	0	T	[2.10.16.7.01.0002]
116	2.10.000198	Dokumen Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	Dokumen	Hasil Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda berupa Dokumen	0	T	[2.10.13.7.01.0001]
117	2.10.000199	Dokumen Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB	Dokumen	Dokumen Hasil Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB	0	T	[2.10.13.7.01.0002]
118	2.10.000201	Dokumen Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat	Dokumen	Dokumen Hasil Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat Gampong	0	T	[2.10.13.7.01.0003]
119	2.10.000202	Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Disediakan	Dokumen	Dokumen Hasil Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota	0	T	[2.10.03.3.01.0001] [2.10.03.4.01.0001]
120	2.10.000203	Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	Dokumen	Dokumen Hasil Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	0	T	[2.10.03.3.03.0001] [2.10.03.4.03.0001]
121	2.10.000206	Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)	Dokumen	Dokumen Hasil Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah	0	T	[2.10.03.7.01.0001]
122	2.10.000208	Laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah	Laporan	Laporan Hasil Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	T	[2.10.05.2.01.0003]
123	2.10.000209	Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota berupa Laporan Koordinasi dan Fasilitasi	0	T	[2.10.05.2.01.0007]
124	2.10.000210	Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	Laporan	Laporan Hasil Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	T	[2.10.05.2.01.0004]
125	2.10.000211	Laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	Laporan	Laporan hasil Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	T	[2.10.05.2.01.0005]
126	2.10.000212	Dana Kerohiman merupakan dana santunan yang diberikan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah kepada Pihak yang Berhak Menerima Bantuan Dana Kerohiman dalam rangka pembangunan di atas Tanah Musnah. Dana dimaksud diberikan apabila adanya Rekonstruksi atau reklamasi yang dilakukan oleh Pernerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau pihak lain diatas tanah musnah dimaksud.	Laporan	Hasil Penyelesaian santunan tanah musnah pada Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berupa Laporan Dana Kerohiman	0	T	[2.10.05.2.01.0006]
127	2.10.000214	Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Berita Acara	Dokumen resmi yang berisi catatan atau laporan singkat tentang suatu kejadian, pertemuan, atau proses yang telah terjadi dari hasil Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0	T	[2.10.06.2.01.0005]
128	2.10.000215	Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan	Laporan hasil Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.	0	T	[2.10.06.2.01.0007]
129	2.10.000216	Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen hasil Inventarisasi data Subjek Redistribusi Tanah	0	T	[2.10.06.2.01.0008]
130	2.10.000217	Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota	0	T	[2.10.06.3.01.0003] [2.10.06.4.01.0003]
131	2.10.000218	Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Hasil Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota	0	T	[2.10.06.3.01.0003] [2.10.06.4.01.0003]

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2025	Disabled	Info Sub Kegiatan
6	1.03.000010	Bangunan Gedung	Bangunan Gedung	Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan dan kegiatan usaha	0	T	[1.03.08.2.01.0023]
7	1.03.000011	Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.	0	T	[1.03.08.2.01.0016]
8	1.03.000013	Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.	0	T	[1.03.08.2.01.0015]
9	1.03.000015	Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.	0	Y	
10	1.03.000018	Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung Negara	Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara	53 Bangunan Gedung Negara	T	[1.03.08.2.01.0022]
11	1.03.000019	Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung Negara	Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara	4 Bangunan Gedung Negara	T	[1.03.08.2.01.0020]
12	1.03.000021	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung	Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara	0	T	[1.03.08.2.01.0017] [1.03.08.2.01.0018] [1.03.08.2.01.0021]
13	1.03.000024	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota	Bantuan Teknis	&Pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara dilakukan terhadap: a. pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung b. ketaatan penerapan peraturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung negara di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota serta melihat kinerja pemerintah daerah provinsi dalam memantau penerapan peraturan perundang-undangan terkait bangunan gedung negara di kabupaten atau c. pelaksanaan kebijakan bangunan gedung negara nasional, baik pada tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau d. pelaksanaan pembangunan bangunan gedung e. pendaftaran Bangunan Gedung dan/atau f. Standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan.&	0	Y	
14	1.03.000026	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bantuan Teknis	&Pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara dilakukan terhadap: a. pemberian bantuan teknis pembangunan bangunan gedung b. ketaatan penerapan peraturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung negara di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota serta melihat kinerja pemerintah daerah provinsi dalam memantau penerapan peraturan perundang-undangan terkait bangunan gedung negara di kabupaten atau c. pelaksanaan kebijakan bangunan gedung negara nasional, baik pada tingkat daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau d. pelaksanaan pembangunan bangunan gedung e. pendaftaran Bangunan Gedung dan/atau f. Standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan.&	0	T	[1.03.08.2.01.0020]
85	1.03.000191	Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Unit	Flood Forecasting and Warning System (FFWS) atau sistem peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Kegiatan ini dapat meliputi pembangunan instrumen yang dapat digunakan untuk peramalan debit banjir secara real time sehingga dapat dilakukan peringatan dini untuk meminimalisir kerugian dan korban jiwa. Instrumen FFWS yang dibangun meliputi pembangunan pos hidrologi, pos pemantauan debit air, termasuk pembangunan pusat kendali. Jumlah FFWS yang dibangun	0	T	[1.03.02.1.01.0019] [1.03.02.2.01.0019]
87	1.03.000193	Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota	Forum Penataan Ruang	Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang Forum Penataan Ruang kabupaten/kota	0	T	[1.03.12.1.04.0004] [1.03.12.2.04.0004]

91	1.03.000212	Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Liter/Detik	Kapasitas unit produksi merupakan kapasitas sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi an/atau biologi, meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum dengan satuan L/detik	105 Liter/Detiik	T	[1.03.03.1.01.0017] [1.03.03.1.01.0018] [1.03.03.2.01.0028]
92	1.03.000213	Kapasitas Unit Produksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	Kapasitas unit produksi merupakan kapasitas sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi an/atau biologi, meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum dengan satuan L/detik	105 Liter/Detiik	T	[1.03.03.1.01.0014] [1.03.03.2.01.0026]
93	1.03.000214	Kasus Pelanggaran Bidang Penataan Ruang	Kasus	Laporan kasus pelanggaran bidang penataan ruang hasil Audit Tata Ruang di Kabupaten/Kota	0	T	[1.03.12.1.04.0002] [1.03.12.1.04.0008] [1.03.12.3.04.0009] [1.03.12.4.04.0009] [1.03.12.2.04.0002] [1.03.12.2.04.0007]
94	1.03.000215	Kasus Penataan Ruang yang ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Kasus	Laporan Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang di Kabupaten/Kota	0	T	[1.03.12.1.04.0003] [1.03.12.2.04.0003]
95	1.03.000216	Kasus yang diselesaikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Kasus	Laporan Kasus yang diselesaikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang di Kabupaten/Kota	0	T	[1.03.12.1.04.0003] [1.03.12.2.04.0003]
96	1.03.000219	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kegiatan	Laporan Hasil Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang di Kabupaten/Kota	0	T	[1.03.12.1.04.0003] [1.03.12.2.04.0003]
101	1.03.000236	Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten/Kota yang difasilitasi	0	T	[1.03.02.2.01.0075]
102	1.03.000237	Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Lembaga	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang disusun	0	T	[1.03.02.1.01.0075] [1.03.02.1.01.0090] [1.03.02.2.01.0078]
103	1.03.000239	Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari lembaga penyelenggaraan SPAM dan asosiasi penyelenggara SPAM	0	Y	[1.03.03.1.01.0026] [1.03.03.2.01.0023]
107	1.03.000246	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing	KM	Panjang perkuatan tebing yang dibangun, strukturnya dapat berupa timbunan tanah, kayu, pasangan batu, dan/atau beton	0,403 KM	T	[1.03.02.1.01.0118] [1.03.02.2.01.0109]
108	1.03.000247	Panjang Breakwater	KM	Bangunan sejajar pantai yang berfungsi untuk meredam/memecah daya rusak gelombang/ombak sehingga garis pantai dapat terlindungi dari abrasi. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru. Panjang breakwater yang dibangun	0	T	[1.03.02.1.01.0086] [1.03.02.1.01.0115] [1.03.02.1.01.0032] [1.03.02.2.01.0102] [1.03.02.2.01.0032] [1.03.02.2.01.0106]
109	1.03.000249	Panjang Jalan	KM	Panjang Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.	0	T	[1.03.10.1.01.0043] [1.03.10.1.01.0042] [1.03.10.1.01.0040] [1.03.10.1.01.0035] [1.03.10.1.01.0031] [1.03.10.1.01.0030] [1.03.10.1.01.0038] [1.03.10.1.01.0033] [1.03.10.1.01.0028] [1.03.10.1.01.0024] [1.03.10.2.01.0043] [1.03.10.2.01.0032] [1.03.10.2.01.0037] [1.03.10.2.01.0041] [1.03.10.2.01.0033] [1.03.10.2.01.0044] [1.03.10.2.01.0034] [1.03.10.2.01.0046] [1.03.10.2.01.0036] [1.03.10.2.01.0030]
110	1.03.000251	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	KM	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dibangun	0	T	[1.03.02.1.02.0002] [1.03.02.2.02.0002]
112	1.03.000254	Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB	Orang	Penduduk terdampak dan berisiko pada kondisi KLB (Kejadian Luar Biasa) adalah mereka yang terkena dampak langsung atau memiliki risiko tinggi terkena penyakit atau kondisi kesehatan yang menjadi KLB. KLB adalah situasi di mana suatu penyakit menyebar dengan cepat dan meluas di wilayah tertentu atau populasi tertentu melebihi angka yang diharapkan.	0	Y	[1.02.02.1.02.0002] [1.02.02.2.02.0013]
113	1.03.000255	Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berPotensi bencana	Orang	Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah mereka yang mengalami dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka sebagai akibat dari bencana alam atau situasi darurat lainnya. Krisis kesehatan akibat bencana dapat melibatkan berbagai jenis bencana, seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, kekeringan, badai), bencana teknologi (kecelakaan industri, kebocoran nuklir), pandemi penyakit, atau krisis kesehatan lainnya.	0	T	[1.02.02.1.02.0001] [1.03.02.1.01.0081] [1.03.02.1.01.0097] [1.03.02.1.01.0098] [1.03.02.1.01.0099] [1.02.02.2.02.0007] [1.02.02.2.02.0014] [1.03.02.2.01.0081] [1.03.02.2.01.0099] [1.03.02.2.01.0113] [1.03.02.2.01.0122]
114	1.03.000257	Panjang Sungai	KM	Panjang sungai yang dioperasikan dan dipelihara	0	T	[1.03.02.1.01.0101] [1.03.02.2.01.0073]
115	1.03.000258	Panjang Tanggul	KM	Tanggul Sungai adalah bangunan yang berada di daerah sempadan sungai yang berfungsi sebagai penahan aliran atau mencegah banjir Panjang tanggul yang dioperasikan dan dipelihara	0	T	[1.03.02.1.01.0107] [1.03.02.2.01.0080]
118	1.03.000272	Pengguna Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/Kota	Orang	Bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan adalah bangunan gedung cagar budaya yang melalui upaya dinamis, dipertahankan keberadaan dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.	0	T	[1.03.08.2.01.0016]

121	1.03.000279	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	PPNS	Laporan jumlah Penyidik Pegawai Negeri ipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	0	T	[1.03.12.1.04.0003] [1.03.12.2.04.0003]
137	1.03.000307	Rumah Deret	Rumah		0	Y	[1.03.08.2.01.0011]
138	1.03.000309	Rumah Tangga	Rumah Tangga		0	T	[1.03.07.1.01.0022] [1.03.07.1.01.0009] [1.03.03.2.01.0022] [1.03.05.2.01.0006] [1.03.05.2.01.0033] [1.03.05.2.01.0039] [1.03.07.2.01.0006] [1.03.07.2.01.0033]
139	1.03.000311	Rumah Tinggal Tunggal	Rumah		0	Y	[1.03.08.2.01.0011]
140	1.03.000315	Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Unit	Jumlah sarana pendukung sistem drainase perkotaan yang dibangun	2 Unit	T	[1.03.06.1.01.0011] [1.03.06.2.01.0026]
141	1.03.000316	Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Unit	Jumlah sarana pengangkutan lumpur hasil olahan Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sarana yang dimaksud berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.	1 Unit	T	[1.03.07.1.01.0020] [1.03.05.2.01.0037]
143	1.03.000336	Stasiun Pompa Banjir	Unit	Stasiun pompa yang berfungsi untuk menguras atau mengendalikan kelebihan air untuk dialirkan ke sungai atau ke laut. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru. Jumlah stasiun pompa banjir yang dibangun	0	T	[1.03.02.1.01.0013] [1.03.02.2.01.0013]
151	1.03.000357	Terowongan/Tunnel	Terowongan/Tunnel	Bangunan jalan yang melintas di bawah permukaan tanah dengan persyaratan teknis sebagai berikut: a. Memiliki ruang yang memadai untuk dapat menampung semua fasilitas terowongan b. Dilengkapi trotoar untuk pejalan kaki dalam keadaan darurat dan untuk akses bagi petugas pemeliharaan	0	T	[1.03.10.1.01.0034] [1.03.10.2.01.0045]
152	1.03.000364	Underpass	Underpass	jalan tidak sebidang lebih rendah yang melintasi bagian bawah jalan lain untuk menghindari daerah/kawasan dengan kemacetan lalu lintas atau lokasi yang dilewati jalan rel sehingga meningkatkan keselamatan lalu lintas dan efisiensi, mengatasi hambatan karena konflik dipersimpangan, dll	0	T	[1.03.10.1.01.0037] [1.03.10.2.01.0047]
154	1.03.000373	Jumlah Tim Profesi Ahli (TPA)	Orang	&Jumlah TPA dari masing-masing unsur terdiri dari: Akademisi = 422 Profesi = 1075 Pakar =117 Jumlah TPA = 1614 TPA&	2 Orang	T	[1.03.08.2.01.0023] [1.03.08.1.01.0024] [1.03.08.2.01.0025]
155	1.03.000374	Jumlah Penilik	Orang	Jumlah Penilik yang sudah ada SK sebesar 4414 Penilik dari Kabupaten/Kota yang sudah mengimplementasikan SIMBG	3 Orang	T	[1.03.08.2.01.0023] [1.03.08.1.01.0024] [1.03.08.2.01.0025]
156	1.03.000375	Jumlah Tim Penilai Teknis (TPT)	Orang	Jumlah TPT yang sudah ada SK sebesar 3746 TPT dari Kabupaten/Kota yang sudah mengimplementasikan SIMBG	2 Orang	T	[1.03.08.2.01.0023] [1.03.08.1.01.0024]
157	1.03.000378	Fasilitas Penunjang TPA di Kawasan Strategis Kab/Kota	Paket	Fasilitas penunjang TPA adalah alat berat yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah di TPA	0	T	[1.03.07.2.01.0007] [1.03.07.2.01.0008] [1.03.07.2.01.0009] [1.03.07.2.01.0012] [1.03.07.2.01.0015] [1.03.07.2.01.0019]
158	1.03.000379	Fasilitas Penunjang TPS	Paket	Fasilitas penunjang TPS adalah alat berat yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah di TPS		Y	[1.03.07.1.01.0005]
159	1.03.000384	Jumlah Arsitek yang terdaftar	Orang	Jumlah Arsitek terdaftar adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh dewan untuk melakukan Praktik Arsitek.	0	T	[1.03.08.1.01.0017]
160	1.03.000386	Jumlah Asesor Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Orang	Asesor adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk melakukan dan menilai uji kompetensi pada jenis dan kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis.	0	T	[1.03.11.2.01.0012]
161	1.03.000387	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi	Badan Usaha	Badan Usaha adalah badan usaha jasa konstruksi atau badan usaha rantai pasok serta usaha orang perseorangan		T	[1.03.11.2.01.0011]
162	1.03.000388	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Badan Usaha	Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota adalah 1. badan usaha jasa konstruksi atau badan usaha rantai pasok serta usaha orang perseorangan yang sedang bekerja menggunakan biaya APBD Kabupaten/kota dan/atau yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usaha 2. badan usaha jasa konstruksi atau badan usaha rantai pasok serta usaha orang perseorangan yang berdomisili di wilayah kewenangannya	196 Badan Usaha	T	[1.03.11.2.04.0007]
163	1.03.000390	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya yang ditata	Kawasan	1. Penataan pada Kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan (Prioritas utama pada suboutput ini adalah cagar budaya nasional yang ditetapkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan (sk mendikbud)) 2. Item yang disentuh dalam hal ini adalah Kawasan pendukung pada bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya	0	T	[1.03.09.1.01.0008] [1.03.09.2.01.0008]
164	1.03.000391	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Untuk memastikan proses pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran, dengan cara pendampingan/pengawasan terhadap pelaksana kegiatan agar mengikuti kaidah penataan/rehabilitasi bangunan gedung atau kawasan cagar budaya	0	Y	[1.03.09.1.01.0010] [1.03.09.2.01.0009]
165	1.03.000392	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata yang ditata	Kawasan	Kegiatan penataan bangunan pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional dilakukan dalam rangka pemenuhan infrastruktur bangunan Gedung dan penataan bangunan sesuai indikasi program yang telah tercantum dalam lampiran pp 50 tahun 2011	0	Y	[1.03.09.1.01.0008] [1.03.09.2.01.0008]

166	1.03.000393	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Untuk memastikan proses pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran, dengan cara pendampingan/pengawasan terhadap pelaksana kegiatan	0	Y	[1.03.09.1.01.0010] [1.03.09.2.01.0009]
167	1.03.000394	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang ditata	Kawasan	Kegiatan penataan bangunan pada Kawasan perkotaan dilakukan dalam rangka pemenuhan infrastruktur sarana prasarana publik guna pemenuhan standar pelayanan perkotaan (spp) sesuai permendagri nomor 57 tahun 2010 pada bidang penataan bangunan dan lingkungan	0	Y	[1.03.09.1.01.0008] [1.03.09.2.01.0008]
168	1.03.000395	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Untuk memastikan proses pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran, dengan cara pendampingan/pengawasan terhadap pelaksana kegiatan	0	Y	[1.03.09.1.01.0010] [1.03.09.2.01.0009]
169	1.03.000396	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis lainnya yang ditata	Kawasan	Kegiatan penataan bangunan pada Kawasan Strategis Nasional dilakukan dalam rangka pemenuhan infrastruktur sarana prasarana publik guna pemenuhan standar pelayanan perkotaan (spp)	0	Y	[1.03.09.1.01.0008] [1.03.09.2.01.0008]
170	1.03.000397	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Untuk memastikan proses pembangunan sesuai dengan rencana dan anggaran, dengan cara pendampingan/pengawasan terhadap pelaksana kegiatan	0	Y	[1.03.09.1.01.0010] [1.03.09.2.01.0009]
171	1.03.000398	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi	Bangunan Gedung Cagar Budaya	Belum tersediannya proses penyelenggaraan BGCB didalam SIMBG dan masih dalam tahap pengembangan sistem	0	T	[1.03.08.2.01.0015]
172	1.03.000399	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	Bangunan Gedung Cagar Budaya	&Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCG) adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap banguna gedung yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.&	0	T	[1.03.08.2.01.0015]
173	1.03.000400	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Bangunan Gedung Cagar Budaya	&Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB) adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya. Kajian identifikasi meliputi: a. b. identifikasi nilai penting dan arti khusus c. pendataan dan penilaian kondisi fisik dan d. studi kelayakan Pelestarian BGCB.	0	T	[1.03.08.2.01.0015]
174	1.03.000401	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi	Bangunan Gedung Cagar Budaya	&Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB) adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya. Kajian identifikasi meliputi: a. b. identifikasi nilai penting dan arti khusus c. pendataan dan penilaian kondisi fisik dan d. studi kelayakan Pelestarian BGCB. &		Y	[1.03.08.1.01.0014]
175	1.03.000404	Jumlah Bangunan Gedung Negara	Bangunan Gedung Negara	Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah Bangunan Gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pemerintah	0	T	[1.03.08.1.01.0018] [1.03.08.2.01.0022]
176	1.03.000405	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang sudah terdaftar dengan dibuktikan Huruf Daftar Nomor (HDNo) sebagai pencatatan/inventarisasi Bangunan Gedung Negara yang dilaksanakan untuk tertib administrasi	0	T	[1.03.08.1.01.0015] [1.03.08.2.01.0014]
177	1.03.000406	Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung	Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, danf atau prasarana dan saranannya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung	0	T	[1.03.08.2.01.0018]
178	1.03.000407	Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dirawat	Bangunan Gedung	Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi.	5 Bangunan Gedung	T	[1.03.08.2.01.0018]
179	1.03.000409	Jumlah Bangunan Gedung ntuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dirawat	Bangunan Gedung	Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap laik fungsi.	0	T	[1.03.08.1.01.0020]
180	1.03.000411	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Bangunan Gedung	Pengubahsuaian adalah upaya penyesuaian kinerja Bangunan Gedung agar memenuhi standar teksnis Bangunan Gedung.	0	T	[1.03.08.2.01.0017]
181	1.03.000412	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dipelihara	Bangunan Gedung	Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.		T	[1.03.08.1.01.0020]
182	1.03.000413	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	Bangunan Gedung	Pengubahsuaian adalah upaya penyesuaian kinerja Bangunan Gedung agar memenuhi standar teksnis Bangunan Gedung.	0	T	[1.03.08.1.01.0016] [1.03.08.2.01.0021]

183	1.03.000414	Jumlah Bangunan Konstruksi	Unit	Bangunan Konstruksi merupakan produk konstruksi baik bangunan gedung maupun bangunan sipil yang berada di wilayah kewenangannya dengan sumber dana APBD Kabupaten/Kota dan/atau yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usaha	0	T	[1.03.11.2.04.0006]
184	1.03.000415	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota	Unit	Bangunan Konstruksi kabupaten/Kota merupakan produk konstruksi baik bangunan gedung maupun bangunan sipil yang berada di wilayah kewenangannya dengan sumber dana APBD Kab/Kota dan/atau yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usaha	53 Unit	T	[1.03.11.2.04.0005]
185	1.03.000417	Jumlah Bantuan Tenaga Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah bangunan negara yang sudah direnovasi di Provinsi DKI Jakarta 151 bangunan	0	T	[1.03.08.2.01.0020]
187	1.03.000421	Jumlah Desa	Desa	Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah.	0	T	[1.03.03.2.01.0027] [1.03.05.2.01.0034] [1.03.04.2.01.0014] [1.03.04.2.01.0021] [1.03.03.2.01.0035]
240	1.03.000497	Jumlah Instruktur Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Orang	Instruktur adalah orang yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingan.	0	T	[1.03.11.2.01.0012]
245	1.03.000504	Jumlah Kegiatan Percontohan Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Kegiatan	Belum tersediannya proses penyelenggaraan BGCB didalam SIMBG dan masih dalam tahap pengembangan sistem	0	T	[1.03.08.2.01.0020]
247	1.03.000506	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Layanan	Layanan Informasi Jasa Konstruksi adalah dokumen yang berisi data dan informasi yang dihasilkan dalam pengelolaan SIPJAKI sebagaimana indikator kinerja kunci sesuai peraturan perundang-undangan	1 Layanan	T	[1.03.11.1.02.0006] [1.03.11.1.02.0007] [1.03.11.2.02.0012] [1.03.11.2.02.0015]
248	1.03.000507	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi	Lembaga	Lembaga Jasa Konstruksi meliputi masyarakat Jasa Konstruksi seperti OPD, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Instansi terkait, Asosiasi, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Jasa Konstruksi, Badan Usaha Rantai Pasok Konstruksi, Pemilik/Pengelola Bangunan	203 Lembaga	T	[1.03.11.1.01.0012] [1.03.11.1.01.0016] [1.03.11.1.03.0006] [1.03.11.2.01.0011] [1.03.11.2.01.0013] [1.03.11.2.04.0006]
249	1.03.000508	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA	Lembaga	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang disusun	0	T	[1.03.02.1.01.0075] [1.03.02.1.01.0090] [1.03.02.1.02.0030] [1.03.02.2.01.0075] [1.03.02.2.02.0030] [1.03.02.2.01.0078]
250	1.03.000509	Jumlah Lembaga pelaksana penyelenggaran Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Lembaga	Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari lembaga penyelenggaraan SPAM dan asosiasi penyelenggara SPAM 1. Lembaga Pengelola SPAM dengan hasil penilaian kinerja yang meningkat dari hasil Buku Kinerja Penilaian BUMD Air Minum 2. Lembaga pengelola yang menetapkan tarif FCR dan termuat dalam hasil Buku Kinerja Penilaian BUMD Air Minum 3. Lembaga Pengelola SPAM dalam bentuk BUMD yang sudah memiliki SK pembentukan, SK tarif, SK organisasi. Kalau bentuk UPTD, yang sudah memiliki Perda Pembentukan Dinas, Perkada Pembentukan dan Struktur Organisasi UPTD, SK Pejabat, SK Kepala Dinas tentang Tupoksi dan Penunjukkan SDM, Perda Retribusi Jasa Pelayanan Air 4. Lembaga Pengelola SPAM yang pendanaannya tidak hanya bersumber dari APBD atau BUMD itu dapat berupa Subsidi Bunga, B to B atau lainnya 5. Lembaga Pengelola SPAM yang telah melakukan pembinaan kepada pelanggan/calon pelanggan berupa anjuran untuk melakukan penyambungan SR dan pembayaran tepat waktu. 6. Lembaga pengelola SPAM yang telah membuat dokumen RPAM	0	Y	[1.03.03.1.01.0013] [1.03.03.1.01.0026] [1.03.03.2.01.0023]
251	1.03.000510	Jumlah Lembaga Sistem Drainase Lingkungan	Lembaga	Penyelenggaraan Sistem Drainase yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	0	T	[1.03.06.2.01.0017]
252	1.03.000512	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum terdiri dari lembaga penyelenggaraan SPAM dan asosiasi penyelenggara SPAM	0	Y	[1.03.03.1.01.0026] [1.03.03.2.01.0023] [1.03.03.2.01.0034]
255	1.03.000515	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Orang	Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.	0	T	[1.03.03.1.01.0014] [1.03.03.1.01.0016] [1.03.05.1.01.0014] [1.03.03.2.01.0024] [1.03.05.2.01.0040] [1.03.06.2.01.0018]
256	1.03.000517	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Paket	Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota adalah kegiatan konstruksi yang berada di wilayah kewenangannya dengan sumber dana APBD Kab/Kota dan/atau yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usaha	442 Paket	T	[1.03.11.2.04.0004]

257	1.03.000519	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Disinsentif	Orang	Disinsentif adalah pengenaan kewajiban membayar ganti rugi perbaikan BGCB oleh pemilik/pengelola Bangunan Gedung kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau Menteri untuk BGCB dengan fungsi dan/atau pembatasan kegiatan pemanfaatan BGCB.	0	T	[1.03.08.2.01.0016]
258	1.03.000520	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Insentif	Orang	Insentif adalah dukungan berupa advokasi yaitu pemberian penghargaan, berbentuk sertifikat, plakat, tanda penghargaan, promosi, atau publikasi, atau berupa perbantuan yaitu dukungan penyediaan sarana dan prasarana termasuk peningkatan kualitas fisik dan/atau dukungan teknis dan/atau kepakaran antara lain berbentuk bantuan advis teknis, bantuan tenaga ahli, dan bantuan Penyedia Jasa yang kompeten di bidang Bangunan Gedung.	0	T	[1.03.08.2.01.0016]
259	1.03.000521	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi	Orang	Pemeriksaan Berkala adalah kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, danf atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung	0	T	[1.03.08.2.01.0016]
260	1.03.000527	Jumlah Pengelola SIPJAKI	Orang	Pengelola SIPJAKI adalah seseorang atau tim yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan menginput data dan informasi dalam SIPJAKI.	1 Orang	T	[1.03.11.1.02.0009] [1.03.11.2.02.0014]
261	1.03.000530	Jumlah Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Orang	Penyelenggara Pelatihan adalah seseorang atau tim yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pelatihan.	8 Orang	T	[1.03.11.2.01.0012]
262	1.03.000531	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Unit	Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi paling sedikit meliputi jaringan listrik, penyediaan server, komputer dan penyediaan jaringan internet.	1 Unit	T	[1.03.11.1.02.0007] [1.03.11.2.02.0012]
263	1.03.000533	Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat	Paket	Sub-sistem Pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, terdiri atas: a. pipa retikulasi b. pipa induk lubang kontrol (manhole) c. bangunan penggelontor d. terminal pembersihan (clean out) e. pipa perlintasan (siphon) dan/atau f. stasiun pompa	0	T	[1.03.05.1.01.0011] [1.03.05.1.01.0012] [1.03.05.1.01.0013] [1.03.07.1.01.0011] [1.03.07.1.01.0023] [1.03.07.1.01.0033] [1.03.05.1.01.0019] [1.03.05.2.01.0023] [1.03.07.2.01.0026] [1.03.07.2.01.0032] [1.03.07.2.01.0034] [1.03.07.2.01.0005] [1.03.07.2.01.0011] [1.03.05.2.01.0042] [1.03.05.2.01.0018] [1.03.05.2.01.0022] [1.03.05.2.01.0024] [1.03.05.2.01.0028] [1.03.05.2.01.0029] [1.03.05.2.01.0030] [1.03.05.2.01.0031] [1.03.05.2.01.0032] [1.03.07.2.01.0018] [1.03.05.2.01.0025] [1.03.05.2.01.0019] [1.03.05.2.01.0027] [1.03.05.2.01.0020] [1.03.05.2.01.0021] [1.03.07.2.01.0040]
264	1.03.000535	Jumlah prasarana dan sarana pendukung IPALD Terpusat	Paket	Prasarana dan sarana pendukung SPALD-T adalah Prasarana dan sarana pelengkap berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain: a. lubang kontrol (manhole); b. bangunan c. terminal pembersihan (clean out); d. pipa perlintasan (siphon); dan e. stasiun pompa	0	T	[1.03.05.1.01.0011] [1.03.05.1.01.0012] [1.03.05.2.01.0022]
266	1.03.000542	Jumlah Sambungan Rumah	Sambungan Rumah (SR)	Jaringan Perpipaan Sambungan Rumah adalah pipa dan perlengkapannya, dimulai dari titik penyadapan sampai dengan meter air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari pipa distribusi ke rumah Jaringan Perpipaan meliputi individual atau komunal (HU dan KU)	0	T	[1.03.07.1.01.0031] [1.03.03.2.01.0032] [1.03.07.2.01.0022] [1.03.07.2.01.0024] [1.03.07.2.01.0020]
267	1.03.000543	Jumlah Sarana Pemilahan Persampahan	Unit	Sarana pemilahan persampahan adalah peralatan untuk kegiatan memilah sampah yang disediakan berdasarkan volume sampah, jenis sampah yang dibedakan/dipilah paling tidak dalam 2 jenis, penempatan, jadwal pengumpulan, dan jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan&	1	T	[1.03.04.1.01.0017] [1.03.04.2.01.0017]
268	1.03.000544	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	Jumlah sarana pengangkutan lumpur hasil olahan Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sarana yang dimaksud berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.	1 Unit	T	[1.03.07.1.01.0020] [1.03.07.2.01.0010]
269	1.03.000546	Jumlah Sarana Pengangkutan Persampahan	Unit	Sarana pengangkutan persampahan adalah peralatan untuk membawa sampah (termasuk sampah di badan air dan laut) dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah dengan mengimplementasikan pemilahan minimal 2 jenis. Pemilahan dapat dilakukan melalui: (1) pengaturan jadwal pemindahan dan pengangkutan sesuai dengan jenis sampah terpilah dan sumber atau (2) Penyediaan sarana pemindahan dan pengangkutan sampah terpilah	0	T	[1.03.04.1.01.0017] [1.03.04.2.01.0017]

270	1.03.000548	Jumlah Sarana Pewadahan Persampahan	Unit	Sarana pewadahan persampahan adalah peralatan untuk kegiatan menampung sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat sumber sampah yang dibedakan/dipilah paling tidak dalam 2 jenis sampah	0	T	[1.03.04.1.01.0017] [1.03.04.2.01.0017]
271	1.03.000550	Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	SDM Penyelenggara SPALD merupakan personil yanng melaksanakan pengelolaan SPALD, terdiri dari pemerintah daerah dan operator (UPTD, BLUD, dan BUMD)	0	Y	[1.03.05.1.01.0017] [1.03.05.1.01.0023] [1.03.05.1.01.0022] [1.03.05.2.01.0035] [1.03.05.2.01.0040]
272	1.03.000552	Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	SDM pelaksana penyelenggara SPAM adalah orang / personil penyelenggara SPAM	0	Y	[1.03.03.1.01.0026] [1.03.03.2.01.0023]
273	1.03.000554	Jumlah Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya yang ditingkatkan	KM	Panjang seawall yang ditingkatkan	0	Y	[1.03.02.1.01.0100] [1.03.02.2.01.0087]
274	1.03.000555	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan			Y	[1.03.06.1.01.0009]
275	1.03.000558	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum	68 Unit	T	[1.03.03.1.01.0017] [1.03.03.1.01.0018] [1.03.03.1.01.0019] [1.03.03.1.01.0020] [1.03.03.1.01.0021] [1.03.03.2.01.0026] [1.03.03.2.01.0028] [1.03.03.2.01.0029] [1.03.03.2.01.0030]
276	1.03.000559	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum	68 Unit	T	[1.03.07.1.01.0027] [1.03.03.2.01.0022] [1.03.03.2.01.0033] [1.03.07.2.01.0025] [1.03.07.2.01.0036]
277	1.03.000560	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum	0	T	[1.03.07.1.01.0030] [1.03.03.2.01.0031] [1.03.07.2.01.0030]
278	1.03.000561	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Unit	Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum	0	T	[1.03.03.1.01.0021] [1.03.03.1.01.0026] [1.03.03.2.01.0023] [1.03.03.2.01.0030] [1.03.07.2.01.0036]
281	1.03.000566	Jumlah SPA	Unit	SPA (Stasiun Peralihan Antara) adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kab/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah	0	T	[1.03.04.1.01.0011] [1.03.04.2.01.0009] [1.03.04.2.01.0012] [1.03.04.2.01.0016]
282	1.03.000567	Jumlah SPALD	Unit	istem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.	0	T	[1.03.05.2.01.0038]
283	1.03.000568	Jumlah SPAM	Unit	Jumlah unit SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum	0	T	[1.03.07.1.01.0024] [1.03.07.1.01.0026] [1.03.07.1.01.0029] [1.03.07.2.01.0021] [1.03.07.2.01.0024]
284	1.03.000570	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Orang	Tenaga Kerja Konstruksi kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis yang mencakup jenjang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 di wilayah kewenangannya	0	T	[1.03.11.2.01.0009] [1.03.11.2.01.0010] [1.03.11.2.01.0012] [1.03.11.2.01.0014] [1.03.11.2.01.0015] [1.03.11.3.01.0009] [1.03.11.4.01.0009]
285	1.03.000571	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Orang	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Operator dan Teknisi atau Analis yang dilatih mencakup jenjang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 di wilayah kewenangannya	0	T	[1.03.11.2.01.0016]
286	1.03.000573	Jumlah TPS	Unit	Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu	0	T	[1.03.04.2.01.0009] [1.03.04.2.01.0012]
287	1.03.000574	Jumlah TPS-3R	Unit	Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (reduce, reuse dan recycle), yang selanjutnya disingkat TPS 3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan	0	T	[1.03.04.2.01.0009] [1.03.04.2.01.0012] [1.03.04.2.01.0016] [1.03.04.2.01.0014]
288	1.03.000575	Jumlah TPST	Unit	TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir	0	T	[1.03.04.1.01.0011] [1.03.04.2.01.0009] [1.03.04.2.01.0012] [1.03.04.2.01.0016]
289	1.03.000578	Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD)	MÂ³/Hari	Kapasitas IPALD adalah kemampuan pengolahan air limbah domestik pada IPAL tiap harinya dalam satuan M3	0	T	[1.03.05.1.01.0011] [1.03.05.1.01.0012] [1.03.05.1.01.0013]
290	1.03.000579	Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat	MÂ³/Hari	Kapasitas IPALD Terpusat adalah kemampuan pengolahan air limbah domestik pada IPAL tiap harinya dalam satuan M3	0	T	[1.03.05.1.01.0012] [1.03.05.1.01.0019] [1.03.07.1.01.0011] [1.03.05.2.01.0018] [1.03.05.2.01.0022] [1.03.05.2.01.0024] [1.03.05.2.01.0025] [1.03.05.2.01.0028] [1.03.05.2.01.0029] [1.03.05.2.01.0031] [1.03.05.2.01.0032] [1.03.07.2.01.0026] [1.03.05.2.01.0042] [1.03.05.2.01.0038]
291	1.03.000584	Kapasitas SPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Ton	Kapasitas SPA adalah kemampuan infrastruktur SPA untuk menampung dan mengelola sampah dengan satuan ton per hari	0	T	[1.03.07.2.01.0007] [1.03.07.2.01.0009] [1.03.07.2.01.0013] [1.03.07.2.01.0014] [1.03.07.2.01.0015] [1.03.07.2.01.0028]
292	1.03.000586	Kapasitas TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Ton	Kapasitas TPA adalah kemampuan infrastruktur TPA memproses pengolahan sampah dengan satuan ton per hari	0	T	[1.03.07.2.01.0007] [1.03.07.2.01.0008] [1.03.07.2.01.0009] [1.03.07.2.01.0012] [1.03.07.2.01.0015] [1.03.07.2.01.0019]
293	1.03.000588	Kapasitas TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Ton	Kapasitas TPS adalah kemampuan infrastruktur TPS untuk memproses pengolahan sampah dengan satuan ton per hari	0	T	[1.03.07.2.01.0007] [1.03.07.2.01.0009] [1.03.07.2.01.0015] [1.03.07.2.01.0016] [1.03.07.2.01.0017] [1.03.07.2.01.0027]
294	1.03.000590	Kapasitas TPS-3R di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Ton	Kapasitas TPS 3R adalah kemampuan infrastruktur TPS3R untuk menampung	0	T	[1.03.07.2.01.0007] [1.03.07.2.01.0009] [1.03.07.2.01.0015] [1.03.07.2.01.0023] [1.03.07.2.01.0029]
295	1.03.000592	Kapasitas TPST di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Ton	Kapasitas TPST adalah kemampuan infrastruktur TPST untuk memproses pengolahan sampah dengan satuan ton per hari	0	T	[1.03.07.2.01.0007] [1.03.07.2.01.0009] [1.03.07.2.01.0015] [1.03.07.2.01.0022] [1.03.07.2.01.0031] [1.03.07.2.01.0035]

296	1.03.000594	Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Liter/Detik	Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detik	372 Liter/Detik	T	[1.03.03.1.01.0017] [1.03.03.1.01.0018] [1.03.03.2.01.0028]
297	1.03.000596	Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detik	372 Liter/Detik	T	[1.03.07.1.01.0024] [1.03.07.1.01.0026] [1.03.03.2.01.0026] [1.03.07.2.01.0021] [1.03.07.2.01.0024]
298	1.03.000597	Kapasitas Unit Air Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Liter/Detik	Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detik	0	T	[1.03.03.1.01.0018] [1.03.03.2.01.0026]
299	1.03.000599	Kapasitas Unit Produksi Baku Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	Kapasitas unit air baku merupakan kapasitas sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya dengan satuan L/detik	0	T	[1.03.07.1.01.0024] [1.03.07.1.01.0026] [1.03.07.2.01.0021] [1.03.07.2.01.0024]
300	1.03.000602	Panjang Bangunan Pengaman Pantai	KM	Panjang bangunan pengaman pantai lainnya yang dibangun, selain breakwater dan seawall. Dapat berupa jetty, groin/krib, atau revetment dari susunan batu	0	Y	[1.03.02.1.01.0096] [1.03.02.2.01.0117] [1.03.02.2.01.0135]
301	1.03.000603	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	KM	Panjang Prasarana transportasi darat kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas pernukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.	0	T	[1.03.10.2.01.0030] [1.03.10.2.01.0036] [1.03.10.2.01.0051] [1.03.10.2.01.0056]
302	1.03.000608	Pendataan Bangunan Gedung	Bangunan Gedung	Fitur Pendataan pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sedang dalam tahap pengembangan	0	T	[1.03.08.2.01.0023]
303	1.03.000609	Regulasi yang memuat Retrbusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Regulasi	Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	0	T	[1.03.08.2.01.0023]
305	1.03.000612	Kapasitas IPLT	MÂ³/Hari	Kapasitas IPLT adalah kemampuan pengolahan lumpur tinja pada IPLT tiap harinya dalam satuan MÂ³	8Â MÂ³/Hari	T	[1.03.05.1.01.0020] [1.03.07.1.01.0014] [1.03.07.1.01.0045] [1.03.07.1.01.0046] [1.03.07.1.01.0044] [1.03.07.1.01.0009] [1.03.05.2.01.0019] [1.03.05.2.01.0021] [1.03.05.2.01.0036] [1.03.07.2.01.0005] [1.03.07.2.01.0034] [1.03.07.2.01.0037] [1.03.07.2.01.0033]
307	1.03.000615	Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Lembaga	Lembaga penyelenggaraan SPALD Regional dengan tanggung jawab meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik pada Provinsi Penyelenggaraan SPALD Regional/Kewenangan Provinsi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud menjadi tanggung jawab Gubernur dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai lembaga pengatur (regulator). Pemerintah daerah harus membentuk institusi pengelola infrastruktur (operator) sesuai kebutuhan sebagai penanggung jawab operasional, baik UPTD, UPTD-BLUD, dan BUMD dimana operator harus terpisah dari regulator SPALD.	0	Y	[1.03.05.1.01.0017] [1.03.05.1.01.0021] [1.03.05.2.01.0035] [1.03.05.2.01.0043]
308	1.03.000616	Jumlah SDM pelaksana penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang memenuhi standar kompetensi minimal	Orang	Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dapat melibatkan tenaga profesional di bidang layanan pengelolaan air limbah dan telah memenuhi standar kompetensi minimal yang ditetapkan	0	Y	[1.03.05.1.01.0017] [1.03.05.2.01.0035]

309	1.03.000617	Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Paket	Prasarana dan sarana pendukung yang berfungsi untuk menunjang pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi IPLT yang berada di satu area dengan IPLT. Prasarana dan sarana pendukung terdiri dari: 1) platform (dumping station) yang merupakan tempat truk penyedot tinja untuk mencurahkan (unloading) lumpur tinja ke dalam tangki imhoff ataupun bak ekualisasi (pengumpul); 2) kantor yang diperuntukkan bagi tenaga 3) gudang dan bengkel kerja untuk tempat penyimpanan peralatan, suku cadang unit di IPLT, dan perlengkapan 4) laboratorium untuk pemantauan kinerja 5) infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan 6) sumur pantau untuk memantau kualitas air tanah di sekitar 7) fasilitas air bersih untuk mendukung kegiatan pengoperasian 8) alat 9) peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); 10) pos 11) pagar pembatas untuk mencegah gangguan serta mengamankan aset yang berada di dalam lingkungan 12) pipa 13) tanaman dan/atau 14) sumber energi listrik.	1 Paket	T	[1.03.07.1.01.0014] [1.03.07.1.01.0019] [1.03.07.1.01.0037] [1.03.07.2.01.0011] [1.03.05.2.01.0021] [1.03.07.2.01.0034] [1.03.07.2.01.0005] [1.03.05.1.01.0020]
311	1.03.000625	Kapasitas instalasi Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPALD) Terpusat	mÃ³/hari	Kapasitas IPALD-T adalah kemampuan pengolahan air limbah domestik pada IPAL tiap harinya dalam satuan M3	0	T	[1.03.05.2.01.0019] [1.03.05.2.01.0020] [1.03.05.2.01.0021] [1.03.05.2.01.0023] [1.03.05.2.01.0027] [1.03.07.2.01.0018] [1.03.07.2.01.0026] [1.03.07.2.01.0032]
312	1.03.000626	Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dapat melibatkan tenaga profesional di bidang layanan pengelolaan air limbah	0	Y	[1.03.05.2.01.0035]
313	1.03.000627	Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)yang memenuhi standar kompetensi minimal	Orang	Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dapat melibatkan tenaga profesional di bidang layanan pengelolaan air limbah dan telah memenuhi standar kompetensi minimal yang ditetapkan	0	Y	[1.03.05.2.01.0035]
314	1.03.000628	Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang meningkat kinerjanya	Lembaga	Jumlah Lembaga/Pelaksana penyelenggaraan SPALD yang mendapatkan peningkatan kinerja melalui Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0	Y	[1.03.05.1.01.0017] [1.03.05.1.01.0021] [1.03.05.2.01.0035] [1.03.05.2.01.0043]
315	1.03.000629	Jumlah SDM Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)yang memenuhi standar kompetensi minimal	Orang	Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, yang dapat melibatkan tenaga profesional di bidang layanan pengelolaan air limbah dan telah memenuhi standar kompetensi minimal yang ditetapkan	0	Y	[1.03.05.1.01.0017] [1.03.05.2.01.0035]
316	1.03.000630	Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang telah menyusun regulasi air limbah domestik	Lembaga	Jumlah Lembaga/Pelaksana penyelenggaraan SPALD yang menyusun regulasi air limbah domestik melalui Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0	Y	[1.03.05.1.01.0007] [1.03.05.1.01.0017] [1.03.05.2.01.0035] [1.03.05.2.01.0043]
317	1.03.000631	Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang telah menetapkan strategi pendanaan penyelenggaraan SPALD	Lembaga	Jumlah Lembaga/Pelaksana penyelenggaraan SPALD yang menetapkan strategi pendanaan penyelenggaraan SPALD melalui Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0	Y	[1.03.05.1.01.0017] [1.03.05.1.01.0021] [1.03.05.2.01.0035] [1.03.05.2.01.0043]
318	1.03.000632	Jumlah Lembaga/pelaksana penyelenggaraan SPALD yang melakukan pengawasan kualitas efluen air limbah domestik	Lembaga	Jumlah Lembaga/Pelaksana penyelenggaraan SPALD yang melakukan pengawasan kualitas efluen air limbah domestik melalui Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0	Y	[1.03.05.1.01.0017] [1.03.05.1.01.0021] [1.03.05.2.01.0035] [1.03.05.2.01.0043]
319	1.03.000636	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit SPALD	SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.	0	T	[1.03.05.1.01.0018]

320	1.03.000637	Pembangunan Bendungan	Bendungan	Merupakan pekerjaan konstruksi bangunan konservasi yang berupa urugan tanah, urugan batu, atau beton, yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. Pembangunan bendungan meliputi tubuh bendungan, saluran dan bangunan pengelak (terowongan atau konduit), bangunan pelimpah (spillway), dan bangunan pelengkap lainnya seperti bangunan pengambilan dan peralatan hidromekanikal. Jumlah bendungan yang dibangun Kriteria bendungan: 1. bendungan dengan tinggi 15 meter atau lebih diukur dari pondasi terdalam 2. bendungan dengan tinggi 10-15 meter diukur dari pondasi terdalam dengan ketentuan: a. panjang puncak bendungan paling sedikit 500 meter b. daya tampung waduk paling sedikit 500.000 meter atau c. debit banjir maksimal yang diperhitungkan paling sedikit 1.000 m3/detik 3. bendungan yang mempunyai kesulitan khusus pada pondasi atau yang didesain dengan menggunakan teknologi baru dan/atau yang memiliki kelas bahaya tinggi	0	T	[1.03.02.1.01.0005] [1.03.02.2.01.0111]
321	1.03.000638	Rehabilitasi Bendungan	Unit	Jumlah bendungan yang direhabilitasi, dapat berupa perbaikan sebagian ataupun menyeluruh satu kesatuan bangunan bendungan Merupakan pekerjaan perbaikan kondisi bendungan untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Bagian yang direhabilitasi dapat hanya berupa perbaikan sebagian (tubuh bendungan saja atau bangunan pelengkap saja) ataupun perbaikan menyeluruh (tubuh bendungan beserta bangunan pelengkapnya). Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah rehabilitasi/perbaikan	0	T	[1.03.02.1.01.0071] [1.03.02.2.01.0112]
322	1.03.000639	Jumlah Pembangunan Embung	Unit	Jumlah embung yang dibangun. Embung dimaksud dapat berupa tampungan air buatan yang digali atau diurug (timbunan tanah atau batu)	1 Unit	T	[1.03.02.1.01.0120] [1.03.02.2.01.0121]
323	1.03.000641	Jumlah Pembangunan Penampung Air	Unit	Jumlah bangunan penampung air yang dibangun (buatan) selain embung	0	T	[1.03.02.1.01.0120] [1.03.02.2.01.0121]
324	1.03.000642	Panjang Pembangunan Kanal Banjir	Km	Panjang kanal banjir yang dibangun. Konstruksinya dapat berupa saluran terbuka, seperti saluran tanah terbuka, atau saluran yang diperkuat (di-lining) dengan beton atau pasangan batu. Dapat juga berupa saluran tertutup (terowongan atau konduit).	0	T	[1.03.02.1.01.0098] [1.03.02.2.01.0113]
325	1.03.000643	Jumlah Rehabilitasi embung	Unit	Merupakan pekerjaan perbaikan kondisi embung dan penampung air lainnya untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah rehabilitasi/perbaikan Jumlah embung yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	Y	[1.03.02.1.01.0078] [1.03.02.2.01.0114]
326	1.03.000644	Jumlah Rehabilitasi Penampung Air Lainnya	Unit	Jumlah bangunan penampung air (buatan) yang direhabilitasi selain embung dan tampungan alami (danau/situ)	0	Y	[1.03.02.1.01.0078] [1.03.02.2.01.0114]
327	1.03.000645	Jumlah Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Titik	Pembangunan prasarana air baku berupa sumur bor pada daerah cekungan air tanah (CAT). Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru. Jumlah titik/lokasi sumur air tanah yang dibangun	0	T	[1.03.02.1.01.0116] [1.03.02.2.01.0119]
328	1.03.000646	Jumlah Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Unit	Merupakan pekerjaan perbaikan kondisi sumur bor untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Rehabilitasi dapat berupa pencucian sumur, penggantian pompa, perbaikan struktur dan komponen lainnya. Termasuk juga peningkatan kapasitas air baku Jumlah titik/lokasi sumur air tanah yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	T	[1.03.02.1.01.0091] [1.03.02.2.01.0116]
329	1.03.000647	Jumlah Pembangunan Unit Air Baku	Unit	Pembangunan prasarana air baku yang secara umum terdiri dari intake/pengambilan, penampungan (kolam/reservoir), dan saluran/sarana pembawa ke unit pengolahan (jaringan transmisi). Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru. Jumlah unit air baku yang dibangun, dapat berupa intake bebas, bendung air baku, broncaptering, reservoir, ABSAH, beserta jaringan transmisi	0	T	[1.03.02.1.01.0123] [1.03.02.2.01.0107]
330	1.03.000648	Jumlah Rehabilitasi Unit Air Baku	Unit	Merupakan pekerjaan perbaikan kondisi unit air baku beserta jaringannya untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Rehabilitasi dapat berupa perbaikan intake, perbaikan bendung, perbaikan pompa, serta perbaikan bangunan pendukung dan jaringan transmisi Jumlah unit air baku yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	T	[1.03.02.1.01.0095] [1.03.02.2.01.0108]

331	1.03.000649	Panjang Pembangunan Tanggul Sungai	Km	Merupakan infrastruktur pelindung yang berada di daerah sempadan sungai yang berfungsi sebagai penahan aliran air atau untuk mencegah banjir. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru. Panjang tanggul sungai yang dibangun, strukturnya dapat berupa timbunan tanah, kayu, pasangan batu, dan/atau beton	0,162 KM	T	[1.03.02.1.01.0009] [1.03.02.2.01.0115]
332	1.03.000650	Panjang Rehabilitasi Tanggul Sungai	Km	Merupakan pekerjaan perbaikan kondisi tanggul sungai untuk mengembalikan fungsinya seperti semula. Panjang tanggul sungai yang direhabilitasi atau diperbaiki	0,02035 KM	T	[1.03.02.1.01.0073] [1.03.02.2.01.0126]
333	1.03.000651	Panjang Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Km	Panjang bangunan perkuatan tebing yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	Y	[1.03.02.1.01.0108] [1.03.02.2.01.0110]
334	1.03.000652	Jumlah Pembangunan Pintu Air	Unit	Bendung pengendali banjir merupakan infrastruktur pengendalian banjir yang dilengkapi dengan pintu yang dapat diatur untuk mengatur elevasi muka air. Bendung pengendali banjir juga dapat berupa bendung karet yang dapat diatur untuk kembang/kempis sesuai elevasi muka air yang diinginkan. Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru. Jumlah pintu air yang dibangun, termasuk bendung gerak dengan pintu	0	T	[1.03.02.1.01.0109] [1.03.02.2.01.0125]
335	1.03.000653	Jumlah Pembangunan Bendungan Pengendali Banjir	Unit	Jumlah bendung pengendali banjir, termasuk bendung gerak dengan pintu, bendung karet	0	T	[1.03.02.1.01.0109] [1.03.02.2.01.0125]
336	1.03.000654	Jumlah Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Unit	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	T	[1.03.02.1.01.0026] [1.03.02.2.01.0026]
337	1.03.000655	Panjang Rehabilitasi Kanal Banjir	Km	Panjang kanal banjir yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	T	[1.03.02.1.01.0099] [1.03.02.2.01.0122]
338	1.03.000656	Jumlah Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Unit	Jumlah stasiun pompa banjir yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	T	[1.03.02.1.01.0028] [1.03.02.2.01.0028]
339	1.03.000657	Jumlah Pembangunan Polder	Unit	Jumlah sistem polder yang dibangun	0	T	[1.03.02.1.01.0089] [1.03.02.2.01.0124]
340	1.03.000658	Jumlah Pembangunan Kolam Retensi	Unit	Jumlah kolam retensi yang dibangun	0	T	[1.03.02.1.01.0089] [1.03.02.2.01.0124]
341	1.03.000659	Jumlah Rehabilitasi Polder	Unit	Jumlah polder yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	T	[1.03.02.1.01.0084] [1.03.02.2.01.0123]
342	1.03.000660	Jumlah Rehabilitasi Kolam Retensi	Unit	Jumlah kolam retensi yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	T	[1.03.02.1.01.0084] [1.03.02.2.01.0123]
343	1.03.000661	Jumlah Pembangunan Bangunan Sabo	Unit	Jumlah sabo dam yang dibangun	0	T	[1.03.02.1.01.0015] [1.03.02.2.01.0015]
344	1.03.000662	Jumlah Rehabilitasi Check dam	Unit	Jumlah check dam yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	T	[1.03.02.1.01.0031] [1.03.02.2.01.0031]
345	1.03.000663	Jumlah Pembangunan Check Dam	Unit	Jumlah check dam yang dibangun	0	T	[1.03.02.1.01.0102] [1.03.02.2.01.0104]
346	1.03.000664	Panjang Pebangunan Seawall	Km	Panjang seawall yang dibangun	0,336Â KM	T	[1.03.02.1.01.0096] [1.03.02.2.01.0117]
347	1.03.000665	Panjang Rehabilitasi Seawall	Km	Panjang seawall yang direhabilitasi atau diperbaiki	0,1146 KM	T	[1.03.02.1.01.0077] [1.03.02.2.01.0105]
348	1.03.000666	Panjang Rehabilitasi Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Km	Panjang bangunan pengaman pantai lainnya yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	T	[1.03.02.1.01.0077] [1.03.02.2.01.0105]
349	1.03.000667	Panjang Peningkatan Tanggul Sungai	Km	Panjang tanggul sungai yang ditingkatkan/direhabilitasi	0	T	[1.03.02.1.01.0094] [1.03.02.2.01.0103]
350	1.03.000668	Panjang Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Km	Panjang bangunan perkuatan tebing sungai yang ditingkatkan/direhabilitasi	0	T	[1.03.02.1.01.0106] [1.03.02.2.01.0101]
351	1.03.000669	Jumlah Peningkatan Pintu Air	Unit	Jumlah pintu air yang ditingkatkan/direhabilitasi	0	T	[1.03.02.1.01.0085] [1.03.02.2.01.0100]
352	1.03.000670	Jumlah Peningkatan Bendung Pengendali Banjir	Unit	Jumlah bendung pengendali banjir yang ditingkatkan	0	T	[1.03.02.1.01.0085] [1.03.02.2.01.0100]
353	1.03.000671	panjang Peningkatan Kanal Banjir	Km	&Pekerjaan peningkatan kanal banjir dapat berupa: 1. peningkatan jenis konstruksi, seperti tanggul tanah menjadi tanggul beton 2. penambahan panjang kanal karena area yang akan dilindungi bertambah& Panjang kanal banjir yang ditingkatkan	0	T	[1.03.02.1.01.0081] [1.03.02.2.01.0099]
354	1.03.000672	Jumlah Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Unit	Jumlah stasiun pompa banjir yang ditingkatkan kapasitasnya	0	T	[1.03.02.1.01.0080] [1.03.02.2.01.0098]
355	1.03.000673	Jumlah Peningkatan Polder	Unit	jumlah polder yang ditingkatkan	0	T	[1.03.02.1.01.0111] [1.03.02.2.01.0097]
356	1.03.000674	Jumlah Peningkatan Kolam Retensi	Unit	Jumlah kolam retensi yang ditingkatkan	0	T	[1.03.02.1.01.0111] [1.03.02.2.01.0097]
357	1.03.000675	Jumlah Peningkatan Bangunan Sabo	Unit	Jumlah sabo dam yang ditingkatkan	0	T	[1.03.02.1.01.0083] [1.03.02.2.01.0096]
358	1.03.000676	Jumlah Peningkatan Check DAM	Unit	Jumlah check dam yang ditingkatkan	0	Y	[1.03.02.1.01.0114] [1.03.02.2.01.0094]
359	1.03.000677	Peningkatan Panjang Breakwater	Km	Panjang breakwater yang ditingkatkan	0	Y	[1.03.02.1.01.0076] [1.03.02.2.01.0092]
360	1.03.000678	Panjang Peningkatan Bangunan Pengaman Pantai	Km	Panjang bangunan pengaman pantai yang ditingkatkan	0	Y	[1.03.02.1.01.0100] [1.03.02.2.01.0087]
361	1.03.000679	Peningkatan Flood Forecasting and Warning System (FFWS)	Unit	Jumlah unit FFWS yang ditingkatkan	0	T	[1.03.02.1.01.0104] [1.03.02.2.01.0090]
362	1.03.000680	Jumlah Revitalisasi Danau	Danau	Jumlah danau yang direvitalisasi	0	T	[1.03.02.1.01.0074] [1.03.02.2.01.0086]
363	1.03.000681	Jumlah Revitalisasi Situ	SITU	Jumlah situ yang direvitalisasi	0	T	[1.03.02.1.01.0068] [1.03.02.2.01.0069]
365	1.03.000683	Panjang Normalisasi/Restorasi Sungai	Km	Panjang sungai yang dinormalisasi/direstorasi	0	T	[1.03.02.1.01.0079] [1.03.02.2.01.0093]
366	1.03.000684	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Unit	Jumlah infrastruktur untuk melindungi mata air yang dibangun	0	T	[1.03.02.1.01.0072] [1.03.02.2.01.0088]
367	1.03.000685	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Bendungan	Jumlah bendungan yang dioperasikan dan dipelihara	0	T	[1.03.02.1.01.0048] [1.03.02.2.01.0091]
368	1.03.000686	Operasi dan Pemeliharaan Embung	Unit	Jumlah embung yang dioperasikan dan dipelihara	0	T	[1.03.02.1.01.0105] [1.03.02.2.01.0089]
369	1.03.000688	Operasi dan Pemeliharaan Danau	Unit	Cekungan/tampungan air yang terbentuk secara alami. Revitalisasi danau bertujuan untuk mengembalikan fungsi alami danau sebagai tampungan air melalui pengerukan sedimen, pembersihan gulma air/eceng gondok, pembuatan tanggul, termasuk penataan di kawasan daerah aliran sungai	0	Y	[1.03.02.1.01.0112] [1.03.02.2.01.0079]
370	1.03.000689	Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Lainnya	Unit	Bangunan penampung air lainnya dapat meliputi long storage dan dam parit	0	Y	[1.03.02.1.01.0069] [1.03.02.2.01.0068]
371	1.03.000690	Pembangunan Jumlah Unit Air Baku	Unit	Bangunan dan konstruksi yang secara umum terdiri dari intake/pengambilan dan saluran/sarana pembawa ke unit pengolahan (jaringan transmisi). Lingkup dalam sub kegiatan ini adalah pembangunan baru.	0	Y	[1.03.02.2.01.0071]
372	1.03.000691	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Titik	Jumlah sumur air tanah untuk air baku yang dioperasikan dan dipelihara	0	T	[1.03.02.1.01.0110] [1.03.02.2.01.0095]

373	1.03.000692	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Unit	Jumlah embung air baku yang dioperasikan dan dipelihara		Y	[1.03.02.1.01.0051] [1.03.02.2.01.0051]
374	1.03.000693	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul	Km	Panjang tanggul yang dioperasikan dan dipelihara	0	T	[1.03.02.1.01.0107] [1.03.02.2.01.0080]
375	1.03.000694	Operasi dan Pemeliharaan Tebing Sungai	Km	Panjang tebing sungai yang dioperasikan dan dipelihara	0	T	[1.03.02.1.01.0107] [1.03.02.2.01.0080]
376	1.03.000695	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Km	Panjang kanal banjir yang dioperasikan dan dipelihara	0	T	[1.03.02.1.01.0097] [1.03.02.2.01.0081]
377	1.03.000696	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Unit	Jumlah stasiun pompa banjir yang dioperasikan dan dipelihara	0	T	[1.03.02.1.01.0055] [1.03.02.2.01.0085]
378	1.03.000697	Operasi dan Pemeliharaan Polder	Unit	Jumlah polder yang dioperasikan dan dipelihara	0	T	[1.03.02.1.01.0092] [1.03.02.2.01.0082]
379	1.03.000698	Operasi dan Pemeliharaan Kolam Retensi	Unit	&Jumlah kolam retensi yang dioperasi dan dipelihara. Kolam Retensi adalah kolam/waduk penampungan air hujan dalam jangka waktu tertentu. Fungsinya untuk memotong puncak banjir yang terjadi dalam badan air/sungai.&	0	T	[1.03.02.1.01.0092] [1.03.02.2.01.0082]
380	1.03.000699	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo	Unit	Jumlah bangunan sabo yang dipelihara	0	T	[1.03.02.1.01.0113] [1.03.02.2.01.0084]
381	1.03.000700	Operasi dan Pemeliharaan Check DAM	Unit	Jumlah check dam yang dipelihara	0	T	[1.03.02.1.01.0088] [1.03.02.2.01.0083]
382	1.03.000701	Operasi dan Pemeliharaan Panjang Breakwater	Km	Panjang breakwater yang dipelihara	0	Y	[1.03.02.1.01.0082] [1.03.02.2.01.0074]
383	1.03.000702	Operasi dan Pemeliharaan Panjang Seawall	Km	Panjang seawall yang dipelihara	0	Y	[1.03.02.1.01.0082] [1.03.02.2.01.0074]
384	1.03.000703	Operasi dan Pemeliharaan Panjang Bangunan Pengaman Pantai	Km	Panjang bangunan pengaman pantai yang dibangun	0	Y	[1.03.02.1.01.0082] [1.03.02.2.01.0074]
385	1.03.000704	Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	Jumlah bendung irigasi yang dibangun	0	T	[1.03.02.1.02.0003] [1.03.02.2.02.0003]
386	1.03.000705	Pembangunan Panjang Jaringan Irigasi Rawa	Km	Panjang jaringan irigasi rawa yang dibangun	0	T	[1.03.02.1.02.0004] [1.03.02.2.02.0004]
387	1.03.000706	Pembangunan Panjang Irigasi Tambak	Km	Panjang jaringan irigasi tambak yang dibangun	0	T	[1.03.02.1.02.0005] [1.03.02.2.02.0005]
388	1.03.000707	Jumlah Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun	0	Y	[1.03.02.1.02.0031] [1.03.02.2.02.0006]
389	1.03.000708	Pembangunan Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	Panjang jaringan irigasi air tanah yang dibangun	0	T	[1.03.02.1.02.0007] [1.03.02.2.02.0007]
390	1.03.000709	Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	Km	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan	0	T	[1.03.02.1.02.0008] [1.03.02.2.02.0008]
391	1.03.000710	Peningkatan Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	Jumlah Bendung Irigasi yang ditingkatkan	0	Y	[1.03.02.1.02.0009] [1.03.02.2.02.0009]
392	1.03.000711	Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Rawa	Km	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang ditingkatkan	0	T	[1.03.02.1.02.0010] [1.03.02.2.02.0010]
393	1.03.000712	Peningkatan Panjang Jaringan Irigasi Tambak	Km	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang ditingkatkan	0	T	[1.03.02.1.02.0011] [1.03.02.2.02.0011]
394	1.03.000713	Peningkatan Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang ditingkatkan	0	Y	[1.03.02.1.02.0035] [1.03.02.2.02.0012]
395	1.03.000714	Peningkatan Jumlah Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang ditingkatkan	0	T	[1.03.02.1.02.0013] [1.03.02.2.02.0013]
396	1.03.000715	Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan	Km	Panjang Jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi atau diperbaiki	0,385 KM	T	[1.03.02.1.02.0014] [1.03.02.2.02.0014]
397	1.03.000716	Rehabilitasi Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	Jumlah bendung irigasi yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	Y	[1.03.02.1.02.0015] [1.03.02.2.02.0015]
398	1.03.000717	Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Rawa	Km	Panjang jaringan irigasi rawa yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	T	[1.03.02.1.02.0016] [1.03.02.2.02.0016]
399	1.03.000718	Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Tambak	Km	Panjang jaringan irigasi tambak yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	T	[1.03.02.1.02.0017] [1.03.02.2.02.0017]
400	1.03.000719	Rehabilitasi Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	Jumlah sumur jaringan irigasi air tanah yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	Y	[1.03.02.1.02.0036] [1.03.02.2.02.0018]
401	1.03.000720	Rehabilitasi Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	Panjang jaringan irigasi air tanah yang direhabilitasi atau diperbaiki	0	T	[1.03.02.1.02.0019] [1.03.02.2.02.0019]
402	1.03.000721	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Km	Panjang Jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	0	T	[1.03.02.1.02.0021] [1.03.02.2.02.0021]
403	1.03.000722	Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Bendung Irigasi	Bendung	Jumlah bendung irigasi yang dioperasikan dan dipelihara	0	Y	[1.03.02.1.02.0022] [1.03.02.2.02.0022]
404	1.03.000723	Operasi dan Pemeliharaan Panjang Jaringan Irigasi Rawa	Km	Panjang jaringan irigasi rawa yang dioperasikan dan dipelihara	0	T	[1.03.02.1.02.0023] [1.03.02.2.02.0023]
405	1.03.000724	Operasi dan Pemeliharaan Panjang Jaringan Irigasi Tambak	Km	Panjang jaringan irigasi tambak yang dioperasikan dan dipelihara	0	T	[1.03.02.1.02.0024] [1.03.02.2.02.0024]
406	1.03.000725	Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Titik	Jumlah sumur jaringan irigasi air tanah yang dioperasikan dan dipelihara	0	Y	[1.03.02.1.02.0033] [1.03.02.2.02.0025]
407	1.03.000726	Operasi dan Pemeliharaan Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah	Km	Panjang jaringan irigasi air tanah yang dioperasikan dan dipelihara	0	Y	[1.03.02.1.02.0026] [1.03.02.2.02.0026]
408	1.03.000727	Fasilitasi Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi	Lembaga	Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang difasilitasi	0	Y	[1.03.02.1.02.0034] [1.03.02.2.02.0034]
410	1.03.000733	Pembangunan Panjang Drainase Perkotaan	Km	Panjang Drainase Perkotaan yang dibangun	1 KM	T	[1.03.06.1.01.0008] [1.03.06.2.01.0029]
411	1.03.000734	Peningkatan Panjang Drainase Perkotaan	Km	Panjang Drainase Perkotaan yang dtingkatkan	2 KM	T	[1.03.06.1.01.0007] [1.03.06.2.01.0024]
412	1.03.000735	Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah sistem drainase perkotaan yang dioperasikan dan dipelihara	3 Sistem Drainase Perkotaan	T	[1.03.06.1.01.0010] [1.03.06.2.01.0031]
413	1.03.000736	Jumlah Kapasitas pembangunan Unit Air Baku	mÂ³/detik	Jumlah kapasitas unit air baku yang bertambah akibat pembangunan baru	0	T	[1.03.02.1.01.0123] [1.03.02.2.01.0107]
414	1.03.000737	Jumlah Pembangunan Bendung Pengendali Banjir	Unit	Jumlah bendung pengendali banjir, termasuk bendung gerak dengan pintu, bendung karet	0	T	[1.03.02.1.01.0109] [1.03.02.2.01.0125]
415	1.03.000738	Jumlah Operasi dan Pemeliharaan Situ	SITU	Jumlah Situ yang dioperasikan dan dipelihara	0	Y	[1.03.02.1.01.0067] [1.03.02.2.01.0070]
416	1.03.000739	Jumlah Paket Pekerjaan	Paket	Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi adalah kegiatan konstruksi yang berada di wilayah kewenangannya dengan sumber dana APBD Kabupaten/Kota dan/atau yang dibiayai dengan dana masyarakat/swasta/badan usaha	442 Paket	T	[1.03.11.2.04.0006]
417	1.03.000740	Jumlah rehabilitasi sistem drainase perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang direhabilitasi	3 Sistem Drainase Perkotaan	T	[1.03.06.1.01.0009] [1.03.06.2.01.0028]
418	1.03.000741	Panjang Drainase Perkotaan	Km	Panjang Drainase Perkotaan yang ditingkatkan	2 KM	T	[1.03.06.1.01.0007] [1.03.06.2.01.0024]
420	1.03.000744	Pengamanan Mata Air	Titik	Jumlah mata air yang dioperasikan dan dipelihara	0	Y	[1.03.02.1.01.0093] [1.03.02.2.01.0076]

429	1.03.910105	Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.	0	Y	[1.03.09.1.01.0008] [1.03.09.2.01.0008]
430	1.03.910106	Jumlah Bangunan Cagar Budaya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Unit	Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya.	0	Y	[1.03.09.1.01.0008] [1.03.09.2.01.0008]
431	1.03.910107	Jumlah Kawasan Pariwisata yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.	0	Y	[1.03.09.1.01.0008] [1.03.09.2.01.0008]
432	1.03.910108	Jumlah Kawasan Sistem Perkotaan Nasional yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Sistem Perkotaan Nasional meliputi pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, maupun pusat kegiatan strategis nasional.	0	Y	[1.03.09.1.01.0008] [1.03.09.2.01.0008]
433	1.03.910109	Jumlah Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	Kawasan	Kawasan Strategis Lainnya adalah kawasan selain Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional	0	Y	[1.03.09.1.01.0008] [1.03.09.2.01.0008]
434	1.03.910112	Jumlah SDM Pengelola Persampahan	Orang	SDM Pengelola Persampahan adalah anggota Institusi Pengelola Persampahan	0	Y	[1.03.04.2.01.0012] [1.03.04.2.01.0011]
435	1.03.910116	Jumlah Bantuan Pengelola Teknis Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Orang	&Bantuan Pengelola Teknis Bangunan Gedung Negara berfungsi membantu kuasa pengguna anggaran, kepala satuan kerja atau pejabat pembuat komitmen di bidang teknis administratif pada setiap tahap pembangunan BGN&	0	T	[1.03.08.2.01.0020]
436	1.03.910117	Sambungan Rumah Penyediaan Air Minum	Sambungan Rumah (SR)	Sambungan Rumah adalah pipa dan perlengkapannya, dimulai dari titik penyadapan sampai dengan meter air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari pipa distribusi ke rumah Jaringan Perpipaan meliputi individual atau komunal Hidran Umum dan Keran Umum.	0	T	[1.03.03.1.01.0017] [1.03.03.1.01.0018] [1.03.03.2.01.0026] [1.03.03.2.01.0028] [1.03.03.2.01.0032]
437	1.03.910120	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Desa	Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah.	0	T	[1.03.03.2.01.0027]
438	1.03.910121	Jumlah Warga Negara Penerima Layanan SPALD	Jiwa	Warga Negara penerima layanan IPALD adalah individu yang menerima layanan SPALD-T	0	T	[1.03.05.1.01.0011] [1.03.05.1.01.0013] [1.03.07.2.01.0032] [1.03.07.2.01.0040]
439	1.03.910123	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Pengembangan SPALD	Orang	Masyarakat yang telah mengikuti pembinaan dan pemberdayaan dalam pengembangan SPALD adalah individu yang telah mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan melalui kegiatan fasilitasi, penyuluhan, advokasi, pelatihan sosialisasi dan/atau kegiatan lainnya dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0	T	[1.03.05.1.01.0014] [1.03.05.2.01.0040]
440	1.03.910126	Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung SPALD-Terpusat	Paket	Prasarana dan sarana pendukung SPALD-T adalah Prasarana dan sarana pelengkap berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain: a. lubang kontrol (manhole); b. bangunan c. terminal pembersihan (clean out); d. pipa perlintasan (siphon); dan e. stasiun pompa	0	T	[1.03.05.1.01.0013] [1.03.07.1.01.0033] [1.03.05.1.01.0012] [1.03.07.1.01.0023] [1.03.05.1.01.0011] [1.03.07.1.01.0011] [1.03.05.2.01.0025] [1.03.05.2.01.0022] [1.03.05.2.01.0031] [1.03.05.2.01.0028] [1.03.05.2.01.0032] [1.03.05.2.01.0030] [1.03.05.2.01.0024] [1.03.05.2.01.0029] [1.03.05.2.01.0018]
441	1.03.910127	Jumlah Warga Negara Penerima Layanan IPALD	Jiwa	Warga Negara penerima layanan IPALD adalah individu yang menerima IPALD.	0	T	[1.03.05.1.01.0019] [1.03.05.2.01.0018] [1.03.05.2.01.0022] [1.03.05.2.01.0024] [1.03.05.2.01.0025] [1.03.05.2.01.0028] [1.03.05.2.01.0029] [1.03.05.2.01.0030] [1.03.05.2.01.0031] [1.03.05.2.01.0032] [1.03.05.2.01.0042] [1.03.07.2.01.0040]
442	1.03.910128	Jumlah Prasarana dan Sarana Pendukung Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Paket	Prasarana dan sarana pendukung SPALD-T adalah Prasarana dan sarana pelengkap berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain: a. lubang kontrol (manhole); b. bangunan c. terminal pembersihan (clean out); d. pipa perlintasan (siphon); dan e. stasiun pompa& Jaringan perpipaan adalah prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan dan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Subsistem Pengolahan Terpusat Sambungan rumah adalah sambungan pelanggan yang mensuplai langsung ke rumah-rumah biasanya berupa sambungan pipa-pipa distribusi melalui water meter dan instalasi pipanya didalam rumah	0	T	[1.03.07.1.01.0011] [1.03.07.1.01.0014] [1.03.07.1.01.0019] [1.03.07.1.01.0023] [1.03.07.1.01.0033] [1.03.07.1.01.0037] [1.03.07.1.01.0041] [1.03.07.1.01.0038] [1.03.05.2.01.0031] [1.03.07.2.01.0011] [1.03.07.2.01.0018] [1.03.07.2.01.0026] [1.03.07.2.01.0032]

444	1.03.910130	Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Laporan	Laporan yang disesuaikan dengan kewenangannya, yaitu: a. melakukan pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan b. meminta c. membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang d. memasuki tempat atau lokasi e. f. membuat rekaman audio g. memeriksa bangunan beserta prasarana dan sarana h. menghentikan pelanggaran dan i. melakukan tindakan lain yang diperlukan.	0	T	[1.03.12.1.04.0010] [1.03.12.3.06.0004] [1.03.12.4.06.0004] [1.03.12.2.04.0005] [1.03.12.3.06.0004] [1.03.12.4.06.0004]
448	1.03.910135	Kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	Kasus		0	T	[1.03.12.1.04.0005] [1.03.12.3.04.0008] [1.03.12.4.04.0008] [1.03.12.2.04.0006]
449	1.03.910136	Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang	Berita Acara		0	T	[1.03.12.1.04.0012] [1.03.12.3.04.0007] [1.03.12.4.04.0007] [1.03.12.2.04.0013]
452	1.03.910139	Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Laporan		0	T	[1.03.13.5.01.0006] [1.03.13.5.01.0006]
453	1.03.910140	Layanan KKPR	Layanan		1 Layanan	T	[1.03.12.1.03.0005] [1.03.12.3.03.0005] [1.03.12.4.03.0005] [1.03.12.3.03.0004] [1.03.12.4.03.0004]
454	1.03.910141	Layanan Persetujuan KKPR	Layanan		2 Layanan	T	[1.03.12.1.03.0003] [1.03.12.3.03.0004] [1.03.12.4.03.0004] [1.03.12.3.03.0003] [1.03.12.4.03.0003]
455	1.03.910146	Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Laporan		0	T	[1.03.12.1.04.0009] [1.03.12.2.04.0009]
456	1.03.910147	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem Informasi		2 Layanan	T	[1.03.12.1.03.0006] [1.03.13.5.01.0006] [1.03.12.2.03.0006] [1.03.13.5.01.0006]
458	1.03.910149	Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Kegiatan		0	T	[1.03.12.1.02.0004] [1.03.12.2.02.0003]
459	1.03.910150	SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Orang		0	T	[1.03.12.1.02.0005] [1.03.12.2.02.0006]
460	1.03.910151	Data SHP Peta Dasar	Peta		1 Peta	T	[1.03.12.1.02.0010] [1.03.12.2.02.0004]
461	1.03.910152	Publikasi informasi penataan ruang	Publikasi		2 Layanan	T	[1.03.12.1.01.0005] [1.03.12.2.01.0007]
464	1.03.910158	Jumlah Bangunan Sabo	Unit	Bangunan Sabo merupakan bangunan pelindung dari lahar gunung berapi	0	Y	[1.03.02.1.01.0030] [1.03.02.2.01.0030]
466	1.03.910161	Jumlah Kawasan Genangan	Kawasan Genangan	...	2 Kawasan Genangan	T	[1.03.06.2.01.0002] [1.03.06.2.01.0027]
467	1.03.910162	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Orang		0	Y	[1.03.06.2.01.0004]
468	1.03.910163	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan	Sistem Drainase Perkotaan	...	2 Sistem Drainase Perkotaan	T	[1.03.06.2.01.0025]
469	1.03.910164	Panjang Saluran Drainase Perkotaan	Meter	...	2 Meter	T	[1.03.06.2.01.0006] [1.03.06.2.01.0025]
471	1.03.910167	Jumlah Warga Negara Penerima Layanan	Jiwa	Warga Negara adalah sekelompok orang yang memiliki kedudukan secara resmi menjadi anggota penuh dari suatu negara.	0	T	[1.03.07.1.01.0031] [1.03.07.2.01.0020] [1.03.07.2.01.0036]
472	1.03.910168	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	Unit	Sarana pendukung sistem drainase adalah Bangunan Pelengkap seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.	1 Unit	T	[1.03.06.2.01.0015] [1.03.06.2.01.0022]
474	1.03.910170	Panjang Saluran Drainase Lingkungan	Meter	Saluran untuk mengalirkan limpasan air hujan yang dapat menimbulkan genangan	0	T	[1.03.06.2.01.0009] [1.03.06.2.01.0012] [1.03.06.2.01.0013] [1.03.06.2.01.0014] [1.03.06.2.01.0019] [1.03.06.2.01.0020] [1.03.06.2.01.0021]
475	1.03.910171	Jumlah Rumah Sehat	Rumah		0	T	[1.03.07.3.02.0001] [1.03.07.4.02.0001] [1.03.07.3.02.0001] [1.03.07.4.02.0001]
476	1.03.910172	Jumlah Rumah Layak Huni	Rumah	Jumlah unit Rumah Baru Layak Huni yang telah terbangun untuk meningkatkan Kualitas Kumuh kewenangan provinsi dan kabupaten/kota	0	T	[1.03.07.3.02.0002] [1.03.07.3.02.0003] [1.03.07.3.02.0007] [1.03.07.4.02.0002] [1.03.07.4.02.0003] [1.03.07.4.02.0007] [1.03.07.3.02.0002] [1.03.07.3.02.0003] [1.03.07.4.02.0002] [1.03.07.4.02.0003]
478	1.03.910177	SPBU Mikro 3 Kilo Liter	Unit	Jumlah gerai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Mikro 3 Kilo Liter (contoh: Pertashop)	0	Y	
479	1.03.910178	SPBU Mikro 3 Kilo Liter Berizin Lengkap	Unit	Jumlah gerai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Mikro 3 Kilo Liter sesuai kewenangan daerah (contoh: Pertashop sudah berizin lengkap dokumen PBG dan SLF) PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) adalah Perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya untuk memulai pembangunan, merenovasi, merawat, atau mengubah bangunan gedung tersebut sesuai dengan yang direncanakan. SLF (Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung) adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.	0	T	
480	1.03.910179	SPBU Mikro 3 Kilo Liter Belum Berizin Lengkap	Unit	Jumlah gerai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Mikro 3 Kilo Liter yang belum memiliki kelengkapan perizinan sesuai kewenangan daerah (contoh: Pertashop belum terdapat dokumen perizinan PBG dan atau SLF). PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) adalah Perizinan yang dikeluarkan dari pemerintah kepada pemilik sebuah bangunan gedung atau perwakilannya untuk memulai pembangunan, merenovasi, merawat, atau mengubah bangunan gedung tersebut sesuai dengan yang direncanakan. SLF (Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung) adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.	0	Y	
481	1.03.910180	Jumlah Unit Air Baku	Unit	Jumlah unit air baku yang dioperasi dan dipelihara	0	T	[1.03.02.1.01.0052] [1.03.02.2.01.0052] [1.03.02.1.01.0125]
482	1.03.910181	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Titik	Jumlah sumur air tanah untuk air baku yang dioperasikan dan dipelihara	0	T	[1.03.02.1.01.0110] [1.03.02.2.01.0095] [1.03.02.1.01.0131]

485	1.03.910186	Jumlah Sarana Pengumpulan Persampahan	Unit	Sarana pengumpulan persampahan adalah peralatan untuk mengambil dan memindahkan sampah (termasuk sampah di badan air dan laut) dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R dan pemilahan minimal 2 jenis sampah	0	T	[1.03.04.1.01.0017] [1.03.04.2.01.0017]
486	1.03.910187	Jumlah Sarana Pengolahan Persampahan	Unit	Sarana pengolahan persampahan adalah peralatan untuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah sehingga sampah dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan	0	T	[1.03.04.1.01.0017] [1.03.04.2.01.0017]
487	1.03.910188	Jumlah Sarana Pemrosesan Akhir Sampah	Unit	Sarana Pemrosesan Akhir persampahan adalah pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan yang terdiri dari kegiatan penutupan sampah dengan tanah urug (lahan urug saniter/terkontrol) dan pemadatan tanah, pemagaran dan akses kontrol 24 jam, dan pengolahan lindi	0	T	[1.03.04.1.01.0017] [1.03.04.2.01.0017]
488	1.03.910189	Jumlah Masyarakat	Orang	Masyarakat adalah orang/individu/kelompok yang menyelenggarakan pengelolaan persampahan yang telah mendapatkan pembinaan teknis dan pemberdayaan melalui kegiatan fasilitasi, penyuluhan, advokasi, pelatihan, dan sosialisasi dalam hal sarana dan prasarana persampahan (Tempat sampah terpilah di tiap rumah, pemilahan di TPS), pembuatan produk olahan sampah (kompos, budidaya maggot, dll), dan lainnya dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	0	Y	[1.03.04.1.01.0014] [1.03.04.1.01.0008] [1.03.04.2.01.0011] [1.03.04.2.01.0014] [1.03.04.2.01.0021] [1.03.04.2.01.0018]
489	1.03.910190	Jumlah Pengelola Persampahan	Kelompok	Pengelola Persampahan adalah organisasi pelaksana dalam kegiatan persampahan	0	T	[1.03.04.2.01.0019]
491	1.03.910195	Kapasitas perencanaan TPA	Ton/hari	Kapasitas perencanaan TPA adalah kemampuan infrastruktur TPA memproses pengolahan sampah sesuai desain perencanaan	0	T	[1.03.04.1.01.0010] [1.03.04.1.01.0011] [1.03.04.1.01.0013] [1.03.04.2.01.0010] [1.03.04.2.01.0013] [1.03.04.2.01.0016]
492	1.03.910196	Kapasitas TPA terpakai	Ton/hari	Kapasitas TPA terpakai adalah kapasitas TPA yang telah terpakai untuk memproses pengolahan sampah	0	T	[1.03.04.1.01.0010] [1.03.04.1.01.0011] [1.03.04.1.01.0013] [1.03.04.2.01.0010] [1.03.04.2.01.0013] [1.03.04.2.01.0016]
493	1.03.910197	Fasilitas penunjang TPA	Paket	Fasilitas penunjang TPA adalah alat berat yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah di TPA	0	T	[1.03.04.1.01.0010] [1.03.04.1.01.0011] [1.03.04.1.01.0013] [1.03.04.2.01.0010] [1.03.04.2.01.0013] [1.03.04.2.01.0016]
494	1.03.910198	Kapasitas perencanaan TPST	Ton/hari	Kapasitas perencanaan TPST adalah kemampuan infrastruktur TPST memproses pengolahan sampah sesuai desain perencanaan	0	T	[1.03.04.1.01.0013] [1.03.04.1.01.0011] [1.03.04.1.01.0010] [1.03.04.2.01.0016] [1.03.04.2.01.0010] [1.03.04.2.01.0013]
495	1.03.910199	Kapasitas TPST terpakai	Ton/hari	Kapasitas TPST terpakai adalah kapasitas TPST yang telah terpakai untuk memproses pengolahan sampah	0	T	[1.03.04.1.01.0010] [1.03.04.1.01.0011] [1.03.04.1.01.0013] [1.03.04.2.01.0010] [1.03.04.2.01.0013] [1.03.04.2.01.0016]
496	1.03.910200	Kapasitas perencanaan SPA	Ton/hari	Kapasitas perencanaan SPA adalah kemampuan infrastruktur SPA memproses pengolahan sampah sesuai desain perencanaan	0	T	[1.03.04.1.01.0010] [1.03.04.1.01.0011] [1.03.04.1.01.0013] [1.03.04.2.01.0010] [1.03.04.2.01.0013] [1.03.04.2.01.0016]
497	1.03.910201	Kapasitas SPA terpakai	Ton/hari	Kapasitas SPA terpakai adalah kapasitas SPA yang telah terpakai untuk memproses pengolahan sampah	0	T	[1.03.04.1.01.0011] [1.03.04.1.01.0013] [1.03.04.1.01.0010] [1.03.04.2.01.0010] [1.03.04.2.01.0013] [1.03.04.2.01.0016]
498	1.03.910202	Kapasitas perencanaan TPS3R	Ton/hari	Kapasitas perencanaan TPS3R adalah kemampuan infrastruktur TPS3R memproses pengolahan sampah sesuai desain perencanaan	0	T	[1.03.04.2.01.0016] [1.03.04.2.01.0010] [1.03.04.2.01.0013]
499	1.03.910203	Kapasitas TPS3R terpakai	Ton/hari	Kapasitas TPS3R terpakai adalah kapasitas TPS3R yang telah terpakai untuk memproses pengolahan sampah	0	T	[1.03.04.2.01.0016] [1.03.04.2.01.0010] [1.03.04.2.01.0013]
500	1.03.910204	Kapasitas TPS	Ton/hari	Kapasitas TPS adalah kemampuan infrastruktur TPS untuk menampung sampah dengan satuan ton per hari	0	T	[1.03.04.2.01.0013]
501	1.03.910205	Jumlah TPA	Unit	TPA (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah) adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan	0	T	[1.03.04.1.01.0011] [1.03.04.2.01.0016]
502	1.03.910206	Kapasitas TPS terpakai	Ton/hari	Kapasitas TPS terpakai adalah kapasitas TPS yang telah terpakai untuk memproses pengumpulan sampah	0	T	[1.03.04.2.01.0016]
504	1.03.910209	Jumlah Bangunan Gedung Hijau	Bangunan Gedung	Bangunan gedung hijau adalah bangunan gedung yang memenuhi standar teknis bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya	0	T	[1.03.08.1.01.0012] [1.03.08.1.01.0016] [1.03.08.1.01.0019] [1.03.08.1.01.0020] [1.03.08.2.01.0017] [1.03.08.2.01.0018] [1.03.08.2.01.0019] [1.03.08.2.01.0021] [1.03.08.2.01.0022]
505	1.03.910211	Jumlah bangunan gedung negara yang ditangani	Unit	Jumlah Bangunan Gedung Negara: jumlah massa bangunan yang dilakukan pembangunan dan/atau rehabilitasi melalui pendanaan APBD dalam satuan unit	0	T	[1.03.08.1.01.0019] [1.03.08.1.01.0020] [1.03.08.2.01.0018] [1.03.08.2.01.0021]
506	1.03.910212	Luas bangunan gedung negara yang ditangani	M2	Luas Bangunan Gedung Negara: luas bangunan gedung negara yang dilakukan pembangunan dan/atau rehabilitasi melalui pendanaan APBD dalam satuan m2	0	T	[1.03.08.1.01.0019] [1.03.08.1.01.0020] [1.03.08.2.01.0018] [1.03.08.2.01.0021]
511	1.03.910220	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dipelihara	Bangunan Gedung	Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.	0	T	[1.03.08.2.01.0018]

512	1.03.910221	Permohonan tenaga/tim Pengelola Teknis pada Dinas teknis Provinsi	Orang	Pengelola Teknis: Tenaga teknis kementerian dan/atau OPD yang bertanggung jawab dalam pembinaan Bangunan Gedung Negara, yang ditugaskan untuk membantu K/L dan/atau OPD dalam Pembangunan Bangunan Gedung Negara. (PP Nomor 16 Tahun 2021 dan Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018)	0	T	[1.03.08.2.01.0018] [1.03.08.2.01.0021]
513	1.03.910222	Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan	Orang	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dilakukan melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan agar proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat bertangsung tertib dan tercapai keandalan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.	0	T	[1.03.08.2.01.0022]
516	1.03.910225	Kapasitas perencanaan TPS	Ton/hari	Kapasitas perencanaan TPS adalah kemampuan infrastruktur TPS memproses pengumpulan sampah sesuai desain perencanaan	0	T	[1.03.04.2.01.0016]
519	1.03.910228	Luas Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	Luas Kawasan adalah besaran (dalam m2) massa bangunan dan lingkungan di sekitrar massa bangunan pada kawasan cagar budaya/pariwisata/sistem perkotaan nasional/rawan bencana/strategis lainnya yang ditangani	0	Y	[1.03.09.1.01.0008] [1.03.09.2.01.0008]
520	1.03.910229	Jumlah Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional, Kawasan Rawan Bencana dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	Jumlah Kawasan adalah jumlah kesatuan massa bangunan dan lingkungan di sekitar massa bangunan pada kawasan cagar budaya/pariwisata/sistem perkotaan nasional/rawan bencana/strategis lainnya yang ditangani	0	Y	[1.03.09.1.01.0008] [1.03.09.2.01.0008]
527	1.03.910239	Penetapan daerah rawan bencana oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah	M2	Besaran daerah rawan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemda	0	Y	[1.03.09.1.01.0008] [1.03.09.2.01.0008]
528	1.03.910240	Tim Ahli Cagar Budaya	Orang	Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya	0	Y	[1.03.09.1.01.0008] [1.03.09.2.01.0008]
529	1.03.910245	Jumlah Orang yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	Orang	Jumlah Orang : individu baik perseorangan maupun dalam instansi/lembaga/kelompok yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terkait penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan oleh pemerintah daerah	0	Y	[1.03.09.2.01.0007]
532	1.03.910248	Jumlah Peraturan Bupati/Walikota tentang RTBL	Peraturan	Jumlah Peraturan Bupati/Walikota tentang RTBL adalah dokumen peraturan tentang RTBL yang diterbitkan	0	T	[1.03.09.2.01.0010]
534	1.03.910254	Sambungan Rumah/Sub-sistem pelayanan Air Limbah Domestik	Sambungan Rumah (SR)	sambungan rumah/sub-sistem pelayanan adalah prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan, terdiri atas: a. Pipa b. Pipa non c. Bak perangkap lemak dan minyak dari d. Pipa e. Bak dan f. Lubang inspeksi	0	T	[1.03.05.1.01.0013] [1.03.07.1.01.0023] [1.03.05.1.01.0011] [1.03.05.1.01.0012] [1.03.05.1.01.0019] [1.03.05.2.01.0042] [1.03.05.2.01.0018] [1.03.05.2.01.0022] [1.03.05.2.01.0025] [1.03.05.2.01.0031] [1.03.05.2.01.0028] [1.03.05.2.01.0032] [1.03.05.2.01.0030] [1.03.05.2.01.0024] [1.03.05.2.01.0029] [1.03.05.2.01.0023] [1.03.05.2.01.0027]
535	1.03.910256	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan jasa penyedotan lumpur tinja	Rumah Tangga	Rumah tangga yang terlayani jasa penyedotan lumpur tinja	0	T	[1.03.07.1.01.0022] [1.03.07.2.01.0006]
536	1.03.910257	Jumlah warga negara penerima layanan penyediaan air minum	Jiwa	Sambungan Rumah adalah pipa dan perlengkapannya, dimulai dari titik penyadapan sampai dengan meter air yang berfungsi untuk mengalirkan air dari pipa distribusi ke rumah Dokumen Penetapan Kawasa Strategis Provinsi	0	T	[1.03.07.1.01.0024] [1.03.07.2.01.0024]
537	1.03.910267	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga	Rumah tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	0	T	[1.03.07.1.01.0009] [1.03.05.2.01.0006] [1.03.05.2.01.0039] [1.03.07.2.01.0033] [1.03.05.2.01.0044]

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2025	Disabled	Info Sub Kegiatan
1	1.04.000001	Anggota Fasilitator	Orang	Jumlah anggota fasilitator yang melakukan pendampingan fisik dalam pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan kembali Penentuan anggota fasilitator berdasarkan: 1. Ketentuan Peraturan Kepala BNPB 2. Melibatkan BPBD dan OPD terkait	0	T	[1.04.02.1.02.0004] [1.04.02.2.02.0004]
2	1.04.000002	Anggota Tim Pendamping	Orang	Jumlah anggota tim pendamping yang melakukan asesmen kerusakan bangunan (rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat) sesuai dengan peraturan bangunan gedung. Penentuan anggota tim pendamping berdasarkan: 1. Ketentuan Peraturan Kepala BNPB 2. Melibatkan BPBD dan OPD terkait	0	T	[1.04.02.1.02.0004] [1.04.02.2.02.0004]
3	1.04.000003	Anggota Tim Satgas	Orang	Jumlah anggota tim Satgas OPD yang bertugas: 1. Melakukan pendataan cepat tingkat kerusakan rumah 2. Melakukan verifikasi BNBA penerima layanan 3. Menyusun Rencana Aksi penanganan 4. Mendampingi fasilitator dalam pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan kembali 5. Menyusun Laporan pelaksanaan	0	T	[1.04.02.1.02.0004] [1.04.02.2.02.0004]
4	1.04.000004	Backlog Kepemilikan Rumah	Unit Rumah	Data sekunder rekapitulasi backlog kepemilikan rumah yang yang dihimpun dari data backlog pemerintah kab/kota atau data olahan dari BPS.	0	T	[1.04.02.1.01.0006] [1.04.02.2.01.0006]
5	1.04.000005	Backlog Kepenghunian Rumah	Unit Rumah	Data sekunder rekapitulasi backlog kepenghunian rumah yang yang dihimpun dari data backlog pemerintah kab/kota atau data olahan dari BPS.	0	T	[1.04.02.1.01.0006] [1.04.02.2.01.0006]
6	1.04.000006	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Berkomitmen menerima bantuan	Orang	Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang berkomitmen menerima bantuan	0	T	[1.04.02.2.01.0010]
7	1.04.000007	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status hak milik	Orang	Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang menempati rumah dengan status hak milik	0	T	[1.04.02.2.01.0010]
8	1.04.000008	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)	Orang	Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)	0	T	[1.04.02.2.01.0010]
9	1.04.000009	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status sewa	Orang	Jumlah calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang menempati rumah dengan status sewa	0	T	[1.04.02.2.01.0010]
10	1.04.000014	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Pembangunan Kembali Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah dan nama calon penerima rumah dalam bentuk pembangunan kembali bagi korban bencana kabupaten/kota	0	T	[1.04.02.2.02.0008]
11	1.04.000016	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Pemberian Subsidi Uang Sewa Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah dan nama calon penerima rumah dalam bentuk subsidi uang sewa bagi korban bencana kabupaten/kota	0	T	[1.04.02.2.02.0008]
12	1.04.000018	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Rehabilitasi Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah dan nama calon penerima rumah dalam bentuk rehabilitasi bagi korban bencana kabupaten/kota	0	T	[1.04.02.2.02.0008]
13	1.04.000020	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Relokasi Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah dan nama calon penerima rumah dalam bentuk relokasi bagi korban bencana kabupaten/kota	0	T	[1.04.02.2.02.0008]
14	1.04.000023	Data Pembentukan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Dokumen	Dokumen data pembentukan Tim Satgas, pendamping, dan fasilitator adalah SK (Surat Keputusan)	0	T	[1.04.02.1.02.0004] [1.04.02.2.02.0004]
15	1.04.000024	Data Sebaran dan Titik Koordinat Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	Peta sebaran dan titik koordinat lokasi rawan bencana provinsi yang bersumber dari: 1. Data BPBD Kabupaten/Kota, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP.	0	T	[1.04.02.2.01.0009]
16	1.04.000031	Dokumen Hasil Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Dokumen	Dokumen yang memuat hasil pre test dan post test peserta keluarga pada kegiatan Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan.	0	T	[1.04.03.1.01.0019] [1.04.03.2.02.0015]
17	1.04.000034	Dokumen kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	Dokumen kesepakatan dengan Pengembang/ Pelaku Pembangunan untuk penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman secara elektronik yang terintegrasi. Dokumen ini tidak terbatas hanya pembangunan rumah.	0	T	[1.04.03.2.01.0001]
18	1.04.000035	Dokumen kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	Dokumen kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	0	T	[1.04.02.2.06.0001]
19	1.04.000037	Dokumen Pemanfaatan Rumah Khusus	Dokumen	Dokumen pembukuan pemanfaatan rumah susun umum yang memuat: 1. Inventarisasi 2. Pelaporan serah terima rumah susun khusus	0	T	[1.04.02.2.05.0002]

20	1.04.000038	Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum	Dokumen	Dokumen pembukuan pemanfaatan rumah susun umum yang memuat: 1. Inventarisasi 2. Pelaporan serah terima rumah susun umum	0	T	[1.04.02.2.05.0002]
21	1.04.000040	Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen BA serah terima aset Pemda kepada masyarakat, Sertifikat Hak Milik masyarakat	0	T	[1.04.02.2.04.0005]
22	1.04.000042	Dokumen Serah Terima Rumah Kepada yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen BA serah terima aset Pemda kepada masyarakat, Sertifikat Hak Milik masyarakat	0	T	[1.04.02.2.04.0004]
23	1.04.000044	Izin Pembangunan dan Pengembangan Rumah atau Perumahan Terintegrasi secara Elektronik pada Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan	Dokumen	Jumlah Izin Pembangunan dan Pengembangan Rumah atau Perumahan Terintegrasi secara Elektronik yang dimiliki Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan	0	T	[1.04.02.2.06.0001]
24	1.04.000045	Kebijakan Bidang PKP	Dokumen	Kebijakan berupa produk hukum perundangan di daerah bidang PKP yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Kepala Daerah sesuai atau kebijakan daerah bidang PKP berbentuk keputusan atau himbauan yang dikeluarkan/ ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Kepala Daerah atau Kepala OPD sesuai atau rancangan naskah akademis atas produk hukum perundangan bidang PKP di daerah sesuai atau dokumen rancangan teknis bidang PKP sebagai penunjang produk hukum daerah Kabupaten/Kota atau kebijakan daerah provinsi Hasil atau produk kebijakan Bidang PKP antara lain adalah Dokumen RP3KP, Dokumen RP2KPKP, Dokumen RP2KPKPK, SK Kumuh, Kajian Kemudahan Perizinan dan Non Perizinan untuk Pembangunan Perumahan, Kajian Insentif Pajak untuk Pembangunan Perumahan, ketentuan lingkungan hunian berimbang, dan dokumen lain yang mendukung pembangunan dan pengembangan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Aktivitas di dalamnya meliputi kegiatan penyusunan, review, legalisasi, sampai dengan sosialisasi/diseminasi.	0	T	[1.04.03.1.01.0008] [1.04.03.2.02.0008]
25	1.04.000046	Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang Terbina	Kelompok	Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan melaksanakan pembinaan berupa: - penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria, - pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi, dan/atau - pemberian kemudahan dan/atau bantuan.	0	T	[1.04.03.1.01.0014] [1.04.03.2.02.0012]
26	1.04.000049	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Dokumen	Jumlah dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan antara Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dengan mitra dari unsur non-pemerintah (melalui: hibah lembaga, CSR perusahaan, filantropi, sumbangan, dsb.)	0	T	[1.04.05.2.01.0009]
27	1.04.000050	Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Dokumen	Dokumen Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	0	T	[1.04.02.2.06.0004]
28	1.04.000051	Ketersediaan akses jaringan jalan sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta)	Dokumen	Identifikasi ketersediaan akses jaringan jalan sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RDTR, RP3KP, dokumen perencanaan teknis bidang jaringan jalan dan identifikasi melalui citra satelit	0	T	[1.04.02.1.01.0002] [1.04.02.2.01.0002]
29	1.04.000052	Ketersediaan Jaringan Air Limbah di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	Identifikasi ketersediaan jaringan air limbah di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perecanaan teknis bidang air limbah domestik dan identifikasi melalui citra satelit	0	T	[1.04.02.1.01.0002] [1.04.02.2.01.0002]
30	1.04.000053	Ketersediaan Jaringan Air Minum di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	Identifikasi ketersediaan jaringan air minum di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perecanaan teknis bidang air minum dan identifikasi melalui citra satelit	0	T	[1.04.02.1.01.0002] [1.04.02.2.01.0002]
31	1.04.000054	Ketersediaan Jaringan Listrik di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	Identifikasi ketersediaan jaringan listrik di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perecanaan teknis bidang jaringan listrik dan identifikasi melalui citra satelit	0	T	[1.04.02.1.01.0002] [1.04.02.2.01.0002]

32	1.04.000055	Ketersediaan Jaringan Persampahan di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	Identifikasi ketersediaan jaringan persampahan di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perecanaan teknis bidang persampahan dan identifikasi melalui citra satelit	0	T	[1.04.02.1.01.0002] [1.04.02.2.01.0002]
33	1.04.000056	Ketersediaan moda transportasi sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	Identifikasi ketersediaan moda transportasi sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perecanaan teknis bidang moda transportasi dan identifikasi melalui citra satelit	0	T	[1.04.02.1.01.0002] [1.04.02.2.01.0002]
34	1.04.000057	Ketersediaan rencana pengembangan aksesibilitas sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta)	Dokumen	Identifikasi ketersediaan rencana pengembangan aksesibilitas sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perecanaan teknis bidang aksesibilitas dan identifikasi melalui citra satelit	0	T	[1.04.02.1.01.0002] [1.04.02.2.01.0002]
35	1.04.000058	Ketersediaan rencana pengembangan PSU pendukung sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan (Peta)	Dokumen	Identifikasi ketersediaan PSU pendukung sebagai daya dukung/daya tampung di lahan potensial sebagai lokasi relokasi dapat diperoleh dari RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perecanaan teknis bidang PSU dan identifikasi melalui citra satelit	0	T	[1.04.02.1.01.0002] [1.04.02.2.01.0002]
36	1.04.000059	Lahan Potensial Milik BUMD Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Lokasi	1. Peruntukan lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 2. Tidak berada di kawasan negative list dalam RP3KP 3. Memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai dengan penilaian appraisal	0	T	[1.04.02.1.01.0002] [1.04.02.2.01.0002]
37	1.04.000060	Lahan Potensial Milik Masyarakat Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Lokasi	1. Peruntukan lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 2. Tidak berada di kawasan negative list dalam RP3KP 3. Memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai dengan penilaian appraisal	0	T	[1.04.02.1.01.0002] [1.04.02.2.01.0002]
38	1.04.000061	Lahan Potensial Milik Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Lokasi	1. Peruntukan lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 2. Tidak berada di kawasan negative list dalam RP3KP 3. Dibuktikan dengan Penetapan Status Barang Milik Daerah	1	T	[1.04.02.2.01.0009] [1.04.02.2.01.0002]
39	1.04.000063	Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Laporan	Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun yang memuat: 1. Data kepemilikan dan/atau penghunian serta letak Sarusun 2. Pembentukan Panitia Musyawarah 3. Hasil Sosialisasi 4. Hasil Musyawarah pembentukan PPPSRS 5. Susunan Organisasi PPPSRS	0	T	[1.04.02.2.05.0001]
40	1.04.000065	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1	T	[1.04.05.2.01.0003]
41	1.04.000066	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Laporan	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi KPDBU perumahan umum/rumah susun umum yang kegiatannya menjelaskan: 1. Tahapan kegiatan 2. Pelaksana kegiatan 3. Mutu baku	0	T	[1.04.02.2.06.0004]

42	1.04.000067	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Laporan	perumahan/permukiman menyusun rencana pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil II. Dinas Kabupaten/Kota yang mengurusi perumahan/permukiman melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas Provinsi yang mengurusi perumahan/permukiman dalam rangka Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dalam bentuk FGD/Workshop/Rapat minimal 1 kali dalam 1 tahun III. Dinas Kabupaten/Kota yang mengurusi perumahan/permukiman melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan pengembang perumahan dalam rangka Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil dalam bentuk FGD/Workshop/Rapat minimal 2 kali dalam 1 tahun IV. Dinas Kabupaten/Kota yang mengurusi perumahan/permukiman menyusun laporan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil kepada Bupati/Walikota minimal 1 kali dalam 1 tahun	0	T	[1.04.06.2.01.0001]
43	1.04.000069	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) Fungsi Hunian	Laporan	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan SKBG fungsi hunian yang kegiatannya menjelaskan: 1. Tahapan kegiatan 2. Pelaksana kegiatan 3. Mutu baku	0	T	[1.04.02.2.07.0002]
44	1.04.000070	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan oleh Pokja PKP Kabupaten/Kota atau Forum PKP Kabupaten/Kota	1	T	[1.04.03.2.01.0004]
45	1.04.000071	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	Dokumen laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan di kabupaten/kota	1	T	[1.04.02.2.06.0003]
46	1.04.000074	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan oleh Pokja PKP atau Forum PKP sesuai kewenangan. Diselenggarakan oleh Pokja PKP Provinsi atau Forum PKP Provinsi bagi Pemerintah Provinsi, serta diselenggarakan oleh Pokja PKP Kabupaten/Kota atau Forum PKP Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.	0	T	[1.04.03.1.02.0005] [1.04.03.2.03.0004]
47	1.04.000078	Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan hasil serah terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang.	0	T	[1.04.05.2.01.0010]
48	1.04.000081	Laporan pelaksanaan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil, dan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman antara Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dengan mitra dari unsur non-pemerintah (melalui: hibah lembaga, CSR perusahaan, filantropi, sumbangan, dsb.)	0	T	[1.04.03.1.02.0004] [1.04.03.1.02.0012] [1.04.03.2.03.0003]
49	1.04.000082	Laporan pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program	Laporan	Dokumen laporan pelaksanaan OP lingkungan perumahan pada relokasi program yang menjelaskan: 1. Urgensi pelaksanaan operasional dan pemeliharaan 2. Kondisi bangunan atau lingkungan perumahan 3. Progres pelaksanaan operasional dan pemeliharaan	0	T	[1.04.02.1.03.0006] [1.04.02.2.03.0006]

50	1.04.000083	Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Layanan	Laporan	Dilakukan oleh OPD Teknis Bidang Perumahan dengan muatan yang terdiri atas: 1. Laporan kendala penerapan SPM 2. Laporan anggaran dalam penerapan SPM 3. Laporan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan (verifikasi, sosialisasi, dan pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti) 4. Jumlah unit rumah yang tertangani 5. Jumlah rumah tangga yang terlayani	0	T	[1.04.02.2.04.0006]
51	1.04.000085	Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Layanan	Laporan	Dilakukan oleh OPD Teknis Bidang Perumahan dengan muatan yang terdiri atas: 1. Laporan kendala penerapan SPM 2. Laporan anggaran dalam penerapan SPM 3. Laporan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan (verifikasi, sosialisasi, dan pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti) 4. Jumlah unit rumah yang tertangani 5. Jumlah rumah tangga yang terlayani pedoman penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan mengacu kepada Perpres 62/2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional	0	T	[1.04.02.2.04.0003]
52	1.04.000089	Laporan pelaksanaan Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Laporan	Dokumen laporan pelaksanaan penguatan dan pembinaan BLU/BUMD untuk penyelenggaraan rumah sederhana	0	T	[1.04.02.2.06.0002]
53	1.04.000090	Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Laporan	Pelaporan untuk Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi. Pelaporan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.		Y	[1.04.03.2.02.0004]
54	1.04.000091	Laporan pelaksanaan pertemuan/ koordinasi penyepakatan penerima bantuan berdasarkan jenis layanan	Laporan	Dokumen laporan pelaksanaan pertemuan dalam rangka Koordinasi Penyepakatan Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan yang menjelaskan: 1. Jumlah penerima bantuan 2. Jenis bantuan yang diberikan 3. Kesepakatan koordinasi	0	T	[1.04.02.1.02.0006] [1.04.02.2.02.0006]
55	1.04.000092	Laporan pelaksanaan pertemuan/ rembug warga yang dilakukan untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Laporan	Dokumen laporan pelaksanaan rembug warga (musyawarah warga) untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang memuat: 1. BNBA penerima layanan 2. Jumlah rumah sesuai dengan klasifikasi kerusakan 3. Jenis pelayanan yang diberikan kepada penerima layanan SPM	0	T	[1.04.02.2.02.0008]
56	1.04.000094	Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Laporan	Dokumen laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana yang menjelaskan: 1. Data penerima bantuan dan kondisi rumah 2. Dokumentasi rumah eksisting 3. Besaran bantuan dan bentuk bantuan 4. DED dan RAB 5. Progres pelaksanaan pembangunan	0	T	[1.04.02.1.03.0004] [1.04.02.2.03.0004]
57	1.04.000096	Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana	Laporan	Dokumen laporan pelaksanaan proses pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana yang menjelaskan: 1. Data penerima bantuan dan kondisi rumah 2. Data lokasi pembangunan rumah baru dan jumlah unit rumah 3. Siteplan, DED dan RAB 4. Progres pelaksanaan pembangunan	0	T	[1.04.02.1.03.0012] [1.04.02.2.03.0012]
58	1.04.000097	Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Relokasi Program	Laporan	Dokumen laporan pelaksanaan proses pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban relokasi program provinsi yang menjelaskan: 1. Data penerima bantuan dan kondisi rumah 2. Data lokasi pembangunan rumah baru dan jumlah unit rumah 3. Siteplan, DED dan RAB 4. Progres pelaksanaan pembangunan	0	T	[1.04.02.1.03.0011] [1.04.02.2.03.0011]
59	1.04.000101	Laporan pelaksanaan proses Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan. Aktivitas pelaksanaan meliputi kegiatan penyusunan, review, legalisasi, sampai dengan sosialisasi/diseminasi.	0	T	[1.04.03.1.01.0008] [1.04.03.2.02.0008]

60	1.04.000105	Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh alam meningkatkan pemahaman atas rumah layak huni melalui penyuluhan, pendampingan, pemberdayaan, dll. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.	0	T	[1.04.03.1.01.0014] [1.04.03.2.02.0012]
61	1.04.000106	Laporan Pembinaan P3SRS	Laporan	Laporan pembinaan P3SRS yang memuat laporan kegiatan: 1. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan 2. Kegiatan pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi terhadap pengurus P3SRS	0	T	[1.04.02.2.05.0001]
62	1.04.000108	Laporan Pembinaan UPT Rumah Susun	Laporan	Laporan pembinaan UPT rumah susun yang dikelola	0	T	[1.04.02.2.05.0001]
63	1.04.000110	Laporan proses penyediaan PSU perumahan	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses penyediaan PSU perumahan yang menjelaskan: 1. Data 2. Dokumentasi kondisi eksisting 3. Progres pelaksanaan penyediaan perumahan 4. DED dan RAB		Y	[1.04.05.2.01.0002]
64	1.04.000111	Laporan proses rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Laporan	Dokumen laporan proses Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana yang menjelaskan: 1. Data penerima bantuan dan kondisi rumah 2. Dokumentasi rumah eksisting 3. Besaran bantuan dan bentuk bantuan 4. RAB 5. Progres pelaksanaan rehabilitasi/perbaikan	0	T	[1.04.02.1.03.0001] [1.04.02.2.03.0001]
65	1.04.000113	lokasi perumahan dan permukiman kumuh hasil survei	Lokasi	Hasil survei yang menggambarkan profil kumuh daerah (nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh), serta dapat merumuskan strategi dan prioritas penanganan kawsan kumuh di daerah.	0	T	[1.04.03.2.02.0014]
66	1.04.000114	Lokasi perumahan dan permukiman kumuh yang ditetapkan	Lokasi	Hasil penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan: a. tabel daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman dan b. peta sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksudberisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan. Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain. Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud, dibuat dalam suatu wilayah daerah kabupaten/kota, khusus DKI Jakarta dalam suatu wilayah daerah provinsi berdasarkan tabel daftar lokasi. Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khusus untuk DKI Jakarta oleh Pemerintah Daerah Provinsi, dengan melibatkan masyarakat serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.	0	T	[1.04.03.2.02.0014]
67	1.04.000115	Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian, dengan penjelasan daftar lokasi perumahan tersebut.		Y	[1.04.05.2.01.0002]
68	1.04.000116	Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Jenis Bencana dan Tingkat Risiko	Lokasi	Lokasi rawan bencana provinsi berdasarkan jenis bencana dan tingkat risiko bencana yang bersumber dari: 1. Data BPBD Kabupaten/Kota, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP.	10	T	[1.04.02.2.01.0009]
69	1.04.000118	Luas Lahan Potensial Milik BUMD Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Ha	Luas lahan milik BUMD yang dapat digunakan sebagai lokasi relokasi sesuai peruntukan perumahan	0	T	[1.04.02.1.01.0002] [1.04.02.2.01.0002]
70	1.04.000119	Luas Lahan Potensial Milik Masyarakat Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Ha	Luas lahan milik masyarakat yang dapat digunakan sebagai lokasi relokasi sesuai hasil penilaian appraisal	0	T	[1.04.02.1.01.0002] [1.04.02.2.01.0002]
71	1.04.000120	Luas Lahan Potensial Milik Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Ha	Luas lahan milik pemerintah yang dapat digunakan sebagai lokasi relokasi sesuai peruntukan perumahan	0	T	[1.04.02.2.01.0002]

72	1.04.000124	Luas Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Ha	Luas lokasi rawan bencana provinsi yang bersumber dari: 1. Data BPBD Kabupaten/Kota, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP.	6,2556	T	[1.04.02.2.01.0009]
73	1.04.000126	Luas Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Ha	Luas lahan lokasi yang berpotensi terkena relokasi, yaitu: 1. kawasan rawan bencana berisiko tinggi, 2. kawasan negative list perumahan, dan 3. kawasan permukiman kumuh berat. Data bersumber dari: 1. Data BPBD Kabupaten/Kota, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP.	0	T	[1.04.02.2.01.0007]
74	1.04.000133	Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Orang	Jumlah orang yang mengikuti penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh.	0	T	[1.04.03.1.01.0018] [1.04.04.2.01.0008]
75	1.04.000134	Pegawai BLU/BUMD yang mengikuti penguatan dan pembinaan untuk penyelenggaraan rumah sederhana	Orang	Daftar jumlah pegawai BLU/BUMD yang mengikuti penguatan dan pembinaan untuk penyelenggaraan rumah sederhana	0	T	[1.04.02.2.06.0002]
76	1.04.000135	Penerima Bantuan Dalam Bentuk Pembangunan Kembali	Orang	Jumlah penerima bantuan dalam bentuk pembangunan kembali yang diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni	0	T	[1.04.02.1.02.0006] [1.04.02.2.02.0006]
77	1.04.000136	Penerima Bantuan Dalam Bentuk Pemberian Subsidi Uang Sewa	Orang	Jumlah penerima bantuan dalam bentuk pemberian subsidi uang sewa yang diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa rumah layak huni terjangkau dan subsidi uang sewa selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat	0	T	[1.04.02.1.02.0006] [1.04.02.2.02.0006]
78	1.04.000137	Penerima Bantuan Dalam Bentuk Rehabilitasi Rumah	Orang	Jumlah penerima bantuan dalam bentuk rehabilitasi rumah yang diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni	0	T	[1.04.02.1.02.0006] [1.04.02.2.02.0006]
79	1.04.000138	Penerima Bantuan Dalam Bentuk Relokasi	Orang	Jumlah penerima bantuan dalam bentuk relokasi yang diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur atau Bupati/Wali Kota tentang Relokasi Korban Bencana	0	T	[1.04.02.1.02.0006] [1.04.02.2.02.0006]
80	1.04.000140	Pengelola Pemilik/Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) yang dibina	P3SRS	Jumlah P3SRS yang dibina Permen PUPR 14/2021	0	T	[1.04.02.2.05.0001]
81	1.04.000141	Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan yang mengajukan izin pembangunan rumah atau pengembangan perumahan	Pengembang (Badan Usaha) atau PerOrangan	Jumlah Pengembang (Badan Usaha) atau Perorangan yang mengajukan izin pembangunan rumah atau pengembangan perumahan	0	T	[1.04.02.2.06.0001]
82	1.04.000143	Perkiraan Harga Beli Tanah di Lahan Potensial (nilai NJOP dan harga pasar)	Dokumen	Perkiraan harga beli tanah adalah penilaian harga beli tanah berdasarkan nilai NJOP dan harga pasar yang melibatkan appraisal dalam prosesnya.	0	T	[1.04.02.1.01.0002] [1.04.02.2.01.0002]
83	1.04.000144	Peserta Sosialisasi Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Orang	Daftar jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	0	T	[1.04.02.1.02.0010] [1.04.02.2.02.0010]
84	1.04.000146	Peserta Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	Daftar jumlah orang dan nama peserta kegiatan sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota	0	T	[1.04.02.2.02.0001]
85	1.04.000148	PSU yang tersedia dari hasil kerja sama	Jenis dan Unit (PSU)	Daftar PSU Perumahan atau Permukiman (sesuai kewenangan) berdasarkan jenis dan jumlahnya, dari Kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan dan/atau pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	0	T	[1.04.05.1.01.0005] [1.04.05.2.01.0009]
86	1.04.000151	Rencana Penyediaan dan Keterpaduan PSU Perumahan	Dokumen	Dokumen yang memuat kebutuhan dan rencana penyediaan PSU Perumahan	0	T	[1.04.05.2.01.0001]
87	1.04.000154	Rumah bagi Korban bencana kabupaten/kota yang terbangun	Unit Rumah	Jumlah rumah yang memenuhi kriteria berat dan dilakukan pembangunan kembali sehingga memenuhi kriteria rumah layak huni	0	T	[1.04.02.2.03.0004]
88	1.04.000159	Rumah Khusus	Unit Rumah	Jumlah rumah khusus eksisting milik pemerintah sesuai kewenangannya beserta data penghunian	0	T	[1.04.02.1.01.0006] [1.04.02.2.01.0006]

89	1.04.000160	Rumah Khusus Beserta PSU bagi Korban bencana kabupaten/kota yang Terbangun	Unit Rumah	Jumlah rumah khusus yang dibangun bagi Korban Bencana kabupaten/kota dengan kriteria: sebagai berikut: 1. Peruntukan lokasi sesuai dengan RTRW didukung dengan surat kesesuaian peruntukan ruang 2. Ketersediaan konektivitas ke lokasi 3. Bebas dari bencana banjir dan longsor 4. Tidak melanggar garis sempadan bangunan, sungai, pantai , dan danau 5. Ketersediaan pasokan listrik sesuai kebutuhan 6. Terdapat pasokan air minum atau sumber air bersih lainnya sesuai kebutuhan 7. Pembebasan tanah (UU No. 2/2012 dan peraturan pelaksananya) 8. Dibutuhkan DED dan Rencana Aksi	0	T	[1.04.02.2.03.0012]
90	1.04.000162	Rumah Khusus Beserta PSU bagi yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	Jumlah rumah khusus yang dibangun bagi Masyarakat Terkena Relokasi Program kabupaten/kota dan dilaksanakan untuk relokasi yang berdampak masif, untukmemenuhi kekurangan rumah sewa eksisting (lebih dari 50 unit) dengan kriteria: sebagai berikut: 1. Peruntukan lokasi sesuai dengan RTRW didukung dengan surat kesesuaian peruntukan ruang 2. Ketersediaan konektivitas ke lokasi 3. Bebas dari bencana banjir dan longsor 4. Tidak melanggar garis sempadan bangunan, sungai, pantai , dan danau 5. Ketersediaan pasokan listrik sesuai kebutuhan 6. Terdapat pasokan air minum atau sumber air bersih lainnya sesuai kebutuhan 7. Pembebasan tanah (UU No. 2/2012 dan peraturan pelaksananya) 8. Dibutuhkan DED dan Rencana Aksi	0	T	[1.04.02.2.03.0011] [1.04.02.2.03.0012]
91	1.04.000164	Rumah Khusus yang Dibangun	Unit	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun dengan kriteria sebagai berikut: 1. Peruntukan lokasi sesuai dengan RTRW didukung dengan surat kesesuaian peruntukan ruang 2. Ketersediaan konektivitas ke lokasi 3. Bebas dari bencana banjir dan longsor 4. Tidak melanggar garis sempadan bangunan, sungai, pantai , dan danau 5. Ketersediaan pasokan listrik sesuai kebutuhan 6. Terdapat pasokan air minum atau sumber air bersih lainnya sesuai kebutuhan 7. Pembebasan tanah (UU No. 2/2012 dan peraturan pelaksananya) 8. Dibutuhkan DED dan Rencana Aksi	0	T	[1.04.02.2.05.0003]
92	1.04.000165	Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya	Unit Rumah	Jumlah total unit rumah yang akan ditangani berdasarkan data capaian pelaksanaan SPM dan dokumen Rencana Aksi yang telah diupdate sesuai pelaksanaan	0	T	[1.04.02.2.01.0003]
93	1.04.000166	Rumah Korban bencana kabupaten/kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Unit Rumah	Jumlah unit rumah yang belum ditangani berdasarkan data capaian pelaksanaan SPM dan dokumen Rencana Aksi yang telah diupdate sesuai pelaksanaan	0	T	[1.04.02.2.01.0003]
94	1.04.000167	Rumah Korban bencana kabupaten/kota Kejadian Sebelumnya yang Sudah Tertangani	Unit Rumah	Jumlah unit rumah yang sudah ditangani berdasarkan data capaian pelaksanaan SPM dan dokumen Rencana Aksi yang telah diupdate sesuai pelaksanaan	0	T	[1.04.02.2.01.0003]
95	1.04.000168	Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit	Jumlah rumah yang memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang dan dilakukan rehabilitasi sehingga memenuhi kriteria rumah layak huni.	0	T	[1.04.02.2.03.0001]
96	1.04.000173	Rumah MBA di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	Jumlah unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Atas (MBA) di lokasi rawan bencana.	0	T	[1.04.02.2.01.0009]
97	1.04.000175	Rumah MBM di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	Jumlah unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Menengah (MBM) di lokasi rawan bencana.	82	T	[1.04.02.2.01.0009]
98	1.04.000177	Rumah MBR di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	Jumlah unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di lokasi rawan bencana.	276	T	[1.04.02.2.01.0009]
99	1.04.000179	Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah	Jumlah rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabuoaten/Kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan OP hanya dapat diberikan kepada aset (rumah susun atau rumah khusus) yang dimiliki pemerintah kab/kota.	0	T	[1.04.02.2.03.0006]
100	1.04.000181	rumah penerima manfaat dari penyediaan jaringan tenaga listrik	Unit Rumah	Ketersediaan data rumah penerima manfaat jaringan distribusi, sambungan ke rumah tangga, KWH meter, subsidi penyambungan rumah tangga	0	T	[1.04.05.3.01.0006] [1.04.05.4.01.0009]
101	1.04.000182	Rumah Sewa Milik Masyarakat	Unit Rumah	Data ketersediaan rumah sewa milik masyarakat yang layak huni dan terjangkau	0	T	[1.04.02.1.01.0006] [1.04.02.2.01.0006]

102	1.04.000183	Rumah Susun (Hunian Vertikal)	Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)	Jumlah rumah susun eksisting milik pemerintah sesuai kewenangannya beserta data penghunian	0	T	[1.04.02.1.01.0006] [1.04.02.2.01.0006]
103	1.04.000190	Rumah yang berkualitas (aman/andal terhadap bencana) di lokasi rawan bencana kabupaten/kota	Unit Rumah	Jumlah unit rumah yang berkualitas di lokasi rawan bencana.	294	T	[1.04.02.2.01.0009]
104	1.04.000193	Rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU perumahan	Unit Rumah	Jumlah unit rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU perumahan.		Y	[1.04.05.2.01.0002]
105	1.04.000194	Rumah yang Rusak Berat Akibat Terkena Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	Jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah 65%, kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.	0	T	[1.04.02.2.01.0004]
106	1.04.000196	Rumah yang Rusak Ringan Akibat Terkena Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	Jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah 30%, kerusakan terutama pada komponen non-struktural seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan dinding pengisi.	0	T	[1.04.02.2.01.0004]
107	1.04.000198	Rumah yang Rusak Sedang Akibat Terkena Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	Jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah 45%, kerusakan pada sebagian komponen non-struktural, dan/atau komponen struktural, seperti atap dan lantai.	0	T	[1.04.02.2.01.0004]
108	1.04.000200	Rumah yang tidak berkualitas (tidak aman/ tidak andal terhadap bencana) di lokasi rawan bencana	Unit Rumah	Jumlah unit rumah yang tidak berkualitas di lokasi rawan bencana.	64	T	[1.04.02.1.01.0011] [1.04.02.2.01.0009]
109	1.04.000201	Rumah yang Tidak Rusak pasca Terkena Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	Jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah di bawah 5%, tidak berdampak pada komponen struktural maupun non-struktural.	0	T	[1.04.02.2.01.0004]
110	1.04.000204	Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Fungsi Hunian yang Diterbitkan	Dokumen	Sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan Permen PUPR No. 17 Tahun 2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kepemilikkan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun	0	T	[1.04.02.2.07.0002]
111	1.04.000206	Sistem dan Kapasitas Pelayanan PSU Perumahan	Dokumen	Dokumen jangkauan dan keterpaduan PSU sesuai dengan dokumen yang memuatnya.	0	T	[1.04.05.2.01.0001]
112	1.04.000211	Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG) Rumah Susun yang Diterbitkan	Dokumen	Dokumen tanda bukti kepemilikan atas Sarusun di atas barang milik negara atau barang milik daerah berupa tanah wakaf dengan cara sewa Permen PUPR No. 17 Tahun 2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kepemilikkan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun	0	T	[1.04.02.2.07.0002]
113	1.04.000212	UPT Rumah Susun yang dikelola	UPT	Jumlah UPT rumah susun yang dikelola	0	T	[1.04.02.2.05.0001]
114	1.04.000216	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Berkomitmen menerima bantuan	Orang	Jumlah Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Kabuoaten/Kota yang Berkomitmen menerima bantuan	0	T	[1.04.02.2.01.0008]
115	1.04.000217	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status hak milik	Orang	Jumlah Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status hak milik	0	T	[1.04.02.2.01.0008]
116	1.04.000218	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)	Orang	Jumlah Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status lainnya (selain hak milik dan sewa)	0	T	[1.04.02.2.01.0008]
117	1.04.000219	Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status sewa	Orang	Jumlah Calon Penerima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang menempati rumah dengan status sewa	0	T	[1.04.02.2.01.0008]
118	1.04.000227	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Penyediaan Rumah Khusus Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Orang	Jumlah dan nama calon penerima rumah dalam bentuk penanganan penyediaan rumah khusus bagi masyarakat yang terdampak relokasi program kabupaten/kota	0	T	[1.04.02.2.02.0007]

119	1.04.000229	Daftar Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Dokumen	Tim Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil II. Kepala Dinas yang mengurusi perumahan/permukiman menerima dokumen permohonan Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi kecil yang sudah di verifikasi dan validasi oleh Asosiasi Pengembang Perumahan III. Tim Sertifikasi Pengembang Perumahan menerima Pendaftaran Permohonan Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil dari Kepala Dinas yang mengurusi perumahan/permukiman IV. Tim Sertifikasi Pengembang Perumahan melaksanakan Pemeriksaan Dokumen Permohonan Sertifikasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil yang meliputi antara lain: A. Dokumen Permohonan Sertifikasi: 1. Surat Permohonan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang 2. Data Identitas Pengembang Perumahan: a. Nama Lengkap Pengembang Perumahan b. Tahun Pendirian c. Faksimile d. Nama Direktur Utama/Penanggung Jawab e. Pengesahan Perusahaan oleh Kementerian HUMHAM f. Keanggotaan asosiasi Pengembang Perumahan g. Alamat Kantor h. Email i. Nomor Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan Akta	0	T	[1.04.06.2.01.0001]
120	1.04.000232	Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Dokumen	Dokumen yang menyatakan terjadinya Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan mitra untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam Kawasan Permukiman Kumuh kewenangan kabupaten/kota. Dokumen dapat berupa: MoU atau Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, surat pernyataan atau surat keterangan	0	T	[1.04.03.2.03.0003]
121	1.04.000233	Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Dokumen	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Layak Huni dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh sesuai kewenangan	0	T	[1.04.03.1.01.0015] [1.04.03.2.02.0013]
122	1.04.000234	Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Program Penanganan Permukiman Kumuh	Dokumen	Jumlah dokumen serah terima rumah baru layak huni dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Terdampak Program Penanganan Permukiman Kumuh sesuai kewenangan	0	T	[1.04.03.1.01.0012] [1.04.03.2.02.0010]
123	1.04.000235	Jumlah Backlog Rumah di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	Unit	Jumlah backlog unit rumah di luar kawasan permukiman kumuh	0	T	[1.04.04.2.01.0004]
124	1.04.000236	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Dokumen	Jumlah dokumen terkait peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud dibuat dalam suatu wilayah daerah kabupaten/kota, khusus DKI Jakarta dalam suatu wilayah daerah provinsi berdasarkan tabel daftar lokasi.	0	T	[1.04.03.2.03.0007]
125	1.04.000237	Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang difasilitiasi	Dokumen	Jumlah dokumen rencana tapak dan lantai perumahan yang terfasilitasi sesuai rekomendasi teknis	0	T	[1.04.02.2.06.0006]
126	1.04.000238	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Dokumen	Jumlah dokumen serah terima rumah baru layak huni dari Pemerintah Provinsi kepada Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	0	T	[1.04.04.2.01.0005]
127	1.04.000240	Jumlah Laporan Fasilitasi Terhadap Pengawasan dalam Pelaksanaan Penjualan Rumah	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	0	T	[1.04.02.2.05.0004]

128	1.04.000242	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Laporan	Jumlah laporan. Laporan tersebut memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan khususnya mengenai hasil pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan PermukimanÂ KumuhÂ Baru, didapatkan dengan ketentuan sebagai berikut: - Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang Perumahan dan Permukiman. - Dalam hal hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 terdapat ketidaksesuaian maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang melakukan upaya penanganan sesuai dengan kewenangannya.	0	T	[1.04.04.2.01.0007]
129	1.04.000243	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Lokasi	Jumlah lokasi perumahan yang dilaksanakan operasional dan pemeliharaan PSU pasca pembangunan, dengan penjelasan daftar lokasi PSU tersebut.	0	T	[1.04.05.2.01.0008]
130	1.04.000246	Jumlah Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Lokasi	Peta sebaran dan titik koordinat lokasi yang berpotensi terkena relokasi, yaitu: 1. kawasan rawan bencana berisiko tinggi, 2. kawasan negative list perumahan, dan 3. kawasan permukiman kumuh berat. Data bersumber dari: 1. Data BPBD Kabupaten/Kota, 2. RTRW, dan/atau 3. RP3KP	0	T	[1.04.02.2.01.0007]
131	1.04.000248	Jumlah orang yang terfasilitasi Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Orang	Daftar jumlah orang yang terfasilitasi Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	T	[1.04.02.2.06.0005]
132	1.04.000251	Jumlah Orang yang Terlayani Melalui Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Orang	Daftar jumlah orang dan nama penerima penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan bagi masyarakat yang terdampak relokasi program kab/kota	0	T	[1.04.02.2.03.0008]
133	1.04.000254	Jumlah Orang yang terlayani melalui penyediaan bantuan uang sewa sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Orang	Jumlah penerima layanan berupa subsidi uang sewa yang terdampak pelaksanaan program peremajaan permukiman kumuh.	0	T	[1.04.03.2.03.0010]
134	1.04.000256	Jumlah Orang yang terlayani melalui penyediaan rumah sewa sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Orang	Jumlah penerima layanan berupa rumah sewa yang terdampak pelaksanaan program peremajaan permukiman kumuh.	0	T	[1.04.03.2.03.0010]
135	1.04.000258	Jumlah Orang yang Terlayani Pemberian Subsidi Uang Sewa bagi Masyarakat yang Terdampak Bencana Kabupaten/Kota	Orang	Daftar jumlah orang dan nama penerima pemberian subsidi uang sewa bagi masyarakat terdampak bencana kabupaten/kota	0	T	[1.04.02.2.03.0007]
136	1.04.000259	Jumlah Orang yang Terlayani Pemberian Subsidi Uang Sewa bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Orang	Daftar jumlah orang dan nama penerima pemberian subsidi uang sewa bagi masyarakat terdampak relokasi program kabupaten/kota	0	T	[1.04.02.2.03.0008]
137	1.04.000261	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Kelompok	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU.	0	T	[1.04.05.2.01.0006]
138	1.04.000262	Jumlah Penerima Pembagian Rumah Baru Terdampak Program Penanganan Kumuh	Rumah Tangga	Jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang menerima Pembagian Rumah Baru Terdampak Program Penanganan Kumuh sesuai kewenangan	0	T	[1.04.03.1.01.0013] [1.04.03.2.02.0011]
139	1.04.000263	Jumlah Penerima Pembagian Rumah Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh	Rumah Tangga	Jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang menerima Pembagian Rumah Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh sesuai kewenangan	0	T	[1.04.03.1.01.0016] [1.04.03.2.02.0011]
140	1.04.000264	Jumlah Prasarana untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Unit	Jumlah prasarana yang disediakan dalam rangka menunjang fungsi hunian. Prasarana antara lain: a. jaringan jalan b. sistem penyediaan air minum c. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase) d. saluran pembuangan air limbah e. sistem pengelolaan persampahan f. sistem proteksi kebakaran.		Y	[1.04.05.2.01.0002]
141	1.04.000268	Jumlah PSU yang dilakukan Operasional dan Pemeliharaan di permukiman	Unit	Daftar PSU Permukiman yang dilakukan operasional dan pemeliharaan pasca pembangunan berdasarkan jenis dan jumlahnya.		Y	[1.04.05.1.01.0007]
142	1.04.000269	Jumlah PSU yang dilakukan Operasional dan Pemeliharaan di perumahan	Unit	Daftar PSU Perumahan yang dilakukan operasional dan pemeliharaan pasca pembangunan berdasarkan jenis dan jumlahnya.	0	T	[1.04.05.2.01.0008]

143	1.04.000271	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit	Jumlah unit Rumah Baru Layak Huni yang telah terbangun untuk meningkatkan Kualitas Kumuh kewenangan daerah	0	T	[1.04.04.2.01.0004]
144	1.04.000272	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang terbangun di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit	Jumlah unit Rumah Baru Layak Huni yang telah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan Kualitas permukiman Kumuh kewenangan kabupaten/kota	0	T	[1.04.03.2.03.0012]
145	1.04.000273	Jumlah Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit	Jumlah unit rumah dengan rincian tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan baik yang sudah diverifikasi maupun belum.	0	T	[1.04.03.2.03.0007]
146	1.04.000274	Jumlah Rumah di Kawasan Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang diverifikasi	Unit	Jumlah unit rumah dengan rincian tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan dan sudah diverifikasi.	67	T	[1.04.03.2.03.0007]
147	1.04.000275	Jumlah Rumah di Lokasi Kumuh yang dikelompokkan berdasarkan tingkat kekumuhan dan penanganannya	Unit	Jumlah rumah di lokasi kumuh dapat dilihat dari data hasil survey sekunder: data wilayah administrasi penanganan RTRW, RP3KP, RDTR, dokumen perencanaan teknis bidang perumahan kumuh dan data survey primer	0	T	[1.04.02.1.01.0008] [1.04.02.2.01.0007]
148	1.04.000276	Jumlah Rumah di lokasi rawan bahaya (bantaran sungai, sempadan rel, dll)	Unit	Jumlah rumah yang berada di lokasi rawan bahaya yaitu sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan rel KA, di kolong jembatan, di bawah SUTET yang bersumber RP3KP.	0	T	[1.04.02.1.01.0008] [1.04.02.2.01.0007]
149	1.04.000277	Jumlah rumah di lokasi rawan bencana	Unit	Jumlah rumah yang berada di lokasi rawan bencana dengan risiko tinggi.	0	T	[1.04.02.1.01.0008] [1.04.02.2.01.0007]
150	1.04.000278	Jumlah Rumah di lokasi yang tidak sesuai dengan tata guna lahan	Unit	Jumlah rumah yang tidak sesuai dengan tata guna lahan dapat dilihat dari data hasil survey sekunder: data wilayah administrasi penanganan RTRW, RDTR, dan data survey primer	0	T	[1.04.02.1.01.0008] [1.04.02.2.01.0007]
151	1.04.000279	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	0	T	[1.04.04.2.01.0006]
152	1.04.000280	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit	Jumlah keseluruhan unit Rumah Tidak Layak Huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh daerah dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	0	T	[1.04.04.2.01.0001]
153	1.04.000281	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit	Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh daerah dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang Diperbaiki oleh daerah	2	T	[1.04.04.2.01.0001]
154	1.04.000282	Jumlah Rumah yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali yang mendapatkan Operasional dan Pemeliharaan	Unit	Jumlah rumah yang dilaksanakan operasional dan pemeliharaan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjaga kawasan permukiman agar tidak menjadi kumuh daerah atau tidak kembali kumuh.	0	T	[1.04.03.1.02.0008] [1.04.03.2.03.0014]
155	1.04.000285	Jumlah Sarana untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Unit	Daftar jenis dan jumlah sarana yang disediakan dalam rangka menunjang fungsi hunian. Sarana antara lain: pendidikan dan pembelajaran, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan niaga, kebudayaan dan rekreasi, ruang terbuka, taman, lapangan olah raga, pemakaman, lahan parkir, serta pelayanan umum dan pemerintahan.		Y	[1.04.05.2.01.0002]
156	1.04.000286	Jumlah Sarana untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Unit	Daftar jenis dan jumlah sarana yang diperbaiki dalam rangka menunjang fungsi hunian. Sarana antara lain: pendidikan dan pembelajaran, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan niaga, kebudayaan dan rekreasi, ruang terbuka, taman, lapangan olah raga, pemakaman, lahan parkir, serta pelayanan umum dan pemerintahan.		Y	[1.04.05.2.01.0007]
157	1.04.000289	Jumlah Utilitas untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Unit	Daftar jenis dan jumlah utilitas yang menunjang fungsi hunian dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.		Y	[1.04.05.2.01.0002]
158	1.04.000290	Jumlah Utilitas untuk Menunjang Fungsi Hunian yang dilakukan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Unit	Daftar jenis dan jumlah utilitas yang diperbaiki dalam rangka menunjang fungsi hunian. Jenis utilitas antara lain: jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi, pemadam kebakaran, dan sarana penerangan jasa umum.		Y	[1.04.05.2.01.0007]

159	1.04.000293	Kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Laporan	Jumlah dokumen yang menjelaskan Kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dari perbaikan yang dilaksanakan.		Y	[1.04.05.1.01.0006] [1.04.05.2.01.0007]
160	1.04.000296	Laporan pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) untuk perumahan. Kerjasama antara Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dengan mitra dari unsur non-pemerintah (melalui: hibah lembaga, CSR perusahaan, filantropi, sumbangan, dsb.)	0	T	[1.04.05.2.01.0009]
161	1.04.000298	Laporan pelaksanaan Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Korban Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	Dokumen laporan pelaksanaan OP lingkungan perumahan pada relokasi program yang menjelaskan pelaksanaan dan penjagaan terhadap bangunan dan lingkungan perumahan	0	T	[1.04.02.2.03.0010]
162	1.04.000301	Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi Pelaksanaan kegiatan Pembagian Rumah layak huni oleh Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh sesuai kewenangan	0	T	[1.04.03.1.01.0016] [1.04.03.2.02.0011]
163	1.04.000302	Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Laporan	Jumlah laporan. Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru	0	T	[1.04.04.2.01.0009]
164	1.04.000303	Laporan pelaksanaan pertemuan/ rembug warga yang dilakukan untuk menentukan calon penerima rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Program Kabupaten/Kota	Laporan	Dokumen laporan pelaksanaan rembug warga (musyawarah warga) untuk menentukan calon penerima rumah dalam bentuk penanganan penyediaan rumah khusus bagi masyarakat yang terdampak relokasi program kabupaten/kota yang memuat: 1. BNBA penerima layanan 2. Jumlah rumah sesuai dengan klasifikasi kerusakan 3. Jenis pelayanan yang diberikan kepada penerima layanan SPM	0	T	[1.04.02.2.02.0007]
165	1.04.000305	Laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Laporan	Dokumen laporan pelaksanaan proses Pembangunan Rumah Baru Layak Huni bagi masyarakat terdampak relokasi program kab/kota yang menjelaskan: 1. Jumlah unit rumah atau penerima bantuan yang terdampak 2. Jenis bantuan yang diberikan 3. Progres pelaksanaan pembangunan	0	T	[1.04.02.2.03.0009]
166	1.04.000307	Laporan pelaksanaan proses pemugaran permukiman kumuh	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil dan dokumentasi pada setiap rangkaian kegiatan pelaksanaan proses pemugaran permukiman kumuh. Pemugaran sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan Perbaikan rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.	0	T	[1.04.03.2.03.0013]

167	1.04.000308	Laporan pelaksanaan proses pemukiman kembali permukiman kumuh	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil, dan dokumentasi dalam pelaksanaan pemukiman kembali pada kawasan permukiman kumuh. Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pembangunan dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum pada lokasi baru yang sesuai dengan rencana tata ruang. Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak. Pemukiman Kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud meliputi: a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas b. penghunian sementara untuk masyarakat di Perumahan dan Permukiman Kumuh pada lokasi rawan c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat d. pendataan masyarakat e. penyusunan rencana Permukiman baru, rencana pembongkaran Permukiman eksisting dan rencana pelaksanaan Pemukiman dan f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.	0	T	[1.04.03.2.03.0011]
168	1.04.000309	Laporan pelaksanaan proses peremajaan kawasan kumuh	Laporan	Laporan yang memuat risalah proses, hasil, dan dokumentasi dalam pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh. Peremajaan sebagaimana dimaksud dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, Perumahan, dan Permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud meliputi: a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan b. penghunian sementara untuk masyarakat c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat d. pendataan masyarakat e. penyusunan rencana dan f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.&	0	T	[1.04.03.2.03.0009]
169	1.04.000310	Laporan Pembinaan terhadap Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Laporan	perumahan/permukiman menyusun rencana pelaksanaan pembinaan Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil II. Dinas Kabupaten/Kota yang mengurusi perumahan/permukiman melaksanakan pembinaan kepada Asosiasi dan Pengembang Perumahan serta stakeholders terkait dalam bentuk: a. b. sosialisasi peraturan perundang- c. pemberian bimbingan, supervisi dan d. pendidikan dan e. penelitian dan f. pendampingan dan dan/atau g. pengembangan sistem layanan informasi dan komunikasi III. Dinas Kabupaten/Kota yang mengurusi perumahan/permukiman menyusun Laporan Pembinaan terhadap Pengembang Perumahan dan menyampaikannya kepada Bupati/Walikota minimal 1 kali dalam1 tahun IV. Bupati/Walikota menyampaikan Laporan Pembinaan terhadap Pengembang Perumahan kepada Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian yang membidangi Perumahan dan Permukiman) minimal 1 kali dalam 1 tahun V. Dinas Kabupaten/Kota yang mengurusi perumahan/permukiman melakukan pemantauan kualitas bangunan	0	T	[1.04.06.2.01.0001]
170	1.04.000313	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang dilakukan pemukiman kembali	Ha	Luas kawasan kumuh yang dilaksanakan melalui pemukiman kembali berdasarkan strategi yang sudah disusun melalui dokumen penanganan kumuh daerah.	0	T	[1.04.03.2.03.0011]
171	1.04.000314	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang dilakukan peremajaan kawasan kumuh	Ha	Luas kawasan kumuh yang dilaksanakan melalui peremajaan berdasarkan strategi yang sudah disusun melalui dokumen penanganan kumuh daerah.	0	T	[1.04.03.2.03.0009]

172	1.04.000315	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang Dipugar	Ha	Data rinci luas permukiman kumuh kewenangan kabupaten/kota yang ditangani melalui Pemugaran. Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali kawasan permukiman kumuh menjadi kawasan permukiman yang layak huni. Pola penanganan ini dilakukan pada lokasi yang memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal.	0	T	[1.04.03.2.03.0013]
173	1.04.000317	Peserta Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Orang	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses pembiayaan perumahan	0	T	[1.04.02.1.02.0009] [1.04.02.2.02.0009]
174	1.04.000318	Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	Pembangunan fisik rumah sesuai dengan ketentuan meliputi: 1. Kesesuaian lokasi pembangunan baru 2. Kesuaian rancangan rumah terhadap spesifikasi dan kriteria rumah layak huni 3. Kesesuaian bangunan fisik rumah terhadap site plan, spesifikasi dan kriteria RLH	0	T	[1.04.02.2.03.0009]
175	1.04.000320	Rumah pada Lokasi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit	Jumlah Rumah pada Lokasi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan OP hanya dapat diberikan kepada aset (rumah susun atau rumah khusus) yang dimiliki pemerintah kab/kota	0	T	[1.04.02.2.03.0010]
176	1.04.000322	Rumah Tangga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang Mengikuti kegiatan (sosialisasi/ seminar/ diskusi warga, dsb) untuk Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah sesuai kewenangan.	0	T	[1.04.03.1.01.0019] [1.04.03.2.02.0015]
177	1.04.000323	Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit	Jumlah keseluruhan unit Rumah Tidak Layak Huni milik masyarakat berpenghasilan rendah dalam Kawasan Permukiman Kumuh kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0	T	[1.04.03.2.03.0002]
178	1.04.000324	Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit	Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni milik masyarakat berpenghasilan rendah dalam Kawasan Permukiman Kumuh yang telah Diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	19	T	[1.04.03.2.03.0002]
179	1.04.000328	Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian Rumah Susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)		0	T	[1.04.02.2.05.0008] [1.04.02.1.01.0012]
180	1.04.000329	Jumlah rumah khusus beserta PSU pendukungnya yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah		0	T	[1.04.02.1.03.0013] [1.04.02.2.05.0007]
181	1.04.000330	Peta lokasi dan deliniasi kawasan permukiman kumuh	Dokumen			Y	[1.04.03.1.01.0020]
182	1.04.000338	Jumlah Data dan Profil Permukiman Kumuh	Dokumen			Y	[1.04.03.1.01.0020]
183	1.04.000889	Jumlah dan kondisi rumah di kawasan permukiman kumuh	Unit Rumah			Y	[1.04.03.1.01.0020]
184	1.04.000890	Jumlah rumah tangga di kawasan permukiman kumuh yang memiliki â€œLack of Accessâ€ terhadap 7 aspek dan 16 kriteria kumuh.	Rumah Tangga			Y	[1.04.03.1.01.0020]

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	Data 2025	Disabled	Info Sub Kegiatan
1	8.01.000001	Anggota Paskibraka	Orang	Anggota Paskibraka adalah pelajar putra dan putri terbaik yang merupakan kader bangsa untuk melaksanakan tugas mengibarkan/ menurunkan duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila baik di tingkat nasional/pusat, provinsi, dan kabupaten/kota	71	T	[8.01.02.1.01.0012] [8.01.02.2.01.0001] [8.01.02.2.01.0008]
2	8.01.000002	Calon Paskibraka	Orang	Para pelajar yang melamar untuk mengikuti seleksi Paskibraka	133	T	[8.01.02.1.01.0012] [8.01.02.2.01.0008]
3	8.01.000003	Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan	Dialog Interaktif dan Diskusi bersama untuk memberikan penguatan kepada peserta terkait pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan kepada para calon anggota paskibraka	0	T	[8.01.02.1.01.0010] [8.01.02.2.01.0010]
4	8.01.000004	Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Kegiatan	Memberikan ruang aktivitas, pelatihan, pengajaran, dan sosialisasi bagi anggota paskibraka dan anggota purnapaskibraka untuk meningkatkan pemahaman terkait ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, serta siap untuk menjadi generasi muda yang menjadi contoh dari generasi muda lainnya dalam membangun NKRI	0	T	[8.01.02.1.01.0008] [8.01.02.2.01.0007]
5	8.01.000005	Kelengkapan Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Unit	Forum Dialog dan Pelatihan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Calon Aggota Paskibraka dan Anggota Paskibraka	0	T	[8.01.02.1.01.0010] [8.01.02.2.01.0007]
6	8.01.000006	Kelengkapan pada Pembentukan Paskibraka	Orang	Penyediaan kebutuhan administrasi, seleksi, dan pelatihan calon anggota paskibraka	133	T	[8.01.02.1.01.0012] [8.01.02.2.01.0008]
7	8.01.000007	Kelengkapan pada pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	Kegiatan Forum dialog, diskusi interaktif, dll terkait pemberian pembinaan lanjutan terkait pancasila dan wawasan kebangsaan bagi anggota purna paskibraka duta pancasila	0	T	[8.01.02.1.01.0011] [8.01.02.2.01.0009]
8	8.01.000008	Kelengkapan Pelaksanaan Pembentukan Paskibraka	Unit	Penyediaan seluruh kebutuhan para calon anggota paskibraka dalam proses rekruitment dan seleksi	133	T	[8.01.02.1.01.0012] [8.01.02.2.01.0008]
9	8.01.000009	Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Unit	Penyediaan seluruh kebutuhan para anggota paskibraka dalam melaksanakan tugas pengibaran bendera	0	T	[8.01.02.1.01.0009] [8.01.03.2.01.0006]
10	8.01.000010	Kelengkapan Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	Penyediaan sarana dan prasarana, serta segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas purna paskibraka duta pancasila	0	T	[8.01.02.1.01.0010] [8.01.02.2.01.0010]
11	8.01.000011	Kelengkapan Pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Unit	Penyediaan ruang diskusi, pelatihan dan pengajaran kepada anggota paskibraka dan purnapaskibraka	0	T	[8.01.02.1.01.0008] [8.01.02.2.01.0007]
12	8.01.000012	Kelengkapan Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	Pemberian ruang diskusi, pelatihan dan pengajaran kepada anggota purna paskibraka duta pancasila	0	T	[8.01.02.1.01.0011] [8.01.02.2.01.0009]
13	8.01.000013	Kelengkapan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Unit	Penyediaan sarana dan prasarana dalam melakukan seleksi dan pengangkatan purnapaskibraka duta pancasila	0	T	[8.01.02.1.01.0007] [8.01.02.2.01.0011]
14	8.01.000014	Narasumber atau fasilitator kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	para pelatih dan pengajar dalam memberikan pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka	6	T	[8.01.02.1.01.0008] [8.01.02.1.01.0012] [8.01.02.2.01.0008] [8.01.02.2.01.0009]
15	8.01.000015	Narasumber atau fasilitator pada pembentukan Paskibraka	Orang	para pengajar dan fasilitator dalam melakukan pelatihan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka	6	T	[8.01.02.1.01.0012] [8.01.02.2.01.0008]
16	8.01.000016	Narasumber atau Pelatih dalam Pembentukan Paskibraka	Orang	para pengajar dan pelatih dalam melakukan pelatihan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka	6	T	[8.01.02.1.01.0012] [8.01.02.2.01.0008]
17	8.01.000017	Pamong/Pengasuh	Orang	Para pamong dan pengasuh angota paskibraka selama pelatihan	3	T	[8.01.02.1.01.0009] [8.01.02.1.01.0012] [8.01.02.2.01.0008] [8.01.03.2.01.0006]
18	8.01.000018	Panitia Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka	Orang	Panitia dalam proses seleksi dan rekuitment calon anggota paskibraka	22	T	[8.01.02.1.01.0012] [8.01.02.2.01.0008]
19	8.01.000019	Pelatih Paskibraka	Orang	para pengajar dan pelatih dalam melakukan pelatihan bagi calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka	6	T	[8.01.02.1.01.0012] [8.01.02.2.01.0008]
20	8.01.000020	Peningkatan kompetensi bidang karakter Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta pancasila terkait dengan pembentukan karakter kebangsaan	0	T	[8.01.02.1.01.0011] [8.01.02.2.01.0009]
21	8.01.000021	Peningkatan kompetensi kecerdasan estetika (olahrasa) Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta pancasila terkait dengan peningkatan kompetensi kecerdasan estetika (olahrasa)	0	T	[8.01.02.1.01.0011] [8.01.02.2.01.0009]

22	8.01.000022	Peningkatan kompetensi kecerdasan kinestetik (olahraga) Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta pancasila terkait dengan peningkatan kompetensi kecerdasan kinestetik (olahraga)	0	T	[8.01.02.1.01.0011] [8.01.02.2.01.0009]
23	8.01.000023	Peningkatan kompetensi kepemimpinan Pancasila Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta pancasila terkait dengan peningkatan kompetensi kepemimpinan	0	T	[8.01.02.1.01.0011] [8.01.02.2.01.0009]
24	8.01.000024	Peningkatan kompetensi literasi dan komunikasi Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kegiatan	Pemberian ruang pembelajaran dan diskusi bagi purnapaskibraka duta pancasila terkait dengan peningkatan kompetensi literasi dan komunikasi	0	T	[8.01.02.1.01.0011] [8.01.02.2.01.0009]
25	8.01.000025	Peserta Calon Paskibraka	Orang	penyedian sarana, prasarana, dan kebutuhan calon anggota paskibraka	133	T	[8.01.02.1.01.0012] [8.01.02.2.01.0008]
26	8.01.000026	Peserta Kegiatan Diskusi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	Penyediaan sarana, prasarana, uang saku, dan kebutuhan para calon anggota paskibraka dan anggota paskibraka dalam melaksanakan diskusi pembinaan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	71	T	[8.01.02.1.01.0008] [8.01.02.1.01.0012] [8.01.02.2.01.0007] [8.01.02.2.01.0008]
27	8.01.000027	Peserta Kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Orang	Penyediaan sarana, prasarana, uang saku, dan kebutuhan para anggota dan anggota purnapaskibraka dalam melaksanakan kegiatan pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	0	T	[8.01.02.1.01.0008] [8.01.02.2.01.0007]
28	8.01.000028	Peserta Kegiatan Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	Pembiayaan terkait kebutuhan peserta dalam pembinaan lanjutan kepada purnapakibraka duta pancasila	0	T	[8.01.02.2.01.0009]
29	8.01.000029	Peserta Kegiatan Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	Pembiayaan untuk peserta Kegiatan Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0	T	[8.01.02.1.01.0010] [8.01.02.2.01.0010]
30	8.01.000030	Peserta Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	Pembiayaan untuk peserta Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0	T	[8.01.02.1.01.0010]
31	8.01.000031	Purnapaskibraka	Orang	pembentukan purnapaskibraka	0	T	[8.01.02.1.01.0007] [8.01.02.2.01.0011]
32	8.01.000032	Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	Penangkatan, penetapan, dan pelantikan purnapaskibraka duta pancasila	0	T	[8.01.02.1.01.0007] [8.01.02.1.01.0011] [8.01.02.2.01.0009] [8.01.02.2.01.0011]
33	8.01.000033	Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan	Pembiayan terkait penyediaan ruang diskusi dengan pembelajaran terkait Seminar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0	T	[8.01.02.1.01.0010] [8.01.02.2.01.0010]
34	8.01.000034	Tim Panitia Rekrutmen dan Seleksi	Orang	Pembiayan terkait Tim Panitia Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota Paskibraka	22	T	[8.01.02.1.01.0012] [8.01.02.2.01.0008]
35	8.01.000035	Tim Pendukung Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Orang	Penyediaan sarana, prasarana, kebutuhan dan honor Tim Pendukung Pelaksanaan Tugas Paskibraka	0	T	[8.01.02.1.01.0009] [8.01.03.2.01.0006]
36	8.01.000036	Training of Trainer Kepamongan	Kegiatan	Penyelenggaraan TOT Kepamongan bagi Anggota Paskibraka dan Anggota Purnapaskibraka	Â Â Â Â 0	T	[8.01.02.1.01.0011] [8.01.02.1.01.0008] [8.01.02.2.01.0009] [8.01.02.2.01.0007]
37	8.01.000037	Transportasi dalam Pembentukan Paskibraka	Unit	kebutuhan fasilitas sarana transportasi dan biaya transportasi dalam pembentukan paskibraka	3	T	[8.01.02.1.01.0012] [8.01.02.2.01.0008]
38	8.01.000038	Transportasi pada pembentukan paskibraka	Unit	kebutuhan fasilitas sarana transportasi dan biaya transportasi pada pembentukan paskibraka	3	T	[8.01.02.1.01.0012] [8.01.02.2.01.0008]
39	8.01.000039	Transportasi Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Unit	kebutuhan fasilitas sarana transportasi dan biaya transport pelaksana tugas paskibraka	0	T	[8.01.02.1.01.0001] [8.01.02.1.01.0009] [8.01.03.2.01.0006]
40	8.01.000040	Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	Penyedian ruang diskusi dan dialog terkait penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	0	T	[8.01.02.1.01.0002] [8.01.02.2.01.0002]
41	8.01.000041	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	Penyediaan forum dialog dan diskusi, serta sosialisasi terkait Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50	T	[8.01.02.1.01.0003] [8.01.02.2.01.0003]
42	8.01.000042	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	Penyediaan forum diskusi dan dialog terkait Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	T	[8.01.02.1.01.0004] [8.01.02.2.01.0004]
43	8.01.000043	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan	Pelaksanaan Monev dan Penyusunan Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	T	[8.01.02.1.01.0005] [8.01.02.2.01.0005]

44	8.01.000044	Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen	Pelaksanaan kegiatan forum diskusi terkait Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	0	T	[8.01.02.1.01.0006] [8.01.02.2.01.0006]
45	8.01.000045	Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	Pembentukan dan Penetapan Purnapaskibraka Duta Pancasila	0	T	[8.01.02.1.01.0007] [8.01.02.2.01.0011]
46	8.01.000046	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	0	T	[8.01.02.1.01.0008] [8.01.02.2.01.0007]
47	8.01.000047	Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen	Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	0	T	[8.01.02.1.01.0009] [8.01.03.2.01.0006]
48	8.01.000048	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	0	T	[8.01.02.1.01.0010] [8.01.02.2.01.0010]
49	8.01.000049	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen	Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	0	T	[8.01.02.1.01.0011] [8.01.02.2.01.0009]
50	8.01.000050	Paskibraka	Orang	Program Paskibraka adalah program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila	71	T	[8.01.02.1.01.0012] [8.01.02.2.01.0008]
51	8.01.000051	Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen Laporan Capaian Kinerja Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	0	T	[8.01.03.1.01.0001] [8.01.03.2.01.0001]
52	8.01.000052	Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	Daftar Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	0	T	[8.01.03.1.01.0002] [8.01.03.2.01.0002]
53	8.01.000053	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	Rincian Orang Pertahun (3 Tahun Terakhir) beserta unsur-unsur yang mengikuti (masyarakat umum, pelajar, ormas dll) yang mengikuti sosialisasi dan bimtek, terkait Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	30	T	[8.01.03.1.01.0003] [8.01.03.2.01.0003]
54	8.01.000054	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	Rincian Orang Pertahun (3 Tahun Terakhir) beserta unsur-unsur yang mengikuti (masyarakat umum, pelajar, ormas dll) yang mengikuti sosialisasi, bimtek, pelatihan terkait koordinasi Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0	T	[8.01.03.1.01.0004] [8.01.03.2.01.0004]
55	8.01.000055	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	Laporan Capaian Kinerja terkait Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Tahun Sebelumnya	0	T	[8.01.03.1.01.0005] [8.01.03.2.01.0005]
56	8.01.000057	Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	Daftar dan Lampiran Kebijakan Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	0	T	[8.01.04.1.01.0002]
57	8.01.000059	Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (dalam 3 Tahun Terakhir)	0	T	[8.01.04.1.01.0004]
58	8.01.000061	Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen Laporan Capaian Kinerja Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	0	T	[8.01.05.1.01.0001] [8.01.05.2.01.0001]

59	8.01.000062	Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	Daftar Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	0	T	[8.01.05.1.01.0002] [8.01.05.2.01.0002]
60	8.01.000063	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi, Bimpek Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (3 Tahun Terakhir)	50	T	[8.01.05.1.01.0003] [8.01.05.2.01.0003]
61	8.01.000064	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti dan melaksanakan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Tahun Sebelumnya)	0	T	[8.01.05.1.01.0004] [8.01.05.2.01.0004]
62	8.01.000065	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	Dokumen Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Tahun Sebelumnya)	0	T	[8.01.05.1.01.0005] [8.01.05.2.01.0005]
63	8.01.000066	Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen Laporan Capaian Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Tahun Sebelumnya)	0	T	[8.01.06.1.01.0001] [8.01.06.2.01.0001]
64	8.01.000067	Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen Daftar Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (tiga tahun terakhir)	0	T	[8.01.06.1.01.0002] [8.01.06.2.01.0002]
65	8.01.000068	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	60	T	[8.01.06.1.01.0003] [8.01.06.2.01.0003]
66	8.01.000069	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Kegaiatan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0	T	[8.01.06.1.01.0004] [8.01.06.2.01.0004]
67	8.01.000070	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	Dokumen Laporan Capaian Kinerja Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Tahun Sebelumnya)	0	T	[8.01.06.1.01.0005] [8.01.06.2.01.0005]
68	8.01.000072	Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Renja dan Lopran Kinerja Tahun Sebelumnya)	0	T	[8.01.02.2.01.0001]
69	8.01.000073	Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	Jumlah dan Daftar Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (tiga Tahun Sebelumnya)	0	T	[8.01.02.1.01.0002] [8.01.02.2.01.0002]
70	8.01.000075	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	daftar dan Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Koordinasi (Diklat, Sosialisasi, Pelatihan dll) di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	T	[8.01.02.2.01.0004]
71	8.01.000088	Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Kegiatan	Laporan Capaian Kinerja dan Kegiatan pelaksanaan Tugas paskibraka Tahun Sebelumnya	0	T	[8.01.02.1.01.0009] [8.01.03.2.01.0006]

72	8.01.000089	Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen	Dokumen Laporan Kinerja Capaian Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	0	T	[8.01.04.2.01.0001]
73	8.01.000091	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	Daftar dan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialiasis, Bimtek, Kursus, dan/atau Pelatihan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	40	T	[8.01.04.1.01.0003] [8.01.04.2.01.0003]
74	8.01.000093	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	Dokumen Laporan Capaian Kinerja Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Tahun Sebelumnya)	0	T	[8.01.04.1.01.0005] [8.01.04.2.01.0005]
75	8.01.000094	Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	Dokumen Laporan Hasil Capaian Kinerja Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (tahun Sebelumnya)	0	T	[8.01.02.1.01.0001] [8.01.02.2.01.0001]
76	8.01.000104	Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Laporan Pelaksanaan & Dokumen SK Anggota Forkopimda)	0	T	[8.01.06.1.01.0006] [8.01.06.2.01.0006]

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2025	Disabled	Info Sub Kegiatan
1	3.30.000001	Agen dan Pasar Rakyat	Unit	Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar	640	T	[3.30.04.2.01.0001] [3.30.04.2.01.0002] [3.30.04.2.01.0003]
2	3.30.000010	Distributor B2	Orang		0	T	[3.30.02.2.06.0003]
3	3.30.000014	fasilitasi proses Perizinan Surat Tanda Pendaftara dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Kegiatan		1966	T	[3.30.02.2.03.0001]
4	3.30.000015	Gudang yang telah terdaftar	Unit	Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.	0	T	[3.30.02.2.02.0001]
5	3.30.000019	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kegiatan		0	T	[3.30.04.2.01.0001]
6	3.30.000020	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kegiatan		0	T	[3.30.04.2.01.0002]
7	3.30.000021	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kegiatan		0	T	
8	3.30.000022	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kegiatan		0	T	
9	3.30.000023	Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha di Bidang Metrologi	Kegiatan		0	T	[3.30.06.2.01.0002]
10	3.30.000024	Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kegiatan		0	T	
11	3.30.000025	Kegiatan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kegiatan		0	T	[3.30.04.2.01.0003]
12	3.30.000026	Kegiatan Penyidikan Metrologi Legal	Kegiatan		0	T	[3.30.06.2.01.0003]
13	3.30.000029	Koordinasi Penerbitan Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Kegiatan		0	T	[3.30.02.2.07.0001]
14	3.30.000044	Lokasi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan	Lokasi		0	T	[3.30.03.2.01.0001]
15	3.30.000045	Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan yang Diikuti	Kegiatan		0	T	[3.30.05.2.01.0004]
16	3.30.000046	Pameran Dagang Lokal yang Diikuti	Kegiatan		0	T	[3.30.05.2.01.0003]
17	3.30.000047	Pameran Dagang Nasional yang Diikuti	Kegiatan		0	T	[3.30.05.2.01.0002]
18	3.30.000048	Pasar Rakyat yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit		0	T	[3.30.02.2.01.0001]
19	3.30.000049	Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Unit		0	T	[3.30.04.2.02.0002]
20	3.30.000053	Pelaksanaan Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksan Distribusi Bahan Berbahaya bagi PA-B2	Kegiatan		0	T	[3.30.02.2.06.0002]
21	3.30.000054	Pelaksanaan Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2	Kegiatan		0	T	[3.30.02.2.06.0002]
22	3.30.000057	Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kegiatan		2	T	[3.30.04.2.02.0003]
23	3.30.000058	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kegiatan		2	T	[3.30.04.2.02.0003]
24	3.30.000060	Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kegiatan	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi adalah Tersedianya laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan alat ukur laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan satuan laporan	0	T	[3.30.04.2.03.0002]

25	3.30.000061	Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Kegiatan	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi adalah Tersedianya laporan pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90% dengan alat ukur laporan pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90% dengan satuan laporan	0	T	[3.30.04.2.03.0003]
26	3.30.000062	Pelaksanaan Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Kegiatan		0	T	[3.30.02.2.04.0001]
27	3.30.000063	Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Perlengkapan	Kegiatan		24	T	[3.30.06.2.01.0001]
28	3.30.000064	Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Takar	Kegiatan		0	T	[3.30.06.2.01.0001]
29	3.30.000065	Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Timbang	Kegiatan		0	T	[3.30.06.2.01.0001]
30	3.30.000066	Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Ukur	Kegiatan		0	T	[3.30.06.2.01.0001]
31	3.30.000067	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi	Pelaku Usaha		0	T	[3.30.06.2.01.0002]
32	3.30.000068	Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Unit		0	T	[3.30.04.2.02.0001]
33	3.30.000070	Pelaku Usaha Ekspor	Pelaku Usaha		12	T	
34	3.30.000071	Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha		9	T	
35	3.30.000073	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kegiatan		99	T	[3.30.04.2.02.0002]
36	3.30.000074	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kegiatan		8	T	[3.30.04.2.02.0001]
37	3.30.000075	Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Jasa Akomodasi	Kegiatan		0	T	[3.30.07.2.01.0006]
38	3.30.000076	Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Marketplace	Kegiatan		0	T	[3.30.07.2.01.0006]
39	3.30.000077	Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Perhotelan	Kegiatan		0	T	[3.30.07.2.01.0006]
40	3.30.000078	Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail	Kegiatan		0	T	[3.30.07.2.01.0006]
41	3.30.000079	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan		0	T	[3.30.03.2.02.0002]
42	3.30.000080	Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan		0	T	[3.30.03.2.02.0001]
43	3.30.000081	Pemeriksaan Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Kegiatan	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan adalah Terlengkapinya Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan dengan alat ukur Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan dengan satuan dokumen	0	T	[3.30.04.2.03.0001]
44	3.30.000082	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Kegiatan		0	T	[3.30.02.2.06.0001]
45	3.30.000083	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Untuk Peenjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kegiatan		0	T	[3.30.02.2.05.0001]
46	3.30.000084	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Untuk Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kegiatan		0	T	[3.30.02.2.05.0001]
47	3.30.000085	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P B2)	Kegiatan		0	T	[3.30.02.2.06.0003]
48	3.30.000091	Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pelaku Usaha		99	T	[3.30.03.2.02.0001] [3.30.03.2.02.0002]
49	3.30.000092	Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2)	Orang		0	T	[3.30.02.2.06.0003]
50	3.30.000094	Produk Unggulan Daerah	Produk		5	T	[5.05.03.1.02.0017] [5.05.03.2.02.0004] [3.30.05.2.01.0005]
51	3.30.000096	Produsen B2 (P-B2)	Orang		0	T	[3.30.02.2.06.0003]
52	3.30.000097	Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kegiatan		0	T	[3.30.07.2.01.0005]
53	3.30.000098	Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diadakan	Unit		0	T	[3.30.04.2.03.0002]
54	3.30.000099	Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diawasi Penyaluran dan Penggunaannya dengan Realisasi Minimal 90%	Unit		0	T	[3.30.04.2.03.0003]

55	3.30.000102	Pusat Perbelanjaan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit		0	T	[3.30.02.2.01.0001]
56	3.30.000103	Sarana Distribusi Perdagangan	Unit		0	T	[3.30.03.2.01.0002]
57	3.30.000104	Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Unit		0	T	
58	3.30.000107	Toko Swalayan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit		32	T	[3.30.02.2.01.0001]
59	3.30.000108	UMKM di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM		0	T	[3.30.07.2.01.0005] [3.30.07.2.01.0006]
60	3.30.000109	Verifikasi Dokumen sebagai Proses Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Kegiatan		0	T	[3.30.02.2.03.0002]
61	3.30.000110	Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenihan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Kegiatan		0	T	[3.30.02.2.04.0002]

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2025	Disabled	Info Sub Kegiatan
1	2.17.000001	Cabang Pembantu untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Kantor Cabang Pembantu adalah kantor yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman. Dalam hal WIlayah Keanggotaan Kab/Kota setiap Bupati/Wali Kota dlm hal ini didelegasikan kepada Perangkat Daerah yg menangani urusan koperasi dan ukm diwajibkan melakukan fasilitasi bimbingan dan pelindungan usaha simpan pinjam Koperasi pada Kantor Cabang Pembantu dan, melaksanakan pengawasan Jaringan Pelayanan Kantor Cabang Pembantu	3	T	[2.17.02.1.02.0001] [2.17.02.1.02.0003] [2.17.02.1.01.0002] [2.17.02.1.01.0001] [2.17.02.2.01.0001] [2.17.02.2.02.0001]
2	2.17.000002	Dokumen hasil peningkatan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan	Dokumen	Tatakelola Koperasi adalah kerangka kerja (framework) dalam bentuk peran (role), aturan (rule) dan pola keterhubungan (relationship) dari organ-organ Koperasi beserta dengan turunannya dalam mengarahkan dan mengendalikan usaha, untuk mewujudkan maksud dan tujuan Koperasi. Kelembagaan Koperasi adalah suatu hubungan dan tatanan dalam organisasi Koperasi untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan.	12	T	[2.17.03.1.01.0003] [2.17.03.2.01.0003]
3	2.17.000003	Dokumen hasil peningkatan pemberian manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakat	Dokumen	Tatakelola Koperasi adalah kerangka kerja (framework) dalam bentuk peran (role), aturan (rule) dan pola keterhubungan (relationship) dari organ-organ Koperasi beserta dengan turunannya dalam mengarahkan dan mengendalikan usaha, untuk mewujudkan maksud dan tujuan Koperasi. Kelembagaan Koperasi adalah suatu hubungan dan tatanan dalam organisasi Koperasi untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan.	4	T	[2.17.03.1.01.0003] [2.17.03.2.01.0003]
4	2.17.000004	Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	Kantor Cabang adalah kantor yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman. Salah satu bentuk Jaringan Pelayanan.	5	T	[2.17.02.1.01.0001] [2.17.02.1.01.0002] [2.17.02.1.02.0001] [2.17.02.1.02.0002] [2.17.02.1.02.0003] [2.17.02.2.01.0001] [2.17.02.2.02.0001] [2.17.02.1.02.0005]
5	2.17.000006	Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	Kantor Cabang Pembantu adalah kantor yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman. Salah satu bentuk jenis Jaringan Pelayanan	1	T	[2.17.02.1.01.0001] [2.17.02.1.01.0002] [2.17.02.1.02.0001] [2.17.02.1.02.0002] [2.17.02.1.02.0003] [2.17.02.2.01.0001] [2.17.02.2.02.0001]
6	2.17.000007	Kantor Cabang Pembantu untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Kantor Cabang Pembantu adalah kantor cabang pembantu yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman.	1	T	[2.17.02.2.01.0001] [2.17.02.2.02.0001]
7	2.17.000008	Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	Kantor Kas adalah kantor kas yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana.	0	T	[2.17.02.1.02.0001] [2.17.02.1.02.0003] [2.17.02.2.02.0001] [2.17.02.2.01.0001]
8	2.17.000010	Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Kantor Kas adalah kantor kas yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana.	0	T	[2.17.02.2.01.0001] [2.17.02.2.02.0001]
9	2.17.000014	Koperasi Koperasi Yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	Penilaian Kesehatan Koperasi merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan Pinjam, baik konvensional maupun Syariah.	20	T	[2.17.04.1.01.0003] [2.17.06.1.01.0005] [2.17.05.1.01.0001] [2.17.04.2.01.0003] [2.17.05.2.01.0001] [2.17.06.2.01.0006] [2.17.06.2.01.0008]

10	2.17.000015	Koperasi Yang akuntabilitas dan memberi manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakat	Unit Usaha	Akuntabilitas Koperasi adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh seseorang atau sekelompok orang (organisasi) yang telah menerima amanah dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut.	10	T	[2.17.03.1.02.0002] [2.17.03.2.01.0004]
11	2.17.000016	Koperasi Yang Diberikan penilaian jatidiri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian koperasi	Unit Usaha	Jati diri Koperasi meliputi pengertian, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip koperasi, seperti dikehendaki oleh anggota dan masyarakat koperasi yang mencerminkan ideologi koperasi.	9	T	[2.17.04.1.01.0003] [2.17.04.2.01.0003]
12	2.17.000021	Koperasi Yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Unit Usaha	Penghargaan Kesehatan adalah wujud penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi. Bentuk penghargaan kesehatan diberikan dalam bentuk sertifikat kesehatan kepada Koperasi dengan tingkat kesehatan sehat atau cukup sehat sebagaimana dimaksud dalam Permenkop Nomor 9 Tahun 2020	10	T	[2.17.04.1.01.0003] [2.17.04.2.01.0003]
13	2.17.000022	Koperasi yang telah dilakukan Kesehatan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Koperasi sehat adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus.	11	T	[2.17.04.1.01.0003]
14	2.17.000023	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi	Unit Usaha	Pengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	6	T	[2.17.03.2.01.0003] [2.17.09.4.01.0005]
15	2.17.000024	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Pengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	15	T	[2.17.03.2.01.0001]
16	2.17.000025	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Ketangguhan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	5	T	[2.17.03.1.02.0002] [2.17.03.2.01.0001]
17	2.17.000026	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	5	T	[2.17.03.1.02.0002] [2.17.03.2.01.0001]
18	2.17.000027	Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kemandirian Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Kemandirian Koperasi adalah suatu koperasi harus berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang didasarkan atas kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Pengawasan atas kemandirian koperasi adalah satu satu faktor kegiatan yang dilakukan oleh Pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan Koperasi.	21	T	[2.17.03.2.01.0001]
19	2.17.000028	Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	Kantor Cabang adalah kantor cabang yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman.	3	T	[2.17.02.1.02.0003] [2.17.02.1.02.0002] [2.17.02.2.01.0001]
20	2.17.000029	Pembukaan kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	Kantor Cabang adalah kantor cabang yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman.	1	T	[2.17.02.1.02.0003] [2.17.02.1.02.0002] [2.17.02.2.01.0001]
21	2.17.000030	Pembukaan Kantor Cabang untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Kantor Cabang adalah kantor cabang yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman.	3	T	[2.17.02.2.01.0001]
22	2.17.000031	Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Unit Usaha	Kantor Kas adalah kantor kas yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana.	0	T	[2.17.02.1.02.0003] [2.17.02.1.02.0002] [2.17.02.2.01.0001]

23	2.17.000032	Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Restrukturisasi usaha Koperasi adalah upaya menata kembali rantai bisnis, Aset dan portofolio asset, struktur keuangan, serta manajemen dan struktur organisasi agar memiliki daya saing dan lebih sehat sehingga dapat meningkatkan kinerja bisnis Koperasi.	0	T	[2.17.06.2.01.0001]
24	2.17.000033	SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	Orang	Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.	12	T	[2.17.05.1.01.0001] [2.17.06.1.01.0003] [2.17.06.1.01.0004] [2.17.06.1.01.0009] [2.17.06.1.01.0002] [2.17.05.2.01.0001] [2.17.05.2.02.0001] [2.17.06.2.01.0001] [2.17.06.2.01.0002] [2.17.06.2.01.0003] [2.17.04.2.01.0003] [2.17.06.2.01.0009] [2.17.06.3.01.0004] [2.17.06.4.01.0004] [2.17.06.1.01.0012] [2.17.05.1.01.0004] [2.17.05.1.01.0005] [2.17.09.4.01.0004] [2.17.09.4.01.0003]
25	2.17.000034	SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro.	20	T	[2.17.07.1.01.0001] [2.17.07.1.01.0002] [2.17.07.1.01.0003] [2.17.07.3.03.0001] [2.17.07.4.03.0001] [2.17.07.1.01.0004] [2.17.07.1.01.0005] [2.17.07.1.01.0006] [2.17.07.1.01.0007] [2.17.07.1.01.0008] [2.17.07.1.01.0010] [2.17.07.1.01.0009] [2.17.07.1.01.0011] [2.17.07.1.01.0012] [2.17.07.3.02.0001] [2.17.07.4.02.0001] [2.17.07.2.01.0004] [2.17.07.2.01.0002] [2.17.07.2.01.0003] [2.17.07.2.01.0005] [2.17.07.2.01.0006] [2.17.07.2.01.0007] [2.17.07.2.01.0008] [2.17.07.2.01.0009] [2.17.07.2.01.0010] [2.17.07.2.01.0011] [2.17.07.2.01.0012] [2.17.07.2.01.0013] [2.17.07.2.01.0014] [2.17.07.2.01.0015] [2.17.07.3.02.0001] [2.17.07.3.03.0001] [2.17.07.4.02.0001] [2.17.07.4.03.0001]
26	2.17.000035	Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil	28	T	[2.17.07.1.01.0001] [2.17.07.1.01.0006] [2.17.07.3.03.0001] [2.17.08.1.01.0002] [2.17.07.2.01.0005] [2.17.07.2.01.0006] [2.17.07.2.01.0007]
27	2.17.000036	Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan SDM	Unit Usaha	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil	12	T	[2.17.07.2.01.0005] [2.17.07.2.01.0001] [2.17.07.2.01.0004] [2.17.08.2.01.0001] [2.17.08.2.01.0002] [2.17.08.2.01.0005] [2.17.07.2.01.0006] [2.17.08.2.01.0006] [2.17.08.2.01.0003]
28	2.17.000037	Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Desain dan Teknologi	Unit Usaha	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil	12	T	[2.17.08.2.01.0001]
29	2.17.000038	Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan	Unit Usaha	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang rnemenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil	12	T	[2.17.08.2.01.0001]

30	2.17.000039	Unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan Pengolahan	Unit Usaha	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.	30	T	[2.17.08.1.01.0001] [2.17.08.2.01.0006]
31	2.17.000042	Unit Usaha Yang memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan	Unit Usaha	Akses pasar adalah kemampuan perusahaan/UMKM untuk memasuki pasar luar negeri dengan menjual barang dan jasanya di negara lain. Akses Pembiayaan adalah kemampuan untuk mendapatkan manfaat dalam rangka penyediaan dana hasil dari penyediaan uang atau tagihan yang didapatkan dari bank yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.	50	T	[2.17.06.1.01.0002] [2.17.06.2.01.0005] [2.17.06.3.01.0003] [2.17.06.4.01.0003] [2.17.07.3.02.0001] [2.17.07.4.02.0001] [2.17.09.3.02.0001] [2.17.09.4.01.0001] [2.17.09.4.02.0001]
32	2.17.000045	Unit Usaha Yang memiliki akses pembiayaan	Unit Usaha	Akses Pembiayaan adalah kemampuan untuk mendapatkan manfaat dalam rangka penyediaan dana hasil dari penyediaan uang atau tagihan yang didapatkan dari bank yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.	0	T	[2.17.06.1.01.0002] [2.17.07.3.02.0001] [2.17.07.4.02.0001] [2.17.06.1.01.0001] [2.17.06.2.01.0009] [2.17.06.2.01.0001] [2.17.06.2.01.0005] [2.17.07.4.02.0001] [2.17.07.3.02.0001] [2.17.06.3.01.0003] [2.17.06.4.01.0003]
33	2.17.000046	Unit Usaha Yang memiliki akses penguatan kelembagaan	Unit Usaha	Penguatan Kelembagaan adalah upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik institusi, sistem, maupun individual dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan.	21	T	[2.17.03.1.01.0003] [2.17.06.1.01.0002] [2.17.09.3.02.0001] [2.17.03.2.01.0003] [2.17.06.2.01.0005] [2.17.06.3.01.0003] [2.17.06.4.01.0003] [2.17.06.1.01.0012] [2.17.09.4.01.0004]
34	2.17.000047	Unit Usaha Yang memiliki akses pasar	Unit Usaha	Akses pasar adalah kemampuan perusahaan/UMKM untuk memasuki pasar luar negeri dengan menjual barang dan jasanya di negara lain.	31	T	[2.17.06.1.01.0002] [2.17.06.1.01.0008] [2.17.06.2.01.0005] [2.17.06.2.01.0007]
35	2.17.000048	Unit Usaha Yang memiliki Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi	Unit Usaha	Penguatan Kelembagaan adalah upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik institusi, sistem, maupun individual dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan. Standardisasi adalah proses menerapkan dan mengembangkan baku teknis berdasarkan kesepakatan berbagai pihak, terutama dalam bidang teknologi dan industri. Pembakuan dapat membantu memaksimalkan kecocokan, keantaroperasian, keamanan, keterulangan, atau mutu.	41	T	[2.17.03.1.01.0003] [2.17.06.1.01.0009] [2.17.06.1.01.0007] [2.17.09.3.01.0001] [2.17.09.4.01.0001] [2.17.06.2.01.0009] [2.17.09.4.01.0001] [2.17.09.3.01.0001] [2.17.03.2.01.0003] [2.17.06.2.01.0001] [2.17.06.1.01.0011] [2.17.05.1.01.0003] [2.17.05.1.01.0006] [2.17.09.4.01.0003]
36	2.17.000049	Unit Usaha Yang memiliki restrukturisasi usaha	Unit Usaha	Restrukturisasi usaha adalah upaya menata kembali rantai bisnis, Aset dan portofolio asset, struktur keuangan, serta manajemen dan struktur organisasi agar memiliki daya saing dan lebih sehat sehingga dapat meningkatkan kinerja bisnis Koperasi.	11	T	[2.17.06.1.01.0002] [2.17.06.2.01.0009] [2.17.06.2.01.0005] [2.17.06.3.01.0003] [2.17.06.4.01.0003]
37	2.17.000051	Unit Usaha Yang produktif	Unit Usaha	Produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu.	41	T	[2.17.06.1.01.0002] [2.17.06.2.01.0005] [2.17.06.3.01.0003] [2.17.06.4.01.0003] [2.17.08.2.01.0004]
38	2.17.000052	Unit Usaha Yang produktif,bernilai Tambah	Unit Usaha	Produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Nilai tambah adalah suatu komoditas yang bertambah nilainya karena melalui proses pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu produksi.	1	T	[2.17.06.1.01.0002] [2.17.06.2.01.0005] [2.17.06.3.01.0003] [2.17.06.4.01.0003]
39	2.17.000053	Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro dengan usaha besar.	10	T	[2.17.06.1.01.0006] [2.17.08.4.02.0001] [2.17.06.2.01.0004] [2.17.07.2.01.0002] [2.17.07.2.01.0014] [2.17.07.3.04.0001] [2.17.07.4.04.0001] [2.17.08.2.01.0002]
40	2.17.000054	Unit Usaha Yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	Pembinaan dan Pendampingan Usaha mikro adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Mikro agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.	160	T	[2.17.07.2.01.0002] [2.17.07.2.01.0003] [2.17.07.2.01.0004] [2.17.07.2.01.0006] [2.17.07.2.01.0015] [2.17.07.3.04.0001] [2.17.07.4.04.0001]
41	2.17.000055	Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Perizinan adalah merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.	283	T	[2.17.07.2.01.0003]

42	2.17.000056	Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	Usaha Simpan Pinjam adalah lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya. Koperasi badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.	283	T	[2.17.02.2.01.0001] [2.17.02.2.02.0001]

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2025	Disabled	Info Sub Kegiatan
1	5.01.000001	Aparatur yang menangangi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Orang	Jumlah aparatur yang ditugaskan menangangi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan dan Perangkat Daerah. Aparatur dimaksud dapat berdasarkan SK Tim yang terdiri dari jabatan: 1. JF Perencana 2. JF Statistisi 3. JF Analisis Kebijakan 4. JF Pranata Komputer 5. JF Peneliti	9 orang	T	[5.01.02.1.02.0002] [5.01.02.2.02.0002]
2	5.01.000002	Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Dokumen	Jumlah bahan koordinasi Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan dalam rangka musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan	11 Dokumen	T	[5.01.02.2.01.0006]
3	5.01.000003	Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	Jumlah berita acara dari hasil pelaksanaan forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.	5 Berita Acara	T	[5.01.02.1.01.0004] [5.01.02.2.01.0004]
4	5.01.000004	Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	Jumlah berita acara yang dihasilkan dari pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD	1 Berita Acara	T	[5.01.02.1.01.0003] [5.01.02.2.01.0003]
5	5.01.000005	Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	Jumlah Berita Acara hasil pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota. Musrenbang Kabupaten/Kota adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.	1 Berita Acara	T	[5.01.02.2.01.0005]
6	5.01.000007	Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	Buku Profil Pembangunan Daerah adalah buku yang berisi data dan informasi tentang kondisi umum, visi, misi dan capaian program dan kegiatan pembangunan	1 Buku	T	[5.01.02.1.02.0004] [5.01.02.2.02.0003]
7	5.01.000009	Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	Jumlah dokumen penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD yang mulai dikumpulkan pada tahapan persiapan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD	1 Dokumen	T	[5.01.02.1.04.0001] [5.01.02.2.04.0001]
8	5.01.000010	Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	Jumlah dokumen yang berisikan hasil analisis Kondisi Daerah yang dilakukan dengan menelaah hasil evaluasi rencana pembangunan Daerah dan kinerja Perangkat Daerah serta dapat menggambarkan kebutuhan penerapan pelayanan dasar. Disusun sesuai dengan aspek: geografi dan demografi, potensi Daerah, kesejahteraan, layanan umum, dan daya saing Daerah.	1 Dokumen	T	[5.01.02.1.02.0001] [5.01.02.2.02.0001]
9	5.01.000011	Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Dokumen	Jumlah dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah. Dokumen dimaksud dapat berupa laporan progres pelaksanaan SIPD dan/atau laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan SIPD	1 Dokumen	T	[5.01.02.1.04.0003] [5.01.02.2.04.0003]
10	5.01.000012	Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	Jumlah dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah. Dokumen dimaksud dapat berupa laporan hasil penerapan SIPD dan/atau laporan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan SIPD dalam pembangunan	1 Dokumen	T	[5.01.02.1.04.0002] [5.01.02.2.04.0002]
11	5.01.000013	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Infrastruktur dan dikoordinir Penyusunannya	1 Dokumen	T	[5.01.03.1.03.0001] [5.01.03.2.03.0001]
12	5.01.000014	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Kewilayahan dan dikoordinir Penyusunannya	1 Dokumen	T	[5.01.03.1.03.0005] [5.01.03.2.03.0005]
13	5.01.000015	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Pembangunan Manusia dan dikoordinir Penyusunannya	1 Dokumen	T	[5.01.03.1.01.0005] [5.01.03.2.01.0005]
14	5.01.000016	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Pemerintahan dan dikoordinir Penyusunannya	1 Dokumen	T	[5.01.03.1.01.0001] [5.01.03.2.01.0001]
15	5.01.000017	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang Perekonomian dan dikoordinir Penyusunannya	1 Dokumen	T	[5.01.03.1.02.0001] [5.01.03.2.02.0001]
16	5.01.000018	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berisikan pembangunan pada Bidang SDA dan dikoordinir Penyusunannya	1 Dokumen	T	[5.01.03.1.02.0005] [5.01.03.2.02.0005]
17	5.01.000019	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD yang Ditetapkan	1 Dokumen	T	[5.01.02.2.01.0007]
18	5.01.000022	Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	Jumlah dokumen rancangan awal RPJPD, RPJMD dan RKPD yang disusun	1 Dokumen	T	[5.01.02.1.01.0001] [5.01.02.2.01.0001]
19	5.01.000023	Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya. Kerja sama dimaksud dapat berupa: 1. Pemerintah dengan Pemerintah 2. Pemerintah dengan Non Pemerintah	2 Kerja Sama	T	[5.01.02.1.03.0002] [5.01.02.2.03.0002]

20	5.01.000024	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	4 Laporan	T	[5.01.03.1.02.0006] [5.01.03.2.02.0006]
21	5.01.000025	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	1 Laporan	T	[5.01.03.1.03.0006] [5.01.03.2.03.0006]
22	5.01.000026	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	3 Laporan	T	[5.01.03.1.03.0002] [5.01.03.2.03.0002]
23	5.01.000027	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	5 Laporan	T	[5.01.03.1.01.0006] [5.01.03.2.01.0006]
24	5.01.000028	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	4 Laporan	T	[5.01.03.1.01.0002] [5.01.03.2.01.0002]
25	5.01.000029	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).	2 Laporan	T	[5.01.03.1.02.0002] [5.01.03.2.02.0002]
26	5.01.000030	Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	Jumlah Laporan hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah terhadap capaian kinerja selama 20 (dua puluh) tahunan, 5 (lima) tahunan dan tahunan.	1 Laporan	T	[5.01.02.1.03.0003] [5.01.02.2.03.0003]
27	5.01.000031	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	T	[5.01.03.1.01.0007] [5.01.03.2.01.0007]
28	5.01.000032	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	T	[5.01.03.1.01.0003] [5.01.03.2.01.0003]
29	5.01.000033	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	T	[5.01.03.1.02.0003] [5.01.03.2.02.0003]
30	5.01.000034	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang SDA	1 Laporan	T	[5.01.03.1.02.0007] [5.01.03.2.02.0007]
31	5.01.000035	Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	T	[5.01.03.1.03.0003] [5.01.03.2.03.0003]
32	5.01.000036	Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	Laporan hasil proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	T	[5.01.03.1.03.0007] [5.01.03.2.03.0007]
33	5.01.000037	Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang berisi Formulir Pengendalian Perencanaan dan Formulir Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana diatur	1 Laporan	T	[5.01.02.1.03.0001] [5.01.02.2.03.0001]
34	5.01.000038	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	T	[5.01.03.1.03.0004] [5.01.03.2.03.0004]
35	5.01.000039	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	T	[5.01.03.1.03.0008] [5.01.03.2.03.0008]
36	5.01.000040	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	T	[5.01.03.1.01.0008] [5.01.03.2.01.0008]
37	5.01.000041	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	T	[5.01.03.1.01.0004] [5.01.03.2.01.0004]
38	5.01.000042	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	T	[5.01.03.1.02.0004] [5.01.03.2.02.0004]
39	5.01.000043	Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	T	[5.01.03.1.02.0008] [5.01.03.2.02.0008]

40	5.01.000044	Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	Jumlah aparatur yang dilaksanakan pembinaan terkait pemanfaatan dan dan informasi dalam pembangunan daerah	74 Orang	T	[5.01.02.1.02.0002] [5.01.02.2.02.0002]
41	5.01.000045	Orang yang dilakukan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	Jumlah Orang yang dilakukan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	2 Orang	T	[5.01.02.1.04.0003] [5.01.02.2.04.0003]
42	5.01.000046	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kali	Jumlah pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD	1 Kali	T	[5.01.02.1.01.0003] [5.01.02.2.01.0003]
43	5.01.000048	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	2 Perangkat Daerah	T	[5.01.03.1.03.0002] [5.01.03.2.03.0002]
44	5.01.000049	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	1 Perangkat Daerah	T	[5.01.03.1.03.0006] [5.01.03.2.03.0006]
45	5.01.000050	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	5 Perangkat Daerah	T	[5.01.03.1.01.0006] [5.01.03.2.01.0006]
46	5.01.000051	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	4 Perangkat Daerah	T	[5.01.03.1.01.0002] [5.01.03.2.01.0002]
47	5.01.000052	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	2 Perangkat Daerah	T	[5.01.03.1.02.0002] [5.01.03.2.02.0002]
48	5.01.000053	Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA. Asistensi dimaksud dapat berupa hasil rapat, sosialiasi, dan/atau kondultasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD).	4 Perangkat Daerah	T	[5.01.03.1.02.0006] [5.01.03.2.02.0006]
49	5.01.000054	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Infrastruktur	2 Perangkat Daerah	T	[5.01.03.1.03.0003] [5.01.03.2.03.0003]
50	5.01.000055	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Kewilayahan	1 Perangkat Daerah	T	[5.01.03.1.03.0007] [5.01.03.2.03.0007]
51	5.01.000056	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pembangunan Manusia	5 Perangkat Daerah	T	[5.01.03.1.01.0007] [5.01.03.2.01.0007]
52	5.01.000057	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Pemerintahan	4 Perangkat Daerah	T	[5.01.03.1.01.0003] [5.01.03.2.01.0003]
53	5.01.000058	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang Perekonomian	2 Perangkat Daerah	T	[5.01.03.1.02.0003] [5.01.03.2.02.0003]
54	5.01.000059	Perangkat Daerah yang Dilakukan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang SDA	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif pada Bidang SDA	4 Perangkat 38 Perangkat DaerahDaerah	T	[5.01.03.1.02.0007] [5.01.03.2.02.0007]
55	5.01.000060	Perangkat Daerah yang mengikuti Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.	38 Perangkat Daerah	T	[5.01.02.1.01.0004] [5.01.02.2.01.0004]

56	5.01.000061	Peserta Konsultasi Publik	Orang	Jumlah peserta yang mengikuti Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD	175 Orang	T	[5.01.02.1.01.0003] [5.01.02.2.01.0003]
57	5.01.000062	Peserta Musrenbang Provinsi	Orang	Jumlah Peserta Musrenbang Provinsi. Musrenbang Provinsi adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.	2 Orang	T	[5.01.02.1.01.0005] [5.01.02.2.01.0005]
58	5.01.000064	Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	T	[5.01.02.1.01.0002] [5.01.02.2.01.0002]
59	5.01.000065	Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	Jumlah usulan Musrenbang Desa/Kelurahan yang diverifikasi oleh Kecamatan	702 Usulan	T	[5.01.02.2.01.0006]

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2025	Disabled	Info Sub Kegiatan
1	1.05.000001	Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang	Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana prioritas kabupaten/kota yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melatih aspek manajerial maupun teknis dalam hal komunikasi, koordinasi, maupun pengerahan sumber daya untuk penanganan darurat bencana berdasarkan skenario yang disusun mendekati kondisi sebenarnya	30	T	[1.05.03.2.02.0010] [1.05.03.2.02.0018]
2	1.05.000006	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Penanggulangan Kebakaran	Orang	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah	0	T	[1.05.04.2.01.0007]
3	1.05.000007	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Analis Dalam Pencegahan Kebakaran	Orang	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah	0	T	[1.05.04.2.01.0007]
4	1.05.000008	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Penanggulangan Kebakaran	Orang	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah	0	T	[1.05.04.2.01.0007]
5	1.05.000009	Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis Dalam Pencegahan Kebakaran	Orang	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran adalah Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah	0	T	[1.05.04.2.01.0007]
6	1.05.000013	Data Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	Data kebencanaan adalah Data mengenai Bencana yang sesuai kriteria dan ditetapkan oleh walidata bencana yang disediakan secara bersama ataupun madiri sebagai hasil pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan yang berisi catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi yang merepresentasikan dampak/kejadian bencana yang menjadi urusan kabupaten/kota	1	T	[1.05.03.2.04.0004]
7	1.05.000014	Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan serta pengembangan sarana komunikasi dan informasi berbasis online dan paperless terkait metoda pelaporan kebakaran dan penyelamatan dalam satu portal dan bisa setiap saat d mutakhirkan dan bersifat real time yang dimiliki oleh desa/kelurahan dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang Informasi dan Pengolah Data	0	T	[1.05.04.2.01.0008]
8	1.05.000015	Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Berkelanjutan yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan serta pengembangan sarana komunikasi dan informasi berbasis online dan paperless terkait metoda pelaporan kebakaran dan penyelamatan dalam satu portal dan bisa setiap saat d mutakhirkan dan bersifat real time yang dimiliki oleh desa/kelurahan dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang Informasi dan Pengolah Data	0	T	[1.05.04.2.01.0008]

9	1.05.000016	Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun) yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan serta pengembangan sarana komunikasi dan informasi berbasis online dan paperless terkait metoda pelaporan kebakaran dan penyelamatan dalam satu portal dan bisa setiap saat d mutakhirkan dan bersifat real time yang dimiliki oleh desa/kelurahan dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang Informasi dan Pengolah Data	0	T	[1.05.04.2.01.0008]
10	1.05.000017	Desa/Kelurahan yang Terbentuk Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran adalah mekanisme dan proses untuk membentuk dan membina REDKAR pada skala desa/kelurahan yang dilakukan setiap tahunnya dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat	0	T	[1.05.04.2.04.0002]
11	1.05.000018	Desa/Kelurahan yang Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran adalah mekanisme dan proses untuk membentuk dan membina REDKAR pada skala desa/kelurahan yang dilakukan setiap tahunnya dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat	0	T	[1.05.04.2.04.0002]
12	1.05.000023	Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen	Dokumen analisis risiko bencana berisi tentang kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menjadi sumber bahaya/menimbulkan bencana baik yang terjadi secara tiba-tiba dan/atau berangsur di lokasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0	T	[1.05.03.1.02.0020] [1.05.03.2.02.0013]
13	1.05.000030	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran adalah penyediaan dokumen atau laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas rescue dan atau tindakan penyelamatan korban pada kondisi kebakaran dan non kebakaran (kondisi membahayakan manusia) dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	1	T	[1.05.04.2.01.0003]
14	1.05.000031	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran adalah penyediaan dokumen atau laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas rescue dan atau tindakan penyelamatan korban pada kondisi kebakaran dan non kebakaran (kondisi membahayakan manusia) dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	1	T	[1.05.04.2.01.0003]
15	1.05.000032	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota adalah penyediaan dokumen yang memuat hasil serangkaian kegiatan untuk mengamankan, mengendalikan dan menangani bahan berbahaya dan beracun agar tidak menimbulkan kebakaran dan yang membahayakan manusia dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran di Kabupaten/Kota	0	T	[1.05.04.2.01.0004]
16	1.05.000033	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota adalah penyediaan dokumen yang memuat hasil serangkaian kegiatan untuk mengamankan, mengendalikan dan menangani bahan berbahaya dan beracun agar tidak menimbulkan kebakaran dan yang membahayakan manusia dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran di Kabupaten/Kota	0	T	[1.05.04.2.01.0004]

17	1.05.000034	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras damkar, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras damkar pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain yang diatur dalam NSPK dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	1	T	[1.05.04.2.01.0005]
18	1.05.000035	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras damkar, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras damkar pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain yang diatur dalam NSPK dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	1	T	[1.05.04.2.01.0005]
19	1.05.000036	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras damkar, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras damkar pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain yang diatur dalam NSPK dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	1	T	[1.05.04.2.01.0005]
20	1.05.000042	Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kab/Kota	7	T	[1.05.02.2.01.0003]
21	1.05.000052	Dokumen Hasil Pengelolaan Laporan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi	Dokumen	Pengelolaan Laporan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Nonyustisi Di Provinsi		Y	[1.05.02.7.04.0010]
22	1.05.000053	Dokumen Hasil Pengelolaan Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi	Dokumen	Pengelolaan Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Nonyustisi Di Kab/Kota		Y	[1.05.02.7.04.0010]
23	1.05.000054	Dokumen Hasil Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi	Dokumen	Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi		Y	[1.05.02.7.04.0010]
24	1.05.000056	Dokumen Hasil Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	Merupakan dokumen yang berisi aktivitas Pusat Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Bencana dalam bentuk laporan periodik penerapan prosedur teknis (check list prosedur) untuk penyelenggaraan tugas Pusdalops baik pada aktivitas internal (misal: prosedur serah terima piket) maupun layanan peringatan dini (misal: prosedur sistem peringatan dini banjir) dan/atau layanan pada tindakan awal operasi penanganan darurat bencana tingkat kabupaten/kota provinsi (misal: prosedur aktivasi ruang krisis, prosedur pengendalian evakuasi,dll). aktivitas tersebut termasuk dalam pelayanan dasar SPM SUB	0	T	[1.05.03.2.02.0017]
25	1.05.000058	Dokumen Hasil Pengendalian Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	Merupakan dokumen yang berisi aktivitas Pusat Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Bencana dalam bentuk laporan periodik penerapan prosedur teknis (check list prosedur) untuk penyelenggaraan tugas Pusdalops baik pada aktivitas internal (misal: prosedur serah terima piket) maupun layanan peringatan dini (misal: prosedur sistem peringatan dini banjir) dan/atau layanan pada tindakan awal operasi penanganan darurat bencana tingkat kabupaten/kota provinsi (misal: prosedur aktivasi ruang krisis, prosedur pengendalian evakuasi,dll). aktivitas tersebut termasuk dalam pelayanan dasar SPM SUB	0	T	[1.05.03.2.02.0017]

26	1.05.000059	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi dalam mempercepat atau mempermudah tujuan berupa meningkatkan layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama	0	T	[1.05.04.2.01.0018]
27	1.05.000060	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi dalam mempercepat atau mempermudah tujuan berupa meningkatkan layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama	0	T	[1.05.04.2.01.0018]
28	1.05.000063	Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota adalah penyediaan dokumen Kajian Risiko Bencana yang sah dan legal dalam bentuk data dan peta yang memberikan analisa ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan bencana untuk mengetahui potensi masyarakat terdampak, potensi kerugian, dan potensi kerusakan lingkungan bila terjadi bencana dan digunakan untuk menyusun kebijakan strategi penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota	1	T	[1.05.03.1.01.0003] [1.05.03.2.01.0003] [1.05.03.2.01.0001] [1.05.03.2.01.0008]
29	1.05.000064	Dokumen Kerja Sama Antar Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	Merupakan dokumen yang berisi perjanjian kesepakatan dan pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana di tingkat provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	0	T	[1.05.03.1.04.0019] [1.05.03.2.04.0003]
30	1.05.000065	Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	Merupakan dokumen yang berisi perjanjian kesepakatan dan pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana di tingkat kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	1	T	[1.05.03.1.04.0019] [1.05.03.2.04.0003]
31	1.05.000066	Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	Pencegahan Kebakaran adalah kegiatan dalam rangka meminimalisir dampak kejadian kebakaran melalui kajian penyusunan dokumen NSPM yang dilakukan setiap tahun dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pencegahan Kebakaran	0	T	[1.05.04.2.01.0001]
32	1.05.000070	Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)	Dokumen	Merupakan dokumen yang berisi kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan. Tersusun dalam dokumen JITUPASNA yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi kabupaten/kota	0	T	[1.05.03.2.04.0013]
33	1.05.000071	Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen	Meupakan dokumen perencanaan yang disusun secara bersama antara BNPB/BPBD kabupaten/kota bersama kementerian/lembaga, perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya berdasarkan atas pengkajian kebutuhan pascabencana untuk periode waktu tertentu melalui penyusunan dokumen R3P yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0	T	[1.05.03.2.04.0013]
34	1.05.000077	Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	Merupakan penyediaan dokumen regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota untuk pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota	0	T	[1.05.03.2.04.0001]

35	1.05.000080	Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen	Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota merupakan dokumen yang berisi proses perencanaan penanganan situasi darurat bencana pada jenis bahaya prioritas Kabupaten/Kokta dengan skenario dan tujuan disepakati serta tindakan teknis dan manajerial yang telah ditetapkan, baik yang baru disusun ataupun yang dimutakhirkan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	0	T	[1.05.03.2.02.0009]
36	1.05.000081	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana merupakan dokumen perencanaan penanggulangan bencana daerah kabupaten/kota yang sah dan legal dan menjadi acuan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana lingkup kewenangan kabupaten/kota yang disusun berdasarkan kajian risiko bencana, Renas PB, dan kondisi kebencanaan daerah	1	T	[1.05.03.1.02.0012] [1.05.03.2.02.0014]
37	1.05.000082	Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen	Dokumen Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana merupakan dokumen perencanaan kedaruratan bencana daerah kabupaten/kota yang sah dan legal berisi kebijakan operasional, sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menanggulangi keadaan darurat bencana tingkat kabupaten/kota	0	T	[1.05.03.2.02.0011]
38	1.05.000088	Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	SKPDB merupakan dokumen yang berisikan mekanisme koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh unsur dalam organisasi Komando Darurat Bencana untuk penanganan darurat bencana	4	T	[1.05.03.2.03.0002]
39	1.05.000089	Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat	Dokumen	SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah dimiliki oleh Kab/Kota	13	T	[1.05.02.1.01.0008] [1.05.02.2.01.0008]
40	1.05.000090	Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dimutakhirkan	Dokumen	SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah dimiliki dan telah di mutahirkan oleh Kab/Kota	6	T	[1.05.02.1.01.0008] [1.05.02.2.01.0008]
41	1.05.000091	Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen	Merupakan dokumen yang berisikan kebijakan/regulasi/SOP Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota dalam rangka penata kelolaan kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota baik dalam hal antara lain struktur dan penugasan, penjenjangan dan kompetensi, tata kelola lembaga, maupun perencanaan dan penganggaran	1	T	[1.05.03.1.04.0018] [1.05.03.2.04.0002] [1.05.03.2.04.0014]
42	1.05.000092	Dokumen yang Memuat SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Dokumen	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran adalah upaya untuk memberikan penyediaan sarana dan prasarana damkar yang berkaitan guna operasionalisasi relawan pemadam kebakaran dalam melakukan layanan pencegahan, pemadaman dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat	0	T	[1.05.04.2.04.0003]
43	1.05.000093	Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran adalah serangkaian proses pengumpulan, pencataran dan pengelolaan data yang berkaitan dengan tersedianya Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran pada bangunan/gedung/lingkungan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pencegahan	0	T	[1.05.04.2.02.0001]
44	1.05.000094	Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran adalah serangkaian proses/kegiatan pemeriksaan/pengujian/inspeksi proteksi kebakaran guna memberikan penilaian laik atau tidaknya sesuai standar teknis yang berlaku dengan satuan dokumen, berdasarkan dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pencegahan	0	T	[1.05.04.2.02.0002]

45	1.05.000098	Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	Dokumen	Investigasi Kejadian Kebakaran adalah serangkaian proses dalam menyelidiki dan mencari fakta terkait penyebab suatu kejadian kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Investasi Kejadian kebakaran	0	T	[1.05.04.2.03.0001]
46	1.05.000099	Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6	T	[1.05.02.1.01.0016] [1.05.02.2.01.0004]
47	1.05.000100	Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian Terhadap Evakuasi yang Sesuai Standar	Dokumen	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian informasi terkait kejadian dan dampak kebakaran serta upaya-upaya penyelamatan	1	T	[1.05.04.2.05.0002]
48	1.05.000101	Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sesuai Standar	Dokumen	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi adalah kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras evakuasi/penyelamatan, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras evakuasi/penyelamatan pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani sarana dan prasarana	1	T	[1.05.04.2.05.0002]
49	1.05.000102	Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pertolongan Terhadap Evakuasi yang Sesuai Standar	Dokumen	Investigasi Kejadian Kebakaran adalah serangkaian proses dalam menyelidiki dan mencari fakta terkait penyebab suatu kejadian kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Investasi Kejadian kebakaran	1	T	[1.05.04.2.05.0002]
50	1.05.000103	Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sesuai Standar	Dokumen	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi adalah kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras evakuasi/penyelamatan, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras evakuasi/penyelamatan pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani sarana dan prasarana	0	T	[1.05.04.2.05.0002]
51	1.05.000108	Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	Informasi kebencanaan adalah informasi mengenai Bencana yang tersedia secara berkala berdasrkan kriteria tertentu yang disediakan secara bersama ataupun madiri sebagai hasil pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan yang berisi catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi yang merepresentasikan dampak/kejadian bencana yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1	T	[1.05.03.2.04.0004]
52	1.05.000110	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	Dokumen Hasil Pelaksanaa kerjasama antar lembaga dan kemitraan merupakan dokumen dari suatu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kesepakatan dalam lingkup tugas dan fungsi Pol PP dalam Pencegahan dalam gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum	12	T	[1.05.02.1.01.0019] [1.05.02.2.01.0006] [1.05.02.2.01.0016]
53	1.05.000111	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	Kegiatan dalam Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	0	T	[1.05.02.1.01.0019] [1.05.02.2.01.0016]
54	1.05.000112	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Cegah Dini	Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini	6	T	[1.05.02.1.01.0017] [1.05.02.2.01.0015]
55	1.05.000113	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini	Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini	6	T	[1.05.02.1.01.0017] [1.05.02.2.01.0015]

56	1.05.000114	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Patroli	Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui patroli	36	T	[1.05.02.1.01.0017] [1.05.02.2.01.0015]
57	1.05.000115	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pembinaan	Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui pembinaan	0	T	[1.05.02.1.01.0017] [1.05.02.2.01.0015]
58	1.05.000116	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan	Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengamanan	4	T	[1.05.02.1.01.0017] [1.05.02.2.01.0015]
59	1.05.000117	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Pengawalan	Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui pengawalan	12	T	[1.05.02.1.01.0017] [1.05.02.2.01.0015]
60	1.05.000118	Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Penyuluhan	Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah MelaluiPenyuluhan/Sosialisasi	0	T	[1.05.02.1.01.0017] [1.05.02.2.01.0015]
61	1.05.000119	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kesiapsiagaan Bencana merupakan kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk pencegahan memperkuat pada aspek penguatan kesiapsiagaan atas potensi bahaya dan kerentanan melalui peningkatan kapasitas kelompok masyarakat/komunitas yang ada disuatu kawasan yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah kabupaten/kota	1	T	[1.05.03.1.02.0013] [1.05.03.2.02.0006] [1.05.03.2.02.0020]
62	1.05.000120	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan Bencana	Kawasan	Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan Bencana merupakan kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk pencegahan memperkuat pada aspek pengurangan potensi bahaya dan kerentanan, maupun peningkatan kapasitas kelompok masyarakat/komunitas yang ada disuatu kawasan yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah kabupaten/kota	1	T	[1.05.03.1.02.0013] [1.05.03.2.02.0006]
63	1.05.000121	Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	Keluarga yang mengikuti pelatihan tanggap bencana alam terhadap bencana prioritastingkat keluarga lingkup kabupaten/kota yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melatih pada aspek manajerial maupun teknis	0	T	[1.05.03.1.04.0006] [1.05.03.2.02.0012] [1.05.03.2.02.0019] [1.05.04.2.01.0010] [1.05.04.2.01.0019]
64	1.05.000122	Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga	Keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam penanganan mandiri atas bencana prioritas kabupaten/kota	0	T	[1.05.04.1.01.0013] [1.05.04.2.01.0019]
65	1.05.000123	Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Evakuasi Korban Bencana	Orang	Merupakan layanan dalam rangka pendistribusian logistik operasionalisasi peralatan penyelamatan dan evakuasi, serta kebutuhan dasar korban bencana, selama berlangsungnya penanganan awal bencana (masa krisis) lingkup daerah kabupaten/kota	2008	T	[1.05.03.1.03.0004] [1.05.03.2.03.0009]
66	1.05.000124	Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan Korban Bencana	Orang	Merupakan layanan dalam rangka pendistribusian logistik operasionalisasi peralatan penyelamatan dan evakuasi, serta kebutuhan dasar korban bencana, selama berlangsungnya penanganan awal bencana (masa krisis) lingkup daerah kabupaten/kota	2008	T	[1.05.03.1.03.0004] [1.05.03.2.03.0009]
67	1.05.000125	Korban yang Berhasil Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	Merupakan pelaksanaan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk memindahkan/mengevakuasi korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman	17	T	[1.05.03.2.03.0003]
68	1.05.000126	Korban yang Berhasil Ditemukan Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	Merupakan pelaksanaan pencarian Korban Bencana Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk upaya untuk menemukan korban bencana di lokasi bencana	17	T	[1.05.03.2.03.0003]
69	1.05.000127	Korban yang Berhasil Ditolong Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	Merupakan memberikan pertolongan pada Korban Bencana Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk menolong korban bencana pada tempat kejadian bencana	2008	T	[1.05.03.2.03.0003]
70	1.05.000133	Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	Berisikan laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana kabupaten/kota meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, asistensi, supervisi dan sinkronisasi serta evaluasi antar perangkat daerah di kabupaten/kota	0	T	[1.05.03.2.04.0005]
71	1.05.000137	Laporan Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh	Laporan	Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh		Y	[1.05.02.7.04.0006]
72	1.05.000138	Laporan Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota	Laporan	Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota		Y	[1.05.02.7.04.0006]

73	1.05.000141	Laporan Hasil Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Laporan	Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		Y	[1.05.02.7.04.0007] [1.05.02.7.04.0007]
74	1.05.000144	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Informasi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota	Laporan	Pelaksanaan Informasi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota		Y	[1.05.02.7.04.0005]
75	1.05.000145	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota	Laporan	Pelaksanaan Kegiatan Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota		Y	[1.05.02.7.04.0005]
76	1.05.000146	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas dan atau tindakan memadamkan api dan mengendalikan kejadian kebakaran di lokasi terbakar dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	1	T	[1.05.04.2.01.0002]
77	1.05.000147	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran adalah penyediaan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas dan atau tindakan memadamkan api dan mengendalikan kejadian kebakaran di lokasi terbakar dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	1	T	[1.05.04.2.01.0002]
78	1.05.000148	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan KonsultasiTerhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota	Laporan	Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota		Y	[1.05.02.7.04.0005]
79	1.05.000149	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Pembinaan Qanun Syariat Islam		Y	[1.05.02.7.04.0002] [1.05.02.7.04.0002]
80	1.05.000150	Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penegakan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Penegakan Qanun Syariat Islam		Y	[1.05.02.7.04.0002] [1.05.02.7.04.0002]
81	1.05.000152	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Legislatif dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Konsultasi Dengan Badan Legislatif dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam		Y	[1.05.02.7.04.0008] [1.05.02.7.04.0008]
82	1.05.000153	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Legislatif dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Konsultasi Dengan Badan Legislatif dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam		Y	[1.05.02.7.04.0008] [1.05.02.7.04.0008]
83	1.05.000154	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Yudikatif dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Yudikatif dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam		Y	[1.05.02.7.04.0008] [1.05.02.7.04.0008]
84	1.05.000155	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Yudikatif dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Yudikatif dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam		Y	[1.05.02.7.04.0008] [1.05.02.7.04.0008]
85	1.05.000156	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Konsultasi dengan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam		Y	[1.05.02.7.04.0008] [1.05.02.7.04.0008]
86	1.05.000157	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Instansi Terkait dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Instansi Terkait dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam		Y	[1.05.02.7.04.0008] [1.05.02.7.04.0008]
87	1.05.000158	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Ulama dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam	Laporan	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Ulama dalam rangka Pembinaan Qanun Syariat Islam		Y	[1.05.02.7.04.0008] [1.05.02.7.04.0008]
88	1.05.000159	Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Ulama dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Konsultasi dengan Ulama dalam rangka Pengawasan Qanun Syariat Islam		Y	[1.05.02.7.04.0008] [1.05.02.7.04.0008]
89	1.05.000160	Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Koordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan Qanun Syariat Islam		Y	[1.05.02.7.04.0011] [1.05.02.7.04.0011]
90	1.05.000161	Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Koordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pengawasan Qanun Syariat Islam		Y	[1.05.02.7.04.0011] [1.05.02.7.04.0011]
91	1.05.000162	Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat di Bidang Pembinaan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat di Bidang Pembinaan Qanun Syariat Islam		Y	[1.05.02.7.04.0011] [1.05.02.7.04.0011]
92	1.05.000163	Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat di Bidang Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat di Bidang Pengawasan Qanun Syariat Islam		Y	[1.05.02.7.04.0011] [1.05.02.7.04.0011]
93	1.05.000164	Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Kepemudaan di Bidang Pembinaan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Kepemudaan di Bidang Pembinaan Qanun Syariat Islam		Y	[1.05.02.7.04.0011] [1.05.02.7.04.0011]
94	1.05.000165	Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Kepemudaan di Bidang Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Koordinasi dengan Organisasi Kepemudaan di Bidang Pengawasan Qanun Syariat Islam		Y	[1.05.02.7.04.0011] [1.05.02.7.04.0011]
95	1.05.000166	Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong	Laporan	Pelaksanaan Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong		Y	[1.05.02.7.04.0009]

96	1.05.000167	Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Mukim	Laporan	Pelaksanaan Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Mukim		Y	[1.05.02.7.04.0009]
97	1.05.000172	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	Pengawasan yang dilakukan sebagai pemantauan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Bupati/Walikota	2	T	[1.05.02.2.02.0012]
98	1.05.000173	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	Laporan	Pengawasan yang dilakukan sebagai pemantauan terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah	2	T	[1.05.02.2.02.0012]
99	1.05.000174	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi Qanun Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam		Y	[1.05.02.7.04.0003]
100	1.05.000178	Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Laporan	1. Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek dlm rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1	T	[1.05.02.2.03.0006]
101	1.05.000181	Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	1. Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek dlm rangka Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1	T	[1.05.02.2.03.0006]
102	1.05.000182	Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan peraturan Perundang-undangan Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan Penyuluhan peraturan Perundang-undangan Syariat Islam		Y	[1.05.02.7.04.0004]
103	1.05.000183	Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan Qanun	Laporan	Pelaksanaan Penyuluhan Qanun		Y	[1.05.02.7.04.0004]
104	1.05.000187	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan	sosialisasi penegsakan perda kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah	1	T	[1.05.02.2.02.0010]
105	1.05.000188	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan	sosialisasi Penegakan perkada kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah	1	T	[1.05.02.2.02.0010]
106	1.05.000189	Laporan Hasil Pelaksanaan sosialisasi peraturan Perundang-undangan Syariat Islam	Laporan	Pelaksanaan sosialisasi peraturan Perundang-undangan Syariat Islam		Y	[1.05.02.7.04.0004]
107	1.05.000190	Laporan Hasil Pelaksanaan sosialisasi Qanun	Laporan	Pelaksanaan sosialisasi Qanun		Y	[1.05.02.7.04.0004]
108	1.05.000193	Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sah dan Legal	Laporan	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	0	T	[1.05.04.2.05.0004]
109	1.05.000194	Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian Terhadap Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan	Penyelenggaraan koordinasi antar perangkat daerah di Provinsi dan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam konteks standarisasi kompetensi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, sistem kerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, kinerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatam, serta kesejahteraan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan	0	T	[1.05.04.2.05.0004]
110	1.05.000196	Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pertolongan Terhadap Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan	Penyelenggaraan koordinasi antar perangkat daerah di Provinsi dan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam konteks standarisasi kompetensi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, sistem kerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, kinerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatam, serta kesejahteraan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan.	0	T	[1.05.04.2.05.0004]
111	1.05.000197	Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan yang Sah dan Legal	Laporan	Penyelenggaraan koordinasi antar perangkat daerah di Provinsi dan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam konteks standarisasi kompetensi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, sistem kerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, kinerja aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatam, serta kesejahteraan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan	0	T	[1.05.04.2.05.0004]

112	1.05.000202	Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah upaya dan tindakan membantu mengatasi Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia serta merupakan tindakan penyelamatan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penyelamatan	1	T	[1.05.04.2.05.0001]
113	1.05.000203	Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	Berisikan laporan hasil Koordinasi penanganan awal pelaksanaan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas yang menjadi urusan kabupaten/kota	0	T	[1.05.03.2.03.0001]
114	1.05.000204	Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda yang Terlayani	Laporan	Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perda sesuai SOP	1	T	[1.05.02.1.01.0015] [1.05.02.2.01.0017]
115	1.05.000205	Laporan Layanan Dampak Penegakan Perkada yang Terlayani	Laporan	Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perkada sesuai SOP	1	T	[1.05.02.1.01.0015]
116	1.05.000208	Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	Merupakan laporan pelaksanaan Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana meliputi antara lain pelaksanaan pengerahan dan pengorganisasian komando penanganan darurat bencana tingkat kabupaten/kota, baik dalam hal manajerial, operasional, maupun sumberdaya	1	T	[1.05.03.1.03.0005] [1.05.03.2.03.0011] [1.05.03.2.03.0005] [1.05.03.2.03.0012]
117	1.05.000213	Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Bupati/Wali Kota Sesuai SOP	Laporan	Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Peraturan Bupati/Walikota sesuai SOP	1	T	[1.05.02.2.02.0011]
118	1.05.000214	Laporan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP	Laporan	Layanan yang diberikan kepada yang terkena dampak atas Penegakan Perda sesuai SOP	1	T	[1.05.02.2.02.0011]
119	1.05.000215	Orang yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana bagi penduduk yang berada di kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerah kabupaten/kota	50	T	[1.05.03.2.01.0004] [1.05.03.2.01.0002] [1.05.03.2.01.0007]
120	1.05.000216	Orang yang Mendapatkan Sosialisasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang	Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana bagi penduduk yang berada di kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana di daerah kabupaten/kota	50	T	[1.05.03.2.01.0004]
121	1.05.000219	Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara	Unit	Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk Penyediaan Peralatan keselmatan keselamatan diri di kawasan rawan bencana daerah kabubpaten/kota	0	T	[1.05.03.2.02.0015]
122	1.05.000220	Peralatan Penyelamatan Diri bagi Keluarga	Unit	Merupakan penyediaan alat peyelamatan diri bagi keluarga yang tinggal di daerah rawan bencana lingkup daerah kabupaten/kota	0	T	[1.05.03.2.02.0015]
123	1.05.000221	Peralatan Penyelamatan Diri bagi Petugas	Unit	Merupakan Penyediaan Peralatanpenyelamatan diri bagi petugas operasi kedaruratan bencana daerah kabubpaten/kota	40	T	[1.05.03.2.02.0015]
124	1.05.000224	Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Manajerialnya	Orang	Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas manajerialnya dalam hal koordinasi/ dukungan bagi dan/atau di wilayah kabupaten/kota untuk melakukan penanganan awal, penilaian dampak bencana secara cepat, maupun pengendalian luas area terpapar	30	T	[1.05.03.2.02.0008] [1.05.03.2.02.0021]
125	1.05.000225	Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis	Orang	Personil Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas teknis operasionalnya dalam hal meningkatkan kecepatan respon time untuk dukungan penanganan awal daurat bencana di wilayah kabupaten/kota untuk melakukan penilaian dampak bencana secara cepat, maupun pengendalian luas area terpapar	30	T	[1.05.03.2.02.0008]

126	1.05.000227	Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit,dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	0	T	[1.05.04.2.01.0017]
127	1.05.000229	Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	1. Pengadaan Bantuan Operasional terhadap Satpol PP Daerah 2. Dukungan anggaran terhadap Satpol PP Daerah dalam pemenuhan sarana dan prasarana sebagai salah satu penunjang SPM Sub Urusan Trantibum	0	T	[1.05.02.1.01.0013] [1.05.02.2.01.0018]
128	1.05.000232	Sarana dan Prasarana Untuk Penanggulangan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit,dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	0	T	[1.05.04.2.01.0017]
129	1.05.000233	Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit,dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	0	T	[1.05.04.2.01.0017]
130	1.05.000236	Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	Pengadaan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	0	T	[1.05.04.2.05.0005]
131	1.05.000237	Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	Pengadaan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	0	T	[1.05.04.2.05.0005]
132	1.05.000239	Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	Pengadaan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	0	T	[1.05.04.2.05.0005]
133	1.05.000240	Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	Pengadaan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi adalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	0	T	[1.05.04.2.05.0005]

134	1.05.000241	SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Orang	1. Dukungan anggaran untuk Diklat Dasar Satpol PP yang diselenggarakan di BPSDM 2. Kegiatan Diklat atau Bimtek Satlinmas dalam rangka Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas anggota Satlinmas	0	T	[1.05.02.1.01.0018] [1.05.02.1.01.0005] [1.05.02.2.01.0005] [1.05.02.2.01.0010] [1.05.02.2.01.0013]
135	1.05.000242	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Epidemiologi Terpadu	Dokumen	Merupakan tahapan kecepatan respon penaganan awal dalam penetapan status darurat bencana paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil penilaian secara cepat dampak awal suatu kejadian bencana daerah Kabupaten/Kota	0	T	[1.05.03.2.03.0010]
136	1.05.000243	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB Terpadu	Dokumen	Merupakan pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit adalah penanganan awal KLB yang ditingkatkan statusnya menjadi darurat bencana non alam, dengan alat ukur SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB	0	T	[1.05.03.2.03.0010]
137	1.05.000244	Warga Masyarakat yang Mendapatkan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat adalah upaya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran yang dilaksanakan setiap tahun dengan satuan orang, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat	36	T	[1.05.04.2.04.0001]
138	1.05.000245	Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat adalah upaya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran yang dilaksanakan setiap tahun dengan satuan orang, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat	30	T	[1.05.04.2.04.0001]
139	1.05.000246	Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Mitigasi Bencana	Orang	Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk pelatihan mitigasi bencana dalam tangka peningkatan kemampuan dan keterampilan warga negara di wilayah kabupaten/kota untuk mengenali potensi risiko bencana yang menjadi kewenangan kabupaten.kota	50	T	[1.05.03.2.02.0016]
140	1.05.000247	Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan Bencana	Orang	Warga Negara yang mendapatkan pelayanan dasar SPM SUB dalam bentuk pelatihan pencegahan bencana dalam tangka peningkatan kemampuan dan keterampilan warga negara di wilayah kabupaten/kota untuk meperkuat aspek pencegahan terhadap bencana yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	50	T	[1.05.03.2.02.0016]
141	1.05.000248	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	BPBD Provinsi memfasilitasi BPBD Kab/Kota berkoordinasi dengan stakeholder terkait (Camat, Lurah, Kepala Desa, Fasilitator Kebencanaan dan Stakeholder lainnya) dalam penyediaan data penduduk terpilah di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan gender ecuality, disbility dan social inclusion (GEDSI - Kesetaraan gender, disbilitas dan aspek sosial - rentan) Laporan data penduduk terpilah di daerah rawan bencana memuat : 1. Jumlah penduduk lansia 2. Jumlah penduduk balita (0-5 Tahun) 3. Jumlah anak-anak (6-12 Tahun) 4. Jumlah penduduk usia produktif (13-60) 5. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan 6. Jumlah penduduk berkebutuhan khus	0	T	[1.05.03.1.04.0014]
142	1.05.000249	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang	Kemampuan spesifik dari Aparatur SDM BPBD kabupaten/kota dan lintas perangkat daerah kabupaten/kota sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan untuk menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P), dengan target pelaksanaan 1 kali dalam satu tahun	0	T	[1.05.03.2.04.0008]

143	1.05.000250	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	Fasilitasi yang dilakukan BPBD Kabupaten/Kota untuk memastikan tertanganinya pasca bencana meliputi Sektor : Infrastruktur, Perumahan dan Permukiman, Ekonomi, Sosial dan Lintas Sektor	1	T	[1.05.03.2.04.0010]
144	1.05.000251	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang	Peningkatan kapasitas meliputi kompetensi, karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, sikap dan kecakapan yang dimiliki aparatur sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan untuk memberikan pelayanan penanggulangan bencana	3	T	[1.05.03.2.04.0007]
145	1.05.000252	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sesuai dengan Permendagri 59/2021	0	T	[1.05.03.2.04.0009] [1.05.03.2.04.0016]
146	1.05.000253	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	Penyusunan rencana operasi kedaruratan bencana sesuai peraturan ini yang ditetapkan oleh peraturan kepala daerah	0	T	[1.05.03.2.03.0007]
147	1.05.000254	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Orang	Kemampuan spesifik dari Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi dalam melaksanakan penangananan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	0	T	[1.05.03.2.03.0008]
148	1.05.000255	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lembaga	Fasilitasi yang dilakukan BPBD Kabupaten/Kota untuk meningkatkan keterlibatan Lembaga non pemerintah : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	0	T	[1.05.03.2.04.0011]
149	1.05.000259	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	BPBD Provinsi memfasilitasi BPBD Kab/Kota berkoordinasi dengan stakeholder terkait (Camat, Lurah, Kepala Desa, Fasilitator Kebencanaan dan Stakeholder lainnya) dalam penyediaan data penduduk terpilah di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan gender ecuality, disbility dan social inclusion (GEDSI - Kesetaraan gender, disbilitas dan aspek sosial - rentan) Laporan data penduduk terpilah di daerah rawan bencana memuat : 1. Jumlah penduduk lansia 2. Jumlah penduduk balita (0-5 Tahun) 3. Jumlah anak-anak (6-12 Tahun) 4. Jumlah penduduk usia produktif (13-60) 5. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan 6. Jumlah penduduk berkebutuhan khusus	0	T	[1.05.03.1.04.0008]
150	1.05.000264	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan	BPBD Provinsi memfasilitasi BPBD Kab/Kota berkoordinasi dengan stakeholder terkait (Camat, Lurah, Kepala Desa, Fasilitator Kebencanaan dan Stakeholder lainnya) dalam penyediaan data penduduk terpilah di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan gender ecuality, disbility dan social inclusion (GEDSI - Kesetaraan gender, disbilitas dan aspek sosial - rentan) Laporan data penduduk terpilah di daerah rawan bencana memuat : 1. Jumlah penduduk lansia 2. Jumlah penduduk balita (0-5 Tahun) 3. Jumlah anak-anak (6-12 Tahun) 4. Jumlah penduduk usia produktif (13-60) 5. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan 6. Jumlah penduduk berkebutuhan khusus	0	T	[1.05.03.2.04.0012]
151	1.05.000266	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Dokumen	Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten/Kota dan Kecamatan	27	T	[1.05.02.1.01.0012] [1.05.02.2.01.0019]
152	1.05.000267	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Dokumen	Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten/Kota dan Kecamatan	27	T	[1.05.02.3.05.0001]
153	1.05.000268	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Dokumen	Dokumen SK Pembentukan satgas linmas dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Linmas tingkas Kabupaten/Kota dan Kecamatan	27	T	[1.05.02.1.01.0012]

154	1.05.000270	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen	Tim penilai angka kredit adalah tim yang menilai angka kredit Jabatan Fungsional Pol PP sesuai dengan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014 Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP adalah Sekretariat yang melakukan tugas pembinaan jabatan fungsional Pol PP sesuai dengan Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2014	0	T	[1.05.02.1.01.0011] [1.05.02.2.01.0011]
155	1.05.000273	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Orang	Kegiatan Diklat Dasar Pol PP terdiri dari 1. Diklat Jabatan JFT dan Administrator 2. Diklat Fungsional bagi Pejabat Fungsional pengangkatan Pertama dari (CPNS) 3. Diklat Kategori Keahlian 4. Diklat Kategori Keterampilan. 5. Diklat Penilaian Angka Kredit JF Pol PP Kriteria Aparatur Satuan Polisi Pamongpraja yang mengikuti pelatihan teknis sebagai berikut: bertugas di Satpol PP minimal 1 (satu) tahun, mempunyai integritas yang baik, SKP dengan kriteria minimal baik 1 (satu) tahun terakhir.	0	T	[1.05.02.2.01.0010] [1.05.02.2.01.0012]
156	1.05.000274	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	Kegiatan Pembinaan/ Penyuluhan kepada warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan Perkada	22	T	[1.05.02.2.02.0004]
157	1.05.000275	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	Dokumen yang ditetapkan oleh KDH atau Kasatpol tentang SOP Penegakan Perda atau Perkada	3	T	[1.05.02.1.02.0011] [1.05.02.2.02.0005]
158	1.05.000276	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	Kegiatan Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3	T	[1.05.02.2.02.0007]
159	1.05.000277	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan	Dukungan anggaran dalam rangka penyelenggaraan persidangan atas penyelesaian perkara pidana pelnggaran Perda	6	T	[1.05.02.1.02.0007] [1.05.02.1.03.0002] [1.05.02.2.02.0008]
160	1.05.000278	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	Pemberkasan yang dilakukan PPNS pada kegiatan penyidikan terhadap Pelanggar Perda	1	T	[1.05.02.1.02.0009] [1.05.02.2.02.0009]
161	1.05.000279	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	Kegiatan sosialisasi perda atau perkada kepada masyarakat, aparatur atau Badan Hukum dengan dasar Surat Keputusan atau Surat Perintah	17	T	[1.05.02.2.02.0010]
162	1.05.000280	Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	Penyusunan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1	T	[1.05.02.1.03.0002] [1.05.02.1.03.0003] [1.05.02.2.03.0002]
163	1.05.000282	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Laporan	Pembinaan dan Pengawasan dalam ketersediaan Tim Penilai Angka Kredit di provinsi dan kabupaten/kota, pengembangan profesi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran, dan kendala dalam penyelenggaraan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	0	T	[1.05.04.1.01.0016] [1.05.04.1.02.0003] [1.05.04.1.01.0020] [1.05.04.1.01.0014] [1.05.04.2.01.0012] [1.05.04.2.01.0014]
164	1.05.000283	Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah	0	T	[1.05.04.1.01.0021] [1.05.04.2.01.0012]
165	1.05.000284	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Laporan	Bentuk kegiatan peningkatan kompetensi jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan	0	T	[1.05.04.1.01.0020] [1.05.04.2.01.0012] [1.05.04.2.01.0014]
166	1.05.000285	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Dokumen	Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran merupakan informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran		Y	[1.05.04.1.01.0019]

167	1.05.000286	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran merupakan informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	1	T	[1.05.04.1.01.0018] [1.05.04.1.01.0002] [1.05.04.1.01.0017] [1.05.04.2.01.0013] [1.05.04.2.01.0011] [1.05.04.2.01.0015]
168	1.05.000287	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) merupakan dokumen mengenai standar perencanaan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang sah dan legal untuk memberikan pedoman yang lengkap dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan dengan satuan dokumen dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	0	T	[1.05.04.2.01.0023] [1.05.04.1.01.0017] [1.05.04.2.01.0015]
169	1.05.000288	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	Pelaksanaan butir kegiatan jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam Permenpanrb Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	0	T	[1.05.04.1.01.0015] [1.05.04.2.01.0016]
170	1.05.000289	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	Aparatur Satpol PP Provinsi dan lintas Kab/Kota yang mengikuti Pelatihan Teknis Satpol PP antara lain : 1. Deteksi dini dan cegah dini 2. Pembinaan dan penyuluhan penegakkan perda dan perkada 3. Teknik pengawalan, pengamanan dan patroli 4. Teknik penanganan unjuk rasa 5. Teknik penyelidikan dan penyidikan yustisi dan non yustisi 6. Teknik pemberkasan perkara 7. Teknik negoisasi dan mediasi 8. Teknik penyusunan perda dan perkada 9. Teknik mobilisasi Satlinmas	0	T	[1.05.02.1.01.0018] [1.05.02.2.01.0014]
171	1.05.000290	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan	Pelaksanaan tugas Sekretariat PPNS sebagaimana bunyi pasal 8 Permendagri 3 Tahun 2019	1	T	[1.05.02.1.03.0005] [1.05.02.2.03.0005]
172	1.05.000291	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah, dengan evidence berupa SK TIM/MoU/PKS/Nota Kesepakatan	4	T	[1.05.02.1.03.0004] [1.05.02.2.03.0003]
173	1.05.000292	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	Dukungan anggaran untuk Diklat PPNS Penegak Perda yang diselenggarakan di Diklat Reserse Polri Megamendung	2	T	[1.05.02.1.03.0006] [1.05.02.2.03.0004]
174	1.05.000293	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Dokumen	Dokumen yang ditetapkan oleh KDH atau Kasatpol tentang SOP Penegakan Perda atau Perkada mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja	1	T	[1.05.02.1.02.0006] [1.05.02.2.02.0005]
175	1.05.000296	Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota adalah kegiatan dalam rangka penguatan kualitas layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan mealui penyusunan dokumen yang memuat prosedur dan tata kerja sebagai pedoman dan bentuk kepastian, konsistensi, transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan kebakaran dan penyelamatan lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota		Y	[1.05.04.1.02.0005]
176	1.05.000297	Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Laporan	Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota		Y	[1.05.04.1.02.0007]

177	1.05.000298	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi	Dokumen	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi adalah penata kelolaan kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di tingkat provinsi baik dalam hal status dan tipe dinas, struktur dan penugasan, penjenjangan dan kompetensi, tata kelola lembaga, maupun perencanaan dan penganggaran		Y	[1.05.04.1.01.0035]
178	1.05.000299	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi	Dokumen	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi adalah penata kelolaan kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di tingkat provinsi baik dalam hal status dan tipe dinas, struktur dan penugasan, penjenjangan dan kompetensi, tata kelola lembaga, maupun perencanaan dan penganggaran		Y	
179	1.05.000300	Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Orang	Pelatihan mengenai bahaya dan resiko kebakaran di tingkat keluarga dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta ketangguhan masyarakat terhadap bahaya kebakaran	0	T	[1.05.04.1.01.0030] [1.05.04.2.04.0004] [1.05.04.1.01.0039]
180	1.05.000302	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	Unit	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri merupakan mekanisme dan proses untuk melakukan memfasilitasi sarana prasarana di kabupaten/Kota, atau penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan di provinsi dalam rangka mendukung capaian SPM di kabupaten.kota yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana		Y	[1.05.04.1.01.0032]
181	1.05.000303	Asistensi dan Fasilitasi Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan	Asistensi dan Fasilitasi Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran merupakan serangkaian upaya dan tindakan berupa asistensi dan fasilitasi untuk saling bersinergi dalam mempercapat atau mempermudah tujuan berupa meningkatkan layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran dengan satuan laporan, yang dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama	0	T	[1.05.04.1.01.0033]
182	1.05.000304	Pembinaan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran provinsi dan kabupaten/kota DSSD belum terisi!	Dokumen	Pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional berdasarkan ruang lingkup kegiatan, pengembangan profesi sebagaimana diatur dalam Permenpanrb Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran, Permenpanrb Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran, dan Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, serta kendala dalam penyelenggaraan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran		Y	[1.05.04.1.01.0031]
183	1.05.000305	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan	Penyelenggaraan koordinasi antar perangkat daerah di Provinsi dan antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam konteks penyelenggaraan sistem kerja, kinerja, pengembangan karier, kesejahteraan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan, dan bentuk kegiatan pembinaan aparatur lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		Y	[1.05.04.1.01.0030]

184	1.05.000306	Pengembangan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Orang	Bentuk kegiatan pengembangan kompetensi jabatan fungsional pemadam kebakaran dan fungsional analis kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka mengembangkan kompetensi JF Pemadam Kebakaran dan JF Analis Kebakaran berupa bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, uji kompetensi, seminar, lokakarya (workshop), konferensi dan kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan		Y	[1.05.04.1.01.0036]
185	1.05.000307	Pengembangan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Orang	Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		Y	[1.05.04.1.01.0037]
186	1.05.000308	Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi kabupaten/Kota dama rangka menyusun kajian akademis RISPKP, menyusun dokumen RISPKP, maupun pemutakhiran RISPKP		Y	[1.05.04.1.01.0034]
187	1.05.000309	Pemutakhiran Peta Rawan Kebakaran	Dokumen	Pemutakhiran Dokumen Peta Rawan Kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka memutakhirkan Dokumen Peta Rawan Kebakaran yang sebelumnya telah dimiliki atau disusun oleh pemerintah daerah namun perlu dimutakhirkan baik dari segi muatan informasi maupun substansi lainnya. Dokumen Peta Rawan Kebakaran merupakan informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, serta dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran		Y	[1.05.04.1.01.0029]
188	1.05.000310	Penyusunan Peta Rawan Kebakaran	Dokumen	Penyusunan Dokumen Peta Rawan Kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka menyusun informasi terpadu dan gambaran spasial yang disajikan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal untuk memberikan gambaran menyeluruh dalam bentuk data dan peta terhadap kerawanan kebakaran suatu daerah dengan menganalisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan kebakaran daerah dengan satuan dokumen, Serta dilaksanakan oleh bidang yang menangani Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran		Y	[1.05.04.1.01.0028]
189	1.05.000311	Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Dokumen	Tercapainya kinerja daerah dalam penegakan perda/perkada sesuai instrumen	1	T	[1.05.02.2.02.0013] [1.05.02.1.02.0013]
190	1.05.000312	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Dokumen	Tercapainya kinerja Satpol PP di daerah dalam penegakan perda/perkada dan penyelenggaraan tibumtranmas sesuai indikator yang di tetapkan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022	0	T	[1.05.02.1.01.0026] [1.05.02.2.01.0024]
191	1.05.000313	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	Mendukung digitalisasi terhadap pelaksanaan tugas, fungsi satpol pp dan satlinmas untuk mewujudkan satu data Trantibumlinmas	0	T	[1.05.02.2.01.0023] [1.05.02.1.01.0028]

192	1.05.000314	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Dokumen	Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum adalah dokumen yang memuat tentang jumlah kebutuhan yang diperlukan oleh Satpol PP dalam penegakan perda/perkada dan penyelenggaraan Tibumtranmas sekaligus menghitung kebutuhan Satpol PP dari sisi jumlah aparatur Satpol PP, sarpras dikaitkan dengan Perda yang akan ditegakkan dan Peta rawan gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah dokumen yang menggambarkan kerawanan suatu wilayah yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	0	T	[1.05.02.1.01.0025] [1.05.02.1.01.0027] [1.05.02.2.01.0022]
193	1.05.000315	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) merupakan dokumen yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan, penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di kawasan perkotaan yang sah dan legal dengan satuan dokumen dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP).	1	T	[1.05.02.2.01.0020]
194	1.05.000316	Penyusunan SOP Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	Penyusunan SOP penanggulangan kebakaran dan penyelamatan adalah kegiatan dalam rangka penguatan kualitas layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan melalui penyusunan dokumen yang memuat prosedur dan tata kerja sebagai pedoman dan bentuk kepastian, konsistensi, transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kepada masyarakat	7	T	[1.05.02.2.01.0021]
195	1.05.000317	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual adalah kegiatan dalam rangka penguatan kualitas layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan melalui kajian penyusunan dokumen yang memuat norma, standar, prosedur dan manual, serta dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pencegahan Kebakaran	0	T	[1.05.04.2.01.0025]
196	1.05.000318	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran adalah penyediaan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas dan atau tindakan memadamkan api dan mengendalikan kejadian kebakaran di lokasi terbakar dengan satuannya adalah laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	1	T	[1.05.04.2.01.0026]
197	1.05.000319	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran adalah kegiatan yang berkaitan dengan serangkaian kegiatan untuk mengamankan, mengendalikan dan menangani bahan berbahaya dan beracun agar tidak menimbulkan kebakaran dan yang membahayakan manusia dengan satuan laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	0	T	[1.05.04.2.01.0022]
198	1.05.000320	Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Orang	Pembinaan dan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka membina dan mengembangkan kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran berupa bimbingan teknis, Pendidikan dan Pelatihan, uji kompetensi, seminar, lokakarya (workshop), konferensi dan kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan	0	T	[1.05.04.2.01.0024]

199	1.05.000321	Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) merupakan kajian Akademis yang berisikan gambaran awal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan, penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di kawasan perkotaan yang sah dan legal dengan satuan dokumen dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP). Kegiatan ini terutama ditujukan untuk pemerintah daerah yang belum pernah menyusun atau memiliki dokumen RISPKP	0	T	[1.05.04.2.01.0020]
200	1.05.000322	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dokumen	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi baik melalui forum komunikasi kebakaran, organisasi profesi atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mempercepat atau mempermudah layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama	0	T	[1.05.04.2.01.0021]
201	1.05.000323	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi baik melalui forum komunikasi kebakaran, organisasi profesi atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mempercepat atau mempermudah layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama	Dokumen	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran adalah serangkaian upaya dan tindakan untuk saling bersinergi baik melalui forum komunikasi kebakaran, organisasi profesi atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mempercepat atau mempermudah layanan pemadaman dan evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani dan memfasilitasi kerjasama	0	T	
202	1.05.000324	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota	Dokumen	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota adalah penata kelolaan kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di tingkat kabupaten/kota baik dalam hal status dan tipe dinas, struktur dan penugasan, penjenjangan dan kompetensi, tata kelola lembaga, maupun perencanaan dan penganggaran	0	T	[1.05.04.2.01.0020] [1.05.04.2.01.0027]
203	1.05.000325	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran adalah serangkaian proses pengumpulan, pencataran dan pengelolaan data yang berkaitan dengan tersedianya Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran pada bangunan/gedung/lingkungan dengan satuan laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	0	T	[1.05.04.2.02.0003]
204	1.05.000326	Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan	Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala adalah serangkaian proses/kegiatan pemeriksaan/pengujian/inspeksi proteksi kebakaran guna memberikan penilaian laik atau tidaknya secara berkala sesuai standar teknis yang berlaku dengan satuan dokumen, berdasarkan dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	0	T	[1.05.04.2.02.0005]
205	1.05.000327	Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan	Laporan	Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pemadam kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis aparatur, berupa bimbingan teknis, Pendidikan dan Pelatihan dan kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan	0	T	[1.05.04.2.02.0004]

206	1.05.000328	Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	Laporan	Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab kebakaran adalah serangkaian proses dalam menyelidiki dan mencari fakta terkait penyebab suatu kejadian kebakaran dengan satuan laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Investasi Kejadian kebakaran	1	T	[1.05.04.2.03.0004]
207	1.05.000329	Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran		Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis aparatur, berupa bimbingan teknis, Pendidikan dan Pelatihan dan kegiatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan	1	T	[1.05.04.2.03.0003]
208	1.05.000330	Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Laporan	Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran adalah serangkaian proses investigasi kejadian kebakaran dalam upaya menyelidiki dan mencari fakta terkait penyebab suatu kejadian kebakaran melalui penelitian dan pengujian dengan satuan laporan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Investasi Kejadian kebakaran	12	T	[1.05.04.2.03.0002]
209	1.05.000331	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Dokumen	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran adalah upaya untuk memberikan penyediaan sarana dan prasarana damkar yang berkaitan guna operasionalisasi relawan pemadam kebakaran dalam melakukan layanan pencegahan, pemadaman dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani sarana dan prasarana	0	T	[1.05.04.2.04.0005]
210	1.05.000333	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Desa/Kelurahan	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran adalah mekanisme dan proses untuk membentuk dan membina REDKAR pada skala desa/kelurahan yang dilakukan setiap tahunnya dengan satuan desa/kelurahan, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat	0	T	[1.05.04.2.04.0007]
211	1.05.000335	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Laporan	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran adalah penyediaan dokumen atau laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan piket petugas rescue dan atau tindakan penyelamatan korban pada kondisi kebakaran dan non kebakaran (kondisi membahayakan manusia) dengan satuan dokumen, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	85	T	[1.05.04.2.05.0006]
212	1.05.000336	Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	Dokumen	Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar adalah kegiatan penyusunan kajian kebutuhan standard sapras damkar, kegiatan monitoring dan pengecekan secara berkala sapras damkar pada setiap pos damkar kecamatan dengan memperhatikan kelayakan, usia pemakaian, dan hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	1	T	[1.05.04.2.05.0008]
213	1.05.000337	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	Unit	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standaradalah mekanisme dan proses untuk melakukan penambahan kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran, Alat Pelindung Diri dan sarpras lainnya yang sah dan legal serta dapat dipertanggungjawabkan dengan satuan unit,dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Sarana dan Prasarana	0	T	[1.05.04.2.05.0007]

214	1.05.000338	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	Unit	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Merupakan Mekanisme dan Proses untuk Melakukan pengaturan agar sarana prasarana selalu dalam kondisi baik dan dapat digunakan sebagaimana fungsinya, serta Dilaksanakan Oleh Bidang yang Menangani Sarana dan Prasarana	5	T	[1.05.04.2.05.0009]
215	1.05.000339	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Laporan	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan serta pengembangan sarana komunikasi dan informasi berbasis online dan paperless terkait metoda pelaporan kebakaran dan penyelamatan dalam satu portal dan bisa setiap saat d mutakhirkan dan bersifat real time yang terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Desa/Kelurahan dan dapat Menjangkau Masyarakat, dan dilaksanakan oleh bidang Informasi dan Pengolah Data	0	T	[1.05.04.2.05.0010]
216	1.05.000340	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Dokumen	Dokumen SOP Ketenteraman dan keteriban Umum merupakan Dokumen pedoman atau acuan yang sistematis bagi Pol PP untuk melakukan tindakan dalam rangka menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang telah di buat dan/atau telah dimutakhirkan	13	T	
217	1.05.000341	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Unit	Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat adalah fasilitas dan peralatan yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP	29	T	
218	1.05.000342	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	Laporan Gangguan Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan laporan hasil tidakan yang dilakukan terhadap Suatu Kondisi Yang Tidak Teratur yang Disebabkan Oleh Tidak Taatnya Kepada Hukum, Norma Serta Kesepakatan umum, yang dilakukan melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.	6	T	
219	1.05.000343	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Linmas dalam bentuk Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa merupakan laporan hasil penertiban dan unjuk rasa dan Penindakan : a. Unjuk Rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan fikiran daengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum yang berkaitan dengan peraturan daerah, pergub, kebijakan pemerintah dan kebijakan lainnya terkait dengan pemerintah b. Kerusuhan massa adalah suatu keadaan /situasi rusuh dan kekacauan yang dilakukan oleh seseorang amupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan , pengerusakan faslitaas umum, aset daerah, rumah ibadah dll	0	T	
220	1.05.000344	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen	Pemberkasan yang dilakukan PPNS pada kegiatan penyidikan terhadap Pelanggar Perda mengacu pada Perka POLRI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan PPNS	6	T	

221	1.05.000345	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Dokumen	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi adalah penyediaan dokumen Kajian Risiko Bencana yang sah dan legal dalam bentuk data dan peta yang memberikan analisa ancaman, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan bencana untuk mengetahui potensi masyarakat terdampak, potensi kerugian, dan potensi kerusakan lingkungan bila terjadi bencana dan digunakan untuk menyusun kebijakan strategi penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota, dengan alat ukur jumlah dokumen yang dilegalisasi, dilaksanakan apabila diperlukan penyusunan baru (pemutakhiran).	0	T	
222	1.05.000346	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Kawasan	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan pelaksanaan kegiatan untuk pengurangan potensi bahaya dan kerentanan, maupun peningkatan kapasitas bagi yang ada di suatu kawasan yang berada dalam lingkup kewenangan pemerintah provinsi. seperti: Kawasan Pariwisata Tangguh Bencana, Kawasan Industri Tangguh Bencana, Fasilitasi pembinaan desa tangguh bencana dan keluarga tangguh bencana dsb, dengan alat ukur Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, dilaksanakan sesuai target yang telah ditentukan.	1	T	
223	1.05.000347	Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran adalah upaya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat akan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran yang dilaksanakan setiap tahun dengan satuan orang, dan dilaksanakan oleh bidang yang menangani Pemberdayaan Masyarakat	5	T	[1.05.04.2.04.0006]
224	1.05.000348	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Laporan hasil pelaksanaan memuat uraian keterangan pelaksanaan pengawasan, hasil pengawasan, dan evaluasi atas hasil pengawasan	27	T	[1.05.02.1.02.0002] [1.05.02.2.02.0012]

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2025	Disabled	Info Sub Kegiatan
1	5.02.000001	Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen		2	T	[5.02.02.1.01.0001] [5.02.02.2.01.0001]
2	5.02.000002	Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen		2	T	[5.02.02.1.01.0002] [5.02.02.2.01.0002]
3	5.02.000003	RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen		45	T	[5.02.02.1.01.0003] [5.02.02.2.01.0003]
4	5.02.000004	Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen		45	T	[5.02.02.1.01.0004] [5.02.02.2.01.0004]
5	5.02.000006	Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen		45	T	[5.02.02.1.01.0006] [5.02.02.2.01.0006]
6	5.02.000007	Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen		3	T	[5.02.02.1.01.0007] [5.02.02.2.01.0007]
7	5.02.000008	Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen		3	T	[5.02.02.1.01.0008] [5.02.02.2.01.0008]
8	5.02.000009	Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen		7	T	[5.02.02.1.01.0009] [5.02.02.2.01.0009]
9	5.02.000010	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen		12	T	[5.02.02.1.01.0010] [5.02.02.2.01.0010]
10	5.02.000011	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen		12	T	[5.02.02.1.01.0011] [5.02.02.2.01.0011]
11	5.02.000012	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen		12	T	[5.02.02.1.01.0012] [5.02.02.2.01.0012]
12	5.02.000013	Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Orang		0	T	[5.02.02.1.01.0013]
13	5.02.000014	Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Laporan		0	T	[5.02.02.1.02.0001] [5.02.02.1.02.0002]
14	5.02.000016	Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Laporan		0	T	[5.02.02.1.02.0003]
15	5.02.000017	Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan		0	T	[5.02.02.1.02.0004]
16	5.02.000018	Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	Dokumen		0	T	[5.02.02.1.02.0005]
17	5.02.000019	Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Laporan		0	T	[5.02.02.1.02.0006]
18	5.02.000020	BLUD yang Diasistensi	Lembaga		0	T	[5.02.02.1.02.0007]
19	5.02.000021	Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Dokumen		0	T	[5.02.02.1.02.0008]
20	5.02.000022	Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen		0	T	[5.02.02.1.02.0009]
21	5.02.000023	Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen		0	T	[5.02.02.1.02.0010]
22	5.02.000024	Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Orang		0	T	[5.02.02.1.02.0011]
23	5.02.000025	Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Dokumen		0	T	[5.02.02.1.02.0012]
24	5.02.000026	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen		12	T	[5.02.02.1.03.0001] [5.02.02.2.02.0001]
25	5.02.000027	Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Laporan		1	T	[5.02.02.1.03.0002] [5.02.02.2.02.0002]
26	5.02.000028	Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen		2	T	[5.02.02.1.03.0003] [5.02.02.2.02.0003]
27	5.02.000029	Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen		1	T	[5.02.02.1.03.0004] [5.02.02.2.02.0004]

28	5.02.000030	Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen		12	T	[5.02.02.1.03.0005] [5.02.02.2.02.0005]
29	5.02.000031	Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen		12	T	[5.02.02.1.03.0006] [5.02.02.2.02.0006]
30	5.02.000032	Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan		12	T	[5.02.02.1.03.0007]
31	5.02.000033	Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen		12	T	[5.02.02.1.03.0008] [5.02.02.2.02.0008]
32	5.02.000034	Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen		2	T	[5.02.02.1.03.0009] [5.02.02.2.02.0009]
33	5.02.000035	Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen		0	T	[5.02.02.1.03.0010] [5.02.02.2.02.0010]
34	5.02.000036	Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang		30	T	[5.02.02.1.03.0011] [5.02.02.2.02.0011]
35	5.02.000037	Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan		1	T	[5.02.02.1.04.0001] [5.02.02.2.03.0001]
36	5.02.000038	Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen		12	T	[5.02.02.1.04.0002] [5.02.02.2.03.0002]
37	5.02.000039	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan		1	T	[5.02.02.1.04.0003] [5.02.02.2.03.0003]
38	5.02.000040	Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan		3	T	[5.02.02.1.04.0004] [5.02.02.2.03.0004]
39	5.02.000041	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen		1	T	[5.02.02.1.04.0005]
40	5.02.000042	Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen		1	T	[5.02.02.1.04.0006] [5.02.02.2.03.0006]
41	5.02.000043	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen		5	T	[5.02.02.1.04.0007] [5.02.02.2.03.0007]
42	5.02.000044	Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen		1	T	[5.02.02.1.04.0008] [5.02.02.2.03.0008]
43	5.02.000045	Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen		0	T	[5.02.02.1.04.0009] [5.02.02.2.03.0009]
44	5.02.000046	Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen		0	T	[5.02.02.1.04.0010] [5.02.02.2.03.0010]
45	5.02.000047	Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang		0	T	[5.02.02.1.04.0011]
46	5.02.000048	BLUD Provinsi yang Dibina	Lembaga		1	T	[5.02.02.1.04.0012]
47	5.02.000049	Dokumen Hasil Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang Dikelola	Dokumen		0	T	[5.02.02.1.05.0001]
48	5.02.000050	Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan		0	T	[5.02.02.1.05.0002] [5.02.02.2.04.0002]
49	5.02.000051	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan		0	T	[5.02.02.1.05.0003] [5.02.02.2.04.0003]
50	5.02.000052	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan		0	T	[5.02.02.1.05.0004] [5.02.02.2.04.0004]

51	5.02.000053	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Laporan		0	T	[5.02.02.1.05.0005] [5.02.02.2.04.0005]
52	5.02.000054	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Laporan		0	T	[5.02.02.1.05.0006] [5.02.02.2.04.0006]
53	5.02.000055	Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Laporan		0	T	[5.02.02.1.05.0007] [5.02.02.2.04.0007]
54	5.02.000056	Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan		1	T	[5.02.02.1.05.0008] [5.02.02.2.04.0008]
55	5.02.000057	Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan		1	T	[5.02.02.1.05.0009] [5.02.02.2.04.0009]
56	5.02.000058	Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan		0	T	[5.02.02.1.05.0010]
57	5.02.000059	Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen		0	T	[5.02.02.1.06.0001] [5.02.02.2.05.0001]
58	5.02.000060	Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen		0	T	[5.02.02.1.06.0002] [5.02.02.2.05.0002]
59	5.02.000061	Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Orang		0	T	[5.02.02.1.06.0003]
60	5.02.000062	Standar Harga yang Disusun	Dokumen		1	T	[5.02.03.1.01.0001] [5.02.03.2.01.0001]
61	5.02.000063	Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen		0	T	[5.02.03.1.01.0002] [5.02.03.2.01.0002]
62	5.02.000064	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen		45	T	[5.02.03.1.01.0003] [5.02.03.2.01.0003]
63	5.02.000065	Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen		0	T	[5.02.03.1.01.0004] [5.02.03.2.01.0004]
64	5.02.000066	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan		1	T	[5.02.03.1.01.0005] [5.02.03.2.01.0005]
65	5.02.000067	Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan		1	T	[5.02.03.1.01.0006] [5.02.03.2.01.0006]
66	5.02.000068	Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan		1	T	[5.02.03.1.01.0007] [5.02.03.2.01.0007]
67	5.02.000069	Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan		0	T	[5.02.03.1.01.0008] [5.02.03.2.01.0008]
68	5.02.000070	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan		1	T	[5.02.03.1.01.0009] [5.02.03.2.01.0009]
69	5.02.000071	Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen		100	T	[5.02.03.1.01.0010] [5.02.03.2.01.0010]
70	5.02.000072	Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan		4	T	[5.02.03.1.01.0011] [5.02.03.2.01.0011]
71	5.02.000073	Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan		1	T	[5.02.03.1.01.0012] [5.02.03.2.01.0012]
72	5.02.000074	Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang		25	T	[5.02.03.1.01.0013] [5.02.03.2.01.0013]
73	5.02.000075	Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen		12	T	[5.02.04.1.01.0001] [5.02.04.2.01.0001]
74	5.02.000076	Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan		2	T	[5.02.04.1.01.0002]
75	5.02.000077	Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan		1	T	[5.02.04.1.01.0003] [5.02.04.2.01.0003]
76	5.02.000078	Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit		4	T	[5.02.04.1.01.0004] [5.02.04.2.01.0004]
77	5.02.000079	Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan		20	T	[5.02.04.1.01.0005]
78	5.02.000080	Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan		1	T	[5.02.04.1.01.0006] [5.02.04.2.01.0006]
79	5.02.000081	Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen		1	T	[5.02.04.1.01.0007] [5.02.04.2.01.0008]
80	5.02.000082	Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan		0	T	[5.02.04.1.01.0008]
81	5.02.000083	Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen		1	T	[5.02.04.1.01.0009]
82	5.02.000084	Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD		0	T	[5.02.04.1.01.0010]
83	5.02.000085	Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan		1	T	[5.02.04.1.01.0011]
84	5.02.000086	Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan		1	T	[5.02.04.1.01.0012]
85	5.02.000087	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan		1	T	[5.02.04.1.01.0013] [5.02.04.2.01.0014]
86	5.02.000088	Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan		0	T	[5.02.04.1.01.0014] [5.02.04.2.01.0015]
87	5.02.000093	DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen		45	T	[5.02.02.2.01.0005]
88	5.02.000101	Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang		0	T	[5.02.02.2.01.0013]

89	5.02.000117	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen		1	T	[5.02.02.2.03.0005]
90	5.02.000123	Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang		0	T	[5.02.02.2.03.0011]
91	5.02.000124	BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Lembaga		1	T	[5.02.02.2.03.0012]
92	5.02.000125	Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan		1	T	[5.02.02.2.03.0013]
93	5.02.000126	Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Dokumen		0	T	[5.02.02.2.04.0001]
94	5.02.000135	Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan		1	T	[5.02.02.2.04.0010]
95	5.02.000138	Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang		0	T	[5.02.02.2.05.0003]
96	5.02.000153	Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen		2	T	[5.02.04.2.01.0002]
97	5.02.000156	Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan		20	T	[5.02.04.2.01.0005]
98	5.02.000158	Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak		20	T	[5.02.04.2.01.0007]
99	5.02.000160	Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan		100	T	[5.02.04.2.01.0009]
100	5.02.000161	Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen		0	T	[5.02.04.2.01.0010]
101	5.02.000162	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen		1	T	[5.02.04.2.01.0011]
102	5.02.000163	Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen		1	T	[5.02.04.2.01.0012]
103	5.02.000164	Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen		1	T	[5.02.04.2.01.0013]

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2025	Disabled	Info Sub Kegiatan
1	3.26.000001	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Berkembang)	Lokasi	Melaksanakakan Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Kabupaten/Kota yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan yang sudah ditetapkan dalam RIPPARDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Kabupaten/Kota dengan pola penguatan jejaring ekosistem dan tata kelola	0	T	[3.26.02.2.03.0003] [3.26.02.2.03.0011]
2	3.26.000002	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Pemantapan)	Lokasi	Melaksanakan Pemantapan Destinasi Pariwisata Prioritas Kabupaten/Kota agar terwujud destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan yang sudah ditetapkan dalam RIPPARDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Kabupaten/Kota dan sudah berkembang dengan pola verifikasi dan sertifikasi	0	T	[3.26.02.2.03.0003] [3.26.02.2.03.0011]
3	3.26.000003	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Revitalisasi)	Lokasi	Melaksanakan Revitalisasi Destinasi Pariwisata Prioritas Kabupaten/Kota agar tercapai destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan yang sudah ditetapkan dalam RIPPARDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Kabupaten/Kota dengan pola evaluatif, peningkatan fungsi dan pengembalian eksistensi	0	T	[3.26.02.2.03.0003]
4	3.26.000004	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan)	Lokasi	Melaksanakan perintisan Destinasi Pariwisata Pengembangan Kabupaten/Kota untuk mewujudkan destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan yang sudah ditetapkan dalam RIPPARDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Kabupaten/Kota dengan pola stimulasi , identifikasi dan Profiling	0	T	[3.26.02.2.03.0003]
5	3.26.000005	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Lokasi	Menetapkan destinasi pariwisata yang tercantum dalam RIPPARKAB/KOTA melalui SK penetapan oleh Kepala Daerah (Bupati/Walikota)	0	T	[3.26.02.1.03.0008] [3.26.02.2.03.0001] [3.26.02.2.03.0009] [3.26.02.2.03.0011]
6	3.26.000013	Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Cipta kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen	Dokumen hasil fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual adalah Bukti Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual ke Kementerian Hukum dan HAM	0	T	[3.26.04.1.02.0018] [3.26.04.2.02.0022]
7	3.26.000014	Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan atas Hak Terkait kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen		0	T	[3.26.04.1.02.0018] [3.26.04.2.02.0022]
8	3.26.000015	Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen		0	T	[3.26.04.1.02.0018] [3.26.04.2.02.0022]
9	3.26.000016	Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen		0	T	[3.26.04.1.02.0018] [3.26.04.2.02.0022]
10	3.26.000017	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota untuk memperoleh data dan informasi tentang pertumbuhan sektor pariwisata Kab/Kota	0	T	[3.26.02.2.03.0010] [3.26.02.2.03.0011]
11	3.26.000019	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Startegis Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan kawasan strategis Pariwisata Kabupaten/Kota untuk memperoleh data dan informasi yang dapat dijadikan bahan umpan balik pengembangan destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan	0	T	[3.26.02.2.02.0009]
12	3.26.000020	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen	Melakukan Monitoring dan Evaluasi pengembangan keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberi nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum	0	T	[3.26.04.2.02.0020]
13	3.26.000021	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen	Melakukan kajian monitoring dan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas pemasaran yang telah dilakukan sebagai dasar penentu kebijakan pada tahun berikutnya	0	T	[3.26.03.1.01.0005] [3.26.03.2.01.0005]

14	3.26.000022	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri	Dokumen	Mengidentifikasi awareness masyarakat dalam negeri terkait Destinasi Pariwisata (yang berada di bawah naungan kabupaten/kota)	1	T	[3.26.03.2.01.0003]
15	3.26.000023	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/KotaLuar Negeri	Dokumen	Mengidentifikasi awareness tourist asing terkait Destinasi Pariwisata Daerah (yang berada di bawah naungan kabupaten/kota)	1	T	[3.26.03.2.01.0003]
16	3.26.000026	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Dalam Negeri	Dokumen	melakukan pendataan secara real time pada setiap destinasi lokal untuk wisatawan dalam negeri	1	T	[3.26.03.2.01.0003]
17	3.26.000027	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Kabupaten/Kota Luar Negeri	Dokumen	melakukan pendataan secara real time pada setiap destinasi lokal untuk wisatawan luar negeri	1	T	[3.26.03.2.01.0003]
18	3.26.000031	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Dalam Negeri	Dokumen	memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media cetak dalam negeri dan mendokumentasikan bukti tayang	1	T	[3.26.03.1.01.0001] [3.26.03.2.01.0007]
19	3.26.000032	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Luar Negeri	Dokumen	memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media cetak luar negeri dan mendokumentasikan bukti tayang	0	T	[3.26.03.1.01.0001] [3.26.03.2.01.0007]
20	3.26.000033	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Dalam Negeri	Dokumen	Memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media elektonik dalam negeri dan mendokumentasikan bukti tayang	0	T	[3.26.03.1.01.0001] [3.26.03.2.01.0007]
21	3.26.000034	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Elektronik Luar Negeri	Dokumen	memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media elektonik luar negeri dan mendokumentasikan bukti tayang	0	T	[3.26.03.1.01.0001] [3.26.03.2.01.0007]
22	3.26.000035	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Dalam Negeri	Dokumen	Memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media luar ruang dalam negeri dan mendokumentasikan bukti tayang	0	T	[3.26.03.1.01.0001] [3.26.03.2.01.0007]
23	3.26.000036	Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Lainnya Luar Negeri	Dokumen	Memiliki rencana strategi pemasaran pariwisata provinsi yang dilakukan melalui media luar ruang luar negeri dan mendokumentasikan bukti tayang	0	T	[3.26.03.1.01.0001] [3.26.03.2.01.0007]
24	3.26.000037	Dokumen Kemitraan Pariwisata Dalam Negeri	Dokumen		0	T	[3.26.03.2.01.0004]
25	3.26.000038	Dokumen Kemitraan Pariwisata Luar Negeri	Dokumen		0	T	[3.26.03.2.01.0004]
26	3.26.000039	Dokumen Kerja Sama Pariwisata Dalam Negeri	Dokumen		0	T	[3.26.03.2.01.0004]
27	3.26.000040	Dokumen Kerja Sama Pariwisata Luar Negeri	Dokumen		0	T	[3.26.03.2.01.0004]
28	3.26.000041	Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen		0	T	[3.26.02.2.04.0009]
29	3.26.000044	Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	Melakukan kajian dan penyusunan dokumen RIPPARDA Provinsi sesuai dengan Permenparekraf No 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan RIPPARDA	0	T	[3.26.02.2.03.0002] [3.26.02.2.03.0011]
30	3.26.000046	Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	Melakukan asesmen dan penilaian terhadap dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota sesuai dengan mengacu pada Pedoman Menparekraf/Baparekraf Nomor PDM/3/DI.00.03/MK/2023 tentang Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata	0	T	[3.26.02.2.01.0009]
31	3.26.000048	Dokumen Perlindungan Hasil Kreativitas yang Berupa Kekayaan Intelektual Pelaku Ekonomi Kreatif	Dokumen		0	T	[3.26.04.1.02.0008] [3.26.04.2.02.0021]
32	3.26.000049	Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	Melakukan asesmen dan penilaian terhadap dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi sesuai dengan Pedoman Menparekraf/Baparekraf Nomor PDM/3/DI.00.03/MK/2023 tentang Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata	0	T	[3.26.02.2.01.0009]
33	3.26.000051	Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen		0	T	[3.26.04.1.02.0017] [3.26.04.2.02.0009]

34	3.26.000052	Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia	Unit	Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif. Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. infrastruktur dan b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Infrastruktur fisik adalah ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif, antara lain ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi& adalah sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/atau menyimpan. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi awan, lokapasar digital, dan pusat data	0	T	[3.26.04.1.02.0019] [3.26.04.2.02.0004]
35	3.26.000054	Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Kawasan	Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif. Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. infrastruktur dan b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Infrastruktur fisik adalah ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif, antara lain ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi& adalah sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/atau menyimpan. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi awan, lokapasar digital, dan pusat data	0	T	[3.26.02.2.02.0008]
36	3.26.000056	Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Laporan	Sertifikasi Kompetensi subsektor Ekonomi Kreatif adalah kegiatan Pelaksanaan Uji Kompetensi yag dilakukan LSP P3 Sub Sekor Ekonomi Kreatif terhadap SDM Ekonomi Kreatif dengan satuan orang, berdasarkan NSPK Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018 - 2025	0	T	[3.26.05.1.02.0007] [3.26.05.2.02.0002]
37	3.26.000057	Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Laporan	Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	0	T	[3.26.04.2.02.0003]
38	3.26.000060	Laporan Hasil Fasilitasi Proses Distribusi Konsumsi	Laporan		0	T	[3.26.05.1.01.0008] [3.26.05.2.01.0005]
39	3.26.000061	Laporan Hasil Fasilitasi Proses Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan	Kegiatan fasilitasi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan wawasan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif	0	T	[3.26.05.1.01.0008] [3.26.05.2.01.0005]
40	3.26.000062	Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi	Laporan		0	T	[3.26.05.1.01.0008] [3.26.05.2.01.0005]
41	3.26.000063	Laporan Hasil Fasilitasi Proses Produksi	Laporan		0	T	[3.26.05.1.01.0008] [3.26.05.2.01.0005]
42	3.26.000072	Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	Membuat indikator terkait pengklasifian UMKM serta melakukan klasifikasi berdasarkan skala (lokal, nasional, dan internasional)		Y	[3.26.04.1.01.0006]
43	3.26.000076	Laporan Hasil Pemberian Insentif yang Diberikan	Laporan		0	T	[3.26.04.2.02.0018]
44	3.26.000114	Pengembangan Dokumen Riset Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen		0	T	[3.26.04.1.02.0016] [3.26.04.2.02.0019]
45	3.26.000144	Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan oleh Kab/Kota	Lokasi	Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang tercantum/masuk dalam RIPPARKAB/KOTA	0	T	[3.26.02.2.03.0001] [3.26.02.2.03.0002] [3.26.02.2.03.0003]

46	3.26.000145	Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang dikembangkan oleh Kab/Kota	Lokasi	Destinasi Pariwisata berbasis alam, budaya, buatan yang tercantum/masuk dalam RIPPARKAB/KOTA	0	T	[3.26.02.2.03.0003]
47	3.26.000159	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	Melaksanakan asesmen dan penilaian terhadap perkembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	0	T	[3.26.02.2.01.0007]
48	3.26.000162	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Unit	&Infrastruktur Ekonomi Kreatif terdiri atas: a. infrastruktur dan b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Infrastruktur fisik adalah ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif, antara lain ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop. Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi&& adalah sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, mengumumkan dengan menyebarkan informasi, dan/atau menyimpan. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi awan, lokapasar digital, dan pusat data.&	0	T	[3.26.04.1.02.0019] [3.26.04.2.02.0004]
49	3.26.000163	Data Kondisi SDM Pengelola Kawasan Stategis Pariwisata	Data	Tersusunnya data jumlah SDM, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi Pengelola Kawasan Stategis Pariwisata	0	T	[3.26.02.1.02.0009] [3.26.02.2.02.0008]
50	3.26.000165	Data Pelaku Usaha yang Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan	Data	Data Pelaku Usaha yang telah Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan	0	T	[3.26.04.1.02.0003] [3.26.04.2.02.0003]
51	3.26.000166	Data Kondisi Masyarakat di Destinasi Pariwisata	Dokumen	Tersusunnya data jumlah anggota masyarakat, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi masyarakat di destinasi Pariwisata	0	T	[3.26.02.1.03.0010] [3.26.02.2.03.0006]
52	3.26.000167	Data Kondisi Masyarakat di Kawasan Strategis Pariwisata Kab/kota	Dokumen	Tersusunnya data jumlah anggota masyarakat, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi masyarakat di Kawasan Strategis Pariwisata Kab/kota	0	T	[3.26.02.2.02.0007]
53	3.26.000168	Laporan Hasil Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Laporan	melakukan pendataan terkait transaksi potensial yang merupakan hasil dari pemasaran	1	T	[3.26.03.1.01.0006] [3.26.03.2.01.0006]
54	3.26.000169	Dokumen Peluang Investasi Sektor Parekraf	Dokumen	Penyusunan dokumen atau kajian peluang investasi sektor Parekraf.	0	T	[3.26.02.1.04.0010] [3.26.02.2.04.0012] [3.26.02.2.04.0024] [3.26.02.2.04.0021]
55	3.26.000171	Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Lokasi	Mengidentifikasi daya tarik wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam/budaya/buatan di lingkup Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Daya Tarik Wisata Unggulan melalui SK Kepala Daerah	0	T	[3.26.02.2.01.0008]
56	3.26.000172	Data Kondisi SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan	Dokumen	Tersusunnya data jumlah SDM, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan	0	T	[3.26.02.2.01.0008] [3.26.02.2.01.0006] [3.26.02.2.01.0005] [3.26.02.2.02.0004] [3.26.02.2.03.0004]

57	3.26.000174	Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan	Destinasi	&Melaksanakan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dan/atau tangguh bencana di destinasi pariwisata Kabupaten/Kota, melalui: 1. jumlah orang (stakeholders pariwisata) yang diberikan pemahaman melalui sosialisasi/bimbingan teknis Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 2. jumlah destinasi wisata yang telah melakukan assessment mandiri prinsip pariwisata berkelanjutan (kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021) dan destinasi tangguh bencana (Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 3. jumlah destinasi pariwisata yang disertifikasi berkelanjutan (sesuai kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021). 4. jumlah destinasi pariwisata yang melakukan monitoring dan evaluasi penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan pada Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan.&	0	T	[3.26.02.1.03.0007] [3.26.02.2.03.0007]
58	3.26.000175	Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang menerapkan prinsip Pariwisata Berkelanjutan	Kawasan	&Melaksanakan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dan/atau tangguh bencana di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota, melalui: 1. jumlah orang (stakeholders pariwisata) yang diberikan pemahaman melalui sosialisasi/bimbingan teknis Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 2. jumlah destinasi wisata yang telah melakukan assessment mandiri prinsip pariwisata berkelanjutan (kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021) dan destinasi tangguh bencana (Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan. 3. jumlah destinasi pariwisata yang disertifikasi berkelanjutan (sesuai kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021). 4. jumlah destinasi pariwisata yang melakukan monitoring dan evaluasi penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan pada Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan.&	0	T	[3.26.02.1.02.0007] [3.26.02.2.02.0007]
59	3.26.000178	Dokumen Peta Jalan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Dokumen	& Peta jalan memberi panduan arah dan strategi daerah dalam mengembangan ekonomi kreatif sesuai potensi daerahnya. Rencana aksi menjabarkan program/kegiatan dari setiap stakeholder terkait di daerah dalam jangka waktu 5 tahunan	0	T	[3.26.04.1.02.0017] [3.26.04.2.02.0009]
60	3.26.000180	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Unit	Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan ekosistem Kabupaten/Kota Kreatif	0	T	[3.26.04.1.01.0001] [3.26.04.2.01.0001]
61	3.26.000181	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata	Unit	mengidentifikasi alokasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset Pemda Provinsi di Destinasi Pariwisata	0	T	[3.26.02.1.03.0004] [3.26.02.2.03.0004]
62	3.26.000182	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata	Unit	mengidentifikasi sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset dan dikelola oleh Pemda Provinsi di Destinasi Pariwisata	0	T	[3.26.02.1.02.0004] [3.26.02.2.02.0004]
63	3.26.000184	Kaawasan Strategis Pariwisata yang Ditetapkan	Kawasan	Mengidentifikasi tingkat kestrategisan destinasi kab/kota terhadap perwilayahan kab/kota untuk selanjutnya ditetapkan menjadi kawasan strategis pariwisata kab/kota melalui SK pimpinan daerah	0	T	[3.26.02.1.02.0001] [3.26.02.2.02.0001]

64	3.26.000185	Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata terpadu	Dokumen	Melakukan kajian dan penyusunan dokumen perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota terpadu berdasar pedoman penyusunan Rencana Induk Rencana Detil (RIRD) Kawasan Strategis Pariwisata	0	T	[3.26.02.1.02.0002] [3.26.02.2.02.0002]
65	3.26.000188	Amenitas pariwisata yang berkembang di Kab/Kota	Dokumen	Akomodasi, usaha makmin, usaha perjalanan, toko souvenir dan amenitas pariwisata lain yang berkembang karena adanya aktivitas wisata	0	T	[3.26.02.2.03.0003]
66	3.26.000189	Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dokumen	Melakukan asesmen dan penilaian terhadap dokumen Perencanaan dan perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota sesuai denganPedoman Menparekraf/Baparekraf Nomor PDM/3/DI.00.03/MK/2023 tentang Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata	0	T	[3.26.02.2.01.0009]
67	3.26.000193	Data Kondisi Masyarakat di Destinasi Pariwisata Kab/kota	Dokumen	Tersusunnya data jumlah anggota masyarakat, demografis, tingkat kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan bagi masyarakat di destinasi Pariwisata Kab/kota	1	T	[3.26.02.2.03.0006]
68	3.26.000195	Standar kegiatan usaha pariwisata berbasis risiko	Kegiatan Usaha	Standar pelaksanaan kegiatan usaha sektor pariwisata merupakan standar usaha pariwisata yang mencakup sarana, organisasi dan sumber daya manusia, pelayanan, persyaratan produk, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan Pengawasan.	0	T	[3.26.02.1.04.0006] [3.26.02.1.04.0009] [3.26.02.1.04.0011] [3.26.02.1.04.0015] [3.26.02.2.04.0007] [3.26.02.2.04.0009] [3.26.02.2.04.0010] [3.26.02.2.04.0013]
69	3.26.000196	Pelaku Ekonomi Kreatif di 17 subsektor	Laporan	17 subsektor ekonomi kreatif diantaranya yaitu Kriya, Musik, Seni Rupa, Seni Pertunjukan, Fesyen, Kuliner, Fotografi, Pengembang Permainan, Desain Interior, Desain Produk, Desain Komunikasi Visual, Arsitektur, Periklanan, Penerbitan, Televisi dan Radio, Aplikasi, Film, Animasi dan Video	0	T	[3.26.05.1.01.0008] [3.26.05.2.01.0005] [3.26.04.1.02.0025] [3.26.04.1.02.0027]
70	3.26.000199	Jumlah Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Unit	Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan ekosistem Kabupaten/Kota Kreatif	0	T	[3.26.04.2.01.0001] [3.26.04.1.01.0007]
71	3.26.000200	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Provinsi yang terpelihara	Unit	Mengidentifikasi alokasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset Pemda Provinsi di Destinasi Pariwisata Provinsi	0	T	[3.26.02.1.03.0004] [3.26.02.2.03.0004]
72	3.26.000201	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Unit	Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset dan dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Destinasi Pariwisata Kab/Kota	0	T	[3.26.02.2.03.0004]
73	3.26.000202	Sarana dan Prasarana yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit	Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang tercatat menjadi aset dan dikelola oleh Pemda Kab/Kota di Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	0	T	[3.26.02.1.02.0004] [3.26.02.2.02.0004]
74	3.26.000204	Kawasan Strategis Pariwisata Kab/kota yang Ditetapkan	Dokumen	Mengidentifikasi tingkat kestrategisan destinasi kab/kota terhadap perwilayahan kab/kota untuk selanjutnya ditetapkan menjadi kawasan strategis pariwisata kab/kota melalui SK pimpinan daerah	0	T	[3.26.02.1.02.0001] [3.26.02.2.02.0001]
75	3.26.000206	Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota terpadu	Dokumen	Melakukan kajian dan penyusunan dokumen perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota terpadu berdasar pedoman penyusunan Rencana Induk Rencana Detil (RIRD) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	0	T	[3.26.02.1.02.0001] [3.26.02.2.02.0002]
76	3.26.000210	Dokumen Kerja sama dan Implementasi (MOU/PKS)	Dokumen	- Pemerintah daerah membuka peluang kerjasama dengan stakeholder dalam dan luar negeri - Pemerintah daerah melakukan sosialisasi MoU/PKS kepada stakeholder pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah - Pemerintah daerah melakukan Implementasi MoU/PKS yang sudah disepakati	0	T	[3.26.03.1.01.0004] [3.26.03.2.01.0004]
77	3.26.000212	Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Orang		0	T	[3.26.02.2.02.0008]
78	3.26.000214	Data jumlah kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan	Orang	Peningkatan kapasitas SDM pengelola kawasan strategis pariwisata provinsi melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (re-skilling, up-skilling, new-skilling)	0	T	[3.26.02.2.02.0008]

79	3.26.000217	Data jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Orang	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan masyarakat	0	T	[3.26.02.2.03.0006]
80	3.26.000218	Daya jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan	Orang	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan masyarakat	0	T	[3.26.02.2.03.0006]
81	3.26.000221	Data jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang telah dilakukan	Orang	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan masyarakat	0	T	[3.26.02.2.02.0008]
82	3.26.000222	Data jumlah anggota masyarakat yang memahami tata cara Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Orang	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan masyarakat	0	T	[3.26.02.2.02.0008]
83	3.26.000225	Data jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Orang	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (re-skilling, up-skilling, new-skilling)	0	T	[3.26.02.2.01.0008]
84	3.26.000226	Data kegiatan peningkatan kapasitas SDM dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota yang telah dilakukan	Orang	Peningkatan kapasitas SDM pengelola Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan bidang pariwisata lainnya (re-skilling, up-skilling, new-skilling)	0	T	[3.26.02.2.01.0008]
85	3.26.000229	Data SDM yang memiliki kompetensi ekonomi kreatif setelah difasilitasi Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	Memberikan fasilitasi Pelatihan (re-skilling, up-skilling, new-skilling), Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	0	T	[3.26.05.1.02.0001] [3.26.05.2.02.0001] [3.26.05.2.01.0013]
86	3.26.000232	Data tenaga kerja pariwisata yang tersertifikasi	Orang	Melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata setelah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	0	T	[3.26.05.1.01.0004] [3.26.05.2.01.0010]
87	3.26.000233	Data kegiatan fasilitasi sertifikasi yang telah dilaksanakan	Orang	Melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata setelah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	0	T	[3.26.05.1.01.0004] [3.26.05.2.01.0010]
88	3.26.000240	Laporan hasil monitoring dan evaluasi	Orang	- Inventarisasi terhadap kegiatan pengembangan SDM Parekraf yang telah dilakukan - Melakukan persandingan antara target volume output dan realisasi volume output jumlah orang yang telah difasilitasi pengembangan SDM Parekraf - Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan melalui penyebaran kuisioner untuk mengetahui manfaat yang dirasakan oleh peserta pelatihan - Pelaporan kinerja	0	T	[3.26.05.2.01.0011]
89	3.26.000245	Data masyarakat memahami tentang tata cara Pengembangan Pariwisata setelah difasilitasi Pemberdayaan dan Pembinaan	Dokumen	Melaksanakan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	0	T	[3.26.05.1.01.0014] [3.26.05.2.01.0009]
90	3.26.000246	Data kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat yang telah dilakukan	Dokumen	Melaksanakan Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	0	T	[3.26.05.1.01.0014] [3.26.05.2.01.0009]
91	3.26.000247	Data SDM Pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai SKKNI di bidang pariwisata setelah difasilitasi Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Orang	Meningkatkan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	0	T	[3.26.05.1.01.0016] [3.26.05.2.01.0008]
92	3.26.000248	Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI yang telah dilaksanakan	Orang	Meningkatkan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	0	T	[3.26.05.1.01.0016] [3.26.05.2.01.0008]
93	3.26.000249	Data SDM yang memiliki kompetensi setelah mengikuti fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) bagi pelaku ekonomi kreatif. Selanjutnya peserta PBK akan difasilitasi untuk sertifikasi kompetensinya	0	T	[3.26.05.1.01.0017] [3.26.05.2.01.0006]
94	3.26.000250	Data pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang	Melaksanakan fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif setelah mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)	0	T	[3.26.05.1.01.0017] [3.26.05.2.01.0006]
95	3.26.000253	ata SDM Pariwisata yang memiliki kompetensi sesuai SKKNI di bidang pariwisata setelah difasilitasi Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Orang	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	0	T	[3.26.05.2.01.0008]

96	3.26.000259	Laporan hasil monitoring dan evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dokumen	- Inventarisasi terhadap kegiatan pengembangan SDM Parekraf yang telah dilakukan - Melakukan persandingan antara target volume output dan realisasi volume output jumlah orang yang telah difasilitasi pengembangan SDM Parekraf - Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan melalui penyebaran kuisioner untuk mengetahui manfaat yang dirasakan oleh peserta pelatihan - Pelaporan kinerja	0	T	[3.26.05.2.01.0011] [3.26.05.2.01.0012] [3.26.02.2.04.0023]
97	3.26.000260	Pelaku Usaha Parekraf yang Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan	Orang	Data Pelaku Usaha sektor parekraf yang telah Mendapatkan Fasilitasi Pembiayaan	0	T	[3.26.04.2.02.0003]
98	3.26.000261	Data Profiling Pelaku Usaha Sektor Parekraf	Data	Data yang berisi terkait perizinan atau legalisasi yang dimiliki oleh Pelaku Usaha Parekraf	0	T	[3.26.02.1.04.0011] [3.26.02.2.04.0009]
99	3.26.000262	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	Promosi	Kegiatan pendukungan pemasaran bagi pelaku ekonomi kreatif, khususnya yang berbasis kekayaan intelektual, berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2022 dan UU Nomor 24 Tahun 2019	0	T	[3.26.04.2.02.0017] [3.26.04.1.02.0027]
100	3.26.000263	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Dokumen	Mengacu ke Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional	0	T	[3.26.04.2.02.0016]
101	3.26.000264	Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	Dokumen	Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual adalah sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan Kekayaan Intelektual, mengacu pada PP Nomor 24 Tahun 2022 dan UU Nomor 24 Tahun 2019	0	T	[3.26.04.1.02.0011] [3.26.04.2.02.0015] [3.26.04.1.02.0026]
102	3.26.000265	Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)	Pelaku Usaha	Kegiatan Penyediaan bantuan pelaku usaha ekonomi kreatif, bantuan mencakup bantuan infratruktur fisik dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	0	T	[3.26.04.2.02.0013]
103	3.26.000266	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Kegiatan	Kegiatan fasilitasi untuk mendukung perluasan dan pengakuan kekayaan intelektual di bidang ekonomi kreatif	0	T	[3.26.04.2.02.0014] [3.26.04.1.02.0026]
104	3.26.000267	Fasilitasi pemberian insentif	Pelaku Usaha	Kegiatan fasilitasi untuk mendukung perluasan pemberian insentif	0	T	[3.26.04.2.02.0011]
105	3.26.000268	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi yang selanjutnya disebut dengan RIPPAR-PROV adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan provinsi untuk periode 15-25 tahun sebagai acuan RIPPAR-KAB/KOTA. Kab/Kota diharapkan dapat mensinkronkan RIPPAR-KAB/KOTA dengan RTRW dan RDTR	0	T	[3.26.02.2.03.0008]
106	3.26.000269	Pendampingan penciptaan produk kreatif (inkubasi)	Produk	Program pendampingan penciptaan dan pemanfaatan karya di destinasi. Tujuan utama program ini adalah untuk menyasar penguatan ekosistem ekonomi kreatif melalui karya komunal, dengan sinergi antara pelaku ekraf /bisnis, akademisi, masyarakat/komunitas, media dan Pemerintah/Pemerintah Daerah di destinasi dengan inspirasi kearifan lokal/budaya.		Y	[3.26.05.1.01.0011]
107	3.26.000273	Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan	Laporan Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP Dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi OAP Yang Dilaksanakan		Y	[3.26.05.3.02.0004] [3.26.05.4.02.0004]
108	3.26.000274	Pengembangan Pendidikan	Dokumen	Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	0	T	[3.26.04.2.02.0002]
109	3.26.000275	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	Dokumen	Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	0	T	[3.26.03.3.01.0006] [3.26.03.4.01.0006]
110	3.26.000276	Fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah	Lembaga	Badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah Yang Dibentuk	0	T	[3.26.03.3.01.0007] [3.26.03.4.01.0007]
111	3.26.000277	Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwiataan di Kabupaten/Kota	0	T	[3.26.02.3.05.0001] [3.26.02.4.05.0001]

112	3.26.000283	Penilaian Mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia (PMK3I)	Dokumen	Penilaian Mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia (PMK3I) adalah aktivitas untuk mengidentifikasi potensi subsektor ekonomi kreatif pada kabupaten/kota melalui mekanisme pengisian borang dan uji petik. Tujuan kegiatan ini adalah: 1. Melakukan pemetaan potensi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan pengembangan ekonomi kreatif di kabupaten/kota. 2. Menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif kabupaten/kota. 3. Menjadi dasar kegiatan fasilitasi dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif kabupaten/kota. Dalam melaksanakan uji petik PMK3I, OPD kab/kota setempat harus berkoordinasi dan melibatkan Kementerian yang menjalankan tugas fungsi di bidang ekonomi kreatif sebagai salah satu stakeholder	0	T	[3.26.04.2.02.0023]
113	3.26.000285	Monitoring dan Evaluasi Pengukuran Indeks Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota	Dokumen	Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan pengukuran indeks pembangunan kepariwisataan di tingkat Kabupaten/kota, mengidentifikasi capaian kemajuan pelaksanaan serta tantangan yang timbul sehingga dapat diambil tindakan mitigasi sedini mungkin. Evaluasi dilakukan atas pelaksanaan Pengukuran Indeks Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota. Hasil Evaluasi digunakan untuk memperbaiki perencanaan dan tata kelola Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota		Y	
114	3.26.000290	Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha	Badan Usaha	terstandardisasi dan tersertifikasi dengan tingkat risiko menengah tinggi yang menjadi kewenangan provinsi. Berdasarkan PP No 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan turunannya Permen Parekraf No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Usaha Sektor Pariwisata Berbasis Risiko menjadikan penerapan standar dan sertifikasi usaha sebagai bagian dari perizinan berusaha yang terintegrasi dengan system OSS. Pada saat ini jumlah usaha pariwisata yang telah tersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata berjumlah 86.668 usaha, dari jumlah tersebut hingga saat ini baru sebanyak 1337 usaha yg telah tersertifikasi atau sebesar 1,5%, arahan Menparekraf mengarahkan agar mencapai 20%. Perlu adanya cascading indicator dari Kemenparekraf, khususnya indicator yang ada Deputi Bidang Industri dan Investasi yaitu Rasio Jumlah Usaha yang terstandardisasi dan tersertifikasi serta turun ke Direktorat Standardisasi dan Sertifikasi Usaha dengan indicator Jumlah Usaha yang Terstandardisasi dan Tersertifikasi Aktifitas: 1. Sosialisasi/Bimtek/Coaching Clinic ttg		Y	[3.26.02.1.04.0016]
115	3.26.000291	Kegiatan/event yang sudah terlaksana pada destinasi pariwisata pada media elektronik dalam negeri, baik media lokal maupun media nasional	Dokumen	Terpublikasinya kegiatan/event yang sudah terlaksana pada destinasi pariwisata pada media elektronik dalam negeri, baik media lokal maupun media nasional		Y	
116	3.26.000293	Pelaku Usaha yang mendapatkan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	Pelaku Usaha	Perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan usaha yang diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Perizinan ini juga mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan usaha.	0	T	[3.26.02.2.04.0015] [3.26.02.2.04.0020]

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2025	Disabled	Info Sub Kegiatan
1	2.15.000000	Dokumen Pemeriksaan kondisi fisik kendaraan bermotor umum	Dokumen	Dokumen pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum meliputi: 1. persyaratan teknis dan laik 2. fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor 3. fasilitas penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita dan 4. identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/ atau papan trayek, dan jenis pelayanan	0	T	[2.15.02.1.03.0006] [2.15.02.6.04.0006] [2.15.02.1.07.0014] [2.15.02.2.03.0006]
2	2.15.000003	Alat pemberi isyarat lalu lintas	Unit	Perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan	3	T	[2.15.02.1.02.0002] [2.15.02.1.02.0004] [2.15.02.2.02.0002] [2.15.02.2.02.0004]
3	2.15.000004	Alat pengawasan dan pengamanan jalan	Unit	1. Jenis : a) alat penimbangan yang dipasang secara b) alat penimbangan yang dapat dipindahkan. 2. ditera secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau pasca perbaikan 3. Fasilitas Penunjang pada jembatan timbang yang dipasang tetap meliputi: 1) gedung 2) lapangan parkir 3) fasilitas jalan keluar masuk 4) gudang penyimpanan 5) lapangan penumpukan 6) bangunan gedung untuk generator 7) 8) perambuan untuk maksud pengoperasian. 4. Alat penimbangan yang dapat dipindahkan, harus memenuhi persyaratan teknis meliputi : 1) alat penimbangan elektronis yang dapat mengumpulkan, mengolah, dan mencetak data hasil 2) mampu mendukung berat kendaraan beserta muatan pada setiap roda sekurangkurangnya 10 (sepuluh) ton dan/atau setiap sumbu sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) ton.	0	T	[2.15.02.1.02.0002] [2.15.02.2.02.0002]
4	2.15.000005	Alat pengawasan dan pengamanan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	1. Jenis : a) alat penimbangan yang dipasang secara b) alat penimbangan yang dapat dipindahkan. 2. ditera secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau pasca perbaikan 3. Fasilitas Penunjang pada jembatan timbang yang dipasang tetap meliputi: 1) gedung 2) lapangan parkir 3) fasilitas jalan keluar masuk 4) gudang penyimpanan 5) lapangan penumpukan 6) bangunan gedung untuk generator 7) 8) perambuan untuk maksud pengoperasian. 4. Alat penimbangan yang dapat dipindahkan, harus memenuhi persyaratan teknis meliputi : 1) alat penimbangan elektronis yang dapat mengumpulkan, mengolah, dan mencetak data hasil 2) mampu mendukung berat kendaraan beserta muatan pada setiap roda sekurangkurangnya 10 (sepuluh) ton dan/atau setiap sumbu sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) ton. fasilitas yang terawat untuk memastikan tingkat layanan	0	T	[2.15.02.1.02.0004] [2.15.02.2.02.0004]
5	2.15.000006	Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan	Unit	Alat yang berfungsi sebagai pengendali kecepatan kendaraan bermotor seperti, Speed Bump, Speed Hump, Speed Table dan pembatas lalu lintas . Selain itu juga alat pengaman untuk kendaraan bermotor dalam mengurangi resiko kecelakaan berupa pagar pengaman, cermin tikungan, patok lalu lintas dan jalur pengehentian darurat.	11	T	[2.15.02.1.02.0002] [2.15.02.2.02.0002]

6	2.15.000007	Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	Alat yang berfungsi sebagai pengendali kecepatan kendaraan bermotor seperti, Speed Bump, Speed Hump, Speed Table dan pembatas lalu lintas . Selain itu juga alat pengaman untuk kendaraan bermotor dalam mengurangi resiko kecelakaan berupa pagar pengaman, cermin tikungan, patok lalu lintas dan jalur pengehentian darurat. Fasilitas yang terehabilitasi untuk memastikan kualitas pelayanan	0	T	[2.15.02.1.02.0004] [2.15.02.2.02.0004]
7	2.15.000008	Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi	Unit	Peralatan pengujian tipe Kendaraan Bermotor meliputi: a. alat uji rem utama dan rem b. alat uji lampu c. alat uji suspensi roda dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah Kendaraan d. alat uji e. alat uji tekanan f. alat uji g. alat uji h. alat uji tingkat i. alat uji pengujian j. alat uji kincup roda k. alat uji l. alat uji posisi roda m. alat uji motor n. alat uji o. alat uji sabuk p. alat uji emisi gas buang, termasuk ketebalan asap gas q. alat uji prestasi Kendaraan r. alat uji s. peralatan dan t. alat uji lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi Kendaraan Bermotor	0	T	[2.15.02.2.05.0004] [2.15.02.2.05.0001] [2.15.02.2.05.0007]
8	2.15.000009	Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi dan personel penguji yang andal	Unit	Data terkait proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor	0	T	[2.15.02.1.07.0015] [2.15.02.2.08.0009]
9	2.15.000010	Analisis dampak lalu lintas	Dokumen	Bertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan meliputi 1. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan dan 2. analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur	0	T	[2.15.02.1.03.0001] [2.15.02.6.04.0001] [2.15.02.2.03.0001]
10	2.15.000011	Analisis mengenai dampak lingkungan	Dokumen	Telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan	0	T	[2.15.02.1.03.0001] [2.15.02.6.04.0001] [2.15.02.2.03.0001]
11	2.15.000018	Buku kerja rancang bangun	Dokumen	merupakan dokumen teknis yang memuat detail engineering design (DED) Terminal	0	T	[2.15.02.1.03.0001] [2.15.02.6.04.0001] [2.15.02.2.03.0001]
12	2.15.000020	Data Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Perusahaan Angkutan Umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki paling sedikit 5 (lima) b. memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dan c. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain.	0	T	[2.15.02.2.15.0003] [2.15.02.2.15.0004]

13	2.15.000023	Data Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia	Unit	Fasilitas pokok antara lain berupa: a. b. gudang lini c. lapangan penumpukan lini d. Terminal e. Terminal peti f. Terminal curah g. Terminal curah h. Terminal ro- i. car j. Terminal k. fasilitas penampungan dan pengelolaan l. fasilitas m. fasilitas pemadam n. fasilitas gudang untuk bahan/barang berbahaya dan beracun (B3); o. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan fasilitas Pelabuhan dan Sarana Bantu dan p. fasilitas pokok lainnya sesuai perkembangan teknologi Fasilitas penunjang berupa: a. kawasan b. fasilitas pos dan c. fasilitas pariwisata dan d. instalasi air bersih, listrik, dan e. jaringan jalan dan rel kereta f. jaringan air limbah, drainase, dan g. areal pengembangan h. tempat tunggu kendaraan i. kawasan	0	T	[2.15.03.2.12.0005]
14	2.15.000026	Data Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal kab/kota yang sudah ditetapkan	Dokumen	Perawatan kapal adalah suatu usaha yang dilakukan secara sengaja dan sistematis terhadap peralatan permesinan, peralatan bantu, pekerjaan bangunan, ruang-ruangan, dek dan lambung kapal diatas garis air sehingga mencapai hasil/ kondisi yang dapat diterima dan diinginkan. Perbaikan kapal adalah perubahan yang mengakibatkan penggunaan alat dapat lebih lama yang dilakukan karena telah terjadi kerusakan atau penurunan kualitas peralatan permesinan, peralatan bantu, pekerjaan bangunan, ruang-ruangan, dek dan lambung kapal di atas garis air. Pelayanan Perawatan dan Perbaikan Kapal: a. perawatan kapal yang dilakukan di atas garis air tanpa membahayakan b. pemeriksaan bagian bawah garis air yang dilakukan dalam kondisi terapung di atas air dapat dilakukan dengan metode Under Water c. perbaikan dan perlengkapan d. perbaikan bangunan atas kapal e. perbaikan atau perawatan permesinan di atas f. perbaikan atau perawatan peralatan navigasi g. perbaikan atau perawatan peralatan radio dan atau h. perbaikan atau perawatan peralatan keselamatan kapal saat terapung (floating)	0	T	[2.15.03.2.08.0002] [2.15.03.2.08.0001]
15	2.15.000027	Data jalur	Jalur	Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rei yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukan bagi lalu lintas kereta api.	0	T	[2.15.05.1.04.0001] [2.15.04.3.08.0001] [2.15.05.4.09.0001] [2.15.05.2.04.0001] [2.15.05.3.06.0001] [2.15.05.4.06.0001]

16	2.15.000028	Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	Dokumen	Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang ditetapkan oleh Buapti/Walikota paling sedikit memuat: a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam wilayah Kawasan b. kebutuhan kendaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi untuk melayani permintaan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan dan c. alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah kabupaten/kota dalam Kawasan Perkotaan dalam kabupaten/kota Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi paling sedikit meliputi kegiatan: a. penelitian potensi bangkitan b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan c. penentuan model perhitungan bangkitan d. penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan 5 (lima) tahun yang akan dan e. pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan, dengan mempertimbangkan: 1. tingkat penggunaan kendaraan dan 2. kapasitas kendaraan yang akan melayani.	0	T	[2.15.02.2.13.0001] [2.15.02.2.13.0002]
17	2.15.000029	Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah Sosialisasikan	Dokumen	Rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang ditetapkan oleh Buapti/Walikota paling sedikit memuat: a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam wilayah Kawasan b. kebutuhan kendaraan Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi untuk melayani permintaan jasa Angkutan Orang dengan Menggunakan dan c. alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah kabupaten/kota dalam Kawasan Perkotaan dalam kabupaten/kota Penyusunan rencana kebutuhan kendaraan Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi paling sedikit meliputi kegiatan: a. penelitian potensi bangkitan b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan c. penentuan model perhitungan bangkitan d. penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan 5 (lima) tahun yang akan dan e. pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan, dengan mempertimbangkan: 1. tingkat penggunaan kendaraan dan 2. kapasitas kendaraan yang akan melayani.	0	T	[2.15.02.2.13.0002] [2.15.02.2.13.0001]
18	2.15.000034	Data Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau yang telah ditetapkan	Dokumen	Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.	0	T	[2.15.03.1.08.0003] [2.15.03.2.11.0003]

19	2.15.000037	Data Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dengan ketentuan badan usaha yang memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran sekurang-kurangnya GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) dan melengkapi persyaratan sesuai PM 89 Tahun 2018 tentang NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIAPERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIKSEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG LAUT	Dokumen	Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional. Standar usaha angkutan laut ini meliputi pengangkutan penumpang dan barang umum antar pelabuhan dalam negeri termasuk daerah 3T		Y	[2.15.03.1.01.0001]
20	2.15.000040	Data Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Kabupaten/Kota	Dokumen	Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan umum dalam Trayek meliputi: a. dokumen b. dokumen Angkutan c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan Angkutan d. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang e. tanda identitas perusahaan Angkutan dan f. tanda identitas awak kendaraan Angkutan umum. dan Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan meliputi: a. tanda bukti lulus uji berkala kendaraan b. fisik Kendaraan dan c. Standar Pelayanan Minimal.	0	T	[2.15.02.2.09.0003] [2.15.02.2.09.0002] [2.15.02.2.10.0001] [2.15.02.2.10.0002] [2.15.02.2.12.0001]
21	2.15.000046	Data Audit Terminal	Dokumen	Audit Keselamatan LLAJ di bidang sarana dan prasarana LLAJ meliputi audit terhadap: a. perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung untuk jalan baru dan/atau jalan yang b. c. unit pengujian kendaraan d. unit pelaksana penimbangan kendaraan dan e. perusahaan angkutan umum Audit terhadap terminal dilaksanakan oleh: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, untuk terminal tipe b. gubernur, untuk terminal tipe dan c. bupati/walikota, untuk terminal tipe C.	0	T	[2.15.02.1.07.0003] [2.15.02.1.07.0004] [2.15.02.2.08.0003] [2.15.02.2.08.0004] [2.15.02.2.08.0006]
22	2.15.000047	Data auditor LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	(1) Audit di bidang jalan dilakukan oleh auditor independen yang ditentukan oleh pembina jalan. (2) Pembina jalan terdiri dari: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan, untuk jalan b. gubernur, untuk jalan dan c. bupati/walikota, untuk jalan kabupaten/kota. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan audit bidang jalan dan persyaratan auditor independen diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang jalan.	0	T	[2.15.02.2.08.0008]
23	2.15.000059	Data dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan	Dokumen	Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.	1	T	[2.15.03.2.10.0002] [2.15.03.2.10.0003] [2.15.03.2.12.0002] [2.15.03.2.12.0005] [2.15.03.2.15.0003]

24	2.15.000060	Data dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan	Dokumen	Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.	1	T	[2.15.03.2.10.0003]
25	2.15.000061	Data dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau yang telah ditetapkan	Dokumen	Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.	0	T	[2.15.03.2.11.0002]
26	2.15.000063	Data fasilitas operasi	Unit	Pengelompokan kelas stasiun kereta api dilakukan berdasarkan kriteria: a. fasilitas operasi b. jumlah jalur c. fasilitas penunjang d. frekuensi/lalu lintas e. jumlah penumpang f. jumlah barang.	0	T	[2.15.05.1.04.0001] [2.15.05.2.04.0001]
27	2.15.000064	Data fasilitas penunjang	Unit	Fasilitas penunjang adalah segala sesuatu yang melengkapi penyelenggaraan angkutan kereta api, yang dapat memberikan kemudahan, kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa kereta api yang ada di stasiun.	0	T	[2.15.05.1.04.0001] [2.15.05.2.04.0001]
28	2.15.000067	Data Fasilitas Penunjang pada Setiap Terminal Tipe C	Dokumen	Fasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa: a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau b. pos c. fasilitas d. fasilitas e. pos f. alat pemadam dan g. fasilitas umum.	7	T	[2.15.02.2.03.0009] [2.15.02.2.03.0007] [2.15.02.2.03.0011]
29	2.15.000068	Data Fasilitas Penunjang yang terehabilitasi dan terpelihara	Dokumen	Fasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa: a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau b. pos c. fasilitas d. fasilitas e. pos f. alat pemadam dan g. fasilitas umum.	0	T	[2.15.02.1.03.0011] [2.15.02.6.04.0004] [2.15.02.2.03.0011]
30	2.15.000071	Data Fasilitas Utama pada Setiap Terminal Tipe C	Dokumen	Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: a. jalur b. jalur c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau d. tempat naik turun e. tempat parkir f. fasilitas pengelolaan lingkungan g. perlengkapan h. media i. kantor penyelenggara dan J. loket penjualan tiket.	4	T	[2.15.02.2.03.0007] [2.15.02.2.03.0009] [2.15.02.3.17.0001] [2.15.02.4.17.0001]
31	2.15.000072	Data Fasilitas Utama yang terehabilitasi dan terpelihara	Dokumen	Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: a. jalur b. jalur c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau d. tempat naik turun e. tempat parkir f. fasilitas pengelolaan lingkungan g. perlengkapan h. media i. kantor penyelenggara dan J. loket penjualan tiket.	0	T	[2.15.02.1.03.0011] [2.15.02.6.04.0004] [2.15.02.2.03.0011]
32	2.15.000073	Data frekuensi/lalu lintas	Kali	Frekuensi lalu lintas adalah banyaknya kereta api yang berangkat, berhenti dan melintas di suatu stasiun selama kurun waktu tertentu.	0	T	[2.15.05.1.04.0001] [2.15.05.2.04.0001]

33	2.15.000074	Data inspeksi Terminal	Dokumen	Kegiatan pengawasan penyelenggaraan terminal meliputi: a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi: 1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perj 2. dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan 3. kartu uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, dan 4. pemeriksaan manifes Penumpang terhadap jumlah b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum, meliputi: 1. persyaratan teknis dan laik 2. fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor 3. fasilitas penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita dan 4. identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/ atau papan trayek, dan jenis c. pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum, meliputi: 1. pemeriksaan 2. pemeriksaan tanda pengenal dan 3. pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat aditif (napza); 4. pemeriksaan kondisi kesehatan dan dan 5. jam kerja d. pengawasan ketertiban Terminal, meliputi: 1. pemanfaatan fasilitas utama 2. pemanfaatan fasilitas penunjang 3. ketertiban dan kebersihan fasilitas dan 4. keamanan di dalam Terminal.	0	T	[2.15.02.1.07.0003] [2.15.02.1.07.0004] [2.15.02.2.08.0003] [2.15.02.2.08.0004]
34	2.15.000075	Data Inspektor LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	1. Inspeksi Keselamatan LLAJ melalui pemeriksaan : a. unsur dan b. unsur teknis 2. Unsur administrasi meliputi: a. SIM umum yang masih berlaku dengan klasifikasi sesuai jenis kendaraan b. STNK yang masih berlaku sesuai dengan fisik kendaraan c. Bujti lulus uji berkala yang masih berlaku d. kartu pengawasan yang masih berlaku 3. unsur teknis meliputi: a. unsur teknis utama b. unsur teknis penunjang 4. Unsur teknis inspeksi tercantum dalam lampiran III SK Dirjen 5637 Tahun 2017 Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan LLAJ	0	T	[2.15.02.2.08.0008]
35	2.15.000077	Data Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	Dokumen	Kegiatan fasilitasi pemenuhan persayaratan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan perolehan izin penyelenggaraan parkir seperti: a.penyiapan Denah marka parkir b.luas area parkir dan perhitungan kapasitas parkir c.persetujuan hasil ANDALALIN (apabila dipersayaratkan).	0	T	[2.15.02.2.04.0002] [2.15.02.2.04.0001]
36	2.15.000078	Data jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota	Unit	a. Jaringan pelayanan perkeretaapian merupakan kumpulan lintas pelayanan yang tersambung satu dengan yang lain menghubungkan lintas pelayanan perkeretaapian dengan pusat kegiatan, pusat logistik, dan antar moda. b. Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota merupakan pelayanan yang menghubungkan: - antarkota - antarkota antarprovinsi - antarkota dalam dan - antarkota dalam kabupaten/kota. c. Jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan: - menghubungkan beberapa stasiun - tidak menyediakan layanan penumpang - melayani penumpang tidak - memiliki jarak dan atau waktu tempuh e. memiliki frekuensi keretaapi sedang atau dan f. melayani kebutuhan angkutan penumpang dan/atau barang antarkota&	0	T	[2.15.05.1.06.0001] [2.15.05.2.06.0001]

37	2.15.000079	Data jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan	Unit	a. Jaringan pelayanan perkeretaapian merupakan kumpulan lintas pelayanan yang tersambung satu dengan yang lain menghubungkan lintas pelayanan perkeretaapian dengan pusat kegiatan, pusat logistik, dan antar moda. b. Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan yang berada dalam suatu wilayah perkotaan dapat : - Melampaui 1 (satu) - Melampaui 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) dan - Berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota. c. Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan: - Menghubungkan beberapa stasiun di wilayah - Melayani banyak penumpang - Memiliki sifat perjalanan ulang alik/ - Melayani penumpang - Memiliki jarak dan/atau waktu tempuh dan - Melayani kebutuhan angkutan penumpang di dalam kota dan dari daerah sub-urban menuju pusat kota atau sebaliknya.	0	T	[2.15.05.1.06.0001] [2.15.05.2.06.0001]
38	2.15.000080	Data Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Rencana Umum Jaringan Trayek Kab/Kota memuat paling sedikit: a. asal dan tujuan setiap Trayek antarkota dalam provinsi merupakan ibukota provinsi, kota, ibukota kabupaten, wilayah strategis provinsi, dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan Angkutan Kab/ b. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan kabupaten / c. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan Kab/ d. Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan paling rendah Terminal tipe C atau simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta dan e. jumlah kebutuhan dan jenis kendaraan Angkutan Kab/Kota setiap Trayek.	0	T	[2.15.02.2.12.0002] [2.15.02.2.14.0003] [2.15.02.2.14.0002]
39	2.15.000082	Data kapasitas, frekuensi, dan headway	Kali	a. Kapasitas lintas yang tersedia harus memperhatikan alokasi waktu perawatan prasarana perkeretaapian. b. Komposisi jenis pelayanan angkutan kereta api sesuai dengan tingkat pelayanan meliputi pelayanan angkutan orang dan/atau barang yang bersifat komersial dan/atau penugasan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. c. Keterpaduan intra dan antarmoda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan kondisi tersedianya jaringan pelayanan angkutan dengan moda kereta api dan/atau moda lain ke dan dari stasiun kereta api. d. Jarak waktu antara kereta api (headway) merupakan jarak kereta api yang satu dengan kereta api berikutnya dalam satuan waktu.	0	T	[2.15.05.1.06.0002] [2.15.05.2.06.0002]

				Trayek perkotaan pada kawasan aglomerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan: a. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap dan b. penentuan pusat Kawasan Perkotaan aglomerasi. Penentuan tempat persinggahan berupa tempat pemberhentian Mobil Bus dan Mobil Penumpang umum serta penentuan rute setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dengan mempertimbangkan: a. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap dan b. kelas jalan. Penentuan jumlah perkiraan jasa Angkutan Penumpang perkotaan untuk setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan: a. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap dan b. pembagian moda. Penentuan jumlah kebutuhan kendaraan Angkutan perkotaan setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi jenis, tipe, kapasitas, dan jumlah kendaraan yang harus disiapkan setiap hari serta frekuensi perjalanan yang harus dilayani dalam waktu tertentu. Penentuan jumlah kebutuhan			
40	2.15.000085	Data kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	kendaraan Angkutan perkotaan setiap	0	T	[2.15.02.2.11.0002]
41	2.15.000086	Data Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang ditetapkan	Dokumen	Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai, dilakukan pembahasan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara	0	T	[2.15.02.1.06.0006] [2.15.02.2.07.0007]
42	2.15.000087	Data kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar	Dokumen	Pengujian secara visual paling sedikit meliputi: a. nomor dan kondisi rangka Kendaraan b. nomor dan tipe motor c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan d. kondisi sistem converter kit bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar e. kondisi sistem baterai, untuk Kendaraan Bermotor menggunakan energi penggerak f. kondisi dan posisi pipa pembuangan, kecuali Kendaraan Bermotor listrik g. ukuran roda dan ban serta kondisi h. kondisi sistem i. kondisi sistem rem j. kondisi penutup lampu dan alat pemantul k. kondisi panel instrumen pada dashboard l. kondisi kaca m. kondisi o. keberadaan dan kondisi perlengkapan p. rancangan teknis kendaraan sesuai q. keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk Mobil dan r. kondisi badan kendaraan, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, pengarah angin untuk Mobil Barang bak muatan tertutup. n. bentuk	0	T	[2.15.02.1.07.0015] [2.15.02.2.05.0003] [2.15.02.2.08.0009]
43	2.15.000088	Data kereta api yang melintas (kereta api yang menjalani lintas pelayanan dan kereta api yang lintas pelayanannya berhimpit)	Unit	Jumlah trayek pelayanan kereta api	0	T	[2.15.05.1.06.0002] [2.15.05.2.06.0002]
44	2.15.000090	Data Laporan Angkutan Laut Kewenangan kab/kota yang telah terdaftar dalam perizinan	Laporan	Laporan koordinasi pengawasan angkutan laut berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan cq Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.	0	T	[2.15.03.2.01.0002]
45	2.15.000092	Data Laporan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan kab/kota yang telah terdaftar dalam perizinan	Laporan	Laporan dilakukan terhadap pengawasan perizinan berusaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pemda membentuk dan/atau menunjuk tim pengawas untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme Pengawasan sesuai ppu	0	T	[2.15.03.2.02.0002]

46	2.15.000094	Data Laporan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	Pengawasan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dilakukan terhadap pemenuhan: a. persyaratan perizinan Angkutan Orang Tidak Dalam dan b. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor Umum. Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. dokumen b. dokumen c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab d. jenis e. tarif untuk Angkutan Orang dengan Menggunakan f. tanda identitas Perusahaan Angkutan dan g. tanda identitas awak kendaraan Angkutan umum. Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor Umum meliputi: a. tanda bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor b. fisik Kendaraan Bermotor dan c. Standar Pelayanan Minimal.	0	T	[2.15.02.2.15.0004] [2.15.02.2.16.0003]
47	2.15.000099	Data laporan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Laporan	Laporan koordinasi pengawasan adalah laporan hasil pengawasan perizinan berusaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya, Pemda membentuk dan/atau menunjuk tim pengawas untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme Pengawasan sesuai ppu	0	T	[2.15.03.1.05.0004] [2.15.03.2.06.0004] [2.15.03.2.07.0004]
48	2.15.000111	Data nama badan usaha sarana perkeretaapian yang menyelenggarakan	Laporan	Data nama badan usaha sarana perkeretaapian yang menyelenggarakan pelayanan	0	T	[2.15.05.1.06.0002] [2.15.05.2.06.0002]
49	2.15.000112	Data nama-nama kereta api (sifat dan jenis pelayanan dan jenis angkutan)	Laporan	Data nama argo pelayanan kereta api dengan rincian sifat dan jenis pelayanan & angkutan	0	T	[2.15.05.1.06.0002] [2.15.05.2.06.0002]
50	2.15.000114	Data pelaksanaan sosialisasi pada media cetak	Dokumen	pelaksanaan sosialisasi kebijakan secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak	0	T	[2.15.02.1.01.0004] [2.15.02.1.01.0002] [2.15.02.1.05.0003] [2.15.04.3.03.0003] [2.15.04.4.03.0003] [2.15.02.2.01.0004] [2.15.02.2.01.0002] [2.15.02.2.06.0014] [2.15.04.3.05.0003] [2.15.04.4.05.0003]
51	2.15.000115	Data pelaksanaan sosialisasi media elektronik	Dokumen	pelaksanaan sosialisasi kebijakan secara langsung maupun tidak langsung melalui media digital	0	T	[2.15.02.1.01.0004] [2.15.02.1.01.0002] [2.15.02.1.05.0003] [2.15.04.3.03.0003] [2.15.04.4.03.0003] [2.15.02.2.01.0004] [2.15.02.2.01.0002] [2.15.02.2.06.0014] [2.15.04.4.05.0003] [2.15.04.3.05.0003]
52	2.15.000116	Data pelaksanaan sosialisasi Penyampaian langsung kepada masyarakat	Dokumen	pelaksanaan sosialisasi kebijakan secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak, media digital dan penyampaian langsung kepada masyarakat	0	T	[2.15.02.1.01.0004] [2.15.02.1.01.0002] [2.15.02.1.05.0003] [2.15.04.3.03.0003] [2.15.04.4.03.0003] [2.15.02.2.01.0004] [2.15.02.2.01.0002] [2.15.02.2.06.0014] [2.15.04.3.05.0003] [2.15.04.4.05.0003]
53	2.15.000117	Data pelayanan angkutan barang	Unit	Pelayanan angkutan kereta api dilaksanakan pada jaringan jalur kereta api dalam lintas pelayanan perkeretaapian yang membentuk jaringan pelayanan perkeretaapian.	0	T	[2.15.05.1.06.0001] [2.15.05.2.06.0001]
54	2.15.000118	Data pelayanan angkutan orang	Unit	a. Pelayanan angkutan kereta api dilaksanakan pada jaringan jalur kereta api dalam lintas pelayanan perkeretaapian yang membentuk jaringan pelayanan perkeretaapian. b. Pelayanan angkutan orang dengan kereta api dapat bersifat komersial atau bersifat penugasan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. c. Pelayanan angkutan kereta api yang bersifat komersil terdiri atas : - Angkutan pelayanan kelas non- dan - Angkutan pelayanan kelas ekonomi d. Pelayanan angkutan kereta api yang bersifat penugasan menggunakan angkutan pelayanan kelas ekonomi untuk melaksanakan: - kewajiban pelayanan atau - angkutan perintis perkeretaapian.	0	T	[2.15.05.1.06.0001] [2.15.05.2.06.0001]

55	2.15.000120	Data pemberian kemudahan bagi penyandang cacat	Dokumen	Fasilitas Khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut 1. Trotoar Jalan a. Bahan : Stabil, kuat, bertekstur halus, tidak licin pada kondisi kering maupun b. Tekstur Ubin : Ubin garis-garis, ubin bulat/dot c. Ukuran dasar ruang (terlampir) d. Kelandaian : 1 satuan vertical : 10 satuan horizontal, ada jalur penghubung (ramp) 2. Tempat Penyeberangan a. Penyeberangan sebidang dilengkapi dengan suara/bunyi yang berintegrasi dengan alat pemberi isyarat lalu b. Penyeberangan tidak sebidang menggunakan lift, escalator, tangga dengan kelandaian (1 satuan vertical : 10 satuan horizontal). 3. Tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum disertai (ramp) dengan lebar 90 4. Tempat Parkir (desain terlampir); 5. Angkutan Umum Tersedianya fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas (Minimal 1 tempat duduk).	0	T	[2.15.02.1.02.0002] [2.15.02.1.02.0004] [2.15.02.1.05.0007] [2.15.02.2.02.0002] [2.15.02.2.02.0004] [2.15.02.2.06.0016]
56	2.15.000121	Data pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki	Dokumen	Fasilitas pejalanan Kaki (Trotoar) 1. lebar sesuai dengan kondisi lokasi atau jumlah pejalan kaki yang melalui atau menggunakan trotoar tersebut a) Jalan di daerah pertokoan atau kaki lima = 4 meter b) Di wilayah perkantoran utama = 3 meter c) Di wilayah industri 1) pada jalan primer = 3 meter 2) pada jalan akses = 2 meter d) Di wilayah pemukiman : 1) pada jalan primer = 2,75 meter 2) pada jalan akses = 2 meter 2. memiliki ruang bebas diatasnya sekurang-kurangnya 2,50 meter dari permukaan trotoar.	0	T	[2.15.02.1.02.0002] [2.15.02.1.02.0004] [2.15.02.1.05.0007] [2.15.02.2.02.0002] [2.15.02.2.02.0004] [2.15.02.2.06.0016]
57	2.15.000124	Data penetapan jalur kereta api khusus	Dokumen		0	T	[2.15.05.1.07.0001] [2.15.05.2.07.0001]
58	2.15.000125	Data penetapan lokasi dan jenis APILL yang dipasang pada ruas dan/atau persimpangan	Dokumen		0	T	[2.15.02.1.05.0003] [2.15.02.2.06.0014]
59	2.15.000126	Data penetapan lokasi dan jenis marka yang dipasang pada ruang dan/atau persimpangan	Dokumen		0	T	[2.15.02.1.05.0003] [2.15.02.2.06.0014]
60	2.15.000127	Data penetapan lokasi dan jenis rambu yang dipasang pada ruas dan/atau persimpangan	Dokumen		0	T	[2.15.02.1.05.0003] [2.15.02.2.06.0014]
61	2.15.000128	Data Penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus	Dokumen		0	T	[2.15.02.1.05.0001] [2.15.02.2.06.0017]
62	2.15.000130	Data pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan	Dokumen		0	T	[2.15.02.1.05.0001] [2.15.02.2.06.0017]
63	2.15.000131	Data pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan	Dokumen		0	T	[2.15.02.1.05.0001] [2.15.02.2.06.0017]

64	2.15.000136	Data perizinan Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan	Dokumen	Pemegang persetujuan kegiatan kerja keruk memiliki kewajiban: a. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak persetujuan kegiatan kerja keruk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pelayaran serta kelestarian c. memasang tanda-tanda beserta rambu-rambu navigasi yang dapat dilihat dengan jelas baik siang maupun malam hari dan berkoordinasi dengan Syahbandar serta Distrik Navigasi setempat selama pelaksanaan kegiatan kerja d. bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan kerja keruk yang e. melaporkankegiatan kerja keruk setiap bulan kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Syahbandar dan f. melaksanakan kegiatan kerja keruk paling lama 6 (enam) bulan sejak persetujuan kegiatan kerja keruk diterbitkan.	0	T	[2.15.03.2.17.0002] [2.15.03.2.18.0002]
65	2.15.000137	Data perizinan pengembangan pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal yang sudah ditetapkan	Dokumen		0	T	[2.15.03.2.15.0002]
66	2.15.000138	Data perizinan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter yang diterbitkan	Dokumen	Pembangunan Heliport di daratan (surface level Heliport) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilaksanakan oleh Pemrakarsa setelah memenuhi standar pembangunan, yang terdiri atas: a. bukti kepemilikan lahan/penguasaan lahansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang b. penetapan lokasi, untuk Heliport yang berada di luar Bandar Udara/di luar daerah kegiatan usaha pokoknya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang tata cara dan prosedur penetapan d. dokumen rancangan teknik terinci(detail engineeringdesign) dan c. persetujuan lingkungan	0	T	[2.15.04.2.01.0002]
67	2.15.000139	Data perizinan Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan	Dokumen		0	T	[2.15.03.2.16.0002]
68	2.15.000140	Data perizinan Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha kewenangan Kabupaten/Kota yang telah diberikan	Dokumen		0	T	[2.15.03.2.05.0002]
69	2.15.000142	Data Perlengkapan Jalan	Dokumen	Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan meliputi: a. alat pemberi isyarat lalu b. rambu lalu c. marka d. alat penerangan e. alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas: 1. alat pembatas dan 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan. f. alat pengaman pemakai jalan, terdiri atas: 1. pagar 2. cermin 3. tanda patok tikungan (delineator); 4. pulau-pulau lalu dan 5. pita penggaduh. g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar badan dan/atau h. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.	2273	T	[2.15.02.1.02.0001] [2.15.02.1.02.0004] [2.15.02.1.05.0007] [2.15.02.3.05.0006] [2.15.02.4.05.0006] [2.15.02.2.02.0001] [2.15.02.2.02.0002] [2.15.02.2.02.0004] [2.15.02.2.06.0016]
70	2.15.000143	Data Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dokumen	Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi: a. alat pemberi isyarat lalu b. rambu lalu c. marka d. alat penerangan	2273	T	[2.15.02.1.05.0007] [2.15.02.2.06.0016] [2.15.02.1.05.0008]

71	2.15.000144	Data Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Dokumen	Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa: a. Rambu Lalu b. Marka c. Alat Pemberi Isyarat Lalu d. alat penerangan e. alat pengendali dan pengaman Pengguna f. alat pengawasan dan pengamanan g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang dan h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.	17	T	[2.15.02.1.02.0003] [2.15.02.2.02.0003]
72	2.15.000146	Data permohonan izin pembangunan	Dokumen		0	T	[2.15.05.1.07.0001] [2.15.05.2.07.0001]
73	2.15.000148	Data persetujuan prinsip pembangunan	Dokumen	&Perkeretaapian khusus adalah perkeretaapian yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum yang kegiatannya meliputi fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin dalam sistem pelayanan perizinan berusahan terintegrasi secara elektronik. Sebelum mendapat izin pembangunan, badan usaha yang akan menyelenggarakan perkeretaapian khusus terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan prinsip pembangunan. Persetujuan prinsip pembangunan diberikan oleh: a. Menteri, untuk penyelenggaraan yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah provinsi dan/atau batas wilayah b. gubernur, untuk penyelenggaraan yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapat persetujuan dan c. bupati/walikota, untuk penyelenggaraan yang jaringan jalurnya dalam wilayah kabupaten/kota setelah mendapat rekomendasi gubernur dan persetujuan Menteri.	0	T	[2.15.05.1.07.0001] [2.15.05.2.07.0001]
74	2.15.000149	Data personel Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya	Dokumen	Peningkatan kapasitas SDM dimaksud adalah dengan memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan dalam peningkatan jenjang penguji yang meliputi : a. Pembantu Penguji b. Penguji Pemula c. Penguji Tingkat 1 d. Penguji Tingkat 2 e. Penguji Tingkat 3 f. Penguji Tingkat 4 g. Penguji Tingkat 5	0	T	[2.15.02.2.05.0002]
75	2.15.000151	Data Perusahaan angkutan Umum Kabupaten/Kota	Dokumen	Sitem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum meliputi: 1. komitmen dan kebijakan 2. pengorganisasian 3. manajemen bahaya dan risiko 4. fasilitasi pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor 5. dokumentasi dan data 6. peningkatan kompetensi dan pelatihan 7. tanggap darurat 8. pelaporan kecelakaan internal 9. monitoring dan evaluasi 10. pengukuran kinerja	0	T	[2.15.02.2.08.0007]
76	2.15.000153	Data prakiraan perindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah perpindahan orang dan/atau barang untuk memprediksi lokasi dan kebutuhan simpul yang perlu dibangun dan diselenggarakan pelayanan angkutan untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat-tempat strategis.	378150	T	[2.15.02.2.01.0002] [2.15.02.2.01.0001] [2.15.05.2.01.0001]

77	2.15.000156	Data Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi yang disahkan oleh gubernur merupakan arahan dan pedoman untuk: a. pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat c. penyusunan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan d. penyusunan rencana umum jaringan jalan e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan antarkota, perkotaan, dan perdesaan dalam f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang g. pembangunan Simpul dan h. pengembangan teknologi dan industri lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.	0	T	[2.15.02.2.01.0007] [2.15.02.2.01.0002]
78	2.15.000158	Data Rencana Kebutuhan Ruang Lalu Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	Hasil pemetaan kebutuhan ruang berdasarkan potensi perpindahan orang dan/atau barang	0	T	[2.15.02.2.01.0001]
79	2.15.000160	Data rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian provinsi	Unit		0	T	[2.15.05.1.01.0001] [2.15.04.3.08.0001] [2.15.05.4.09.0001] [2.15.05.2.01.0001] [2.15.05.3.06.0001] [2.15.05.4.06.0001]
80	2.15.000162	Data rencana kebutuhan sumber daya manusia	Orang	Rencana kebutuhan sumber daya manusia meliputi: a. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian b. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian c. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian d. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian dan e. rencana kebutuhan sumber daya manusia pembina perkeretaapian provinsi.	0	T	[2.15.05.1.01.0003] [2.15.05.1.01.0001] [2.15.05.1.01.0002] [2.15.05.1.03.0001] [2.15.05.1.03.0002] [2.15.05.2.01.0001] [2.15.05.2.01.0002] [2.15.05.2.03.0001] [2.15.05.2.03.0002] [2.15.05.2.01.0003]
81	2.15.000163	Data Rencana lokasi dan kebutuhan Simpul Kabupaten/Kota	Dokumen	Hasil pemetaan lokasi dan kebutuhan simpul berdasarkan potensi perpindahan orang dan/atau barang	0	T	[2.15.02.2.01.0001] [2.15.02.2.03.0001]
82	2.15.000165	Data Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota eksisting	Dokumen	Rencana Umum Jaringan Trayek pedesaan memuat paling sedikit: a. asal dan tujuan Trayek merupakan simpul transportasi pedesaan dan wilayah lainnya yang mempunyai potensi bangkitan dan tarikan perjalanan Angkutan b. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jalan c. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan d. terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan paling rendah Terminal tipe C atau simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, dan/atau stasiun kereta dan e. jumlah kebutuhan dan jenis kendaraan Angkutan Pedesaan.	0	T	[2.15.02.2.12.0001] [2.15.02.2.12.0002]

				Trayek perkotaan pada kawasan aglomerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan: a. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap dan b. penentuan pusat Kawasan Perkotaan aglomerasi. Penentuan tempat persinggahan berupa tempat pemberhentian Mobil Bus dan Mobil Penumpang umum serta penentuan rute setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dengan mempertimbangkan: a. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap dan b. kelas jalan. Penentuan jumlah perkiraan jasa Angkutan Penumpang perkotaan untuk setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan: a. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap dan b. pembagian moda. Penentuan jumlah kebutuhan kendaraan Angkutan perkotaan setiap Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi jenis, tipe, kapasitas, dan jumlah kendaraan yang harus disiapkan setiap hari serta frekuensi perjalanan yang harus dilayani dalam waktu tertentu. Penentuan jumlah kebutuhan			
83	2.15.000166	Data Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota eksisting	Dokumen	kendaraan Angkutan perkotaan setiap	0	T	[2.15.02.2.11.0001] [2.15.02.2.11.0002] [2.15.02.2.10.0002]
84	2.15.000167	Data rencanan induk pelabuhan kab/kota yang telah ditetapkan	Dokumen		0	T	[2.15.03.2.13.0010]
85	2.15.000168	Data Ruang Lalu Lintas	Dokumen	Hasil pemetaan kebutuhan ruang berdasarkan potensi perpindahan orang dan/atau barang	0	T	[2.15.02.1.01.0001] [2.15.02.2.02.0001] [2.15.02.2.01.0001]
86	2.15.000172	Data Sumber Daya Manuai Pengelola pada setiapTerminal Tipe C	Dokumen	Pengoperasian Terminal dikoordinasikan oleh koordinator satuan pelayanan Terminal yang dibantu oleh petugas terminal yang meliputi: a. kepala urusan layanan tata b. kepala urusan sistem c. petugas d. petugas pencatat kedatangan, keberangkatan, dan faktor e. pengatur lalu f. Penyidik Pegawai Negeri g. penguji kendaraan dan h. petugas komersial.	1	T	[2.15.02.2.03.0010]
87	2.15.000173	Data Terminal	Dokumen	Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: a. jalur b. jalur c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau d. tempat naik turun e. tempat parkir f. fasilitas pengelolaan lingkungan g. perlengkapan h. media i. kantor penyelenggara dan J. loket penjualan tiket. Fasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa: a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau b. pos c. fasilitas d. fasilitas e. pos f. alat pemadam dan g. fasilitas umum.	1	T	[2.15.02.1.03.0010] [2.15.02.6.04.0008] [2.15.02.2.03.0009]
88	2.15.000176	Data Terminal Penumpang Tipe C	Dokumen	Data terminal penumpang sebagai simpul transportasi daerah meliputi: a. nama terminal b. tipe terminal c. lokasi d. status pengelolaan	1	T	[2.15.02.2.03.0009] [2.15.02.2.03.0001]
89	2.15.000177	Data Terminal yang terehabilitasi dan terpelihara	Dokumen	Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: a. jalur b. jalur c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau d. tempat naik turun e. tempat parkir f. fasilitas pengelolaan lingkungan g. perlengkapan h. media i. kantor penyelenggara dan J. loket penjualan tiket. Fasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa: a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau b. pos c. fasilitas d. fasilitas e. pos f. alat pemadam dan g. fasilitas umum.	0	T	[2.15.02.1.02.0003] [2.15.02.2.02.0003]
90	2.15.000178	Data UPPKB	Dokumen	Data terkait proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor	0	T	[2.15.02.1.07.0015] [2.15.02.2.08.0009]

91	2.15.000180	Dokumen Izin Usaha Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	-Dalam pelaksanaan pembangunan perkeretaapian umum pada jalur melintasi daerah kabupatan/kota dalam satu provinsi, Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum wajib memenuhi Perizinan Berusaha terkait prasarana perkeretaapian umum meliputi izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi. - Badan Usaha yang akan melakukan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum, wajib mengajukan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati / Wali Kota sesuai kewenangannya melalui Lembaga Online Single Submission (OSS).	0	T	[2.15.05.1.02.0001] [2.15.05.2.02.0001]
92	2.15.000181	Dokumen kebijakan penetapan jaringan jalur kereta api	Dokumen		0	T	[2.15.05.1.03.0001] [2.15.05.2.03.0001]
93	2.15.000183	Dokumen Kebijakan Rencana Induk Perkeretaapian	Regulasi		0	T	[2.15.05.1.01.0002] [2.15.05.2.01.0002]
94	2.15.000184	Dokumen pemenuhan persyaratan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	Untuk memperoleh izin operasi Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian umum wajib memenuhi persyaratan: a. memiliki studi b. memiliki paling sedikit 2 (dua) rangkaian Kereta Api sesuai dengan spesifikasi teknis Sarana c. Sarana Perkeretaapian yang akan dioperasikan telah lulus uji pertama yang dinyatakan dengan sertifikat uji d. tersedianya Awak Sarana Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kecakapan, serta tenaga perawatan, dan tenaga pemeriksa Sarana Perkeretaapian yang memiliki sertifikat e. menyusun sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan Sarana f. menyediakan fasilitas perawatan Sarana g. lintas pelayanan telah ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan dan h. membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan.	0	T	[2.15.05.1.05.0001] [2.15.05.2.05.0001]
95	2.15.000187	Dokumentasi pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	Bersifat lintas sektor dan harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina beserta para pemangku kepentingan (stakeholders). Guna mengatasi permasalahan yang sangat kompleks yang memerlukan keterpaduan, dibahas dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan	0	T	[2.15.02.2.06.0015]
96	2.15.000189	Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai, dilakukan pembahasan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara.	0	T	[2.15.02.1.06.0003] [2.15.02.2.07.0003]
97	2.15.000190	Dokumentasi sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Laporan		0	T	[2.15.05.1.01.0002] [2.15.05.2.01.0002]
98	2.15.000191	Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan	Unit	Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan meliputi: a. jalur khusus angkutan b. jalur/lajur sepeda c. jalur/lajur kendaraan tidak d. parkir pada badan e. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar dan/atau f. tempat istirahat.	0	T	[2.15.02.1.02.0002] [2.15.02.2.02.0002] [2.15.02.1.01.0008] [2.15.02.1.01.0009] [2.15.02.1.05.0008]
99	2.15.000192	Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit		0	T	[2.15.02.1.02.0004] [2.15.02.2.02.0004] [2.15.02.1.01.0008] [2.15.02.1.01.0009] [2.15.02.1.05.0008]

				Pesepeda &1.500 Pesepeda/hari 1) Searah : 2,25 meter 2) Dua Arah : 2,75 meter b) Volume Pesepeda &1.500 Pesepeda/hari 1) Searah : 2,50 meter 2) Dua Arah : 3,00 meter Trotoar 1. lebar sesuai dengan kondisi lokasi atau jumlah pejalan kaki yang melalui atau menggunakan trotoar tersebut a) Jalan di daerah pertokoan atau kaki lima = 4 meter b) Di wilayah perkantoran utama = 3 meter c) Di wilayah industri 1) pada jalan primer = 3 meter 2) pada jalan akses = 2 meter d) Di wilayah pemukiman : 1) pada jalan primer = 2,75 meter 2) pada jalan akses = 2 meter 2. memiliki ruang bebas diatasnya sekurang- kurangnya 2,50 meter dari permukaan trotoar. Fasilitas Khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut 1. Trotoar Jalan a. Bahan : Stabil, kuat, bertekstur halus, tidak licin pada kondisi kering maupun b. Tekstur Ubin : Ubin garis-garis, ubin bulat/dot c. Ukuran dasar ruang (terlampir) d. Kelandaian : 1 satuan vertical : 10 satuan horizontal, ada jalur penghubung (ramp) 2. Tempat Penyeberangan a. Penyeberangan sebidang dilengkapi dengan suara/bunyi yang berintegrasi dengan alat			
100	2.15.000193	Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat	Unit	pemberi isyarat lalu b. Penyeberangan tidak sebidang menggunakan lift, escalator,	0	T	[2.15.02.1.02.0002] [2.15.02.2.02.0002]
				Pesepeda &1.500 Pesepeda/hari 1) Searah : 2,25 meter 2) Dua Arah : 2,75 meter b) Volume Pesepeda &1.500 Pesepeda/hari 1) Searah : 2,50 meter 2) Dua Arah : 3,00 meter Trotoar 1. lebar sesuai dengan kondisi lokasi atau jumlah pejalan kaki yang melalui atau menggunakan trotoar tersebut a) Jalan di daerah pertokoan atau kaki lima = 4 meter b) Di wilayah perkantoran utama = 3 meter c) Di wilayah industri 1) pada jalan primer = 3 meter 2) pada jalan akses = 2 meter d) Di wilayah pemukiman : 1) pada jalan primer = 2,75 meter 2) pada jalan akses = 2 meter 2. memiliki ruang bebas diatasnya sekurang- kurangnya 2,50 meter dari permukaan trotoar. Fasilitas Khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut 1. Trotoar Jalan a. Bahan : Stabil, kuat, bertekstur halus, tidak licin pada kondisi kering maupun b. Tekstur Ubin : Ubin garis-garis, ubin bulat/dot c. Ukuran dasar ruang (terlampir) d. Kelandaian : 1 satuan vertical : 10 satuan horizontal, ada jalur penghubung (ramp) 2. Tempat Penyeberangan a. Penyeberangan sebidang dilengkapi dengan suara/bunyi yang berintegrasi dengan alat			
101	2.15.000194	Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	pemberi isyarat lalu b. Penyeberangan tidak sebidang menggunakan lift, escalator,	0	T	[2.15.02.1.02.0004] [2.15.02.2.02.0004]
102	2.15.000196	hasil kajian Rencana Induk Pelabuhan.	Dokumen	Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan.	0	T	[2.15.03.1.08.0001] [2.15.03.2.13.0006]
103	2.15.000197	Hasil Penilaian Tim Evaluasi	Dokumen	Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai yang dinyatakan memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal, Kepala Badan, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya meminta Pengembang atau Pembangun membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban Analisis Dampak Lalu Lintas	0	T	[2.15.02.1.06.0004] [2.15.02.1.06.0003] [2.15.02.2.07.0006] [2.15.02.2.07.0003]

104	2.15.000199	Jarak Pelayanan	Dokumen	Tarif adalah nilai yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa atas pelayanan yang diperoleh pada suatu lintas tertentu. Tarif Dasar adalah besaran Tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per satuan unit produksi per mil.	0	T	[2.15.03.1.07.0002] [2.15.03.2.09.0002]
105	2.15.000200	Kajian rencana induk bandar udara	Dokumen	- Rencana Induk Bandar udara paling sedikit memuat : a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan b. kebutuhan c. tata letak d. tahapan pelaksanaan e. kebutuhan dan pemanfaatan f. daerah lingkungan g. daerah lingkungan h. kawasan keselamatan operasi dan i. batas kawasan kebisingan. (1) - Sertifikat Bandar udara diberikan setelah bandar udara memiliki buku pedoman pengoperasian bandar udara (aerodrome manual) yang memenuhi persyaratan teknis tentang: a. personel b. fasilitas c. prosedur operasi bandar dan d. sistem manajemen keselamatan operasi bandar udara. (2) - Sumber daya manusia terdiri atas sumber daya manusia di bidang: a. Pesawat udara b. angkutan udara c. kebandarudaraan d. navigasi penerbangan e. Keselamatan penerbangan dan f. keamanan penerbangan. (3) - Fasilitas Bandar udara adalah semua fasilitas yang dipergunakan untuk keperluan operasional bandar udara dan penerbangan yang terdiri dari prasarana dan, Peralatan Bandar Udara, utilitas Bandar Udara dan Pelayanan Darurat Bandar Udara (4)	0	T	[2.15.04.3.01.0006] [2.15.04.3.01.0007] [2.15.04.3.03.0001] [2.15.04.4.01.0006] [2.15.04.4.01.0007] [2.15.04.4.03.0001] [2.15.04.3.03.0002] [2.15.04.4.03.0002] [2.15.04.3.02.0005] [2.15.04.3.02.0006] [2.15.04.4.02.0007] [2.15.04.4.02.0008] [2.15.04.3.05.0002] [2.15.04.4.05.0002]
106	2.15.000201	Kebutuhan angkutan (demanci);	Dokumen	Kebutuhan angkutan (demand) meliputi: 1. Tingkat pertumbuhan eksisting dan prediksi kebutuhan pergerakan barang total di Pelabuhan Sungai dan Danau. 2. Tingkat pertumbuhan eksisting dan prediksi kebutuhan angkutan penumpang, angkutan kendaraan R2 (roda dua) dan R4 (roda empat) di Pelabuhan Sungai dan Danau.	0	T	[2.15.03.1.04.0002] [2.15.03.1.05.0003] [2.15.03.1.09.0002] [2.15.03.2.06.0003] [2.15.03.2.07.0003]
107	2.15.000202	Ketersediaan kapal (supply) dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada lintas yang akan dilayani; dan	Dokumen	Supply Angkutan Sungai dan Danau adalah penyediaan kapal yang memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan kapal sungai dan danau, memenuhi SPM, serta memiliki Trayek Tetap dan Teratur dan/atau Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur sesuai PM 61 Tahun 2021.	0	T	[2.15.03.1.04.0002] [2.15.03.1.05.0003] [2.15.03.2.06.0003] [2.15.03.2.07.0003]
108	2.15.000203	Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Laporan	Untuk memperoleh izin operasi Prasarana Perkeretaapian, Badan Usaha wajib memenuhi persyaratan: a. Prasarana Perkeretaapian yang telah dibangun telah sesuai dengan persyaratan kelaikan teknis dan operasional Prasarana Perkeretaapian dan telah lulus uji pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan b. menyusun sistem dan prosedur pengoperasian dan perawatan Prasarana c. tersedianya tenaga perawatan prasarana Perkeretaapian, tenaga pemerikba prasarana Perkeretaapian, dan petugas pengoperasian prasarana Perkeretaapian yang dibuktikan dengan d. menyediakan peralatan untuk perawatan prasarana dan e. membuat dan melaksanakan sistem keselamatan.	0	T	[2.15.05.1.02.0002] [2.15.05.2.02.0002]

109	2.15.000204	Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum	Laporan	Dalam penerbitan izin operasi yang diberikan oleh Gubernur, perlu dipastikan dokumen persyaratan yang telah ditentukan sehingga perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan perkeretaapian umum	0	T	[2.15.05.1.05.0002] [2.15.05.2.05.0002]
110	2.15.000205	Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Laporan	Permohonan izin pembangunan Prasarana Perkeretaapian harus dilengkapi dengan persyaratan meliputi: a. rancang bangun yang dibuat berdasarkan b. gambar c. data d. jadwal e. spesifikasi f. metode g. telah membebaskan tanah paling sedikit 5% (lima persen) dari total tanah yang h. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL- dan i. memenuhi ketentuan mendirikan bangunan dari instansi yang berwenang.	0	T	[2.15.05.1.02.0002] [2.15.05.2.02.0002]
111	2.15.000206	Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus	Laporan	Menurut Fungsinya Perkeretaapian terdiri dari perkeretaapian umum dan perkeretaapin khusus, perkeretaapian khusus hanya digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.	0	T	[2.15.05.1.07.0002] [2.15.05.2.07.0002]
112	2.15.000207	Laporan pengawasan pelaksanaan Izin Usaha Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Laporan	Dalam pelaksanaan pembangunan perkeretaapian umum pada jalur melintasi daerah kabupatan/kota dan jalur dalam satu kab/kota, Badan Usaha yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum wajib memenuhi Perizinan Berusaha terkait prasarana perkeretaapian umum meliputi izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi	0	T	[2.15.05.1.02.0002] [2.15.05.2.02.0002]
113	2.15.000208	Laporan Rencana Induk Perkeretaapian	Laporan		0	T	[2.15.05.1.01.0003] [2.15.05.2.01.0003]
114	2.15.000209	Laporan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api	Laporan	1. Kumpulan lintas pelayanan perkeretaapian antarkota yang tersambung satu dengan yang lain yang telah ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya merupakan jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota. 2. Kumpulan lintas pelayanan perkeretaapian perkotaan yang tersambung satu dengan yang lain yang telah ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya merupakan jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan. 3. Kumpulan lintas pelayanan perkeretaapian yang tersambung satu dengan yang lain dapat berupa: a. keterpaduan secara fisik baik berupa perpotongan atau persinggungan simpul yang berada pada jalur kereta dan/atau b. keterpaduan pelayanan angkutan kereta api.	0	T	[2.15.05.1.03.0002] [2.15.05.1.06.0002] [2.15.05.2.03.0002] [2.15.05.2.06.0002]
115	2.15.000210	Marka Jalan	Unit	Suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas	0	T	[2.15.02.1.02.0002] [2.15.02.2.02.0002]
116	2.15.000211	Marka Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	Suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas yang terehabilitasi untuk memastikan kualitas layanan	0	T	[2.15.02.1.02.0004] [2.15.02.2.02.0004]

117	2.15.000215	Pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi maupun peralatan sesuai kebutuhan	Dokumen	Peralatan pengujian tipe Kendaraan Bermotor meliputi: a. alat uji rem utama dan rem b. alat uji lampu c. alat uji suspensi roda dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah Kendaraan d. alat uji e. alat uji tekanan f. alat uji g. alat uji h. alat uji tingkat i. alat uji pengujian j. alat uji kincup roda k. alat uji l. alat uji posisi roda m. alat uji motor n. alat uji o. alat uji sabuk p. alat uji emisi gas buang, termasuk ketebalan asap gas q. alat uji prestasi Kendaraan r. alat uji s. peralatan dan t. alat uji lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi Kendaraan Bermotor	0	T	[2.15.02.2.05.0001] [2.15.02.2.05.0007]
118	2.15.000218	Perorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia berbentuk PT, BUMN, BUMD atau koperasi untuk Peruntukan usaha tsb;	Dokumen		0	T	[2.15.03.1.03.0001] [2.15.03.2.03.0001] [2.15.03.2.04.0001] [2.15.03.2.05.0001]
119	2.15.000219	persyaratan administratif	Dokumen		0	T	[2.15.03.2.15.0001] [2.15.03.2.17.0001] [2.15.03.2.18.0001]
120	2.15.000221	Potensi Perekonomian daerah	Dokumen	Peran transportasi dalam menopang potensi kegiatan komersil, sumber daya alam dan pariwisata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi	0	T	[2.15.03.1.04.0002] [2.15.03.1.05.0003] [2.15.03.2.06.0003]
121	2.15.000224	Rambu Lalu Lintas	Unit	Bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan	259	T	[2.15.02.1.02.0002] [2.15.02.2.02.0002]
122	2.15.000225	Rambu Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	Bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan untuk menjaga kualitas layanan dari perlengkapan jalan tersebut	0	T	[2.15.02.1.02.0004] [2.15.02.2.02.0004]
123	2.15.000226	Rancang Bangun	Dokumen	a. desain arsitektur meliputi eksterior dan b. desain struktur c. mekanikal berupa tata udara, sanitasi, plumbing, d. elektrikal berupa catu daya, tata cahaya, telepon, komunikasi, dan e. tata ruang luar berupa lansekap, ruang terbuka hijau, dan dan f. rencana anggaran biaya disertai analisa harga satuan.	0	T	[2.15.02.1.03.0001] [2.15.02.6.04.0001] [2.15.02.2.03.0001]
124	2.15.000227	Rekomendasi dari bupati/wali kota mengenaikesesuaian tata Ruang wilayah kabupaten/kota	Dokumen		0	T	[2.15.03.1.08.0001] [2.15.03.2.10.0001] [2.15.03.2.11.0001] [2.15.03.2.12.0001] [2.15.03.2.12.0004] [2.15.03.2.13.0001]
125	2.15.000228	Rencana dan/atau ketersediaan terminal penyeberangan atau pelabuhan;	Dokumen	Ditinjau dari sisi pelayanan, dalam merencanakan layanan transportasi penyeberangan diawali dengan membuka lintasan, membangun pelabuhan serta armada (kapal Ro-Ro) hingga transportasi penyeberangan dapat beroperasi secara optimal baik secara komersil maupun perintis melalui subsidi angkutan. Didukung dengan pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang merupakan penunjang mobilitas penduduk di wilayah tersebut.	0	T	[2.15.03.1.04.0002] [2.15.03.1.05.0003] [2.15.03.2.06.0003] [2.15.03.2.07.0003]
126	2.15.000231	Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN); .	Dokumen	Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah pengaturan ruang Kepelabuhanan nasional yang memuat tentang kebijakan Pelabuhan, rencana lokasi dan hierarki Pelabuhan secara nasional yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan Pelabuhan yang ditetapkan dengan KP 432 Tahun 2017	0	T	[2.15.03.1.04.0002] [2.15.03.1.05.0003] [2.15.03.1.08.0001] [2.15.03.1.10.0002] [2.15.03.1.12.0001] [2.15.03.3.08.0004] [2.15.03.4.08.0004] [2.15.03.2.06.0003] [2.15.03.2.10.0001] [2.15.03.2.11.0001] [2.15.03.2.12.0001] [2.15.03.2.13.0001] [2.15.03.2.15.0001] [2.15.03.2.13.0006]
127	2.15.000232	Rencana induk terminal	Dokumen	Dokumen rencana pengembangan masing-masing terminal penumpang di masa yang akan datang	0	T	[2.15.02.1.03.0001] [2.15.02.6.04.0001] [2.15.02.2.03.0001]

128	2.15.000238	rencana umum tata ruang;	Dokumen	Kegiatan fasilitasi pemenuhan persayaratan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan perolehan izin penyelenggaraan parkir seperti: a.penyiapan Denah marka parkir b.luas area parkir dan perhitungan kapasitas parkir c.persetujuan hasil ANDALALIN (apabila dipersayaratkan).	0	T	[2.15.02.2.04.0001]
129	2.15.000239	Salinan dokumen perjanjiankonsesi pengusahaan pelabuhansesuai ketentuan sebagaimanadiatur UU 17 Tahun 2008 tentangPelayaran, PP 61 Tahun 2009tentang Kepelabuhanan dan PM15 Tahun 2015;	Dokumen		0	T	[2.15.03.1.09.0002] [2.15.03.1.10.0002] [2.15.03.2.12.0002] [2.15.03.2.13.0002]
130	2.15.000243	Tarif pelayanan dasar	Dokumen		0	T	[2.15.03.1.07.0001] [2.15.03.1.07.0002] [2.15.03.2.09.0002]
131	2.15.000244	Tenaga Ahli atau Konsultan yang tersertifikasi	Orang		0	T	[2.15.02.1.06.0005] [2.15.02.2.07.0005]
132	2.15.000245	Marka Jalan	Meter	Suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas	0	T	[2.15.02.1.02.0002] [2.15.02.2.02.0002]
133	2.15.000246	Data indentifikasi masalah lalu lintas	Dokumen	Bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dengan memperhatikan 1. penggunaan ruang 2. kapasitas 3. tata guna lahan pinggir 4. perlengkapanjalan yang berkaitan langsung dengan 5. pengaturan lalu 6. kinerja lalu dan atau 7. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas	0	T	[2.15.02.1.05.0001] [2.15.02.3.05.0006] [2.15.02.4.05.0006] [2.15.02.2.06.0017]
134	2.15.000247	Data inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas	Dokumen	Bertujuan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas dari aspek kondisi jalan, perlengkapan jalan, dan budaya pengguna jalan, meliputi 1. volume lalu 2. komposisi lalu 3. variasi lalu 4. distribusi 5. pengaturan arus lalu 6. kecepatan dan tundaan lalu 7. kinerja perlengkapan jalan, 8. perkiraan volume lalu lintas yang akan datang	0	T	[2.15.02.1.05.0001] [2.15.02.3.05.0006] [2.15.02.4.05.0006] [2.15.02.2.06.0017]
135	2.15.000248	Data inventasisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang	Dokumen	Bertujuan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan angkutan orang dan barang meliputi 1. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau 2. bangkitan dan 3. pemilahan dan 4. pembebanan lalu lintas angkutan orang dan barang.	0	T	[2.15.02.1.05.0001] [2.15.02.3.05.0006] [2.15.02.4.05.0006] [2.15.02.2.06.0017]
136	2.15.000249	Data inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan	Dokumen	Bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung jalan untuk menampung lalu lintas kendaraan meliputi pengumpulan data-data yang terkait dengan jalan dan bagian-bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan dan orang, yaitu ruang manfaat jalan (Rumaja)dengan tinggi ruang bebas bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter dan kedalaman ruang bebas bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima)meter.	0	T	[2.15.02.1.05.0001] [2.15.02.3.05.0006] [2.15.02.4.05.0006] [2.15.02.2.06.0017]
137	2.15.000251	Data inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan	Dokumen	Bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung kendaraan untuk mengangkut orang dan barang meliputi 1. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau 2. bangkitan dan 3. pemilahan dan 4. kebutuhan kendaraan.	0	T	[2.15.02.1.05.0001] [2.15.02.3.05.0006] [2.15.02.4.05.0006] [2.15.02.2.06.0017]

138	2.15.000253	Data inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas	Dokumen	Bertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan meliputi 1. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan dan 2. analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur	0	T	[2.15.02.1.05.0001] [2.15.02.3.05.0006] [2.15.02.4.05.0006] [2.15.02.2.06.0017]
139	2.15.000254	Data Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan	Dokumen	Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), merupakan wilayah daratan dan / atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), terdiri atas: a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas b. kawasan kemungkinan bahaya c. kawasan di bawah permukaan d. kawasan di bawah permukaan horizontal- e. kawasan di bawah permukaan dan f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar	0	T	[2.15.04.3.01.0004] [2.15.04.4.01.0004] [2.15.04.3.05.0001] [2.15.04.4.05.0001] [2.15.04.3.02.0004] [2.15.04.4.02.0004]
140	2.15.000255	Trotoar	M2	Tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi daripada jalan tersebut, tempat orang berjalan kaki. Dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk memastikan hak pejalan kaki dalam berlalu lintas	0	T	[2.15.02.1.02.0001] [2.15.02.1.02.0003] [2.15.02.2.02.0001] [2.15.02.2.02.0003]
141	2.15.000256	Data penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan gerakan lalu lintas	Dokumen	yang berlaku pada setiap ruas jalan dan/ atau persimpangan, dilakukan melalui tahapan: 1. skema penanganan lalu 2. pemilihan alternatif dari skema penanganan lalu 3. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas. a. Skema Penanganan Lalu Lintas Skema penanganan lalu lintas merupakan strategi manajemen dan rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan pada ruas jalan, persimpangan, dan/ atau jaringan jalan. Strategi manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa: 1) penetapan prioritas angkutan 2) pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan 3) pemberian kemudahan bagi penyandang 4) pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu 5) pemaduan berbagai moda 6) pengendalian lalu lintas pada 7) pengendalian lalu lintas pada ruas dan! atau 8) perlindungan terhadap lingkungan. b. Pemilihan Alternatif Dari Skema Penanganan Lalu Lintas Pemilihan alternatif penanganan lalu lintas yang akan diterapkan pada ruas dan/ atau persimpangan harus memperhatikan: 1) dampak terhadap lingkungan ekonomi, sosial dan lingkungan 2) dampak terhadap	0	T	[2.15.02.1.05.0001] [2.15.02.3.05.0006] [2.15.02.4.05.0006] [2.15.02.2.06.0017]

142	2.15.000257	Data Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor	Dokumen	Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil: a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di b. dan/atau c. rekaman peralatan elektronik Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan berdasarkan tata acara pemeriksaan cepat, digolongkan menjadi: a. tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana dan b. tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertentu. (2) Tata acara pemeriksaan tindak pidana ringan atas pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tata acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Tilang.	0	T	[2.15.02.1.05.0004] [2.15.02.2.06.0004]
143	2.15.000258	Data Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Dokumen	Proses teknologi informasi, elektronika , dan telekomunikasi yang terintegrasi untuk mendukung perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengawasan layanan transportasi jalan yang efektif dan efisien	0	T	[2.15.02.1.05.0006] [2.15.02.3.16.0002] [2.15.02.4.16.0002] [2.15.02.2.16.0004] [2.15.02.3.17.0002] [2.15.02.4.17.0002] [2.15.02.2.06.0018]
144	2.15.000259	Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	Untuk mendapatkan persetujuan teknis Tim Evaluasi Penilai, dilakukan pembahasan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Pengembang atau Pembangun yang dituangkan dalam berita acara.	0	T	[2.15.02.1.06.0003] [2.15.02.2.07.0003]
145	2.15.000260	Persetujuan Teknis Hasil Andalalin	Dokumen	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, Tim Monitoring dan Evaluasi dapat melakukan tindakan korektif terhadap rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang dilakukan pada masa a. dan b. Operasional	0	T	[2.15.02.1.06.0004] [2.15.02.1.06.0006] [2.15.02.2.07.0006] [2.15.02.2.07.0008]
146	2.15.000261	SDM dibidang Analisis Dampak Lalu Lintas	Orang	Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas wajib memiliki kompetensi penilai Analisis Dampak Lalu Lintas dengan mampu dan memahami hal: a. sikap dan perilaku sebagai petugas/abdi negara yang profesional dengan dilandasi etika profesi dan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi b. peraturan perundang-undangan dalam proses kegiatan Analisis Dampak Lalu c. pelaksanaan Analisis Dampak Lalu d. teknik pengumpulan dan pengolahan data Analisis Dampak Lalu e. teknik pelaksanaan Analisis Dampak Lalu f. perencanaan dan pemodelan g. tata cara pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas kawasan bangkitan, tarikan dan pembangunan prasarana transportasi h. penilaian Analisis Dampak Lalu i. perancangan proses penilaian Analisis Dampak Lalu dan j. teknik penilaian rekomendasi hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.	0	T	[2.15.02.1.06.0005] [2.15.02.2.07.0005]
147	2.15.000262	Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting implementasi batas kecepatan	Dokumen	Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melakukan pengawasan meliputi: a. Penilaian terhadap pelaksanaan b. Tindakan korektif terhadap dan c. Tindakan penegakan hukum terhadap kesalahan prosedur penetapan.	0	T	[2.15.02.1.07.0006] [2.15.02.2.06.0007]

148	2.15.000263	Data kawasan yang akan dibangun atau diperbaiki sesuai dengan rekomendasi.	Dokumen	Merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dan penggunaan Janngan jalan serta penggunaan sarana dan prasarana angkutan sungai dan danau dari lokasi permukiman meriuju sekolah	0	T	[2.15.02.1.07.0007] [2.15.02.2.06.0008]
149	2.15.000264	Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting ZOSS	Dokumen	Evaluasi pengendalian dilakukan melalui: a. Menginventarisasi kondisi jalan yang terdapat ZoSS b. Membandingkan kondisi pengendalian lalu lintas di jalan pada ZoSS yang ada dengan standar teknis, baik geometrik jalan, maupun perlengkapan jalan c. Menganialisis tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan setelah dilakukan Pengendalian Lalu Lintas di Jalan pada dan d. Peninjauan kembali peraturan/standar teknis mengenai kondisi Pengendalian Lalu Lintas di Jalan pada ZoSS	0	T	[2.15.02.1.07.0008] [2.15.02.2.06.0010]
150	2.15.000265	Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting RASS	Dokumen	Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan pentahapan Perencanaan evaluasi yang dimulai sejak awal program RASS. Tahapan penentuan program adalah: 1) penetapan sasaran 2) pengumpulan data dasar dan pemahaman kondisi pejalan kaki dan pesepeda saat 3) penentuan aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan.	0	T	[2.15.02.1.07.0009] [2.15.02.2.06.0009]
151	2.15.000266	SDM dibidang Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang tersertifikasi	Orang	Semua personel Perusahaan Angkutan Umum yaitu awak kendaraan bermotor dan mekanik sudah mempunyai kompetensi yang sesuai dengan posisi mereka masing-masing dengan rincian paling sedikit: 1. Pengemudi ....orang. 2. Pengemudi cadangan .... orang. 3. Kondektur.... orang. 4. Pembantu pengemudi .... orang. 5. Mekanik....orang.	0	T	[2.15.02.1.07.0010] [2.15.02.2.06.0011]
152	2.15.000267	Lokasi pembangunan zona selamat sekolah (ZOSS)	Lokasi	Merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah. ZoSS dinyatakan dengan perlengkapan jalan terdiri atas: a. Rambu lalu lintas b. Marka Jalan c. Alat Pemberi Isyarat Lalu dan d. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan e. Alat Penerangan Jalan f. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan kaki berupa Trotoar dan penyandang cacat g. Rambu perintah berupa perintah memasuki jalur atau lajur yang ditunjuk h. Alat Pengandali dan Pengaman pengguna jalan berupa pulau lalu lintas atau pagar pengaman jalan i. Tempat pemberhentian bus dengan teluk& dan j. Marka jalan berupa paku jalan	0	T	[2.15.02.1.07.0011] [2.15.02.2.06.0013] [2.15.02.1.05.0008]
153	2.15.000268	Data Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan	Unit	Batas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendah harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas. Batas kecepatan ditetapkan : a. paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per Jam untuk jalan bebas b. paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk jalan c. paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasan dan d. paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan permukinan.	0	T	[2.15.02.1.07.0012] [2.15.02.2.06.0012]

154	2.15.000269	Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Dokumen	Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum berisikan: 1. Pendahuluan 2. Dasar 3. Tujuan dan sasaran 4. Profil perusahaan 5. Struktur sistem manajemen keselamatan 6. Elemen dan ekspektasi 6.1. Komitmen dan kebijakan 6.2. Pengorganisasian 6.3. Manajemen bahay dan resiko 6.4. Fasilitas perbaikan dan perbaikan kendaraan bermotor 6.5. Dokumentasi dan data 6.6. Peningkatan kompetensi dan pelatihan 6.7. Tanggap darurat 6.8. Pelaporan kecelakaan internal 6.9. Monitoring dan evaluasi 6.10. Pengukuran Kinerja LAMPIRAN	0	T	[2.15.02.1.07.0013] [2.15.02.2.06.0006]
155	2.15.000270	Halte	Unit	Tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang , umumnya dilengkapi dengan ruang tunggu yang beratap, tetapi lebih kecil daripada stasiun	0	T	[2.15.02.1.02.0001] [2.15.02.2.02.0001]
156	2.15.000271	Tempat Penyebrangan Pejalan Kaki	Unit	Lajur dengan tanda setrip putih pada jalan tempat pejalan kaki menyeberang jalan	0	T	[2.15.02.1.02.0001] [2.15.02.2.02.0001]
157	2.15.000272	Dokumen Pengawasan awak kendaraan bermotor umum	Dokumen	Dokumen pengawasan awak kendaraan bermotor umum meliputi: 1. pemeriksaan 2. pemeriksaan tanda pengenal dan 3. pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat aditif (napza); 4. pemeriksaan kondisi kesehatan dan dan 5. jam kerja	0	T	[2.15.02.1.03.0006] [2.15.02.6.04.0006] [2.15.02.2.03.0006]
158	2.15.000273	Laporan Pengawasan ketertiban terminal	Laporan	Dokumen pengawasan ketertiban terminal meliputi: 1. pemanfaatan fasilitas utama 2. pemanfaatan fasilitas penunjang 3. ketertiban dan kebersihan fasilitas dan 4. keamanan di dalam Terminal.	0	T	[2.15.02.1.03.0006] [2.15.02.6.04.0006] [2.15.02.2.03.0006]
159	2.15.000274	Alat Penerangan Jalan	Unit	Lampu penerangan jalan yang dipasang untuk menerangi jalanjalan umum, PJU dipasang agar masyarakat pengguna jalan dapat melakukan aktifitasnya dengan aman dan nyaman	2003	T	[2.15.02.1.02.0002] [2.15.02.2.02.0002]
160	2.15.000275	Data Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen	yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi meliputi: a. nama Kawasan Perkotaan b. cakupan atau batas wilayah Kawasan c. pembagian Kawasan Perkotaan aglomerasi dalam beberapa satuan Kawasan d. pembagian Kawasan Perkotaan aglomerasi dalam zona sebagai bangkitan dan tarikan perjalanan Kawasan Perkotaan e. pembagian zona dalam sub-Kawasan Perkotaan aglomerasi sebagai bangkitan dan tarikan f. penentuan pusat kawasan aglomerasi dan pusat sub-Kawasan Perkotaan g. penentuan asal dan/atau tujuan Trayek yang berupa simpul transportasi lain sebagai Trayekpemadu h. penentuan rute jaringan setiap Trayek Angkutan Perkotaan dan i. mekanisme koordinasi dalam penyusunan RencanaUmum Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan aglomerasi. Angkutan Antarkota dalam Provinsi harus memenuhi kriteria pelayanan sebagai berikut: a. mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jadwal b. pelayanan angkutan bersifat pelayanan cepat dan/atau pelayanan dan c. Terminal yang merupakan Terminal asal pemberangkatan,	0	T	[2.15.02.1.09.0001] [2.15.02.1.09.0002] [2.15.02.1.12.0001] [2.15.02.1.12.0002] [2.15.02.1.12.0003] [2.15.02.1.12.0004] [2.15.02.2.10.0001] [2.15.02.2.10.0002] [2.15.02.2.13.0001] [2.15.02.2.13.0002] [2.15.02.2.13.0003] [2.15.02.2.13.0004]
161	2.15.000276	Data Prasarana Jalan	Dokumen	Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum dilengkapi dengan prasarana jalan berupa: 1. trotoar 2. halte 3. tempat penyeberangan pejalan kaki 4. lajur sepeda 5. fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas dan usia lanjut (kelompok rentan)	0	T	[2.15.02.1.02.0003] [2.15.02.2.02.0003]

162	2.15.000277	Penetapan Tipe dan Kelas Terminal	Dokumen	Ditetapkan melalui kajian teknis terhadap intensitas kendaraan yang dilayani dengan mendasarkan pada kriteria a. Tingkat permintaan angkutan b. Keterpaduan pelayanan angkutan c. Jumlah trayek d. Jenis pelayanan angkutan e. Fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal	0	T	[2.15.02.1.03.0001] [2.15.02.6.04.0001] [2.15.02.2.03.0001]
163	2.15.000278	Dokumen Pemeriksaaan terhadap Administrasi Kendaraan	Dokumen	Pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan meliputi: 1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perj 2. dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan 3. kartu uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, dan 4. pemeriksaan manifes Penumpang terhadap jumlah	0	T	[2.15.02.1.03.0006] [2.15.02.6.04.0006] [2.15.02.2.03.0006]
164	2.15.000279	Data sarana perkeretaapian	Unit	Rencana kebutuhan sarana perkeretaapian provinsi terdiri atas: a. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian yang melayani angkutan antarkota pada perkeretaapian b. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian yang melayani angkutan perkotaan pada perkeretaapian provinsi dari dan ke simpul moda transportasi lain yang dilayani oleh perkeretaapian provinsi.	0	T	[2.15.05.1.01.0001] [2.15.05.1.01.0002] [2.15.04.3.08.0001] [2.15.05.4.09.0001] [2.15.05.2.01.0002] [2.15.05.2.01.0003] [2.15.05.2.03.0001] [2.15.05.2.03.0002] [2.15.05.3.06.0001] [2.15.05.4.06.0001]
165	2.15.000280	Laporan pengawasan penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum	Laporan	Dalam penerbitan izin operasi yang diberikan oleh Gubernur, perlu dipastikan dokumen persyaratan yang telah ditentukan sehingga perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan perkeretaapian umum	0	T	[2.15.05.1.05.0002] [2.15.05.2.05.0002]
166	2.15.000281	Data pelayanan angkutan orang	Laporan	a. Pelayanan angkutan kereta api dilaksanakan pada jaringan jalur kereta api dalam lintas pelayanan perkeretaapian yang membentuk jaringan pelayanan perkeretaapian. b. Pelayanan angkutan orang dengan kereta api dapat bersifat komersial atau bersifat penugasan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. c. Pelayanan angkutan kereta api yang bersifat komersil terdiri atas : - Angkutan pelayanan kelas non- dan - Angkutan pelayanan kelas ekonomi d. Pelayanan angkutan kereta api yang bersifat penugasan menggunakan angkutan pelayanan kelas ekonomi untuk melaksanakan: - kewajiban pelayanan atau - angkutan perintis perkeretaapian.	0	T	[2.15.05.1.06.0001] [2.15.05.2.06.0001]
167	2.15.000283	Data jumlah dan asal tujuan penumpang menuju bandara	Dokumen	a) data aksesibilitas dengan ibu kota propinsi dan/atau daerah lain yang mempunyai keterhubungan secara ekonomi yang meliputi: 1) pelayanan dan ketersediaan moda transportasi lainnya meliputi: (a) jenis dan jumlah moda transportasi dan (b) kapasitas tiap moda transportasi. 2) waktu tempuh dengan moda transportasi 3) kondisi kesinambungan pelayanan moda transportasi lainnya.	0	T	[2.15.04.3.01.0005] [2.15.04.4.01.0005] [2.15.04.3.02.0003] [2.15.04.4.02.0003]
168	2.15.000285	bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan	Dokumen	Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. (2) Kepemilikan dan/atau penguasaan lahan paling sedikit sesuai dengan kebutuhan lahan pada rencana tahap pembangunan	2	T	[2.15.04.3.02.0002] [2.15.04.4.02.0002] [2.15.04.3.03.0002] [2.15.04.3.03.0005] [2.15.04.4.02.0005] [2.15.04.4.03.0002] [2.15.04.3.03.0001] [2.15.04.4.03.0001]

169	2.15.000286	Data izin pembangunan	Dokumen	a. Izin pembangunan Perkeretaapian Khusus diterbitkan oleh: - Direktur Jenderal, untuk penyelenggaraan yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah provinsi dan/atau batas wilayah - Gubernur, untuk penyelenggaraan yang Jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapat persetujuan dari Direktur dan - Bupati/Walikota, untuk penyelenggaraan yang jaringan jalurnya dalam wilayah kabupaten/kota setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan persetujuan dari Direktur Jenderal. b. Permohonan izin pembangunan harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan: - Surat persetujuan prinsip - Rancang bangun yang dibuat berdasarkan - Gambar-gambar - Data - Jadwal - Spesifikasi - Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan - Metode - Izin mendirikan - Izin Jain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- - Rekomendasi dari bupati/walikota yang wiJayahnya akan dilintasi oleh jalur kereta dan - Melampirkan bukti pembebasan tanah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) persen dari total tanah yang dibutuhkan.	0	T	[2.15.05.1.07.0001] [2.15.05.2.07.0001]
170	2.15.000287	Data izin operasi	Dokumen	a. Izin operasi sebagaimana diterbitkan oleh: - Menteri, untuk pengoperasian yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah provinsi dan/atau batas wilayah - Gubernur, untuk pengoperasian yang jaringan jalurnya melintasi batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapat persetujuan dari dan - Bupati/walikota, untuk pengoperasian yang jaringan jalurnya dalam wilayah kabupaten/kota setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan persetujuan dari Menteri. b. Permohonan Izm operasi harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut: - Sertifikat uji kelaikan terhadap prasarana dan sarana yang akan - Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan - Sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan - Tersedianya petugas pengoperasian prasarana dan awak sarana perkeretaapian sesuai kebutuhan yang dilengkapi sertifikat - Tersedianya tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa prasarana dan sarana sesuai kebutuhan yang dilengkapi sertifikat keahlian.	0	T	[2.15.05.1.07.0001] [2.15.05.2.07.0001]
171	2.15.000288	Laporan pengawasan penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus	Laporan	Menurut Fungsinya Perkeretaapian terdiri dari perkeretaapian umum dan perkeretaapin khusus, perkeretaapian khusus hanya digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.	0	T	[2.15.05.1.07.0002] [2.15.05.2.07.0002]
172	2.15.000289	Terminal yang telah dilakukan revitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Unit	Fasilitas utama Terminal penumpang terdiri atas: a. jalur b. jalur c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau d. tempat naik turun e. tempat parkir f. fasilitas pengelolaan lingkungan g. perlengkapan h. media i. kantor penyelenggara dan J. loket penjualan tiket. Fasilitas penunjang pada terminal penumpang dapat berupa: a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau b. pos c. fasilitas d. fasilitas e. pos f. alat pemadam dan g. fasilitas umum.	0	T	[2.15.02.1.03.0007] [2.15.02.2.03.0007]

173	2.15.000290	Data jumlah barang	Unit	Jumlah barang adalah banyaknya barang yang diantar dari atau ke stasiun dengan menggunakan jasa kereta api dan pengguna jasa tersebut memiliki tanda bukti perjanjian pengangkutan barang berupa surat angkutan barang.	0	T	[2.15.05.1.04.0001] [2.15.05.2.04.0001]
174	2.15.000291	Data jumlah penumpang	Orang	Jumlah penumpang adalah banyaknya orang yang naik atau turun dari kereta api sebagai pengguna jasa kereta api dan memiliki karcis sebagai tanda bukti perjanjian angkutan orang.	0	T	[2.15.05.1.04.0001] [2.15.05.2.04.0001]
175	2.15.000292	Data jumlah jalur	Jalur	Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rei yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukan bagi lalu lintas kereta api.	0	T	[2.15.05.1.04.0001] [2.15.05.2.04.0001]
176	2.15.000294	Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Manual	Unit	Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Manual, paling sedikit memuat : 1. trayek dan 2. jadwal kedatangan dan 3. 4. dan 5. asal dan tujuan pelayanan trayek.	0	T	[2.15.02.1.03.0008] [2.15.02.6.04.0007] [2.15.02.2.03.0008]
177	2.15.000295	Jumlah kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang	Kejadian	Data kejadian kecelakaan kereta api tunggal dan interaksi dengan kendaraan lain	0	T	[2.15.05.1.01.0003] [2.15.05.1.01.0001] [2.15.05.1.01.0002] [2.15.05.1.03.0001] [2.15.05.1.03.0002] [2.15.05.2.01.0001] [2.15.05.2.01.0002] [2.15.05.2.01.0003] [2.15.05.2.03.0001] [2.15.05.2.03.0002]
178	2.15.000296	dokumen penetapan lokasi Bandar Udara	Dokumen	Dokumen penetapan lokasi Bandar Udara ditetapkan oleh Menteri	0	T	[2.15.04.3.02.0002] [2.15.04.4.02.0002] [2.15.04.3.03.0002] [2.15.04.4.03.0002] [2.15.04.3.03.0005] [2.15.04.4.02.0005]
179	2.15.000297	Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Digital	Unit	Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Digital melalui Digitalisasi Penumpang Terminal Online yang memuat: a. Sistem Perangkat Lunak (Software) b. Sistem Perangkat Keras (Hardware) c. Sistem Perangkat Pikir (Brainware)	0	T	[2.15.02.1.03.0008] [2.15.02.6.04.0007] [2.15.02.2.03.0008]
180	2.15.000298	dokumen rancangan teknik terinci (detail engineering design) fasilitas Bandar Udara	Dokumen	Dokumen rancangan teknik terinci (detail engineering design) fasilitas Bandar Udara dapat disusun seluruh atau sebagian fasilitas Bandar Udara sesuai pentahapan pembangunan dengan berpedoman pada Rencana Induk Bandar Udara Dokumen rancangan teknik terinci (detail engineering design), disusun dengan memperhatikan: a. standar teknis dan standar kebutuhan fasilitas Bandar b. standar pelayanan pengguna jasa bandar dan c. Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 mengenai Aerodrome Dokumen rancangan teknik terinci (detail engineering design) fasilitas Bandar Udara, paling sedikit memuat: a. data hasil pengujian, pengukuran, survei dan/atau pengumpulan data b. laporan kajian teknis yang meliputi analisa dan perhitungan teknis fasilitas Bandar Udara sesuai ruang lingkup c. gambar situasi, denah, tampak, potongan dan gambar kerja detail perancangan arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal yang memuat informasi meliputi nama fasilitas, jumlah, ukuran, elevasi, jarak dan d. spesifikasi teknis dan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS); dan e. rencana anggaran biaya	0	T	[2.15.04.3.02.0002] [2.15.04.4.02.0002] [2.15.04.3.03.0002] [2.15.04.3.03.0005] [2.15.04.4.02.0005] [2.15.04.4.03.0002]

181	2.15.000300	Komponen Perhitungaan Tarif Kelas Ekonomi	Dokumen	Komponen Perhitungan Tarif meliputi: - Biaya Langsung - Biaya Tidak Langsung - Total Biaya Per Penumpang untuk Load Factor sama dengan 100% - Total Biaya Per Penumpang untuk Load Factor sama dengan 70% Besaran tarif dasar sebagai berikut: 1.Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) dengan Tarif sebesar Rp.159 (seratus lima puluh sembilan rupiah) per penumpang 2. Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, dan pulau lainnya) dengan tarif sebesar Rp. 176 (seratus tujuh puluh enam rupiah) per penumpang Kilometer besaran Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah sebagai berikut: a. Tarif Batas Atas: 1.Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) dengan Tarif sebesar Rp.155 (seratus lima puluh lima rupiah) per penumpang 2. Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, dan pulau lainnya) dengan tarif sebesar Rp. 172 (seratus tujuh puluh dua rupiah) per penumpang Kilometer. b. Tarif Batas Bawah: 1. Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara) dengan tarif sebesar Rp. 95 (sembilan puluh lima rupiah); 2. Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau lainnya) dengan tarif sebesar 106 (seratus enam rupiah).	0	T	[2.15.02.1.15.0001] [2.15.02.1.15.0002] [2.15.02.1.15.0003] [2.15.02.2.16.0001] [2.15.02.2.16.0002] [2.15.02.2.16.0003]
182	2.15.000301	persetujuan lingkungan	Dokumen	Persetujuan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	0	T	[2.15.04.3.02.0002] [2.15.04.4.02.0002] [2.15.04.3.03.0002] [2.15.04.3.03.0005] [2.15.04.4.02.0005] [2.15.04.4.03.0002]
183	2.15.000302	Data Infrastruktur Penunjang	Unit	fasilitas penunjang merupakan fasilitas yang secara langsung dan tidak langsung menunjang kegiatan Bandar Udara dan memberikan nilai tambah secara ekonomis pada penyelenggaraan Bandar Udara, antara lain fasilitas perbengkelan Pesawat Udara, fasilitas pergudangan, penginapan/hotel, toko, restoran, dan lapangan	0	T	[2.15.04.4.02.0003] [2.15.04.3.02.0003] [2.15.04.4.03.0003] [2.15.04.3.03.0003]
184	2.15.000304	Jumlah kejadian kecelakaan diperlintasan	Kejadian	Data kejadian kecelakaan kereta api tunggal dan interaksi dengan kendaraan lain	0	T	[2.15.05.1.01.0001] [2.15.05.1.01.0002] [2.15.05.1.01.0003] [2.15.05.1.03.0001] [2.15.05.1.03.0002] [2.15.05.2.01.0001] [2.15.05.2.01.0002] [2.15.05.2.01.0003] [2.15.05.2.03.0001] [2.15.05.2.03.0002]
185	2.15.000305	Grosse akta kapal	Dokumen	Grosse Akta Kapal adalah salinan resmi dari minut akta	0	T	[2.15.03.1.01.0001] [2.15.03.2.01.0001]
186	2.15.000306	Peta Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola pada setiap Terminal	Orang	Pengoperasian Terminal dikoordinasikan oleh koordinator satuan pelayanan Terminal yang dibantu oleh petugas terminal yang meliputi: a. kepala urusan layanan tata b. kepala urusan sistem c. petugas d. petugas pencatat kedatangan, keberangkatan, dan faktor e. pengatur lalu f. Penyidik Pegawai Negeri g. penguji kendaraan dan h. petugas komersial.	0	T	[2.15.02.1.03.0009] [2.15.02.6.04.0009] [2.15.02.2.03.0010]
187	2.15.000307	Surat ukur kapal yang masih berlaku	Dokumen	Surat Ukur adalah Surat Kapal yang memuat ukuran dan Tonase Kapal berdasarkan hasil pengukuran	0	T	[2.15.03.1.01.0001] [2.15.03.2.01.0001]
188	2.15.000308	Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku	Dokumen	Sertifikat Keselamatan Kapal adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk kapal yang telah memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio, dan elektronika kapal berdasarkan hasil pengujian	0	T	[2.15.03.1.01.0001] [2.15.03.2.01.0001]

189	2.15.000309	Peta Kompetensi Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua	Orang	Pengoperasian Urusan Perhubungan oleh Orang Asli Papua terkait layanan dan kegiatan pada matra: 1. LLAJ a. SDM di bidang Lalu Lintas Jalan b. SDM di bidang Angkutan Jalan c. SDM di bidang Sarana Transportasi Jalan d. SDM di bidang Prasarana Transportasi Jalan e. SDM di bidang Sungai, Danau dan Penyeberangan 2. Pelayaran a. SDM bidang Angkutan b. Sumber Daya Manusia di Bidang c. SDM di Bidang Keselamatan dan Keamanan dan d. SDM di bidang Perlindungan Lingkungan Maritim 3. Penerbangan a. SDM di bidang Angkutan Udara b. SDM di bidang Bandar Udara c. SDM di bidang Keamanan Penerbangan 4. Perkeretaapian a. SDM di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Keretaapi b. SDM di bidang Prasaran Perkeretaapian c. SDM di bidang Sarana Perkeretaapian d. SDM di bidang Keselamatan Perkeretaapian	0	T	[2.15.02.3.17.0001] [2.15.02.4.17.0001] [2.15.03.3.17.0001] [2.15.03.4.17.0001] [2.15.04.3.04.0001] [2.15.04.3.10.0001] [2.15.04.4.04.0001] [2.15.05.4.10.0001] [2.15.02.3.18.0001] [2.15.02.4.18.0001] [2.15.03.3.20.0001] [2.15.03.4.20.0001] [2.15.05.3.07.0001] [2.15.05.4.07.0001]
190	2.15.000310	Data awak kapal	Dokumen	Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal oleh pemilik atau operator Kapal untuk melakukan tugas di atas Kapal sesuai dengan jabatannya sesuai PM 12 Tahun 2021	0	T	[2.15.03.1.01.0001] [2.15.03.2.01.0001]
191	2.15.000311	Data Komponen substantif	Dokumen	Komponen substantif merupakan data dan informasi yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas pokok Kantor Unit PenyelenggaraBandar Udara sebagai berikut: a. jasa angkutan udara dan pelayanan pesawat b. kapasitas pelayanan bandar c. rute d. koordinasi pelayanan operasional bandar dan e. personel penerbangan di bandar udara.	0	T	[2.15.04.3.05.0001] [2.15.04.4.05.0001] [2.15.04.3.04.0001] [2.15.04.4.04.0001]
192	2.15.000312	Laporan koordinasi pengawasan Angkutan Laut yang telah terdaftar dalam perizinan	Laporan	Laporan koordinasi pengawasan angkutan laut berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan cq Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang melaksanakan pengawasan perizinan berusaha.	0	T	[2.15.03.1.01.0002] [2.15.03.2.01.0002]
193	2.15.000313	Jumlah perlintasan sebidang	Lokasi	Data perlintasan keretaapi yang berpotongan dengan jalan raya	0	T	[2.15.05.1.01.0001] [2.15.05.1.01.0002] [2.15.05.1.01.0003] [2.15.05.1.03.0001] [2.15.05.1.03.0002] [2.15.05.2.01.0001] [2.15.05.2.01.0002] [2.15.05.2.01.0003] [2.15.05.2.03.0001] [2.15.05.2.03.0002]
194	2.15.000314	Kapal Layar motor tradisional berbendera indonesia berukuran paling besar GT 500	Unit	Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.	0	T	[2.15.03.1.01.0001] [2.15.03.1.02.0001] [2.15.03.2.01.0001] [2.15.03.2.02.0001]
195	2.15.000315	Kapal motor berbendera Indoensia berukuran paling kecil GT 7	Unit	Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.	0	T	[2.15.03.1.02.0001] [2.15.03.2.02.0001]
196	2.15.000316	Peraturan Bupati/Walikota mengenai Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	Dokumen	RAK LLAJ Kabupaten/Kota memuat: a. sasaran Pemerintah Kabupaten/ b. arah kebijakan strategis berdasarkan RUNK LLAJ, RAK LLAJ Kementerian/Lembaga, dan RAK LLAJ c. kebutuhan regulasi daerah dan tatanan kelembagaan Pemerintah Kabupaten/ d. rencana aksi dan target kine{ dan e. rencana pendanaan. RAK LLAJ Kabupaten/Kota disusun berdasarkan: a. RUNK b. RAK LLAJ Kementerian/ c. RAK LLAJ dan d. Rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten/Kota.	0	T	[2.15.02.2.01.0004] [2.15.02.2.01.0006]

197	2.15.000320	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	Data kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar	0	T	[2.15.02.2.05.0003]
198	2.15.000321	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	Bukti lulus uji tipe paling sedikit a. Keputusan Direktur b. c. Hasil dan d. Foto kendaraan bermotor	0	T	[2.15.02.2.05.0004]
199	2.15.000322	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	Jumlah Standar Operasional Prosedur yang telah disahkan oleh Kepala Dinas sesuai Syarat Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	0	T	[2.15.02.2.05.0005]
200	2.15.000323	Laporan koordinasi pengawasan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat yang telah terdaftar dalam perizinan	Laporan	Laporan koordinasi pengawasan adalah laporan hasil pengawasan perizinan berusaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya, Pemda membentuk dan/atau menunjuk tim pengawas untuk melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha melalui mekanisme Pengawasan sesuai ppu	0	T	[2.15.03.1.02.0002] [2.15.03.2.02.0002]
201	2.15.000324	Data kapal sungai dan danau yang memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani	Unit	Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh pengusaha angkutan sungai dan danau	0	T	[2.15.03.1.03.0001] [2.15.03.2.03.0001]
202	2.15.000325	Dokumen sertifikasi pengawakan	Dokumen	Sertifikat Pengawakan (Safe Manning Certificate) adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional yang menerangkan jumlah awak kapal yang diwajibkan dan sertifikat keahlian. Masa berlaku adalah 1 tahun.	0	T	[2.15.03.1.03.0001] [2.15.03.2.03.0001] [2.15.03.2.05.0001]
203	2.15.000326	Sumber Daya Manusia di bidang Pelayaran	Orang	Sumber Daya Manusia di Bidang Pelayaran meliputi : SDM bidang Angkutan Sumber Daya Manusia di Bidang SDM di Bidang Keselamatan dan Keamanan dan SDM di bidang Perlindungan Lingkungan Maritim	0	T	[2.15.03.1.09.0003] [2.15.03.1.09.0004] [2.15.03.1.10.0006] [2.15.03.1.10.0007] [2.15.03.1.10.0008] [2.15.03.3.17.0001] [2.15.03.4.17.0001] [2.15.03.2.13.0008] [2.15.03.2.13.0009] [2.15.03.3.20.0001] [2.15.03.4.20.0001]
204	2.15.000327	Dokumen persetujuan atau Perizinan Berusaha	Dokumen	Pengoperasian Pelabuhan dilakukan setelah mendapat persetujuan atau Perizinan Berusaha. Pengoperasian Pelabuhan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan wajib memperoleh Perizinan Berusaha dari gubernur untuk Pelabuhan Pengumpan regional	0	T	[2.15.03.1.09.0001] [2.15.03.1.09.0003] [2.15.03.1.11.0001] [2.15.03.1.11.0002] [2.15.03.1.12.0001] [2.15.03.1.12.0002] [2.15.03.1.13.0001] [2.15.03.1.13.0002] [2.15.03.2.12.0001] [2.15.03.2.12.0003] [2.15.03.2.13.0001] [2.15.03.2.13.0010] [2.15.03.2.14.0001] [2.15.03.2.15.0001] [2.15.03.2.15.0002] [2.15.03.2.16.0001] [2.15.03.2.16.0002] [2.15.03.2.14.0002] [3.26.02.2.04.0020]
205	2.15.000328	Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi yang diberikan oleh Menteri	Dokumen	Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.	0	T	[2.15.03.1.14.0002] [2.15.03.1.15.0002] [2.15.03.2.17.0002] [2.15.03.2.18.0002]
206	2.15.000329	Dokumen Persetujuan Pekerjaan Reklamasi	Dokumen	Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu. Reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/ atau kontur kedalaman perairan.	0	T	[2.15.03.1.14.0002] [2.15.03.1.15.0002] [2.15.03.2.17.0002] [2.15.03.2.18.0002]
207	2.15.000330	Dokumen Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi	Dokumen	Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu. Reklamasi adalah pekerjaan timbunan di perairan atau pesisir yang mengubah garis pantai dan/ atau kontur kedalaman perairan.	0	T	[2.15.03.1.14.0002] [2.15.03.1.15.0002] [2.15.03.2.17.0002] [2.15.03.2.18.0002]

208	2.15.000332	Data jumlah dan lokasi Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)	Dokumen	Terminal Untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKR/DLKP) yang merupakan bagian dari Pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Perizinan Berusaha dari Gubernur, bagi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang berlokasi di dalam DLKr dan DLKp Pelabuhan pengumpan regional Perizinan Berusaha pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.	0	T	[2.15.03.1.16.0001] [2.15.03.2.19.0001]
209	2.15.000333	Perizinan Berusaha pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri	Dokumen	Perizinan Berusaha pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri terdiri dari: 1. Perizinan Berusaha pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 2. Perizinan Berusaha pengoperasian Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Perizinan Berusaha Pembangunan adalah legalitas yang diberikan oleh Gubernur kepada Pelaku Usaha untuk memulai pembangunan TUKS. Perizinan Berusaha Pengoperasian adalah legalitas yang diberikan oleh Gubernur kepada Pelaku Usaha untuk mengoperasikan TUKS.	0	T	[2.15.03.1.16.0002] [2.15.03.2.19.0002]
210	2.15.000342	Data Standar Pelayanan Minimal Kapal Sungai dan Danau	Dokumen	Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sungai dan Danau, yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan Minimal adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh perseorangan atau perusahaan Angkutan Sungai dan Danau dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa.	0	T	[2.15.03.1.03.0001] [2.15.03.2.03.0001]
211	2.15.000343	Memiliki personil dengan keahlian di bidang Angkutan Sungai dan Danau	Orang	Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal oleh pemilik atau operator Kapal untuk melakukan tugas di atas Kapal sesuai dengan jabatannya	0	T	[2.15.03.1.03.0001] [2.15.03.2.03.0001]
212	2.15.000346	Unit penyelenggara pelabuhan sungai dan danau	Unit	Penyelenggara Pelabuhan adalah UPTD untuk pelabuhan sungai dan danau yan gbelum diusahakan secara komersial dan diselenggarakan oleh Pemda. UPTD bertanggungjawab melaksanakan pengusulan dan pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai dan danau	0	T	[2.15.03.3.10.0006] [2.15.03.4.10.0007] [2.15.03.1.10.0008] [2.15.03.2.09.0003]
213	2.15.000347	BAST P3D Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen	Penyelenggaraan pelabuhan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah pada Pelabuhan Pelabuhan Pengumpan lokal dilaksanakan setelah dilakukan penyerahan personel, pendanaan, sarana dan prasarana Pelabuhan, serta dokumen administrasi penyelenggaraan Pelabuhan.	0	T	[2.15.03.2.12.0001] [2.15.03.2.12.0003] [2.15.03.2.12.0004] [2.15.03.2.12.0005] [2.15.03.2.13.0001] [2.15.03.2.15.0001]
214	2.15.000348	Laporan koordinasi pengawasan Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek yang terdaftar dalam perizinan	Laporan	Laporan pengawasan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.	0	T	[2.15.03.1.03.0002] [2.15.03.2.03.0002] [2.15.03.2.04.0002]
215	2.15.000349	Data Fasilitas Pelabuhan	Dokumen	Fasilitas Pelabuhan terdiri Fasilitas Pokok, Penunjang dan Fasilitas Pelabuhan lainnya	0	T	[2.15.03.1.09.0005] [2.15.03.1.10.0009] [2.15.03.2.15.0003] [2.15.03.2.13.0011] [2.15.03.2.12.0005]
216	2.15.000350	Pelabuhan Sungai dan Danau	Unit	Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang	0	T	[2.15.03.1.10.0002] [2.15.03.2.13.0002] [2.15.03.2.04.0001]

217	2.15.000351	Perjanjian konsesi pengusahaan	Dokumen	Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.	0	T	[2.15.03.1.09.0002] [2.15.03.2.13.0002] [2.15.03.2.12.0002]
218	2.15.000353	Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Sungai dan Danau	Dokumen	Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.	0	T	[2.15.03.1.10.0009] [2.15.03.2.13.0002]
219	2.15.000354	Unit Penyelengggara Pelabuhan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen	Unit Penyelenggaran Pelabuhan melaksanakan Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan	0	T	[2.15.03.2.12.0004]
220	2.15.000355	Data Pelabuhan Pengumpan Lokal	Unit	Pelabuhan Pengumpan adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/ atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provmsi.	0	T	[2.15.03.2.12.0002] [2.15.03.2.17.0001] [2.15.03.2.18.0001]
221	2.15.000356	Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau dan Penyeberangan	Dokumen	Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.	0	T	[2.15.03.1.10.0009] [2.15.03.1.10.0001] [2.15.03.2.13.0011] [2.15.03.2.04.0001] [2.15.03.2.11.0002] [2.15.03.2.11.0003]
222	2.15.000357	Unit Penyelengggara Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	Unit Penyelenggaran Pelabuhan melaksanakan Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan	0	T	[2.15.03.2.13.0003] [2.15.03.2.13.0010]
223	2.15.000358	Unit Penyelengggara Pelabuhan Penyeberangan	Unit	Penyelenggara Pelabuhan adalah UPTD untuk pelabuhan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial dan diselenggarakan oleh Pemda. UPTD bertanggungjawab melaksanakan pengusulan dan pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai dan danau	0	T	[2.15.03.1.07.0003] [2.15.03.2.13.0010] [2.15.03.3.12.0006] [2.15.03.4.12.0006]
224	2.15.000359	BAST P3D Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	Penyelenggaraan pelabuhan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah pada Sungai dan Danau dilaksanakan setelah dilakukan penyerahan personel, pendanaan, sarana dan prasarana Pelabuhan, serta dokumen administrasi penyelenggaraan Pelabuhan.	0	T	[2.15.03.2.13.0003] [2.15.03.2.04.0001]
225	2.15.000363	Regulasi Tarif Angkutan Penyeberangan	Regulasi	penetapan tarif angkutan perairan Pelabuhan yang terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan barang.	1	T	[2.15.03.3.10.0006] [2.15.03.4.10.0007] [2.15.03.1.07.0001] [2.15.03.1.07.0002] [2.15.03.3.12.0006] [2.15.03.4.12.0006] [2.15.03.2.09.0001] [2.15.03.2.09.0002]

226	2.15.000365	Data Komponen penunjang	Dokumen	Komponen penunjang merupakan data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas administasi dan/atau pendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok sebagai berikut: a. Sumber daya manusia b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); c. Anggaran Belanja d. Asset/Barang Milik Negara (BMN); dan e. Hirarki Bandar Udara.	0	T	[2.15.04.3.05.0001] [2.15.04.4.05.0001] [2.15.04.3.04.0001] [2.15.04.4.04.0001]
227	2.15.000373	Izin Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	Pengopersian pelabuhan oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya izin	0	T	[2.15.03.1.10.0003] [2.15.03.2.13.0010]
228	2.15.000376	SK penetapan trayek Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	Trayek Angkutan Sungai dan Danau adalah lintasan untuk pelayanan jasa Angkutan Sungai dan Danau yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap, maupun tidak berjadwal yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. Surat keputusan penetapan trayek/lintas merupakan salah satu syarat adminitrasi permohonan pembangunan pelabuhan	0	T	[2.15.03.1.10.0001] [2.15.03.2.13.0006]
229	2.15.000380	Data daerah lingkungan kepentingan	Dokumen	Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Bandar Udara merupakan daerah diluar lingkungan kerja bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo.	0	T	[2.15.04.3.02.0004] [2.15.04.3.05.0001] [2.15.04.4.05.0001]
230	2.15.000381	tahapan pelaksanaan pembangunan	Dokumen	Tahapan pelaksanaan pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan (demand) pelayanan penumpang dan kargo dengan kajian analisis terhadap: a. rencana tata guna lahan hingga desain b. kebutuhan fasilitas bandar udara dengan skala prioritas yang mempertimbangkan faktor kebutuhan dan ketersediaan c. rencana tata letak fasilitas bandar dan d. rencana pengembangan fasilitas bandar udara tiaptiap tahapan pembangunan hingga tahap akhir (ultimate phase).	0	T	[2.15.04.3.02.0004] [2.15.04.4.02.0004] [2.15.04.3.03.0004] [2.15.04.3.05.0001] [2.15.04.4.03.0004] [2.15.04.4.05.0001]
231	2.15.000383	prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo	Dokumen	1. Prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo merupakan peramalan jumlah pergerakan pesawat udara, penumpang dan kargo (demand). 2. Prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo dilakukan berdasarkan pada hasil survei permintaan jasa angkutan udara serta analisa pergerakan dan kebutuhan pengguna jasa angkutan udara dengan memperhatikan: a. potensi penumpang dan kargo tahunan/jam sibuk dengan kajian asal/tujuan penumpang dan kargo (Origin Destination), kemampuan membayar (Ability to Pay/ ATPJ serta kemauan membayar (Willingness to Pay/ b. potensi jaringan/rute penerbangan dengan kajian asal dan tujuan penumpang dan kargo (Origin/Destination); dan c. potensi ketersediaan armada atau pesawat dengan kajian kapasitas penumpang, jarak tempuh pesawat, umur pesawat dan perkembangan teknologi (jenis/tipe).	0	T	[2.15.04.3.05.0001] [2.15.04.4.05.0001]

232	2.15.000386	kebutuhan fasilitas	Unit	perhitungan dan kajian kebutuhan fasilitas pokok dan penunjang bandar udara berdasarkan prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo Fasilitas pokok bandar udara terdiri dari: a. fasilitas keselamatan dan keamanan antara lain: 1) Pertolongan Kecelakaan Penerbangan -Pemadam Kebakaran (PKPPK); 2) 3) alat bantu navigasi 4) alat bantu pendaratan visual (Airfield Lighting System); 5) catu daya dan 6) pagar. b. fasilitas sisi udara (airside facility) antara lain: 1) landas pacu (runway); 2) runway strip, Runway End Safety Area (RESA), stopway, 3) landas hubung (taxiway); 4) landas parkir (apron); 5) marka dan dan 6) taman meteD (fasilitas dan peralatan pengamatan cuaca). c. fasilitas sisi darat (landside facility) antara lain: 1) bangunan terminal 2) bangunan terminal 3) menara pengatur lalu lintas penerbangan(control towery); 4) bangunan operasional 5) jalan masuk (access road); 6) parkir kendaraan 7) depo pengisian bahan bakar pesawat 8) bangunan 9) bangunan administrasi 10) marka dan dan 11) fasilitas pengolahan limbah. 3. Fasilitas penunjang bandar udara merupakan fasilitas yang secara langsung	0	T	[2.15.04.3.05.0001] [2.15.04.4.05.0001] [2.15.04.3.03.0006] [2.15.04.4.02.0006]
233	2.15.000387	tata letak fasilitas	Dokumen	Tata letak fasilitas direncanakan sesuai dengan kebutuhan fasilitas berdasarkan pada standar teknis dan kondisi lahan, setelah melakukan kajian analisa berupa : a. tapak (site), topografi, penyelidikan tanah (soil investigation) ; b. drainase bandar c. konfigurasi fasilitas pokok bandar udara: runway, runway strip, apron, taxiway, terminal area dan jalan masuk menuju bandar udara sesuai dengan hasil perhitungan dan kajian kebutuhan fasilitas d. arah angin (wind rose) e. objek-objek obstacle di sekitar bandar f. kondisi g. pengembangan pada areal di sekitar bandar h. ketersediaan lahan dan i. aksesibilitas dengan moda angkutan lain.	0	T	[2.15.04.3.05.0001] [2.15.04.4.05.0001]
234	2.15.000388	Data laporan Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan	Laporan	Penetapan tarif angkutan perairan Pelabuhan yang terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan barang.	1	T	[2.15.03.2.09.0003]
235	2.15.000390	Laporan pemeliharaan dermaga sungai dan danau	Laporan	Laporan pemeliharaan dermaga sungai dan danau sebggai pelaksanaan pemeliharaan penahan gelombang, kolam Pelabuhan, alur pelayaran, dan jaringan jalan	0	T	[2.15.03.2.13.0007]
236	2.15.000391	Peta lokasi dan titik koordinat geografi dermaga sungai dan danau	Dokumen	Rencana lokasi Pelabuhan Sungai dan Danau berpedoman pada Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Rencana lokasi Pelabuhan Sungai dan Danau harus sesuai dengan: a. rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota b. potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah c. potensi sumber daya alam d. perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional.	0	T	[2.15.03.2.13.0006]

237	2.15.000393	Laporan Hasil Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Laporan	Pelaksanaan dan pengendalian RAK LLAJ Jalan dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap: 1. Pemenuhan persyaratan laik fungsi 2. Pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan 3. Pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan 4. Penegakan hukum ketentuan persyaratan keselamatan berlalu dan 5. Penanganan korban kecelakaan.	0	T	[2.15.02.1.01.0006] [2.15.02.2.01.0006]
238	2.15.000394	Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Dokumen	RUNK LLAJ memuat: a. visi dan b. c. d. dan e. Program Nasional KLLAJ. Dan penyusunan memperhatikan: a. rencana pembangunan jangka panjang b. rencana pembangunan jangka menengah c. perkembangan lingkungan strategis KLLAJ dalam 10 (sepuluh) tahun dan d. tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Deuelopment Goals/ SDG&s).	0	T	[2.15.02.1.01.0005] [2.15.02.2.01.0005]
239	2.15.000395	Laporan Hasil Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ	Laporan	Rencana Induk Jaringan LLAJ berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun	0	T	[2.15.02.1.01.0007] [2.15.02.2.01.0007]
240	2.15.000397	Koordinasi dalam memenuhi ketentuan wajib pembangunan bandara	Dokumen	Koordinasi dengan stakeholder terkait dalam memenuhi kewajiban ketentuan pembangunan bandara Dalam Pembangunan Bandar Udara Umumdan Bandar Udara Khusus, Pemrakarsa/Penyelenggara Bandar Udara wajib memenuhi ketentuan: a. melaksanakan pekerjaan pembangunan Bandar Udara sesuai dengan Rencana Induk Bandar b. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan Bandar Udara yang c. mentaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan keamanan penerbangan serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan d. memberikan akses terhadap pelaksanaan pengawasan dalam pembangunan Bandar e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Bandar Udara secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri, gubernur, dan/atau bupati/Walikota sesuai dengan dan f. melaporkan hasil pembangunan Bandar Udara kepada Menteri setelah selesainya pembangunan Bandar Udara	0	T	[2.15.04.3.02.0004] [2.15.04.4.02.0004] [2.15.04.3.03.0004] [2.15.04.4.03.0004]
241	2.15.000398	Rencana Tata Ruang Wialayah	Dokumen	Rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota merupakan strategi dan kebijakan pemanfaatan ruang untuk kepentingan nasional, keterkaitan antarpulau dan antarprovinsi, serta keterkaitan antarkawasan kabupaten / kota.	0	T	[2.15.04.3.03.0002] [2.15.04.4.03.0002] [2.15.04.3.05.0002] [2.15.04.4.05.0002]
242	2.15.000399	Pengawasan kesesuaian pelaksanaan dokumen perencanaan	Laporan	Dalam rangka memastikan kepatuhan Pemrakarsa/Penyelenggara Bandar Udara dalam pembangunan bandar udara yang memenuhi persyaratan Keselamatan Penerbangan dan Keamanan Penerbangan serta pelayanan jasa kebandarudaraan dilaksanakan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan Pengawasan dilakukan dalam bentuk: a. b. c. pengamatan (Surveillance); d. pemantauan (Monitoring); dan/atau e. pengujian (test).	0	T	[2.15.04.3.03.0004] [2.15.04.4.03.0004] [2.15.04.3.05.0004] [2.15.04.4.05.0004]

243	2.15.000400	Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	Dokumen	Koordinasi dilakukan oleh penyelenggara jasa kebandarudaraan dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan pelayanan jasa kebandarudaraan Pelayanan jasa Kebandarudaran meliputi pelayanan jasa Pesawat Udara, penumpang, barang, dan pos yang terdiri atas penyediaan dan/atau pengembangan: a. fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir, dan penyimpanan pesawat b. fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo, dan c. fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah dan d. lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.	0	T	[2.15.04.3.05.0002] [2.15.04.4.05.0002] [2.15.04.3.04.0002] [2.15.04.4.04.0002]
244	2.15.000402	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian	Laporan	Dalam rekomendasi yang diberikan oleh gubernur terkait penyediaan infrastruktur perkeretaapian, perlu dipastikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan infrastruktur perkeretaapian	0	T	[2.15.04.3.08.0002] [2.15.05.4.09.0002] [2.15.05.3.06.0002] [2.15.05.4.06.0002]
245	2.15.000403	Data Laporan hasil pengawasan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Kab/Kota	Laporan	Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan umum dalam Trayek meliputi: a. dokumen b. dokumen Angkutan c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan Angkutan d. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang e. tanda identitas perusahaan Angkutan dan f. tanda identitas awak kendaraan Angkutan umum. dan Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan meliputi: a. tanda bukti lulus uji berkala kendaraan b. fisik Kendaraan dan c. Standar Pelayanan Minimal.	0	T	[2.15.02.2.11.0003]
246	2.15.000404	Pemeliharaan Fasilitas	Unit	Mempertahankan keandalan dan fungsi fasilitas Bandara Udara wajib dilakukan pemeliharaan dengan menggunakan peralatan pemeliharaan Penyelenggara bandara wajib mempertahankan kesiapan Fasilitas Bandar Udara, dalam bentuk: 1) melakukan pemeliharaan dalam jangka waktu tertentu dengan cara pengecekan, tes, verifikasi, dan/atau dan 2) melakukan pelatihan penanggulangan keadaan darurat secara berkala.	0	T	[2.15.04.3.03.0006] [2.15.04.4.02.0006]
247	2.15.000405	Rencana Pengadaan Tanah	Dokumen	Rencana Pengadaan Tanah disusun dalam bentuk dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, paling sedikit memuat: a. maksud dan tujuan rencana b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan c. prioritas pembangunan nasional/ d. letak e. luas tanah yang f. gambaran umum status g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan h. perkiraan jangka waktu pelaksanaan i. perkiraan nilai j. rencana dan k. preferensi bentuk Ganti Kerugian.	0	T	[2.15.04.3.03.0001] [2.15.04.4.03.0001]
248	2.15.000406	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	Data laporan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor	0	T	[2.15.02.2.05.0010]
249	2.15.000407	Regulasi Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	Peraturan Daerah / Peraturan Bupati/Walikota tentang tarif retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor	0	T	[2.15.02.2.05.0009]
250	2.15.000408	Data penyelenggaraan pengujian berkalan kendaraan bermotor	Dokumen	Data laporan jumlah kendaraan wajib uji sesuai kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor	0	T	[2.15.02.2.05.0008]
251	2.15.000409	Data kendaraan bermotor yang telah melaksanakan wajib uji	Dokumen	Data laporan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang terdaftar	0	T	[2.15.02.2.05.0006]

252	2.15.000411	Pengaman Perlintasan Sebidang atau Portal Pengaman Pengguna Jalan	Unit	Terdiri dari pengaman perlintasan berpintu dan tidak berpintu. Pengaman perlintasan berpintu terdiri dari: a. Pintu perlintasan manual mekanik: b. Pintu perlintasan manual c. Pintu perlintasan elektrik.	0	T	[2.15.05.2.01.0004] [2.15.05.1.01.0004]
253	2.15.000412	Alat Pendeteksi Kereta Api	Unit	Berfungsi untuk mengetahui kereta api yang akan melintas di perlintasan sebidang.	0	T	[2.15.05.2.01.0004] [2.15.05.1.01.0004]
254	2.15.000413	Panic Button/ Emergency Lamp	Unit	Alat pendeteksi rintang jalan di perlintasan sebidang, untuk menginformasikan kepada Masinis (ASP) yang akan melintas di perlintasan melihat Cahaya/Emergency untuk segera mem perlam bat kecepatan dan berhenti sebelum titik perlintasan.	0	T	[2.15.05.2.01.0004] [2.15.05.1.01.0004]
255	2.15.000414	Pos Jaga	Unit	Bangunan Pos yang digunakan sebagai tempat untuk operasional Petugas JPL dalam menjalankan tugas.	0	T	[2.15.05.2.01.0004] [2.15.05.1.01.0004]
256	2.15.000415	Penjaga Perlintasan Kereta Api	Orang	Orang yang menjaga perlintasan kereta api yang memiliki kompetensi dan kecakapan untuk menjaga perlintasan kereta api.	0	T	
257	2.15.000416	Rambu Peringatan	Unit	Rambu peringatan yang dipasang pada perlintasan sebidang antara jalan dengan jalur kereta api adalah: a. Rambu peringatan pintu perlintasan sebidang kereta b. Rambu peringatan pintu perlintasan sebidang kereta api tanpa c. Untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan dapat dipasang rambu tambahan tentang jarak lokasi kritis dengan perlintasan d. Rambu peringatan dengan kata-kata yang menyatakan agar berhati -- hati mendekati perlintasan kereta e. Rambu yang menyatakan adanya rintangan atau objek berbahaya pada sisi jalan.	0	T	[2.15.02.1.02.0002] [2.15.02.2.02.0002]
258	2.15.000417	Rambu Larangan	Unit	Rambu larangan yang dipasang pada perlintasan sebidang antara jalan dengan jalur kereta api, terdiri dari: a. Rambu larangan berhenti terus karena wajib berhenti sesaat dan/atau melanjutkan perjalanan setelah dipastikan selamat dari konflik lalu lintas dari arah b. Rambu larangan berjalan terus pada perlintasan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal sebelum mendapatkan kepastian selamat dari c. Rambu larangan berjalan terus pada perlintasan sebidang lintasan kereta api jalur ganda sebelum mendapatkan kepastian selamat dari konflik.	0	T	[2.15.02.1.02.0002] [2.15.02.2.02.0002]
259	2.15.000419	Pita Penggaduh	Meter	Merupakan kelengkapan pada jalan yang berfungsi sebagai: a. Mengurangi kecepatan b. Mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus c. Melindungi penyeberang d. Mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan.	0	T	[2.15.02.1.02.0002] [2.15.02.2.02.0002]
260	2.15.000420	Yellow Box	Meter	Merupakan marka kotak berwarna kuning yang ditempatkan pada perlintasan sebidang untuk mencegah penumpukan kendaraan di atas perlintasan sebidang yang diakibatkan pengguna jalan tidak mau mengalah ketika kereta api akan melintas atau pintu perlintasan sudah tertutup.	0	T	[2.15.02.1.02.0002] [2.15.02.2.02.0002]
261	2.15.000421	Penjaga Perlintasan Kereta Api	Orang	Orang yang menjaga perlintasan kereta api yang memiliki kompetensi dan kecakapan untuk menjaga perlintasan kereta api.	0	T	[2.15.05.2.01.0004] [2.15.05.1.01.0004]

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2025	Disabled	Info Sub Kegiatan
1	3.25.000006	Benih ikan	Paket	Benih Ikan adalah Ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa.	11	T	[3.25.04.2.04.0009]
2	3.25.000007	dan jenis alat tangkap perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	Unit	Jumlah dan jenis alat tangkap perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	0	T	[3.25.03.2.01.0004]
3	3.25.000010	Data pengendalian residu	Dokumen	data yang didapatkan setelah dilakukan Pengendalian Residu yaitu upaya yang dilakukan agar Ikan konsumsi hasil pembudidayaan bebas dari residu Obat Ikan dan/atau metabolitnya, bahan kimia dan/atau metabolitnya, dan Kontaminan atau memiliki kandungan residu di bawah ambang batas yang dipersyaratkan.	0	T	[3.25.04.1.05.0011] [3.25.04.2.04.0004]
4	3.25.000012	Data prasarana dan sarana Pada Pengolahan Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	Data prasarana dan sarana berdasarkan skala usaha Subsektor Pengolahan Ikan (mikro, kecil, menengah, dan besar) serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	1	T	[3.25.06.1.01.0003] [3.25.06.1.01.0004] [3.25.06.2.01.0005]
5	3.25.000013	Data prasarana dan sarana pemasaran hasil perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	Data prasarana dan sarana berdasarkan skala usaha Subsektor Pemasaran Ikan (mikro, kecil, menengah, dan besar) serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	1	T	[3.25.06.2.01.0005]
6	3.25.000020	Data pengendalian lingkungan budidaya	Dokumen	Data dan informasi pengendalian lingkungan budidaya	0	T	[3.25.04.1.05.0011] [3.25.04.2.04.0004]
7	3.25.000021	Data pengendalian penyakit ikan	Dokumen	Data dan informasi pengendalian penyakit ikan	0	T	[3.25.04.1.05.0011] [3.25.04.2.04.0004]
8	3.25.000023	Data prasarana dan sarana perikanan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Penyediaan data dan informasi prasarana dan sarana perikanan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	T	[3.25.04.2.04.0001]
9	3.25.000027	Data prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	Dokumen	Penyediaan data dan informasi Data prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	0	T	[3.25.03.2.01.0001]
10	3.25.000028	Data rehabilitasi lingkungan budidaya	Dokumen	Data dan informasi rehabilitasi lingkungan budidaya	0	T	[3.25.04.1.05.0011] [3.25.04.2.04.0004]
11	3.25.000032	Data sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Penyediaan data dan informasi sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	T	[3.25.04.2.04.0001]
12	3.25.000036	Data sumber daya dan lingkungan perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	Dokumen	Penyediaan data dan informasi sumber daya dan lingkungan perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	1	T	[3.25.03.2.01.0001]
13	3.25.000044	Data Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko	Dokumen	Penyediaan data dan informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko	0	T	[3.25.06.2.01.0005]
14	3.25.000045	Data Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha	Dokumen	penyediaan data dan informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha	0	T	[3.25.06.2.01.0005]
15	3.25.000046	Data Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko	Dokumen	Penyediaan data dan informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko	0	T	[3.25.06.2.01.0005]
16	3.25.000047	Data Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha	Dokumen	penyediaan data dan informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha	1	T	[3.25.06.2.01.0005]
17	3.25.000050	Data volume dan nilai pemasaran hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	Penyediaan data dan informasi volume dan nilai pemasaran hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	0	T	[3.25.06.2.01.0001] [3.25.06.2.01.0005]
18	3.25.000051	Data volume dan nilai pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	Penyediaan Data volume dan nilai pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	1	T	[3.25.06.2.01.0001] [3.25.06.2.01.0005]
19	3.25.000058	Data volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	Dokumen	Penyediaan data dan informasi volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	0	T	[3.25.03.2.01.0001]
20	3.25.000063	hasil tangkapan yang di daratkan	Ton	Jumlah hasil tangkapan yang di daratkan	23.940,30	T	[3.25.03.2.03.0002]
21	3.25.000064	hasil tangkapan yang dilelang	Ton	Jumlah hasil tangkapan yang dilelang	0	T	[3.25.03.2.03.0002]
22	3.25.000065	ikan yang tersedia untuk konsumsi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Ton	Data dan Informasi ikan yang tersedia untuk konsumsi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	0	T	[3.25.06.2.03.0001]
23	3.25.000066	ikan yang tersedia untuk usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Ton	Data dan informasi ikan yang tersedia untuk usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	342	T	[3.25.06.2.03.0001]
24	3.25.000072	Informasi prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	Dokumen	Data dan Informasi prasarana dan sarana perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	0	T	[3.25.03.2.01.0001]
25	3.25.000076	Informasi sumber daya dan lingkungan perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	Dokumen	Data dan Informasi sumber daya dan lingkungan perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	0	T	[3.25.03.2.01.0001]

26	3.25.000079	Informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko	Dokumen	Data dan Informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko	0	T	[3.25.06.2.01.0001] [3.25.06.2.01.0005]
27	3.25.000080	Informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha	Dokumen	Data dan Informasi Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha	0	T	[3.25.06.2.01.0001] [3.25.06.2.01.0005]
28	3.25.000081	Informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko	Dokumen	Data dan Informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko	0	T	[3.25.06.2.01.0001] [3.25.06.2.01.0005]
29	3.25.000082	Informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha	Dokumen	Data dan Informasi Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha	1	T	[3.25.06.2.01.0001] [3.25.06.2.01.0005]
30	3.25.000085	Informasi volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	Dokumen	Data dan Informasi volume, nilai, dan hasil perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	0	T	[3.25.03.2.01.0001]
31	3.25.000093	Junlah alat pengangkut hasil produksi pembudidayaan ikan	Unit	Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palka dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/ atau mengawetkan ikan.	0	T	[3.25.04.2.04.0003] [3.25.04.2.04.0009]
32	3.25.000098	kapal perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota	Unit	&Jumlah kapal perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 kab/kota&	0	T	[3.25.03.2.01.0004]
33	3.25.000109	kelompok nelayan kecil	Kelompok	Jumlah kelompok nelayan kecil yang berada pada Kabupaten/Kota	25	T	[3.25.03.2.02.0002]
34	3.25.000110	kelompok nelayan yang mendapatkan akses permodalan melalui perbankan atau non perbankan	Nelayan/KUB/Koperasi	Kelompok Nelayan di Daerah yang mendapatkan mendapatkan akses permodalan dari perbankan bagi pengembangan usahanya	0	T	[3.25.03.2.02.0003]
35	3.25.000112	kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pembentukan dan pengembangan kelembagaan	Kelompok	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pembentukan dan pengembangan kelembagaan seperti pembentukan koperasi	0	T	[3.25.04.2.02.0002]
36	3.25.000113	kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pendanaan dan pembiayaan melalui perbankan atau non perbankan	Kelompok	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pendanaan dan pembiayaan melalui perbankan atau non perbankan	0	T	[3.25.04.2.02.0003]
37	3.25.000114	kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pengembangan kapasitas	Kelompok	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan akses pengembangan kapasitas berupa pelatihan teknis dan manajerial usaha budidaya	11	T	[3.25.04.2.02.0001]
38	3.25.000115	kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses informasi	Kelompok	&Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses informasi&	11	T	[3.25.04.2.02.0004]
39	3.25.000116	kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses IPTEK	Kelompok	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan kemudahan akses IPTEK berupa diseminasi teknologi terapan untuk peningkatan produktivitas usaha	0	T	[3.25.04.2.02.0004]
40	3.25.000117	kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Kelompok	&Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan&	0	T	[3.25.04.2.02.0004]
41	3.25.000118	kelompok pembudidaya ikan kecil yang terfasilitasi kemitraan usahanya	Kelompok	&Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang terfasilitasi kemitraan usahanya di bidang pemasaran, pengolahan dan kerjasama operasional untuk pengembangan kapasitas usaha&	0	T	[3.25.04.2.02.0003]
42	3.25.000119	Kelompok Usaha Bersama (KUB)	KUB	Kelompok Usaha Bersama Nelayan Kecil yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha yang dibentuk oleh nelayan kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggung jawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.	30	T	[3.25.03.2.02.0002]
43	3.25.000121	Koperasi Perikanan (Bidang Penangkapan Ikan)	Koperasi	Jumlah Koperasi Perikanan Pada Bidang Penangkapan Ikan	1	T	[3.25.03.2.02.0002]
44	3.25.000123	Laporan hasil pengujian sampel	Dokumen	1. pemeriksaan kualitas air, kualitas tanah, penyakit ikan, pakan ikan, dan obat 2. pengujian kualitas fisika, kimia, dan biologi air, kualitas tanah, penyakit ikan (parasit, jamur, bakteri, dan virus), residu, mutu dan kontaminan pakan ikan, mutu dan kontaminan obat ikan, dan produk rekayasa dan 3. diagnosa penyakit secara klinis dan Kegiatan diatas yang dilakukan dilaporkan dalam laporan hasil pengujian sampel	0	T	[3.25.04.1.05.0011] [3.25.04.2.04.0004]
45	3.25.000127	Luas lahan untuk pembudidayaan ikan di darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi	Ha	Luas lahan yang telah direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk pembudidayaan ikan di darat.	300	T	[3.25.04.2.04.0012]
46	3.25.000133	nelayan kecil	Orang	Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan Kapal Penangkap Ikan.	11675	T	[3.25.03.2.02.0001]

47	3.25.000134	Obat Ikan	Unit	Obat Ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Ikan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh Ikan.	0	T	[3.25.04.1.05.0004] [3.25.04.2.04.0003]
48	3.25.000136	Pakan Ikan	Unit	Pakan Ikan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, pemulihan, dan berkembang biak baik berupa Pakan Ikan Alami atau Pakan Ikan Buatan	0	T	[3.25.04.2.04.0009]
49	3.25.000139	Panjang saluran air	Meter	Saluran untuk Pembudidayaan Ikan dibuat untuk menyediakan Air yang memenuhi kuantitas dan kualitas Air sesuai dengan standar dan mengalirkan Air buangan dari wadah Pembudidayaan Ikan.	0	T	[3.25.04.2.04.0002]
50	3.25.000143	pelabuhan perikanan yang melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan umum daratan	Pelabuhan	Jumlah Pelabuhan Perikanan sesuai kewenangan Kab/Kota di perairan umum daratan	0	T	[3.25.03.2.01.0002]
51	3.25.000144	pelaksanaan kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan untuk nelayan kecil	Kegiatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan untuk nelayan kecil	1	T	[3.25.03.2.02.0001]
52	3.25.000146	pelaku usaha pemasaran hasil perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	1	T	[3.25.06.2.01.0001] [3.25.06.2.01.0005]
53	3.25.000147	pelaku usaha pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko	1	T	[3.25.06.2.01.0001] [3.25.06.2.01.0005]
54	3.25.000148	pelaku usaha perikanan skala kecil yang difasilitasi	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha perikanan skala kecil yang difasilitasi	107	T	[3.25.06.2.03.0002]
55	3.25.000149	pelaku usaha perikanan skala mikro yang difasilitasi	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro yang difasilitasi	10	T	[3.25.06.2.03.0002]
56	3.25.000154	pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	Orang	pembudidaya ikan yang menerapkan usaha budidaya sesuai dengan standar CBIB dan CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) agar semakin meningkatkan keamanan pangan bagi konsumen.	0	T	[3.25.04.2.04.0005] [3.25.04.2.04.0010]
57	3.25.000161	permohonan Buku Kapal Perikanan (BKP) yang masuk	Dokumen	Jumlah permohonan Buku Kapal Perikanan (BKP) yang masuk	0	T	[3.25.03.2.06.0002] [3.25.03.2.06.0003]
58	3.25.000164	permohonan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang diproses	Dokumen	Jumlah permohonan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang diproses	9	T	[3.25.04.2.01.0002]
59	3.25.000165	permohonan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang masuk	Rekomendasi	Jumlah permohonan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang diusulkan oleh pelaku usaha budidaya	9	T	[3.25.04.2.01.0002]
60	3.25.000176	permohonan Persetujuan Buku Kapal Perikanan (BKP) yang diproses	Dokumen	Jumlah permohonan Persetujuan Buku Kapal Perikanan (BKP) yang diproses	0	T	[3.25.03.2.06.0002] [3.25.03.2.06.0003]
61	3.25.000177	Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diProses	Dokumen	&Jumlah permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diproses sesuai dengan kewenangan Kabupaten/Kota	0	T	[3.25.03.2.05.0002] [3.25.03.2.05.0003]
62	3.25.000178	Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang masuk	Dokumen	Jumlah permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang masuk	0	T	[3.25.03.2.05.0002] [3.25.03.2.05.0003]
63	3.25.000179	permohonan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang diproses	Dokumen	Jumlah permohonan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang diusulkan	0	T	[3.25.04.2.03.0002] [3.25.04.2.03.0003]
64	3.25.000180	permohonan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang masuk	Rekomendasi	Jumlah permohonan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang diusulkan	0	T	[3.25.04.2.03.0002] [3.25.04.2.03.0003]
65	3.25.000182	permohonan Tanda Daftar Kapal Perikanan yang diproses	Dokumen	&Jumlah permohonan Tanda Daftar Kapal Perikanan yang diproses&	0	T	[3.25.03.2.04.0002]
66	3.25.000183	permohonan Tanda Daftar Kapal Perikanan yang masuk	Dokumen	Jumlah permohonan Tanda Daftar Kapal Perikanan yang masuk	0	T	[3.25.03.2.04.0002]
67	3.25.000186	Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi kewenangan kab/kota	Dokumen	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi kewenangan kab/kota	0	T	[3.25.03.2.06.0001]
68	3.25.000187	persyaratan dan prosedur penerbitan rekomendasi perizinan berusaha perikanan tangkap yang menjadi kewenangan Kab/Kota	Dokumen	Jumlah persyaratan dan prosedur penerbitan rekomendasi perizinan berusaha perikanan tangkap yang menjadi kewenangan Kab/Kota	0	T	[3.25.03.2.04.0001]
69	3.25.000188	Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang menjadi kewenangan Kab/Kota	Dokumen	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang menjadi kewenangan Kab/Kota	0	T	[3.25.03.2.05.0001]
70	3.25.000189	Prasarana pengujian kesehatan ikan dan lingkungan	Unit	Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan adalah laboratorium yang digunakan untuk melakukan kegiatan pemeriksaan, pengujian, dan diagnosa kesehatan ikan dan lingkungan.	0	T	[3.25.04.1.05.0011] [3.25.04.2.04.0004]
71	3.25.000207	pupuk ikan	Paket	Pupuk yang digunakan dalam Pembudidayaan Ikan dapat berupa dan n harus memenuhi standar persyaratan keamanan pangan dan lingkungan.: a. pupuk dan/atau b. pupuk anorganik.	0	T	[3.25.04.2.04.0003] [3.25.04.2.04.0009]
72	3.25.000208	rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang diterbitkan	Rekomendasi	Jumlah rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang diterbitkan	0	T	[3.25.03.2.06.0002] [3.25.03.2.06.0003]
73	3.25.000212	rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang diterbitkan	Rekomendasi	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan yang diterbitkan	9	T	[3.25.04.2.01.0002]
74	3.25.000215	rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diterbitkan	Rekomendasi	&Jumlah rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diterbitkan&	0	T	[3.25.03.2.05.0002] [3.25.03.2.05.0003]

75	3.25.000216	Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang diproses dan diterbitkan	0	T	[3.25.04.2.01.0001]
76	3.25.000217	Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	T	[3.25.04.2.03.0001]
77	3.25.000218	rekomendasi Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang diterbitkan	Rekomendasi	&Jumlah rekomendasi Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang diterbitkan&	0	T	[3.25.04.2.03.0002]
78	3.25.000219	rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan yang diterbitkan	Dokumen	&Jumlah rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan yang diterbitkan&	0	T	[3.25.03.2.04.0002]
79	3.25.000226	sampel yang diuji	Sampel	Sampel yang diambil dari lapangan untuk mengetahui kesehatan ikan dan lingkungan budidaya yang telah diuji pada laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan	0	T	[3.25.04.1.05.0011] [3.25.04.2.04.0004]
80	3.25.000227	Sarana pengujian kesehatan ikan dan lingkungan	Unit	Kesehetan Ikan dan Lingkungan sesuai dengan tingkatan level laboratorium. peralatan uji kualitas fisika, kimia, dan biologi air, kualitas tanah, penyakit ikan (parasit, jamur, bakteri, dan virus), histopatologi, residu, mutu dan kontaminan pakan ikan, mutu dan kontaminan obat ikan, dan produk rekayasa b. peralatan uji konfirmatori kualitas fisika, kimia, dan biologi air, kualitas tanah, penyakit ikan (parasit, jamur, bakteri, dan virus), histopatologi, residu, mutu dan kontaminan pakan ikan, mutu dan kontaminan obat ikan, dan produk rekayasa peralatan penyimpan sampel, bahan uji, vaksin, isolat, primer DNA, dan kontrol d. peralatan keselamatan kerja yaitu jas laboratorium, kaca mata goggle, sarung tangan, alas kaki, antiseptik, masker, dan alat pemadam api e. peralatan administrasi dan f. bahan uji kualitas fisika, kimia, dan biologi air, kualitas tanah, penyakit ikan (parasit, jamur, bakteri, dan virus), residu, mutu dan kontaminan pakan ikan, mutu dan kontaminan obat ikan, dan produk rekayasa dan g. bahan uji konfirmatori kualitas fisika, kimia, dan biologi air, kualitas tanah, penyakit ikan (parasit,	0	T	[3.25.04.1.05.0011] [3.25.04.2.04.0004]
81	3.25.000229	SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dokumen	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0	T	[3.25.03.2.03.0001]
82	3.25.000233	Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang terkeloladan terselenggara	TPI	Jumlah TPI sesuai kewenangan Kab/Kota	1	T	[3.25.03.2.01.0002]
83	3.25.000238	unit penyimpanan hasil produksi pembudidayaan ikan	Unit	Unit penyimpanan hasil produksi Pembudidayaan Ikan berupa bangunan yang memenuhi: a. persyaratan dan b. persyaratan dan standar sarana penyimpanan.	0	T	[3.25.04.2.04.0002]
84	3.25.000241	unit usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai risiko	Unit Usaha	Jumlah pelaku usaha pemsaran hasil perikanan yang terbina sesuai risiko	0	T	[3.25.06.2.02.0001] [3.25.06.2.02.0002]
85	3.25.000242	unit usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai Skala Usaha	Unit Usaha	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha	0	T	[3.25.06.2.02.0001] [3.25.06.2.02.0002]
86	3.25.000245	unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai risiko	Unit Usaha	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai risiko	0	T	[3.25.06.2.02.0001] [3.25.06.2.02.0002]
87	3.25.000246	unit usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha	Unit Usaha	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang terbina sesuai skala usaha	10	T	[3.25.06.2.02.0001] [3.25.06.2.02.0002]
88	3.25.000258	wadah pembudidayaan ikan	Unit	wadah budidaya merupakan tempat atau sarana untuk memelihara dan mengembangkan suatu komoditas perairan seperti ikan, rumput laut, dan lainnya untuk di budidaya	0	T	[3.25.04.2.04.0003] [3.25.04.2.04.0009]
89	3.25.000391	Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan/atau pendampingan untuk nelayan kecil	Kegiatan	&Jumlah pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan/atau pendampingan untuk nelayan kecil&	4	T	[3.25.03.2.02.0001]
90	3.25.000401	Hari Operasi Kapal Pengawas Perikanan	Hari Operasi	Operasi kapal pengawas perikanan adalah operasi pengawasan menggunakan kapal pengawas perikanan di daerah operasinya baik dalam bentuk operasi mandiri, bersama, terkoordinasi dan operasi lainnya untuk menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di bidang Perikanan	0	T	[3.25.05.2.01.0003]

91	3.25.000402	Kapal Pengawas Perikanan Yang Dirawat	Unit	pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang 2) Operasi kapal pengawas perikanan kab/kota dapat menggunakan kapal pengawas perikanan kelas VI (& 15 meter); 3) Perawatan kapal pengawas Perikanan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menjamin kesiapan dan kelaikan operasi kapal pengawas perikanan. Perawatan kapal pengawas perikanan meliputi: perawatan pencegahan, prediktif, dan darurat dilakukan terhadap kapal pengawas perikanan berbagai ukuran yang tercatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD) kab/ 4) Perawatan pencegahan adalah perawatan kapal pengawas perikanan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: perawatan rutin, pengedokan/pelimbungan, servis, analisa teknis, dan 5) Perawatan prediktif adalah perewatan kapal pengawas perikanan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: perbaikan mesin pada bagian atas (top overhaul), perbaikan setengah bagian mesin (in frame overhaul), perbaikan keseluruhan mesin (general overhaul), kalibrasi perlengkapan keselamatan, navigasi, dan komunikasi, pergantian plat kapal (replating), dan suku	0	T	[3.25.05.2.01.0005]
92	3.25.000403	Sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin kabupaten/kota yang ditangani	Perkara	1) Sanksi administratif bidang perikanan izin kabupaten/kota diterapkan terhadap pelanggaran kesesuaian kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dan perizinan berusaha sektor pemanfaatan sumber daya perikanan yang memiliki izin dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 2) Pelaku Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan adalah setiap badan usaha dan/atau perorangan dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan pemanfaatan terhadap sumber daya perikanan yang meliputi: usaha perikanan tangkap, usaha pembudidayaan ikan, unit usaha pengolahan ikan dan unit usaha yang melakukan distribusi hasil 3) Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin kabupaten/kota dilakukan dengan tahapan/cara pemeriksaan lapangan, analisis pelanggaran, dan pengenaan sanksi administratif. Sanksi administratif terdiri dari: a. peringatan/teguran b. paksaan c. denda d. pembekuan Perizinan dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha.	0	T	[3.25.05.2.01.0010]
93	3.25.000404	Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun	Unit	perikanan yang selanjutnya disebut Prasarana Pengawasan adalah fasilitas yang digunakan untuk mendukung pengawasan yang terdiri dari lahan, pos pengawas, bangunan operator, bangunan penampungan sementara, gudang, tempat penyimpanan benda sitaan negara, gedung serbaguna, dan 2) Pos Pengawas adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran, pelayanan, dan dijalankan secara rutin untuk menunjang operasional pengawasan sumber daya 3) Bangunan Operator adalah adalah tempat tinggal untuk Pengawas 4) Rumah penampungan sementara adalah ruang yang berfungsi sebagai hunian sementara untuk mengamankan para pelaku pelanggaran perikanan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan dan 5) Gudang adalah bangunan tertutup untuk menyimpan barang-barang yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan sumber daya perikanan selain benda sitaan 6) Tempat penyimpanan benda sitaan negara adalah ruang terbuka dan/atau tertutup yang digunakan untuk menyimpan benda sitaan pada tahap 7) Gedung Serba Guna adalah	0	T	[3.25.05.2.01.0011]

				) Kapal Pengawas Perikanan adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang 2) Operasi kapal pengawas perikanan adalah operasi pengawasan menggunakan kapal pengawas perikanan di daerah operasinya baik dalam bentuk operasi mandiri, bersama, terkoordinasi dan operasi lainnya untuk menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di bidang 3) Daerah operasi kapal pengawas perikanan kabupaten/kota adalah di WPPNRI perairan darat dalam wilayah kewenangan kabupaten/ 4) Pengadaan kapal pengawas perikanan bagi Pemda kab/kota ditujukan untuk melaksanakan kewenangan dalam Operasi kapal pengawas perikanan kab/kota yang dapat menggunakan kapal pengawas			
94	3.25.000406	Kapal Pengawas Perikanan Yang Diadakan	Unit	perikanan kelas V (Kurang Dari 12meter)	0	T	[3.25.05.2.01.0008]
95	3.25.000407	Kapal perikanan yang diawasi dalam kegiatan penangkapan ikan	Unit	Data kapal perikanan yang diawasi dalam kegiatan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota.	70	T	[3.25.05.2.01.0001] [3.25.05.2.01.0007]
96	3.25.000408	Kasus pelanggaran usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota.	Perkara	Data kasus pelanggaran usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota.	36	T	[3.25.05.2.01.0001] [3.25.05.2.01.0007]
97	3.25.000409	Peta rawan pelanggaran usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	Peta rawan pelanggaran usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota.	0	T	[3.25.05.2.01.0001] [3.25.05.2.01.0007]
98	3.25.000410	Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang tersedia dan terbentuk	Orang	perikanan terdiri dari Pengawas Perikanan dan Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) Perikanan. 2) Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan meliputi: a. pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/ b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan dan c. sehat jasmani dan rohani 3) PPNS Perikanan adalah pejabat pegawai negeri sipil perikanan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Persyaratan untuk diangkat sebagai PPNS Perikanan meliputi: a. pegawai negeri sipil masa kerja paling singkat 2 tahun b. pangkat paling rendah Penata Muda/golongan III.a c. pendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara d. bertugas di bidang teknis	0	T	[3.25.05.2.01.0009]

99	3.25.000411	Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Pelaku Usaha	pengawasan kesesuaian standar perizinan berusaha terhadap kegiatan usaha produksi garam dengan penguapan air garam lainnya di tambak/empang/media lainnya dan/atau penghancuran, pemisahan, dan penyulingan garam. 2. Pengawasan Umum dilaksanakan di kabupaten/kota yang terdapat aktifitas usaha produksi/ekstraksi garam skala usaha mikro dengan luas lahan di bawah 15 hektar. 3. Ruang lingkup dan tata cara pengawasan produksi/ekstraksi garam sebagaimana dimuat di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. 4. cakupan pengawasan kegiatan usaha ekstraksi garam yang diatur dalam peraturan Menteri ini adalah terkait kesesuaian standar perizinan pengawasan terhadap kegiatan usaha ekstraksi garam dilaksanakan di lokasi ekstraksi garam 5. Batasan pelaku/unit usaha sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri KP Nomor 10 Tahun 2021 yaitu KBLI 08930 terkait Ekstraksi Garam	0	T	[3.25.05.2.01.0012]
100	3.25.000423	Lokasi Pembudidayaan Ikan yang diawasi Pada Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Sesuai dengan Kewenangannya	Lokasi	Data Lokasi pembudidayaan ikan yang diawasi pengawas perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Sesuai dengan Kewenangannya	2	T	[3.25.05.2.01.0002] [3.25.05.2.01.0004]
101	3.25.000424	pelaku usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha	Data pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diawasi pengawas perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Sesuai dengan Kewenangannya	20	T	[3.25.05.2.01.0002] [3.25.05.2.01.0004]
102	3.25.000425	Kasus Pelanggaran Usaha pembudidayaan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Sesuai dengan Kewenangannya	Perkara	Jumlah kasus pelanggaran perikanan budidaya di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Sesuai dengan Kewenangannya	2	T	[3.25.05.2.01.0002] [3.25.05.2.01.0004]
103	3.25.000426	Kasus Pelanggaran Usaha Pengolahan dan/atau Pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Perkara	Kasus Pelanggaran Usaha Pengolahan dan/atau Pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Sesuai dengan Kewenangannya	0	T	[3.25.05.2.01.0006]
104	3.25.000427	Pelaku Usaha Pengolahan dan/atau Pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha Pengolahan dan/atau Pemasaran ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota yang diawasi	15	T	[3.25.05.2.01.0006]
105	3.25.004115	Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di sub sektor pengolahan hasil perikanan	Dokumen	Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di di sub sektor pengolahan hasil perikanan sesuai dengan skala usaha dan tingkat risiko sesuai dengan NSPK	0	T	[3.25.06.2.01.0004]
106	3.25.004116	Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di sub sektor pemasaran hasil perikanan	Dokumen	Persyaratan pengajuan perizinan berusaha di sub sektor pemasaran hasil perikanan sesuai dengan skala usaha dan tingkat risiko sesuai dengan NSPK	0	T	[3.25.06.2.01.0004]
107	3.25.004117	Pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pengolahan hasil perikanan	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pengolahan hasil perikanan sesuai dengan skala usaha dan tingkat risiko	0	T	[3.25.06.2.01.0004]
108	3.25.004118	Pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pemasaran hasil perikanan	Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan berusaha di bidang pemasaran hasil perikanan sesuai dengan skala usaha dan tingkat risiko	0	T	[3.25.06.2.01.0004]
109	3.25.004119	Izin Usaha Penunjang Bidang Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi	Perizinan berusaha di bidang Usaha penunjang Pengolahan Ikan berupa Rekomendasi Kelayakan Pengolahan oleh Pembina Mutu Daerah	0	T	[3.25.06.2.01.0003]
110	3.25.004120	Izin Usaha Penunjang Bidang Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi	Perizinan berusaha di bidang Usaha penunjang Pemasaran Ikan berupa Rekomendasi Kelayakan Pengolahan oleh Pembina Mutu Daerah	0	T	[3.25.06.2.01.0003]
111	3.25.004121	SOP penerbitan perizinan berusaha sub sektor pengolahan ikan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko melalui proses verifikasi	Dokumen	Juklak, Juknis, SOP Perizinan Berusaha Pengolahan Ikan yang dilaksanakan untuk menilai kelayakan dan pemenuhan standar usaha yang telah ditetapkan untuk menghasilkan perizinan berusaha dengan kriteria KBLI: a. KBLI Pengolahan Ikan	0	T	[3.25.06.2.01.0002]

112	3.25.004122	SOP penerbitan perizinan berusaha sub sektor pemasaran ikan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko melalui proses verifikasi	Dokumen	&Juklak, Juknis, SOP Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan yang dilaksanakan untuk menilai kelayakan dan pemenuhan standar usaha yang telah ditetapkan untuk menghasilkan perizinan berusaha dengan kriteria KBLI: a. KBLI Pemasaran Ikan	0	T	[3.25.06.2.01.0002]
113	3.25.004123	SOP penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko melalui proses verifikasi	Dokumen	&Juklak, Juknis, SOP Perizinan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang dilaksanakan untuk menilai kelayakan dan pemenuhan standar usaha yang telah ditetapkan untuk menghasilkan perizinan berusaha dengan kriteria KBLI: a. KBLI Pasca Panen Penangkapan Ikan&	0	T	[3.25.06.2.01.0002]
114	3.25.004127	Izin Usaha berbasis risiko yang diterbitkan untuk kapal yang beroperasi di perairan darat di wilayah administrasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi	Jumlah Izin Usaha berbasis risiko yang diterbitkan untuk kapal yang beroperasi di perairan darat di wilayah administrasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	T	[3.25.03.2.04.0004]
115	3.25.004128	SIUP yang diterbitkan untuk kapal yang beroperasi di perairan darat di wilayah administrasinya yang diterbitkan untuk kapal yang beroperasi di perairan darat di wilayah administrasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi	Jumlah SIUP yang diterbitkan untuk kapal yang beroperasi di perairan darat di wilayah administrasinya yang diterbitkan untuk kapal yang beroperasi di perairan darat di wilayah administrasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	T	[3.25.03.2.04.0003]
116	3.25.004129	Jumlah data perizinan usaha Perikanan Tangkap di perairan darat di wilayah administrasinya yang terintegrasi	Dokumen	Jumlah data perizinan usaha Perikanan Tangkap di perairan darat di wilayah administrasinya yang terintegrasi	0	T	[3.25.03.2.04.0005]
117	3.25.004130	Perahu/Kapal Penangkap Ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT di perairan laut beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran untuk peningkatan kapasitas nelayan kecil	Unit	Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan berukuran lebih kecil dari 5 GT di perairan laut beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran untuk peningkatan kapasitas nelayan kecil	0	T	[3.25.03.2.02.0004]
118	3.25.004131	Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk perairan darat berukuran lebih kecil dari 3 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan penagkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran	Unit	Jumlah Perahu/Kapal Penangkap Ikan untuk perairan darat berukuran lebih kecil dari 3 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, sarana pendukung kegiatan penagkapan ikan dan sarana keselamatan pelayaran	65	T	[3.25.03.2.02.0004]
119	3.25.004132	Jumlah Alat Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Unit	Jumlah Alat Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	144	T	[3.25.03.2.02.0004]
120	3.25.004133	Jumlah Alat Bantu Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Unit	Jumlah Alat Bantu Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	6	T	[3.25.03.2.02.0004]
121	3.25.004134	Jumlah Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Unit	Jumlah Jumlah Sarana Pendukung Kegiatan Penangkapan Ikan yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	23	T	[3.25.03.2.02.0004]
122	3.25.004135	Jumlah sarana keselamatan pelayaran yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Unit	Jumlah sarana keselamatan pelayaran yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	T	[3.25.03.2.02.0004]
123	3.25.004136	Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas Nelayan (Jalan Produksi, Drainase, dan Air Bersih Mendukung Produksi Perikanan	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas Nelayan (Jalan Produksi, Drainase, dan Air Bersih Mendukung Produksi Perikanan	0	T	[3.25.03.2.02.0004]
124	3.25.004137	Jumlah data perizinan usaha Perikanan Tangkap di perairan darat di wilayah administrasinya yang terintegrasi	Dokumen	Jumlah data perizinan usaha Perikanan Tangkap di perairan darat di wilayah administrasinya yang terintegrasi	0	T	[3.25.03.2.04.0005]
125	3.25.004165	Persyaratan penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Dokumen	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan adalah banyaknya dokumen rekomendasi yang menjelaskan langkah-langkah dalam enerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	0	T	[3.25.04.2.03.0001] [3.25.04.2.01.0004]

126	3.25.004166	SOP penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Dokumen	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan adalah banyaknya dokumen rekomendasi yang menjelaskan langkah-langkah dalam enerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	1	T	[3.25.04.2.03.0001] [3.25.04.2.01.0004]
127	3.25.004167	Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan (SIUP SIUP dan SIUP Pembenihan dan Pembesaran)	Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang diterbitkan (SIUP SIUP dan SIUP Pembenihan dan Pembesaran)	0	T	[3.25.04.2.01.0003]
128	3.25.004168	Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	9	T	[3.25.04.2.03.0003]
129	3.25.004174	Monitoring kesehatan ikan dan lingkungan yang sekurang-kurangnya memuat data terkait pengendalian penyakit Ikan, pengendalian pakan dan obat Ikan, pengendalian residu, pengendalian resistensi anti mikroba, pengendalian lingkungan budidaya, rehabilitasi lingkungan budidaya, dan/atau penyelenggaraan kesejahteraan Ikan (aquatic animal welfare) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Jumlah laporan kegiatan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan, yang memuat: pengendalian penyakit Ikan, pengendalian pakan dan Obat Ikan, pengendalian residu, pengendalian lingkungan budidaya, rehabilitasi lingkungan budidaya, dan/atau penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan (aquatic animal wellfare)	0	T	[3.25.04.2.04.0008]
130	3.25.004175	Sarana kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan	Unit	Jumlah Sarana Prasarana Unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan berupa laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan	0	T	[3.25.04.2.04.0013]
131	3.25.004176	Prasarana kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan	Unit	Jumlah Sarana Prasarana Unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan berupa laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan	0	T	[3.25.04.2.04.0013]
132	3.25.004177	Unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan	Unit	Jumlah Sarana Prasarana Unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan berupa laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang memenuhi persyaratan	0	T	[3.25.04.2.04.0013]
133	3.25.004189	pos kesehatan ikan terpadu	Unit	Jumlah pos kesehatan ikan terpadu	0	T	[3.25.04.2.04.0002] [3.25.04.2.04.0013]
134	3.25.004190	Kelompok Pembudidaya Ikan yang mengikuti perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat	Kelompok	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang mengikuti perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat	1	T	[3.25.04.2.04.0007] [3.25.04.2.04.0011]

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2025	Disabled	Info Sub Kegiatan
1	3.27.000051	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Dokumen	Hasil pengujian terhadap mutu benih dan bibit ternak	0	T	[3.27.02.2.05.0002]
2	3.27.000135	Panjang Jalan Usaha Tani eksisting	KM	panjang usaha tani yang ada dan berfungsi untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian	1,096	T	[3.27.03.2.02.0003]
3	3.27.000137	Panjang Jalan Usaha Tani yang direhabilitasi dan dipelihara	KM	Panjang Usaha tani yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian	6	T	[3.27.03.2.02.0003]
4	3.27.000143	Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar	Laporan	Obat hewan yang telah lolos pengawasan oleh Tim Pengawas Obat Hewan dan siap untuk diedarkan	0	T	[3.27.02.1.06.0001] [3.27.02.2.04.0001]
5	3.27.000152	pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Laporan	Banyaknya kegiatan pengawasan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi peredaran hewan dna produk hewan yang baik	1	T	[3.27.04.2.04.0002]
6	3.27.000222	Sertifikat Benih Hortikultura yang diterbitkan	Sertifikat	Sertifikasi benih adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat benih.		Y	[3.27.02.1.02.0001]
7	3.27.000238	Jumlah analisis Risiko media pembawa penyakit hewan lainnya	Laporan	Jumlah Pemindaian terhadap Potensi Wabah Penyakit Hewan yang berkaitan dengan laluâ€lintas hewan dan produk hewan	0	T	[3.27.04.1.02.0005] [3.27.04.2.02.0007]
8	3.27.000239	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan	Laporan	Jumlah Pemindaian terhadap Potensi Wabah Penyakit Hewan yang berkaitan dengan laluâ€lintas hewan dan produk hewan	0	T	[3.27.04.1.02.0005] [3.27.04.2.02.0007]
9	3.27.000240	Jumlah analisis Risiko Penyakit zoonosis	Laporan	Jumlah Pemindaian terhadap Potensi perpindahan Penyakit Hewan yang berkaitan dengan laluâ€lintas hewan dan produk hewan di lapangan		Y	[3.27.04.1.02.0005] [1.02.02.2.02.0052] [1.02.02.1.02.0039]
10	3.27.000241	Jumlah analisis Risiko produk hewan	Laporan	jumlah kasus pencegahan masuk dan tersebarnya penyakit hewan menular prioritas.	0	T	[3.27.04.1.02.0005] [3.27.04.2.02.0007]
11	3.27.000242	Jumlah analisis Risiko zoonosis	Laporan	jumlah kegiatan analisa risiko kejadian zoonosis di suatu wilayah	0	T	[3.27.04.2.02.0007]
12	3.27.000243	Jumlah Bahan Pakan/Pakan yang beredar	Ton	Banyaknya bahan pakan dan pakan ternak yang beredar	0	T	[3.27.02.2.05.0004] [3.27.02.2.03.0002]
13	3.27.000244	Jumlah bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil	Ton	Jenis dan banyaknya bahan pakan, pakan dan pakan yang digunakan oleh peternak	0	T	[3.27.02.2.03.0001]
14	3.27.000245	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun	Unit	Banyaknya Balai penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun dan dikembangkan	0	T	[3.27.03.2.02.0008]
15	3.27.000246	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhabilitasi	Unit	Banyaknya Balai penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan	0	T	[3.27.03.2.02.0008]
16	3.27.000248	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	Batang	Data hasil pengawasan Banyaknya Benih Batang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan		Y	[3.27.02.1.02.0005] [3.27.02.1.02.0019]
17	3.27.000249	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang terawasi peredarannya	Batang	Banyaknya Benih Batang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang beredar di masyarakat dan terawasi oleh petugas pengawas benih tanaman (PBT)		Y	[3.27.02.1.02.0005] [3.27.02.1.02.0019]
18	3.27.000250	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang tersedia	Batang	Banyaknya Benih Batang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang tersedia di masyarakat		Y	[3.27.02.1.02.0005] [3.27.02.1.02.0019]
19	3.27.000251	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	Ton	Data hasil pengawasan Banyaknya Benih Umbi/Rimpang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan		Y	[3.27.02.1.02.0005] [3.27.02.1.02.0019]
20	3.27.000252	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang terawasi peredarannya	Ton	Banyaknya Benih Umbi/Rimpang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang beredar di masyarakat dan terawasi oleh petugas pengawas benih tanaman (PBT)		Y	[3.27.02.1.02.0005] [3.27.02.1.02.0019]
21	3.27.000253	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang tersedia	Ton	Banyaknya Benih Umbi/Rimpang hortikultura yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang tersedia di masyarakat		Y	[3.27.02.1.02.0005]
22	3.27.000254	Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	Batang	Banyakanya benih batang perkebunan yang berasal dari kebun sumber benih yang ditetapkan dan disertifikasi oleh BPSB/ OPD berwenang melakukan sertifikasi benih sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan		Y	[3.27.02.1.02.0005] [3.27.02.1.02.0020]
23	3.27.000255	Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan yang terawasi peredarannya	Batang	Banyaknya Benih Batang perkebunan yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang beredar di masyarakat dan terawasi oleh petugas pengawas benih tanaman (PBT)		Y	[3.27.02.1.02.0005] [3.27.02.1.02.0020]

24	3.27.000256	Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan yang tersedia	Batang	Banyaknya Benih Batang perkebunan yang disertifikasi oleh BPSB/ OPD yang berwenang melakukan sertifikasi benih yang tersedia di masyarakat		Y	[3.27.02.1.02.0005] [3.27.02.1.02.0020]
25	3.27.000257	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji atau benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang tersedia	Ton	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang tersedia dengan mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku		Y	[3.27.02.1.02.0018] [3.27.02.1.02.0005]
26	3.27.000258	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	Ton	Jumlah benih tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang telah disertifikasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) atau dari produsen benih yang telah mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu dari lembaga penilai yang berwenang (Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu) dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku		Y	[3.27.02.1.02.0005] [3.27.02.1.02.0018]
27	3.27.000259	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang terawasi peredarannya	Ton	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang terawasi peredarannya		Y	[3.27.02.1.02.0018] [3.27.02.1.02.0005]
28	3.27.000260	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	Setek	Jumlah benih tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang telah disertifikasi oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) atau dari produsen benih yang telah mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu dari lembaga penilai yang berwenang (Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu) dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku		Y	[3.27.02.1.02.0018] [3.27.02.1.02.0005]
29	3.27.000261	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang terawasi peredarannya	Setek	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang terawasi peredarannya		Y	[3.27.02.1.02.0005] [3.27.02.1.02.0018]
30	3.27.000262	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang tersedia	Setek	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang tersedia dengan mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku		Y	[3.27.02.1.02.0005] [3.27.02.1.02.0018]
31	3.27.000263	Jumlah benih hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak/ diproduksi	Batang	Banyaknya benih batang hortikultura yang diproduksi/ diperbanyak oleh OPD yang berwenang memproduksi benih maupun produsen/penangkar benih		Y	[3.27.02.1.02.0007]
32	3.27.000264	Jumlah benih hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak/ diproduksi	Ton	Banyaknya benih umbi/ rimpang hortikultura yang diproduksi/ diperbanyak oleh OPD yang berwenang memproduksi benih maupun produsen/penangkar benih	0	T	[3.27.02.1.02.0014] [3.27.02.2.01.0015]
33	3.27.000265	Jumlah benih perkebunan berbentuk anakan yang diperbanyak/ diproduksi	Anakan	Banyaknya benih anakan perkebunan yang diproduksi/ diperbanyak oleh OPD yang berwenang memproduksi benih maupun produsen/penangkar benih	0	T	[3.27.02.1.02.0006] [3.27.02.2.01.0017]
34	3.27.000266	Jumlah benih perkebunan berbentuk batang yang diperbanyak/ diproduksi	Batang	Banyaknya benih batang perkebunan yang diproduksi/ diperbanyak oleh OPD yang berwenang memproduksi benih maupun produsen/penangkar benih	0	T	[3.27.02.1.02.0012] [3.27.02.2.01.0008]
35	3.27.000267	Jumlah benih perkebunan berbentuk biji yang diperbanyak/ diproduksi	Gram	Banyaknya benih perkebunan berbentuk biji yang diproduksi/ diperbanyak oleh OPD yang berwenang memproduksi benih maupun produsen/penangkar benih	0	T	[3.27.02.1.02.0011] [3.27.02.2.01.0011]
36	3.27.000270	Jumlah Benih Ternak yang beredar	Dosis	Jumlah Benih Ternak yang beredar	0	T	[3.27.02.1.05.0005] [3.27.02.2.05.0008]
37	3.27.000271	Jumlah benih ternak yang bermutu	Dosis	Benih ternak bermutu yang telah dilepas dan dimanfaatkan	0	T	[3.27.02.2.03.0001]
38	3.27.000272	Jumlah benih ternak yang bersertifikat	Dosis	Banyaknya benih ternak yang telah disertifikasi	0	T	[3.27.02.1.05.0003] [3.27.02.2.05.0007]
39	3.27.000273	Jumlah Benih Ternak yang dibutuhkan	Dosis	Benih Ternak bermutu sesuai standar dan syarat tertentu yang dibutuhkan dalam kurun waktu tertentu		Y	[3.27.02.1.05.0005]
40	3.27.000274	Jumlah Benih Ternak yang tersedia	Dosis	Banyaknya benih ternak yang tersedia	0	T	[3.27.02.2.05.0009]
41	3.27.000275	Jumlah Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang beredar	Ton	Jenis dan banyaknya benih/bibit hijauan pakan ternak yang beredar	0	T	[3.27.02.2.03.0002]
42	3.27.000276	Jumlah benih/bibit ternak yang diproduksi	Ekor	Ketersediaan Jumlah Bibit Ternak bermutu dalam suatu Wilayah tertentu dan secara kontinyu		Y	[3.27.02.1.05.0004]
43	3.27.000277	Jumlah benih/bibit ternak yang tersedia	Ekor	Ketersediaan Benih/Bibit Ternak bermutu dalam suatu Wilayah tertentu dan secara kontinyu		Y	[3.27.02.1.05.0004]
44	3.27.000278	Jumlah Bibit Ternak yang beredar	Ekor	Jumlah Bibit Ternak yang beredar dari spesies/rumpun tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	0	T	[3.27.02.1.05.0005] [3.27.02.2.05.0008]
45	3.27.000279	Jumlah bibit ternak yang bermutu	Ekor	Bibit ternak bermutu yang telah dilepas dan dimanfaatkan	0	T	[3.27.02.2.03.0001]
46	3.27.000280	Jumlah bibit ternak yang bersertifikat	Ekor	Banyaknya bibit ternak yang telah disertifikasi	0	T	[3.27.02.1.05.0003] [3.27.02.2.05.0007]
47	3.27.000281	Jumlah Bibit Ternak yang dibutuhkan	Ekor	Bibit Ternak bermutu sesuai standar dan syarat tertentu yang dibutuhkan dalam kurun waktu tertentu		Y	[3.27.02.1.05.0005]

48	3.27.000282	Jumlah Bibit Ternak yang tersedia	Ekor	Banyaknya bibit ternak yang tersedia	0	T	[3.27.02.2.05.0009]
49	3.27.000283	Jumlah Bimbingan Peningkatan Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	Kegiatan penataan kelembagaan dan SDM dalam rangka meningkatkan Bahan yang berkualitas		Y	[3.27.02.1.04.0001]
50	3.27.000284	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Bahan Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	Kegiatan penataan kelembagaan dan SDM dalam rangka meningkatkan Bahan Pakan yang berkualitas		Y	[3.27.02.1.04.0001]
51	3.27.000285	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak Kewenangan Provinsi	Dokumen	Kegiatan penataan kelembagaan dan SDM dalam rangka meningkatkan Produksi Benih/Bibit Ternak yang berkualitas		Y	[3.27.02.1.04.0001]
52	3.27.000286	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Tanaman Pakan Ternak Kewenangan Provinsi	Dokumen	Kegiatan penataan kelembagaan dan SDM dalam rangka meningkatkan Produksi Tanaman Pakan Ternak yang berkualitas		Y	[3.27.02.1.04.0001]
53	3.27.000287	Jumlah daerah terdampak wabah yang terkendali	Wilayah	Terkendalinya jumlah daerah yang terdampak dari penyakit hewan menular strategis	0	T	[3.27.04.1.01.0003] [3.27.04.2.01.0003]
54	3.27.000289	Jumlah DAM Parit yang direhabilitasi	Unit	Jumlah Dam parit yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian	0	T	[3.27.03.2.02.0004]
55	3.27.000290	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	pertanian merujuk pada total kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian untuk menyebarkan informasi, pengetahuan, dan inovasi terkait teknik pertanian, aspek sosial dalam pertanian, ekonomi pertanian, serta inovasi terbaru di bidang pertanian kepada komunitas petani atau stakeholder terkait. Diseminasi ini dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti seminar, lokakarya, pelatihan, publikasi, atau media digital. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau laporan kegiatan diseminasi yang telah dijalankan oleh penyuluh pertanian dalam periode waktu tertentu.	0	T	[3.27.07.2.01.0009]
56	3.27.000291	Jumlah dokumen rencana kontingensi penanganan hewan/ternak akibat bencana alam	Dokumen	Dokumen perencanaan penanganan hewan ternak yang diakibatkan oleh bencana alam	0	T	[3.27.05.1.01.0006] [3.27.05.2.01.0007]
57	3.27.000292	Jumlah Eksisting Bahan Pakan yang diproduksi	Laporan	Jumlah laporan hasil penyediaan Bahan Pakan yang diproduksi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)		Y	[3.27.02.1.04.0004]
58	3.27.000293	Jumlah Eksisting Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Unit	Banyaknya Balai penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang berfungsi baik	0	T	[3.27.03.2.02.0008]
59	3.27.000294	Jumlah Eksisting Benih/Bibit Ternak yang diproduksi	Laporan	Jumlah laporan hasil penyediaan Benih/Bibit Ternak hasil produksi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)		Y	[3.27.02.1.04.0004]
60	3.27.000295	Jumlah eksisting DAM Parit	Unit	Jumlah eksisting dam parit yang ada dan berfungsi untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian dengan debit air minimal 5 lt/detik dan lebar penampang kurang lebih 5 m	0	T	[3.27.03.2.02.0004]
61	3.27.000296	Jumlah Eksisting Embung Pertanian	Unit	banyaknya embung yang ada dan berfungsi untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian	0	T	[3.27.03.2.02.0002]
62	3.27.000297	Jumlah Eksisting Gedung UPTD Pertanian	Unit	Banyaknya gedung UPTD baik berupa balai ataupun bentuk lain yang digunakan dalam kondisi baik		Y	[3.27.03.1.01.0010]
63	3.27.000298	Jumlah Eksisting Jaringan Irigasi Usaha Tani	Unit	Panjang jaringan irigasi yang ada, terhubung langsung ke lahan pertanian dan berfungsi baik	0	T	[3.27.03.2.02.0010]
64	3.27.000299	Jumlah Eksisting Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Unit	Jumlah Laboratoriium keswan dan kesmavet yang berfungsi baik	0	T	[3.27.03.2.02.0012]
65	3.27.000300	Jumlah eksisting Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Unit	Ketersediaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet mempunyai fungsi pengawasan, pengamatan, pemantauan penyakit hewan yang bersifat zoonosis dan non zoonosis serta kualitas pangan asal hewan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi		Y	[3.27.03.1.01.0012]
66	3.27.000301	Jumlah eksisting laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan	Unit	Ketersediaan unit pengujian terhadap tingkat kesehatan hewan/ternak yang bersifat penyakit infeksius atau penyakit non infeksius	0	T	
67	3.27.000302	Jumlah Eksisting lembaga penyuluhan pertanian kabupaten/kota	Unit	Jumlah kelembagaan yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian tingkat Kabupaten/Kota (UPTD/BIDANG/SEKSI)	10	T	[3.27.07.2.01.0001] [3.27.07.2.01.0007]
68	3.27.000303	Jumlah Eksisting lembaga penyuluhan pertanian provinsi	Unit	Jumlah kelembagaan yang menyelanggarakan fungsi penyuluhan pertanian tingkat provinsi		Y	[3.27.07.1.01.0003]
69	3.27.000304	Jumlah Eksisting Obat Hewan yang beredar	Dosis	Obat hewan yang telah lolos pengawasan oleh Tim Pengawas Obat Hewan dan siap untuk diedarkan	0	T	[3.27.02.2.04.0001]
70	3.27.000305	Jumlah Eksisting Pakan yang diproduksi	Laporan	Jumlah laporan hasil penyediaan Pakan yang diproduksi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)		Y	[3.27.02.1.04.0004]
71	3.27.000306	Jumlah Eksisting Pelanggaran Kesejahteraan Hewan	Kasus	kasus pelanggaran yang terjadi dan diakibatkan oleh kesalahan dalam penanganan kesejahteraan hewan	0	T	[3.27.04.2.05.0002]

72	3.27.000307	Jumlah Eksisting Penyuluh Pertanian ASN	Orang	Jumlah penyuluh pertanian ASN yang terpenuhi sesuai kebutuhan daerah	0	T	[3.27.07.1.01.0004] [3.27.07.2.01.0006]
73	3.27.000308	Jumlah Eksisting Pintu Air	Unit	Jumlah Pintu Air yang ada dan berfungsi untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian	0	T	[3.27.03.2.02.0006]
74	3.27.000309	Jumlah Eksisting Pos Pemeriksaan Hewan	Unit	Unit Pelayanan Pemeriksaan Hewan yang tersedia yang berguna dalam pengawasan, peredaran ternak dan pengendalian penyebaran penyakit hewan menular		Y	[3.27.03.1.01.0024]
75	3.27.000310	Jumlah Eksisting Prasarana Hortikultura Lainnya	Unit	Banyaknya prasarana hortikultura lainnya yang berfungsi baik	0	T	[3.27.03.2.02.0009]
76	3.27.000311	Jumlah Eksisting Prasarana Perkebunan Lainnya	Unit	Banyaknya prasarana perkebunan lainnya yang berfungsi baik	0	T	[3.27.03.2.02.0009]
77	3.27.000312	Jumlah Eksisting Prasarana Peternakan Lainnya	Unit	Banyaknya prasarana peternakan lainnya yang berfungsi baik	0	T	[3.27.03.2.02.0009]
78	3.27.000313	Jumlah Eksisting Prasarana Tanaman Pangan Lainnya	Unit	Banyaknya prasarana tanaman pangan lainnya yang berfungsi baik	0	T	[3.27.03.2.02.0009]
79	3.27.000314	Jumlah Eksisting Puskeswan	Unit	Banyaknya Puskeswan yang berfungsi baik	1	T	[3.27.03.2.02.0014]
80	3.27.000316	Jumlah Eksisting Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang terbangun	Unit	Tempat pelayanan jasa oleh paramedik dan medik veteriner yang baru terbangun, yang berperan dalam penanganan penyakit hewan yang telah memiliki perizinan		Y	[3.27.03.1.01.0021]
81	3.27.000317	Jumlah Eksisting Sarana Pendukung	Unit	Banyaknya sarana pendukung yang digunakan dalam kondisi baik. Sarana pendukung dapat berupa gudang penyimpanan dan sarana lain yang mendukung peningkatan produktivitas hasil pertanian		Y	[3.27.03.1.01.0010]
82	3.27.000318	Jumlah Eksisting Tanaman Pakan Ternak yang diproduksi	Laporan	Jumlah laporan hasil penyediaan Tanaman Pakan Ternak yang di produksi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)		Y	[3.27.02.1.04.0004]
83	3.27.000319	Jumlah Eksisting UPTD BIB	Unit	Banyaknya UPTD inseminasi buatan, baik berbentuk balai atau lainnya yang ada dan berfungsi baik	0	T	[3.27.03.2.02.0013]
84	3.27.000320	Jumlah Eksisting UPTD Pembibitan dan UPTD Produksi Ternak	Unit	Banyaknya UPTD pembibitan dan produksi ternak, baik berbentuk balai atau lainnya yang ada dan berfungsi baik	0	T	[3.27.03.2.02.0011]
85	3.27.000321	Jumlah Eksisting usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	Jumlah usaha pertanian yang ada dan didampingi dalam pengembangannya	0	T	[3.27.06.1.01.0005] [3.27.06.2.01.0005]
86	3.27.000322	Jumlah Eksisting Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Unit	Kondisi terkini terkait wilayah kompartemen atau zona yang dinyatakan bebas dari penyakit		Y	[3.27.04.1.03.0001]
87	3.27.000323	Jumlah Embung Pertanian yang dipelihara	Unit	banyaknya embung yang dipelihara dalam rangka mendukung kegiatan budidaya pertanian	0	T	
88	3.27.000324	Jumlah Embung Pertanian yang direhabilitasi	Unit	banyaknya embung yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian	0	T	[3.27.03.2.02.0002]
89	3.27.000325	Jumlah Esksisting Laboratorium Benih atau Balai Benih (BIBD Provinsi)	Unit	Ketersediaan Laboratorium Benih atau Balai Benih yang melakukan peredaran Benih di Provinsi		Y	[3.27.03.1.01.0022]
90	3.27.000326	Jumlah Esksisting Laboratorium Pertanian	Unit	Banyaknya laboratorium yang digunakan untuk mendukung penelitian, upaya pengembangan jaringan/kultivar/SDG dalam rangka pengembangan kualitas produksi pertanian dalam kondisi baik		Y	[3.27.03.1.01.0007]
91	3.27.000327	Jumlah Esksisting Rumah Potong Hewan	Unit	Banyaknya RPH yang beroperasi dan berfungsi baik	0	T	[3.27.03.2.02.0015]
92	3.27.000328	Jumlah galur ternak yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Galur	Jumlah galur ternak yang dilestarikan dan dimurnikan	0	T	[3.27.02.2.02.0005]
93	3.27.000329	Jumlah galur yang dimanfaatkan	Galur	Jumlah jenis galur yang berkualitas dan telah dimanfaatkan	0	T	[3.27.02.2.02.0003]
94	3.27.000330	Jumlah galur yang dinilai	Galur	Sekumpulan atau sekelompok individu hewan dalam satu rumpun yang memiliki karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan		Y	[3.27.02.1.03.0006]
95	3.27.000331	Jumlah galur yang ditingkatkan kualitasnya	Galur	Jumlah jenis galur yang dilakukan pengusahaan peningkatan kualitas	0	T	[3.27.02.2.02.0002]
96	3.27.000332	Jumlah Gedung UPTD Pertanian yang dibangun	Unit	Banyaknya gedung UPTD baik berupa balai ataupun bentuk lain yang dibangun atau dikembangkan		Y	[3.27.03.1.01.0010]
97	3.27.000333	Jumlah Gedung UPTD Pertanian yang direhabilitasi	Unit	Banyaknya gedung UPTD baik berupa balai ataupun bentuk lain yang direhabilitasi atau diperbaiki dalam rangka pemeliharaan		Y	[3.27.03.1.01.0010]
98	3.27.000335	Jumlah Hasil pengujian di laboratorium kesehatan Hewan	Laporan	Hasil uji Laboratorium Kesehatan Hewan yang dilakukan pada Laboratorium terakreditasi	0	T	[3.27.04.1.03.0003] [3.27.04.2.04.0004]
99	3.27.000336	Jumlah Hasil pengujian di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Laporan	Hasil uji Laboratorium Kesehatan Masayarakat Veteriner yang dilakukan pada Laboratorium terakreditasi	0	T	[3.27.04.2.04.0004]
100	3.27.000337	Jumlah hewan yang berhasil ditangani	Ekor	Banyaknya hewan yang berhasil ditangani dari penyakit hewan	0	T	[3.27.05.1.01.0006] [3.27.05.2.01.0007]
101	3.27.000338	Jumlah Hijauan Pakan Ternak (HPT), Bahan Pakan dan Pakan yang beredar	Ton	Hijauan Pakan Ternak, Bahan Pakan dan Pakan yang beredar dari spesies/rumpun tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat		Y	[3.27.02.1.05.0005]

102	3.27.000339	Jumlah Hijauan Pakan Ternak (HPT), Bahan Pakan dan Pakan yang dibutukan	Ton	Hijauan Pakan Ternak, Bahan Pakan dan Pakan bermutu sesuai standar dan syarat tertentu yang dibutuhkan dalam kurun waktu tertentu		Y	[3.27.02.1.05.0005]
103	3.27.000340	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang diproduksi	Ton	Ketersediaan Jumlah Hijauan Pakan Ternak bermutu dalam suatu Wilayah tertentu dan secara kontinyu		Y	[3.27.02.1.05.0004]
104	3.27.000341	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ton	Banyaknya hijauan pakan ternak yang didatangkan dari daerah lain	0	T	[3.27.02.2.06.0002]
105	3.27.000342	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang tersedia	Ton	Banyaknya hijauan pakan ternak yang tersedia	0	T	[3.27.02.1.05.0004] [3.27.02.2.05.0009]
106	3.27.000343	Jumlah HPT yang beredar	Ton	Banyaknya hijauan pakan ternak yang beredar	0	T	[3.27.02.2.05.0004]
107	3.27.000344	Jumlah infrastruktur peternakan yang direhabilitasi dan rekonstruksi	Unit	Ketersediaan Infrastruktur Peternakan yang direhabilitasi	0	T	[3.27.05.1.01.0006] [3.27.05.2.01.0007]
108	3.27.000345	Jumlah izin laboratorium yang diawasi	Laporan	Ketersediaan Laboratorium yang memiliki perijinan dserta dalam oprasionalnya berada dalam pengawasan otoritas veteriner berwenang setempat		Y	[3.27.06.1.01.0002]
109	3.27.000347	Jumlah izin usaha Distributor Obat Hewan yang diawasi	Laporan	Ketersediaan perizinan usaha obat hewan yang bertujuan untuk mencegah berbagai penyimpangan mutu obat hewan dalam rangka melindungi konsumen		Y	[3.27.06.1.02.0002]
110	3.27.000348	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang memenuhi komitmen	Laporan	Ketersediaan perizinan usaha obat hewan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha untuk penyediaan obat hewan yang memenuhi standar		Y	[3.27.06.1.02.0001]
111	3.27.000349	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang diawasi	Laporan	banyaknya izin usaha fasilitas pemeliharaan hewan yang diawasi	0	T	
112	3.27.000350	Jumlah izin usaha pasar hewan yang diawasi	Laporan	banyaknya izin usaha pasar hewan yang diawasi	0	T	[3.27.06.2.02.0006]
113	3.27.000351	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang diawasi	Laporan	banyaknya izin usaha pengecer obat hewan yang diawasi	0	T	[3.27.06.2.03.0002]
114	3.27.000352	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang memenuhi komitmen	Laporan	banyaknya izin usaha obat hewan yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	0	T	[3.27.06.2.03.0001]
115	3.27.000353	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang dinilai kelayakan dan diberikan pertimbangan teknis	Dokumen	Banyaknya izin usaha pertanian yang telah dinilai layak melalui pemberian pertimbangan teknis	0	T	[3.27.06.2.01.0002]
116	3.27.000354	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak yang diawasi	Laporan	banyaknya izin usaha produksi benih/bibit ternak yang diawasi	0	T	[3.27.06.2.02.0002]
117	3.27.000355	Jumlah Izin Usaha produksi Pakan yang diawasi	Laporan	banyaknya izin usaha produksi pakan ternak yang diawasi	0	T	[3.27.06.2.02.0002]
118	3.27.000356	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang diawasi	Laporan	banyaknya izin usaha RPH yang diawasi	0	T	[3.27.06.2.02.0005]
119	3.27.000357	Jumlah izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner	Laporan	banyaknya izin usaha rumah sakit hewan, klinik hewan, ambulatori, praktik dokter hewan mandiri/puskeswan mandiri, atau tempat pelayanan paramedik veteriner yang diawasi	0	T	[3.27.06.2.02.0006]
120	3.27.000358	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dikelola	Unit	Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan serta menyampaikan laporan rekapitulasi hasil kegiatan di seluruh kabupaten penerima bantuan kepada Direktur Jenderal PSP		Y	[3.27.03.1.01.0003]
121	3.27.000359	Jumlah Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani yang dikelola	Unit	Panjang jaringan irigasi yang mendukung pengelolaan kawasan pertanian dan terhubung langsung ke lahan pertanian dan berfungsi baik		Y	[3.27.03.1.01.0004]
122	3.27.000360	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dipelihara	Unit	Panjang jaringan irigasi yang dipelihara	0	T	[3.27.03.2.02.0010]
123	3.27.000361	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang direhabilitasi	Unit	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan	0	T	[3.27.03.2.02.0010]
124	3.27.000362	Jumlah kader zoonosis	Orang	Ketersediaan sumber daya manusia yang berperan dalam pencegahan zoonosis melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	7	T	[3.27.04.1.01.0009] [3.27.04.2.01.0004]
125	3.27.000363	Jumlah kasus Gangguan Usaha Perkebunan	Kasus	Jumlah penangaan kasus Gangguan Usaha Perkebunan (misalnya:konflik usaha perkebunan, perizinan usaha)	0	T	[3.27.05.2.01.0003]
126	3.27.000364	Jumlah kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang ditangani	Kasus	Kasus pelanggaran yang diakibatkan oleh kesalahan dalam penanganan kesejahteraan hewan yang berhasil ditangani	0	T	[3.27.04.2.05.0002]
127	3.27.000365	Jumlah kasus penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang dilakukan penindakan	Kasus	Penyimpangan yang terjadi dalam penyediaan dan peredaran obat hewan berdasarkan hasil pengawasan obat hewan dan diberhentikan peredarannya oleh otoritas veteriner setempat	0	T	[3.27.02.1.06.0002] [3.27.02.2.04.0002]
128	3.27.000367	Jumlah kasus zoonosis pada hewan	Kasus	Jumlah penyakit infeksius yang bersumber pada hewan sebagai dampak kerusakan lingkungan, pemanasan global dan urbanisasi yang progresif	0	T	[3.27.04.1.01.0006] [3.27.04.2.01.0007] [3.27.05.2.01.0004]
129	3.27.000368	Jumlah kasus zoonosis pada manusia	Kasus	Jumlah kasus penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia.	0	T	[3.27.04.1.01.0006] [3.27.04.2.01.0007]
130	3.27.000369	Jumlah Kebutuhan Benih	Ton	Jumlah benih yang dibutuhkan per hektar sesuai luasan yang tersedia	0	T	[3.27.02.1.01.0001] [3.27.02.2.01.0001]

131	3.27.000370	Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	Unit	data banyaknya unit sarana pascapanen hortikultura yang dibutuhkan kelompok tani hortikultura maupun yang sudah tersedia. Sarana pascapanen hortikultura berupa mesin pencuci, meja peniris, meja pengemas, dan keranjang pascapanen serta angkutan roda 3, dan sarana mendukung pascapanen hortikultura lain		Y	[3.27.02.1.01.0006]
132	3.27.000371	Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	Unit	data jumlah kebutuhan dan sebaran unit alat atau mesin pascapanen tanaman perkebunan yang dimiliki poktan/gapoktan		Y	[3.27.02.1.01.0003]
133	3.27.000372	Jumlah Kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	Unit	Jumlah sarana pascapanen tanaman pangan yang dibutuhkan oleh suatu daerah serta sebarannya		Y	[3.27.02.1.01.0004]
134	3.27.000373	Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	Unit	data banyaknya unit sarana pengolahan hortikultura yang dibutuhkan kelompok tani hortikultura maupun yang sudah tersedia. Sarana pengolahan hortikultura sesuai komoditas seperti mesin penggiling, meja stainless, mesin vacuum frying, mesin deep drying, mesin pengering tipe rak, mesin continous sealer, freezer		Y	[3.27.02.1.01.0007]
135	3.27.000375	Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Unit	Jumlah sarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dibutuhkan oleh suatu daerah serta sebarannya		Y	[3.27.02.1.01.0008]
136	3.27.000376	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Laporan	Kegiatan pengawasan peredaran produk hewan yang dilaksanakan pada tempat / lalu lintas strategis	0	T	[3.27.04.1.02.0006] [3.27.04.2.02.0005]
137	3.27.000377	Jumlah kejadian penyakit hewan dan Zoonosis pada Hewan yang divalidasi	Kasus	Kasus penyakit hewan yang terjadi dan terlaporkan serta ditindaklanjuti untuk dilakukan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis dan dalam keadaan tertangani	27	T	[3.27.04.1.01.0008] [3.27.04.2.01.0006]
138	3.27.000378	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Kasus	Kasus penyakit hewan yang terjadi dan ditindaklanjuti untuk dilakukan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	727	T	[3.27.04.1.01.0008] [3.27.04.2.01.0006]
139	3.27.000379	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	Unit	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk merujuk pada total organisasi atau kelompok petani yang sengaja didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi petani, seperti koperasi petani, asosiasi, atau unit bisnis lainnya yang berfokus pada aktivitas ekonomi di sektor pertanian. Kelembagaan ini bertujuan untuk memperkuat posisi tawar petani, meningkatkan akses pasar, dan memajukan kesejahteraan anggota melalui aktivitas ekonomi bersama. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau registrasi kelembagaan ekonomi petani yang telah dibentuk dalam periode waktu tertentu.	0	T	[3.27.07.2.01.0008]
140	3.27.000380	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	Jumlah kelembagaan yang menangani penyuluhan tingkat desa	0	T	[3.27.07.2.01.0001]
141	3.27.000381	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	Jumlah kelembagaan yang menangani penyuluhan tingkat kecamatan	10	T	[3.27.07.2.01.0001]
142	3.27.000382	Jumlah Kelembagaan Petani di Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	Banyaknya kelembagaan petani di desa yang meningkat kapasitasnya setelah kegiatan peningkatan kapasitas, seperti sosialisasi, diklat atau workshop yang sesuai	2	T	[3.27.07.2.01.0002]
143	3.27.000383	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	Banyaknya kelembagaan petani di kecamatan yang meningkat kapasitasnya setelah kegiatan peningkatan kapasitas, seperti sosialisasi, diklat atau workshop yang sesuai	5	T	[3.27.07.2.01.0002]
144	3.27.000384	Jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan	Kelompok	Jumlah Kelompok Petani adalah total kelompok yang terdiri dari petani yang aktif berkolaborasi dan bekerja bersama dalam suatu wilayah tertentu untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan pemasaran hasil pertanian, dan dapat diukur berdasarkan data resmi atau registrasi kelompok petani terbaru dalam periode waktu tertentu.		T	[3.27.07.1.02.0002]
145	3.27.000385	Jumlah Ketersediaan Alsintan	Unit	Jumlah alat dan mesin pertanian pra panen yang tersedia baik dalam kondisi baik maupun perlu perbaikan atau rusak yang ada di kelompok masyarakat/masyarakat petani di tingkat provinsi		Y	[3.27.02.1.01.0001]

146	3.27.000386	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi baik	Unit	data banyaknya unit sarana pascapanen hortikultura yang dimiliki kelompok tani hortikultura atau tersedia dalam kondisi baik/ beroperasi dengan baik. Sarana pascapanen hortikultura berupa mesin pencuci, meja peniris, meja pengemas, dan keranjang pascapanen serta angkutan roda 3, dan sarana mendukung pascapanen hortikultura lain		Y	[3.27.02.1.01.0006]
147	3.27.000387	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi rusak	Unit	data banyaknya unit sarana pascapanen hortikultura yang dimiliki kelompok tani hortikultura atau tersedia dalam kondisi rusak/tidak dapat digunakan. Sarana pascapanen hortikultura berupa mesin pencuci, meja peniris, meja pengemas, dan keranjang pascapanen serta angkutan roda 3, dan sarana mendukung pascapanen hortikultura lain		Y	[3.27.02.1.01.0006]
148	3.27.000388	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi baik	Unit	data jumlah ketersediaan dan sebaran unit alat atau mesin pascapanen tanaman perkebunan yang dimiliki poktan/gapoktan dalam kondisi baik		Y	[3.27.02.1.01.0003]
149	3.27.000389	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi rusak	Unit	data jumlah ketersediaan dan sebaran unit alat atau mesin pascapanen tanaman perkebunan yang dimiliki poktan/gapoktan dalam kondisi rusak		Y	[3.27.02.1.01.0003]
150	3.27.000390	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi baik	Unit	Jumlah sarana pascapanen tanaman pangan yang sudah tersedia di suatu daerah serta sebarannya, yang berada dalam kondisi baik, dapat beroperasi		Y	[3.27.02.1.01.0004]
151	3.27.000391	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi rusak	Unit	Jumlah sarana pascapanen tanaman pangan yang sudah tersedia di suatu daerah serta sebarannya, yang berada dalam kondisi rusak, sehingga tidak dapat beroperasi		Y	[3.27.02.1.01.0004]
152	3.27.000392	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi baik	Unit	data banyaknya unit sarana pengolahan hortikultura yang dimiliki kelompok tani hortikultura atau tersedia dalam kondisi baik/ beroperasi dengan baik. Sarana pengolahan hortikultura sesuai komoditas seperti mesin penggiling, meja stainless, mesin vacuum frying, mesin deep drying, mesin pengering tipe rak, mesin continous sealer, freezer		Y	[3.27.02.1.01.0007]
153	3.27.000393	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi rusak	Unit	data banyaknya unit sarana pengolahan hortikultura yang dimiliki kelompok tani hortikultura atau tersedia dalam kondisi rusak/tidak dapat digunakan. Sarana pengolahan hortikultura sesuai komoditas seperti mesin penggiling, meja stainless, mesin vacuum frying, mesin deep drying, mesin pengering tipe rak, mesin continous sealer, freezer		Y	[3.27.02.1.01.0007]
154	3.27.000394	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi baik	Unit	data jumlah kebutuhan dan sebaran unit alat atau mesin pengolahan hasil tanaman perkebunan yang dimiliki poktan/gapoktan dalam kondisi baik		Y	[3.27.02.1.01.0005]
155	3.27.000395	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi rusak	Unit	data jumlah kebutuhan dan sebaran unit alat atau mesin pengolahan hasil tanaman perkebunan yang dimiliki poktan/gapoktan dalam kondisi rusak		Y	[3.27.02.1.01.0005]
156	3.27.000396	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi baik	Unit	Jumlah sarana pengolahan hasil tanaman pangan yang sudah tersedia di suatu daerah serta sebarannya, yang berada dalam kondisi baik, dapat beroperasi		Y	[3.27.02.1.01.0008]
157	3.27.000397	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi rusak	Unit	Jumlah sarana pengolahan hasil tanaman pangan yang sudah tersedia di suatu daerah serta sebarannya, yang berada dalam kondisi rusak, sehingga tidak dapat beroperasi		Y	[3.27.02.1.01.0008]
158	3.27.000398	Jumlah Ketersediaan Pestisida	Liter	Jumlah pestisida yang tersedia secara keseluruhan di masyarakat, baik pengadaan pribadi maupun bantuan pemerintah.		Y	[3.27.02.1.01.0001]
159	3.27.000399	Jumlah ketersediaan pupuk	Ton	Jumlah ketersediaan pupuk di masyarakat secara keseluruhan, baik itu pupuk subsidi maupun pupuk non subsidi		Y	[3.27.02.1.01.0001]
160	3.27.000400	Jumlah Ketersediaan Sarana Pendukung Pertanian	Unit	jumlah dan jenis sarana pendukung pertanian yang tersedia dalam kondisi baik di daerah		Y	[3.27.02.1.01.0001]
161	3.27.000401	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Unit	Melaksanakan koordinasi, pengendalian pelaksanaan, konstruksi dan pemanfaatan, monitoring dan evaluasi serta menyampaikan laporan rekapitulasi hasil kegiatan di seluruh kabupaten penerima bantuan kepada Direktur Jenderal PSP		Y	[3.27.03.1.01.0003]
162	3.27.000402	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Kegiatan	Koordinasi dilakukan minimal 4 kali : (1) dan (2) persiapan (menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari Petunjuk Teknis, menentukan CP/CL), (3) bimbingan (pelaksanaan kegiatan), (4) monitoring dan evaluasi kegiatan (setelah pelaksanaan kegiatan selesai)		Y	[3.27.03.1.01.0004]

163	3.27.000403	Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Peredaran Sarana Pertanian	Kegiatan	adalah jumlah kegiatan pertemuan multipihak baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menghasilkan kesepakatan bersama terkait sarana peredaran pertanian. Kesepakatan diputuskan untuk mencapai output bersama, dan dapat dalam bentuk pembagian peran pelaksanaan suatu kebijakan ataupun kewenangan.		Y	[3.27.02.1.01.0002] [3.27.02.1.01.0011]
164	3.27.000404	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Laporan	adalah jumlah kegiatan pertemuan multipihak baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menghasilkan kesepakatan bersama terkait penggunaan, pengelolaan, termasuk pemeliharaan prasarana pendukung pertanian lainnya. Kesepakatan diputuskan untuk mencapai output bersama, dan dapat dalam bentuk pembagian peran pelaksanaan suatu kebijakan ataupun kewenangan.	1	T	[3.27.03.2.01.0003]
165	3.27.000405	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	adalah jumlah kegiatan pertemuan multipihak baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menghasilkan kesepakatan bersama dalam pelaksanaan pengelolaan prasarana pendukung pertanian lainnya. Kesepakatan diputuskan untuk mencapai output bersama, dan dapat dalam bentuk pembagian peran pelaksanaan suatu kebijakan ataupun kewenangan.		Y	[3.27.03.1.01.0009]
166	3.27.000406	Jumlah Koorporasi Petani, Jumlah manajemen koorporasi petani yang mendapatkan pendampingan	Unit	Jumlah Korporasi Petani merujuk pada total entitas atau badan hukum yang dibentuk oleh sekelompok petani yang bekerja bersama dalam struktur korporasi untuk meningkatkan kapasitas produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian di suatu wilayah tertentu, dan dapat diukur berdasarkan data resmi atau registrasi korporasi petani terbaru dalam periode waktu tertentu. - Jumlah Manajemen Korporasi Petani yang Mendapatkan Pendampingan adalah total individu atau tim manajemen dalam korporasi petani yang telah menerima bimbingan, pelatihan, atau konsultasi dari pihak ketiga (seperti pemerintah, LSM, atau konsultan) untuk meningkatkan kinerja dan kapabilitas manajerial korporasi, dan dapat diukur berdasarkan laporan atau bukti pendampingan yang diterima dalam periode waktu tertentu.		Y	[3.27.07.1.03.0005]
167	3.27.000407	Jumlah Korporasi Petani	Unit	Jumlah Korporasi Petani merujuk pada total entitas atau badan hukum yang dibentuk oleh sekelompok petani yang bekerja bersama dalam struktur korporasi untuk meningkatkan kapasitas produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian di suatu wilayah tertentu, dan dapat diukur berdasarkan data resmi atau registrasi korporasi petani terbaru dalam periode waktu tertentu.		Y	[3.27.07.1.03.0006]
168	3.27.000408	Jumlah Laboratorium	Unit	banyaknya laboratorium yang digunakan dalam rangka kegiatan analisa kesehatan hewan yang beroperasi dan berfungsi baik	0	T	[3.27.04.2.03.0001]
169	3.27.000409	Jumlah Laboratorium Benih atau Balai Benih yang dibangun	Unit	Laboratorium Benih atau Balai Benih yang akan dibangun di Provinsi		Y	[3.27.03.1.01.0022]
170	3.27.000410	Jumlah laboratorium Benih atau Balai Benih yang terpelihara	Unit	Jumlah laboratorium Benih atau Balai Benih yang terpelihara		Y	[3.27.03.1.01.0022]
171	3.27.000411	Jumlah Laboratorium Pertanian yang dibangun	Unit	Banyaknya laboratorium yang dibangun/dikembangkan untuk mendukung penelitian, upaya pengembangan jaringan/kultivar/SDG dalam rangka pengembangan kualitas produksi pertanian		Y	[3.27.03.1.01.0007]
172	3.27.000413	Jumlah laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dibangun	Unit	unit pengujian terhadap tingkat kesehatan hewan/ternak yang bersifat penyakit infeksius atau penyakit non infeksius yang akan terbangun pada suatu wilayah		Y	[3.27.03.1.01.0007]
173	3.27.000414	Jumlah laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terpelihara	Unit	Ketersediaan Laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terpelihara		Y	[3.27.03.1.01.0022]
174	3.27.000415	Jumlah Laporan kejadian penyakit hewan dan zoonosis pada Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional	Kasus	Kasus penyakit hewan yang terjadi dan terlaporkan serta ditindaklanjuti untuk dilakukan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	0	T	[3.27.04.1.01.0008] [3.27.04.2.01.0006]
175	3.27.000416	Jumlah Laporan Pengawasan Benih/Bibit Ternak Bersertifikat yang beredar	Laporan	Banyaknya kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap benih/bibit ternak bersertifikat yang beredar	0	T	[3.27.02.1.05.0003] [3.27.02.2.05.0007]
176	3.27.000417	Jumlah layanan jasa medik veteriner	Unit	Layanan penanganan penyakit hewan yang dilakukan oleh petugas berwenang (medik veteriner)		Y	[3.27.04.1.01.0005]
177	3.27.000418	Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Hortikultura	Ha	Luas areal hortikultura yang terkena dampak bencana alam pada suatu wilayah	0	T	[3.27.05.1.01.0005] [3.27.05.2.01.0006]

178	3.27.000419	Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Perkebunan	Ha	luas area perkebunan yang terdampak bencana alam	0	T	[3.27.05.1.01.0005] [3.27.05.2.01.0006]
179	3.27.000420	Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan	Ha	Luas areal tanaman pangan yang terkena dampak bencana alam pada suatu wilayah	0	T	[3.27.05.1.01.0005] [3.27.05.2.01.0006]
180	3.27.000421	Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Hortikultura yang ditanggulangi	Ha	Luas areal hortikultura melewati masa kebencanaan. Melewati masa kebencanaan berarti telah masuk pada masa rehabilitasi/ penataan kembali	0	T	[3.27.05.1.01.0005] [3.27.05.2.01.0006]
181	3.27.000422	Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Perkebunan yang ditanggulangi	Ha	Luas areal perkebunan melewati masa kebencanaan. Melewati masa kebencanaan berarti telah masuk pada masa rehabilitasi/ penataan kembali	0	T	[3.27.05.1.01.0005] [3.27.05.2.01.0006]
182	3.27.000423	Jumlah Luas area Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan yang ditanggulangi	Ha	Luas areal tanaman pangan yang dapat ditangani, yang terkena dampak bencana alam pada suatu wilayah	0	T	[3.27.05.1.01.0005] [3.27.05.2.01.0006]
183	3.27.000424	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura	Ha	luas area kawasan hortikultura yang terdampak perubahan iklim (DPI)	0	T	[3.27.05.1.01.0002] [3.27.05.2.01.0002]
184	3.27.000425	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura yang ditangani	Ha	luas kawasan hortikultura yang terdampak perubahan iklim yang ditangani (difasilitasi bantuan/ dilakukan penanganan untuk mengurangi/ mengantisipasi dampak perubahan iklim)	0	T	[3.27.05.1.01.0002] [3.27.05.2.01.0002]
185	3.27.000426	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan	Ha	Luas area perkebunan yang terdampak perubahan iklim	0	T	[3.27.05.1.01.0002] [3.27.05.2.01.0002]
186	3.27.000427	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan yang ditangani	Ha	Luas area perkebunan yang terdampak perubahan iklim dan ditangani oleh OPD yang berwenang	0	T	[3.27.05.1.01.0002] [3.27.05.2.01.0002]
187	3.27.000428	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan	Ha	Jumlah luas area sebagai dampak dari perubahan iklim (seperti kenaikan temperatur, perubahan pola hujan dan angin) dan perubahan variabilitas iklim	0	T	[3.27.05.1.01.0002] [3.27.05.2.01.0002]
188	3.27.000429	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan yang ditangani	Ha	Jumlah luas areal tanaman pangan yang dapat ditangani sebagai dampak banjir dan kekeringan	0	T	[3.27.05.1.01.0002] [3.27.05.2.01.0002]
189	3.27.000430	Jumlah Luas lahan pengembalaan umum yang diidentifikasi	Ha	Luasan areal penggembalaan umum yang teridentifikasi dapat digunakan	0	T	[3.27.03.2.04.0001]
190	3.27.000431	Jumlah Luas lahan pengembalaan umum yang ditetapkan	Ha	Luasan areal penggembalaan umum yang ditetapkan dapat dimanfaatkan/digunakan	0	T	[3.27.03.2.04.0001]
191	3.27.000432	Jumlah Luas Lahan Penggembalaan Umum yang dikelola	Ha	Luasan areal penggembalaan umum yang dikelola pemanfaatannya dengan baik	0	T	[3.27.03.2.04.0002]
192	3.27.000433	Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura	Ha	luas area kawasan hortikultura yang terserang OPT (organisme pengganggu hama, penyakit, dan gulma)	203,78	T	[3.27.05.1.01.0001] [3.27.05.2.01.0001]
193	3.27.000434	Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura yang ditangani	Ha	Jumlah luas area kawasan hortikultura yang dikendalikan/ditangani (jumlah/populasi OPT (organisme pengganggu hama, penyakit, dan gulma) berkurang/ intensitas serangan menurun)	203,78	T	[3.27.05.1.01.0001] [3.27.05.2.01.0001]
194	3.27.000435	Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan	Ha	luas area perkebunan yang terserang OPT	876.81	T	[3.27.05.1.01.0001] [3.27.05.2.01.0001]
195	3.27.000436	Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan yang ditangani	Ha	luas area perkebunan yang terserang OPT dan dikendalikan /ditangani oleh OPD yang berwenang	85,4	T	[3.27.05.1.01.0001] [3.27.05.2.01.0001]
196	3.27.000437	Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan	Ha	Jumlah luas areal tanaman pangan yang terserang organisme pengganggu tumbuhan (hama, penyakit, dan gulma) sehingga menyebabkan kerusakan, gangguan kehidupan atau kematian pada tumbuhan	80.41	T	[3.27.05.1.01.0001] [3.27.05.2.01.0001]
197	3.27.000438	Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan yang ditangani	Ha	Jumlah luas areal tanaman pangan yang sembuh (tidak bertambah/populasi OPT tidak meningkat/intensitas serangan OPT tidak meningkat) akibat adanya tindakan pengendalian	15	T	[3.27.05.1.01.0001] [3.27.05.2.01.0001]
198	3.27.000439	Jumlah luasan Penanganan Kebakaran Lahan Usaha Perkebunan	Ha	Luasan area kebakaran hutan yang tertangani	0	T	[3.27.05.1.01.0003] [3.27.05.2.01.0003]
199	3.27.000440	Jumlah luasan Pencegahan Kebakaran Lahan Usaha Perkebunan	Ha	Luasan area yang berpotensi mengalami kebakaran lahandan dilakukan upaya pencegahannya	0	T	[3.27.05.1.01.0003] [3.27.05.2.01.0003]
200	3.27.000441	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	Orang	sekelompok atau golongan masyarakat yang sadar terhadap kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan sanitasi persyaratan teknis		Y	[3.27.04.1.03.0007]
201	3.27.000442	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	Orang	Banyaknya masayarakat yang teredukasi dan meningkat pemahamannya terhadap kesmavet dan keswan	0	T	[3.27.04.2.04.0008]
202	3.27.000443	Jumlah Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	Orang	Ketersediaan Petugas Medik Veteriner yang memiliki kewenangan dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengawasan , sesuai dengan prosedur dan teknik kerja tertentu		Y	[3.27.02.1.04.0005]
203	3.27.000444	Jumlah obat hewan bermutu, berkhasiat dan aman yang beredar	Dokumen	Obat hewan yang telah lolos pengawasan oleh Tim Inspeksi Good manufacturing practise (GMP) atau cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB) dari Veterinary Drug & Animal Feed Administration & Control Authority (VDFACA) dan siap untuk didistribusikan	0	T	[3.27.02.1.06.0001] [3.27.02.2.04.0001]

204	3.27.000445	Jumlah Paramedik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	Orang	Ketersediaan Petugas Paramedik Veteriner yang memiliki kewenangan dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengawasan , sesuai dengan prosedur dan teknik kerja tertentu		Y	[3.27.02.1.04.0005]
205	3.27.000446	Jumlah pascapanen perkebunan	Unit	banyaknya sarana dan prasarana pascapanen perkebunan guna mendukung pencapaian produksi (misal Bangungan dan alat pascapanen yang digunakan poktan/gapoktan/kelembagaan ekonomi petani untuk Pengolahan hasil perkebunan)	0	T	[3.27.03.2.01.0010]
206	3.27.000447	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	pelaksanaan tata kelola yang bertujuan meningkatkan kualitas/mutu tumbuhan dan organisme		Y	[3.27.02.1.03.0004]
207	3.27.000448	Jumlah pelayanan jasa laboratorium	Laporan	banyaknya pelayanan jasa pada laboratorium kesehatan hewan yang beroperasi dan berfungsi baik	0	T	[3.27.04.2.03.0001]
208	3.27.000449	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	Banyaknya pelayanan yang dilakukan oleh petugas medik veteriner pada tahun berjalan	1	T	[3.27.04.2.03.0002]
209	3.27.000450	Jumlah pembangunan Pemeliharaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Unit	Laboratorium Keswan dan Kesmavet mempunyai fungsi pengawasan, pengamatan, pemantauan penyakit hewan yang bersifat zoonosis dan non zoonosis serta kualitas pangan asal hewan yang akan dibangun di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi		Y	[3.27.03.1.01.0012]
210	3.27.000451	Jumlah pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum	Laporan	Banyaknya kegiatan pembinaan dan pengawsan terhadpa lahan penggembalaan umum	0	T	[3.27.03.2.04.0003]
211	3.27.000452	Jumlah pemeliharaan Pemeliharaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Unit	Laboratorium Keswan dan Kesmavet mempunyai fungsi pengawasan, pengamatan, pemantauan penyakit hewan yang bersifat zoonosis dan non zoonosis serta kualitas pangan asal hewan yang memerlukan pemeliharaan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi		Y	[3.27.03.1.01.0012]
212	3.27.000453	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Laporan	Pemeriksaan yang dilakukan terhadap HPM atau terduga pembawa kasus penyakit menular di tempat pemeriksaan	0	T	[3.27.04.1.02.0004] [3.27.04.2.02.0006]
213	3.27.000454	Jumlah Pemeriksaan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Laporan	Pemeriksaan yang dilakukan terhadap HPM atau terduga pembawa kasus penyakit menular di tempat pemeriksaan	0	T	[3.27.04.1.02.0004] [3.27.04.2.02.0006]
214	3.27.000455	Jumlah pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang bereda	Laporan	Obat hewan yang telah lolos pengawasan oleh Tim Inspeksi Good manufacturing practise (GMP) atau cara pembuatan obat hewan yang baik (CPOHB) dari Veterinary Drug & Animal Feed Administration & Control Authority (VDFACA) dan siap untuk didistribusikan	0	T	[3.27.02.2.04.0001]
215	3.27.000456	Jumlah Pemeriksaan Produk Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Laporan	Pemeriksaan yang dilakukan terhadap produk hewan baik olahan maupun non olahan di tempat pemeeriksaan	0	T	[3.27.04.1.02.0004] [3.27.04.2.02.0006]
216	3.27.000458	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Dokumen	Kegiatan administrasi yang dilakukan sebagai salah satu proses penerbitan izin usaha fasilitas pemeliharaan hewan	0	T	[3.27.06.2.02.0001]
217	3.27.000459	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Dokumen	Kegiatan administrasi yang dilakukan sebagai salah satu proses penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan	0	T	[3.27.06.2.02.0001]
218	3.27.000460	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Dokumen	Kegiatan administrasi yang dilakukan sebagai salah satu proses penerbitan izin usaha rumah potong hewan	0	T	[3.27.06.2.02.0001]
219	3.27.000461	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan	Dokumen	Kegiatan administrasi yang dilakukan sebagai salah satu proses penerbitan izin usaha rumah sakit hewan/pasar hewan	0	T	[3.27.06.2.02.0001]
220	3.27.000462	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Laporan	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian adalah kegiatan fasilitasi, advokasi, dan komunikasi terhadap penggunaan sarana pendukung pertanian agar terjamin mutu dan efektivitasnya, serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	1	T	[3.27.02.2.01.0002]
221	3.27.000463	Jumlah Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan	Laporan	Banyaknya penerapan terhadap persyaratan teknis pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan dari dan ke luar daerah Kab/Kota	0	T	[3.27.04.2.02.0004]
222	3.27.000464	Jumlah Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Dosis	Penyediaan Benih Ternak yang sumber nya berasal dari daerah lain dengan kondisi surplus benih ternak		Y	[3.27.02.1.07.0003]
223	3.27.000465	Jumlah Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah kabupaten/kota Lain	Ekor	Banyaknya bibit ternak yang didatangkan dari daerah lain	356	T	[3.27.02.2.06.0003]
224	3.27.000466	Jumlah Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ekor	Penyediaan Bibit Ternak yang sumber nya berasal dari daerah lain dengan kondisi surplus bibit ternak		Y	[3.27.02.1.07.0004]

225	3.27.000467	Jumlah Pengawasan Kesehatan Hewan di Perbatasan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Laporan	Kegiatan pengawasan kesehatan hewan di daerah perbatasan tempat pemeriksaan hewan dan media pembawa penyakit	15	T	[3.27.04.2.02.0006]
226	3.27.000468	Jumlah Pengawasan Kesehatan Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Laporan	Pengawasan yang dilakukan terhadap HPM atau terduga tertular kasus penyakit di tempat pemeriksaan		Y	[3.27.04.1.02.0004]
227	3.27.000469	Jumlah Pengawasan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Laporan	Pengawasan yang dilakukan terhadap HPM atau terduga pembawa kasus penyakit menular di tempat pemeriksaan	0	T	[3.27.04.1.02.0004] [3.27.04.2.02.0006]
228	3.27.000470	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan	Laporan	Pengawasan dengan Penerapan Persyaratan Teknis yang dilakukan dalam rangka Pemasukan/Pengeluaran Hewan Hidup baik yang dilakukan oleh perorangan ataupun korporasi	15	T	[3.27.04.1.02.0007] [3.27.04.2.02.0004]
229	3.27.000471	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya	Laporan	Pengawasan dengan Penerapan Persyaratan Teknis yang dilakukan dalam rangka Pemasukan/Pengeluaran Produk berupa media pembawa penyakit hewan baik yang dilakukan oleh perorangan ataupun korporasi	0	T	[3.27.04.1.02.0007] [3.27.04.2.02.0004]
230	3.27.000472	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan	Laporan	Pengawasan dengan Penerapan Persyaratan Teknis yang dilakukan dalam rangka Pemasukan/Pengeluaran Produk Hewan baik yang dilakukan oleh perorangan ataupun korporasi		Y	[3.27.04.1.02.0007]
231	3.27.000473	Jumlah Pengawasan Produk Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Laporan	Pengawasan yang dilakukan terhadap produk hewan baik olahan maupun non olahan di tempat pemeriksaan	0	T	[3.27.04.1.02.0004] [3.27.04.2.02.0006]
232	3.27.000474	Jumlah penggunaan alsintan	Unit	Kegiatan pengawasan alat dan mesin pertanian pra panen yang meliputi pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pemanfaatan bantuan alsintan pra panen di tingkat kabupaten/kota	234	T	[3.27.02.2.01.0001]
233	3.27.000475	Jumlah penggunaan pestisida	Liter	Kegiatan penggunaan pestisida yang meliputi perijinan, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan pemanfaatan bantuan pestisida di tingkat kabupaten/kota	0	T	[3.27.02.2.01.0001]
234	3.27.000476	Jumlah penggunaan pupuk	Ton	kegiatan pengelolaan pupuk bersubsidi meliputi perencanaan penginputan, dan penetapan alokasi pupuk bersubsidi, sosialisasi, pembinaan dan pelaksanaan pengawalan terhadap verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota yang dilakukan oleh tim Kecamatan Kegiatan Pengelolaan Pupuk Non Subsidi meliputi kegiatan pendataan pupuk dan pembenah tanah yang terdaftar, pemantauan peredarannya di lapangan serta melakukan edukasi penggunaaan pupuk dan pembenah tanah yang tepat.	712,863	T	[3.27.02.2.01.0001]
235	3.27.000477	Jumlah penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Unit	banyaknya sarana pascapanen hortikultura yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ asosiasi/ pelaku usaha hortikultura	0	T	[3.27.02.2.01.0016]
236	3.27.000478	Jumlah penggunaan sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi baik	Unit	banyaknya sarana pascapanen hortikultura yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ asosiasi/ pelaku usaha hortikultura yang masih dalam kondisi baik	0	T	[3.27.02.2.01.0016]
237	3.27.000479	Jumlah penggunaan sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi rusak	Unit	banyaknya sarana pascapanen hortikultura yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ asosiasi/ pelaku usaha hortikultura yang masih dalam kondisi rusak	0	T	[3.27.02.2.01.0016]
238	3.27.000480	Jumlah penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	Unit	banyaknya sarana pascapanen perkebunan yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ pelaku usaha perkebunan	0	T	[3.27.02.2.01.0006]
239	3.27.000481	Jumlah penggunaan sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi baik	Unit	banyaknya sarana pascapanen perkebunan yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ pelaku usaha perkebunan masih dalam kondisi baik	0	T	[3.27.02.2.01.0006]
240	3.27.000482	Jumlah penggunaan sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi rusak	Unit	banyaknya sarana pascapanen perkebunan yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ pelaku usaha perkebunanyang rusak	0	T	[3.27.02.2.01.0006]
241	3.27.000483	Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Unit	Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	18	T	[3.27.02.2.01.0014]
242	3.27.000484	Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi baik	Unit	Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi baik	18	T	[3.27.02.2.01.0014]
243	3.27.000485	Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi rusak	Unit	Jumlah sarana pascapanen tanaman pangan yang sudah tersedia di suatu daerah serta sebarannya, yang berada dalam kondisi rusak, sehingga tidak dapat beroperasi	0	T	[3.27.02.2.01.0014]

244	3.27.000486	Jumlah penggunaan sarana pendukung pertanian lainnya	Unit	Pengawasan sarana pendukung pertanian adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan sarana pendukung pertanian agar terjamin mutu dan efektivitasnya, serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	0	T	[3.27.02.2.01.0001]
245	3.27.000487	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Unit	banyaknya sarana pengolahan hortikultura yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ asosiasi/ pelaku usaha hortikultura	0	T	[3.27.02.2.01.0007]
246	3.27.000488	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi baik	Unit	banyaknya sarana pengolahan hortikultura yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ asosiasi/ pelaku usaha hortikultura yang masih dalam kondisi baik	0	T	[3.27.02.2.01.0007]
247	3.27.000489	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi rusak	Unit	banyaknya sarana pengolahan hortikultura yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ asosiasi/ pelaku usaha hortikultura yang masih dalam kondisi rusak	0	T	[3.27.02.2.01.0007]
248	3.27.000490	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	Unit	banyaknya sarana pengolahan perkebunan yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ pelaku usaha perkebunan	0	T	[3.27.02.2.01.0012]
249	3.27.000491	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi baik	Unit	banyaknya sarana pengolahan perkebunan yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ pelaku usaha perkebunan masih dalam kondisi baik	0	T	[3.27.02.2.01.0012]
250	3.27.000492	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi rusak	Unit	banyaknya sarana pengolahan perkebunan yang digunakan kelompok tani/ gapoktan/ pelaku usaha perkebunanyang rusak	0	T	[3.27.02.2.01.0012]
251	3.27.000493	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Unit	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	8	T	[3.27.02.2.01.0005]
252	3.27.000494	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi baik	Unit	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi baik	8	T	[3.27.02.2.01.0005]
253	3.27.000495	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi rusak	Unit	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi rusak	0	T	[3.27.02.2.01.0005]
254	3.27.000496	Jumlah pengolahan hasil perkebunan	Unit	banyaknya sarana dan prasarana pengolahan perkebunan guna mendukung nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan (misal Bangungan dan alat pengolahan yang digunakan poktan/gapoktan/kelembagaan ekonomi petani untuk Pengolahan hasil perkebunan)	0	T	[3.27.03.2.01.0010]
255	3.27.000497	Jumlah penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kasus	Penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dibandingkan tahun sebelumnya dalam satu daerah kab/kota	27	T	[3.27.04.2.01.0008]
256	3.27.000498	Jumlah penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kasus	Menurunnya kasus penyakit hewan menular strategis yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada satu kawasan wilayah Provinsi		Y	[3.27.04.1.01.0007]
257	3.27.000499	Jumlah penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Kasus	Penyimpangan yang terjadi dalam penyediaan dan peredaran obat hewan berdasarkan hasil pengawasan obat hewan oleh otoritas veteriner setempat	0	T	[3.27.02.1.06.0002] [3.27.02.2.04.0002]
258	3.27.000500	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan	Orang	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan karir dan peningkatan kompetensi	0	T	[3.27.07.1.01.0004] [3.27.07.2.01.0006]
259	3.27.000501	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	Orang	Jumlah Penyuluh Pertanian swadaya dan swasta yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka dan peningkatan kompetensi	0	T	[3.27.07.1.01.0004] [3.27.07.2.01.0006]
260	3.27.000502	Jumlah peralatan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Unit	Ketersediaan Peralatan Laboratorium Keswan dan Kesmavet mempunyai fungsi pengawasan, pengamatan, pemantauan penyakit hewan yang bersifat zoonosis dan non zoonosis serta kualitas pangan asal hewan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi		Y	[3.27.03.1.01.0012]
261	3.27.000503	Jumlah Peralatan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Unit	Ketersediaan Peralatan pada Pos Pelayanan Terpadu Kesehatan Hewan dan Pemeriksaan Ternak Keliling yang ada pada suatu wilayah		Y	[3.27.03.1.01.0024]
262	3.27.000504	Jumlah perbanyakan/ produksi benih bersertifikat Tanaman Pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain)	Ton	Jumlah perbanyakan/ produksi benih tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) dari varietas unggul yang telah disertifikasi	0	T	[3.27.02.1.02.0013] [3.27.02.2.01.0003]
263	3.27.000505	Jumlah perbanyakan/ produksi benih bersertifikat Tanaman Pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain)	Setek	Jumlah perbanyakan/ produksi benih tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) dari varietas unggul yang telah disertifikasi	0	T	[3.27.02.1.02.0009] [3.27.02.2.01.0004]
264	3.27.000506	Jumlah Petugas Medik Veteriner	Orang	Banyaknya petugas medik veteriner di daerah	2	T	[3.27.04.2.03.0002]

265	3.27.000507	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak yang mengikuti pengembangan kapasitas	Orang	Ketersediaan Petugas Pengawas Bibit Ternak yang memiliki kewenangan dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengawasan bibit ternak, sesuai dengan prosedur dan teknik kerja tertentu		Y	[3.27.02.1.04.0005]
266	3.27.000508	Jumlah Petugas Pengawas Mutu Pakan yang mengikuti pengembangan kapasitas	Orang	Ketersediaan Petugas Pengawas Mutu Pakan yang memiliki kewenangan dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengawasan Mutu Pakan, sesuai dengan prosedur dan teknik kerja tertentu		Y	[3.27.02.1.04.0005]
267	3.27.000509	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Orang	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kersehatan Masayarakat Veteriner yang sesuai standar dan mutu dalam rangka peningkatan mutu	0	T	[3.27.04.1.04.0004] [3.27.04.2.04.0007]
268	3.27.000510	Jumlah petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Orang	Banyaknya petugas teknis kesehatan hewan, kesmavet dan keswan yang mengikuti pengembangan kompetensi	0	T	[3.27.04.1.04.0004] [3.27.04.2.04.0007]
269	3.27.000511	Jumlah Pintu Air direhabilitasi	Unit	Jumlah Pintu Air yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian	0	T	[3.27.03.2.02.0006]
270	3.27.000513	Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit ternak yang dilakukan pelestarian	Ekor	Banyaknya populasi ternak di wilayah sumber ternak yang dilestarikan	0	T	[3.27.03.2.03.0001]
271	3.27.000514	Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit ternak yang dilakukan pemanfaatan	Ekor	Banyaknya populasi ternak di wilayah sumber ternak yang dimanfaatkan	0	T	[3.27.03.2.03.0001]
272	3.27.000515	Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit Ternak yang dilestarikan dan dimanfaatkan	Ekor	Jumlah populasi ternak di wilayah sumber bibit Ternak yang dilestarikan dan dimanfaatkan		Y	[3.27.03.1.02.0001]
273	3.27.000516	Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan Keliling	Unit	Ketersediaan Pos Pelayanan Terpadu Kesehatan Hewan dan Pemeriksaan Ternak Keliling yang ada pada suatu wilayah		Y	[3.27.03.1.01.0024]
274	3.27.000517	Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan yang dibangun	Unit	Unit Pelayanan Pemeriksaan Hewan yang terbangun dan berguna dalam pengawasan, peredaran ternak dan pengendalian penyebaran penyakit hewan menular		Y	[3.27.03.1.01.0024]
275	3.27.000518	Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan yang terehabilitasi	Unit	Unit Pelayanan Pemeriksaan Hewan yang terehabilitasi dan berguna dalam pengawasan, peredaran ternak dan pengendalian penyebaran penyakit hewan menular		Y	[3.27.03.1.01.0024]
276	3.27.000519	Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan yang terpelihara	Unit	Unit Pelayanan Pemeriksaan Hewan yang terpelihara dan berguna dalam pengawasan, peredaran ternak dan pengendalian penyebaran penyakit hewan menular		Y	[3.27.03.1.01.0024]
277	3.27.000520	Jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya yang dibangun	Unit	Banyaknya prasarana hortikultura yang dibangun dan dikembangkan	0	T	[3.27.03.2.02.0009]
278	3.27.000521	Jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya yang direhabilitasi	Unit	Banyaknya prasarana hortikultura yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan	0	T	[3.27.03.2.02.0009]
279	3.27.000522	Jumlah Prasarana Hortikultura Lainnya yang terpelihara	Unit		0	T	[3.27.03.2.02.0009]
280	3.27.000523	Jumlah prasarana pascapanen hasil hortikultura	Unit	banyaknya prasarana yang digunakan untuk kegiatan pascapanen hortikultura	0	T	[3.27.03.1.01.0014] [3.27.03.2.01.0008]
281	3.27.000524	Jumlah prasarana pascapanen hasil perkebunan	Unit	banyaknya prasarana yang digunakan untuk kegiatan pascapanen hasil perkebunan	0	T	[3.27.03.1.01.0017] [3.27.03.2.01.0007]
282	3.27.000525	Jumlah prasarana pascapanen hasil peternakan	Unit	Ketersediaan prasarana pascapanen hasil peternakan yang sesuai dengan prosedur penanganan pascapanen	0	T	[3.27.03.1.01.0019] [3.27.03.2.01.0009]
283	3.27.000526	Jumlah prasarana pascapanen hasil tanaman pangan	Unit	Jumlah prasarana pascapanen hasil tanaman pangan	0	T	[3.27.03.1.01.0023] [3.27.03.2.01.0006]
284	3.27.000527	Jumlah Prasarana Pendukung Hortikultura	Unit	banyaknya prasarana pendukung kawasan hortikultura	0	T	[3.27.03.2.01.0003]
285	3.27.000528	Jumlah Prasarana Pendukung Perkebunan	Unit	banyaknya prasarana pendukung perkebunan	0	T	[3.27.03.2.01.0003]
286	3.27.000529	Jumlah Prasarana Pendukung Peternakan	Unit	Banyaknya prasarana pendukung peternakan yang digunakan dalam rangka mendukung produktivitas hasil peternakan	0	T	[3.27.03.2.01.0003]
287	3.27.000530	Jumlah Prasarana Pendukung Tanaman Pangan	Unit	banyaknya prasarana pendukung kawasan tanaman pangan	8	T	[3.27.03.2.01.0003]
288	3.27.000531	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura	Unit	banyaknya prasarana yang digunakan untuk kegiatan pengolahan hortikultura	0	T	[3.27.03.1.01.0011] [3.27.03.2.01.0011]
289	3.27.000532	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan	Unit	banyaknya prasarana yang digunakan untuk kegiatan pasca panen dalam rangka pengolahan hasil perkebunan	0	T	[3.27.03.1.01.0020] [3.27.03.2.01.0013]
290	3.27.000533	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan	Unit	Jumlah bangunan/rumah produksi pengolahan hasil tanaman pangan	2	T	[3.27.03.1.01.0025] [3.27.03.2.01.0012]

291	3.27.000534	Jumlah prasarana penyuluhan pertanian	Unit	Jumlah prasarana penyuluhan pertanian merujuk pada total bangunan, tanah, dan fasilitas fisik lainnya yang digunakan sebagai tempat atau lokasi untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian di suatu wilayah tertentu. Prasarana ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, gedung penyuluhan, aula, lapangan demonstrasi, laboratorium, dan fasilitas pendukung lainnya yang digunakan dalam proses penyuluhan. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau inventarisasi prasarana penyuluhan pertanian yang ada dalam periode waktu tertentu.	0	T	[3.27.07.2.01.0003]
292	3.27.000535	Jumlah Prasarana Perkebunan Lainnya yang dibangun	Unit	Banyaknya prasarana perkebunan yang dibangun dan dikembangkan	2	T	[3.27.03.2.02.0009]
293	3.27.000536	Jumlah Prasarana Perkebunan Lainnya yang direhabilitasi	Unit	Banyaknya prasarana perkebunan yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan	0	T	[3.27.03.2.02.0009]
294	3.27.000538	Jumlah Prasarana Peternakan Lainnya yang dibangun	Unit	Banyaknya prasarana peternakan yang dibangun dan dikembangkan	0	T	[3.27.03.2.02.0009]
295	3.27.000539	Jumlah Prasarana Peternakan Lainnya yang direhabilitasi	Unit	Banyaknya prasarana peternakan yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan	0	T	[3.27.03.2.02.0009]
296	3.27.000541	Jumlah Prasarana Tanaman Pangan Lainnya yang dibangun	Unit	Banyaknya prasarana tanaman pangan yang dibangun dan dikembangkan	0	T	[3.27.03.2.02.0009]
297	3.27.000542	Jumlah Prasarana Tanaman Pangan Lainnya yang direhabilitasi	Unit	Banyaknya prasarana tanaman pangan yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan	0	T	[3.27.03.2.02.0009]
298	3.27.000543	Jumlah Prasarana Tanaman Pangan Lainnya yang terpelihara	Unit	Banyaknya Prasarana Tanaman Pangan Lainnya yang terpelihara	0	T	[3.27.03.2.02.0009]
299	3.27.000544	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi perstyaratan registrasi produk hewan	Produk	unit usaha produk hewan segar berkemasan yang telah untuk emenuhi syarat persyaratan higiene sanitasi sebagai jaminan keamanan dan kualitas untuk produk pangan asal ternak yang dikonsumsi masyarakat.	0	T	[3.27.04.1.03.0008] [3.27.04.2.04.0009]
300	3.27.000546	Jumlah Produksi Bahan Pakan/Pakan	Ton	Banyaknya produksi bahan pakan/pakan ternak yang dihasilkan	0	T	[3.27.02.2.05.0006]
301	3.27.000547	Jumlah Produksi Benih Ternak	Dosis	Banyaknya produksi benih ternak yang dihasilkan	0	T	[3.27.02.2.05.0006]
302	3.27.000548	Jumlah Produksi Bibit Ternak	Ekor	Banyaknya produksi bibit ternak yang dihasilkan	0	T	[3.27.02.2.05.0006]
303	3.27.000549	Jumlah Produksi HPT	Ton	Banyaknya produksi hijau pakan ternak yang dihasilkan	0	T	[3.27.02.2.05.0006]
304	3.27.000550	Jumlah Puskeswan yang dibangun	Unit	Banyaknya Puskeswan yang dibangun dan dikembangkan	2	T	[3.27.03.2.02.0014]
305	3.27.000551	Jumlah Puskeswan yang direhabilitasi	Unit	Banyaknya Puskeswan yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan	0	T	[3.27.03.2.02.0014]
306	3.27.000553	Jumlah rehabilitasi Pemeliharaan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Unit	Laboratorium Keswan dan Kesmavet mempunyai fungsi pengawasan, pengamatan, pemantauan penyakit hewan yang bersifat zoonosis dan non zoonosis serta kualitas pangan asal hewan yang memerlukan rehabilitasi di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi		Y	[3.27.03.1.01.0012]
307	3.27.000554	Jumlah Rekomendasi Pemasukan HPM	Rekomendasi	Dokumen yang berisikan perijinan pemasukan lalu lintas HPM dalam satu wilayahnyang dikeluarkan oleh otoritas veteriner	1	T	[3.27.04.1.04.0003] [3.27.04.2.04.0006]
308	3.27.000555	Jumlah Rekomendasi Pengeluaran HPM	Rekomendasi	Dokumen yang berisikan perijinan pengeluaran lalu lintas HPM dalam satu wilayahnyang dikeluarkan oleh otoritas veteriner	15	T	[3.27.04.1.04.0003] [3.27.04.2.04.0006]
309	3.27.000556	Jumlah rencana pengembangan Kawasan Hortikultura	Dokumen	banyaknya rencana pengembangan kawasan hortikultura		Y	[3.27.03.1.01.0001]
310	3.27.000557	Jumlah rencana pengembangan Kawasan Perkebunan	Dokumen	banyaknya rencana pengembangan kawasan perkebunan		Y	[3.27.03.1.01.0001]
311	3.27.000558	Jumlah rencana pengembangan Kawasan Peternakan	Dokumen	Banyaknya rencana pengembangan kawasan peternakan, berupa rencana integrasi pertanian-peternakan, perluasan lahan peternakan, rencana penambahan ternak, dan rencana penggunaan lahan baru untuk peternakan		Y	[3.27.03.1.01.0001]
312	3.27.000559	Jumlah rencana pengembangan Kawasan Tanaman Pangan	Dokumen	Banyaknya rencana pengembangan kawasan tanaman pangan, berupa rencana diversifikasi, intensifikasi, maupun rencana perluasan dan penggunaan lahan baru untuk budidaya tanaman pangan		Y	[3.27.03.1.01.0001]
313	3.27.000560	Jumlah rencana pengembangan Prasarana Hortikultura	Dokumen	banyaknya rencana pengembangan prasarana hortikultura		Y	[3.27.03.1.01.0001]
314	3.27.000561	Jumlah rencana pengembangan Prasarana Perkebunan	Dokumen	banyaknya rencana pengembangan prasarana perkebunan		Y	[3.27.03.1.01.0001]
315	3.27.000564	Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun	Unit	Banyaknya RPH yang dibangun dan dikembangkan	1	T	[3.27.03.2.02.0015]
316	3.27.000565	Jumlah Rumah Potong Hewan yang direhabilitasi	Unit	Banyaknya RPH yang direhabilitasi dan diperbaiki dalam rangka pemeliharaan	0	T	[3.27.03.2.02.0015]

317	3.27.000567	Jumlah Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang dibangun	Unit	Tempat pelayanan jasa oleh paramedik dan medik veteriner yang akan dibangun yang berperan dalam penanganan penyakit hewan yang telah memiliki perizinan		Y	[3.27.03.1.01.0021]
318	3.27.000568	Jumlah Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang terehabilitasi	Unit	Tempat pelayanan jasa oleh paramedik dan medik veteriner yang terehabilitasi, yang berperan dalam penanganan penyakit hewan yang telah memiliki perizinan		Y	[3.27.03.1.01.0021]
319	3.27.000569	Jumlah rumpun ternak yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Rumpun	Jumlah rumpun ternak yang dilestarikan dan dimurnikan	0	T	[3.27.02.2.02.0005]
320	3.27.000570	Jumlah rumpun yang dimanfaatkan	Rumpun	Jumlah jenis rumpun yang berkualitas dan telah dimanfaatkan	0	T	[3.27.02.2.02.0003]
321	3.27.000571	Jumlah rumpun yang dinilai	Rumpun	Rumpun atau Galur (Hewan) adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang memiliki ciri fenotipe khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.		Y	[3.27.02.1.03.0005]
322	3.27.000572	Jumlah rumpun yang ditingkatkan kualitasnya	Rumpun	Jumlah jenis rumpun yang dilakukan pengusahaan peningkatan kualitas	1	T	[3.27.02.2.02.0002]
323	3.27.000573	Jumlah Rumpun/Galur Ternak yang diawasi	Laporan	Galur Ternak dalam satu rumpun, memiliki karakteristik tertentu yang dalam pemanfaatan pemuliaannya dilakukan pengawasan untuk tujuan tertentu	0	T	[3.27.03.1.02.0002] [3.27.03.2.03.0002]
324	3.27.000574	Jumlah Rumpun/Galur Ternak yang dilakukan pelestarian	Ekor	Banyaknya rumpun/galur ternak yang dilestarikan	0	T	[3.27.03.2.03.0001]
325	3.27.000575	Jumlah Rumpun/Galur Ternak yang dilakukan pemanfaatan	Ekor	Banyaknya rumpun/galur ternak yang dimanfaatkan	0	T	[3.27.03.2.03.0001]
326	3.27.000576	Jumlah Sarana Pendukung dibangun	Unit	Banyaknya sarana pendukung yang dibangun atau dikembangkan. Sarana pendukung dapat berupa gudang penyimpanan dan sarana lain yang mendukung peningkatan produktivitas hasil pertanian		Y	[3.27.03.1.01.0010]
327	3.27.000577	Jumlah Sarana Pendukung direhabilitas	Unit	Banyaknya sarana pendukung yang direhabilitasi atau diperbaiki dalam rangka pemeliharaan. Sarana pendukung dapat berupa gudang penyimpanan dan sarana lain yang mendukung peningkatan produktivitas hasil pertanian		Y	[3.27.03.1.01.0010]
328	3.27.000579	Jumlah sarana penyuluhan pertanian	Unit	Jumlah sarana penyuluhan pertanian merujuk pada total alat, fasilitas, atau infrastruktur yang digunakan untuk mendukung kegiatan penyuluhan pertanian di suatu wilayah tertentu. Sarana ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, ruang kelas, alat peraga, media penyuluhan, kendaraan operasional, dan peralatan teknologi informasi yang digunakan dalam proses penyuluhan. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau inventarisasi sarana penyuluhan pertanian yang ada dalam periode waktu tertentu.	0	T	[3.27.07.2.01.0003]
329	3.27.000580	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Varietas Unggul Baru (VUB)	Jumlah SDG yang sudah dilepas dan dinyatakan unggul sebagai varietas baru dan dilakukan pelestarian serta pemurnian mutunya	1	T	[3.27.02.2.02.0004]
330	3.27.000581	Jumlah SDG Tanaman yang dimanfaatkan	Varietas Unggul Baru (VUB)	Jumlah jenis SDG yang berkualitas dan telah dimanfaatkan	1	T	[3.27.02.2.02.0003]
331	3.27.000582	Jumlah SDG Tanaman yang ditingkatkan kualitasnya	Varietas Unggul Baru (VUB)	Jumlah jenis SDG yang dilakukan pengusahaan peningkatan kualitas	1	T	[3.27.02.2.02.0002]
332	3.27.000583	Jumlah Sebaran Alsintan	Unit	Jumlah alat dan mesin pertanian pra panen yang tersebar baik dalam kondisi baik maupun perlu perbaikan atau rusak yang ada di masing-masing kelompok masyarakat/masyarakat petani di tingkat provinsi		Y	[3.27.02.1.01.0001]
333	3.27.000584	Jumlah Sebaran Pestisida	Liter	Jumlah pestisida yang tersebar atau dimiliki oleh masing-masing masyarakat petani untuk digunakan atau dimanfaatkan.		Y	[3.27.02.1.01.0001]
334	3.27.000585	Jumlah Sebaran pupuk	Ton	Jumlah pupuk subsidi maupun non subsidi yang tersebar atau dimiliki oleh masing-masing masyarakat petani untuk digunakan atau dimanfaatkan pada lahan garapannya.		Y	[3.27.02.1.01.0001]
335	3.27.000586	Jumlah Sebaran Sarana Pendukung Pertanian	Unit	jumlah dan jenis sarana pendukung pertanian yang tersebar di masing-masing kelompok/ petani, dalam kondisi baik		Y	[3.27.02.1.01.0001]

336	3.27.000587	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani	Unit	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani merujuk pada total program pendidikan non-formal yang dilaksanakan di lapangan dan ditujukan khusus untuk kelompok tani dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam praktik pertanian yang berkelanjutan. Sekolah lapang ini biasanya melibatkan pendekatan belajar sambil melakukan (learning by doing) di mana petani diajarkan melalui demonstrasi langsung di lahan pertanian. Jumlah tersebut dapat diukur berdasarkan data resmi atau registrasi sekolah lapang yang telah diadakan atau sedang berlangsung dalam periode waktu tertentu.	0	T	[3.27.07.2.01.0005]
337	3.27.000588	Jumlah Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Sertifikat	Sertifikat yang tersedia sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene-sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan, untuk memastikan bahwa unit usaha telah memenuhi persyaratan higiene-sanitasi dan menerapkan cara produksi yang baik		Y	[3.27.04.1.05.0003]
338	3.27.000589	Jumlah Sertifikat Veteriner HPM	Sertifikat	Jumlah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh otoritas Veteriner dalam rangka pengawasan lalu lintas HPM	1	T	[3.27.04.1.04.0003] [3.27.04.2.04.0006]
339	3.27.000590	Jumlah SKKH/SKPH HPM	Dokumen	Ketersediaan Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang berisi standar persayaratan terkait penolakan, pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan	15	T	[3.27.04.1.04.0003] [3.27.04.2.04.0006]
340	3.27.000591	Jumlah Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Dokumen	Jumlah dokumen standar pelayanan publik yang disusun dan digunakan sebagai acuan pemberian izin usaha pertanian	0	T	[3.27.06.1.01.0001] [3.27.06.2.01.0001]
341	3.27.000599	Jumlah wilayah Penanggulangan Zoonosis	Wilayah	Wilayah dengan risiko zoonosis dan dapat dikendalikan melalui pengawasan yang dilakukan	6	T	[3.27.05.2.01.0004]
342	3.27.000601	Jumlah wilayah sumber bibit Ternak yang diawasi	Laporan	Ketersediaan wilayah/daerah pemurnian ternak asli/lokal Indonesia, sehingga ternak asli/lokal Indonesia dapat lestari, mewujudkan dan menjamin ketersediaan bibit ternak baik secara jumlah maupun mutu	0	T	[3.27.03.1.02.0002] [3.27.03.2.03.0002]
343	3.27.000602	Jumlah wilayah terkendali Zoonosis	Wilayah	Wilayah dengan risiko zoonosis dan dapat dikendalikan melalui pengawasan yang dilakukan	6	T	[3.27.04.1.01.0006] [3.27.04.2.01.0007]
344	3.27.000603	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	Wilayah yang dilakukan pengawasan melalui peningkatan surveilans terpadu berbasis risiko dan kemampuan untuk deteksi kasus, perbaikan biosekuriti	6	T	[3.27.04.1.01.0004] [3.27.04.2.01.0005]
345	3.27.000604	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang memenuhi persyaratan teknis sertifikasi	Unit	Wilayah yang bebas dari penyakit hewan menular yang disahkan oleh pejabat otoritas veteriner		Y	[3.27.04.1.03.0001]
346	3.27.000605	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten/Kota	Ha	Kawasan KP2B yang telah ditetapkan, dimanfaatkan sesuai komoditas, dan diawasi di tingkat Kab/Kota	1842	T	[3.27.03.2.01.0015]
347	3.27.000606	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di tingkat Provinsi	Ha	Kawasan KP2B yang telah ditetapkan, dimanfaatkan sesuai komoditas, dan diawasi di tingkat Provinsi		Y	[3.27.03.1.01.0018]
348	3.27.000607	Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten/Kota	Ha	Kawasan LCP2B yang telah ditetapkan, dimanfaatkan sesuai komoditas, dan diawasi	0	T	[3.27.03.2.01.0015]
349	3.27.000608	Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di tingkat Provinsi	Ha	Kawasan LCP2B yang telah ditetapkan, dimanfaatkan sesuai komoditas, dan diawasi di tingkat Provinsi		Y	[3.27.03.1.01.0018]
350	3.27.000609	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di Kabupaten/Kota	Ha	LP2B yang ditetapkan akan dijadikan dasar dalam pemberian bantuan di bidang pertanian baik melalui APBN maupun pengendalian terhadap KP2B yang ditetapkan dalam Peraturan daerah Rencana Tata Ruang mengikuti dengan pengaturan penataan ruang dan UU 41 2009 beserta turunannya	0	T	[3.27.03.2.01.0015]
351	3.27.000610	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan, dimanfaatkan, dan diawasi di tingkat Provinsi	Ha	LP2B yang ditetapkan akan dijadikan dasar dalam pemberian bantuan di bidang pertanian baik melalui APBN maupun pengendalian terhadap KP2B yang ditetapkan dalam Peraturan daerah Rencana Tata Ruang mengikuti dengan pengaturan penataan ruang dan UU 41 2009 beserta turunannya		Y	[3.27.03.1.01.0018]
352	3.27.000611	Luas kawasan hortikultura	Ha	Luas area kawasan hortikultura (luas tanam sesuai Statistik Pertanian Hortikultura/SPH)	20842	T	[3.27.03.1.01.0013] [3.27.03.2.01.0005]
353	3.27.000612	Luas kawasan perkebunan	Ha	luas area kawasan perkebunan eksisting	40817	T	[3.27.03.1.01.0013] [3.27.03.2.01.0005]

354	3.27.000613	Luas kawasan peternakan	Ha	Luas area kawasan peternakan yang diusahakan dalam rangka pemenuhan produk peternakan seperti susu, telur dan daging.	12495	T	[3.27.03.1.01.0013] [3.27.03.2.01.0005]
355	3.27.000614	Luas kawasan tanaman pangan	Ha	Luas area kawasan tanaman pangan	5807	T	[3.27.03.1.01.0013] [3.27.03.2.01.0005]
356	3.27.000615	Luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Ha	Luas area KP2B yang telah ditetapkan berdasarkan data spasial dan numerik di tingkat Kab/Kota	0	T	[3.27.03.2.01.0014]
357	3.27.000616	Luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di tingkat Provinsi	Ha	Luas area KP2B yang telah ditetapkan berdasarkan data spasial dan numerik di tingkat Provinsi		Y	[3.27.03.1.01.0015]
358	3.27.000617	Luasan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Ha	Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan berasal dari lahan bekas hutan atau lahan Daerah yang tidak memiliki lahan cadangan sesuai dengan yang dipersyaratkan tidak perlu menetapkan lahan cadangan	411	T	[3.27.03.2.01.0014]
359	3.27.000618	Luasan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di tingkat Provinsi	Ha	Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan berasal dari lahan bekas hutan atau lahan Daerah yang tidak memiliki lahan cadangan sesuai dengan yang dipersyaratkan tidak perlu menetapkan lahan cadangan		Y	[3.27.03.1.01.0015]
360	3.27.000619	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Ha	- Penetapan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan kab/kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang Wilayah kab/ KP2B yang ditetapkan berupa lahan beririgasi, reklamasi rawa pasang surut dan lebak, tidak Sesuai amanat Perpres 18 Tahun 2020 maka eksisting sawah seluruhnya ditetapkan sebagai Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan penetapan kawasan memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial.&	1829	T	[3.27.03.2.01.0014]
361	3.27.000620	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang ditetapkan secara numerik dan spasial di tingkat Provinsi	Ha	- Penetapan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan provinsi diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang Wilayah Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan provinsi yang sudah ditetapkan menjadi acuan penyusunan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/ KP2B yang ditetapkan berupa lahan beririgasi, reklamasi rawa pasang surut dan lebak, tidak Sesuai amanat Perpres 18 Tahun 2020 maka eksisting sawah seluruhnya ditetapkan sebagai Kawasan yang dapat ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada di dalam dan/atau di luar kawasan peruntukan P257 penetapan kawasan memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial.		Y	[3.27.03.1.01.0015]
362	3.27.000624	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Dokumen	Peta Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) kab/kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang Wilayah Kab/ Peta KP2B memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial	1	T	[3.27.03.2.01.0016]
363	3.27.000625	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Dokumen	-Peta Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) provinsi diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Tata Ruang Wilayah Kp2B provinsi yang sudah ditetapkan menjadi acuan penyusunan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/ Peta KP2B memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial.		Y	[3.27.03.1.01.0016]
364	3.27.000626	Rencana Aksi Pengembangan kawasan pertanian	Dokumen	Jumlah dokumen rencana aksi pengembangan kawasan pertanian	1	T	[3.27.03.2.01.0017]
365	3.27.000632	Jumlah Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah kabupaten/kota Lain	Dosis	Banyaknya benih ternak yang didatangkan dari daerah lain	0	T	[3.27.02.2.06.0004]
366	3.27.000636	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Laporan	Banyaknya unit usaha yang didampingi dalam menerapkan prinsip kesejahteraan hewan	0	T	[3.27.04.2.05.0003]
367	3.27.000637	Jumlah unit usaha pembibitan ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan ternak yang baik	Unit Usaha	Unit Usaha Pembibitan Ternak yang tersertifikasi dengan penerapan cara budidaya ternak yang baik	0	T	[3.27.06.1.01.0004] [3.27.06.2.01.0004]
368	3.27.000638	Jumlah unit usaha budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara budidaya ternak yang baik	Unit Usaha	Unit Usaha Budidaya Ternak yang tersertifikasi dengan penerapan cara budidaya ternak yang baik	0	T	[3.27.06.1.01.0004] [3.27.06.2.01.0004]

369	3.27.000641	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Unit Usaha	unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi sebagai jaminan keamanan dan kualitas untuk produk pangan asal ternak yang dikonsumsi masyarakat.	0	T	[3.27.04.1.03.0005] [3.27.04.2.04.0005]
370	3.27.000649	Laporan Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian	Laporan	Jumlah laporan pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian. Pengelolaan UPTD meliputi penataan/pengembangan dna pemeliharaan (rehabilitasi dan perbaikan)	0	T	[3.27.07.3.02.0003] [3.27.07.4.02.0003] [3.27.07.3.01.0007] [3.27.07.4.01.0007]

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	Definisi Operasional	2025	Disabled	Info Sub Kegiatan
1	2.09.000021	Jenis pangan lokal	Laporan	Pangan lokal mencakup pangan sumber karbohidrat (padi-padian, umbi-umbian), pangan sumber protein (pangan hewani, aneka jenis kacang) dan pangan sumber vitamin dan mineral (sayur dan buah)	0	T	[2.09.03.1.01.0002] [2.09.03.1.01.0007] [2.09.03.2.01.0002] [2.09.03.2.01.0009]
2	2.09.000030	Konsumsi per kapita per tahun	Laporan	Capaian konsumsi energi (kkal/kap/hari), konsumsi protein (gram/kap/hari) dan konsumsi pangan utama (kg/kapita/tahun) berdasarkan wilayah. Konsumsi pangan utama mencakup konsumsi komoditas pangan utama dari sembilan kelompok pangan PPH	1	T	[2.09.03.1.04.0004] [2.09.03.1.04.0003] [2.09.03.2.04.0003]
3	2.09.000053	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dokumen	Peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisis indikator ketahanan dan kerentanan pangan.	1	T	[2.09.04.1.01.0001] [2.09.04.2.01.0001]
4	2.09.000063	Rencana kebutuhan pangan lokal sesuai komoditas	Dokumen	Jumlah kebutuhan pangan lokal dalam satuan kg/kap/tahun dan ton/tahun selama lima tahun ke depan yang dihitung dari tahun dasar angka konsumsi pangan dikali jumlah penduduk (komoditas pangan lokal yang akan dikembangkan, ditetapkan oleh pimpinan daerah dan/atau sejalan dengan kebijakan pusat)	1	T	[2.09.03.1.02.0002] [2.09.03.2.02.0002]
5	2.09.000068	Target konsumsi pangan per kapita per tahun	Dokumen	Sasaran total konsumsi energi (kkal/kap/hari), total konsumsi protein (gram/kap/hari), skor PPH selama lima tahun perencanaan pembangunan daerah yang dihitung dari data dasar konsumsi pangan aktual. (Target konsumsi pangan tercantum dalam RPJMD/dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/ target konsumsi energi sejalan dengan standar AKE yang ditetapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku). Penetapan target skor PPH kabupaten/kota mengacu pada Perbadan 11/2023 tentang Pola Pangan Harapan.	1	T	[2.09.03.2.04.0001]
6	2.09.000076	Data daerah rentan rawan pangan	Laporan	data daerah yang memiliki karakteristik berpotensi mengalami kejadian rawan pangan. Dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan, yang termasuk daerah rentan rawan pangan adalah daerah pada prioritas 1 sampai 3.	1	T	[2.09.04.1.02.0004] [2.09.04.2.02.0003]
7	2.09.000078	Data harga dan pasokan pangan di tingkat produsen dan konsumen	Dokumen	Data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan, pengolahan serta analisis data dan informasi harga dan pasokan pangan tingkat produsen (petani/peternak/penggilingan) dan tingkat konsumen (pedagang grosir/eceran) dengan subjek tertentu melalui pencatatan berulang secara berkala	1	T	[2.09.03.2.01.0015]
8	2.09.000079	Data Jumlah Penduduk	Dokumen	Data jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun berjalan yang digunakan untuk menghitung total kebutuhan pangan, dengan penghitungan konsumsi kg per kapita dikalikan jumlah penduduk. Sumber data dari BPS	1	T	[2.09.03.1.01.0013] [2.09.03.1.01.0010] [2.09.03.2.01.0013] [2.09.03.2.01.0016] [2.09.03.2.01.0020] [2.09.03.1.01.0015]
9	2.09.000081	Data Konsumsi Pangan	Dokumen	Data jumlah pangan yang dibutuhkan untuk konsumsi baik rumah tangga maupun non rumah tangga (untuk satu jenis pangan tertentu). Jenis pangan sesuai dengan amanat Perpres 66/2021	1	T	[2.09.03.1.01.0013] [2.09.03.1.01.0010] [2.09.03.2.01.0013] [2.09.03.2.01.0016] [2.09.03.2.01.0020] [2.09.03.1.01.0015]
10	2.09.000082	Data Perdagangan Antar Wilayah	Dokumen	Data jumlah pangan baik yang belum maupun yang sudah mengalami pengolahan yang didatangkan atau dikeluarkan ke dalam wilayah provinsi atau kabupaten/kota dengan tujuan diperdagangkan/diedarkan/disimpan (untuk satu jenis pangan tertentu). Jenis pangan sesuai dengan amanat Perpres Nomor 66 Tahun 2021.	0	T	[2.09.03.1.01.0010] [2.09.03.1.01.0013] [2.09.03.2.01.0013] [2.09.03.2.01.0016] [2.09.03.2.01.0020] [2.09.03.1.01.0015]
11	2.09.000083	Data Produksi Pangan	Dokumen	Data jumlah pangan yang diproduksi atau dihasilkan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, baik yang belum mengalami proses pengolahan maupun yang sudah mengalami proses pengolahan (angka tetap dan angka sementara)	0	T	[2.09.03.2.01.0020] [2.09.03.1.01.0010] [2.09.03.1.01.0013] [2.09.03.2.01.0013] [2.09.03.2.01.0015] [2.09.03.1.01.0015]

12	2.09.000084	Data Stok Pangan	Dokumen	Data jumlah bahan pangan yang disimpan/dikuasai oleh pemerintah/swasta, seperti yang ada di pabrik, gudang, depo, lumbung petani/rumah tangga, dan pasar/pedagang yang dimaksudkan sebagai cadangan pangan(untuk satu jenis pangan tertentu). Jenis pangan sesuai dengan amanat Perpres 66/2021	12	T	[2.09.03.2.01.0020] [2.09.03.1.01.0015] [2.09.03.1.01.0010] [2.09.03.1.01.0013] [2.09.03.2.01.0011] [2.09.03.2.01.0013] [2.09.03.2.01.0016]
13	2.09.000086	Informasi Harga Pangan di tingkat Konsumen berkala	Laporan	Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan, pengolahan serta analisis data dan informasi harga pangan tingkat konsumen (pedagang grosir/eceran) dengan subjek tertentu melalui pencatatan berulang secara berkala	12	T	[2.09.03.1.01.0009] [2.09.03.1.01.0012] [2.09.03.2.01.0008] [2.09.03.2.01.0012]
14	2.09.000087	Informasi Harga Pangan di tingkat Produsen berkala	Laporan	Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan, pengolahan serta analisis data dan informasi harga pangan tingkat produsen (petani/peternak/penggilingan) dengan subjek tertentu melalui pencatatan berulang secara berkala	0	T	[2.09.03.1.01.0012] [2.09.03.1.01.0009] [2.09.03.2.01.0008] [2.09.03.2.01.0012]
15	2.09.000097	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sosialisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	Dokumen hasil pelaksanaan koordinasi/sinkronisasi/sosialisasi/monev keamanan dan mutu pangan, dan/atau berupa penyediaan media cetak/elektronik sebagai bahan edukasi, komunikasi dan informasi	1	T	[2.09.05.1.01.0011] [2.09.05.2.01.0008]
16	2.09.000100	Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM keamanan pangan per tahun	Dokumen	Dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM keamanan pangan per tahun adalah catatan atau rekaman pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM Keamanan pangan, yang mencakup pelatihan internal dan eksternal	0	T	[2.09.05.1.01.0009] [2.09.05.2.01.0009]
17	2.09.000101	Jumlah dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang disusun	Dokumen	Dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan adalah Laporan hasil pembinaan pelaku usaha pangan segar	0	T	[2.09.05.1.01.0009] [2.09.05.2.01.0009]
18	2.09.000102	Jumlah dokumen penerapan SOP kelembagaan yang disusun	Dokumen	Dokumen penerapan SOP adalah catatan kegiatan penerapan SOP yang dilaksanakan oleh lembaga pengawas keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan	0	T	[2.09.05.1.01.0009] [2.09.05.2.01.0009]
19	2.09.000103	Jumlah dokumen SOP kelembagaan yang disusun	Dokumen	SOP kelembagaan adalah SOP yang disusun oleh lembaga pengawas keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan sesuai dengan persyaratan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 tahun 2023	0	T	[2.09.05.1.01.0009] [2.09.05.2.01.0009]
20	2.09.000105	Jumlah Eksisting Infrastruktur Cadangan Pangan	Unit	Data gudang CPP, lumbung pangan ataupun infrastruktur lain yang memiliki fungsi yang sama dan sarana pendukung yang dimiliki	8	T	[2.09.02.1.01.0006] [2.09.02.2.01.0006]
21	2.09.000109	Jumlah izin edar PSAT PDUK label hijau per tahun	Dokumen	Jumlah sertifikat registrasi PSAT PDUK label hjau yang diterbitkan kepada pelaku usaha PDUK yang telah memenuhi komitmen sesuai persyaratan registrasi PSAT PDUK	0	T	[2.09.05.2.01.0006]
22	2.09.000113	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan yang Eksisting	Unit	Jumlah kelembagaan distribusi pangan untuk aksesibilitas pangan masyarakat	0	T	[2.09.03.1.01.0011] [2.09.03.2.01.0010]
23	2.09.000114	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	Jumlah laporan kegiatan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan keluarga yang telah dilaksanakan, melalui kegiatan pemanfaatan pekarangan, teras pangan, gerasi B2SA, rumah pangan B2SA, Dapur B2SA, dan kegiatan sejenis yang mendukung.	0	T	[2.09.03.2.01.0007]
24	2.09.000115	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi informasi stok, pasokan dan harga pangan secara berkala	Laporan	Kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi untuk memantau jumlah stok, pasokan dan kondisi harga pangan pokok strategis dengan melibatkan semua pelaku usaha produsen/penggilingan/pedagang/ asosiasi/distributor serta melakukan pemantauan harga di tingkat produsen dan harga eceran di pasar tradisional, grosir, dan retail yang dilakukan secara berkala	0	T	[2.09.03.1.01.0008] [2.09.03.2.01.0014]
25	2.09.000118	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP)	Laporan	Jumlah pelaksanaan kegiatan dan volume pendistribusian bahan pangan dari wilayah produsen (surplus) atau harga rendah ke wilayah konsumen (defisit) atau harga tinggi	0	T	[2.09.03.1.01.0009] [2.09.03.2.01.0008]

26	2.09.000119	Jumlah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/Bazar Pangan Murah atau Operasi Pasar	Laporan	Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau kegiatan dengan sebutan lainnya yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan, dengan harga terjangkau dengan tujuan stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi	50	T	[2.09.03.1.01.0009] [2.09.03.2.01.0008]
27	2.09.000120	Jumlah pelaku usaha pangan lokal	Laporan	Jumlah UMKM/UKM/kelompok usaha yang berkembang dalam mengolah aneka pangan berbahan baku lokal	0	T	[2.09.03.1.01.0007] [2.09.03.2.01.0009]
28	2.09.000126	Jumlah promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Kegiatan	Jenis kegiatan yang dilakukan dalam rangka sosialisasi/promosi/kampanye/edukasi konsumsi B2SA berbasis pangan lokal	0	T	[2.09.03.1.04.0001] [2.09.03.2.04.0005]
29	2.09.000132	Peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi	Dokumen	Peta tematik yang menggambarkan situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi sesuai data dan analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) yang mencerminkan aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, dengan unit analisisnya data di tingkat kabuapten/kota. Yang dilakukan secara berkala (bulanan)	12	T	[2.09.04.1.02.0005] [2.09.04.2.02.0005]
30	2.09.000134	Jumlah Eksisting Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Unit	Jumlah cold storage, RMU, dryer, lantai jemur eksisting yang dimiliki	0	T	[2.09.02.1.01.0003] [2.09.02.2.01.0003]
31	2.09.000135	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah infrastruktur jaringan internet dan software/aplikasi yang dimiliki untuk mendukung kemandirian pangan	0	T	[2.09.02.1.01.0003] [2.09.02.2.01.0003]
32	2.09.000137	Jumlah Usaha Pangan Lokal	Laporan	Jumlah UMKM/UKM/kelompok usaha yang mengolah aneka pangan berbahan baku lokal	0	T	[2.09.03.1.01.0002] [2.09.03.2.01.0002]
33	2.09.000138	Jumlah Pangan Pokok yang Terdistribusi	Laporan	data banyaknya dan sebaran pangan pokok yang terdistribusi	0	T	[2.09.03.1.01.0003] [2.09.03.2.01.0003]
34	2.09.000139	Jumlah Pangan Lainnya yang Terdistribusi	Laporan	data banyaknya dan sebaran pangan lainnya yang terdistribusi	0	T	[2.09.03.1.01.0003] [2.09.03.2.01.0003]
35	2.09.000142	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Laporan	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penentuan harga minimum pangan pokok lokal	0	T	[2.09.03.1.03.0001] [2.09.03.2.03.0001]
36	2.09.000143	Data harga minimum pangan pokok lokal	Dokumen	Informasi harga pangan pokok lokal yang diproduksi dan/atau dikonsumsi di wilayah setempat untuk dilakukan penentuan harga minimumnya	0	T	[2.09.03.3.03.0002] [2.09.03.4.03.0002] [2.09.03.1.03.0001] [2.09.03.3.03.0002] [2.09.03.4.03.0002] [2.09.03.2.03.0001]
37	2.09.000144	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	Banyaknya kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan penerapan konsumsi pangan B2SA di desa/kelurahan di kabupaten/kota	1	T	[2.09.03.2.04.0002]
38	2.09.000145	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Laporan	Banyaknya kegiatan yang dilakukan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penilaian capaian konsumsi energi, konsumsi protein, dan skor PPH, serta evaluasi terhadap target RPMJD/dokumen perencanaan pembangunan daerah. Penetapan target skor PPH sejalan dengan Perbadan nomor 11 tahun 2023 tentang Pola Pangan Harapan.	0	T	[2.09.03.1.04.0003] [2.09.03.2.04.0003]
39	2.09.000149	Indeks Ketahanan Pangan Level Desa	Dokumen	Ukuran dari indikator-indikator yang mewakili aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan level desa/kelurahan. Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kelurahan/desa) dan peringkat (ranking) relatif antara satu desa/kelurahan dibandingkan dengan desa/kelurahan lainnya.	0	T	[2.09.04.2.01.0001]
40	2.09.000152	Data Penerima Manfaat	Dokumen	Penerima manfaat dalam rangka pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten/kota di desa/kelurahan rentan rawan pangan atau terdampak bencana	1	T	[2.09.04.1.02.0002] [2.09.04.2.02.0002]
41	2.09.000153	Jumlah Intervensi terhadap Hasil Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen	Program atau kegiatan sebagai tindak lanjut hasil analis situasi kewaspadaan pangan dan gizi wilayah & rekomendasi kebijakan tingkat Provinsi atau kabupaten/kota	0	T	[2.09.04.1.02.0003] [2.09.04.2.02.0004]
42	2.09.000155	Jumlah registrasi PSAT PDUK per tahun	Dokumen	Jumlah registrasi PSAT PDUK yang diterbitkan melalui online single submision (OSS) untuk pelaku usaha UMK tanpa klaim dalam jangka waktu satu tahun	0	T	[2.09.05.2.01.0006]

43	2.09.000159	Rekomendasi Keamanan dan/atau mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	merupakan berita acara hasil pengawasan post market dan/atau bentuk tindaklanjut hasil pengawasan post market yang dilakukan di wilayah masing-masing, dapat berupa surat ke pihak terkait maupun laporan hasil pertemuan tindaklanjut.	1	T	[2.09.05.2.01.0004]
44	2.09.000160	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan segar	Persentase	Presentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat merupakan perbandingan antara jumlah sampel yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan dengan jumlah total sampel yang diuji	100	T	[2.09.05.1.01.0008] [2.09.05.2.01.0004]
45	2.09.000190	data cadangan pangan pemerintah Pemerintah kab/kota	Dokumen	data cadangan pangan pemerintah Pemerintah kab/kota , yaitu pengadaan, pengelolaan, penyaluran, dan pelepasan	0	T	[2.09.03.3.02.0005]
46	2.09.000210	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	Unit	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penguatan penyediaan sarana dan prasarana logistik pangan, jaringan distribusi pangan antar pelaku usaha dan pemerintah.	0	T	[2.09.02.1.01.0004] [2.09.02.2.01.0004]
47	2.09.000211	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan pokok	Laporan	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan antar instansi dan pelaku usaha dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana logistik pangan dan penguatan jaringan distribusi pangan antar pelaku usaha dan pemerintah.	0	T	[2.09.03.1.01.0003] [2.09.03.2.01.0003]
48	2.09.000212	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan lainnya	Laporan	Kegiatan rapat koordinasi dan sinkronisasi kegiatan distribusi/penyaluran pangan pokok lainnya dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah	0	T	[2.09.03.1.01.0003] [2.09.03.2.01.0003]
49	2.09.000213	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang terpelihara	Ton	Jumlah stok cadangan pangan pemerintah yang terpelihara		Y	[2.09.03.1.02.0004] [2.09.03.2.02.0004]
50	2.09.000214	Jumlah stok dan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	Jumlah stok dan jumlah pelepasan cadangan pangan pemerintah yang dilakukan akibat penurunan mutu	0	T	[2.09.03.1.02.0005] [2.09.03.2.02.0006]
51	2.09.000215	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	Jumlah cadangan pangan pemerintah yang disalurkan	21,07	T	[2.09.03.1.02.0006] [2.09.03.2.02.0005]
52	2.09.000216	Jumlah pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	Jumlah dan jenis pangan pengadaan cadangan pangan pemerintah	21,07	T	[2.09.03.1.02.0007] [2.09.03.2.02.0003]
53	2.09.000217	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi	Dokumen	Laporan mengenai pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi yang melibatkan OPD terkait dan stakeholder lainnya.	0	T	[2.09.04.1.02.0004] [2.09.04.2.02.0003]
54	2.09.000219	Jenis prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Unit	Prasarana berupa laboratorium pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan yang dimiliki	1	T	[2.09.05.1.01.0010] [2.09.05.2.01.0007]
55	2.09.000255	Data Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Dokumen	Data jumlah LPM, data pengadaan dan stok pangan yang dikelola LPM, jenis pangan yang dikelola LPM	0	T	[2.09.02.2.01.0006] [2.09.03.2.02.0008]